



KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LAPORAN

Pemantauan dan Evaluasi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2007-2008



Kata Pengantar

Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk perencanaan kedepan, mengingat akan berakhirnya BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) NAD-Nias pada April 2009 sesuai amanat undang-undang. Dengan alasan tersebut, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi ini sangatlah strategis. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini merupakan mandat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas dalam memastikan dan mengawal pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kedua wilayah pascabencana tersebut.



Lebih jelasnya, pemantauan dan evaluasi pada tahun 2008 ini disusun memperoleh gambaran perkembangan dan kemajuan mengenai implementasi Rencana Induk yang sudah dilakukan perubahan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja BRR NAD-Nias, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan komitmen Donor/NGO. Sebagaimana diketahui, pihak yang terlibat dalam implementasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya BRR NAD –Nias, namun juga Donor/NGO, Pemerintah Daerah, korporasi, dan berbagai *stakeholders* lainnya.

Tujuan lain dari pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk menilai pelaksanaan peralihan dan pengakhiran mandat dan masa tugas BRR NAD-Nias yang akan berlangsung pada April 2009 yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah. Di sisi lain, evaluasi dan pemantauan ini juga dimaksudkan untuk menilai kesiapan peralihan program kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara setelah berakhirnya masa tugas BRR NAD –Nias.

Dari hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk tahun 2008 telah diperoleh berbagai data dan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tidak hanya itu saja, pada fase ini juga diperoleh gambaran proses perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut yang sebelumnya didasarkan kepada Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005. Berdasarkan masukan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui Evaluasi Paruh Waktu Tahun 2005-2007 maka disarankan untuk dilakukan perubahan terhadap kerangka kebijakan tersebut. Atas dasar itu pula maka diterbitkan kerangka kebijakan yang baru berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Prov. Sumut. Kerangka regulasi ini yang akan menjadi basis perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua wilayah tersebut untuk tahap selanjutnya.

Disamping isu perubahan terhadap Rencana Induk, isu strategis lain dalam tahun 2008 adalah isu persiapan berbagai proses, tahap dan kerangka regulasi untuk pengakhiran masa tugas BRR. Menjelang berakhirnya masa tugas Badan ini, maka sudah harus dilakukan proses mempersiapkan

langkah dan upaya kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya diteruskan oleh Kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Termasuk pula isu yang sangat strategis dan sensitif yaitu permasalahan serah terima aset yang sudah dibangun selama masa tugas BRR. Perlu juga untuk diketahuin proses dan tahapan pelaksanaan serah terima aset tersebut dari BRR kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat penerima manfaat. Untuk itu, sangat diharapkan pelaksanaan serah terima aset ini sudah dapat diselesaikan dan dituntaskan pada saat sebelum BRR mengakhiri masa tugas pada April 2009.

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemenneg PPN/Bappenas) ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi bagi pelaksanaan dan keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini. Semoga melalui laporan ini semua maksud dan tujuan yang telah disebutkan di atas, dapat tercapai dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam mempercepat pemulihan wilayah dan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Jakarta, 31 Maret 2009

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
Selaku Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi
Pemantauan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B),
Kementerian Negara PPN/Bappenas 



Max H. Pohan

Ringkasan Eksekutif

1 Latar Belakang

- Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut hingga akhir 2008 memasuki tahun keempat dari proses pemulihan di wilayah tersebut.
- Pada 2008 telah diterbitkan Perpres Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Kerangka kebijakan ini menjadi acuan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan terhadap proses pemulihan wilayah dan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.
- Berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2005, *jo.* UU No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut bahwa BRR NAD-Nias diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan mandatnya selama 4 (empat) tahun yaitu sejak April 2005 hingga April 2009.
- Pasca berakhirnya BRR NAD-Nias, maka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab dan dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Permasalahan lain pasca berakhirnya BRR yaitu mengenai asset-asset hasil rehabilitasi Dan rekonstruksi yang sudah dibangun oleh BRR, Donor/NGO Dan berbagai stakeholders lainnya. Hal terpenting dalam permasalahan ini mengenai pengelolaan dan perawatan terhadap berbagai asset tersebut.

2 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

- Mendapatkan gambaran perkembangan dan kemajuan mengenai implementasi Rencana Induk yang sudah dilakukan revisi melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja BRR NAD-Nias, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan komitmen Donor/NGO;
- Menilai pelaksanaan peralihan dan pengakhiran mandat dan masa tugas BRR NAD-Nias yang akan berlangsung pada April 2009 yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Menilai kesiapan peralihan program kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kementerian/Lembaga dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias

3 Metodologi Pemantauan dan Evaluasi

- Fokus pemantauan Dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut pada tahu 2007-2008 menggunakan 5 (lima) fokus evaluasi, yaitu: (a) konsistensi, (b) koordinasi, (c) konsultasi, (d) kapasitas, dan (e) keberlanjutan.

- Kelompok sasaran pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007-2008 adalah (a) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias; (b) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara yang terdiri dari SKPD/SKPA terpilih; (c) Donor/NGO terpilih; dan (d) Masyarakat penerima manfaat pada daerah pascabencana terpilih.
- Metode pemantauan dan evaluasi di dasarkan pada; (1) Data Primer, yang terdiri dari FGD, Rapat Koordinasi, konsultasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam; (2) Data Sekunder, yang diperoleh dari kajian literatur, tinjauan laporan, kliping media massa dan dokumentasi foto serta sumber data utama yang mengacu pada Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tahun 2005-2008 dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tahun 2008-2009.

4 Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, didasarkan pada berbagai data dan informasi yang tersedia dari BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO dalam kurun waktu 2007-2008. Klasifikasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang pemulihan, yaitu : (a) perumahan dan permukiman, (b) infrastruktur, (c) sosial dan kemasyarakatan, (d) perekonomian dan (e) kelembagaan dan hukum.

5 Evaluasi Aspek Konsistensi.

- Rencana Induk merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, namun dalam proses pelaksanaan terjadi berbagai dinamika di lapangan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan.
- Penerbitan Perpres 47/2008 bertujuan untuk memantapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan landasan hukum bagi para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu BRR (2005-2008) serta K/L dan Pemda di tahun 2009. Substansi perubahan rencana induk berdasarkan Perpres 47/2008 meliputi batang tubuh, lampiran I (kebijakan dan strategi) dan lampiran II (sasaran program/kegiatan untuk 5 bidang pemulihan yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial kemasyarakatan, kelembagaan dan hukum).
- Selain itu, terjadi pula perubahan pada aspek kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bila merujuk kepada Perpres No. 30 Tahun 2005 maka kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp. 48,7 triliun. namun setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres No. 47 Tahun 2008 maka kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meningkat menjadi Rp. 64 triliun.
- Terdapat beberapa faktor meningkatnya kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu terjadinya peningkatan investasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti di sektor perumahan, sektor perekonomian dan sektor lainnya. Faktor lainnya yaitu faktor inflasi yang mengakibatkan *unit cost* menjadi membengkak.
- Untuk pembangunan prasarana dasar perumahan dan permukiman, walaupun seluruh pelaksanaannya dapat direalisasikan dengan baik, tetapi ada beberapa fasilitas yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan.
- Peran BRR dan Donor/NGO dalam rehabilitasi/rekonstruksi bangunan fisik yang rusak akibat bencana tsunami dan gempa, dan biasanya berskala besar, sedangkan Pemda

berkontribusi melalui APBD berupa dukungan pembebasan lahan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi skala kecil, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

- Pada umumnya, perencanaan strategis BRR lebih terfokus pada bantuan sarana prasarana, dan belum membangun dalam artian pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Demikian pula dengan perencanaan lembaga donor/NGO yang lebih memperhatikan bantuan sarana prasarana, walaupun ada sedikit perhatian pada bantuan modal.

6 Evaluasi Aspek Koordinasi.

- Di dalam koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias terdapat beberapa forum koordinasi dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda, antara lain; Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias (Coordination Forum for Aceh and Nias, CFAN), Pertemuan Pemangku-kepentingan Kepulauan Nias (Nias Islands Stakeholder Meeting, NISM), Tim Terpadu, Sekretariat Bersama (Sekber) dan regionalisasi dan berbagai forum koordinasi lainnya.
- Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tahun 2008 yang belum berjalan dengan baik terutama dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam hal pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum tentang pertanahan terdapat hambatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena terlalu lambat dalam menerbitkan regulasi yang terkait dengan masalah tersebut. Sehingga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah mengalami keterlambatan dalam penyelesaian masalah ini.

Belum maksimalnya peran Sekretariat Bersama (Sekber) di tingkat kabupaten/kota. Sekber melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dengan semua sektor SKPD. Selanjutnya Sekber berkoordinasi dengan BRR pusat untuk menyaring program-program prioritas. Dengan adanya penyaringan tersebut, tidak semua program dan kegiatan sesuai kebutuhan yang sudah diusulkan oleh SKPD dilaksanakan.

7 Evaluasi Aspek Konsultasi.

- Pada beberapa kasus, bahwa BRR dan Donor/NGO tidak semua dan tidak selalu menginformasikan kegiatan apa yang akan dikerjakan dan laporan hasil kegiatannya kepada Pemda setempat, sehingga tidak dapat diketahui secara detail proses pelaksanaan terhadap program yang berlangsung.
- Penerapan pemberdayaan masyarakat (*community based*) dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang berkaitan erat dengan aspek konsultasi (partisipasi masyarakat), belum cukup memadai, pelaksanaannya pun masih sangat terbatas. Tidak banyak pembangunan perumahan yang dikerjakan dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat.
- Partisipasi masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur masih terbatas,
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan, secara umum menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, masih terdapat tingkat partisipasi yang rendah di wilayah tertentu karena berbagai situasi yang terjadi di wilayah tersebut.

8 Evaluasi Aspek Kapasitas.

- Dana APBN untuk tahun anggaran 2008 untuk BRR tersedia sebesar Rp10.888.322.764.000,- yang terdiri dari DIPAMurni 2008 Rp7.000.401.140.000,- dan

DIPA Luncuran sebesar Rp3.887.921.624.000,-. Total realisasi belanja per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp7.625.820.619.607,- atau mencapai 70,04%, sedangkan total realisasi pada 31 Oktober 2008 hanya mencapai 47%. Ini berarti terjadi peningkatan kapasitas penyerapan pendanaan yang sangat tinggi hingga mencapai sekitar 30%.

- Pada tahun 2008, terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan BRR di bidang infrastruktur, yang terlihat dari meningkatnya efektifitas kinerja dengan adanya regionalisasi BRR dan adanya peningkatan jumlah satker dalam kelompok bidang infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan dimana awalnya sebanyak 25 satker kemudian meningkat menjadi 28 satker.
- Kapasitas dalam hal penyerapan pendanaan untuk bidang pemuihan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada tiga sub bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan peran perempuan menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi dari alokasi pendanaan yang disediakan untuk tiga sector ini.

9 Evaluasi Aspek Keberlanjutan.

- Pada tahun 2009, kelanjutan rehabilitasi Dan rekonstruksi selain diteruskan oleh Pemerintah Daerah, juga dilanjutkan oleh 6 Kementerian/Lembaga terkait yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Agama, dan Badan Pertanahan Nasional.
- Hal yang terpenting dan strategis menjelang BRR berakhir yaitu permasalahan serah terima aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena pada saat BRR NAD-Nias berakhir pada tahun 2009 seluruh aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemda, masyarakat penerima manfaat atau pihak lain melalui mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kesiapan Pemda dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi terkendala pada manajemen dan biaya *operations and maintenance* aset-aset rehabilitasi dan rekonstruksi. Terutama sekali pada bidang infrastruktur yang membutuhkan biaya yang cukup besar, karena anggaran APBD sangat terbatas.

tiwa bencana gempa dan tsunami yang sangat dahsyat di wilayah NAD dan Kepulauan Nias telah memberikan inspirasi bagi penanganan dan penannggulangan bencana di Indonesia.

10 Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Kestinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahun 2009.

- Perlu dilakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan kestinambungan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR
- Kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut, termasuk oleh kalangan Donor/NGO
- Supaya tetap mengacu kepada Perubahan Rencana Induk sesuai Perpres No. 47 Tahun 2008 sebagai kerangka kebijakan perencanaan dan pelaksanaan
- Hendaknya Bapel BRR dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi secara lebih intensif dengan K/L terkait dan Pemda yang akan melanjutkan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi

11 Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka PMT BRR NAD-Nias

- Menghadapi PMT BRR pada tahun 2009 supaya dapat disusun dan dirancang kerangka kebijakan secara khusus.
- Hendaknya dapat disusun berbagai langkah-langkah dan tahapan-tahapan dalam rangka PMT BRR
- Hendaknya dapat dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak baik di pusat maupun daerah
- Hal yang terpenting yaitu proses transisi dan peralihan Aset, Program, Pendanaan, Personel dan Dokumen (AP3D) dari institusi BRR kepada berbagai stakeholders terkait
- Terkait aset-aset yang sudah dibangun perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi sebelum dilakukan proses serah terima kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kerangka regulai yang berlaku

12 Rekomendasi Penguatan Kapasitas Pemda dan K/L Menghadapi Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BRR

- Perlu dipersiapkan kapasitas Pemda dan K/L untuk mempunyai kapasitas yang memadai dan baik untuk melanjutkan kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Pihak K/L terkait perlu mempersiapkan kapasitas yang memadai untuk dapat melanjutkan program/kegiatan yang merupakan limpahan dari BRR
- Terkait serah terima aset hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat diperlukan penyiapan kapasitas untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut

13 Rekomendasi Implementasi Rencana Induk yang Sudah Mengalami Perubahan

- Perubahan Rencana Induk sesuai Perpres No. 47 Tahun 2008 dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi pelaksanaan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Masa berlaku Rencana Induk yang sudah mengalami perubahan berlangsung hingga akhir tahun 2009
- Perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan untuk melihat implementasi Rencana Induk sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 47 Tahun 2008

14 Rekomendasi Pembelajaran Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Di NAD-Nias

- Keberadaan *trust fund* yang diorganisasikan melalui wadah tertentu sangat membantu dalam melakukan koordinasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Keberadaan Sekretariat Bersama (Sekber) sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- Pembagian peran dan tugas dari masing-masing stakeholders terkait akan mempercepat dan memperlancar proses rekonstruksi dan dapat dihindari adanya tumpang tindih kegiatan baik pada lokasi yang sama atau objek kegiatan yang sama.
- Pelibatan Pemda dan K/L dalam proses pemulihan pascabencana di NAD dan Kepulauan Nias sangat diperlukan dan dibutuhkan sejak dini. Seharusnya peranan Pemda sangat strategis dalam rangka menghadapi berakhirnya masa tugas BRR.
- Peristiwa bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias memberikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menyusun kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana secara lebih sistematis dan terencana.

15 Rekomendasi Peran Pemerintah Pusat, Pemda, Donor/NGO dan Masyarakat Dalam Rangka Penuntasan dan Kestinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Bappenas perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi stakeholders terkait untuk melaksanakan kegiatan kesinambungan rekonstruksi sesuai dengan program dan kegiatan yang masih dilanjutkan.
- BRR perlu mempersiapkan langkah-langkah peralihan aset, program, pendanaan, personel dan dokumen sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku
- Pasca BRR bubar pada 2009, Pemda harus mempersiapkan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat mendukung kelanjutan proses pemulihan di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias
- Sangat dibutuhkan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan berbagai aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dibangun oleh berbagai pihak
- Pemda perlu mengintegrasikan aspek penanganan dan penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD Dan RTRW
- Terkait kelanjutan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kalangan Donor/NGO, hendaknya dapat mengisi kesenjangan yang belum tertangani pada masa tugas BRR
- Pada masa BRR sudah banyak dihasilkan berbagai aset-aset rehabilitasi dan rekonstruksi supaya dapat difungsionalisasikan dan dioptimalisasikan secara maksimal
- Peranan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sangat urgen untuk melakukan pengawalan di lapangan sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang sudah ditentukan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xx
Daftar Diagram	xxii
Daftar Bagan	xxiii

Bab I Pendahuluan	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Landasan Hukum	I-4
I.3 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	I-4
I.4 Sasaran	I-5
I.5 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi	I-5
I.6 Kerangka Waktu Pelaksanaan	I-5
I.7 Sistematika Penulisan Laporan	I-6

Bab II Metodologi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk	II-1
II.1 Kerangka Dasar Evaluasi	II-1
II.2 Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi	II-2
II.3 Aspek dan Indikator Evaluasi	II-4
II.4 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi	II-5
II.5 Teknik Pengumpulan Data	II-5
II.6 Kelompok Sasaran	II-7
II.7 Lokasi Pemantauan dan Evaluasi	II-8

Bab III Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008	III-1
III.1 Perubahan Rencana Induk	III-1
III.1.1 Dasar Perubahan Rencana Induk	III-1
III.1.2 Substansi Perubahan Rencana Induk	III-4
III.1.2.1 Batang Tubuh	III-5
III.1.2.2 Lampiran I (Kebijakan dan Strategi)	III-5
III.1.2.3 Lampiran II (Sasaran)	III-6

III.2	Perubahan Anggaran Rencana Induk	III-7
III.2.1	Sumber Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi	III-7
III.2.1.1	Pendanaan BRR NAD-Nias	III-8
III.2.1.2	Pendanaan Donor/NGO	III-11
III.2.2	Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi Pendanaan	III-16
III.2.2.1	Pengelolaan Hibah/Pinjaman dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III-18
III.2.2.2	Pengelolaan Khusus: Mekanisme Anggaran Pengesahan (On-Budget – Off-Treasury)	III-19
III.2.2.3	Kebijakan dan Strategi Pendanaan	III-19
III.3	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III-21
III.3.1	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III-22
III.3.1.1	Pemulihan Perumahan dan Permukiman	III-22
III.3.1.1.1	Perumahan dan Permukiman	III-23
III.3.1.1.2	Tata Ruang dan Pertanahan	III-27
III.3.1.2	Pemulihan Infrastruktur	III-31
III.3.1.2.1	Jalan dan Jembatan	III-32
III.3.1.2.2	Perhubungan	III-34
III.3.1.2.3	Sumber Daya Air	III-38
III.3.1.2.4	Energi dan Listrik	III-42
III.3.1.2.5	Pos dan Telematika	III-44
III.3.1.2.6	Bangunan Fasilitas Umum	III-44
III.3.1.2.7	Pemeliharaan	III-46
III.3.1.2.8	IREP	III-47
III.3.1.3	Pemulihan Perekonomian	III-48
III.3.1.3.1	Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	III-49
III.3.1.3.2	Perikanan	III-54
III.3.1.3.3	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	III-56
III.3.1.3.4	Pengembangan Usaha	III-58
III.3.1.4	Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan	III-64
III.3.1.4.1	Pendidikan	III-64
III.3.1.4.2	Kesehatan	III-66
III.3.1.4.3	Peningkatan Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak	III-69
III.3.1.4.4	Kependudukan dan Keluarga Berencana	III-71
III.3.1.4.5	Agama	III-72
III.3.1.4.6	Sosial	III-74
III.3.1.4.7	Budaya	III-75

	III.3.1.4.8 Pemuda/Olahraga	III-77
III.3.1.5	Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III-78
	III.3.1.5.1 Kelembagaan	III-78
	III.3.1.5.2 Hukum	III-82
	III.3.1.5.3 Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	III-84
III.3.2	Pemerintah Daerah	III-87
III.3.2.1	Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur	III-90
	III.3.2.1.1 Pemulihan Perumahan dan Permukiman	III-91
	III.3.2.1.2 Pemulihan Infrastruktur	III-92
III.3.2.2	Pemulihan Perekonomian	III-94
III.3.2.3	Pemulihan Sosial Kemasyarakatan	III-97
III.3.2.4	Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III-100
III.3.3	Donor/NGO	III-103
III.3.3.1	Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur	III-103
	III.3.3.1.1 Pemulihan Perumahan dan Permukiman	III-104
	III.3.3.1.2 Pemulihan Infrastruktur	III-109
III.3.3.2	Pemulihan Perekonomian	III-115
III.3.3.3	Pemulihan Sosial Kemasyarakatan	III-119
III.3.3.4	Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III-127

Bab IV Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007-2008 **IV-1**

IV.1	Aspek Konsistensi	IV-2
IV.1.1	Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan	IV-3
	IV.1.1.1 Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-3
	IV.1.1.2 Bidang Infrastruktur	IV-7
	IV.1.1.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-14
	IV.1.1.4 Bidang Perekonomian	IV-20
	IV.1.1.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-28
IV.1.2	Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan	IV-35
	IV.1.2.1 Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-35
	IV.1.2.2 Bidang Infrastruktur	IV-37
	IV.1.2.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-41
	IV.1.2.4 Bidang Perekonomian	IV-44
	IV.1.2.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-49
IV.1.3	Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV-50
	IV.1.3.1 Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-50
	IV.1.3.2 Bidang Infrastruktur	IV-52

	IV.1.3.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-55
	IV.1.3.4	Bidang Perekonomian	IV-57
	IV.1.3.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-57
IV.1.4		Masyarakat Penerima Manfaat	IV-59
	IV.1.4.1	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-59
	IV.1.4.2	Bidang Infrastruktur	IV-61
	IV.1.4.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-63
	IV.1.4.4	Bidang Perekonomian	IV-64
	IV.1.4.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-64
IV.2		Aspek Koordinasi	IV-64
IV.2.1		Mekanisme Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan	IV-65
	IV.2.1.1	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-69
	IV.2.1.2	Bidang Infrastruktur	IV-70
	IV.2.1.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-72
	IV.2.1.4	Bidang Perekonomian	IV-74
	IV.2.1.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-75
IV.2.2		Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan	IV-76
	IV.2.2.1	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-76
	IV.2.2.2	Bidang Infrastruktur	IV-77
	IV.2.2.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-78
	IV.2.2.4	Bidang Perekonomian	IV-80
	IV.2.2.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-81
IV.3		Aspek Konsultasi	IV-82
IV.3.1		Tingkat Partisipasi Masyarakat	IV-85
	IV.3.1.1	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-85
	IV.3.1.2	Bidang Infrastruktur	IV-86
	IV.3.1.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-87
	IV.3.1.4	Bidang Perekonomian	IV-88
	IV.3.1.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-89
IV.3.2		Media Partisipasi Masyarakat dan Akses Informasi	IV-90
	IV.3.2.1	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-90
	IV.3.2.2	Bidang Infrastruktur	IV-90
	IV.3.2.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-91
	IV.3.2.4	Bidang Perekonomian	IV-91
	IV.3.2.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-92
IV.4		Aspek Kapasitas	IV-92
IV.4.1		Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)	IV-92
IV.4.2		Pendanaan	IV-100

IV.5	Aspek Keberlanjutan	IV-103
IV.5.1	Regulasi PMT BRR dan kesinambungan RR	IV-107
IV.5.2	Manajemen Aset P3D dan Kesiapan Peralihan	IV-111
IV.5.3	Pengaturan Kelembagaan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV-116
IV.5.4	Integrasi PRB dan Kebijakan Pembangunan	IV-117
Bab V	Kesimpulan dan Rekomendasi	V-1
V.1	Kesimpulan	V-1
V.1.1	Bidang Perumahan dan Permukiman	V-3
V.1.2	Bidang Infrastruktur	V-4
V.1.3	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	V-6
V.1.4	Bidang Perekonomian	V-8
V.1.5	Bidang Kelembagaan dan Hukum	V-9
V.2	Rekomendasi	V-10
V.2.1	Penyusunan Kebijakan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahun 2009	V-10
V.2.2	Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Pengakhiran Masa Tugas BRR	V-11
V.2.3	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga menghadapi Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BRR	V-12
V.2.4	Implementasi Rencana Induk yang Sudah Mengalami Perubahan	V-13
V.2.5	Pembelajaran dari Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias	V-13
V.2.6	Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Donor/NGO dan Masyarakat dalam Rangka Penuntasan dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	V-14

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Kemajuan Pemulihan NAD-Nias Per 31 Desember 2008	I-1
Tabel 1. 2 Kerangka Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	I-6
Tabel 2. 1 Aspek dan Indikator Evaluasi	II-4
Tabel 2. 2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	II-5
Tabel 2. 3 Pemetaan Stakeholder Dalam Wawancara Mendalam	II-6
Tabel 3. 1 Perubahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk	III-6
Tabel 3. 2 Perubahan Sasaran Rencana Induk	III-7
Tabel 3. 3 Penyesuaian Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III-7
Tabel 3. 4 DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2008	III-9
Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang pemulihan perumahan dan infrastruktur	III-12
Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Perekonomian	III-13
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Sosial Kemasyarakatan	III-14
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum	III-16
Tabel 3. 9 Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	III-16
Tabel 3. 10 Komitmen dan Kontribusi Multi Donor Fund	III-20
Tabel 3. 11 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Perumahan	III-24
Tabel 3. 12 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	III-27
Tabel 3. 13 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Jalan dan Jembatan	III-32
Tabel 3. 14 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Perhubungan	III-34
Tabel 3. 15 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Sumberdaya Air	III-38
Tabel 3. 16 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Energi dan Listrik	III-42
Tabel 3. 17 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Pos dan Telematika	III-44
Tabel 3. 18 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Bangunan Fasilitas Umum	III-46
Tabel 3. 19 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Pemeliharaan	III-46
Tabel 3. 20 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang IREP	III-47
Tabel 3. 21 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Pertanian	III-50
Tabel 3. 22 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Perikanan	III-54
Tabel 3. 23 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan	III-57
Tabel 3. 24 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Pengembangan Usaha	III-58
Tabel 3. 25 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Pendidikan	III-64
Tabel 3. 26 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Kesehatan	III-67

Tabel 3. 27 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	III-70
Tabel 3. 28 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Agama	III-72
Tabel 3. 29 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Sosial	III-74
Tabel 3. 30 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Budaya	III-75
Tabel 3. 31 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Pemuda dan Olahraga	III-77
Tabel 3. 32 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Kelembagaan	III-79
Tabel 3. 33 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang Hukum	III-83
Tabel 3. 34 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Sub Bidang K3M	III-86
Tabel 3. 35 Rekapitulasi APBD Daerah Sampel Berdasarkan Bidang Pemulihan Tahun 2007 dan 2008	III-88
Tabel 3. 36 Pengelompokan SKPA/SKPD di Bidang Perumahan dan Infrastruktur	III-90
Tabel 3. 37 Alokasi Belanja Langsung APBD Bidang Perumahan dan Infrastruktur Tahun 2007 dan 2008	III-90
Tabel 3. 38 Pengelompokan SKPA/SKPD di Bidang Perekonomian	III-94
Tabel 3. 39 Alokasi Belanja Langsung APBD Bidang Perekonomian Tahun 2007 dan 2008	III-95
Tabel 3. 40 Pengelompokan SKPA/SKPD di Bidang Sosial Kemasyarakatan	III-97
Tabel 3. 41 Alokasi Belanja Langsung APBD Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2007 dan 2008	III-98
Tabel 3. 42 Pengelompokan SKPA/SKPD di Bidang Kelembagaan dan Hukum	III-100
Tabel 3. 43 Alokasi Belanja Langsung APBD Bidang Kelembagaan dan Hukum Tahun 2007 dan 2008	III-102
Tabel 3. 44 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Infrastruktur dan Permukiman	III-103
Tabel 3. 45 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman oleh Donor/NGO	III-104
Tabel 3. 46 Realisasi Bidang Perumahan dan Permukiman oleh CIDA	III-105
Tabel 3. 47 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur oleh Donor/NGO	III-109
Tabel 3. 48 Beberapa realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur oleh MDF	III-114
Tabel 3. 49 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Perekonomian	III-116
Tabel 3. 50 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perekonomian oleh Donor/NGO	III-116
Tabel 3. 51 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Kemasyarakatan oleh Donor/NGO	III-119
Tabel 3. 52 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Sosial Kemasyarakatan	III-122

Tabel 3. 53 Paket Pembangunan RSUD Dr. Zaenol Abidin –Banda Aceh	III-124
Tabel 3. 54 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Kelembagaan dan Hukum	III-128
Tabel 3. 55 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan dan Hukum oleh Donor/NGO	III-129
Tabel 3. 56 Komitmen Pemerintah Australia untuk Rekonstruksi Tata Pemerintahan	III-133
Tabel 4. 1 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-4
Tabel 4. 2 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	IV-5
Tabel 4. 3 Konsistensi Antar Perencanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-7
Tabel 4. 4 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Jalan dan Jembatan	IV-8
Tabel 4. 5 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Perhubungan	IV-9
Tabel 4. 6 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Air	IV-11
Tabel 4. 7 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Energi dan Listrik	IV-12
Tabel 4. 8 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi	IV-13
Tabel 4. 9 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Bangunan Fasilitas Umum	IV-14
Tabel 4. 10 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pendidikan	IV-14
Tabel 4. 11 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Kesehatan	IV-16
Tabel 4. 12 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Agama	IV-18
Tabel 4. 13 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Sosial	IV-19
Tabel 4. 14 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Budaya	IV-19
Tabel 4. 15 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	IV-20
Tabel 4. 16 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pertanian	IV-22
Tabel 4. 17 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pariwisata	IV-23
Tabel 4. 18 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	IV-24
Tabel 4. 19 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Tenaga Kerja	IV-25
Tabel 4. 20 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Koperasi & Usaha Kecil	IV-26

Tabel 4. 21 Konsistensi Antar Perencanaan Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-28
Tabel 4. 22 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	IV-29
Tabel 4. 23 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Hukum	IV-32
Tabel 4. 24 Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang K3M	IV-33
Tabel 4. 25 Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Infrastruktur yang Belum Selesai	IV-37
Tabel 4. 26 Konsistensi Antar Perencanaan dan Pelaksana Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-38
Tabel 4. 27 Konsistensi Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	IV-41
Tabel 4. 28 Perbandingan Antara Rencana Induk dengan Realisasi Sub Bidang Pendidikan Tahun 2005-2008	IV-43
Tabel 4. 29 Perbandingan Antara Rencana Induk dengan Realisasi Sub Bidang Kesehatan Tahun 2005-2008	IV-43
Tabel 4. 30 Perbandingan Antara Rencana Induk dengan Realisasi Sub Bidang Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2008	IV-44
Tabel 4. 31 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008 Bidang Perekonomian	IV-44
Tabel 4. 32 Perencanaan dengan Pelaksanaan Bidang Kelembagaan, Hukum dan K3M	IV-49
Tabel 4. 33 Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman	IV-50
Tabel 4. 34 Pembagian Peran dan Tanggungjawab Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur	IV-52
Tabel 4. 35 Pembagian Peran dan Tanggungjawab Antar Pelaksana Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan	IV-55
Tabel 4. 36 Peran BRR, Pemda dan Donor/NGO dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV-58
Tabel 4. 37 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-69
Tabel 4. 38 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-70

Tabel 4. 39 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan di Beberapa Lokasi	IV-73
Tabel 4. 40 Evaluasi Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan Bidang Pemulihan Perekonomian	IV-74
Tabel 4. 41 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-75
Tabel 4. 42 Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur dan Permukiman di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-76
Tabel 4. 43 Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-77
Tabel 4. 44 Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan di Beberapa Lokasi	IV-78
Tabel 4. 45 Koordinasi dalam Pelaksanaan Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-81
Tabel 4. 46 Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-85
Tabel 4. 47 Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-86
Tabel 4. 48 Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-87
Tabel 4. 49 Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-89
Tabel 4. 50 Media Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-90
Tabel 4. 51 Media Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-91
Tabel 4. 52 Sumber Daya Manusia (SDM) Bapel BRR NAD -Nias	IV-94
Tabel 4. 53 Kelembagaan dan SDM dalam Aspek Kapasitas di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-95
Tabel 4. 54 Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-98

Tabel 4. 55 Rincian Alokasi dan Realisasi per-Bidang Pemulihan Status 31 Oktober 2009	IV-102
Tabel 4. 56 Kapasitas Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-103
Tabel 4. 57 Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Beberapa Kabupaten/Kota	IV-104
Tabel 4. 58 Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2009 oleh Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pagu Indikatif 2009	IV-110
Tabel 4. 59 Donor Yang Mendukung Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009	IV-110

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Kick-off Meeting dengan Pemda Aceh Besar	II-5
Gambar 2. 2 Wawancara Mendalam dengan UNDP Banda Aceh	II-6
Gambar 3. 1 Kondisi Hunian Sementara (Barak)	III-25
Gambar 3. 2 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman oleh BRR	III-26
Gambar 3. 3 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Jalan dan Jembatan oleh BRR	III-33
Gambar 3. 4 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Perhubungan oleh BRR	III-38
Gambar 3. 5 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Sumber Daya Air oleh BRR	III-41
Gambar 3. 6 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Energi dan Listrik oleh BRR	III-43
Gambar 3. 7 Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Bangunan Fasilitas Umum oleh BRR	III-45
Gambar 3. 8 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Pertanian oleh BRR	III-54
Gambar 3. 9 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Perikanan oleh BRR	III-56
Gambar 3. 10 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Pengembangan Usaha oleh BRR	III-63
Gambar 3. 11 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Pendidikan oleh BRR	III-66
Gambar 3. 12 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Kesehatan oleh BRR	III-69
Gambar 3. 13 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak oleh BRR	III-71
Gambar 3. 14 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Agama oleh BRR	III-73
Gambar 3. 15 Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Kelembagaan oleh BRR	III-81
Gambar 3. 16 Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Hukum oleh BRR	III-84
Gambar 3. 17 Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang K3M oleh BRR	III-85
Gambar 3. 18 Beberapa Hasil Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman oleh Donor/NGO	III-108
Gambar 3. 19 Denah Kawasan Perumahan Ar-Rayya Lampineung di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	III-109
Gambar 3. 20 Tahap Pembangunan Jalan dan Jembatan oleh USAID di Kabupaten Aceh Besar	III-112
Gambar 3. 21 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Jalan dan Jembatan oleh USAID	III-112

Gambar 3. 22 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Sumberdaya Air oleh Muslim Aid	III-113
Gambar 3. 23 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Perikanan oleh FAO	III-118
Gambar 3. 24 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Perdagangan oleh JICS	III-118
Gambar 3. 25 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Pendidikan oleh UNICEF	III-123
Gambar 3. 26 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Kesehatan oleh KfW Jerman	III-124
Gambar 3. 27 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Pendidikan oleh KfW Jerman	III-125
Gambar 3. 28 Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak oleh Children On The Edge	III-127

Daftar Diagram

Diagram 1. 1 Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2009	I-3
Diagram 2. 1 Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk	II-3
Diagram 3. 1 Diagram Penyesuaian Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	III-8
Diagram 3. 2 Diagram DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009	III-9
Diagram 3. 3 Alokasi Pendanaan Masing-masing Sektor Pemulihan	III-10
Diagram 3. 4 Grafik Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur	III-12
Diagram 3. 5 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang perekonomian	III-13
Diagram 3. 6 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Sosial Kemasyarakatan	III-15
Diagram 3. 7 Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum	III-15
Diagram 3. 8 Perbandingan APBD Tahun 2007 dan 2008 Berdasarkan Lokasi Sampel	III-88
Diagram 3. 9 Perbandingan APBD Tahun 2007 dan 2008 Berdasarkan Lokasi Sampel dan Bidang Pemulihan	III-89
Diagram 3. 10 Grafik Alokasi Belanja Langsung Bidang Perumahan dan Infrastruktur Tahun 2007 dan 2008	III-91
Diagram 3. 11 Grafik Alokasi Belanja Langsung Bidang Perekonomian Tahun 2007 dan 2008	III-95
Diagram 3. 12 Grafik Alokasi Belanja Langsung Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2007 dan 2008	III-98
Diagram 3. 13 Grafik Alokasi Belanja Langsung Bidang Kelembagaan dan Hukum Tahun 2007 dan 2008	III-103
Diagram 3. 14 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Perumahan dan Infrastruktur	III-104
Diagram 3. 15 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Perekonomian	III-116
Diagram 3. 16 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Sosial Kemasyarakatan	III-122
Diagram 3. 17 Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang Kelembagaan dan Hukum	III-129
Diagram 4. 1 Komposisi SDM BRR NAD-Nias Menurut Jabatan	IV-95
Diagram 4. 2 Komposisi SDM BRR NAD-Nias Menurut Tingkat Pendidikan	IV-95

Daftar Bagan

Bagan 2. 1 Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk	II-3
Bagan 3. 1 Kuadran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	III-2
Bagan 3. 2 Alur Proses Penyusunan Perpres Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2008	III-3
Bagan 3. 3 Kerangka Umum Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III-18
Bagan 3. 4 Bagan Alir Mekanisme Hibah/Pinjaman Luar Negeri	III-18
Bagan 3. 5 Pola Pendanaan Hibah/Pinjaman Dalam Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD-Nias	III-19
Bagan 3. 6 Skema Co-Financing Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	III-20
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias	IV-94
Bagan 4. 2 Program/ kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilanjutkan pada Tahun 2009	IV-109
Bagan 4. 3 Alur Aset BRR NAD-Nias	IV-113
Bagan 4. 4 Skenario Pengakhiran Masa Tugas BRR dan Kelembagaan Pelaksana	IV-117



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Okt 2008

Bab I

Pendahuluan

Bab I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara hingga akhir 2008 sudah memasuki tahun keempat. Hingga akhir tahun 2008 sudah banyak dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berbagai pihak telah melakukan upaya pemulihan untuk dapat mengangkat kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang terpuruk akibat bencana tersebut. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat dinamika permasalahan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum direalisasikan dalam upaya pencapaian sasaran dan kegiatannya. Sehingga masih diperlukan upaya dan langkah berikutnya dalam rangka penuntasan dan penyelesaian kegiatan pemulihan tersebut. Kondisi umum mengenai perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pemulihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, secara garis besar dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Dari kondisi umum tersebut, dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap dokumen Rencana Induk. Atas dasar itu pula Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Proses penyesuaian dan perubahan Rencana Induk yang ditetapkan melalui Perpres No. 47 Tahun 2008 ini dilakukan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Bappenas). Proses

tersebut dilakukan secara konsultatif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi paruh waktu dan rekomendasi BPKP terhadap evaluasi paruh waktu dan Rencana Aksi yang sudah disusun sebelumnya. Perpres ini telah menampung penyempurnaan lebih lanjut dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, BPKP, Gubernur Provinsi NAD dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang proses selanjutnya

Tabel 1. 1
Kemajuan Pemulihan NAD-Nias
Per 31 Desember 2008

Rumah permanen dibangun	127.402 unit
Pengungsi yang masih tinggal di barak	964 KK
Fasilitas kesehatan dibangun	1.016 unit
Gedung sekolah dibangun	1.485 unit
Guru dilatih	38.981 orang
Jalan dibangun (semua tipe)	3.058 Km
Jembatan dibangun	273 unit
Bandar udara dibangun	12 unit
Pelabuhan laut dibangun	20 unit
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dibantu	145.250 unit
Rumah ibadah dibangun/direhab	3.192 Unit
Kapal Nelayan disediakan	6.497 unit
Tenaga Kerja dilatih	80.543 orang
Lahan pertanian direhab	103.341 Ha
Gedung pemerintahan dibangun	980 unit

ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Perpres Nomor 47 Tahun 2008 ini pula yang dijadikan acuan utama dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias pada April 2009 dan perencanaan untuk tahun 2009 dalam rangka penyelesaian dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bubarnya BRR NAD-Nias.

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DALAM RKP 2008

Sesuai Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan tidak hanya pada pembangunan perumahan;
2. Penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, dan telekomunikasi;
3. Pulihnya fasilitas dan pelayanan sosial budaya kemasyarakatan;
4. Pulihnya perekonomian di tingkat masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan peralihan tanggungjawab setelah selesainya mandat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias di tahun 2009 (*exit strategy*).

Sumber: Perpres 18/2007

Dalam konteks perencanaan tahunan, arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 seperti tertera pada boks disamping.

Rumusan kebijakan dimaksud, disusun karena mengingat berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2008. **Pertama**, masih belum terselesaikannya penanganan korban bencana. **Kedua**, belum berjalan dengan

baiknya program pemberdayaan masyarakat korban bencana. **Ketiga**, masih rendahnya kualitas pelayanan publik. **Keempat**, masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pascabencana. **Kelima**, belum terselesaikannya masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya yang terkait dengan masalah pertanahan

Terkait dengan keberadaan dan status kelembagaan BRR NAD-Nias, berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2005, *jo.* Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bahwa BRR NAD-Nias diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama 4 (empat) tahun yaitu sejak April 2005 hingga April 2009. Dan bila diperlukan dapat diperpanjang atas usulan Dewan Pengarah yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Namun demikian, kebijakan yang sudah diambil yaitu berdasarkan hasil Rapat Tripartite Terbatas BRR NAD-Nias pada tanggal 20 Oktober 2008 ditetapkan bahwa BRR berakhir pada 16 April 2009.

Setelah berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, maka keberlanjutan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya tanggungjawabnya akan diteruskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan menerima pelimpahan kegiatan eks BRR NAD-Nias seperti tertuang pada ilustrasi (INSTITUSI PENERIMA LIMPAPAN KEGIATAN EKS BRR) berikut.

Selain masalah pelimpahan tanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diatas, masih terdapat masalah lainnya yang tidak kalah pentingnya. Selama 4 (empat) tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sudah cukup banyak aset-aset yang ditinggalkan yang sudah dibangun. Peninggalan aset-aset itu selain yang dikerjakan oleh BRR NAD-Nias sendiri juga oleh kalangan Donor, *Non-Governmental Organization* (NGO), korporasi dan stakeholders lainnya. Persoalan peninggalan aset-aset ini juga menyisakan permasalahan tersendiri terutama menyangkut kewenangan pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset yang sudah dibangun dan persoalan dukungan sumber pendanaan pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias.

Di samping itu, untuk menghadapi pengakhiran BRR NAD-Nias pada April 2009 telah dipersiapkan kerangka regulasi mengenai Peraturan Presiden Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proses penyusunan regulasi ini pun dilakukan secara konsultatif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai instrumen kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar hukum atau regulasi inilah yang nantinya akan dijadikan landasan bagi berakhirnya masa tugas dan tanggungjawab BRR NAD-Nias pada tanggal 16 April 2009. Selanjutnya kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada tahun 2008 sangat *urgent* dan strategis untuk mengamati dan menilai perkembangan dan kemajuan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias dan stakeholders lainnya. Aspek yang paling strategis dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yaitu menghadapi pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias pada April 2009 dan mempersiapkan kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR NAD-Nias baik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dari hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara selanjutnya.

INSTITUSI PENERIMA LIMPAHAN KEGIATAN EKS-BRR KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

Sesuai Perpres No. 38 Tahun 2008 tentang RKP 2009 disebutkan bahwa terdapat 6 Kementerian/Lembaga yang akan menerima kegiatan eks BRR, yaitu:

1. Departemen Pekerjaan Umum;
2. Departemen Perhubungan;
3. Departemen Dalam Negeri;
4. Departemen Agama;
5. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Badan Pertanahan Nasional.

Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai penanggungjawab kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sumber: Perpres 38/2008

I.2 Landasan Hukum

Sebagaimana digariskan dalam Perpres No. 30 Tahun 2005, jo. Perpres No. 47 Tahun 2008, bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN/Kepala Bappenas) diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Sumber: Perpres 30/2005

Untuk mendukung kebijakan dimaksud, pada tahun 2008, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengeluarkan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. KEP.011A/M.PPN/01/2008 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) Bappenas. Di dalam Tim Koordinasi tersebut terdapat salah satu program untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut Tahun 2007-2008 ini mengacu kepada beberapa regulasi lainnya yang terkait, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, *jo.* Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
6. Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008.
7. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

I.3 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk Tahun Anggaran 2007 -2008 bertujuan :

1. Mendapatkan gambaran perkembangan dan kemajuan mengenai implementasi Rencana Induk yang sudah dilakukan revisi melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja BRR NAD-Nias, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan komitmen Donor/NGO. Terdapat beberapa isu strategis pada tujuan pertama ini, antara lain;
 - Proses perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias,
 - Menilai konsistensi pelaksanaan Rencana Induk,
 - Menilai dinamika pelaksanaan Rencana Induk.
 - Implementasi Rencana Induk pada tahap kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Menilai pelaksanaan peralihan dan pengakhiran mandat dan masa tugas BRR NAD-Nias yang akan berlangsung pada April 2009 yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada bagian tujuan ini ada beberapa isu strategis, antara lain;
 - Payung hukum pengakhiran masa tugas BRR,
 - Permasalahan manajemen asset,
 - Serah terima AP3D,
 - Pemeliharaan asset pasca berakhirnya BRR,
 - Peran tim penuntasan dalam mendukung PMT BRR NAD-Nias.
3. Menilai kesiapan peralihan program kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kementerian/Lembaga dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias. Sedangkan pada tujuan ketiga ini terdapat beberapa isu strategis, antara lain,
 - Payung hukum kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi,
 - Perencanaan dan penganggaran kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi,
 - Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi,
 - Pemetaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga,
 - Implikasi terhadap produk hukum pasca berakhirnya BRR
 - Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan daerah

I.4 Sasaran

Beberapa sasaran yang terdapat di dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya konsistensi penjabaran Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias yang sudah mengalami penyempurnaan
2. Adanya gambaran pelaksanaan peralihan dan persiapan pengakhiran masa tugas dan mandat BRR NAD-Nias pada April 2009
3. Adanya kesiapan peralihan program kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kementerian/Lembaga dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias.

I.5 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana yang disebutkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk, maka secara substansi evaluasi akan dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan, yaitu sebagai berikut;

1. Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman
2. Bidang Pemulihan Infrastruktur
3. Bidang Pemulihan Sosial Budaya
4. Bidang Pemulihan Perekonomian
5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

I.6 Kerangka Waktu Pelaksanaan

Untuk tahapan-tahapan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Kerangka Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

NO	Kegiatan	Kerangka Waktu (dalam bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan RKP, Renja K/L, dan RKPD TA 2009												
2.	Musrenbang Provinsi												
3.	Musrenbang Nasional												
4.	Penyusunan Kerangka Acuan Pemantauan dan Evaluasi												
5.	Penyusunan Instrumen Monev												
6.	Koordinasi Tim Teknis Sekretariat P3RIRRWANS												
7.	Koordinasi Persiapan Pemantauan dan Evaluasi internal Bappenas												
8.	<i>Kick off Meeting</i> Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dengan BRR, Pemda dan Donor/NGO												
9.	Pengumpulan Data dan Informasi Sekunder												
10.	Penulisan Draf Awal Laporan Monev												
11.	Kunjungan Lapangan												

NO	Kegiatan	Kerangka Waktu (dalam bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Stock Opname Data												
13.	Pengolahan Data dan informasi												
14.	Penulisan Draf Akhir Laporan Monev												
15.	Lokakarya Laporan Monev												
16.	Finalisasi Laporan Monev												
17.	Penyampaian Laporan Monev kepada <i>stakeholders</i> di pusat dan daerah												

I.7 Sistematika Penulisan Laporan

Berikut ini sistematika pelaporan dari hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahun 2007/2008, yaitu sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Mengawali laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (P3RIRRWANS) ini diurai konteks permasalahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahun 2007-2008 yang terdapat beberapa isu penting, antara lain, perubahan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias. Tahun terkahir masa tugas BRR dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, persiapan pengakhiran masa tugas BRR dan menghadapi kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias dan beberapa isu lainnya. Selanjutnya akan diinformasikan berbagai kerangka regulasi yang dipergunakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi. Sedangkan fokus pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi tahun 2007-2008 telah dirumuskan tujuan, sasaran dan runag lingkup dalam kegiatan ini. Secara garis besar, gambaran pelaksanaan kegiatan akan dijabarkan pada bagian tahapan pelaksanaan dan sistematika penulisan laporan pemantauan dan evaluasi.

BAB II METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pada bagian metodologi pemantauan dan evaluasi akan dideskripsikan beberapa poin penting. Kerangka dasar evaluasi kinerja yang berisi hal yang mendasar dalam kegiatan evaluasi ini yaitu input, proses, output, outcome dan impact. Di dalam bab ini pula akan ditentukan kelompok sasaran dan lokasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penulisan laporan ini diperlukan beberapa teknik metode pemantauan baik yang bersumber dari data primer seperti wawancara, observasi dan diskusi terbatas maupun data sekunder seperti kajian literatur, review laporan stakeholders dan analisis klipng media massa. Hal yang paling terpenting dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi ini yaitu kerangka kerja logis yang merupakan alur keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari berbagai unsur dan tahapan utama dalam proses pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, akan dijabarkan lima aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi untuk tahun 2008.

BAB III PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2007/2008

Setelah dijelaskan pendahuluan dan kerangka metodologi pemantauan dan evaluasi ini, selanjutnya akan dideskripsikan mengenai proses terjadinya perubahan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias yang merupakan hasil dari evaluasi paruh

waktu. Kemudian, akan diuraikan mengenai pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang bersumber dari on budget maupun off budget. Setelah dijelaskan mengenai pendanaan, baru dielaborasi lebih jauh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fisik baik yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, Donor/NGO maupun Pemerintah Daerah.

BAB IV EVALUASI HASIL PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2007-2008

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa aspek pemantauan dan evaluasi meliputi lima aspek yaitu Aspek Konsistensi, Aspek Koordinasi, Aspek Konsultasi, Aspek Kapasitas dan Aspek Keberlanjutan. Selanjutnya, pada Bab IV ini akan diuraikan lebih lanjut dan lebih dalam hasil evaluasi pada masing-masing aspek tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat diperoleh gambaran dan kondisi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, Donor/NGO, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pada bagian pula akan digambarkan mengenai persepsi dan pandangan masyarakat penerima manfaat terhadap hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir dari laporan ini akan dibagi ke dalam dua bagian yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk bagian kesimpulan akan dikelompokkan ke dalam aspek yaitu Aspek Konsistensi, Aspek Koordinasi, Aspek Konsultasi, Aspek Kapasitas dan Aspek Keberlanjutan. Dari hasil keseluruhan laporan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi berdasarkan topik-topik secara khusus sebagaimana tercantum di bawah ini;

1. Penyusunan Kebijakan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2009
2. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Rangka Pengakhiran Masa Tugas BRR
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga menghadapi Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BRR
4. Implementasi Rencana Induk yang sudah mengalami penyempurnaan
5. Pembelajaran dari Proses Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias

Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Donor/NGO dan Masyarakat dalam Rangka Penuntasan dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Okt 2008

Bab II

Metodologi Pemantauan dan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Induk

Bab II

Metodologi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk

II.1 Kerangka Dasar Evaluasi

Evaluasi implementasi Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut telah berjalan selama 4 (empat) tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dimulai sejak tahun 2005 hingga akhir 2008. Di dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi ini melibatkan berbagai stakeholders terkait yaitu BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias Provinsi Sumut, Donor/NGO, masyarakat penerima manfaat dan stakeholders lainnya.

Basis evaluasi ini mengacu kepada Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Kerangka regulasi Rencana Induk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008. Kebijakan perubahan terhadap Rencana Induk tersebut dilakukan setelah adanya hasil Evaluasi Paruh Waktu (*Mid-term Review*) rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Evaluasi Paruh Waktu dilakukan secara bersama-sama antara BRR NAD-Nias, Bappenas dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tujuan yang disebutkan pada UU No, 25 Tahun 2004 seperti tertuang pada boks diatas, maka dirumuskan kerangka dasar evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut, yang meliputi 5 (lima) kerangka dasar yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Adapun penjelasan detailnya sebagai berikut:

1. Konsistensi

Proses penelaahan kesesuaian : (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Kerja pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) antara Rencana Induk dengan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan; (c) antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta (d) manfaat dan dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat penerima manfaat.

2. Koordinasi

Upaya pemulihan pascabencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi adalah merupakan bagian dari proses pembangunan. Dalam konteks ini, berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah serta pendayagunaan sumber daya;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi (konsultasi); para pemangku kepentingan khususnya masyarakat sebagai subyek pembangunan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya (alam, keuangan dan manusia/kelembagaan) secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (kapasitas dan keberlanjutan).

Suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD-Nias.

3. **Konsultasi**
Keikutsertaan atau partisipasi Masyarakat NAD-Nias pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. **Kapasitas**
Kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. **Keberlanjutan**
Proses pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan pelaksana kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi.

II.2 Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi

Di dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias menggunakan prinsip pengukuran kinerja yang terdiri dari input, proses, output dan outcome. Secara definitif dapat dirumuskan sebagai berikut;

- a. **input** yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, baik program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. **process** yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders termasuk penerima manfaat, serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit organisasi.
- c. **output** yaitu pencapaian sasaran dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- d. **outcome** yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan fungsi atau manfaat keluaran kegiatan.

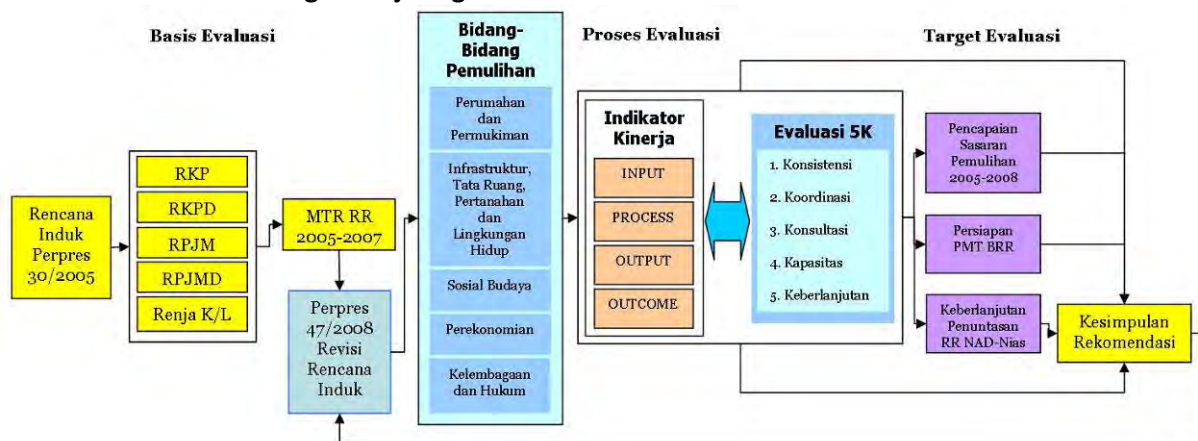
Selain itu, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk ini menggunakan analisis kerangka 5 (lima) evaluasi yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Secara definisi operasional sudah diterangkan pada bagian atas bab ini. Hal terpenting pula dalam kegiatan evaluasi ini yaitu bagaimana melihat dampak atau manfaat dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dilakukan, baik oleh BRR NAD-Nias, Donor/NGO, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya.

Diagram 2. 1 menggambarkan kerangka kerja logis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi, dan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. **Bagian Basis Evaluasi**
Hal paling terpenting dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi ini yaitu adanya basis yang dipergunakan untuk dasar penilaian. Basis evaluasi utama dan pertama dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yaitu Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sesuai Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk. Kerangka regulasi ini yang dijadikan sebagai referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selain Rencana Induk, terdapat kerangka kebijakan lainnya yang juga dijadikan sebagai rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan sumber-sumber lainnya.

Diagram 2. 1
Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk



b. Proses Evaluasi

Selanjutnya, atas dasar basis evaluasi itu, maka dilakukan proses evaluasi. Sedangkan secara substantif, ruang lingkup evaluasi ini berbasiskan Perpres No. 47 Tahun 2008 dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang pemulihan yaitu; bidang pemulihan perumahan dan permukiman, bidang pemulihan infrastruktur, bidang pemulihan sosial kemasyarakatan, bidang pemulihan perekonomian, serta bidang pemulihan kelembagaan dan hukum. Pada tahap proses evaluasi ini akan dipergunakan penilaian kinerja evaluasi yang terdiri dari input, proses, output dan outcomes. Dan proses evaluasi yang paling urgen dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu penggunaan pendekatan 5-K yaitu aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan.

c. Target Evaluasi

Berdasarkan basis evaluasi dan proses evaluasi yang sudah dijelaskan, tahap berikutnya memasuki tahap target evaluasi. Pada tahap ini, terdapat tiga terget utama dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk yaitu pencapaian sasaran pemulihan pada tahun 2008, persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias serta keberlanjutan dan penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Dari keseluruhan tahapan ini maka akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahap selanjutnya.

II.3 Aspek dan Indikator Evaluasi

Aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Tabel 2. 1
Aspek dan Indikator Evaluasi

NO.	ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
1.	KONSISTENSI	1. Konsistensi <i>antar dokumen perencanaan</i> , yaitu antara Rencana Induk yang sudah direvisi dengan RKP, Renja BRR NAD-Nias, RPJMD dan RKPD Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, dan Komitmen Donor dan NGO. 2. Konsistensi <i>antara perencanaan dengan pelaksanaan</i> , yaitu antara dokumen

NO.	ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
		perencanaan yang dilakukan pada masing-masing bidang Rencana Induk oleh BRR, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO. 3. Konsistensi <i>antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi</i>, yaitu hasil pelaksanaan antara BRR, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO. 4. Konsistensi antara dampak/manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kehidupan masyarakat penerima manfaat di NAD-Nias.
2.	KOORDINASI	1. Mekanisme <i>koordinasi dalam penyusunan perencanaan</i> pada BRR, Donor/ NGO, Pemda Provinsi NAD dan Pemda Kepulauan Nias Provinsi Sumut. 2. Mekanisme <i>koordinasi dalam pelaksanaan</i> pada BRR, Satuan Kerja (Satker), Pemda Provinsi NAD dan Pemda Kepulauan Nias Provinsi Sumut, dan Donor/NGO.
3.	KONSULTASI	1. <i>Tingkat partisipasi masyarakat</i> dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh BRR, Pemda, Donor/NGO, yang diwujudkan dalam: identifikasi penilaian kebutuhan, sosialisasi rencana kerja pembangunan, legitimasi komitmen perencanaan, pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengawasan dan evaluasi . 2. Media partisipasi masyarakat secara langsung: • Sistem atau mekanisme yang dibangun untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan; • Forum pertemuan untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan; • <i>Ketersediaan dan kemudahan akses informasi</i> melalui: media massa lokal, website, kotak pos pengaduan, telepon bebas pulsa.
4.	KAPASITAS	1. <i>Kelembagaan</i>: Mekanisme perencanaan, pengendalian dan pengawasan, standar perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. 2. <i>Sumber Daya Manusi</i>: Regulasi yang terkait dengan kebijakan dan pola pembinaan SDM. 3. <i>Pendanaan</i>: Gambaran pendanaan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias.
5	KEBERLANJUTAN	1. Regulasi pengakhiran masa tugas BRR dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. 2. Manajemen dan serah terima <i>asset</i>. 3. Kesiapan peralihan AP3D dari BRR kepada Pemda dan K/L. 4. Kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi. 5. Pengaturan kelembagaan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi. 6. Integrasi pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan.

Sumber: Sekretariat P3B Bappenas, 2008

II.4 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana yang disebutkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk, maka secara substansi ruang lingkup evaluasi ini akan dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan, yaitu sebagai berikut:

- Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman;
- Bidang Pemulihan Infrastruktur;
- Bidang Pemulihan Sosial Budaya;
- Bidang Pemulihan Perekonomian; dan
- Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum.

Berdasarkan pengelompokan diatas, masing-masing bidang pemulihan terdapat sub bidang pemulihan yang lebih spesifik dan fokus kepada sektor-sektor kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara rinci pembagian sub bidang pemulihan dapat diamati pada bagian lampiran Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Rencana Induk.

II.5 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kelompok jenis data, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Rapat Koordinasi

Proses pengumpulan data dan informasi evaluasi ini, salah satunya dilakukan melalui rapat atau pertemuan koordinasi baik di pusat maupun di daerah.

Beberapa bentuk rapat di tingkat pusat, antara lain, Rapat Koordinasi Persiapan Pemantauan dan Evaluasi RIRRWANS 2008, yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2008 di Bappenas. Yang dihadiri oleh Tim Pelaksana P3RIRRWANS, Tim Sekretariat P3B, dan Tim Teknis P3RIRRWANS. Tujuan kegiatan ini dalam rangka konsolidasi persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan mensosialisasikan kerangka acuan beserta instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk. Dari rapat ini dihasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dijadikan perbaikan untuk kerangka acuan dan instrumen tersebut.

Gambar 2. 1
Rapat Koordinasi
Tim Pelaksana P3RIRRWANS



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Agt 2008

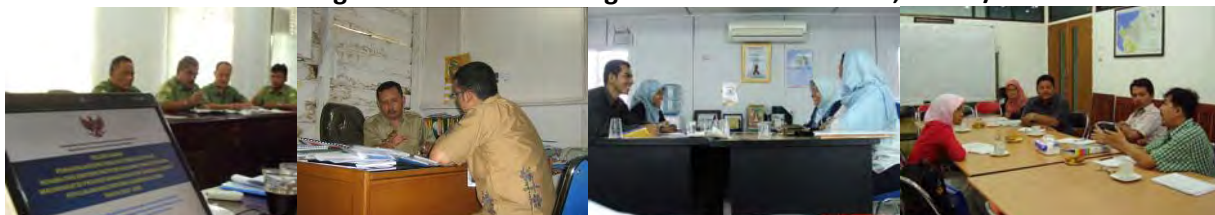
Tabel 2. 2
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

No.	JENIS DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1.	Data Primer	1. Rapat Koordinasi 2. Wawancara Mendalam dengan stakeholders 3. Wawancara Mendalam dengan masyarakat penerima manfaat 4. Observasi Lapangan
2.	Data Sekunder	1. Kajian Literatur 2. Tinjauan Laporan 3. Dokumentasi Foto 4. Kliping Media Massa

Sumber: Sekretariat P3B Bappenas, 2008

Selain rapat koordinasi di internal tim pelaksana dan sekretariat, terdapat berbagai rapat atau pertemuan lainnya baik di Bappenas maupun di instansi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan membahas dinamika dan permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Dari hasil pelaksanaan rapat atau pertemuan tersebut banyak diperoleh gambaran dan pemetaan isu yang berkembang sesuai dengan agenda pembahasan.

Gambar 2. 2
Kickoff Meeting dan Wawancara dengan Pemerintah Daerah, Donor/NGO



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

b. Wawancara Mendalam dengan stakeholders

Penggalan informasi secara kualitatif dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan, antara lain, melalui wawancara mendalam dengan pihak BRR NAD-Nias, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah level Provinsi dan Kabupaten/Kota di NAD dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Dari pengelompokan itu, dapat dilakukan pemetaan stakeholders secara detail pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Pemetaan Stakeholder Dalam Wawancara Mendalam

NO	INSTANSI	JUMLAH
I	BRR NAD-NIAS	7
1	Kedeputan Operasi	
2	Kedeputan Keuangan dan Perencanaan	
3	Kedeputan Pengawasan	
4	Direktorat Manajemen Asset	
5	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)	
6	Kantor Regional	
7	Kantor Distrik	
II	Donor/ NGO	12
1	MDF	
2	UNDP	
3	GTZ	
4	IFRC	
5	USAID	
6	PMI	
7	OXFAM GB	
8	UN-HABITAT	
9	JBIC	
10	AUSAID	
11	IDB	
12	ADB	
III	SKPD PROVINSI	12
1	Bappeda	
2	Badan Kesbang Linmas	
3	Dinas Pendidikan	
4	Dinas Syariat Islam	
5	Dinas Pengairan	
6	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
7	Dinas Kesehatan	
8	Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama	
9	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	
11	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM	
12	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika	
IV	SKPD KABUPATEN/ KOTA	11
1	Bappeda	
2	Badan Kesbang Linmas	
3	Dinas Perhubungan	
4	Dinas Kimpraswil	
5	Dinas Pendidikan	
6	Dinas Kesehatan	
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
8	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	
10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
11	Kantor Departemen Agama	
	TOTAL	42

Sumber: Sekretariat P3B Bappenas, 2008

c. Wawancara Mendalam dengan masyarakat penerima manfaat

Dalam rangka melihat sejauhmana dampak dan kemanfaatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana maka salah satu teknik yang sangat penting yaitu melalui wawancara mendalam dengan masyarakat penerima manfaat. Penelusuran informasi dari masyarakat penerima manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangatlah urgen dan strategis. Dari hasil wawancara mendalam dapat diperoleh gambaran secara langsung dan konkret kondisi pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Lokasi wawancara mendalam dengan masyarakat penerima manfaat yaitu di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Pada masing-masing lokasi tersebut ditargetkan sebanyak lima narasumber atau informasi dari kalangan masyarakat setempat.

Gambar 2. 3
Wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

d. Observasi Lapangan

Kegiatan ini merupakan proses peninjauan dan kunjungan lapangan untuk melihat dan mengamati secara langsung terhadap berbagai hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun lokasi yang dijadikan sasaran observasi lapangan ini yaitu di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan objek sasaran pengamatan lapangan ini meliputi pada lima bidang pemulihan sesuai dengan kerangka Rencana Induk. Objek observasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan tidak hanya yang dilaksanakan oleh BRR, tapi juga yang dilaksanakan oleh Donor/NGO, Pemerintah daerah, atau stakeholders lainnya. Dari pelaksanaan observasi ini dapat diperbandingkan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi baik secara kualitas dan kuantitas.

2. Data Sekunder

a. Kajian Literatur

Untuk menunjang kegiatan pemantauan dan evaluasi ini sangat diperlukan kajian-kajian literatur yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Hal ini untuk mendukung penilaian dan analisis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi ini. Beberapa hasil kajian tersebut telah dipublikasikan antara lain oleh Bank Dunia, Multi Donor Fund, BRR maupun lembaga lainnya. Selain itu, kajian literatur dapat memperkaya dan memperdalam wacana dan ulasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara ilmiah dan akademis.

b. Tinjauan Laporan

Sumber sekunder lainnya yang memang sangat mendukung kepada kegiatan pemantauan dan evaluasi ini bersumber dari laporan yang telah disusun oleh pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Laporan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi itu dijadikan sebagai rujukan dan dasar dalam pengambilan data dan informasi untuk penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi ini. Berbagai produk laporan itu merupakan gambaran kemajuan dan pemetaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh berbagai stakeholders. Masing-masing aktor yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan gambaran peran dan kiprah aktor tersebut. Sekedar menyebut beberapa saja, instansi yang rutin menerbitkan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain; BRR, Multi Donor Fund, UNDP, Uni Eropa, Bank Dunia, dan aktor lainnya.

c. Dokumentasi Foto

Hasil dokumentasi foto yang dilaksanakan pada saat kunjungan lapangan memberikan visualisasi secara konkret pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Objek yang dijadikan kegiatan pendokumentasian meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada lima bidang pemulihan. Selain itu, pendokumentasian ini juga diarahkan kepada aktifitas tim pemantauan dan evaluasi dalam menjalankan pengumpulan data dan informasi di lapangan. Dokumentasi foto yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas ini dijadikan bahan laporan untuk memberikan visualisasi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Kliping Media Massa

Sumber data sekunder lainnya yang cukup menarik dalam memperkaya rekaman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diperoleh melalui media massa, terutama media cetak. Jenis media massa ini dapat bersumber dari media di pusat seperti KOMPAS, TEMPO, Media Indonesia dan lainnya. Dan dapat bersumber dari media massa lokal seperti SERAMBI Indonesia, WASPADA, Harian Rakyat Aceh, MODUS, dan lainnya. Selain itu, terdapat pula media internal lembaga pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti BRR, PMI, dan sebagainya.

II.6 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2007/2008 adalah :

1. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias
2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara yang terdiri dari SKPD/SKPA terpilih
3. Donor/NGO terpilih
4. Masyarakat penerima manfaat pada daerah pascabencana terpilih

II.7 Lokasi Pemantauan dan Evaluasi

Lokasi-lokasi yang akan dijadikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2007/2008 dipilih beberapa sampel yaitu sebagai berikut :

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kota Banda Aceh
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Nias
6. Kabupaten Nias Selatan



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Okt 2008

Bab III

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

Bab III

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

III.1 Perubahan Rencana Induk

Rencana Induk merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Namun dalam proses pelaksanaan terjadi berbagai dinamika di lapangan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan. Pembahasan proses perubahan Rencana Induk meliputi dasar perubahan rencana induk dan substansi perubahannya.

III.1.1 Dasar Perubahan Rencana Induk

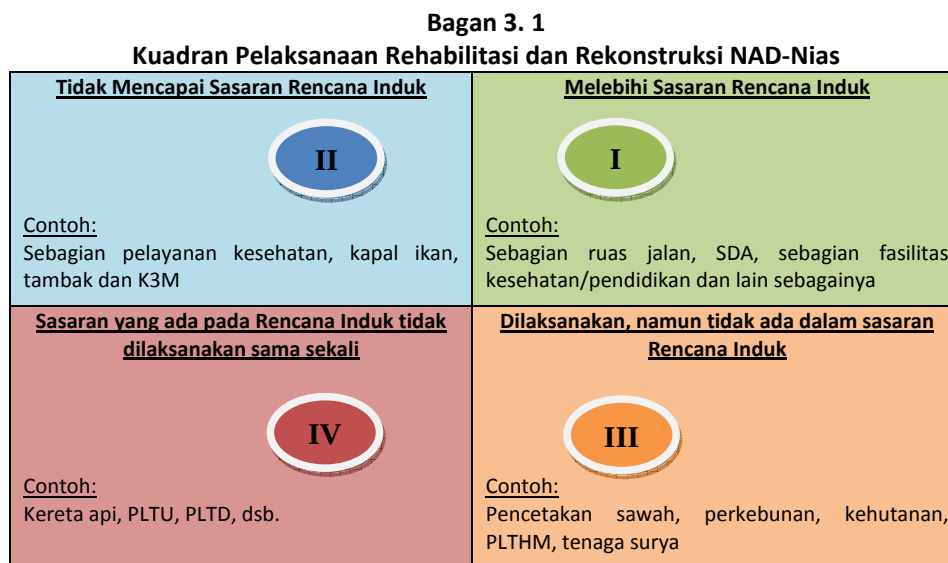
Dasar perubahan Rencana Induk adalah diawali dari hasil rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 pada bulan Juni-Juli 2007. Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Paruh Waktu adalah :

1. Penilaian kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada paruh waktu pertama yaitu dari tahun 2005 hingga 2007.
2. Penyempurnaan/pemantapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap berikutnya antara lain 1) penetapan landasan hukum/peraturan yang mendukung, 2) penetapan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, 3) arahan bagi penetapan program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah 2008, dan 4) rekomendasi *cross sectoral (cross cutting issue)*.
3. Memberikan rekomendasi Untuk *Exit Strategy* BRR diantaranya 1) pengalihan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Sumber APBN), 2) pengalihan koordinasi bantuan Donor/NGO, dan 3) kesiapan kelembagaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR menyesuaikan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Induk. Namun terkait dengan sasaran program dan rinciannya, Rencana Induk mengarahkan agar penjabaran pelaksanaannya disesuaikan melalui pendalaman terhadap kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat. Hal ini ditindaklanjuti BRR dengan melakukan pendalaman terhadap kondisi wilayah dan upaya untuk menampung aspirasi masyarakat dan para *stakeholders* terkait, kemudian diketahui adanya sasaran program baru atau kebutuhan riil yang terdiri dari :

1. Hasil verifikasi terhadap *beneficiaries* bidang perumahan sehingga menghasilkan rumah rehabilitasi dan rekonstruksi yang baru;
2. Hasil pendalaman terhadap kondisi infrastruktur (melalui studi) dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, sehingga diperoleh kebutuhan riil di bidang infrastruktur;
3. Hasil koordinasi dengan instansi terkait/Pemerintah Daerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga diperoleh kebutuhan riil untuk bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, agama, sosial budaya, kelembagaan, hukum dan K3M.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari 4 (empat) kuadran, yaitu melebihi sasaran rencana induk, tidak mencapai sasaran rencana induk, dilaksanakan namun tidak ada dalam sasaran rencana induk, dan sasaran yang ada pada rencana induk tidak dilaksanakan sama sekali. Kuadran pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2008

Berdasarkan 4 (empat) kuadran di atas terdapat rekomendasi dan usulan rencana tindak lanjut mengenai penyempurnaan rencana induk khususnya untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Perubahan terhadap rencana induk sangat dimungkinkan terhadap program dan kegiatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat NAD-Nias pada saat ini. Awalnya Rencana Induk ditetapkan melalui Peraturan Presiden, maka upaya untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun di luar ketentuan Perpres harus kembali dilakukan melalui Perpres.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada bulan Juli-Oktober 2007 dilaksanakan Penyusunan **Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009**, dengan tujuan:

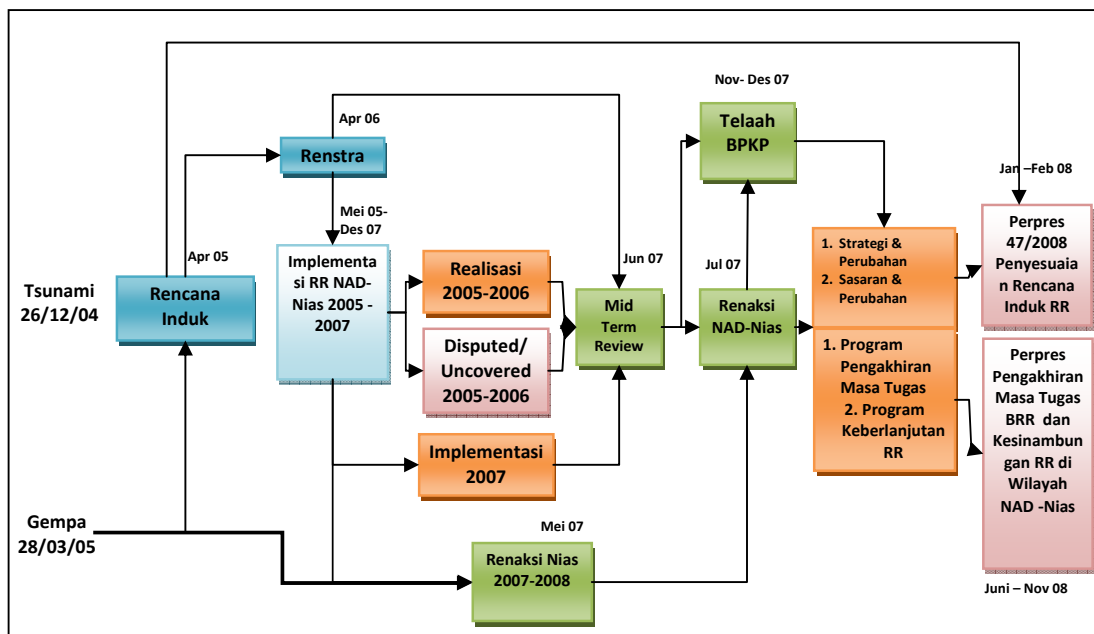
1. Penajaman sasaran Rencana Induk yang memuat; penyesuaian substansi program, perubahan sasaran, proyeksi kegiatan hingga 2009 dengan mempertimbangkan masa transisi menjelang berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias.
2. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Mobilisasi pendanaan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
4. Menciptakan kesinambungan dan keterpaduan dalam pembangunan kembali wilayah dan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada aspek kelembagaan, pendanaan dan SDM.

Rencana Aksi NAD-Nias yang dapat dikatakan sebagai penyesuaian/perubahan Rencana Induk yang sudah diserahkan kepada Presiden. Presiden merekomendasikan agar sebelum disahkan perlu direview oleh BPKP dan perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada bulan November-Desember 2007, **BPKP melakukan Review terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009** dan dihasilkan rekomendasi perlunya perubahan Rencana Induk dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Tidak menggunakan terminologi “Rencana Aksi” karena rencana aksi disusun oleh BRR NAD-Nias bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Perubahan Perpres 30/2005 sebaiknya mencakup :
 - Perubahan kebijakan, strategi, program/kegiatan dan sasaran;
 - Ketentuan mengenai pengakhiran masa tugas BRR NAD dan Nias (termasuk masa transisi dan kewajiban pengalihan program/kegiatan yang belum selesai kepada Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda);
 - Pengaturan pengalihan seluruh aset dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani dan atau dialihkan kepada kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah
 - Pengawasan fungsional pemerintah oleh BPKP terhadap akuntabilitas BRR
3. Program/kegiatan yang menjadi kebutuhan riil diharapkan menjadi acuan dalam penetapan program/kegiatan dalam perubahan Rencana Induk

Hasil rekomendasi dari evaluasi paruh waktu, yang selanjutnya juga telah sejalan dengan hasil review BPKP, maka Bappenas telah menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang meliputi perubahan kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk lebih jelasnya alur proses penyusunan Perpres Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2008 dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 3. 2
Alur Proses Penyusunan Perpres Perubahan Rencana Induk
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2008



Sumber: Bappenas, 2008

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Bappenas) kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui proses konsultasi di pusat dan daerah untuk menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk. Proses konsultasi tersebut melibatkan Bappenas, BRR NAD-Nias,

Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Kabinet, BPKP dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah. Beberapa rapat koordinasi yang dilaksanakan antara lain adalah:

- Pertemuan Konsinyasi Pembahasan Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (12 Maret 2008 di Banda Aceh)
- Rapat koordinasi Dewan Pengarah BRR (14 Maret 2007)
- Forum Penyelesaian Masalah Bersama BRR NAD-Nias (13 Juni 2007)
- Rapat Tripartite Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BRR NAD-Nias (4 April 2007)
- Pertemuan Terbatas antara Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Kepala Bapel BRR, BPKP, Waseskab, Gubernur NAD dan Sumut tentang pelaksanaan RR di NAD dan Nias tahun 2005-2008 dan perencanaan tahun 2009 (5 Mei 2007)
- Forum koordinasi tripartite (10 Agustus 2007)
- Dan lain sebagainya

Rincian perubahan kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi serta masukan dari *stakeholders* terkait sudah diserahkan kepada Bappenas dan sudah memasuki proses akhir (finalisasi) di Bappenas pada bulan Maret 2008. Peraturan Presiden dimaksud telah menampung penyempurnaan lebih lanjut dengan mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, BPKP, Gubernur NAD dan Gubernur Sumut guna proses penetapan oleh Presiden Republik Indonesia. Tahap selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat Kabinet untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2008 Perpres Perubahan Rencana Induk diterbitkan yaitu **Perpres Nomor 47 Tahun 2008**. Perpres tersebut dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan dan proses pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias di tahun 2008 dan perencanaan untuk tahun 2009 dalam penuntasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias.

PERPRES 47/2008 HARUS JADI ACUAN

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias telah terbit awal Juli lalu. Perpres bernomor 47 tahun 2008 ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua wilayah yang dilanda bencana alam ini. Selanjutnya Perpres ini akan dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan dan proses pengakhiran masa tugas BRR tahun 2008 dan perencanaan penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun depan.

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca berakhirnya tugas BRR diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana induk yang telah mengalami perubahan (Perpres 47 Tahun 2008) untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.

Perpres No 47/2008 tersebut berisikan perubahan atas Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kabupaten Nias. Keberadaan Perpres tersebut berdasarkan pertimbangan masih terdapat kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir 2009. Perpres itu sendiri menerangkan rencana induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009. Selain itu Perpres 47/2008 memandang perlu menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program. Khusus berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi di Aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh. Perpres tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Juli 2008.

Sumber: <http://www.serambinews.com> (17 Juli 2008)

III.1.2 Substansi Perubahan Rencana Induk

Penerbitan Perpres 47/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk memantapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan landasan hukum bagi para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu BRR (2005-2008) serta K/L dan Pemda di tahun 2009.

Substansi perubahan rencana induk berdasarkan Perpres 47/2008 meliputi batang tubuh, lampiran I (kebijakan dan strategi) dan lampiran II (sasaran program/kegiatan).

III.1.2.1 Batang Tubuh

Dalam batang tubuh Perpres 47/2008 terdapat 2 pasal baru dan sisipan, yaitu :

- **Pasal 2 (Baru)** yaitu : "Rencana Induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009"
- **Pasal 5 A (Sisipan)**, yaitu :
 - Dalam hal dipandang perlu, Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D, dan Lampiran II E.
 - Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh

III.1.2.2 Lampiran I (Kebijakan dan Strategi)

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rencana induk pada dasarnya tetap dijadikan acuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, umumnya terdapat sedikit perubahan. Kebijakan dan Strategi Rencana Induk yang terdapat dalam Perpres 47/2008 terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

Lampiran IA Kebijakan dan Strategi Utama

- a) Latar Belakang
- b) Umum (Penyesuaian dari Lampiran I Buku Utama Perpres 30/2005)
- c) Tata Ruang dan Pertanahan (Penyesuaian dari Lampiran Buku II tentang Tata Ruang dan Pertanahan Perpres 30/2005)
- d) Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Penyesuaian dari Lampiran III tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Perpres 30/2005)

Lampiran IB Kebijakan dan Strategi 5 (Lima) Bidang Pemulihan

- a) Perumahan dan Permukiman (Penyesuaian dari sebagian Lampiran IV tentang Perumahan dan Infrastruktur Perpres 30/2005)
- b) Infrastruktur (Penyesuaian dari sebagian Lampiran IV Tentang Perumahan dan Infrastruktur Perpres 30/2005)
- c) Perekonomian (Penyesuaian dari Lampiran V tentang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Perpres 30/2005)
- d) Sosial Kemasyarakatan (Penyesuaian dari Lampiran VII tentang Pendidikan dan Kesehatan serta Lampiran VIII tentang Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Perpres 30/2005)
- e) Kelembagaan dan Hukum (Penyesuaian dari sebagian Lampiran VI tentang Sistem Kelembagaan Daerah, Lampiran IX tentang Hukum, dan Lampiran X tentang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat Perpres 30/2005)

Lampiran IC Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung

- a) Tata Kelola dan Pengawasan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran XI tentang Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan Perpres 30/2005)
- b) Pendanaan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku XII tentang Pendanaan Perpres 30/2005)

Tabel 3. 1
Perubahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk

Kebijakan dan Strategi Perpres 30/2005	Kebijakan dan Strategi Perpres 47/2008
1. Buku Utama 2. Tata Ruang dan Pertanahan 3. Lingkungan dan SDA 4. Infrastruktur dan Perumahan 5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan 6. Sistem Kelembagaan Daerah 7. Pendidikan dan Kesehatan 8. Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia 9. Hukum 10. Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) 11. Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan 12. Pendanaan	Kebijakan dan Strategi Utama 1. Latar Belakang 2. Umum 3. Tata Ruang dan Pertanahan 4. Lingkungan Hidup dan SDA Kebijakan dan Strategi 5 bidang pemulihan 1. Perumahan dan Permukiman 2. Infrastruktur 3. Perekonomian 4. Sosial Kemasyarakatan 5. Kelembagaan dan Hukum Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung 1. Tata Kelola dan Pengawasan 2. Pendanaan

Sumber : Lampiran I Perpres 47/2008

III.1.2.3 Lampiran II (Sasaran)

Penyesuaian sasaran dipengaruhi oleh situasi dimana program dan kegiatan yang disusun dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan atas informasi yang bersifat terbatas tanpa dilandasi wawasan penataan ruang dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu sasaran fisik program rencana induk dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah, sedangkan sasaran kegiatan non fisik yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat disesuaikan menurut kajian lapangan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyesuaian sasaran terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu:

1. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan;
2. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan;
3. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan;
4. tidak terdapat sasaran dalam Rencana Induk, tetapi perlu dilaksanakan.

Awalnya pada Perpres 30/2005 ada 9 (sembilan) bidang, kemudian sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdapat dalam Perpres 47/2008 menjadi 5 (lima) bidang pemulihan dengan tujuan untuk kemudahan pengelolaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu :

1. Lampiran IIA : Perumahan dan Permukiman, yang terdiri dari sub bidang perumahan, tata ruang, dan pertanahan;
2. Lampiran II B : Infrastruktur, yang terdiri dari sub bidang perhubungan, jalan dan jembatan, terminal dan LLAJ, pos dan telematika, energi dan kelistrikan, sumberdaya air, bangunan publik, pemeliharaan infrastruktur, dan IREP (Infrastructure Reconstruction Enabling Program);
3. Lampiran II C : Perekonomian, yang terdiri dari sub bidang pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan), sub bidang perikanan, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang pengembangan usaha (industri, perdagangan, koperasi, dan UKM, serta pariwisata)

4. Lampiran II D : Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri dari sub bidang pendidikan, kesehatan dan peran perempuan (pendidikan, kesehatan, peranan perempuan, kependudukan dan keluarga berencana); serta sub bidang agama sosial dan budaya (agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga)
5. Lampiran II E : Kelembagaan dan Hukum, yang terdiri dari sub bidang kelembagaan daerah, hukum, dan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M);

Tabel 3. 2
Perubahan Sasaran Rencana Induk

Sasaran Perpres 30/2005	Sasaran Perpres 47/2008
1. Tata Ruang dan Pertanahan	1. Perumahan dan Permukiman
2. Lingkungan dan SDA	2. Infrastruktur
3. Infrastruktur dan Perumahan	3. Perekonomian
4. Ekonomi dan Ketenagakerjaan	4. Sosial Kemasyarakatan
5. Sistem Kelembagaan Daerah	5. Kelembagaan dan Hukum
6. Pendidikan dan Kesehatan	
7. Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	
8. Hukum	
9. Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan	

Sumber : Lampiran II Perpres 47/2008

III.2 Perubahan Anggaran Rencana Induk

III.2.1 Sumber Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi

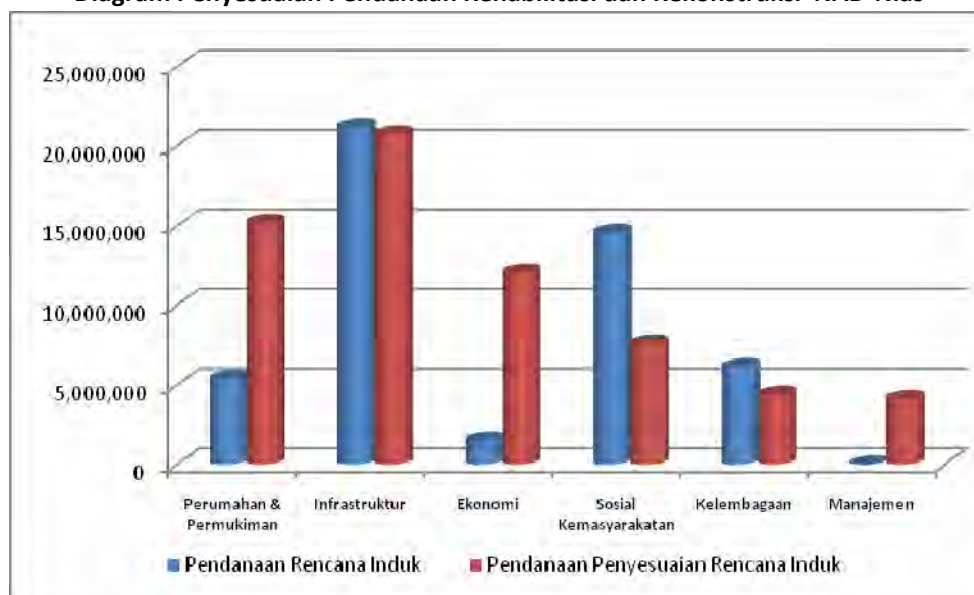
Berdasarkan rencana induk kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp. 48,7 triliun, namun setelah penyesuaian dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 64 triliun. Melonjaknya kebutuhan pendanaan ini diakibatkan meningkatnya kebutuhan nyata rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pada bidang perumahan. Misalnya Kebutuhan nyata rekonstruksi perumahan meningkat sebanyak 140 ribu unit dari 90 ribu unit yang direncanakan di rencana induk. Hal yang sama terjadi juga pada bidang ekonomi, dimana yang direncanakan dalam rencana induk baru sebatas rehabilitasi asset dan belum pada pemberdayaan keterpurukan ekonomi akibat bencana. Faktor inflasi juga sangat berpengaruh. Inflasi yang terjadi mengakibatkan *unit cost* dari setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi menjadi berlipat-lipat.

Tabel 3. 3
Penyesuaian Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Kegiatan	Pendanaan Rencana Induk (Rp Juta)	Penyesuaian Pendanaan (Rp Juta)		
		APBN	Non APBN	Total
Perumahan dan Permukiman	5,384,900	8,188,225	6,997,524	15,185,749
Infrastruktur	21,208,700	13,240,507	7,492,725	20,733,232
Sosial Kemasyarakatan	14,564,000	3,867,559	3,708,427	7,575,986
Ekonomi	1,499,200	3,014,832	9,052,683	12,067,515
Kelembagaan	6,111,000	1,889,609	2,483,624	4,373,233
Manajemen	-	2,081,770	2,027,887	4,109,657
Total	48,767,800	32,282,502	31,762,870	64,045,372

Sumber : Lampiran 1 Perpres 47 tahun 2008

Diagram 3. 1
Diagram Penyesuaian Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias



Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

III.2.1.1 Pendanaan BRR NAD-Nias

Perkiraan kebutuhan pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat adanya penyesuaian sasaran program dan kegiatan, mencakup pendanaan yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. Pendanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari APBN berlaku hingga tahun anggaran 2009, sedangkan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari non-APBN disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pendanaannya yaitu dengan memperhatikan kesepakatan dengan pihak pemberi bantuan selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2012.

Berdasarkan perhitungan kembali atas kebutuhan pendanaan (*need assessment*) yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia (World Bank) pada akhir 2007, diperoleh perkiraan angka kebutuhan USD 7.1 miliar (setara Rp. 64 triliun). Perhitungan kebutuhan pendanaan dan anggaran ini dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap kerusakan yang bersifat dinamis, yaitu:

1. Pengaruh inflasi dimana Pasca bencana wilayah Aceh dan Nias telah mengalami inflasi tinggi yang pada puncaknya (di bulan Januari 2006) mencapai 40% dan perlu diperkirakan perkembangannya.
2. Perlu dimasukkan biaya pertanahan seperti biaya Pembebasan tanah untuk pembangunan kembali dan relokasi, biaya Pematangan lahan mengingat lahan yang dibebaskan belum siap bangun, dan Biaya administrasi pensertifikatan tanah dan restorasi/penggantian sertifikat atas tanah yang hilang/musnah.
3. Peningkatan harga satuan dan volume bangunan perumahan/ permukiman dan infrastruktur. Dimana terdapat tambahan jumlah unit rumah yang harus dibangun kembali (rekonstruksi dan direhabilitasi; tambahan harga satuan rumah, akibat spesifikasi teknis yang lebih tinggi; tambahan harga satuan dari berbagai kegiatan pembangunan kembali infrastruktur dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya; dan Biaya prasarana utilitas lainnya.
4. Adanya kebijakan tambahan; "Membangun kembali lebih baik seluruh sarana prasarana infrastruktur publik (build-back better)". Kelima, harga satuan, manajemen perencanaan, desain, supervisi dan biaya overhead belum diperhitungkan pada rencana induk.

Kebutuhan pendanaan bidang perumahan meningkat dari sekitar Rp. 5 triliun yang direncanakan menjadi sekitar Rp. 15 triliun, kebutuhan pendanaan bidang infrastruktur menjadi sebesar Rp. 20 triliun, kebutuhan pendanaan bidang sosial kemasyarakatan tidak sebesar yang direncanakan yaitu Rp. 7,5 triliun, kebutuhan bidang ekonomi meningkat dari sekitar Rp.1,5 triliun dalam rencana induk menjadi sekitar Rp. 12 triliun, kebutuhan bidang Kelembagaan lebih sedikit dari yang direncanakan yaitu sekitar Rp. 4 triliun. Adapun secara total, kebutuhan penyesuaian pendanaan meningkat sebesar Rp. 16 triliun atau melonjak 30 persen.

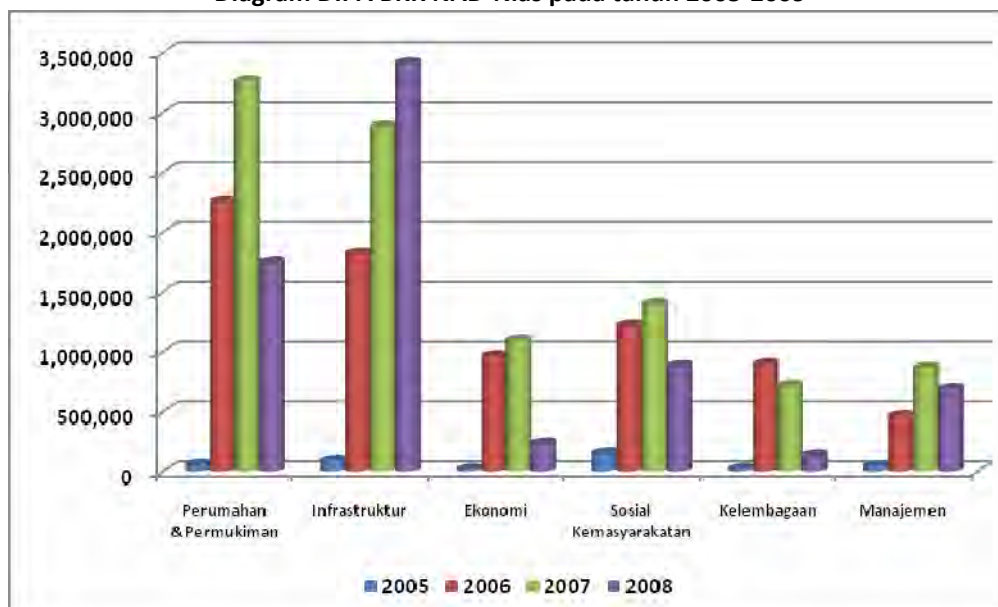
Penyesuaian dana rehabilitasi rekonstruksi sebesar Rp. 64 triliun terdiri dari dana APBN (On-Budget) dan dana Non-APBN (Off-Budget). Dana APBN adalah dana yang masuk ke dalam DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009 yaitu sebesar Rp. 32 triliun, sedangkan dana Non-APBN berdasarkan komitmen adalah sebesar Rp. 31,7 triliun. Adapun rincian DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 4
DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2008

Bidang Kegiatan	Rencana Induk (Rp Juta)	APBN (Rp Juta)			
		2005	2006	2007	2008
Perumahan	5.384.900	64.399	2.259.255	3.264.490	1.752.436
Infrastruktur	21.208.700	96.042	1.827.479	2.884.490	3.413.532
Sosial Kemasyarakatan	14.564.000	152.055	1.223.192	1.399.755	882.908
Ekonomi	1.499.200	24.631	964.253	1.104.581	235.942
Kelembagaan	6.111.000	28.075	898.421	719.135	133.227
Manajemen		49.461	465.410	866.899	689.175
Total	48.767.800	414.663	7.638.014	10.239.350	7.000.401

Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

Diagram 3. 2
Diagram DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009



Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

Pendanaan untuk pemulihan sejumlah Rp 64 trilyun (USD 7,4 milyar) sudah dikomitmenkan untuk proses Pemulihan di berbagai sektor di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Asesmen kerusakan dan

kehilangan untuk proses Pemulihan Aceh saja (belum termasuk Nias) mencapai sekitar Rp. 40 trilyun ($\pm$ USD 4,5 milyar). Sebaran kerusakan dan kehilangan itu meliputi 22 persen di sektor publik dan 78 persen di sektor privat. Prakiraan pendanaan yang diperhitungkan, bagaimanapun, hal ini tertuju pada kerusakan yang harus rehabilitasi maupun penggantian asset fisik dan belum termasuk pada membangun kembali wilayah, masyarakat, dan Pemda. Melalui dukungan pendanaan Pemerintah untuk Pemulihan Aceh-Nias (*on-budget*), serta masyarakat nasional dan internasional melalui Donor (*off-budget*), program Pemulihan telah dapat dilanjutkan. Pendanaan *off-budget* telah mencapai komitmen sekitar Rp. 35 trilyun, dan realisasinya sekarang sudah mencapai sekitar Rp. 22,85 trilyun. Adapun melalui saluran *on-budget*, baik yang *on-* maupun *off-treasury*, termasuk di dalamnya berupa pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), tercatat komitmen sekitar Rp. 32 trilyun, dan realisasinya sekarang sudah mencapai sekitar Rp. 23 trilyun. Tentunya, ini merupakan capaian pendanaan yang amat menggembirakan. Adapun persentase alokasi untuk masing-masing sektor pemulihan yaitu:

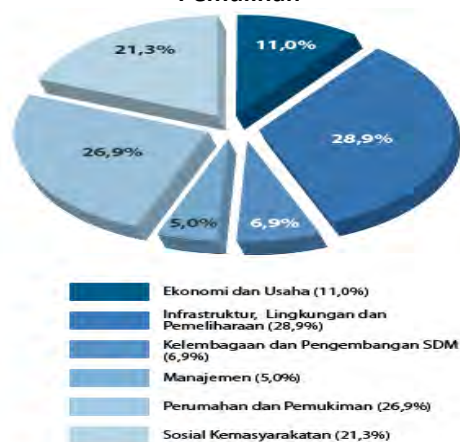
- 26,9 % untuk pemulihan Perumahan dan Permukiman
- 28,9 % untuk pemulihan Infrastruktur, Lingkungan, Pemeliharaan
- 11,09 % untuk pemulihan Ekonomi dan Usaha
- 21,3 % untuk pemulihan Sosial Kemasyarakatan
- 6,9 % untuk pemulihan Kelembagaan dan Pengembangan SDM, serta
- 5,09 % untuk pengelolaan Manajemen.

Alokasi diatas dapat diilustrasikan pada Diagram 3.3 berikut:

Alokasi anggaran pada TA 2008 adalah sebesar Rp. 10,8 trilyun ($\pm$ USD 1,2 milyar) yang merupakan kombinasi dari dua skema Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA Murni Rp. 7 trilyun ($\pm$ USD 778 juta) serta DIPA Luncuran Rp3,8 trilyun. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (Rp. 6,57 trilyun), Pinjaman Luar Negeri (Rp. 482,16 milyar), Hibah (Rp. 3,2 trilyun), serta Rupiah Murni Pendamping (Rp. 633,77 milyar). Atas amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2/2005, sebagian besar penyaluran dana Pemulihan yang tercatat dalam DIPA (*on-budget on-treasury*) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara-Khusus (KPPN-K) di Banda Aceh. KPPN-K termaksud dibentuk oleh Departemen Keuangan. Kebijakan pengalokasian anggaran DIPA Murni 2008 (Rp. 7 trilyun) diarahkan dalam tiga saluran prinsip, yakni:

1. sebesar 84,11 persen atau sekitar Rp. 5,9 trilyun ($\pm$ USD 654 juta) untuk peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah Aceh-Nias;
2. sebesar 10,89 persen atau sekitar Rp. 762 milyar ($\pm$ USD 85 juta) untuk penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pemerintahan, dan transisi pembangunan Aceh-Nias;

Diagram 3.3
Alokasi Pendanaan Masing-Masing Sektor Pemulihan



Sumber : Laporan Semesteran BRR NAD-Nias, 2008

3. sebesar 5 persen atau sekitar Rp. 350 milyar ($\pm$ USD 39juta) untuk program penyelenggaraan pimpinan, kenegaraan, dan pemerintahan.

Apabila ditinjau dari perspektif besaran anggaran yang didistribusikan untuk Aceh dan Nias, maka dari total anggaran TA 2008 (Rp. 10,8 trilyun) yang tersedia, Aceh mendapatkan bagian Rp. 9,6 trilyun ($\pm$ USD 1 milyar) dan Nias Rp. 1,2 trilyun ($\pm$ USD 143 juta).

Untuk kepulauan Nias secara umum terdapat 2 kategori dana yang dikoordinasikan dan dilaksanakan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. *Pertama*, dana bantuan yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut sebagai sumber dana *on-budget*. Sumber dana melalui APBN (*on-budget*) ini dilaksanakan secara langsung oleh BRR Perwakilan Nias, dengan pengecualian pada tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka *exit strategy* BRR di Nias. *Kedua*, dana bantuan yang secara langsung dilaksanakan oleh berbagai negara/lembaga donor yang disebut sebagai sumber dana *off-budget* (Non APBN). Sejak 2005 hingga 2009 total dana yang sudah dan akan dilaksanakan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Nias mencapai lebih dari Rp. 5,663 trilyun. Sebesar lebih dari Rp 3,472 trilyun dari total dana tersebut berasal dari sumber dana *on-budget* dan sisanya sebanyak Rp. 2,191 trilyun merupakan anggaran *off-budget*¹.

Meskipun masa tugas BRR berakhir pada April 2009, namun tahun 2008 adalah tahun terakhir pelaksanaan program BRR. Selain melaksanakan program yang telah dicanangkan, tahun 2008 harus merupakan tahun dimana BRR menyelesaikan program-program yang masih terbengkalai. Target utama yang harus dicapai adalah semua program dan proyek yang telah dilaksanakan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi harus terselesaikan dengan mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tahun 2008 juga merupakan tahun transisi pelaksanaan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan BRR ditahun 2008 harus menjamin terjadinya transisi yang mulus secara administrasi dan fisik dari BRR kepada Pemerintah Daerah. Alokasi kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 dilaksanakan oleh K/L yang terdiri dari 6 K/L sebesar Rp. 1,78 trilyun dan Pemda NAD dan Kep. Nias sebesar Rp. 1,63 trilyun, sedangkan BRR pada tahun 2009 hanya menyelesaikan tugas administratif dan berbagai pelaporan lainnya yang dialokasikan sebesar Rp. 222 milyar.

III.2.1.2 Pendanaan Donor/NGO

A. Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur

Total komitmen lembaga donor dan NGO untuk bidang pemulihan infrastruktur, perumahan dan permukiman per Oktober 2008 tercatat sebesar USD 1,63 miliar, dengan alokasi komitmen terbesar pada sector pembangunan perumahan permukiman sekitar USD 872 juta atau lebih dari 50 persen komitmen pendanaan. Kecenderungan perhatian lembaga donor/NGO terhadap perumahan permukiman dibandingkan sector infrastruktur (jalan, jembatan, prasarana lainnya) dapat dimaklumi mengingat penyediaan prasarana yang merupakan barang public tsb memang seharusnya menjadi domain pemerintah. Adapun Komitmen pendanaan pada sector infratraktur transportasi tercatat sebesar USD 359 juta.

Hingga bulan oktober tahun 2008 telah terserap 67,1 persen dari keseluruhan komitmen lembaga donor/NGO pada sector perumahan permukiman dan infrastruktur public. Penyerapan terbesar khususnya pada bidang irigasi dan pengendalian banjir sebesar 96,3 persen. Realisasi penyerapan pendanaan pada bidang perumahan permukiman sebesar 71,1 persen, sedangkan pada bidang transportasi 44 persen. Belum optimalnya penyerapan ini mengisyaratkan pembangunan

¹ Berdasarkan data yang termuat di RAN Database, komitmen dalam format Project Concept Note yang tercatat per 31 Oktober 2008 adalah sebesar Rp 2,191T. Nilai pada Project Concept Note pada beberapa kasus tidak selalu sama dengan komitmen yang dinyatakan secara formal.

rekonstruksi pada kedua bidang pemulihan utama ini masih akan terus dilanjutkan di tahun depan (2009).

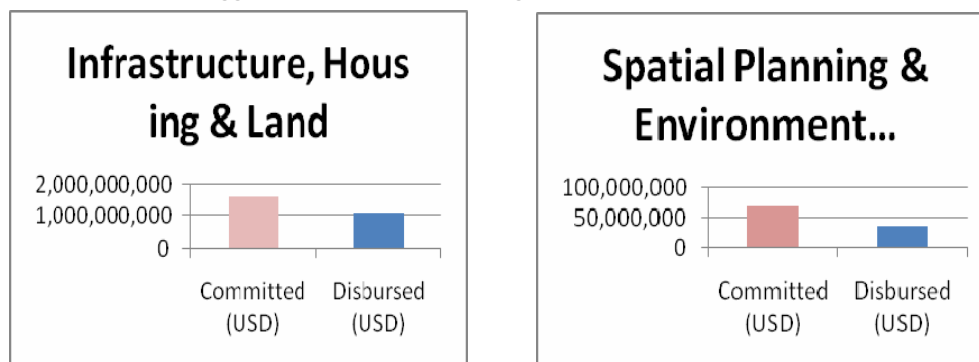
Tabel 3. 5
Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang pemulihan perumahan dan infrastruktur

Sector / SubSector	Committed (USD)	Disbursed (USD)	
Infrastructure, Housing & Land			
All SubSectors - Infrastructure, Housing & Land	69.571.981	64.411.066	92,6%
Fuel and Energy	3.164.299	1.353.953	42,8%
Housing Development	872.114.731	619.763.805	71,1%
Irrigation and Flood Control/Coastal Protection	17.044.983	16.410.120	96,3%
Other Housing and Community Amenities	24.027.563	17.391.457	72,4%
R & D Housing and Community Amenities	3.628.526	2.607.879	71,9%
Street Lighting	74.074	74.074	100%
SubSector to be defined - Infrastructure, Housing & Land	17.991.024	13.408.539	74,5%
Transportation	359.517.387	158.073.626	44,0%
Waste Management	25.320.299	13.661.443	54,0%
Waste Water Management	50.084.951	36.214.474	72,3%
Water Supply	189.285.505	151.620.163	80,1%
Total	1.631.825.323	1.094.990.599	67,1%
All SubSectors - Spatial Planning & Environment Protection			
All SubSectors - Spatial Planning & Environment Protection	19.322.578	11.983.680	62,0%
Conservation of Natural Resources	21.942.539	5.634.239	25,7%
Environment Protection	1.763.687	60.211	3,4%
R & D Environmental Protection	9.423.431	6.286.916	66,7%
Spatial Planning	14.226.569	10.582.156	74,4%
Spatial Planning and Agrarian Affairs	810.505	657.106	81,1%
SubSector to be defined - Spatial Planning & Environment Protection	1.459.837	1.360.169	93,2%
Total	68.949.146	36.564.477	53,0%

Sumber : RAN Database, Oktober 2008

Perhatian lembaga donor/NGO pada bidang konservasi lingkungan dan perencanaan tata ruang juga cukup besar. Tercatat total komitmen pendanaan pada sector ini sebesar USD 68,9 juta, dimana per Oktober 2008 telah terserap anggaran sebesar USD 36,5 juta atau sekitar 53 persen.

Diagram 3. 4
Grafik Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur



Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

B. Pemulihan Perekonomian

Aspek pemulihan (recovery) perekonomian masyarakat di provinsi NAD dan kepulauan Nias meliputi sektor primer (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan, koperasi dan UKM) serta aspek

ketenagakerjaan. Program dan kegiatan yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari masyarakat dunia melalui sumbangan NGO dan Donor tercatat melalui RAN Database sebagai berikut.

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Donor/NGO
Bidang Perekonomian

Sector / SubSector	Committed (USD)	Disbursed (USD)	
Economic Development			
Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime	165.610.409	109.341.488	66,0%
All SubSectors - Economic Development	92.045.676	30.249.837	32,9%
Business Development	115.635.417	79.703.856	68,9%
Development of Tourism and Culture	560.137	583.484	104,2%
Industry and Construction	8.742.486	7.295.968	83,5%
Labor	32.199.464	27.968.050	86,9%
Other Economic Affairs	18.771.843	14.156.584	75,4%
Other Environmental Protection Affairs	4.524.680	2.106.189	46,5%
Other Tourism and Culture Affairs	16.000	16.000	100,0%
Publishing and Broadcasting Services	506.198	293.947	58,1%
R & D Economic Affairs	165.179	6.255	3,8%
R & D Tourism and Culture	42.397	42.397	100,0%
SubSector to be defined - Economic Development	13.394.049	6.575.471	49,1%
Total	452.213.935	278.339.526	61,6%

Sumber : RAN Database, Oktober 2008

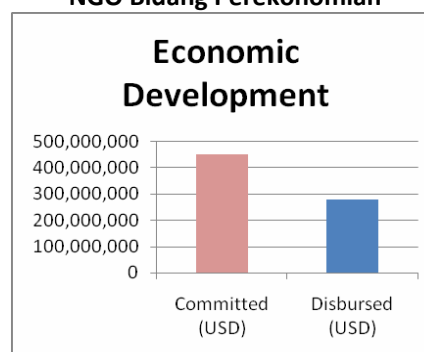
Total komitmen lembaga donor dan NGO untuk pemulihan perekonomian per Oktober 2008 tercatat sebesar USD 452 juta, dengan alokasi komitmen terbesar pada pemulihan sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan sebesar USD 165 juta. Komitmen pada sektor pengembangan usaha sebesar 115 juta USD, sektor tenaga kerja USD 32 juta, sektor industri dan perdagangan USD 9 juta, sektor pariwisata dan budaya USD 1,9 juta (0,37 persen) dan sektor lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat sebesar USD 92 juta.

Hingga bulan Oktober 2008, pada sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan telah terserap komitmen pendanaan sebesar USD 109 juta atau sebesar 66 persen dari keseluruhan total komitmen awal. Penyerapan komitmen pada sektor pengembangan usaha sebesar USD 79 juta (68,9 persen), sektor tenaga kerja USD 27 juta (86,9 persen), sektor industri dan perdagangan USD 7,2 juta (83 persen). Secara keseluruhan per Oktober 2008 penyerapan komitmen pendanaan untuk keseluruhan bidang pemulihan perekonomian adalah USD 279 juta dari komitmen awal keseluruhan sebesar USD 452 juta atau sebesar 61,6 persen.

C. Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Total komitmen lembaga donor dan NGO untuk sub bidang pemulihan pendidikan per Oktober 2008 tercatat sebesar USD 455 juta, utamanya pada pembangunan gedung sekolah dasar dan sekolah menengah dan pengadaan peralatan meubellair. Tercatat komitmen pada pendidikan

Diagram 3. 5
Realisasi Anggaran Donor/
NGO Bidang Perekonomian



Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

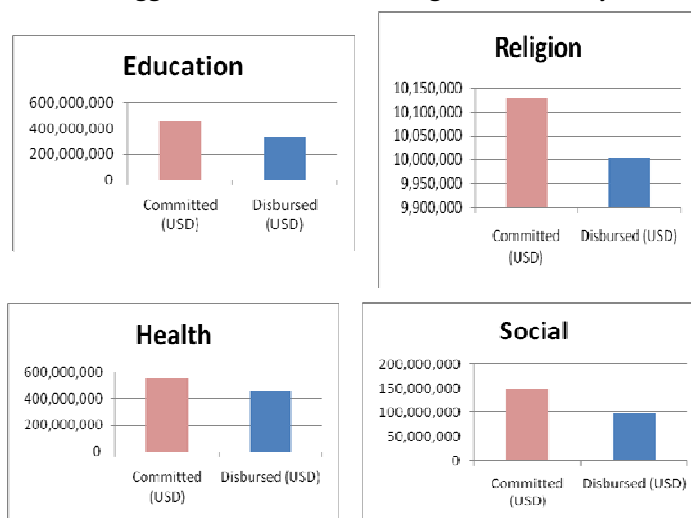
dasar sebesar USD 237 juta atau lebih dari 50 persen total komitmen. Namun, hingga bulan oktober tahun 2008 baru terserap 72,8 persen atau USD 175 juta dari keseluruhan komitmen lembaga donor/NGO pada sub bidang pemulihan pendidikan.

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Donor/NGO
Bidang Sosial Kemasyarakatan

Sector / SubSector	Committed (USD)	Disbursed (USD)	
Education			
All SubSectors - Education	53.698.038	43.894.534	81,7%
Government Official Education	5.181.574	4.393.935	84,8%
Non-formal and Informal Education	14.935.096	7.726.762	51,7%
Other Education Affairs	21.348.625	6.469.275	30,3%
Pre-primary Education	9.483.657	8.854.027	93,4%
Primary Education	237.706.126	175.340.126	73,8%
R & D Education	95.556	74.377	77,8%
Religious Education	9.645.322	8.963.383	92,9%
Secondary Education	79.798.459	53.904.991	67,6%
SubSector to be defined - Education	5.109.388	4.636.175	90,7%
Subsidiary Services to Education	5.019.864	3.991.001	79,5%
Tertiary Education	13.922.210	13.723.342	98,6%
Sub Total	455.943.915	331.971.928	72,8%
Health			
All SubSectors - Health	122.822.509	91.889.092	74,8%
Family Planning	3.615.695	2.258.006	62,5%
Individual Health Services	10.807.626	7.850.945	72,6%
Medical Products, Appliances and Equipment	31.098.156	26.586.835	85,5%
Other Health Affairs	178.844.274	177.083.234	99,0%
Public Health Services	198.758.484	143.279.884	72,1%
R & D Health Affairs	6.576.474	2.902.489	44,1%
SubSector to be defined - Health	6.458.476	6.380.176	98,8%
Sub Total	558.981.694	458.230.661	82,0%
Religion			
Advancement of Religious Life	4.798.618	4.761.174	99,2%
All SubSectors - Religion	1.205.622	1.194.979	99,1%
Harmony in Religious Life	794.752	772.752	97,2%
Other Religious Affairs Services	1.612.426	1.561.439	96,8%
R & D Religious Affairs	644.500	644.500	100,0%
SubSector to be defined - Religion	1.072.664	1.067.561	99,5%
Sub Total	10.128.582	10.002.405	98,8%
Social			
All SubSectors - Social	24.122.428	19.186.264	79,5%
Empowerment of Women	15.134.682	11.917.394	78,7%
Housing Assistance	11.587.380	8.963.354	77,4%
Information and Social Guidance	10.440.531	6.330.979	60,6%
Old Age Protection and Services	1.253.120	981.044	78,3%
Protection and Social Services to Children and Family	71.598.888	39.816.335	55,6%
Protection and Social Services to Family of Heroes, Veterans and Freedom Fighters	10.000		0,0%
R & D Social Protection	948.011	939.505	99,1%
Sickness and Disability Protection and Services	329.486	267.295	81,1%
Social Security and Assistance	4.533.976	2.787.654	61,5%
SubSector to be defined - Social	3.179.738	2.756.748	86,7%
Youth and Sports	3.827.479	2.734.868	71,5%
Sub Total	146.965.719	96.681.440	65,8%

Sumber : RAN Database, Oktober 2008

Diagram 3. 6
Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Sosial Kemasyarakatan



Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

Untuk sub bidang pemulihan kesehatan per Oktober 2008 tercatat komitmen sebesar USD 558 juta, utamanya pada penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat, rehabilitasi dan pembangunan puskesmas yang rusak, serta pengadaan peralatan meubellair. Tercatat komitmen pada penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat sebesar USD 198 juta atau sekitar sepertiga dari total keseluruhan komitmen. Hingga bulan oktober tahun 2008 untuk sub bidang pemulihan kesehatan telah terealisasi sebesar 82 persen dari keseluruhan komitmen pendanaan lembaga donor/NGO.

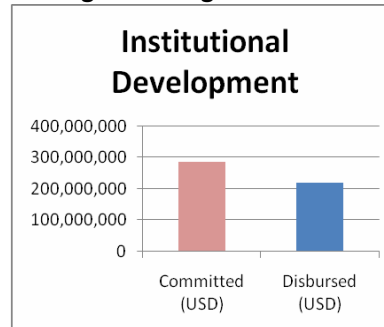
Untuk sub bidang pemulihan agama per Oktober 2008 tercatat komitmen sebesar USD 10 juta, utamanya untuk peningkatan kehidupan beragama sebesar USD 4,7 juta atau hampir 50 persen keseluruhan komitmen lembaga donor/NGO pad sub bidang pemulihan keagamaan. Hingga bulan oktober tahun 2008, komitmen pendanaan untuk sub bidang pemulihan agama telah terealisasi sebesar 98,8 persen dari keseluruhan komitmen pendanaan lembaga donor/NGO.

Untuk sub bidang pemulihan sosial per Oktober 2008 tercatat komitmen sebesar USD 146 juta, utamanya pada penyediaan bantuan sosial untuk keluarga dan anak-anak kepada masyarakat, yaitu sebesar USD 71 juta. Hingga bulan oktober tahun 2008 untuk sub bidang pemulihan sosial telah terealisasi sebesar 65,8 persen dari keseluruhan komitmen pendanaan lembaga donor/NGO.

D. Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Untuk sub bidang pemulihan kelembagaan per Oktober 2008 tercatat komitmen sebesar USD 286 juta, utamanya untuk peningkatan kapasitas pegawai pemerintah dan bantuan bencana dalam rangka pembangunan masyarakat (community development). Hingga bulan oktober tahun 2008, komitmen pendanaan untuk sub bidang pemulihan kelembagaan telah terealisasi sebesar 76,6 persen dari keseluruhan komitmen pendanaan lembaga donor/NGO.

Diagram 3. 7
Realisasi Anggaran Donor/NGO
Bidang Kelembagaan dan Hukum



Sumber : Analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas, 2008

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum

Sector / SubSector	Committed (USD)	Disbursed (USD)	
Institutional Development			
All SubSectors - Apparatus Development	46.719.165	35.203.448	75,4%
Apparatus Development	60.293.853	40.066.654	66,5%
Basic Research and Development of Science and Technology	4.348.463	322.893	7,4%
Community Development	26.998.493	20.761.502	76,9%
Disaster Relief	39.627.865	34.341.606	86,7%
Foreign Aid	1.037.289	214.504	20,7%
General Services	16.214.546	10.358.439	63,9%
Judicature	4.358.107	3.763.173	86,3%
Legal Affairs	20.992.291	16.829.004	80,2%
Other Defense Affairs	300.000	-	0,0%
Other Government Public Services	25.806.110	21.945.360	85,0%
Other Legal Affairs, Public Order and Safety	21.232.400	21.212.798	99,9%
R & D Defense	6.250.000	6.250.000	100,0%
R & D Government Public Services	4.656.647	2.754.722	59,2%
Regional Development	2.260.572	1.418.072	62,7%
SubSector to be defined - Apparatus Development	4.921.446	3.658.035	74,3%
SubTotal	286.017.247	219.100.210	76,6%

Sumber : RAN Database, Oktober 2008

III.2.2 Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi Pendanaan

Sumber Pendanaan rehabilitasi rekonstruksi terbagi dua, yaitu dana APBN (*on-budget*) dan dana Non-APBN (*off-budget*).

Tabel 3. 9
Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

<i>on-budget</i>	<i>off-budget</i>
- Alokasi dana APBN dapat bersumber dari (i) dana rupiah murni, (ii) hibah luar negeri, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, (iii) realokasi atau pemrograman ulang (<i>reprogramming</i>) dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, (iv) pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); serta (v) penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri berdasarkan <i>moratorium</i> dari Paris Club. - Dana rupiah murni yang bisa digunakan antara lain berasal dari dana cadangan umum dan dana dari Departemen/Lembaga yang dapat disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan - Hibah LN berasal dari negara-negara dan lembaga donor yang disalurkan ke dalam APBN. - Dana yang dapat direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (<i>unallocated</i>), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai. - Pinjaman Luar Negeri baru, terutama pinjaman sangat lunak. - Pinjaman lunak bunganya 0%, masa pengembalian 40 tahun, tenggang waktu pembayaran (<i>grace period</i>) selama 10 tahun.	- Sumber dana non APBN adalah sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias secara langsung tanpa melalui neraca anggaran Pemerintah RI. Pengalokasian dana <i>off budget</i> tersebut dilakukan secara langsung oleh lembaga donor internasional/Nasional ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO). - Sumber pendanaan off-budget berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN. - Terdapat sekitar 400 Lembaga Donor dan NGO yang membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hibah yang berasal dari swasta/masyarakat bersumber dari perusahaan, Non Government Organization (NGO), perorangan dan sumber lain. - Dana hibah yang berhasil dihimpun dari swasta/masyarakat sesuai dengan komitmen dari lembaga Donor/ NGO.

Sumber : Lampiran I Perpres 47/2008

Setelah berakhirnya mandat BRR, Sumber pendanaan bagi untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

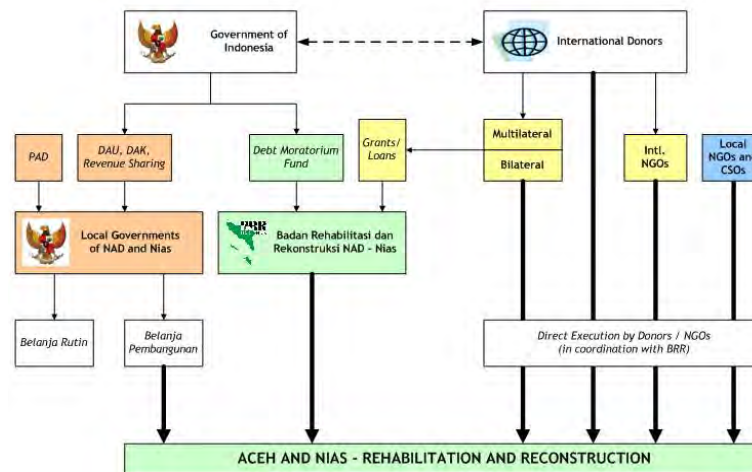
1. DIPA K/L merupakan sumber pendanaan yang diberikan kepada kementerian/Departemen teknis pusat untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi di daerah pasca bencana.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada Pemda di daerah pasca bencana setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Pemda di daerah pascabencana dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur di daerah pascabencana sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah.
5. Dana Tugas Pembantuan adalah Dana dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di daerah pascabencana untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempetanggung jawabkan kepada pemerintah pusat.
6. Dana Otonomi Khusus Provinsi NAD adalah Dana dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di daerah yang ditetapkan sebagai otonomi khusus oleh pemerintah pusat.

PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- Mekanisme dan prosedur pendanaan rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait lainnya
- Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran; (ii) percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh (iii), kebijakan luncuran dan (iv) kebijakan pengelolaan dana rupiah murni melalui *'Trust Fund'*
- Pembentukan Dana *Trust Fund* untuk menjamin agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang termasuk kategori kegiatan prioritas utama dapat mencapai sasaran/target dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan. Izin ini didasarkan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2007.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian mempunyai dokumen anggaran (DIPA).
- Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada dalam APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi NAD dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, Sumatera Utara.

Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah, ditampilkan dalam bentuk bagan 3.3:

Bagan 3. 3
Kerangka Umum Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber : Lampiran 1 Perpres 47/2008

III.2.2.1 Pengelolaan Hibah/Pinjaman dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi

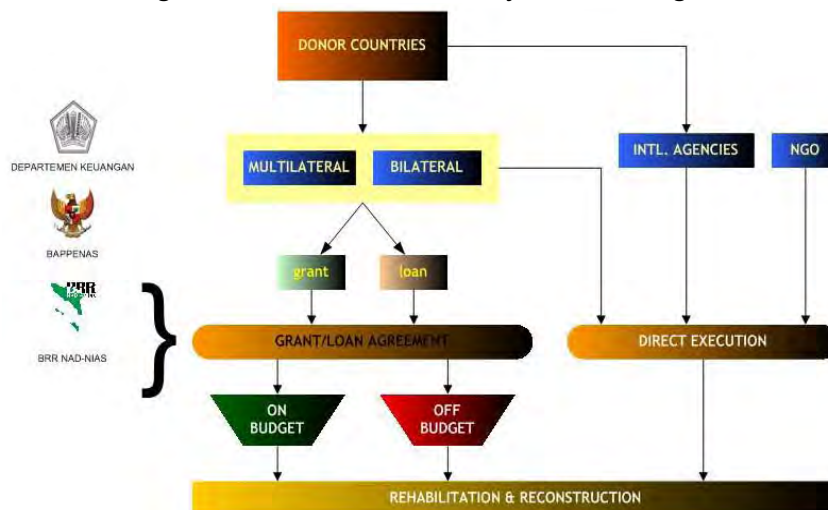
Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan berbagai donor/lender untuk memperpendek prosedur dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah dapat dilaksanakan langsung oleh pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bapel BRR NAD -Nias).

Dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan dicatatkan (registered) kepada Departemen Keuangan, dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpah-tindih kegiatan.

Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program sebagai berikut :

Bagan 3. 4
Bagan Alir Mekanisme Hibah/Pinjaman Luar Negeri



Sumber : Lampiran 1 Perpres 47/2008

III.2.2.2 Pengelolaan Khusus: Mekanisme Anggaran Pengesahan (On-Budget – Off-Treasury)

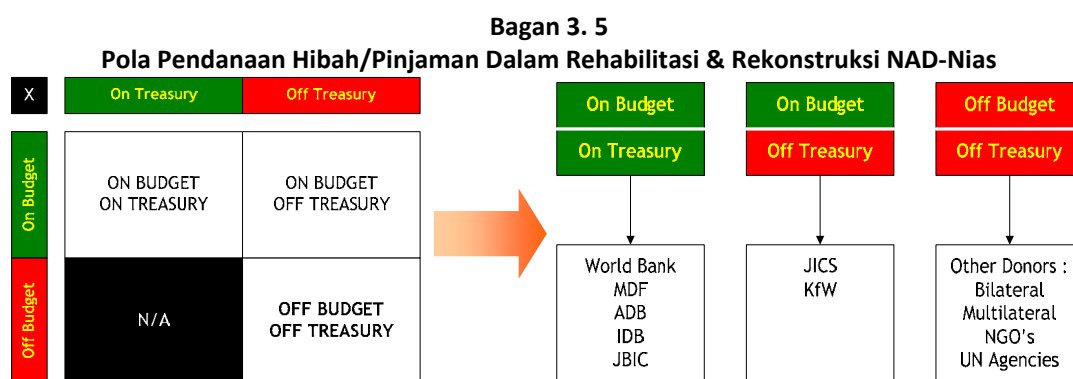
Dalam konteks pembangunan pascabencana, kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci bagi keberhasilan implementasi.

Banyak lembaga donor (terutama yang bersifat bilateral) ingin agar kontribusi mereka dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memperoleh pengakuan administrative (dicatat dalam anggaran pemerintah), namun di lain pihak mereka ingin adanya kecepatan dan fleksibilitas dalam implementasinya mengingat kondisi operasi di Aceh dan Nias di luar kondisi normal.

Dalam konteks ini pendekatan untuk menerapkan ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman/Hibah Luar negeri, memerlukan mekanisme tersendiri.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah pro-aktif dengan memberikan fleksibilitas dalam pencatatan/pencantuman hibah luar negeri untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, melalui peraturan-peraturan yang tertuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 48/2005, No. 47/2006 dan No. 67/2006.

Adanya peraturan tersebut, memberikan keleluasaan bagi BRR untuk tetap melaporkan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam dokumen anggaran melalui mekanisme pengesahan, tanpa mengesampingkan arti penting transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaannya. Berikut adalah gambaran pola Pendanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias.



Catatan :

On Budget (tercantum dalam DIPA)

On Treasury (pencairan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan / KPPN-Khusus)

Sumber : Lampiran 1 Perpres 47/2008

III.2.2.3 Kebijakan dan Strategi Pendanaan

Prioritas pendanaan pemerintah berikutnya adalah untuk mengisi kesenjangan (*filling the gap*) untuk menutup kesenjangan sektor/ program/wilayah.

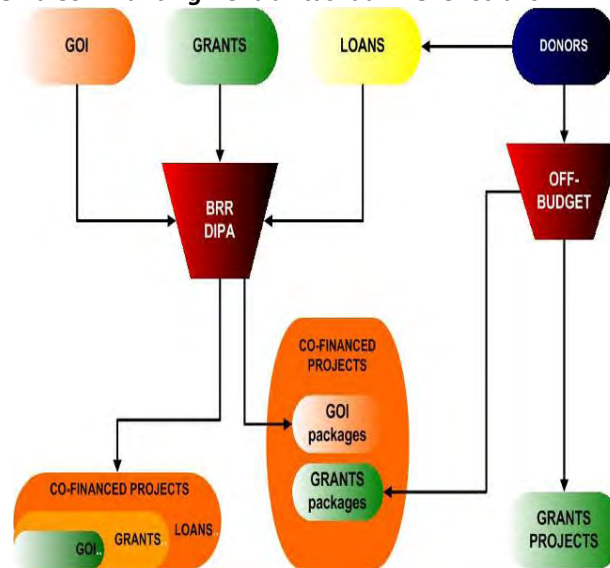
Dalam rangka meningkatkan volume sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah menempuh kebijakan melaksanakan perjanjian pembiayaan bersama (*co-financing*) bersama *Multi Donor Fund* (MDF), melalui proyek-proyek seperti IRFF, SPADA dan KRRP di Nias.

Selain itu, dalam melaksanakan strategi '*filling the gaps*' skema *co-financing* juga telah dilaksanakan dalam skema yang lebih luas, yaitu dengan melaksanakan 2 proyek/kegiatan yang masing-masing saling melengkapi (komplementer).

Dunia internasional menaruh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca bencana, yang antara lain diwujudkan dalam program '*debt to*

reconstruction swap'. Salah satu program ini, berasal dari pemerintah Italia, yang menawarkan potensi *debt-swap* yang mencapai USD 31.1 juta.

Bagan 3. 6
Skema Co-Financing Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias



Sumber : Lampiran 1 Perpres 47/2008

Membentuk Unit Pengelola Dana Masyarakat. Besarnya perhatian swasta/masyarakat/individu terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca bencana, namun secara sendiri-sendiri kontribusi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai suatu proyek. Oleh karena itu Pemerintah membentuk unit *trust fund* yang diberi nama *Recovery Aceh and Nias – Trust Fund* (RAN-TF). Unit khusus ini merupakan jawaban bagi swasta/masyarakat/individu yang ingin berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pascabencana.

Pembentukan *Multi Donor Fund* (*Aceh and Nias Reconstruction Trust Fund*). Multi Donor Fund (MDTF) adalah sebuah mekanisme dimana beberapa negara donor berkumpul dan bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Dasar pemikiran pembentukan *trust fund* adalah agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara *bilateral*.

Kontribusi untuk MDF bersumber dari Komisi Eropa, negara-negara donor individu, dan institusi keuangan multilateral seperti World Bank (WB), dan Asian Development Bank (ADB). MDF menyediakan pendanaan hibah dengan prioritas program rekonstruksi, selain untuk kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi.

Tabel 3. 10
Komitmen dan Kontribusi Multi Donor Fund
Per 30 September 2008

Sumber	Jumlah Komitmen Dalam \$AS	% Jumlah Komitmen
Komisi Eropa*	272,62	39%
Pemerintah Belanda	171,60	25%
Pemerintah Inggris*	73,71	11%
Pemerintah Kanada	25,55	3,7%

Sumber	Jumlah Komitmen Dalam \$AS	% Jumlah Komitmen
Bank Dunia	25,00	4%
Pemerintah Swedia	20,72	3,0%
Pemerintah Norwegia	19,57	2,8%
Pemerintah Denmark	18,03	2,6%
Pemerintah Jerman	13,93	2,0%
Pemerintah Belgia	11,05	1,6%
Pemerintah Finlandia	10,13	1,5%
Bank Pembangunan Asia	10,00	1,4%
Pemerintah Amerika Serikat	10,00	1,4%
Pemerintah Selandia Baru	8,80	1,3%
Pemerintah Irlandia	1,20	0,2%
Jumlah Komitmen	691,92	100%

Sumber : Laporan Kemajuan V Desember 2008 Multi Donor Fund

III.3 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dinamika dan perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka kerangka umum dan acuan yang dipakai dalam pelaksanaan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2009 mengacu kepada Rencana Induk yang telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Isi Perpres 47/2008 pada dasarnya adalah tolok ukur kinerja organisasi BRR sebagai pengemban mandat pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NAD dan Nias. Berdasarkan lampiran Perpres 47/2008 terdapat 5 (lima) bidang pemulihan, yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, social kemasyarakatan, ekonomi dan kelembagaan.

Kebijakan umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Perpres 47/2008 diantaranya adalah:

1. Menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, di luar wilayah bencana sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana induk mengingat Kabupaten/Kota tersebut juga mengalami dampak tidak langsung akibat bencana.
2. Memberikan kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan spesifik atau tertentu yang karena sifatnya memerlukan kecepatan.
3. Memberikan ijin kontrak tahun jamak 2006-2007 dan tahun jamak 2007-2008, sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun anggaran.
4. Melakukan pemutihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007, melalui pemberian ijin kontrak tahun jamak berkaitan dengan DIPA-L 2008.
5. Memberikan kewenangan bagi BRR guna melakukan kegiatan pembebasan tanah yang seharusnya menjadi kewajiban pusat dan pemerintah daerah.
6. Membuat perikatan dan perjanjian yang masa pelaksanaannya melebihi masa tugas BRR dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi proses pengalihan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda.
7. Membentuk badan pengelola dan mengelola dana masyarakat (non-APBN) yang berasal dari donor/ sumbangan.

8. Memberikan pelayanan terpadu dalam kaitan dengan perpajakan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan kegiatan yang terkait dengan pemberian kemudahan bagi bantuan lembaga/perorangan asing,
9. Pembangunan sistem informasi terpadu yang terkait dengan kegiatan lintas sektoral dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapat dana dari APBN dan Non APBN (dari masyarakat/perorangan baik nasional maupun asing).

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dilakukan oleh BRR, Pemda, dan Donor/NGO. Berikut ini akan dibahas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan bidang pemulihan.

III.3.1 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

III.3.1.1 Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Dalam Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perpres Rencana Induk disebutkan bahwa pembangunan kembali perumahan dan permukiman adalah dengan mengutamakan pembangunan permukiman yang mengalami kerusakan akibat bencana dan melengkapinya dengan prasarana dasar yang memadai, selain penyediaan perumahan baik dalam bentuk rehabilitasi perumahan maupun rekonstruksi perumahan.

Relokasi dan rekonstruksi rumah baru, menurut update yang disajikan oleh BRR (dalam e-aceh-nias), jumlah yang telah terbangun sampai Desember 2008 adalah sebanyak 127.402 unit dan jumlah pengungsi yang masih tetap tinggal di barak (belum mendapatkan jatah rumah) sekitar 964 KK. Pada 2008, sekitar 26,3 persen dari anggaran Pemulihan dialokasikan untuk kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang belum selesai. Sekitar 41,4 persen program perumahan didanai pemerintah melalui APBN dan dilaksanakan oleh BRR. Sisanya, *off-budget*, didanai dan dilaksanakan sendiri oleh Donor/ organisasi non pemerintah (non governmental organisation, NGO). Lebih lanjut, pada awal 2008, program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah diluncurkan. Dengan mempertimbangkan masalah distribusi logistik, proses tender dan pengadaan barang, serta survei ulang dan penerbitan dokumen pertanahan, sejauh ini telah melibatkan luasan tanah ± 121.594 bidang. Kesulitan alamiah dalam pengumpulan data mengenai para penerima manfaat yang akurat. Kebutuhan mendesak untuk merumahkan-kembali masyarakat di wilayah dengan tanpa perencanaan tata ruang yang tepat, merupakan ancaman serius terhadap lingkungan - sumberdaya alam dan mitigasi bencananya. Guna mengatasi ancaman itu, dan untuk mempercepat penempatan kembali masyarakat, program pemetaan tanah oleh masyarakat yang didukung para ahli pertanahan, menyepakati batas-batas tanah dan membangun peta pertanahan mereka sendiri melalui suatu mekanisme “Kemufakatan Berbasis Masyarakat”.

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN

1. Bantuan rehabilitasi, diberikan kepada korban yang masih mempunyai rumah atau rumahnya masih bisa dihuni, namun sebagian rusak dan atau memerlukan perbaikan yang dilakukan. Hal ini dilakukan melalui pemberian bantuan dana atau perbaikan rumah.
2. Pembangunan rumah baru (rekonstruksi), dilakukan bagi korban yang kehilangan tempat tinggalnya dan atau rumahnya tidak mungkin dihuni lagi. Terdiri dari 4 (empat) bentuk kebijakan penanganan, yaitu:
 - Pembangunan rumah pada lahan yang sama, diberikan bagi korban yang kehilangan rumah dan lahannya secara teknis layak untuk pembangunan permukiman.
 - Pembangunan kembali rumah pada lahan di lokasi baru (relokasi), diberikan bagi korban yang kehilangan rumah dan lahannya hilang atau secara teknis tidak layak untuk dijadikan permukiman.
 - Bantuan sosial untuk bertempat tinggal, diberikan bagi korban penyewa atau menumpang yang rumah tinggalnya hancur atau rusak akibat bencana.
 - Pembangunan rumah baru yang dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) bagi sebagian masyarakat yang rumahnya rusak/ hancur akibat **adanya konflik**.

Sumber: Perpres 47/2008

Terkait kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), program perumahan telah mendorong terealisasinya “Kepemilikan Bersama atas Tanah” (Joint Land-Titling, JLT). Untuk mengedepankan kemitraan bersama penyedia jasa besar, sedang, dan kecil dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi potensi setempat dan sektor lainnya secara simultan, ditempuh pendekatan pembangunan berbasis kemufakatan masyarakat. Kemajuannya antara lain :

- pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah: rumah baru di lokasi lama/semula 14.000 unit, rumah baru di lokasi baru (relokasi) 79.000 unit, dan rumah baru bagi para penyewa;
- pembangunan PSD di 391 desa dari 900 desa yang direncanakan;
- relokasi (1.233 bidang tanah sedang disertifikatkan dan 360 sertifikat sudah diterbitkan) dan rekonstruksi (telah diterbitkan 119.000-an sertifikat);
- penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta sejumlah dokumen lain seperti Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)/Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan, Perencanaan Desa, Tata Ruang Kecamatan, dan Pedoman Perencanaan Desa.

Penanganan perumahan bagi para penyintas dilakukan melalui upaya:

- rehabilitasi bagi rumah yang masih dapat dihuni, namun untuk menjadi hunian yang layak, masih memerlukan beberapa kelengkapan fungsi;
- pembangunan rumah baru bagi rumah yang rusak, hancur total, atau hilang;
- pembangunan PSD;
- pemetaan dan administrasi pertanahan bagi penyintas yang menghuni rumah;
- penetapan para penyintas yang layak menerima bantuan rumah,
- pembuatan rencana tata ruang.

III.3.1.1.1 Perumahan dan Permukiman

Realisasi bantuan perumahan merupakan kebutuhan paling riil dan dominan. Pembangunan rumah terdiri dari program perbaikan (rehabilitasi) serta pembangunan baru (rekonstruksi) yang terdiri dari rumah baru, relokasi, dan penyewa. Untuk mewujudkan suasana yang aman dan nyaman pada hunian pascabencana, dilengkapi dengan prasarana-sarana dasar (PSD) skala kawasan, meliputi jalan lingkungan, air minum dan sanitasi, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik, ruang terbuka hijau, serta sarana sosial/umum lainnya. Kesemua bantuan dan kebijakan perumahan itu realisasinya diatur melalui Peraturan Kepala Bapel BRR.

Perumahan dan permukiman merupakan sektor yang mendapatkan kucuran dana kedua terbesar setelah sektor prasarana/infrastruktur, yakni sekitar 27% dari anggaran Pemulihan. Pada 2008, sekitar 26,3 persen dari anggaran Pemulihan dialokasikan untuk kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang belum rampung. Lebih lanjut, pada awal 2008, program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) diluncurkan. Melalui program tersebut disalurkan dana sebesar Rp2,5 juta untuk 48.579 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat (37.264 KK di Aceh 11.315 KK di Nias) yang mencakup 1.103 desa (1.007 desa di 15 kabupaten/kota se-Aceh dan 96 desa di 2 kabupaten se-Kepulauan Nias). Bantuan tersebut sedianya dimaksudkan untuk membantu biaya perawatan dan perbaikan rumah. Per Juni 2008, sudah 34.613 KK tercatat di bank lokal sebagai para penerima manfaatnya. Pada 2007, ditetapkan hampir 140.000 unit rumah memerlukan rekonstruksi, 68.000 unit memerlukan rehabilitasi, dan sekitar 650 desa memerlukan perbaikan prasarana dan sarana dasar (PSD). Kini, pada medio 2008, tercatat sekitar 110.000-an unit rumah telah dibangun kembali, sekitar 70.000 unit rumah telah direhabilitasi. Selain itu, 1.450 desa telah menerima perbaikan PSD ditambah dengan yang dikerjakan oleh Donor/NGO. Program perumahan dikerjakan oleh banyak lembaga. Sekitar 41,4 persen didanai pemerintah melalui

APBN dan dilaksanakan oleh BRR. Adapun sisanya, sekitar 59,6 persen, adalah *off-budget*, yang didanai dan dilaksanakan sendiri oleh Donor/NGO.

Dana tambahan juga dialokasikan untuk membantu para warga penyintas yang belum menempati rumah baru mereka. Per Juni 2008, diperkirakan masih ada sebagian rumah yang telah dibangun tapi belum dihuni. Ada sejumlah alasan sehingga para penerima manfaat enggan menghuni rumah barunya. Ketaktersediaan atau jauhnya jarak dari lapangan pekerjaan para penghuni lingkungan rumah baru, adalah alasan utamanya. Masih belum terlengkapinya PSD pemukiman (listrik, air, sekolah) serta ditemukannya ratusan penyintas yang memperoleh rumah ganda, adalah alasan berikutnya.

Penerapan pemberdayaan masyarakat belum cukup memadai dan pelaksanaannya masih sangat terbatas, yang efektif misalnya hanya terealisasi pada program-program “Rekompak” (kerjasama Departemen PU dengan BRR yang dibiayai oleh Multi Donor Fund). Data tentang para penerima manfaat masih memerlukan banyak verifikasi dan validasi, dan banyak pekerjaan yang belum tertuntaskan. Program-program 2005-2006 yang masih belum rampung, pengerjaannya dituntaskan pada 2007. Secara bersamaan, program 2007 juga difokuskan pada upaya-upaya merehabilitasi sebanyak 51.000-an unit rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah korban yang belum direhabilitasi, serta melakukan upaya rekonstruksi terhadap sebanyak 5.000-an unit rumah baru.

Tabel 3. 11
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Perumahan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Rumah Baru (Rekonstruksi)	Unit	139,195	51,253	87,942	139,195	-	
2	Perbaikan Rumah (Rehabilitasi)	Unit	67,850	65,674	2,176	67,850	3792*)	*) Tambahan Dana Rp,7,5jt/unit NAD/ Nias
3	Prasarana dan Sarana Dasar	desa	647	560	87	647	2*)	NAD/ Nias

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Data BRR NAD-Nias bulan Agustus 2008, dapat diketahui bahwa sasaran rekonstruksi rumah baru untuk tahun 2005-2008 sebanyak 139.195 unit (jumlah dari pelaksanaan APBN/On Budget sebanyak 51.253 unit dan koordinasi Non APBN/Off Budget 87.942 unit) seluruhnya dapat terealisasi. Sedangkan rehabilitasi rumah tahun 2005-2008, dari sasaran sejumlah 67.850 unit (65.674 unit dari APBN/On Budget dan 2.176 unit dari Non APBN/Off Budget), ada penambahan sebanyak 3.792 unit rumah untuk kegiatan di tahun 2009, yang merupakan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR). Dari sasaran sebanyak 647 desa (560 desa dari dana APBN dan 87 desa dari dana Non APBN), hanya tinggal 2 desa yang belum terpenuhi prasarana dan sarana dasar perumahan.

Untuk masalah masyarakat yang masih menempati barak, ditempuh cara *regrouping* (penggabungan) barak dengan tujuan pengurangan lokasi barak yang terlalu banyak jumlahnya. Sebagai contoh, adalah pemindahan warga barak Cot Killa Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2008 pukul 10.00 WIB. Dengan Bapak Syaifullah MY staf BRR Distrik Aceh Besar, sebagai penanggungjawab barak, sebanyak 17 KK warga barak dipindahkan ke Barak Bakoy 2 yang berada di Jalan Baru Huntara Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Beberapa warga yang administrasinya belum selesai atau belum ada kejelasan,

sementara masih tetap tinggal di barak Cot Killa ini sampai proses administrasinya selesai, untuk kemudian pindah ke barak yang baru.

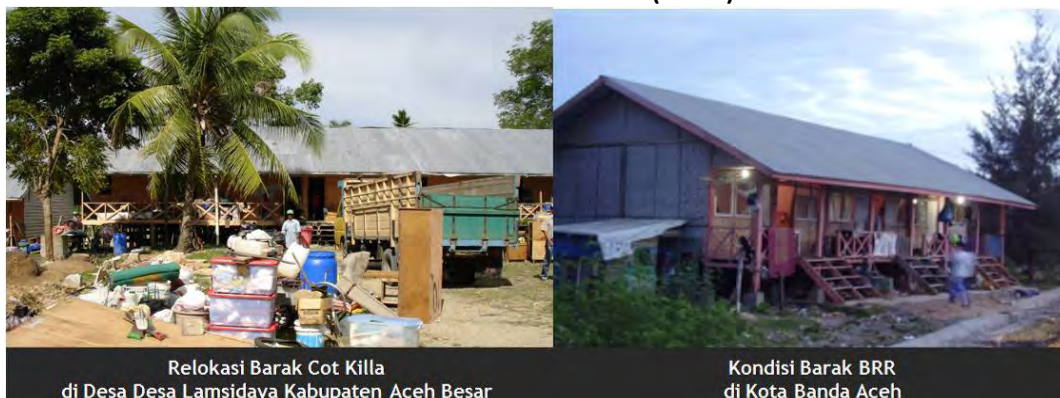
Berdasarkan keterangan dari Kepala Bappeda Kota Banda Aceh sampai saat ini (Oktober 2008) masih terdapat warga Kota/pengungsi yang tinggal di barak-barak di Kota Banda Aceh. Posisi barak tersebut berada di 4 lokasi termasuk di Kecamatan Meuraxa. Letak barak pengungsi ini tidak jauh dari pelabuhan feri Ulee Lheue dan Fasilitas Wisata Kuliner yang sudah hampir selesai pembangunannya.

Melalui DIPA BRR melalui Satker Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah I tahun 2008, sebanyak Rp. 9 Milyar dialokasikan untuk membangun rumah dan PSD di Kawasan Labuy Kecamatan Masjid Raya. Pembangunan proyek ini dimulai pada bulan Maret hingga September 2008, namun status Oktober 2008 proyek tersebut belum selesai. Prasarana dasar permukiman terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lain. Tata Ruang dan Pertanahan adalah salah satu bagian dari prasarana dasar karena merupakan arahan perencanaan untuk mewadahi permukiman tersebut.

Kompleks perumahan di Kawasan Labuy Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar belum satu pun yang dapat dihuni, karena masih dalam proses pembangunan. Setiap rumah di kompleks tersebut, tersedia kamar mandi, jamban/kloset, air bersih dan juga septictank. Akses terhadap pusat kegiatan di kawasan ini adalah fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, tempat ibadah (mesjid dan musholla). Prasarana lingkungan seperti air bersih, drainase, jalan, dan sanitasi juga sudah dilengkapi oleh BRR. Gambar diatas adalah pembangunan perumahan, saluran drainase dan jalan lingkungan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pembangunan perumahan di Desa Nusa dan Rumpeet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya mempunyai nilai proyek (sesuai kontrak) sebesar 2,05 miliar. Namun hingga 27 Oktober 2008 kegiatan fisik yang terealisasi baru mencapai Rp. 1,5 miliar (75%). Yang menjadi penerima manfaat dari pembangunan perumahan ini adalah: masyarakat korban tsunami dari Desa Nusa dan Rumpeet, Kecamatan Jaya. Perumahan ini merupakan pembangunan baru, setelah sebelumnya rumah penduduk di desa ini habis disapu oleh gelombang tsunami. Pembangunan perumahan ini hingga akhir oktober 2008 belum 100% selesai. Dengan jumlah total 42 unit, belum seluruhnya dilengkapi dengan saluran pembuangan yang layak dan sistem drainase yang baik. Kondisi perumahan saat ini telah terbangunnya prasarana jalan tanah pada beberapa ruas antar permukiman penduduk. Dan beberapa rumah yang belum selesai diperkirakan akan terbengkalai. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca memasuki musim penghujan dan kelangkaan material kayu di pasaran.

Gambar 3. 1
Kondisi Hunian Sementara (Barak)



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Gambar 3. 2
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Perumahan dan Permukiman oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas dan BRR Distrik Aceh Besar, Oktober 2008

Pembangunan prasarana dasar lingkungan di Desa Kuala, Gle Jong Darat, Krueng Tunong, Meudang Gon, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya mempunyai nilai proyek (sesuai kontrak) sebesar Rp. 3,9 miliar, sampai 27 Oktober 2008 kegiatan fisik dapat terealisasi hingga 100 %.

Kondisi fisik prasarana sebelum pembangunan : jalanan masih tanah, dan sebagiannya pasir dan batu, belum dilengkapi saluran pembuangan yang layak dan sistem drainase yang baik. Kondisi prasarana dasar sesudah pembangunan: terbangun prasarana jalan aspal antar permukiman penduduk yang dilengkapi dengan prasarana penanganan air limbah yang baik (telah dibeton) dan sistem drainase yang telah terintegrasi dengan baik. Disamping itu juga telah dibangun jembatan kecil antara jalan dengan perumahan penduduk.

Konstruksi prasarana lingkungan di Desa Blang Dalam, Kuala Bakong, Blang Mon Lueng dan Gampong Baro, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dibangun dengan nilai proyek (sesuai kontrak) sebesar Rp. 6,4 miliar. Namun untuk kegiatan fisik hingga 27 Oktober 2008 baru terealisasi sekitar 86 %. Keterlambatan pembangunan ini antara lain disebabkan oleh : sulitnya supply material pembangunan akibat banjir dan melonjaknya harga material aspal yang melewati harga standar. Kondisi jalan lingkungan sebelum konstruksi : jalanan masih tanah merah, belum dilengkapi dengan saluran pembuangan yang layak dari perumahan warga sekitar. Dan kondisi jalan sesudah konstruksi : terbangunnya prasarana jalan yang dibeton antar permukiman penduduk yang dilengkapi dengan prasarana penanganan air limbah (dibeton) dan sistem drainase telah terintegrasi dengan baik.

Sektor perumahan dan permukiman Nias mendapatkan porsi dana sebanyak Rp 1,739 trilyun atau 30,71% dari keseluruhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Dari total anggaran untuk sektor tersebut, sumbangan anggaran on-budget sebesar 34,17% dan dari total off-budget sebesar 25,23%. Meskipun proporsi anggaran on-budget hanya pada urutan kedua, namun secara rata-rata masih lebih banyak dibandingkan dengan proporsi total off-budget. Total dana sektor perumahan yang dilaksanakan oleh BRR Nias ini mencapai lebih dua kali lipat dibandingkan total dana pada sektor perumahan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga/negara donor. Karena itu, perubahan kebijakan dari pendekatan kontraktor ke pendekatan berbasis masyarakat yang dilakukan BRR Nias berdampak signifikan terhadap keseluruhan proses pemberian bantuan perumahan. Pembangunan perumahan (sampai dengan akhir November 2008).

- Target Rencana Induk (2005) dalam kegiatan rekonstruksi rumah adalah 12.255 unit, sementara target yang tercatat pada Revisi Rencana Induk (2008) adalah 19.207 unit.
- Rumah baru (rekonstruksi), telah terbangun sebanyak 14.464 unit dan sedang dalam pelaksanaan sebanyak 5.190 unit.
- Rehabilitasi rumah (rusak berat dan ringan) telah terlaksana untuk 12.666 unit. Sedangkan pada RKP 2009 telah dialokasikan paket rehabilitasi sebanyak 15.696 unit di Nias dan 8.000 unit di Nias Selatan. Dengan demikian total rumah yang telah dan akan direhabilitasi sebanyak 36.362 unit.
- Penyediaan air bersih telah dilaksanakan pembangunan 104.299 meter pipa distribusi air bersih beserta kelengkapannya.

III.3.1.1.2 Tata Ruang dan Pertanian

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang tata ruang dan pertanian yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada Tabel 3. 12 di bawah ini.

Tabel 3. 12
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Tata Ruang							
1	Penyusunan Revisi RTRW	Prop.	1	1		1	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Provinsi NAD							
a	Penyusunan/ Revisi RTRW Kabupaten/Kota	Kab/Kota	15	15		15	-	1 oleh Bappeda Kab Aceh Brt
b	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota	Kab/Kota		0		-	-	
c	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota							
	- RDTR Kota Kecamatan	Kab/Kota	18	18		18	-	
	- Kerangka Tata Ruang Kecamatan dan Rencana Aksi	Kecamatan	63	0	63	63	-	
d	RUTL / RTBL/ RTR Kawasan	Kab/Kota	17	17		17	-	
2	Rencana Pengembangan Desa (Village Planning)							
a	Rencana Desa (<i>Village Planing</i>)	Desa	647	158	489	647	-	
b	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa berdasarkan Village Planning	Desa	346	346		346	-	
3	Penyusunan Pedoman							
a	Pemetaan desa secara Partisipatif	Paket	1	2		1	-	
b	Perencanaan Desa	Paket	2	1	1	2	-	
c	Perencanaan Tata Ruang Kecamatan	Paket	1	1		1	-	
d	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Paket	1	1		1	-	
e	Indikator Makro Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi-Sosial-Budaya	Paket	1	1		1	-	
4	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada masyarakat	Kab/Kota	11	11		11	-	
5	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Integrasi Program Sektoral)	Kab/Kota	8	8		8	-	
6	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	Kab	5	5		5	-	
7	Studi-studi							
a	Studi Pengembangan Sistem Transportasi Intermoda dan Sistem Pedestrian (dan DED) Kota Banda Aceh	Paket	1	1		1	-	
b	Studi (dan DED) Pengembangan Taman Lansekap di Sepanjang Jalur Transportasi Regional Banda Aceh Meulaboh	Paket	1	1		1	-	
c	Studi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nias	Paket	1	1		1	-	
	Pertanahan							
1	Pemulihan pelayanan	Prop.	1	1		1	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	pertanahan	Kab/Kota	18	18		18	-	
2	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Prop.	1	1		1	-	
		Kab./Kota	14	14		14	-	
3	Pembangunan fisik kadastral	Propinsi	1	1		1	-	
		Kab/Kota	15	15		15	-	
	- Peta Dasar	ha	250,000	250,000		250,000	-	
	- Ajudikasi	bidang	330,000	220,662	0	220,662	109,338	BPN Kab/Kota *) RKP 2009, program RALAS
4	Penyusunan rencana tata guna tanah	Prop.	-	1		-	-	
		Kab/Kota	15	15		15	-	
5	Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> .	Prop.	1	1		1	-	
		Kab/Kota	15	15		15	-	
6	Pembuatan sertifikat pengganti	Prop.	1	1		1	-	
		Kab/Kota	13	1		1	12	BPN Kab/Kota *) RKP 2009, program RALAS
	- Sertifikat Pengganti	Sertifikat	10,000	178		178	9.822	BPN Kab/Kota. *) RKP 2009, program RALAS
7	Konsolidasi tanah/ Pemberian Hak Atas Tanah (Relokasi Perumahan)	Prop.	1	1		1	-	
		Kab/Kota	13	13		13	-	
	- Sertifikat tanah perumahan Relokasi	Sertifikat	8,851	8,851		8,851	-	
8	Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008	Prop./ LS	1	1		1	-	
		Kab./Kota	8	8		8	-	
9	Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan	Prop.	1	1		1	-	
		Kab/Kota	1	1		1	-	
10	Pengadaan tanah						-	
	- Kepentingan publik	ha	426	426		426	-	
	- Perumahan/relokasi	ha	506	506		506	-	Oleh BRR 468 ha/ Sisa Pemda

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Menurut tabel rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BRR NAD-Nias, diketahui bahwa hampir semua program/kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Dari 7 program pada sub bidang tata ruang dan 10 program sub bidang pertanahan yang merupakan sasaran perubahan rencana induk, hanya 2 program pertanahan dari Program RALAS yang tersisa di tahun 2009. Seperti program pembangunan fisik kadastral untuk kegiatan adjudikasi, yang direncanakan 330.000 bidang dalam sasaran perubahan rencana induk hanya terealisasi 220.662 bidang, dan sisanya akan menjadi tugas lanjutan di tahun 2009; dan program pembuatan sertifikat pengganti sebanyak 10.000 sertifikat yang akan dikeluarkan sesuai dengan sasaran perubahan rencana induk

hanya bisa dikerjakan 178 sertifikat dari pelaksanaan APBN (On Budget) dan bersisa 9.822 sertifikat yang harus dikerjakan di tahun 2009.

A. Tata Ruang

Akibat tsunami dan gempa bumi, selain konflik panjang pada masa sebelumnya, aparat dan institusi daerah mengalami kelumpuhan, termasuk dalam urusan penataan ruang. Kerusakan institusional dalam urusan penataan ruang diperkirakan terjadi di semua kabupaten/kota, di Provinsi NAD. Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada khususnya dan pemulihan jangka panjang NAD pada umumnya, upaya-upaya pementapan kelembagaan penataan ruang dapat dilakukan dengan fokus pada salah satu atau kombinasi dari: pementapan organisasi yang bertanggung-jawab dalam penataan ruang; penguatan aturan-main yang mendukung penempatan penataan ruang sebagai acuan pemulihan; dan penguatan personalia.

Dengan demikian, kebijakan pengaturan tentang penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam menjadi bagian penting yang lintas sektoral dalam setiap bidang sektor. Tujuan penataan ruang wilayah Aceh dan Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami adalah membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari bencana. Adapun sasarannya adalah tersedianya rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perdesaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan semua sektor pembangunan. Implementasi pembangunan Aceh dan Nias pasca bencana akan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek dan pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan pembangunan antar dan intra generasi. Pelaksanaan berbagai aspek pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ini juga mempertimbangkan aspek pendukung lainnya seperti penggunaan teknologi terkini, tepat guna, dan ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspek-aspek kemungkinan bencana yang akan datang.

B. Pertanahan

Penyusunan rencana tata ruang dalam tingkatan yang lebih rinci/operasional harus memperhatikan hak keperdataan masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, penetapan dan pelaksanaan tata ruang perlu didahului oleh pendataan fisik dan yuridis tanah. Masyarakat harus diberi jaminan bahwa hak-hak keperdataan atas tanah mereka akan terjamin/tidak terhapus sebagai akibat penetapan dan implementasi tata ruang. Dilakukan strategi dengan a). mengidentifikasi hak-hak warga dan merekonstruksi batas-batas fisik; dan b). mengembangkan

KEBIJAKAN SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

1. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman dari bencana dan penghidupan yang lebih baik
2. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim
3. Melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan
4. Proses penataan ruang sebagai perpaduan proses pendekatan pembangunan dari atas dan bawah (partisipatif), yang memperhatikan karakteristik budaya dan agama
5. Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
6. Mengokohkan kewenangan dan kapasitas sistem pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang
7. Perlindungan terhadap hak perdata warga (dalam bidang pertanahan)
8. Mempercepat proses administrasi dan pengadaan pertanahan
9. Pemberian kompensasi ganti rugi (pertanahan) yang adil
10. Melakukan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sumber daya alam di kawasan budi daya
11. Mengembalikan dan merehabilitasi struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Aceh
12. Membangun kembali kota-kota yang terkena bencana dilakukan dengan merajut kembali tatanan kota lama

Sumber: Perpres 47/2008

sistem pemilikan tanah yang berkeadilan (sertifikat tanah atas nama suami istri). Untuk mempercepat pelaksanaan proses admistrasi dan pengadaan pertanahan, serta untuk memungkinkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membuat peraturan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada guna menyesuaikan peraturan pertanahan yang berlaku nasional dengan kondisi di Aceh dan Nias terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Khusus untuk pemerintahan aceh didorong percepatan peralihan Kanwil BPN dan Kantor BPN menjadi perangkat daerah. Strateginya adalah a). menyusun peraturan untuk mempercepat proses adminstrasi pertanahan; dan b). membantu penyediaan lahan bagi keperluan pembangunan dan permukiman. Penetapan rencana tata ruang sebisanya tidak menghilangkan hubungan hukum orang dengan tanah. Apabila terjadi kehilangan/terhapusnya hak keperdataan seseorang terhadap tanah sebagai akibat penetapan rencana tata ruang, maka wajib dilakukan ganti rugi kepada yang bersangkutan atau dengan cara lain atas kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan dengan menetapkan ganti rugi yang adil bagi semua pihak.

Pelaksanaan Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS), yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan BRR serta didanai oleh Multi Donor Trust Fund (MDTF) bertujuan untuk merekonstruksi hak atas tanah bagi masyarakat di wilayah korban Tsunami dan sekitarnya; dan membangun kembali sistem administrasi pertanahan di Aceh, dilaksanakan mulai September 2005 sampai 30 Juni 2008 dan telah menggunakan dana hibah sebesar $\pm$ USD 9,8 juta dari alokasi sesuai Grant Agreement No. TF-0553530IND sebesar USD 28,5 juta dengan kemajuan fisik sebagai berikut :

- Rekonstruksi bidang tanah (pemetaan) $\pm$ 203.000 bidang;
- Penerbitan sertifikat 121.594 bidang;
- Renovasi gedung Kanwil BPN NAD dan Kantah Kabupaten Aceh Besar;
- Pembangunan Gedung Kantah Kota Banda Aceh;
- Restorasi dokumen pertanahan sebanyak 13 ton;
- Komputer dan jaringan (beserta kelengkapannya) serta peralatan ukur;
- Diklat adjudikasi, Diklat Pengembangan Mutu, Diklat Bendahara/Pengelola Keuangan PHLN dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Perencanaan gedung Kantah Aceh Barat, Simeulue, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Nias dan Nias Selatan.

III.3.1.2 Pemulihan Infrastruktur

Berdasarkan Perpres 47/2008, diketahui bahwa kebijakan infrastruktur secara umum adalah :

1. Menjadikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan;
2. Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah kecamatan, kecamatan dan desa, serta menuju sentra-sentra produksi;
3. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian;
4. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama;
5. Peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;

6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan pada wilayah-wilayah terpencil dan sangat terpencil, terutama pada wilayah-wilayah yang terkait dengan sentra-sentra produksi dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat;
7. Memprioritaskan pada penjernihan air minum, jaringan distribusi, saluran drainase dan pengolahan sampah;
8. Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dan melindungi wilayah pantai.

Pemulihan bidang infrastruktur terdiri dari jalan dan jembatan, perhubungan, sumberdaya air, energi dan listrik, pos dan telematika, bangunan fasilitas umum, pemeliharaan, dan IREP.

III.3.1.2.1 Jalan dan Jembatan

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada Tabel 3. 13 di bawah ini.

Tabel 3. 13
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Jalan dan Jembatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Lintas Timur NAD (Jalan Nasional)	km	40	40		40	-	
2	Lintas Barat NAD (Jalan Nasional)	km	702	435	267	702	-	
3	Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional)	km	191	88	-	88	103	65 Km RKP 2009 Dinas PU NAD/NIAS
4	Lintas Lainnya di NAD (Jalan Propinsi)	km	313	313	-	313		
5	Jalan Propinsi P. Nias	km	469	359	-	359	110	47 Km RKP 2009 Dinas PU NAD/NIAS
6	Jalan Kabupaten NAD dan Nias	km	3,511	1383	664	2,047	1,464	339 Km RKP 2009 Dinas PU NAD/NIAS

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

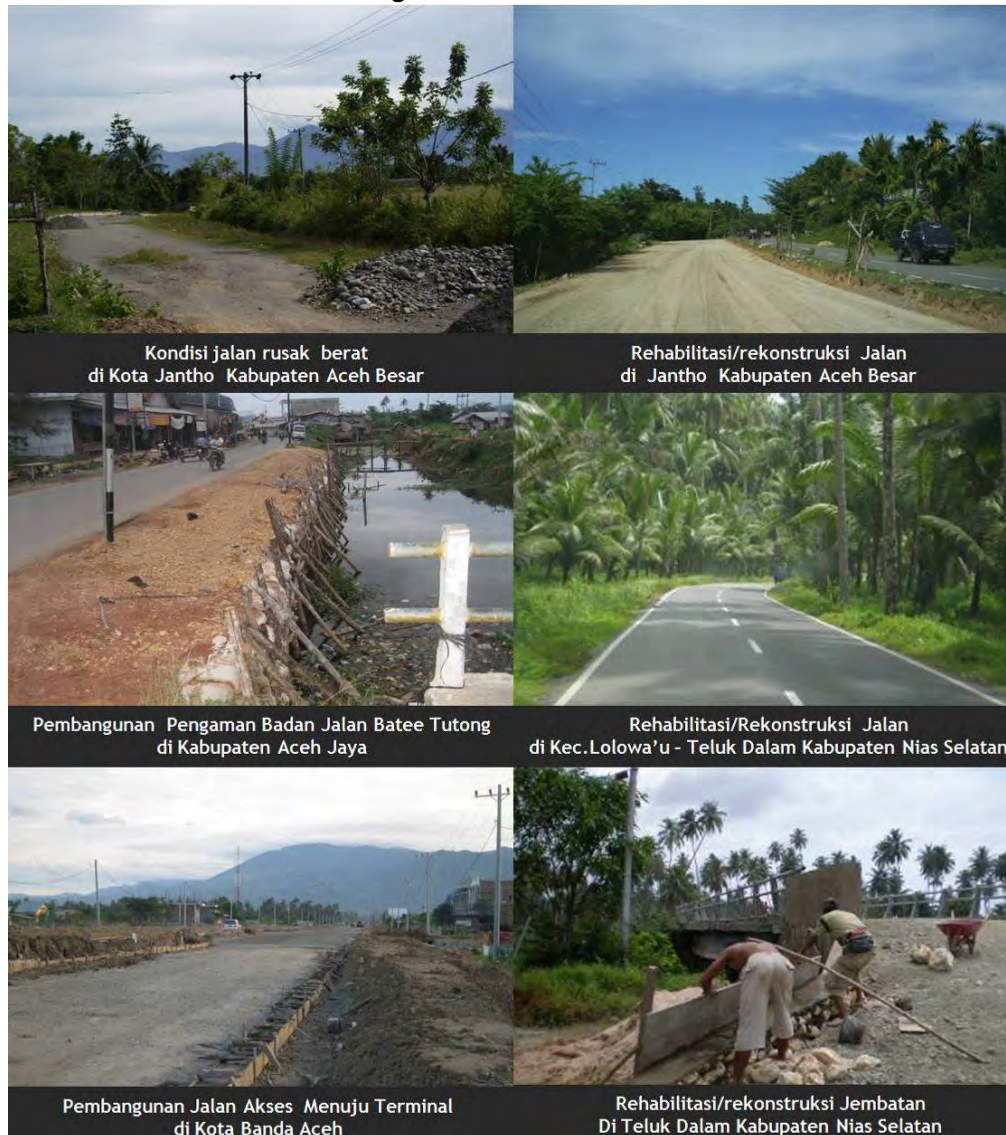
Prioritas pengembangan jalan dan jembatan di Provinsi NAD adalah jalur Lintas-Barat karena jalur Lintas Timur relatif lebih baik dan telah ditangani melalui kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Jalur Lintas-tengah juga ditangani dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan terutama terkait dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sedangkan pembangunan jalan kabupaten/kota dilaksanakan sebagai prasarana pendukung perumahan atau permukiman.

Sampai akhir 2008, total jalan yang telah direhabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR dan Donor/NGO adalah sepanjang 830 km jalan nasional (40 km Lintas Timur NAD, 702 km Lintas Barat NAD, dan 88 km Lintas Tengah NAD), 672 km jalan provinsi (313 km Jalan Provinsi NAD dan 359 km Jalan Provinsi Kepulauan Nias), dan 2.047 km jalan kabupaten. Beberapa hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fisik sub bidang jalan dan jembatan seperti terlihat pada Gambar 3.3.

Dampak rehabilitasi dan rekonstruksi di Jantho Kabupaten Aceh Besar adalah adanya jalan dan jembatan yang rusak berat, misalnya pada ruas jalan nasional Seulimeum-Jantho mengalami rusak berat sepanjang 10 km. Rusaknya jalan tersebut karena mengangkut bahan galian C/material (pasir, batu, dll) untuk Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diketahui bahwa kondisi salah satu jalur jalan banyak yang berlubang, bahkan sudah ditumbuhi rumput liar karena tidak digunakan lagi. Dari 2 jalur yang biasanya digunakan kemudian menjadi 1 jalur, hal ini

tentunya menghambat arus lalu lintas dan rawan terjadi kecelakaan. Hal ini sudah diatasi BRR dengan merehabilitasi jalan tersebut secara bertahap di beberapa ruas jalan berupa perkerasan jalan.

Gambar 3. 3
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Jalan dan Jembatan oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Rehabilitasi atau pembangunan jalan juga diikuti dengan pembangunan pengaman badan jalan, contohnya di jalan Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Awalnya di pinggir jalan utama tersebut riskan bila dilewati oleh kendaraan besar (seperti truk) padahal jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan Desa Lageun dan Desa Pante Kuyun di Kabupaten Aceh Jaya. BRR Distrik Aceh Jaya kemudian membangun pinggiran pengaman badan jalan ini sehingga saat ini jalan tersebut menjadi lebih aman bila dilewati kendaraan, terutama kendaraan besar.

Selain di Provinsi NAD, BRR juga membangun jalan di Kepulauan Nias, contohnya pembangunan jalan Lolowa'u – Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Pembangunan jalan ini diharapkan akan membuka keterisolan wilayah pedesaan sekitar yang selama ini sulit berkembang, meningkatkan pelayanan pemerintahan di desa-desa terisolir di kawasan bagian tengah dan barat Nias Selatan, mempercepat arus orang dan barang, serta membantu pengembangan perekonomian masyarakat.

BRR juga membangun jalan akses menuju fasilitas publik, salah satunya adalah pembangunan jalan akses menuju terminal di Kota Banda Aceh sepanjang 1,97 km yang dinamakan *New Town Access Road 2nd Stage* NAD (Jp1.07). Pembangunan jalan ini kerjasama BRR dan MDF melalui proyek IRFF dengan jangka waktu pengerjaan selama 1 tahun (29 Februari 2008-28 Februari 2009) dan pendanaan DIPA BRR TA 2008.

Selain jalan, BRR juga membangun jembatan, salah satunya yaitu di Kabupaten Nias Selatan. Kondisi jembatan di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan masih jauh dari ideal karena masih menggunakan batang pohon atau kayu sementara, akibatnya tidak sedikit kendaraan roda 2 atau mobil yang terperosok ke sungai. Untuk mengatasi hal tersebut, BRR kemudian membangun jembatan permanen untuk menggantikan jembatan sementara tersebut, sehingga lalu lintas menjadi lancar kembali.

STRATEGI SUB BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi di Aceh dan Nias, serta mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana.

Mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan urat nadi (jalan arteri nasional), jalan Provinsi, Kabupaten/Kota serta lingkungan, dengan strategi pembangunan jalan dan jembatan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang langsung dikoordinasikan dengan program Kementerian/Lembaga dan Pemda:

- Jalan Nasional lintas timur Aceh (selektif)-
- Jalan Nasional lintas barat Aceh.
- Jalan Nasional lintas tengah Aceh(selektif).
- Jalan provinsi Aceh(selektif).
- Jalan Provinsi Nias.
- Jalan kabupaten/kota Aceh/Nias (selektif).

Sumber: Perpres 47/2008

III.3.1.2.2 Perhubungan

Bidang perhubungan di dalam Perpres 47/2008 terdiri dari 1) transportasi darat dan lalu lintas angkutan jalan raya (LLAJR); 2) transportasi laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); dan 3) transportasi udara. Berdasarkan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi, diketahui bahwa sistem perhubungan telah berfungsi kembali dan perlahan-lahan telah melancarkan hubungan antar wilayah serta memberikan dampak positif terhadap dukungan bagi revitalisasi sektor sosial-ekonomi. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada Tabel 3. 14.

Tabel 3. 14
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Transportasi Darat dan LLAJR							
1	Pembangunan Terminal dan stasiun/Pool Damri	unit	16	16	-	16	3*)	*) RKP Dept. Hub
2	Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok,	unit	325	325	-	325	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	lampu)							
3	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	unit	2	2	-	2	1 *)	*) RKP Dept. Hub
4	Rehab jembatan timbang	unit	-	0	-	-	-	
5	Pengadaan bus bantuan	unit	56	36	20	56	-	
6	Pembangunan halte bus	unit	-	0	-	-	-	
7	Jalan kereta api	Km	-	0	-	-	-	
	Transportasi Laut dan ASDP							
1	Pelabuhan Laut	unit	16	16	-	16	4*)	*) RKP 2009 Dept. Hub
2	Pelabuhan Ferry	unit	8	7	1	8	-	
	Transportasi Udara							
1	Rehabilitasi-rekonstruksi Bandara	Unit	9	9	-	9	1*)	*) RKP 2009 Dept. Hub
2	Airstrip	Unit	3	2	1	3	-	
3	Helipad	Unit	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

A. Transportasi Darat dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR)

Sampai dengan tahun 2008, telah dibangun terminal dan stasiun/pool damri sebanyak 16 unit, dengan adanya terminal dan banyaknya jalur transportasi darat yang sudah diperbaiki diharapkan kemajuan ekonomi dapat meningkat. Dari hasil kunjungan lapangan, di Kota Banda Aceh terdapat pembangunan terminal tipe A (antar kota antar/dalam provinsi) yang direlokasi dari terminal lama di daerah Seteui. Hingga bulan Oktober 2008 pembangunan terminal tersebut belum selesai karena masih dalam tahap pengerjaan pada fasilitas prasarana terminal seperti pengerasan dan pengaspalan jalan, pembangunan saluran drainase, rambu-rambu, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2008 BRR juga membangun terminal angkutan tipe C (Antar Kota-Kabupaten) di Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya yang berlokasi di daerah strategis, karena berada antara pertemuan jalan utama Banda Aceh-Calang-Meulaboh. Pembangunan terminal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan akses transportasi dan akses untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat sampai dengan Nagan Raya. Bangunan yang telah terbangun hingga Oktober 2008 adalah tower, ruang tunggu, papan nama, pagar keliling terminal, dan kegiatan pada tahap *finishing* adalah area parkir bus, parkir kendaraan penumpang, kios, mushalla dan fasilitas MCK terminal. Terminal direncanakan dapat menampung angkutan Taxi (sejenis L-300) serta bus roda 6 dan 10.

Pembangunan terminal bus apabila tidak diimbangi dengan jumlah moda transportasi, maka prasarana yang ada menjadi kurang optimal fungsinya. Oleh karena itu BRR bekerjasama dengan Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan setempat dalam hal penyediaan bus bantuan sejak tahun 2006, yaitu sebanyak 28 unit dan 8 unit pada tahun 2008. Bus ini telah diserahkan dan dioperasikan oleh Damri. Selain melalui dana APBN, pengadaan bus juga menggunakan dana Donor/NGO sebanyak 20 unit, sehingga total bus bantuan ini berjumlah 56 unit. Selain terminal, BRR juga membangun 325 unit sarana keselamatan LLAJ (rambu, *traffic-light*, pagar, patok, lampu) dan 2 unit gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2007. Lokasi pembangunan gedung PKB diutamakan untuk daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotornya tinggi yaitu Meulaboh dan Langsa.

STRATEGI SUB BIDANG PERHUBUNGAN

- Mengembalikan dan memfungsikan jaringan dan infrastruktur transportasi darat, pelabuhan dan bandar udara yang rusak/ mengalami gangguan, terutama yang berfungsi sebagai akses masuk logistik dan menunjang operasionalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Kepulauan Nias;
- Beberapa pelabuhan laut perlu ditingkatkan fungsi dan kapaistasnya dalam menampung perkembangan teknologi laut dan harus terpadu dengan system transportasi lainnya serta membuka dan memfungsikan kembali pelabuhan: Lhokseumawe, Kruing Raya (Malahayati), Simeuleu (pelabuhan baru), Langsa, Calang (Pelabuhan baru), Sabang, Gunung Sitoli dan pelabuhan lokal lainnya.
- Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) perlu dikembangkan kapasitasnya menjadi bandar udara internasional dengan fasilitas lengkap dan modern serta harus tetap menjadi bandar udara embarkasi haji untuk Provinsi Aceh;
- Bandara Udara Cut Nyak Dhien di Meulaboh diusulkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk mengantisipasi pengembangan kawasan pantai barat, serta diarahkan untuk mengakomodasi pangkalan pertahanan keamanan;
- Sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Aceh perlu dikembangkan dengan memperhitungkan akses untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana di suatu daerah melalui akses penyelamatan ke wilayah yang relatif aman;
- Menyelesaikan pembangunan sistem jaringan transportasi dan telekomunikasi yang memadai dan terpadu untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah di dalam provinsi dan antar provinsi, serta dengan luar negeri, misalnya:
 - i. membuka *entry point* pada simpul-simpul utama transportasi yang baru dalam rangka pengembangan wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang efisien;
 - ii. merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nirkabel untuk meningkatkan akses ke daerah perdesaan, baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI;
- Pelabuhan laut dan penyeberangan yang telah ada di pantai timur maupun pantai barat tetap dipertahankan dan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang selama ini berfungsi sebagai *eeder*;
- Membangun dermaga darurat dan landasan *helipad* guna melayani kegiatan transportasi dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat digunakan untuk upaya darurat;
- Khusus untuk Pelabuhan Meulaboh akan dilakukan studi untuk kemungkinan direlokasi. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang telah rusak total juga diusulkan untuk direlokasi dengan melakukan studi untuk mendapatkan lokasi yang tepat;
- Peningkatan kapasitas pelabuhan laut dan bandara sipil lainnya, seperti Tapak Tuan, Rembele (Bener Meriah), Kuala Batee, Sabang dan Gunung Sitoli; serta
- Pembangunan *airstrip* di Blangkejeren dan Calang.

Sumber: Perpres 47/2008

B. Transportasi Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Dengan terbangunnya transportasi laut, menjadikan wilayah perairan Aceh-Nias sebagai pintu gerbang ke arah kemungkinan akses sosial-ekonomi yang lebih lebar bagi dan dari kemajuan wilayah daratan. Khusus untuk pulau-pulau kecil, dengan adanya pelabuhan dapat membuka keterisolasian dan kelancaran pasokan logistik masyarakat di pulau tersebut.

Hingga akhir 2008, BRR telah menangani pelabuhan laut sebanyak 16 unit dan 8 unit pelabuhan ferry (penyeberangan). Lokasi pelabuhan ini meliputi Lhokseumawe, Kruing Raya (Malahayati), Simeuleu (pelabuhan baru), Langsa, Calang (Pelabuhan baru), Sabang, Gunung Sitoli dan pelabuhan lokal lainnya. Dari 16 unit pelabuhan laut tersebut, ada yang dilanjutkan pada tahun 2009 yaitu sebanyak 4 unit oleh Departemen Perhubungan

Keberadaan pelabuhan feri sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung mobilisasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari hasil kunjungan lapangan pada bulan Oktober 2008, Pelabuhan Feri Ulee Lheue yang menghubungkan ujung terbarat Pulau Sumatera dengan Pulau Weh dan Pulo Aceh telah dapat dioperasikan dan pelayanan pelabuhan meningkat hampir 50 persen dibandingkan 3 (tiga) tahun yang lalu. Perbaikan telah dilakukan dengan membuat jalur air untuk jalan kapal sepanjang 1,4 km. Areal pelabuhan, termasuk lahan parkir diperluas, dan

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

sebuah terminal permanen bagi penumpang dibangun lebih besar. Namun ada beberapa prasarana pelabuhan feri tersebut yang belum selesai pengerjaannya antara lain jalan akses utama yang menghubungkan dari jalan raya menuju pelabuhan (belum diaspal), areal parkir dan sandaran pelabuhan yang masih banyak terdapat tumpukan batu-batu besar, dan lain sebagainya.

C. Transportasi Udara

Transportasi udara yang telah ditangani sampai tahun 2008 sebanyak 9 unit (Bandara Maimun Saleh, Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dhien, Teuku Cut Ali, Lasikin, Kuala Batee, Rembele, Binaka, dan Lasondre), dan pada tahun 2009 Dephub akan melanjutkan kegiatan 2008 yaitu lanjutan pengembangan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Berdasarkan amanat Perpres 47/2008 diketahui bahwa Bandara SIM perlu dikembangkan kapasitasnya menjadi bandar udara internasional dengan fasilitas lengkap dan modern serta tetap menjadi bandar udara embarkasi haji untuk Provinsi NAD. Kapasitas layanan angkut bandara SIM mampu menampung pesawat penumpang sebanyak 12 unit dan pesawat angkut barang (kargo). Dari hasil kunjungan lapangan, diketahui bahwa fasilitas pendukung Bandara SIM yang sudah terbangun diantaranya adalah gedung kedatangan dan keberangkatan bandara, perpanjangan *runway*/landasan pacu menjadi 3.000 meter (awalnya sepanjang 2500 meter) dan lebar 45 meter, dan apron/lapangan parkir pesawat, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, mushola, loket, rambu lalu lintas, toilet. Prasarana lain yang sedang dibangun diantaranya pemasangan alat elektrik, alat navigasi udara, *approach lighting*, bangunan alat bantuan pendaratan, membangun tower, pembangunan pelataran parkir kendaraan penumpang, serta pembangunan fasilitas penunjang lainnya.

Hasil kunjungan lapangan lainnya yaitu di Kabupaten Nias, dimana BRR telah merehabilitasi apron Bandara Binaka di Kecamatan Gunung Sitoli Kabupaten Nias. Kondisi bandar udara Binaka saat ini sudah dapat didarati pesawat jenis Fokker 27, sedangkan untuk Boeing 737 masih menunggu perpanjangan landasan. Studi rancangan teknik terinci untuk pembangunan terminal penumpang, tower, dan fasilitas navigasi sudah terselesaikan.

Selain bandara, juga telah dibangun 3 unit airstrip (Calang, blangkejeren-Gayo Luwes, dan Teluk Dalam-Nias Selatan) dan 1 unit helipad di Pulau Rondo-Aceh Besar. Pembangunan prasarana *airstrip* dan *helipad* awalnya tidak direncanakan di dalam Rencana Induk, namun mengingat pertimbangan kondisi medan yang secara geografi-topografi sulit dijangkau, maka di beberapa titik perlu dibangun dan hal ini sudah tercantum di dalam Perpres 47/2008. Pembangunan prasarana tersebut dibutuhkan pula untuk kepentingan akses penyelamatan sebagai bagian dari mitigasi bencana dan kecepatan evakuasi pengungsi.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, diketahui bahwa salah satu airstrip yang dibangun BRR yaitu airstrip/landasan perintis Teluk Dalam dalam proses pembangunan tahap awal penguatan/pengaspalan landasan, sedangkan pembangunan landasan sepanjang 600 meter dijadwalkan selesai pada tahun 2009. Pembangunan Airstrip ini sangat penting sebagai prasarana transportasi Kabupaten Nias Selatan yang selama ini masih mengandalkan Bandara Binaka di Kabupaten Nias. Terlebih lagi jarak tempuh antara Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias selatan cukup jauh sekitar 120 km atau 2,5 jam perjalanan.

Gambar 3. 4
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Perhubungan oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

III.3.1.2.3 Sumber Daya Air

Sub bidang sumberdaya air terdiri dari irigasi, pantai, sungai, serta air bersih, sanitasi, dan persampahan. Rekapitulasi realisasi tahun 2005-2008 pada sub bidang sumberdaya air dapat dilihat pada Tabel 3. 15.

Tabel 3. 15
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Sumberdaya Air

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Irigasi							
1	Irigasi	ha	121,884	121,884	-	121,884	1695	*) Pemprov

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pantai						*)	NAD
1	Pengamanan Pantai	m	72,454	72,454	-	72,454	5000 *)	*) Pemprov NAD
	Sungai							
1	Pengendalian Banjir	m	98,765	98,765	-	98,765	4120 *)	*) Pemprov NAD
	Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan							
1	Air Bersih	Lt/dtk	1,430	605	825	1,430	-	
2	Pembuangan Limbah (IPLT)	Unit	6	5	1	6	-	
3	Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Unit	7	5	2	7	1 *)	*) Pemprov NAD
4	Drainase	m'	200,000	200,000	-	200,000	3000 *)	*) Pemprov NAD

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

A. Irigasi

Sasaran revisi Rencana Induk untuk irigasi menjadi 121.884 Ha dan direncanakan selesai di tahun 2008, dan pada tahun 2009 ada beberapa kegiatan yang akan dilanjutkan oleh Pemprov NAD. Dengan adanya rehabilitasi/rekonstruksi irigasi berdampak positif bagi masyarakat NAD-Nias yaitu mendukung pulihnya kegiatan pertanian sawah, perkebunan, dan petambakan rakyat. Prioritas lokasi rehabilitasi/rekonstruksi irigasi adalah lahan (atau tambak) yang pembersihan dan penggarapannya sudah siap, airnya banyak, dan memiliki potensi cepat panen.

B. Pantai

Pengaman pantai dibangun untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi yang dilakukan dengan memadukan pendekatan revegetasi dan konstruksi. Serta untuk mencegah kerusakan jalan yang berbatasan langsung dengan bibir pantai/laut dan dalam upaya meminimalisasi dampak hantaman ombak dan air pasang terhadap pemukiman penduduk. Sasaran revisi Rencana Induk untuk pengaman pantai menjadi 72.454 meter, dan realisasi pelaksanaan dari 2005-2008 diharapkan mencapai 100 %, dan pada tahun 2009 ada beberapa kegiatan yang akan dilanjutkan oleh Pemprov NAD. Dari hasil kunjulan lapangan, salah satu contoh pengaman pantai yang selesai dibangun oleh BRR yaitu di sepanjang jalan kabupaten yang menghubungkan Lahusa dan Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimana terlihat beton-beton penahan gelombang pantai tampak terjajar kokoh dan tertata rapi.

C. Sungai

Dari target 98,765 meter sungai yang harus direhabilitasi dan rekonstruksi, sampai dengan Desember 2008 telah selesai seluruhnya (100 %), dan pada tahun 2009 ada beberapa kegiatan akan dilanjutkan oleh Pemprov NAD. Rehabilitasi sungai dan pengendalian banjir ditujukan untuk mengelola sungai yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami, serta untuk melindungi kawasan permukiman atau kawasan produktif lainnya dari banjir. Sebagai contoh, dari hasil kunjungan lapang di Kabupaten Aceh Besar, BRR melalui Satker Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana NAD-Wilayah I melaksanakan normalisasi alur sungai di kompleks permukiman Budha Suci Kabupaten Aceh Besar (DIPA 2008). Kegiatan ini dimulai sejak Juni 2008, dan hingga Oktober 2008 proses normalisasi alur sungai ini sedang dalam proses pembuatan.

STRATEGI SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR IRIGASI

- Membangun kembali irigasi untuk memulihkan kegiatan usaha tani dalam arti luas, serta memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat *quick yielding*;
- Menyelesaikan pembangunan sarana pendukung ketersediaan pangan dengan memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi (teknis dan non teknis), pada wilayah dengan petant penggarap yang telah siap, tetapi lebih diutamakan di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman; serta
- Penataan kelembagaan dan pemberdayaan petani pemakai air pada setiap daerah irigasi yang telah direhabilitasi.

PANTAI

Melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi, menyclaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif, serta memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian pada wilayah pantai Barat.

SUNGAI

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air lainnya;
- Melindungi permukiman dan area produktif dari ancaman banjir dan erosi tebing terutama pada DAS-DAS kritis.

AIR BERSIH, SANITASI DAN PERSAMPAHAN

- AirMinum
Di daerah perkotaan dilakukan dengan memprioritaskan pada rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama dan terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasi-lokasi pengungsian yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan perbaikan/pembangunan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar.
Di daerah pedesaan, dilakukan cara penanganan dengan skala sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat.
- Air Limbah
Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) yang dilakukan dengan pendekatan *best practice* dan memperhatikan sistem pelayanan air limbah sebagai prasarana dan sarana pendukung perumahan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan perencanaan denah tapak lokasi permukiman kembali. Di daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual.
- Persampahan
Kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pengumpulan sampah diprioritaskan untuk dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, diperlukan kebijakan khusus terkait dengan pengadaan, penyaluran, konstruksi, dan pemanfaatan sebagian besar material dan peralatan (alat berat, *geotextile*, *incinerator*, dan sebagainya) yang mungkin perlu didatangkan dari luar negeri.
- Drainase
Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana melalui peningkatan infrastruktur penunjang upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana misalnya:
 - o saluran drainase alami,
 - o sistem drainase mikro dan makro untuk kawasan perkotaan
 - o Bangunan penyelamatan (*Escape building*) dan jalur penyelamatan (*escape road*)
 - o kantong-kantong air (*retention basin*), tanggul, pintu-pintu air termasuk penyelesaian penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL atau SOP) bidang infrastruktur untuk acuan pelaksanaan mitigasi dampak lingkungan pasca rekonstruksi.

Sumber: Perpres 47/2008

Gambar 3. 5
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Sumber Daya Air oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas dan BRR Distrik Aceh Besar, Oktober 2008

D. Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

O Air Minum

Kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya di wilayah yang terkena tsunami dan barak-barak pengungsian hingga Desember 2008 yaitu terbangunnya fasilitas pelayanan air bersih (pompa air minum, dan jaringan distribusi utama/perpipaan) dengan kapasitas sebesar 605 lt/detik oleh BRR dan bantuan Donor/NGO sebesar 825 lt/detik atau dengan kata lain sudah terealisasi 100 % dari target revisi Rencana Induk (1.430 lt/detik).

O Air Limbah

Pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi air limbah saat ini sudah terbangun 6 unit Pembuangan Limbah (IPLT), dimana 5 unit oleh BRR dan 1 unit oleh bantuan Donor/NGO.

O Persampahan

Pada kondisi tanggap darurat, masalah persampahan banyak yang ditangani oleh Donor/NGO, misalnya UNDP, UNICEF dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembangunan untuk persampahan dimulai tahun 2007 yaitu pembangunan TPA, dimana target berdasarkan revisi Rencana Induk ada 7 unit (BRR membangun 5 unit dan Donor/NGO membangun 2 unit). Pengelolaan persampahan juga melibatkan partisipasi masyarakat, sedangkan pengangkutan dan penolakan akhir dilakukan oleh pihak swasta (system kontrak) dan Dinas terkait.

o Drainase

Penanganan drainase serta saluran primer dan sekunder yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat, hingga Desember 2008 banyak sudah yang diperbaiki atau dibangun pada kota-kota besar yaitu mencapai 200.000 meter atau sudah mencapai 100 %, dan pada tahun 2009 ada beberapa kegiatan akan dilanjutkan oleh Pemprov NAD.

III.3.1.2.4 Energi dan Listrik

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang energi dan listrik yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada **Tabel 3. 16** di bawah ini.

Tabel 3. 16
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Energi dan Listrik

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Kelistrikan							
1	Pengadaan generator/PLTD	Paket	13	10	3	13	-	
2	Perbaikan kantor PT. PLN	Paket	1	1	-	1	-	
3	Pengadaan PLTD Apung baru	Unit	2	0	2	2	-	
4	Pembangunan PLTA Peusangan	UnitxMW	4 x 21	0	4x21	4 x 21	-	
5	Pembangunan PLTM (Mini Hidro)	Unit	-	0	-	-	-	
6	Pembangunan PLTMH (Mikro Hidro)	Unit	8	6	2	8	-	
7	Pembangunan PLTS	Unit	4,084	3084	1000	4,084	-	
8	Pembangunan PLTGU Banda Aceh	MW	2 x 30	0	2x30	2x30	-	
9	Transmission lines & GI (T/L 150 kV) Bireuen – Takengon	Kms	78	78	-	78	-	Dikerjakan oleh PLN
10	Trasmission lines (SUTM dan SKTM)	Km	852	852	-	852	-	
11	Distribution lines (SKTR)	Km	1,271	1271	-	1,271	-	
12	Stasiun Distribusi	Unit	-	0	-	-	-	
13	Sambungan Pelanggan	Unit	122,000	122,000	-	122,000	-	
14	Gardu Distribusi	Unit	597	597	-	597	-	
15	Gardu induk	Unit	1	1	-	1	-	
16	Sistem SCADA	Unit	1	1	-	1	-	
	Energi							
1	Depo BBM	Unit	1	1	-	1	-	
2	Gedung ESDM	Unit	3	3	-	3	-	
3	Pemantau Gunung Api	Unit	3	3	-	3	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

A. Kelistrikan

STRATEGI SUB BIDANG ENERGI DAN LISTRIK

- Dalam jangka pendek, diprioritaskan pada pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai terutama di wilayah-wilayah padat penduduk;
- Mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan yang semakin optimal dan terintegrasi; serta
- Mengembangkan energi alternatif, seperti Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH), tenaga surya, dsb.

Sumber: Perpres 47/2008

Kelistrikan adalah salah satu permasalahan di Provinsi NAD, karena masih bergantung pada pasokan listrik Sumatera Utara, sedangkan permasalahan kelistrikan di pulau Nias yaitu tidak mencukupinya daya yang dipasok PLN seiring semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat rehabilitasi rekonstruksi. Hingga Desember 2008, 100% pelaksanaan kegiatan untuk kelistrikan telah selesai. Dalam memulihkan kelistrikan, BRR bekerjasama dengan Donor/NGO dalam pembangunan pembangkit listrik misalnya 2 unit PLTD Apung

baru, pembangunan PLTA Peusangan dengan kapasitas 4 x 21 MW, pembangunan 2 unit PLTMH (Mikro Hidro), dan 1000 unit PLTS, dan pembangunan PLTGU Banda Aceh dengan kapasitas 2x30 MW. Selain itu, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral melalui Program Listrik desa, turut memberikan kontribusinya dengan membangun ribuan unit PLTS. PT PLN sebagai badan usaha memiliki kewajiban untuk terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi kelistrikan, misalnya dalam pembiayaan pembangunan kembali gedung kantor PLN, rehabilitasi sebagian jaringan tegangan menengah dan rendah.

Dalam upaya diversifikasi sumber energi listrik, BRR telah membangun Pembangkit Listrik tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 6 unit dan 2 unit oleh Donor/NGO. Khusus untuk daerah yang belum mendapat listrik, BRR membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 3084 unit. BRR juga memperbaiki 13 unit generator, 1.271 km jaringan transmisi-distribusi di wilayah pasca tsunami serta peningkatan kapasitas, diantaranya 78 Kms *transmission lines* dan GI (T/L 150 kV) Bireun-Takengon yang juga bekerjasama dengan PLN, pembangunan 852 km *transmission lines* (SUTM dan SKTM), 122.000 unit sambungan pelanggan, 597 unit gardu distribusi, 1 unit gardu induk, dan 1 unit system SCADA, serta pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun sebanyak 122.000 unit.

Gambar 3. 6
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Energi dan Listrik oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

B. Energi

Kegiatan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan oleh PT Pertamina serta perusahaan swasta bidang penyaluran BBM. Rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang energi 100%

telah selesai, diantaranya adalah BRR dan PT Pertamina membangun 1 unit Depo BBM di Pulau Simeulue, 3 gedung ESDM, dan 3 unit pemantau gunung api.

III.3.1.2.5 Pos dan Telematika

Untuk prasarana pos, sesuai dengan target yaitu 19 unit kantor pos yang mengalami rusak berat, hingga Desember 2008 telah ditangani 100% oleh BRR. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat, BRR telah menyelesaikan 100% kegiatannya yaitu membangun 1 unit Kantor SAR, 8 unit Kantor Meteorologi dan Geofisika, rehabilitasi/rekonstruksi 9 paket PS RRI-TVRI, 12 paket fasilitas telematika, dan pembangunan infrastruktur WIMAX Provinsi Aceh dan Pulau Nias sebanyak 1 paket.

Donor pun terlibat dalam sub bidang pos dan telematika, misalnya membangun 4 unit kantor pos dan 143 Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio, Rehabilitasi/Rekonstruksi BMF UPT Postel sebanyak 1 unit, *Radio Broadcast* Sistem Peringatan Dini (EWS - *Early Warning System*) sebanyak 1 paket. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pos dan telematika yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada tabel Tabel 3. 17.

STRATEGI SUB BIDANG POS DAN TELEMATIKA

- Jaringan telekomunikasi untuk pembangunan baru akan menggunakan teknologi *wireless line* dengan pertimbangan biaya investasi lebih murah, pembangunan lebih cepat dan *coverage area* lebih luas.
- Pembangunan jaringan telekomunikasi perdesaan akan dibiayai pemerintah.
- Investasi swasta wajib diasuransikan.
- Rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada.
- Pemanfaatan teknologi nir-kabel untuk fasilitas komunikasi baru.
- Memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, dan SLI.
- Menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam (*early warning system*).
- Mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos sebagai media komunikasi masyarakat.

Sumber: Perpres 47/2008

Tabel 3. 17
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Pos dan Telematika

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Kantor SAR	Unit	1	1	-	1	-	
2	Meteorologi dan Geofisika	Unit	8	8	-	8	-	
3	Kantor Pos	Unit	23	19	4	23	-	
4	Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio	unit	143	0	143	143	-	
5	Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel	unit	1	0	1	1	-	
6	Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI	paket	9	9	-	9	-	
7	<i>Radio Broadcast</i> Sistem Peringatan Dini (EWS - <i>Early Warning System</i>)	paket	1	0	1	1	-	
8	Fasilitas Telematika	paket	12	12	-	12	1 *)	*) Dept. Kom Info
9	Pembangunan Infrastruktur WIMAX Provinsi Aceh dan Pulau Nias	paket	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

III.3.1.2.6 Bangunan Fasilitas Umum

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

Pembangunan fasilitas umum diprioritaskan pada kawasan pesisir dan 100% sudah selesai, dimana desain bangunan tersebut mengacu pada pedoman pengurangan risiko bencana. Fasilitas umum tersebut diantaranya adalah pusat pelatihan mitigasi bencana Banda Aceh, *escape building* (2 unit oleh BRR dan 3 unit oleh Donor/NGO), museum tsunami Banda Aceh, dan Pusat kualitas struktur dan laboratorium.

STRATEGI SUB BIDANG BANGUNAN FASILITAS UMUM

Fasilitas dan Bangunan umum yang diamanatkan perlu dibangun adalah berupa fasilitas yang terkait dengan fasilitas umum penyelamatan jiwa manusia, jika terjadi lagi bencana tsunami, yaitu berupa Bangunan penyelamat (*Escape Buildings**). Bangunan museum tsunami, sebagai bangunan peringatan, dibangun di beberapa tempat sesuai dengan potensi kesesuaian untuk tujuan dimaksud.

Sumber: Perpres 47/2008

Dari hasil kunjungan lapangan pada bulan Oktober 2008, Museum Tsunami NAD sedang dalam tahap pembangunan (70%). Proyek ini terselenggara atas nota kesepahaman kerjasama 4 (empat) pihak, yaitu BRR (Satker Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD), Departemen

Energi dan Sumber Daya Alam (DESDM), Pemerintah Provinsi NAD, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Masing-masing pihak tersebut sudah mempunyai peran dan tanggung jawab sendiri-sendiri yaitu BRR membangun gedung museum, Pemerintah Daerah membebaskan lahan/tanah, sedangkan DESDM serta Pemda menyiapkan isi dan kelengkapan museum untuk pelestarian warisan dan pengembangan sosial budaya. Selain sebagai museum, bangunan ini juga berfungsi sebagai *escape building* untuk masyarakat sekitar dan berpotensi menjadi landmark kota. *Escape building* lainnya juga di bangun BRR di Kabupaten Aceh Jaya, dimana berlokasi ini berada pada $\pm$ 100 meter dari pusat pemerintahan kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Gambar 3. 7
Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Bangunan Fasilitas Umum oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kekuatan bangunan tersebut karena berada di kawasan rawan bencana. Bangunan fasilitas umum ini juga dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan sosial. Pola bangunan yang dipakai disesuaikan dengan kondisi lapangan, misalnya daerah yang dekat pegunungan, ruas-ruas jalan untuk akses rute penyelamatan terus disempurnakan dan diperlebar, serta rambu-rambu keselamatan umum sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana diperbaiki. Untuk daerah yang jauh dari pegunungan/dataran tinggi, *escape building* berada di atap bangunan ruko lantai 2.

Pusat Riset Mitigasi Bencana dan Tsunami atau *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center* (TDMRC) berfungsi sebagai pusat penyediaan data, informasi, riset, training, konsultasi, dan segala aspek kebencanaan dalam rangka menuju masyarakat Aceh siaga bencana, telah terbangun di Provinsi NAD. Lembaga riset ini dirancang khusus sebagai pusat pendidikan manajemen bencana

bertaraf internasional dan berfungsi sebagai bangunan penyelamatan untuk penyelamatan diri dari tsunami dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh air.

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang bangunan fasilitas umum yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada Tabel 3. 18.

Tabel 3. 18
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Bangunan Fasilitas Umum

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Pusat Pelatihan Mitigasi Bencana Banda Aceh	unit	1	1	-	1	-	
2	<i>Escape Hill</i>	unit	-	0	-	-	-	
3	<i>Escape Building</i>	unit	5	2	3	5	-	
4	Museum Tsunami Banda Aceh	unit	1	1		1	-	
5	Pusat Kualitas Struktur dan Lab	unit	1	1	-	1	-	
6	Koordinasi dan konsultasi program dan proyek infrastruktur Aceh dan Nias	paket	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

III.3.1.2.7 Pemeliharaan

STRATEGI SUB BIDANG PEMELIHARAAN

- Penyediaan peralatan berat dan ringan guna keperluan pemeliharaan infrastruktur jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan pelabuhan penyeberangan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- Penyediaan alat guna pengangkutan/ distribusi air minum dan sampah.
- Setiap hasil bangunan infrastruktur selalu diikuti dengan kegiatan pemeliharaan Infrastruktur dengan dukungan prasarana dan sarananya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga usia pakai dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegunaan infrastruktur.

Sumber: Perpres 47/2008

Agar hasil rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias dapat terpelihara untuk jangka panjang, maka BRR telah melaksanakan beberapa program, antara lain studi pemeliharaan infrastruktur, perlengkapan laboratorium, perlengkapan komponen jembatan, pelatihan teknisi laboratorium di kabupaten dan staf komponen jembatan, pembelian suku cadang, pemeliharaan aset infrastruktur kabupaten/kota, dan perlengkapan berat untuk pemeliharaan rutin kabupaten/kota.

BRR telah memberikan dukungan program pemeliharaan prasarana kepada Pemda

melalui pembentukan unit swakelola, yang dalam hal ini merupakan suatu inisiatif tersendiri. Wujud dari dukungan itu, antara lain adalah dengan pedoman dan peraturan bagi penguatan tim swakelola, selain pengadaan peralatan berat untuk pemeliharaan prasarana.

Tabel 3. 19
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Pemeliharaan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Studi Pemeliharaan Infrastruktur	Paket	1	1	-	1	-	
2	Perlengkapan	Paket	1	1	-	1	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	laboratorium							
3	Perlengkapan komponen Jembatan	Paket	1	1	-	1	-	
4	Pelatihan teknisi laboratorium di Kabupaten dan staf komponen jembatan	Paket	1	1	-	1	-	
5	Pembelian suku cadang untuk perlengkapan komponen Jembatan	Paket	1	1	-	1	-	
6	Pemeliharaan aset infrastruktur Kabupaten/ Kota	Paket	1	1	-	1	-	
7	Perlengkapan berat untuk pemeliharaan rutin kabupaten/ kota	Paket	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

III.3.1.2.8 IREP

Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (*Infrastructure Reconstruction Enabling Program*/IREP) dilaksanakan untuk mengatasi terjadinya permasalahan dalam realisasi pembangunan infrastruktur besar. Program ini merupakan kerjasama BRR dengan Bank Dunia, dan sumber dananya berasal dari MDF. Komponen-komponen IREP mencakup :

1. Program Manajemen Infrastruktur (*Infrastructure Program Management* - IPM);
2. Perencanaan Infrastruktur dan Fasilitas, Desain, Konstruksi dan Pengawasan Infrastruktur Pantai Barat (*West Coast Infrastructure and Services Planning, Design and Construction Supervision* - PDCS West Coast);
3. Perencanaan, Desain dan Pengawasan Konstruksi Infrastruktur Nias (*Nias Infrastructure Planning, Design and Construction Supervision* - PDCS Nias);
4. Perencanaan, Desain, Pelelangan, dan Pengawasan Konstruksi serta Peningkatan kapasitas bagi infrastruktur strategis di tingkat provinsi (*Planning, Design, Procurement and Construction Supervision* - PDCS Strategic Infrastructure);
5. Manajemen Keuangan untuk Proyek Keuangan BRR (*Financial Management* - FM).

Tabel 3. 20
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang IREP

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Program Manajemen Infrastruktur (<i>Infrastructure Program Management</i> - IPM)	Paket	1	1	-	1	1 *)	*) Dept. Pekerjaan Umum
2	Perencanaan Infrastruktur dan Fasilitas, Desain, Konstruksi dan Pengawasan Infrastruktur Pantai Barat (<i>West Coast Infrastructure and Services Planning, Design and Construction Supervision</i> -	Paket	1	1	-	1	2 *)	*) Dept. Pekerjaan Umum

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	PDCS West Coast)							
3	Perencanaan, Desain dan Pengawasan Konstruksi Infrastruktur Nias (<i>Nias Infrastructure Planning, Design and Construction Supervision</i> - PDCS Nias)	Paket	1	1	-	1	3 *)	*) Dept. Pekerjaan Umum
4	Perencanaan, Desain, Pelelangan, dan Pengawasan Konstruksi serta Peningkatan kapasitas bagi infrastruktur strategis di tingkat provinsi (<i>Planning, Design, Procurement and Construction Supervision</i> - PDCS Strategic Infrastructure)	Paket	1	1	-	1	4 *)	*) Dept. Pekerjaan Umum
5	Manajemen Keuangan untuk Proyek Keuangan BRR (<i>Financial Management</i> - FM)	Paket	1	1	-	1	5 *)	*) Dept. Pekerjaan Umum

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Program IREP bertujuan untuk memberikan dukungan pada 2 (dua) tahapan yaitu 1) tim manajemen di bawah pengawasan BRR yang bertugas membantu perencanaan strategis dan koordinasi untuk semua kegiatan rekonstruksi untuk Aceh dan Nias, dan 2) tim teknis yang bertanggung jawab dalam menyusun rancangan serta pelaksanaan program infrastruktur. Infrastruktur yang dicakup IREP yaitu tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemda dalam perencanaan strategis, rancangan proyek, pelaksanaannya serta pengawasannya. IREP juga memfokuskan pada masalah operasional dan pemeliharaan untuk mempersiapkan peran Pemda secara lebih baik dalam memastikan keberlanjutan investasi rekonstruksi dan pembangunan daerah tersebut di masa yang akan datang.

III.3.1.3 Pemulihan Perekonomian

Berdasarkan Perpres 47/2008, diketahui bahwa kebijakan Perekonomian secara umum adalah :

1. Menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan melalui sektor pertanian, industri dan koperasi;
2. Pemulihan aset produktif masyarakat yang hilang atau rusak di bidang perekonomian, seperti pengembangan pasar tradisional hingga pasar grosir;
3. Pemulihan segera pendapatan (*income-generating*) masyarakat;
4. Pengembalian kepercayaan diri para pelaku usaha;
5. Melibatkan peran serta masyarakat;
6. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat;
7. Peningkatan *skill* SDM dan tenaga teknis di bidang ekonomi;
8. Pemulihan layanan teknis, sarana dan prasarana utama di bidang ekspor; serta
9. Penguatan kelembagaan untuk mendukung terbukanya peluang investasi dan ekspor serta peningkatan mutu produk unggulan.

Pemulihan bidang Perekonomian terdiri dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup dan pengembangan usaha. Kegiatan Pemulihan Bidang Perekonomian dilaksanakan baik di Provinsi NAD maupun di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Secara khusus strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perekonomian untuk Provinsi Aceh ditetapkan strategi sebagai berikut:

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan membuka akses kesempatan usaha seluas luasnya kepada masyarakat Aceh yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi secara umum, khususnya usaha ekonomi kecil dan menengah;
- Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya investasi melalui promosi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah di bidang investasi dan perdagangan;
- Meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan kawasan dan sentra produk-produk unggulan wilayah (pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan); serta
- Menguatkan kapasitas kelembagaan pelaku kegiatan ekonomi melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

Secara khusus, strategi Kepulauan Nias adalah sebagai berikut:

- Pemberian bantuan modal kerja dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses finansial ke sumberdaya produktif. Kebijakan ini diserahkan pengaturannya kepada kelompok-kelompok kerja yang telah dibentuk sebelumnya. BRR dan Pemda berperan menjadi fasilitator bantuan modal dan mengajak kerjasama lembaga-lembaga keuangan formal lainnya. Sementara itu, lembaga keuangan mikro dikembangkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan:
 - (i) penciptaan lapangan kerja,
 - (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - (iii) penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan degradasi lingkungan hidup yang berdampak negatif pada keberlanjutan perekonomian jangka panjang.

III.3.1.3.1 Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)

Bidang pertanian, meliputi sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub-sektor perkebunan dan sub-sektor peternakan. Kehancuran dan kerusakan di sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), mengakibatkan sekitar 300.000 petani kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, karena rusaknya lahan pertanian, yakni lahan sawah seluas 23.330 ha; lahan palawija/tegalan seluas 24.345 ha dan lahan perkebunan (tanaman keras) seluas 102.461 ha. Serta 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan

STRATEGI SUB BIDANG PERTANIAN (TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN)

Kebijakan:

- Pemulihan aset produktif masyarakat dan aset publik yang rusak akibat tsunami.
- Peningkatan sarana dan prasarana di bidang pertanian.
- Memulihkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.
- Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- Pengembangan sentra-sentra produksi komoditas unggulan.

Strategi:

- Menjaga ketersediaan pangan untuk pengungsi korban tsunami.
- Memulihkan pelayanan pemerintahan dalam bidang pertanian.
- Memulihkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.
- Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pertanian dan pedesaan.
- Memperkuat fondasi ekonomi melalui pengembangan kawasan pertanian (misalnya kawasan peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
- Pembangunan dan pengembangan balai benih

Sumber: Perpres 47/2008

unggas) hilang. Sub bidang pertanian terbagi ke dalam tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pertanian yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 21
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Pertanian

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pertanian							
	Pembangunan lining jaringan irigasi tingkat usaha tani	M	154,885	74,070	80,815	154,885	-	
	Bantuan Materi Usaha Tani	Ha	6,200	6,200	-	6,200	-	
	- Rehabilitasi Lahan Sawah	Ha	16,356	11,000	5,356	16,356	-	*) 1000 ha, RKP 2009
	- Pengembangan Padi Sawah (Agroinput)	Ha	25,259	8,922	16,337	25,259	-	
	- Rehabilitasi Lahan Kering	Ha	2,450	2,450	-	2,450	-	
	- Pengembangan Lahan Kering/ Tegalan (Agroinput)	Ha	14,824	14,824	-	14,824	-	
	Percetakan sawah baru	Ha	2,921	907	-	907	2,014	Dinas Tan. Pangan Kab/kota.NAD/ Nias **) 1500 ha - RKP 2009),
	Pembangunan / Rehabilitasi Balai Benih Tanah (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus	Unit	19	19	-	19	-	
	Pembangunan Gudang dan Mesin RMU	Unit	92	75	-	75	17	Dinas Tan. Pangan Kab/kota
	Pembangunan Balai Pertemuan Petani	Unit	154	154	-	154	-	
	Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan	Unit	1	1	-	1	-	
	Pengadaan alat mesin pertanian (Alat Pertanian Kecil, Traktor 4 WD, Hand Traktor dan Hand Sprayer)	Unit	13,457	4,186	9,271	13,457	-	
	Pengadaan Gudang Alsintan dan Saprotan	Unit	24	24	-	24	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Pendamping	Orang	814	814	-	814	-	
	Penataan/ Penguatan Kelembagaan Petani	Paket	264	264	-	264	-	
	Bantuan Pembiayaan	Paket	32	32	-	32	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pertanian Melalui LKM							
	Pengembangan Terminal Agribisnis	Unit	3	1	-	1	2	Dinas Prov. NAD
	Pengembangan Kawasan Tan. Pangan dan Hortikultura	Kwsn	5	4	-	4	1	Dinas Tan. Pangan Kab/kota. *) 1 kws - RKP 2009),
	Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Rusak Ringan	Paket	1	1	-	1	-	
	Pembangunan Gedung Benih BPTP	Unit	1	1	-	1	-	
	Ruang dan Peralatan Lab. BPTP	Unit	1	1	-	1	-	
	Demplot Teknologi SRI Budidaya Padi	Ha	100	100	-	100	-	
	Bantuan Riset Pengembangan Kebun Organik dan Nursery Hortikultura	Paket	1	1	-	1	-	*) 1 Unit, RKP 2009.
	Peternakan							
	Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	36,817	32,917	3,900	36,817	-	
	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular	Ekor	35,785	35,785	-	35,785	-	
	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	53,270	48,900	-	48,900	4,370	Disnak. Prov. NAD/ Nias
	Pembangunan Poskeswan dan Gudang Fasilitas IB	Unit	30	20	1	21	9	Disnak Prov. NAD
	Pembangunan Pasar Hewan	Unit	7	2	-	2	5	Disnak. Kab/Kota
	Tempat Penjualan Daging	Unit	7	7	-	7	-	
	Pembangunan tempat/ Rumah Pemotongan Ternak	Unit	15	7	-	7	8	Disnak. Kab/Kota
	Pembangunan BPP, Gedung Karantina Hewan dan Laboratorium	Unit	2	2	-	2	-	
	Pembangunan Rumah Paramedis	Unit	6	6	-	6	-	
	Pembangunan Kandang Isolasi, Penggemukan Ternak dan Kandang Produksi Ternak Unggas	Unit	29,591	4,081	25,510	29,591	-	
	Pengadaan Storage N2 Cair Lengkap	Paket	1	1	-	1	-	
	Peningkatan Kegiatan Lab. Dan Obat-obatan	Paket	8	8	-	8	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Poskeswan							
	BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	22	22	-	22	-	
	Pelatihan Penyuluh dan Petugas Inseminator	Orang	212	212	-	212	-	
	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	6	6	-	6	-	*)1 kawasan, RKP 2009
	Revitalisasi Research Station Peternakan	Paket	1	1	-	1	-	
	Pemb. Lab. Kesehatan Hewan Type A (Lengkap dengan Peralatan Lab. Dan Mebelair)	Paket	1	1	-	1	-	
	Pembangunan Tempat Instalasi Karantina	Unit	1	1	-	1	-	
	Perkebunan							
	Pembangunan Jalan Produksi	M	30,386	30,386	-	30,386	-	
	Rehabilitasi Kantor	Unit	10	10	-	10	-	*)1 Unit, RKP 2009.
	Rehab, Intensifikasi, Penanaman, Perawatan, Tan. Perkebunan (kelapa sawit, kakao, kelapa, karet)	Ha	32,011	17,111	14,900	32,011	-	*)900 ha, RKP 2009
	Penyediaan bibit tanaman (kelapa sawit dan kakao)	Batang	6,332,131	2,721,500	3,610,631	6,332,131	-	
	Pendidikan, Pelatihan fasilitator dan Penyuluh Pendamping	Orang	535	85	-	85	450	Dis. Perkebunan Kab/Kota
	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Orang	405	405	-	405	-	
	Peralatan Pengolahan Hasil Kebun Rakyat	Paket	28	28	-	28	-	
	Pembangunan Gd. Lab. Analisa Kualitas Hasil Produksi	Paket	2	-	-	-	2	Disbun. Prov. NAD
	Kantor Oprasional Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Sawit (100 M2)	Unit	4	4	-	4	-	
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	1	1	-	1	-	
	Rumah Dinas Kepala Laboratorium dan Staff	Unit	2	-	-	-	2	Disbun. Prov. Aceh
	Pembangunan Sarana UPTD Nilam	Paket	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

A. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Melalui proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 s/d 2008, telah mampu menyediakan pekerjaan bagi 304.582 keluarga petani (KK), melalui kegiatan padat karya pada saat pelaksanaan proyek serta telah selesainya rehabilitasi sebagian besar lahan pertanian, baik berupa lahan sawah, lahan palawija/tegalan) dan perkebunan. Lahan pertanian (Sawah dan Tegalan) yang sudah direhabilitasi seluas 85.132 Ha dari areal pertanian yang rusak seluas 47.675 Ha.

Selain rehabilitasi lahan pertanian untuk mengganti kerusakan lahan pertanian, BRR telah menyediakan traktor, mesin dan peralatan pertanian berupa traktor serta alat pertanian kecil. Termasuk penggilingan padi (*Heuleur/Rice Milling Unit*) dan gudang. Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura juga telah tertuntaskan seperti adalah pembangunan lining irigasi, pembangunan Balai Benih Utama (BBU), dan Balai Benih Induk (BBI); gudang Alsintan, gedung Balai Pertemuan Petani, dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*).

B. Peternakan

Sepanjang tahun 2006 s/d 2008 BRR telah melakukan *restocking* ternak besar (sapi/kerbau), ternak kecil (kambing), unggas terutama ayam ras. Program pendukung pengembangan peternakan adalah pembangunan Poskeswan; pembangunan Pasar Hewan; Tempat Pemotongan Hewan; Tempat Penjualan Daging; pengembangan Kebun HMT dan Tempat Penempatan Ternak.

C. Perkebunan

Pada sub-sektor perkebunan Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan yang telah dilakukan sejak tahun 2006 yaitu sebesar 6.703 Ha. Jika mengacu kepada data Rencana Induk, luas areal kebun yang rusak adalah sebesar 102.461 Ha. Selain telah merehabilitasi areal kebun, telah dilakukan penyediaan bibit kelapa sawit dan penyiapan lahan (*Land clearing*) untuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Rehabilitasi dan pengembangan sub-sektor perkebunan telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pencaharian bagi keluarga petani perkebunan (KK), sejak pelaksanaan proyek, melalui program padat karya rehabilitasi kebun, pembangunan jalan produksi hingga pemeliharaan kebun hingga berproduksi.

Penanaman bibit kelapa sawit sebanyak 1000 buah ini merupakan salah satu program bantuan dari BRR NAD-Nias dalam rangka membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat pada awal tahun 2008. Penanaman ini bertempat pada lintasan jalan Banda Aceh-Calang-Meulaboh. Tepatnya berada di kec. Krueng Sabee, Kab Aceh Jaya. Namun kelanjutan dari penanaman ini telah terlantar pemeliharaannya setelah 6 bulan penanamannya. Sehingga masyarakat beralih kepada penanaman tanaman alternatif yaitu penanaman cabai hijau, karena dinilai akan lebih produktif dalam waktu cepat. Penanaman bibit ini dilaksanakan pada areal dengan luas + 3 Ha.

Beberapa hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pertanian dapat dilihat pada gambar 3.8.

Gambar 3. 8
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Pertanian oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

III.3.1.3.2 Perikanan

STRATEGI SUB BIDANG PERIKANAN

Kebijakan:

- Memulihkan aset pelayanan publik dan aset-aset produktif masyarakat serta menciptakan kegiatan-kegiatan padat karya sebagai sumber pendapatan sementara masyarakat perikanan korban tsunami.
- Memulihkan mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan melalui pengembangan industri perikanan yang tangguh dan handal.
- Mengembangkan infrastruktur perikanan yang handal guna merangsang investasi industri perikanan.

Strategi:

- Penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum.
- Pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya.
- Pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan.
- Rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak.
- Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitasi pelabuhan perikanan.
- Pengembangan agro-industri berbasis perikanan.

Sumber: Perpres 47/2008

Pada sub sektor perikanan telah direhabilitasi tambak yang rusak, telah disediakan sejumlah Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT) dan boat yang direhabilitasi, dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) telah berhasil direhab dan telah dibentuk UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) untuk melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi.

Tabel 3. 22
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Perikanan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pembuatan Boat Nelayan	Unit	4,121	3,133	988	4,121	-	
	Pengadaan Alat Tangkap	Unit	3,532	2,935	597	3,532	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pelabuhan Perikanan			-	-	-	-	
	- Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo	Unit	1	1	-	1	-	
	- Pangkalan Pendaratan Ikan	Unit	31	25	5	30	1	Dis. Perik & kelautan prov. NAD **) 2 unit, RKP 2009
	Galangan Kapal	Paket	67	11	56	67	-	*) 1 pkt, RKP 2009
	Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Unit	4	4	-	4	-	
	Pengadaan GPS dan Fish Finder	Unit	72	72	-	72	-	
	Pembuatan Rumpun	Paket	26	14	12	26	-	
	Bagan Apung	Unit	59	11	35	46	13	Dis. Perik & Laut Kab/Kota
	Rehabilitasi Tambak	Ha	18,631	7,699	8,078	15,777	2,854	Dis. Perik & Laut Kab/Kota. **) 775 ha, RKP 2009
	Agroinput Tambak	Ha	10,532	7,714	100	7,814	2,718	Dis. Perik & Laut Kab/Kota
	Bantuan Hatchery	Unit	55	55		55	-	
	Pembangunan Keramba Jaring Apung	Unit	485	132	120	252	233	Dis. Perik & Laut Kab/Kota
	Pabrik Es	Paket	64	5	30	35	29	Dis. Kan Kab/Kota NAD/ Nias
	Pengadaan Cold Storage	Paket	7	1	-	1	6	Dis. Perik & Kelautan Prov. NAD **) 1 unit RKP 2009
	Unit Pengolahan Ikan (UPI)/ Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan (SPI)	Paket	229	229	-	229	-	
	Pembangunan Laboratorium/ BPP Perikanan	Paket	1	1	-	1	-	
	Fasilitas Lab. SUPM Ladong	Paket	1	1	-	1	-	
	Fasilitas Lab. GIS	Paket	1	1	-	1	-	
	Pembangunan Pasar Ikan	Paket	7	4	3	7	-	
	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bidang	Paket	492	1	491	492	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Perikanan							
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan	Paket	2	2		2	-	
	Pengembangan Kelembagaan/ Koperasi Nelayan	Paket	94	1	26	27	67	Dis. Kan Kab/Kota NAD/ Nias
	Pilot Project Pendederan Kerapu	Paket	1	1	-	1	-	
	Pembangunan Jetty dan Pengerukan Anak Laut	Paket	1	1	-	1	-	
	Pengemb. Percontohan Ikan Air Tawar unggulan	Paket	16	16	-	16	-	
	Pembangunan Kolam Air Deras	Paket	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Beberapa hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pertanian dapat dilihat pada gambar 3.9.

Pembangunan Tempat Pelelangan ikan di kota Calang ini merupakan relokasi dari tempat lama yang sebelumnya telah hancur yang berada dipinggir pantai pada lintasan jalan Banda Aceh-Calang-Meulaboh.

Alokasi pembangunan PPI ke tempat baru ini dinilai masih sangat strategis karena bersebelahan langsung dengan sungai yang bermuara ke laut (± 300 m dari laut). PPI ini juga dilengkapi dengan tempat pelabuhan pendaratan ikan yang telah memenuhi standar dan berdekatan langsung dengan pasar ikan, pasar daging, pasar ternak dan pasar sayur. Bangunan PPI dibangun dengan luas ± 300 m persegi pada areal ± 1 Ha persegi, letaknya sangat strategis akses dari kota Calang hanya 100 meter. Pembangunan pasar ikan baru ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemda

Kab.Aceh Jaya dan dukungan pendanaan dari BRR NAD-Nias. Disamping itu PPI ini juga dilengkapi dengan balai musyawarah berjarak hanya 50 m dari PPI yang diperuntukkan bagi para nelayan.

Gambar 3. 9
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Perikanan oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

III.3.1.3.3 Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan proyek untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha.

program lain yang telah terealisasi antara lain rehabilitasi hutan alam; rehabilitasi hutan kota; pengembangan hutan konservasi; pengukuran kawasan hutan (tata batas); tumpangsari hutan

rakyat; peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan; peningkatan kelembagaan lokal; restorasi kawasan bufferzone; transplantasi terumbu karang dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas.

Untuk program lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam; rehabilitasi hutan kota; magersari (tumpangsari di hutan); bantuan bibit kepada masyarakat; pengembangan hasil hutan Non Kayu; pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; Pawang Uteun & Inong Beuraleu sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium. Klimatologi lapangan.

STRATEGI SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan:

- Pemulihan kembali kawasan pesisir, penyangga, *mangrove*, hutan pantai dan hutan alam yang rusak baik akibat bencana alam maupun yang telah mengalami degradasi.
- Perlindungan terhadap kawasan lindung (*protected area*) eksisting.
- Pemulihan kembali perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya hutan.
- Peningkatan SDM dan tenaga teknis di bidang kehutanan.

Strategi:

- Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (*green belt*), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai.
- Mengamankan fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan.
- Memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, dengan strategi menyediakan material dasar pembangunan lainnya yang dapat mengantisipasi penebangan hutan yang terjadi.
- Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam pelestarian hutan lindung dan pengendalian pemanfaatan hutan lainnya.
- Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan terutama Departemen Kehutanan.

Sumber: Perpres 47/2008

Tabel 3. 23
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Rehabilitasi Fasilitas Kantor Dinas Kehutanan Provinsi	Unit	1	1		1	-	
	Penguatan kawasan hutan (tata batas, rekonstruksi, orientasi dan pemeliharaan batas)	Km	134	70		70	64	DisHut. Prov. NAD
	Pengembangan database kehutanan dan pelatihan sistem informasi kehutanan	Unit	3	3		3	-	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan	Ha	164,044	1,449	162,595	164,044	-	
	Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Klp	76	18		18	58	DisHut. Kab/Kota
	Rehabilitasi Hutan Pantai	Ha	16,775	1,448	516	1,964	14,811	DepHut.

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lokal	Paket	23	8		8	15	DisHut. Kab/Kota
	Rehabilitasi Hutan Kota	Ha	166	166		166	-	
	Restorasi Kawasan Bufferzone	Ha	267	267		267	-	
	Transplantasi Terumbu Karang	Paket	1	1		1	-	
	Pembangunan Laboratorium Klimatologi Lapangan	Paket	1	1		1	-	
	Perbaikan dan Pengembangan Fasilitas Ekowisata (Wilayah Wisata)	Paket	3	3		3	-	
	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Kab	7	7		7	-	
	Penghijauan Reservoir Waduk Alue Baroh Desa Klip	Paket	1	1		1	-	
	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	13	13		13	-	
	Pengembangan Hutan Pendidikan STIK (Belanja Sosial)	Paket	1	1		1	-	
	Pendidikan dan pelatihan Teknis Petugas Kehutanan	Org	150	150		150	-	
	Pembuatan Tanaman Hutan Mangrove	Ha	6,540	5,572	968	6,540	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

III.3.1.3.4 Pengembangan Usaha

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pertanian yang dilaksanakan oleh BRR dapat dilihat pada tabel 3.24.

Tabel 3. 24
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Pengembangan Usaha

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Industri							
	Bantuan Langsung Masyarakat Industri	Orang	5,281	5,281	-	5,281	-	
	Pilot Project pengembangan Industri Garam Rakyat	Lokasi	3	3	-	3	-	
	Fasilitas Pendukung Industri	Unit	105	5	100	105	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pengadaan Peralatan Pendukung Alat Produksi dan Peyelesaian Bangunan Gedung Batik Aceh Serta Pengembangan Desa Batik Aceh	Paket	3	3	-	3	-	
	Peningkatan Kualitas Produk Pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar	Paket	1	1	-	1	-	*) 1 pkt, RKP 2009
	BLM Penguatan Perajin Sentra dan Non Sentra Industri	Paket	29	27	-	27	2	Dis. Indag. Prov. NAD
	BLM Modal LKM	Unit	138	138	-	138	-	
	Bantuan Pengembangan Industri kepada Dekranas	Paket	1	1	-	1	-	
	Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif	Kab	4	3	1	4	-	
	Pembangunan Pabrik Es	Paket	3	2	1	3	-	
	Bantuan Pondok Kerja, Modal dan Peralatan Kerja untuk Pengembangan KUD	Unit	6	6	-	6	-	
	Pengembangan Desa Konveksi	Paket	1	1	-	1	-	
	Pembangunan Gedung Promosi Produksi Hasil Kerajinan	Paket	1	1	-	1	-	
	Perdagangan dan UKM			-		-		
	Bantuan Modal Bergulir bagi Grosir dan Pedagang Pasar	Unit	13,779	897	12,882	13,779	-	
	Pengadaan Cold Storage & Truck Cold Storage	Unit	1	1		1	-	
	Pasar Induk/ Grosir/ Tradisional	Unit	89	57	32	89	-	
	Rehabilitasi/ Pembangunan Gudang Transito	Paket	1	1		1	-	
	Pembangunan Pasar dan Pertokoan di Labui (Termasuk Lanjutan 2008)	Paket	1	2		1	-	
	Pembangunan Halte di Labui	Unit	3	3		3	-	
	Pemberdayaan Koperasi dan UKM Melalui LKM di setiap Kecamatan	Unit	444	259	185	444	-	
	Bantuan Modal LKM untuk Usaha Masyarakat dan BLM aset Produktif	Orang	77,316	55,000	22,316	77,316	-	
	Penguatan Kelembagaan Aceh Mikro Finance	Unit	2	1	1	2	-	
	Pengembangan AMF Center dan Perwakilannya di Kab/ Kota	Unit	43	22		22	21	Dis. Indag. Prov. NAD
	Bantuan Teknis dan Manajemen LKM	Paket	100	100		100	-	
	Bantuan Modal Usaha Penghuni Huntara	Paket	1	1		1	-	
	Pendirian Kelembagaan Koperasi Terpadu	Paket	1	1		1	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi	Unit	60	60		60	-	
	Penyelenggaraan Program Pelatihan	Orang	2,016	2,016		2,016	-	
	Pelatihan LKM	Orang	410	410		410	-	
	Pengemb. Pusat Distribusi Koperasi (UKM Trading)	Paket	2	2		2	-	
	Pengembangan Pusat Pasar Ekspor	Paket	2	2		2	-	
	Penguatan IOO (Investor Outreach Office)	Paket	2	2		2	-	
	Penguatan Klinik Kemasan dan Merk UKM	Paket	2	2		2	-	
	Pembinaan Manajemen AMF	Paket	1	1		1	-	
	Pemb. Gedung Promosi Hasil Kerajinan	Paket	1	1		1	-	
	Ketenagakerjaan			-		-	-	
	Jasa Pelatihan	Orang	100,000	12,835	87,165	100,000	-	
	Pembangunan/ Rehab. BLK dan Peralatan BLK	Unit	10	5		5	5	Disnakertrans. Prov. NAD
	Pekerja Cash For Work	Orang	91,242	-	91,242	91,242	-	
	Pelatihan Pegawai	Orang	247	138	109	247	-	
	Pebangunan Jalan di Lingkungan BLK Banda Aceh	Paket	1	1		1	-	
	Informasi Bursa Kerja	Paket	1	1		1	-	
	Pengadaan Peralatan Kantor Workshop KLIK Aceh Selatan.	Paket	1	1		1	-	
	Parwisata			-			-	
	Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/ Prasarana Objek Wisata	Paket	29	29		29	-	
	Pelatihan Bidang Pariwisata	Paket	11	11		11	-	
	Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Paket	4	1		1	3	Dis. Budpar kab/ kota
	Pengembangan dan studi pengembangan wisata	Paket	57	7	0	7	50	Dis. Budpar NAD/ Nias
	Pengembangan Usaha Ekonomi Pariwisata	Paket	59	59		59	-	
	Pembangunan Pusat Pasar Kuliner	Paket	1	1		1	-	
	Pembangunan Fasilitas Wisata Kuliner di sepanjang Kuala Cakra	Paket	1	1		1	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Pendidikan	Paket	1	1		1	-	
	Pengembangan Budaya Lobster Air	Paket	1	1		1	-	
	Pengembangan Paket Wisata Terpadu (Termasuk Bus Wisata)	Paket	1	1		1	-	*) 1 pkt, RKP 2009

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

D. Industri

Sejak tahun anggaran 2005 telah direalisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) industri dan peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati serta pengembangan industri garam rakyat (Pilot Proyek) dan kegiatan pendukung pengembangan industri lainnya,

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

seperti pengembangan desa batik Aceh. Pemberian bantuan kepada industri batu bata di Simeulue. Di Provinsi NAD, untuk industri batu bata diberikan bantuan diberikan kepada kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya. Jenis bantuan yang diberikan untuk industri batu bata terdiri atas bantuan pondok kerja, modal kerja, dan peralatan kerja.

Program pendukung pengembangan industri antara lain pengembangan Desa Batik Aceh; pengembangan industri oleh Dekranas dan Bantuan pengembangan ekonomi produktif.

E. Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM)

Di sektor perdagangan, telah direalisasikan bantuan modal bergulir (*revolving fund*) bagi para pedagang grosir dan pedagang pasar baik melalui APBN dan melalui pembiayaan Non APBN (*Off Budget*). Rehabilitasi pasar diantaranya rehabilitasi pasar induk sejumlah 42 unit dan sisanya merupakan pasar grosir dan pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dengan sumber pembiayaan dari APBN dan Non APBN (*Off Budget*). Untuk kota Banda Aceh, konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro yang masih terus dalam tahap pembangunan, yaitu pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Serta sedang dilakukan pembebasan lahan untuk perluasan pasar. Program pendukung perdagangan antara lain Pembangunan/Rehab. Pasar; pembangunan halte dan pasar di Labuy dan pembangunan gudang transito.

Berdasarkan kunjungan lapangan pada bulan Oktober 2008, Pembangunan Pasar Labuy tahap kedua untuk Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi 2 yang dibiayai melalui DIPA BRR TA 2008 (Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3,174 M sudah selesai dibangun, namun belum dapat digunakan.

Pembentukan Lembaga Keuangan Micro (LKM) Bagi Beurata merupakan tujuan dari program Aceh Micro Finance BRR (LKM) didirikan pada November 2007 melalui pembiayaan DIPA BRR 2007-2008. Misi dari LKM adalah : 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan, sistem manajemen dan SDM, 2) Menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam menjalankan usahanya, sehingga mandiri dan berkelanjutan, 3) Menciptakan sistem pengembangan dan pengawasan LKM berbasis masyarakat. Bangunan kantor LKM memiliki fungsi ganda sebagai Kantor Desa Lam Pineung dan telah dilengkapi dengan listrik dan AC namun belum digunakan secara optimal, terletak di lokasi Desa Lam Pineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Pembangunan Pasar Induk Aceh Jaya dibiayai melalui sumber dana APBN dengan nilai proyek (sesuai kontrak) sebesar Rp. 4,9 miliar dan telah selesai dibangun pada pertengahan tahun 2008 namun hingga akhir tahun 2008 masih belum dapat dioperasikan karena terdapat beberapa bagian dari bangunan, dinilai belum sempurna. Seperti etalase yang terlalu lebar, dll. Sehingga diwaktu musim penghujan terjadi kemasukan air. Hal ini telah ditangani lebih lanjut oleh dinas

STRATEGI SUB BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Kebijakan:

- Mengembangkan industri kecil yang berbasis pada potensi masyarakat seperti bordir, kopiah, rencong dan kue-kue kering;
- Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk memasarkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat;
- Pengembangan sistem perdagangan dan informasi produk seperti *booklet*, *leaflet* dan brosur;
- Mengembangkan perekonomian yang berorientasi pasar sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan keunggulan kompetitif; serta
- Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing khususnya usaha kecil dan menengah.

Strategi:

- Memulihkan kembali sarana perdagangan;
- Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah;
- Membangkitkan aktivitas perdagangan; serta
- Melancarkan distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana.

Sumber: Perpres 47/2008

perindustrian, perdagangan dan UKM dalam menangani hal ini. Dan diperkirakan awal tahun 2009 akan dioperasionalkan.

Pasar Ya Hobouw terletak di ibukota Kabupaten Nias dan merupakan pasar paling modern di Pulau Nias. Berbeda dengan pasar lainnya, pasar ini menyediakan tempat berjualan beragam jenis barang dagangan seperti hasil pertanian, perikanan, kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, dan pakaian. Dengan terpusatnya berbagai kegiatan perdagangan di pasar ini diharapkan perekonomian di wilayah Kabupaten Nias pada khususnya semakin meningkat.

F. Ketenagakerjaan

STRATEGI SUB BIDANG TENAGA KERJA

Kebijakan:

- Melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja;
- Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
- Penyelenggaraan program-program pelatihan dan magang tenaga kerja berbasis kompetensi; serta
- Bekerjasama dengan lembaga-lembaga profit dalam mengikutsertakan para tenaga kerja untuk mengikuti training keterampilan.

Strategi:

- Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana, seperti balai latihan kerja;
- Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat; serta
- Memberi bekal peralatan kepada tenaga kerja yang telah dilatih agar dapat bekerja secara mandiri.

Sumber: Perpres 47/2008

Dalam rangka mendorong sektor ketenagakerjaan telah direalisasikan pelatihan keterampilan (*vocational training*) tenaga kerja, terdiri dari pembiayaan melalui APBN dan melalui kegiatan NGO (*Off Budget*). Selanjutnya Rehabilitasi Balai Latihan kerja dan peralatan BLK. Program '*cash for work*' sebanyak 91.242 orang pekerja dan pendidikan dan pelatihan pegawai. Program pendukung sektor ketenagakerjaan BRR tahun 2007 berupa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK); Peralatan BLK; Pembangunan KKK dan Pembangunan jalan lingkungan BLK.

Rekonstruksi Balai Latihan Kerja yang terletak di Desa Bawonifaoso, Teluk Dalam Nias Selatan telah terselesaikan dan dimanfaatkan guna peningkatan kapasitas tenaga kerja. Pembangunan gedung ini dibiayai oleh dana RANTF.

G. Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan yang perlu mendapat dukungan guna ekonomi dan usaha masyarakat Aceh dan Nias Kepulauan, selain melestarikan dan meningkatkan situs budaya. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BRR dalam rangka pengembangan pariwisata adalah pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata Kota Sabang serta perencanaan pemugaran kawasan wisata Pulau Sinabang; pulau Banyak dan Kawasan wisata Ujung Batee.

Untuk mendukung program pengembangan pariwisata telah dilaksanakan program pelatihan bidang pariwisata; penyelenggaraan pesta rakyat; pengembangan usaha ekonomi pariwisata dan pengembangan wisata Kota Banda Aceh.

Pembangunan fasilitas wisata kuliner di Kota Banda Aceh secara lengkap dibangun di Sepakang Pesisir Kuala Cakra melalui DIPA APBN. Keberadaan fasilitas ini sangat mendukung terhadap operasionalisasi Pelabuhan Feri Ulee Lheu dimana lokasinya berdekatan dengan fasilitas wisata kuliner. Dengan demikian keberadaan fasilitas ini dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah tersebut. Namun fasilitas ini belum sepenuhnya tuntas karena prasarana pendukung di sekitar fasilitas belum selesai seperti jalan dan pertamanan. Selain itu, belum ada kegiatan bisnis yang cukup signifikan.

STRATEGI SUB BIDANG PARIWISATA

Kebijakan:

- Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana;
- Pengembangan usaha jasa dan objek pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan berbasis pada masyarakat;
- Pengembangan pariwisata berbasiskan nilai-nilai dan budaya masyarakat;
- Pemberdayaan dan penguatan pranata kelembagaan sektor pariwisata; dan
- Perencanaan pengembangan kepariwisataan Aceh dan Pulau Nias.

Strategi:

- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana;
- Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/ Prasarana Objek Wisata;
- Menciptakan dan menumbuhkan atmosfir dan *image* yang positif dan kondusif* bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata; serta
- Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Sumber: Perpres 47/2008

Beberapa hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pengembangan usaha dapat dilihat pada gambar 3.10.

Gambar 3. 10
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Pengembangan Usaha oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

III.3.1.4 Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan

Berdasarkan Perpres 47/2008, diketahui bahwa kebijakan sosial dan kemasyarakatan secara umum adalah untuk membangun masyarakat Aceh dan Nias melalui pemeliharaan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan; pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, peningkatan peran perempuan dan anak, keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olah raga. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun masyarakat NAD dan Nias melalui pemeliharaan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil implementasi kegiatan pada bidang pemulihan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO, secara lebih terinci dapat digambarkan pada bagian berikut ini.

III.3.1.4.1 Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, disebutkan bahwa kebijakan mengenai sub bidang pemulihan pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan peran pendidikan menengah, peningkatan pendidikan tinggi, mengintensifkan pendidikan non-formal, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan pengelolaan dan pengaturan (*Governance*) manajemen layanan pendidikan agar lebih efisien, efektif dan akuntabel, mengefektifkan penelitian dan pengembangan pendidikan, mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, mengintensifkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penekanan pada penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 dan 2007 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

STRATEGI SUB BIDANG PENDIDIKAN

- Penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi di panti asuhan
- Penekanan penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional, diantaranya adalah kelengkapan bangunan fisik pendidikan untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya, sekolah kejuruan (*vocational schools*), peralatan laboratorium dan komputer, pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SDM, beasiswa, perguruan tinggi dan asrama.
- Memperkuat proses pengalihan kepada dinas terkait melalui kegiatan peningkatan mutu SDM sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Aceh dan Nias.
- Pemerataan pengembangan pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan

Sumber: Perpres 47/2008

Sedangkan dari aspek strategi untuk sub bidang pendidikan dapat dilihat dalam boks diatas.

Realisasi pelaksanaan kegiatan secara fisik untuk sub bidang pendidikan pada beberapa item kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3. 25.

Tabel 3. 25
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit TK	91	13	78	91	-	
2	Rehabilitasi sekolah	SD	664	350	314	664	-	
3	Pembangunan USB	SD	30	28	2	30	-	
4	Pembangunan Rumah Guru	Unit	178	178	0	178	-	
5	Trauma Conseling	Kab	16	16	0	16	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
6	Rehabilitasi berat, rehabilitasi ringan dan Pembangunan kembali sekolah yang hancur	SMP	293	6	287	293	-	
7	Pembangunan Sekolah Binaan/ Unggul	Paket	6	6	0	6	-	
8	Pembangunan Asrama Siswa	Unit	4	4	0	4	-	
9	Pelatihan Guru	Org	25.000	10.000	15.000	25000	-	
10	Pengembangan Mutu Sekolah (Sekolah Standar Nasional/ SSN)	skl	90	2	88	90	-	
11	Buku perpustakaan	Expl	973.308	877416	95.892	973308	-	
12	Laboratorium IPA (Kimia, Fisika dan Biologi) dan Komputer	pkt	150	150	0	150	-	
13	Operasional dan pemeliharaan	skl - thn	1.120	1120	0	1120	-	
14	Pendidikan dan pelatihan siswa (untuk 24 TC/CC)	siswa	480	0	480	480	-	
15	Vocational Training	Org	25.299	3.236	22.063	25299	-	
16	Pembangunan RKB madrasah	Unit	294	294	0	294	-	
17	Pembangunan UGB Madrasah	Unit	32	32	0	32	-	
18	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3 25 orang	OB	369	369	0	369	-	
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	m2	1.440	1423	17	1440	-	
20	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTS	pts	7	2	5	7	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Pada sektor pendidikan ini merupakan salah satu yang paling parah mengalami dampak kerusakan dan kerugian. Dampak dari peristiwa bencana gempa dan tsunami ini tidak hanya terjadi pada fisik sarana dan prasarana namun juga Sumber Daya Manusia pada sektor yang banyak menjadi korban. Pemulihan pada sektor ini menjadi salah satu prioritas dalam rangka normalisasi wilayah dan kehidupan di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias. Berdasarkan laporan Badan Pelaksana BRR, dalam *Menyinyambungkan Pemulihan, Laporan Semesteran 2008 Banda Pelaksana BRR NAD-Nias*, disebutkan hingga akhir tahun 2007 sudah hampir 900 sekolah baru yang sudah selesai dibangun. Pada tahun 2008 ada tambahan sebanyak empat sekolah menengah umum (SMU) yang akan selesai dibangun.

Selain pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah berhasil dibangun, telah dilakukan pemberian beasiswa kepada sebanyak 35.000-an kepada para tenaga pendidik dan anak didik pilihan. Sedangkan fokus pada tahun 2008 kebijakan pemulihan sektor pendidikan diarahkan pada kesinambungan sistem pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah melalui penguatan institusi tertier. Pada tahun 2008, telah dilaksanakan pembangunan sarana pelatihan yang besar di Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh. Selain itu pula dalam tahun ini diprogramkan pembangunan 3.000-an unit rumah bagi para dosen dan melakukan renovasi kampus. Untuk pembangunan sekolah internasional sesuai perencanaan diselesaikan sebelum akhir tahun 2008.

Gambar di bawah ini merupakan salah satu hasil observasi lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas dalam meninjau hasil pembangunan sekolah di daerah Kepulauan Nias. Secara khusus, gambaran sub bidang pendidikan di Kepulauan Nias berdasarkan Rancangan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun 2007-2008 yaitu terdapat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 479 unit fasilitas pendidikan, mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga universitas Sedangkan target dalam Revisi Rencana Induk adalah merehabilitasi dan membangun fasilitas pendidikan sebanyak 650 unit. Hingga tahun telah dan sedang dibangun 620 unit fasilitas pendidikan.

Gambar 3. 11
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Pendidikan oleh BRR



Pembangunan sekolah
di Sirombu Kepulauan Nias

Pembangunan RKB SMPN 1
di Muara Tiga Kabupaten Pidie

Dok: Sekretariat P3B Bappenas dan BRR NAD-Nias, Oktober 2008

Di Kepulauan Nias, kerusakan sekolah akibat bencana gempa bumi 2005 mencapai angka lebih dari 700 sekolah. Sebagian besar adalah SD sebanyak 581 sekolah, 85 SMP dan 31 SMA. Revisi Rencana Induk 2007-2009 (Perpres No. 47 tahun 2008) menyebutkan target rekonstruksi bidang pendidikan adalah 664 sekolah. Selain BRR dan UNICEF sebagai salah satu dari sekian pelaku utama dalam pembangunan sekolah, masih banyak peran NGOs baik internasional maupun lokal dalam membangun sekolah-sekolah yang rusak baik karena gempa maupun karena usia yang telah tua. Di antaranya adalah World Vision International, French Red Cross, LPAM-Nias, Spanish Red Cross, ACTED, dan Johanniter – International Assistance. Sebanyak 412 unit sekolah dibangun oleh BRR, mencakup total 62,% dari target rekonstruksi yang ditetapkan. Selain dana dari sektor pendidikan pada proyek PPK-R2PN (KRRP) juga dialokasikan dana untuk membangun 180 kelas di Kabupaten Nias dan 207 kelas di Kabupaten Nias Selatan.

Dalam kurun waktu penugasannya di Kepulauan Nias, BRR Perwakilan Nias telah mengalokasikan dana sebesar Rp 171,8 Milyar, dan terbagi dalam empat kelompok program yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi sebesar Rp 139,1 Milyar, Penyediaan Fasilitas sebesar Rp 26,3 Milyar, Program Beasiswa sebesar Rp 5,9 Milyar, dan Program Pelatihan sebesar Rp 0,397 Milyar.

Pembangunan dan rehabilitasi bangunan yang dikerjakan oleh BRR pada umumnya hampir menjangkau semua wilayah, termasuk daerah yang paling sulit aksesnya yang dilaksanakan terutama pada tahun awal pelaksanaan tugas BRR pada tahun 2005 dan 2006. Wilayah sulit yang dimaksud adalah antara lain wilayah Kecamatan Afulu, Alasa, Gomo, maupun diwilayah pulau-pulau kecil lainnya².

III.3.1.4.2 Kesehatan

Kebijakan sub bidang pemulihan kesehatan yaitu memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanggap darurat, revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat dengan kebijakan menerapkan standar minimal bangunan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Pemerintah dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas, serta menyediakan dokter ahli/ spesialis definitif, revitalisasi sarana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta institusi pendukung layanan kesehatan lainnya, pemberdayaan mitra kerja dan bantuan luar negeri dengan kebijakan meningkatkan hubungan kerjasama dalam melaksanakan/menyalurkan program/bantuan, peningkatan Sumber

² Sumber : Laporan Akhir BRR NAD-Nias Perwakilan Nias 2005-2008, Desember 2008

Daya Manusia Kesehatan melalui Program Investasi Beasiswa Pendidikan Lanjutan bagi tenaga kesehatan, dan pembuatan dan penerapan pedoman standarisasi pelayanan kesehatan berdasarkan berkearifan lokal aceh (islami) untuk Puskesmas dan Rumah Sakit. Dari hasil laporan realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor kesehatan, secara sampel dapat dilihat pada Tabel 3. 26.

Tabel 3. 26
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Rehab dan rekon Kantor Dinas Kesehatan	unit	9	17	2	19	-	
2	Rehab dan rekon Rumah Sakit	pkt	25	19	6	25	-	
3	Rehab dan rekon Pustu	pkt	117	42	75	117	-	
4	Rehab dan rekon Polindes	pkt	246	6	240	246	-	
5	Rehab dan rekon Klinik	pkt	4	0	4	4	-	
6	Rehab dan rekon BBPOM	pkt	1	1	0	1	-	
7	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	12	12	0	12	-	
8	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB	unit	15	15	0	15	-	
9	Rehab dan rekon Posyandu	unit	62	0	62	62	-	
10	Pembangunan Poskeslit	unit	55	55	0	55	-	
11	Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	kab/kota	24	24	0	24	-	
12	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	156	156	0	156	-	
13	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kab/ Keg	118	118	0	118	-	
14	Program Promosi Kesehatan	pkt	23	23	0	23	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Sektor kesehatan juga termasuk salah satu prioritas pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat pascabencana. Sama seperti halnya sektor pendidikan yang banyak memperoleh perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, sektor kesehatan juga yang termasuk yang mendapat perhatian. Hingga akhir tahun 2007, sebanyak 18 rumah sakit sudah selesai dibangun. Sedangkan pada tahun 2008, ada penambahan 3 rumah sakit dan 4 Pusat Kesehatan Masyarakat serta mengoperasikan kembali Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 33 unit. Selin itu, pada tahun 2008 pula dilakukan pengadaan berupa peralatan, pelatihan dan sanitasi. Sebanyak 15 unit peralatan medis sudah dibeli dalam tahun ini juga. Dari sebanyak 156 paket beasiswa kesehatan, telah direalisasikan lebih dari 256 paket maka pada tahun 2008 telah direalisasikan sebanyak 21 paket³.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan sudah banyak dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan baik di Provinsi NAD maupun di Kepulauan Nias. Sebagai sampel saja dapat diamati pembangunan Rumah Sakit Gunung Sitoli, di Kabupaten Nias yang dibangun oleh BRR Regional Nias melalui koordinasi dengan stakeholders lainnya. Pengembangan Rumah Sakit Gunung Sitoli hingga status per Oktober 2008 telah tersedia 180 unit tempat tidur dan unit gawat darurat (ICU). Selain itu, dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut sudah disediakan beasiswa untuk 11 spesialis, 1 Master manajemen rumah sakit, beasiswa untuk menghasilkan staf pendukung seperti teknisi laboratorium, radiographer, ahli gizi, pelatihan dan

³ Sumber: Menyinambungkan Pemulihan, Laporan Semesteran 2008 Badan Pelaksana BRR NAD-Nias

Capacity Building untuk keterampilan klinis dan peningkatan pelayanan rumah sakit. Dengan adanya Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli ini maka dijadikan sebagai rumah sakit rujukan ini yang memasuki pembangunan tahap keempat dan akan selesai pada Desember 2008. Sedangkan di Teluk Dalam, yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan, dilaksanakan pembangunannya Rumah Sakit Umum Daerah St. Lukas.

RSU Gunung Sitoli merupakan satu-satunya pusat rujukan kesehatan bagi lebih dari 712,000 penduduk Kepulauan Nias. Mempertimbangkan terpencilnya wilayah Nias serta tingginya permasalahan kesehatan yang ada, maka kebutuhan akan revitalisasi RSU Gunung Sitoli yang juga mengalami kerusakan serius karena bencana menjadi salah satu prioritas penanganan. Diawali dengan Hospital Working Group Workshop yang dimotori oleh BRR, WHO, dan Mercy Malaysia pada bulan September 2005, maka tersusunlah master plan revitalisasi RSU Gunung Sitoli.

STRATEGI SUB BIDANG KESEHATAN

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma pada semua unit pelayanan kesehatan.
- Merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana serta memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan konsep *Build Back Better*.
- Mengembangkan kesinambungan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien dan berkualitas dan mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengedepankan peran dan fungsi Pemerintah Daerah.
- Mengembangkan “*best practice*” yang disesuaikan dengan kearifan lokal/ spesifik untuk meningkatkan mutu/ kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Memperkuat sumber daya kesehatan yang mahir dan terampil untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang pada semua unit pelayanan dengan mengedepankan profesionalitas dan terstadarisasi.
- Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Sumber: Perpres 47/2008

Sementara itu untuk mengganti kompleks RSU yang sebagian besar rusak karena gempa disusunlah master plan baru yang merupakan sumbangsih dari Technical Team Mercy Malaysia. Dengan keterbatasan dana maka pembangunan fisik berdasarkan master plan baru RSU Gunung Sitoli dilaksanakan dalam empat tahap melalui mekanisme “basket funding”. Keempat tahapan ini menggunakan sumber pendanaan yang berbeda dan masing-masing tahap dibangun setelah donor memberikan dananya. Masing-masing Keempat tahap mendapat sumbangan dari Mercy Malaysia (USD 1 juta), RRC (USD1,5 juta), Pemerintah Jepang (USD 5 juta) dan Singapore Red Cross (USD 4 juta). Sedangkan BRR mengalokasikan dana sebesar USD 2 juta untuk institutional capacity building dan training SDM. Sehingga total dana yang sudah diinvestasikan untuk program ini adalah sekitar USD 13,5 juta atau setara dengan Rp 120 Milyar. Upaya peningkatan kapasitas pelayanan dan SDM dikerjakan secara simultan semenjak program revitalisasi RSU Gunung Sitoli digagas. Melalui program beasiswa BRR tahun 2006 dan 2007, sebanyak 11 (sebelas) dokter PNS Nias telah disekolahkan di UGM untuk menjadi dokter

spesialis. Diproyeksikan sekitar tahun 2011-2012 RSU Gunungsitoli akan memiliki dokter spesialis – dokter spesialis tetap dalam jumlah yang memadai. Selama para dokter Nias menempuh pendidikan spesialis, BRR bekerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito dan Fakultas Kedokteran UGM mengirim dokter spesialis/residen secara rutin ke RSU Gunung Sitoli untuk memberikan pelayanan sekaligus memberikan pelatihan kepada perawat-perawat melalui program “residency training”. Program ini dijalankan selama 3 tahun mulai dari 2007 – 2009. Sementara itu melalui program pengembangan manajemen RSU yang dimulai tahun 2007 sampai 2009, BRR bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) – Fakultas Kedokteran UGM memperbaiki kinerja organisasi dan manajemen RSU Gunung Sitoli. Perawat sebagai salah satu ujung tombak pelayanan RSU Gunung Sitoli juga dilatih secara simultan, diantaranya bekerja sama dengan

Singapore Red Cross melalui program pelatihan perawat di Alexandria Hospital dan Changi Hospital di Singapore. Tercatat sebanyak 44 peserta sudah menjalani pelatihan ini⁴.

Dengan demikian target Revisi Rencana Induk untuk membangun rumah sakit di Kepulauan Nias sebanyak 2 rumah sakit telah terpenuhi. Target yang terdapat di dalam Revisi Rencana Induk adalah pembangunan 77 unit fasilitas kesehatan, sementara pada Rancangan Renaksi Nias 2007-2008, terdapat kebutuhan rekonstruksi-rehabilitasi untuk puskesmas/pustu sebanyak 52 unit yang saat ini telah terpenuhi sebanyak 50 unit. Sejalan dengan pembangunan fasilitas fisik sektor kesehatan tersebut, untuk peningkatan pelayanan dilakukan pemberian beasiswa untuk 17 dokter spesialis (5 dari Nias Selatan), 26 dokter umum (6 dari Nias Selatan) dan 15 master (3 dari Nias Selatan).

Gambar 3. 12
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Kesehatan oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Selain di Kepulauan Nias, berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan juga sudah dibangun di Provinsi NAD. Sebagaimana hasil observasi Tim Sekretariat P3B Bappenas di daerah Kota Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya, sudah dibangun Rumah Sakit Pemerintah Daerah Type B yang dilaksanakan oleh BRR yang bekerja sama dengan pihak Pemda.

Pembangunan Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini, merupakan rumah sakit pertama tipe B. Rumah sakit ini direncanakan akan menjadi yang terlengkap di Kabupaten Aceh Jaya dan bisa menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya di sekitar Aceh Jaya. Status kemajuan pembangunan rumah sakit ini hingga November 2008 mencapai 70% dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2008. Sesuai rencana pula, pada awal tahun 2009 telah selesai finishing dan rampung untuk dioperasikan. Namun kekurangan lain adalah, jalan utama menuju rumah sakit, masih dalam proses pembebasan oleh Pemda setempat. Sehingga akses sementara masih menggunakan jalan lama, yang sedikit lebih jauh, karena harus melingkar dari perumahan penduduk. Rumah sakit ini diperkirakan akan menampung lebih dari 1000 pasien per hari dan lebih dari 300 pasien rawat inap dengan fasilitas lengkap.

III.3.1.4.3 Peningkatan Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak

Sesuai dengan kebijakan Rencana Induk dalam Perpres No. 47 Tahun 2008, kebijakan mengenai sub pemulihan peran perempuan dan perlindungan anak ditempuh melalui meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan; membangun kelembagaan dan jaringan pemberdayaan perempuan di masyarakat dan pemerintah; memastikan perempuan dilibatkan peran aktifnya

⁴ Sumber : Laporan Akhir BRR NAD-Nias Perwakilan Nias 2005-2008, Desember 2008

dalam pengambilan keputusan pembangunan Aceh dan Nias; dan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama di daerah pengungsian.

STRATEGI SUB BIDANG PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- mengembalikan fungsi kelembagaan PP, termasuk penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, penguatan jejaring kerjasama lintas program dan sektor dalam perlindungan perempuan dan anak;
- melakukan pengarusutamaan gender pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tiga tahap (tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi);
- Berfungsi dan maksimalnya peranan Biro Pemberdayaan Perempuan, DPRD, MPU, Dinas dan Mahkamah Syariah Islam;
- Meningkatnya kapasitas Biro /Bagian PP Kabupaten/kota;
- Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah yang memberikan pelayanan terhadap perempuan secara komprehensif;
- Terfasilitasi dan berfungsinya pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A;
- Terwujudnya perempuan Aceh yang mandiri di bidang ekonomi;
- Terwujudnya perempuan Aceh yang pulih dari/ tanpa trauma;
- Adanya *legal assistance* terhadap perempuan;
- Lahirnya kader-kader ulama perempuan Aceh;
- Meningkatnya kapasitas/ kemampuan perempuan wira usaha, perempuan dan informasi, teknologi dan komunikasi, perempuan dan media serta jurnalis perempuan;
- Pembuatan modul pola asuh anak;
- Adanya qanun perlindungan anak;
- Pendidikan konvensi hak anak.

Sumber: Perpres 47/2008

Dari Tabel 3. 27 di bawah ini akan ditampilkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fisik baik Provinsi NAD maupun Kepulauan Nias, sebagai berikut;

Tabel 3. 27
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Peran Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Peng-arus-utama-an Gender	Paket	3	3	0	3	-	
2	Fasilitasi <i>Women Crisis Center</i>	Unit	10	10	0	10	-	
3	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	5.300	2100	3200	5300	-	
4	<i>Training lifeskill</i> dan <i>vocational skill</i> untuk perempuan	Paket	1	1	0	1	-	
5	Fasilitasi <i>Children Center</i> dan <i>Kid Line Counseling</i>	Unit	34	19	15	34	-	
6	Reunifikasi keluarga	Anak	6.800	235	118	353	6.447	Badan/ Dinas. Kab/ Kota
7	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak	73.223	63000	0	63000	10.223	Badan/ Dinas. Kab/ Kota
8	TOT bagi pola asuh anak	Diklat	1	1	0	1	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
9	Qanun Perlindungan Anak (Akte Kelahiran Bebas)	Paket	1	1	0	1	-	
10	Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb	Paket	290	290	0	290	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Berdasarkan data Badan Pelaksana BRR dalam laporan semesteran 2008, diuraikan bahwa pada tahun 2007 telah dibangun sebanyak 43 pusat kegiatan perempuan di seluruh NAD dan Kepulauan Nias. Pusat-pusat kegiatan tersebut menyediakan serangkaian layanan terpadu yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) yang dirancang untuk mengadvokasi perempuan dalam permasalahan hukum dan ketenagakerjaan serta isu-isu lainnya yang terkait pascastunami. Sedangkan pada tahun 2008 tiga program tambahan diimplementasikan untuk memberikan dukungan khusus berkenaan dengan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui penyediaan dukungan pusat kegiatan dan bantuan di bidang hukum, diharapkan prakarsa pemulihan lain bagi perempuan dan anak akan berkembang.

Secara khusus di Kepulauan Nias, baik Revisi Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias (Perpres 47 tahun 2008) maupun Revisi Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias (Perpres 47 tahun 2008) hanya menargetkan program dan kegiatan yang bersifat non fisik dan hal ini telah dilaksanakan sampai dengan akhir TA 2008 berupa pelatihan dan sosialisasi⁵.

Gambar 3. 13
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Peran Perempuan dan Kesejahteraan
Anak oleh BRR



Pembangunan Gedung P2TP2
di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Dok : BRR NAD-Nias, Desember 2008

III.3.1.4.4 Kependudukan dan Keluarga Berencana

STRATEGI SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB

- Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap;
- Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga;
- Program perlengkapan sarana kantor pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional.

Sumber: Perpres 47/2008

Berdasarkan Perubahan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, sesuai dengan Perpres No. 47 Tahun 2008, disebutkan bahwa kebijakan dan strategi dalam keluarga berencana ditempuh melalui pemberian jaminan pelayanan keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi dengan:

- Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap;

⁵ Laporan Akhir BRR NAD-Nias Perwakilan Nias 2005-2008, Desember 2008

- Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga;
- Program perlengkapan sarana kantor pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional.

Sedangkan gambaran rencana kegiatan pada sektor ini yaitu Pendidikan dan pelatihan masyarakat sebanyak 290 paket, Penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 290 paket, pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan KB sebanyak 290 paket, Program Perlengkapan Sarana Gedung sebanyak 3 paket, pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 271 unit, dan pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10 sebanyak 3 unit.

III.3.1.4.5 Agama

Kebijakan di sub bidang agama sejalan dengan Rencana Induk sebagaimana diatur dalam Perpres No. 47 Tahun 2008 yaitu meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kehidupan beragama, pengembangan lembaga pendidikan keagamaan, serta pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama.

STRATEGI SUB BIDANG AGAMA

- Bantuan pembangunan rumah ibadah dan dayah;
- Memfungsikan masjid sebagai *escape building*;
- Pembangunan gedung/kantor Kantor Urusan Agama (KUA), Kadepag, rumah dinas, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Baitul Mal, asrama haji, dan gedung observasi hilal;
- Bantuan pengembangan lembaga pendidikan dan kapasitas aparatur agama.

Sumber: Perpres 47/2008

Tabel 3. 28 berikut ini adalah data rekapitulasi realisasi pelaksanaan pada beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang pemulihan agama, yaitu;

Tabel 3. 28
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Agama

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Bantuan pemb. Masjid	Unit	1.533	1147	89	1236	297	Dinas syariah Kab/ Kota
2	Bantuan Pemb. Meunasah	Unit	1.062	746	173	919	143	Dinas syariah Kab/ Kota
3	Bantuan Pemb. Dayah	Unit	252	252	0	252	-	
4	Bantuan pemb. Vihara	Unit	2	2	0	2	-	
5	bantuan pemb. Gereja	Unit	478	478	0	478	-	
6	Terbangunnya kembali KUA	Unit	143	99	0	99	44	Dinas syariah Kab/ Kota
7	Pelatihan Imam Masjid dsb.	Keg	585	15	570	585	-	
8	Pulihnya kondisi mental spiritual	Org	45	45	0	45	-	
9	Penelitian Keagamaan	Paket	8	8	-	8	-	
10	Asrama Haji	Unit	1	1	0	1	-	
11	Gedung Baitul Mal	Unit	24	5	0	5	19	Dinas syariah Kab/ Kota

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Dari hasil asesmen terhadap kebutuhan versi terbaru yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BRR menunjukkan bahwa 1.533 mesjid dan 1.062 meunasah di NAD memerlukan bantuan. Angka sebanyak itu diperoleh dari hasil revisi kebutuhan yang baru. Hanya saja, sarana-sarana ibadah yang mesti diperbaiki lebih karena kondisi sarana tersebut sudah buruk saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami.

Selain sarana ibadah yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi, masih terdapat banyak dayah atau pesantren yang perlu direhabilitasi. Maka itu, pada tahun 2008 terdapat beberapa proyek yang penting untuk dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu sebanyak 315 mesjid, 138 meunasah, dan 16 dayah dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2008.

Bila dilihat dari sisi pendanaan, maka Badan Pelaksana BRR telah mengalokasikan dana pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 143,6 milyar untuk membantu pembangunan 379 unit sarana ibadah yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Provinsi NAD dan alokasi dana sebesar Rp. 23,7 milyar untuk membangun sarana ibadah sebanyak 73 unit di Kepulauan Nias. Sebagaimana disebutkan dalam laporan semesteran 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana BRR bahwa institusi tersebut sudah melakukan rehabilitasi lebih dari 1.000 sarana peribadatan yang terdiri dari 881 unit senilai Rp. 8,7 miliar pada tahun 2005, 379 unit senilai Rp. 27 miliar pada tahun 2006 dan sebanyak 259 unit senilai Rp. 5 miliar pada tahun 2007.

Gambar 3. 14
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Agama oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Sebagai gambaran konkret hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana peribadatan, Gambar 3. 14 menampilkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Sekretariat P3B Bappenas. Tim ini melakukan pemantauan pembangunan mushalla yang dibangun oleh Badan Pelaksana BRR di daerah Gampoeng Meunasah Cut Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.

Pembangunan mushalla ini berlokasi di kompleks Perumahan Palang Merah Turki di Desa Lampuuk terdapat beberapa pembangunan sarana ibadah oleh BRR-Satker Pemulihan dan Pengembangan Bidang Agama, Sosial dan Budaya Wilayah I, salah satunya adalah pembangunan mushalla. Pembangunan mushalla ini menggunakan dana DIPA 2008 sebesar Rp 300 juta dan pembangunannya swakelola oleh masyarakat setempat.

Mushalla tersebut sedang dalam proses pembuatan, dan di sebelah mushalla juga dibangun semacam balai pertemuan warga. Menurut Kepala Desa, bangunan tersebut akan digunakan untuk berbagai macam kegiatan warga, misalnya Posyandu, kegiatan ibu PKK, dan lain sebagainya.

Sarana peribadatan lainnya yang sudah dibangun oleh Badan Pelaksana BRR yaitu mesjid yang berlokasi di Kemukiman Klieng, Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil pengamatan Tim Sekretariat P3B Bappenas ketika melakukan kunjungan lapangan menunjukkan sedang dilakukan pembangunan sarana ibadah oleh BRR-Satker Pemulihan dan Pengembangan Bidang

Agama, Sosial dan Budaya Wilayah I, salah satunya adalah pembangunan/rehabilitasi mesjid Jamik Nurul Falah di Kemukiman Klieng, Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan mesjid ini menggunakan dana DIPA 2008 dan pembangunannya swakelola oleh masyarakat setempat. Pada Oktober 2008, kondisi mesjid tersebut sedang dalam tahap finishing dan belum di cat dan belum dignakan oleh masyarakat setempat.

Khusus untuk di Kepulauan Nias, program utamanya adalah peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang difokuskan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana ibadah. Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi Nias 2005-2009 (Perpres 30 tahun 2005) menyebutkan kebutuhan rehabilitasi untuk 1.935 sarana ibadah. Namun Revisi Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias (Perpres 47 tahun 2008) menyebutkan target penanganan sarana ibadah sebanyak 504 unit (475 unit gereja, 28 unit masjid, 1 unit vihara). Sementara itu Rencana Aksi Rekonstruksi Nias 2007-2009 yang merupakan produk dari evaluasi paruh waktu (Mid Term Review 2005-2006) menyebutkan angka target 1.419 rumah ibadah yang perlu mendapatkan bantuan. Sampai dengan akhir TA 2008 telah diberikan bantuan rehabilitasi pada 1.340 rumah ibadah dimana diantaranya terdapat 1.304 unit gereja yang artinya telah melampaui KPI yang ditetapkan⁶.

III.3.1.4.6 Sosial

Kebijakan Sosial diarahkan dalam rangka membangun landasan masyarakat madani Aceh yang kuat menuju kemandirian sosial. Beberapa kegiatan utama di dalam kebijakan sosial meliputi pengembangan sistem penanganan kelompok rentan, pembangunan sosial masyarakat pedesaan berbasis kawasan, pengembangan kapasitas masyarakat Aceh untuk transformasi sosial, dan pembangunan sistem kesejahteraan sosial Aceh. Untuk sub bidang pemulihan sosial, realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya dapat dilihat pada Tabel 3. 29.

STRATEGI SUB BIDANG SOSIAL

1. Peningkatkan pelayanan sosial untuk kelompok rentan dan pengungsi, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengungsi di pemukiman baru; pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat; serta pengembangan sistem kesejahteraan sosial.

Sumber: Perpres 47/2008

Tabel 3. 29
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Sosial

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Pembangunan Pusat trauma Center	Unit	5	5	0	5	-	
2	Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga	orang	5.000	500	4500	5000	-	
3	Panti Masyarakat	Panti	42	42	0	42	-	
4	Rehabilitasi TMP	TMP	4	4	0	4	-	
5	Rehabilitasi MPN	MPN	2	0	0	0	2	Dis. Sosial/ Depsos
6	Bantuan biaya percepatan pembangunan panti baru	Unit	7	7	0	7	-	
7	Bantuan fasilitas panti/ dayah yang menampung anak terlantar/ yatim/ piatu	Paket	50	50	0	50	-	
8	Bantuan sarana belajar anak pengungsi dalam rangka kegiatan <i>children center</i>	Lokasi	19	19	0	19	-	

⁶ Laporan Akhir BRR NAD-Nias Perwakilan Nias 2005-2008, Desember 2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
9	Bantuan biaya pembinaan untuk anak berprestasi	orang	500	500	0	500	-	
10	Bantuan Panti Sosial	Keg	50	50	0	50	-	
11	Bantuan sarana Panti Sosial	Panti	49	49	0	49	-	
12	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	Unit	11	11	0	11	-	
13	Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit	10	10	0	10	-	
14	Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket	229	229	0	229	-	
15	Bantuan Biaya fakir miskin	Org	13.360	84	13276	13360	-	
16	Bantuan Insentif bagi petugas KBS (keluarga Binaan Sosial)	Paket	1	1	0	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

III.3.1.4.7 Budaya

Kebijakan dari sub bidang pemulihan budaya yang akan ditempuh adalah membangun kembali masyarakat Aceh melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman, dan kekayaan budaya. Rekapitulasi realiasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sub bidang pemulihan budaya dapat dilihat pada Tabel 3. 30.

STRATEGI SUB BIDANG BUDAYA

- Meningkatkan fungsi dan mengembangkan sarana pendukung kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya
- Melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat.

Sumber: Perpres 47/2008

Tabel 3. 30
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Budaya

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2	2	0	2	-	
2	Pemulihan sumberdaya budaya yang rusak terkena bencana.	Paket	2	2	0	2	-	
3	Penyusunan modul dan sosialisasi nilai budaya Aceh melalui media elektronik	Paket	2	2	0	2	-	
4	Pagelaran budaya Aceh	Kegiatan	2	2	0	2	-	
5	Workshop wawasan budaya di aceh dan sumut	Kegiatan	2	2	0	2	-	
6	Membangun sistem jaringan informasi kebudayaan	Paket	1	1	0	1	-	
7	Penyusunan peta budaya	Paket	5	3	0	3	2	DinasHubpar ProvNAD/ Nias
8	Pembuatan Rancangan	Paket	1	1	0	1	-	

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	museum peringatan bencana kemanusiaan tsunami							
9	Pendirian museum peringatan bencana kemanusiaan tsunami	Paket	2	2	0	2	-	
10	Museum Budaya dan Sejarah Purbakala Nias	Paket	1	0	1	1	-	
11	Menghimpun informasi kebudayaan (NAD dan Nias-Sumut)	Paket	2	2	0	2	-	
12	Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	5	5	0	5	-	
13	Pembuatan kembali instrumen seni	Paket	1	1	0	1	-	
14	Pemberian bantuan alat-alat seni	Paket	5	5	0	5	-	
15	Pembangunan gedung Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)	Paket	2	2	0	2	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Sebagaimana dilaporkan pihak BRR dalam Mengisi Bangunan Pemulihan, Per Mei 2008, disebutkan bahwa untuk tahun 2007 titik tekan kegiatan sektor budaya yaitu pada pembangunan dan penguatan prasarana budaya strategis. Realisasinya dapat diamati pada pembangunan gedung Galeri Museum Aceh serta merehabilitasi sejumlah cagar budaya penting.

Di samping itu pula, dibangun gedung lembaga seni budaya di beberapa kabupaten/kota. Termasuk dilakukan program penataan dan pembangunan kembali cagar budaya, penguatan kapasitas adat bagi pemangku kepentingan strategis berbasis mukim dan perempuan serta pembelajaran budaya santun bagi pelajar dan pemuda. Di sektor budaya ini pula, dicetak ulang al-Qur'an berterjemahan dan bersajak bahasa Aceh. Dalam rangka menarik minat para cendekiawan internasional terhadap kajian terhadap Aceh maka dilakukan sebuah konferensi internasional.

Sedangkan kegiatan pada tahun 2008 difokuskan pada penuntasan program tahun 2007 yang belum selesai. Beberapa program yang difokuskan pada tahun 2008, antara lain, yaitu pembangunan gedung lembaga seni budaya di beberapa kabupaten/kota yang meliputi Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) dan Galeri Museum Negeri Aceh. Selain itu pula dilakukan kegiatan pemasyarakatan budaya damai yang diperluas bagi komunitas gampong dan program pemberdayaan bagi perajin khas Aceh.

Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor budaya di Kepulauan Nias, program utamanya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan budaya. Tidak kegiatan spesifik terkait kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana yang ditargetkan baik pada Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2009 (Perpres 30 tahun 2005) maupun Revisi Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias (Perpres 47 tahun 2008). Sampai akhir TA 2008 BRR di Nias telah melakukan rehabilitasi rumah tradisional, memfasilitasi pertemuan-pertemuan adat, dan beberapa kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya pada masyarakat Nias⁷.

⁷ Laporan Akhir BRR NAD-Nias Perwakilan Nias 2005-2008, Desember 2008

III.3.1.4.8 Pemuda/Olahraga

Sesuai Perpres No. 47 Tahun 2008, kebijakan tentang sub bidang pemulihan pemuda dan olah raga yang akan ditempuh adalah meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan

kepemimpinan dalam pembangunan, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, dan meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sub bidang pemulihan pemuda dan olah raga, secara rekapitulasi dapat diamati pada Tabel 3. 31 berikut;

STRATEGI SUB BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menyediakan akses masyarakat terhadap aktivitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya;
- Mobilisasi dan pemberdayaan semua potensi kepemudaan dan keolahragaan di masyarakat;
- Membangun dan penguatan jaringan kerjasama lintas sektor dengan seluruh pihak terkait; dan
- Rehabilitasi, revitalisasi dan rekonstruksi sistem pembinaan kepemudaan dan keolahragaan sehingga, dapat berfungsi kembali.

Sumber: Perpres 47/2008

Tabel 3. 31
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Pemuda dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pemuda							
1	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	91	91	0	0	-	
2	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	5	0	5	-	
3	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	32	32	0	0	-	
4	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota	orang	300	120	0	120	180	Badan PORA Nad/Nias
5	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	300	244	0	244	56	Badan PORA Nad/ Nias
	Pembinaan Olahraga							
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	300	0	300	-	
2	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	450	450	0	450	-	
3	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	25	25	0	25	-	
4	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	10	10	0	10	-	
5	Pekan OR Pelajar	paket	2	2	0	2	-	
6	Training Camp Atlet Pelajar	orang	100	100	0	100	-	
7	Peringatan HAORNAS	kab./kota	23	23	0	23	-	
8	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	200	200	0	200	-	
9	Penelusuran Data Base Olah Raga	Paket	1	1	0	1	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
10	Rehabilitasi dan Pembangunan sarana olah raga	Paket	49	16	33	49	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Berdasarkan Laporan BRR NAD-Nias, *Mengisi Bangunan Pemulihan*, Per Mei 2008, disebutkan bahwa pada tahun 2007, kegiatan yang dilaksanakan umumnya merupakan pengembangan dari tiga aspek yang sudah dicanangkan pada dua tahun sebelumnya. Pada tahun ini ada penekanan untuk program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana olah raga serta pembinaan atlet berbakat. Sedangkan pada tahun 2008, target capaian terpenting yang diharapkan, antara lain, meliputi terbangunnya sejumlah prasarana dan sarana olahraga yaitu gedung sport center UNSYIAH, Hall Serbaguna Stadion Harapan Bangsa, terbinanya atlet cabang olahraga prestasi serta termampukannya pelatih dan asistennya untuk cabang olahraga andalan.

Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Laporan Akhir BRR NAD-Nias Perwakilan Nias 2005-2008, Desember 2008 disebutkan bidang pemuda dan olahraga program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2009 (Perpres 30 tahun 2005) menyebutkan target rehabilitasi GOR di Nias dan perbaikan surfing judging tower (menara penilai selancar) sebagai target rekonstruksi di Kepulauan Nias. Sedangkan Revisi Rencana Induk Rekonstruksi NAD-Nias (Perpres 47 tahun 2008) hanya menyebutkan perlunya memperbaiki sarana-prasarana olahraga sebagai targetnya. Sampai akhir TA 2008 BRR telah membangun stadion dan lapangan olahraga dan pada TA 2009 telah mengalokasikan tambahan 2 stadion.

III.3.1.5 Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Bidang kelembagaan dan hukum merupakan penggabungan dari ketiga bidang pemulihan yaitu bidang kelembagaan daerah, bidang pemulihan hukum serta bidang pemulihan keamanan, ketertiban dan ketahanan dalam rencana induk kedalam satu bidang pemulihan kelembagaan dan hukum.

Secara umum Pemulihan dan perkuatan Pemerintahan dilakukan dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengembangan kelembagaan Pemerintahan yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang mampu memberikan pelayanan masyarakat yang baik, secara bersih dan berwibawa, serta mampu melaksanakan penegakan hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai.

III.3.1.5.1 Kelembagaan

Perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang kelembagaan diarahkan sesuai yang diamanatkan dalam Perpres 47 Tahun 2008, dengan melaksanakan strategi, yaitu:

1. Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah

KEBIJAKAN SUB BIDANG KELEMBAGAAN

1. Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan di daerah dalam jangka menengah
3. Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen
4. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Lembaga Pemerintah Daerah yang baru (Lembaga Legislatif Daerah dan Eksekutif Daerah) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembuatan kebijakan daerah.

Sumber: Perpres 47/2008

dan aparaturnya;

2. Meningkatkan kemampuan aparaturnya Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatkan kemampuan aparaturnya Pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini;
4. Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan); dan
5. Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 47 Tahun 2008 tentang penetapan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005-2008 dan sisa yang masih harus dilanjutkan pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 32
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Kelembagaan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Perencanaan	Dokumen	550	356	194	550	-	Perencanaan
2	Ktr KDH/DPRD/Dinas/ Meuligo	Unit/Paket	11	11	11	11	16 Unit *)	*) RKP 2009/ Pemda Kab/Kota
3	Kantor Kecamatan	Unit	26	14	12	26	-	
4	Rumah Dinas Camat	Unit	46	46		46	-	
5	Kantor Desa/Kelurahan	Unit	450	319	131	450	-	
6	Kantor Mukim/Balee	Unit	116	116		116	-	
7	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket	3	3		3	-	
8	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket	1	1		1	-	
9	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparaturnya Pemda	Paket	5	5		5	-	
10	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Pemda	14	14		14	-	
11	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/k	7	7		7	-	
12	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	23	23		23	-	
13	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	13		13	-	
14	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	8	8		8	-	
15	Penataan SisKom Humas daerah (media centre)		2	2		2	-	
16	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam) kab	Kab/k	23	23		23	-	
17	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam) Kec	Kec.	263	263		263	-	
18	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong kab	Kab/k	13	13		13	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
19	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong kec	Kec.	263	263		263	-	
20	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg	21	21		21	-	
21	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/k	25	25		25	-	
22	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/k	22	22		22	-	
23	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket	2	2		2	-	
24	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket	1	1		1	-	
25	Penataan Administrasi Kependudukan	Dok	73	73		73	-	
26	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Paket	1	1		1	-	
27	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Paket	1	1		1	-	
28	Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy.	Paket	2	2		2	-	
29	FKK Stakeholder RR	Paket	2	2		2	-	
30	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/k	21	21		21	-	
31	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket	7	7		7	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Berdasarkan Tabel 3. 32 diatas dalam sub bidang Kelembagaan khususnya dalam pemulihan kembali dan penguatan kelembagaan daerah menjelaskan bahwa telah 97% kegiatan-kegiatan pada sub bidang ini telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, diantaranya pada kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat, aparatur pemerintahan, pemantapan rencana kerja pemerintahan, maupun peningkatan kapasitas dalam perencanaan pembangunan. Namun sebagaimana yang tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, masih terdapat kegiatan pembangunan Kantor KDH/DPRD/Dinas/Meuligo dengan total 16 unit bangunan yang masih harus dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2009.

Komitmen penyelenggara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibidang kelembagaan daerah dalam mengimplementasikannya di lapangan, seperti dibangunnya Kantor Desa Meunasah Cut Lampu'uk ini difungsikan sebagai Kantor Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa Meunasah Cut. Kantor ini juga digunakan ibu-ibu desa untuk melenggarakan pengajian dan pos yandu. Hal ini dilakukan sampai musholla yang akan dialihkan untuk para ibu tersebut selesai dibangun. Di sebelah bangunan Kantor Desa ini ada Gampong Meunasah Cut Lampuuk, yaitu suatu Balee Pertemuan yang digunakan masyarakat untuk melakukan pertemuan dan musyawarah desa.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada Oktober 2008, BRR juga membangun Gedung kantor Bupati Aceh Jaya, dimana hingga akhir Oktober 2008 masih dalam kondisi 77% dengan nilai kontrak Rp. 6,8 miliar, dan diperkirakan baru dapat rampung tahun 2009. Selain itu juga dibangun Gedung DPRD Aceh Jaya hingga akhir oktober 2008 masih dalam kondisi 24% dengan nilai kontrak Rp. 4 miliar, dan diperkirakan baru dapat rampung akhir tahun 2009. Gedung Kantor Bappeda Aceh Jaya, hingga akhir oktober 2008 masih dalam kondisi 78% dengan nilai kontrak Rp. 2,2 miliar,

dan diperkirakan baru dapat rampung pertengahan tahun 2009. Pembangunan lainnya yaitu Pendopo Bupati Nias Selatan yang sedang dalam pembangunan.

Gambar 3. 15
Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Kelembagaan oleh BRR



Dok: Sekretariat P3B Bappenas dan BRR Distrik Aceh Jaya, Oktober 2008

Mayoritas pelaksanaan kegiatan pada sub bidang kelembagaan didanai melalui APBN (*on budget*) dan terdapat beberapa kegiatan yang didanai melalui *off budget* yaitu:

- Pada kegiatan perencanaan terhadap 550 dokumen yang dilaksanakan melalui *on budget* sebanyak 356 dokumen dan 194 dokumen melalui *off budget*.
- Pada pembangunan 26 kantor kecamatan, sebanyak 14 unit bangunan didanai melalui *on budget* dan 12 unit sisanya dibangun melalui *off budget*.

- Sedangkan untuk rekonstruksi kantor kelurahan/ desa mayoritas didanai melalui *on budget* yaitu sebanyak 319 unit kantor, sedangkan melalui *off budget* sebanyak 131 unit, dengan jumlah total 450 unit kantor desa/ kelurahan.

III.3.1.5.2 Hukum

Pada awal penyusunan rencana induk, Bappenas telah memetakan permasalahan hukum di Aceh menjadi empat bidang utama, yaitu keperdataan, pertanahan, administrasi pemerintahan dan peradilan. Masalah dalam bidang keperdataan dibagi tentang orang dan keluarga serta kebendaan dan perniagaan. Masalah orang dan keluarga adalah tidak adanya data penduduk pasca gempa tsunami yang akurat, yaitu data penduduk yang selamat, meninggal atau hilang serta tidak adanya identitas diri yang berkaitan dengan hubungan perkawinan, perceraian serta pewarisan.

Masalah dalam kebendaan dan perniagaan adalah; *pertama*, tidak jelasnya status harta benda individu, misalnya dana di bank, asuransi jiwa, dan kepemilikan benda bergerak. *Kedua*, hilangnya dokumen identitas badan hukum dan *ketiga*, belum jelasnya status pelaksanaan hak dan kewajiban (hubungan perikatan), baik antara individu maupun badan hukum, termasuk cicilan rumah, mobil, motor.

Di bidang pertanahan, masalah yang berhasil diidentifikasi, antara lain, belum adanya ketentuan mengenai objek tanah, seperti tanah yang musnah dan hasil *scanning* sebagai alat bukti yang sah. Kemudian, belum adanya ketentuan mengenai subjek hukum berkaitan dengan tanah, yaitu tanggungjawab terhadap kebenaran materiil dokumen pendukung kepemilikan dan larangan transaksi

atau pengalihan hak atas tanah untuk melindungi pemilik tanah. Permasalahan lainnya adalah belum adanya ketentuan Baitul Maal sebagai badan hukum pemegang hak atas tanah, serta belum adanya ketentuan mengenai penetapan tanah milik komunal (hak milik adat).

Lain halnya seperti yang terdapat di bidang administrasi pemerintahan; ada dua masalah yang teridentifikasi yaitu tidak jelasnya tanggungjawab kepada pihak ketiga, baik tanggungjawab keuangan (pengadaan barang yang musnah), dokumen hukum di lingkungan pemerintahan.

Strategi yang di terapkan terhadap penyelesaian berbagai masalah di bidang keperdataan, pidana, status identitas, perikatan dan pemerintahan. *Pertama*, pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya. *Kedua*, pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik. *Ketiga*, pemberian kembali dokumen identitas. *Keempat*, pemberian status hukum Baitul Maal sebagai subyek hukum dalam Provinsi NAD. *Kelima*, pemberdayaan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mulai tahun 2005 hingga 2007 strategi tersebut telah diimplementasi dilapangan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan di bidang hukum. Kemudian penyelenggaraan pemulihan pada sub bidang hukum telah disempurnakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres 47 Tahun 2008 dengan menggunakan strategi umum, yaitu Menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

KEBIJAKAN SUB BIDANG HUKUM

1. Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan public
2. Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM
3. Mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hokum
4. Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender
5. Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis
6. Melanjutkan proses pematangan dan pendewasaan kehidupan sosial politik bagi masyarakat
7. Melanjutkan program untuk menjaga rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat
8. Meningkatkan peran ulama dalam pembuatan peraturan perundangundangan dan kebijakan-kebijakan publik, khususnya dalam penerapan syari'at Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Sumber: Perpres 47/2008

untuk Pertanahan, Tata Ruang, Ekonomi, khususnya Ketenagakerjaan, serta Hukum. Sehingga penyelenggaraan dibidang hukum lebih spesifik. Perpres 47 Tahun 2008 juga telah menetapkan kembali arah sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana tertera dalam Tabel 3. 33 berikut:

Tabel 3. 33
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang Hukum

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Kejati Provinsi NAD	Unit	1	1		1	-	
2	Kejari	Unit	7	7		7	-	
3	Rumah Dinas Jaksa	Unit	38	38		38	-	
4	Peralatan Kantor	Paket	79	79		79	-	
5	Kendaraan R2	Unit	38	33		33	5	Dep. Hukum dan Ham
6	Kendaraan Tahanan	Unit	12	12		12	-	
7	Rumah Dinas	Unit	49	49		49	-	
8	Lapas/Rutan	Unit	4	4		4	1 *)	*) RKP 2009/ Dep. Hukum dan Ham
9	Bapas	Unit	2	2		2	-	
10	Kanwil Depkumham	Unit	2	2		2	-	
11	Kantor Imigrasi	Unit	1	1		1	-	
12	Kendaraan R4	Unit	10	10		10	-	
13	Peralatan Kantor	Paket	19	19		19	-	
14	PT/PTUN	Unit	2	2		2	-	
15	Pengadilan Negeri	Unit	15	15		15	-	
16	Bangunan Mahkamah Syari'ah	Unit	13	13		13	-	
17	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	15		15	18	Mahkamah Syariah
18	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	17		17	1	Mahkamah Syariah
19	Peralatan Kantor	Unit	79	79		79	-	
20	Pengadilan Militer	Paket	1	1		1	-	
21	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	1	1		1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Pemulihan kelembagaan penegak hukum juga disentuh sebagai upaya membangun kesadaran hukum di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Ini menjadi bagian dari reformasi hukum, baik melalui perangkat keras berupa pengadaan fasilitas fisik, maupun perangkat lunak melalui peningkatan kualitas aparat hukum, hakim dan jaksa. Seperti di Aceh, tidak terkecuali hakim yang ada di lembaga Mahkamah Syari'ah. Karena Aceh yang telah memberlakukan syariat Islam memerlukan ketersediaan perangkat penegak hukum yang berkualitas dan memadai secara kuantitas.

Paradigma pembangunan hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Seperti di Aceh, muncul dari identitas masyarakat yang berpegang kuat pada adat dan syariat Islam. Masyarakat Aceh sangat menyadari bahwa hukum adat dan hukum syariat merupakan hukum yang selalu hidup dan melekat bagi kehidupan mereka. karena itulah posifikasi hukum adat dan hukum syariat sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Aceh dan karakter masyarakat Aceh yang religius merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk meningkatkan keamanan di Kabupaten Aceh Besar, melalui DIPA 2008 sebesar Rp 4 miliar, BRR membangun Cabang Rutan Tahap II, yang merupakan lanjutan dari kegiatan pada tahun 2007. Pembangunan Rumah tahanan ini juga meliputi pembangunan rumah dinas petugas, musholla dan ruang kunjungan. Selain pembangunan, BRR juga melakukan pengawasan dalam pembangunan cabang rutan Lhoknga tersebut. Demikian juga dengan pembangunan Rutan di Aceh Jaya, pengawasan juga dilaksanakan secara langsung oleh Tim dari BRR Distrik Aceh Jaya. Rutan Kota Calang, Aceh Jaya baru rampung dan dapat dioperasikan pertengahan tahun 2009. Pada akhir tahun 2008 baru rampung 85 %. Secara keseluruhan yang terdiri dari, ruang tahanan, pos monyet, ruang administrasi, isolasi, ruang serbaguna dan ruang berkarya.

Gambar 3. 16
Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Hukum oleh BRR



Dok: BRR Distrik Aceh Besar dan Aceh Jaya, Oktober 2008

Dalam jangka waktu tahun 2005-2008 BRR NAD-Nias telah menyelesaikan hampir keseluruhan dari 21 kegiatan utama pada sub bidang hukum (dengan persentase sebesar 85%). Angka 85% diselesaikan setelah dilakukan kembali penetapan sasaran sehingga terbitnya Perpres 47 Tahun 2008 khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai *urgent* untuk segera dituntaskan. Kegiatan-kegiatan utama tersebut mayoritas terkait dengan pembangunan fisik terhadap lembaga penyelenggara hukum, seperti kantor pengadilan, lapas, dan mahkamah syariah.

Termasuk juga pengadaan terhadap perlengkapan peralatan perkantoran dan kendaraan dinas sebagai alat operasional. Namun demikian, tahun 2009 kegiatan pada sub bidang ini masih menyisakan beberapa pekerjaan yang masih harus dilanjutkan oleh Kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah. Seperti: Pengadaan 5 unit kendaraan roda dua sebagai alat operasional serta penyelesaian rekonstruksi 1 unit bangunan Lapas/Rutan yang harus dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan HAM. Lembaga Mahkamah Syariah juga harus melaksanakan pengadaan 18 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 pada Tahun 2009.

III.3.1.5.3 Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Penguatan kelembagaan daerah meliputi juga bidang keamanan dan pertahanan, meskipun kedua institusi ini bersifat hirarkis-nasional. Namun sebagai instansi yang terkena dampak langsung bencana, ke deputian kelembagaan harus memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan sebagai upaya *recovery*. Untuk bidang ini kebijakan yang diambil ke deputian kelembagaan sering menuai kritik dari masyarakat. BRR dinilai membantu lembaga yang sesungguhnya tidak perlu, sehingga dianggap pengelolaan keuangan tidak efektif dan bahkan melakukan pemborosan. Padahal prinsip yang digunakan dalam menjalankan mandat yang diberikan adalah mengganti kerusakan dan kehilangan yang dialami semua stakeholders yang terkena bencana.

Gambar 3. 17
Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang K3M oleh BRR



Pembangunan Kantor Polres
di Kabupaten Nias Selatan

Pembangunan Kantor KODIM
di Kabupaten Nias Selatan

Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, BRR membangun Polres dan Kantor Kodim di Nias Selatan. Kondisi Polres Nias selatan pada saat kunjungan lapangan sudah terselesaikan dan pelayanan masyarakat sudah berjalan normal. Pembangunan Kantor Polres tidak menggunakan anggaran BRR namun berasal dari kantor Polri pusat di Jakarta. Kantor Kodim juga sudah berfungsi dengan normal. Dengan demikian dapat dikatakan fungsi pertahanan keamanan serta ketertiban umum sudah berjalan normal.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SUB BIDANG K3M :

1. Kebijakan membangun kebersamaan dan kepercayaan
 - a. Membangun masyarakat melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik baik tata kehidupannya maupun kelembagaan dan mekanismenya dalam kerangka demokrasi;
 - b. Membangun masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat.
2. Strategi membangun kebersamaan dan kepercayaan

Strategi membangun kembali Aceh dan Nias harus diletakkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik yang hancur akibat gempa dan tsunami. Pembangunan kembali Aceh harus ditempatkan dalam konteks mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh dengan cara yang damai dan bermartabat.
3. Strategi ketertiban dan keamanan
 - a. Melaksanakan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban;
 - b. Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian;
 - c. Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif;
 - d. Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan
 - e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.
4. Strategi Ketahanan Masyarakat
 - a. Fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan;
 - b. Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi;
 - c. Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural.

Sumber: Perpres 47/2008

Terhadap upaya membantu menciptakan kebersamaan dan kepercayaan masyarakat kepada kelembagaan kepolisian dan TNI, berdasarkan Pepres Nomor 47 Tahun 2008, ada beberapa kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :

- Kebijakan membangun kebersamaan dan kepercayaan
- Strategi membangun kepercayaan dan kebersamaan
- Strategi keamanan dan ketertiban
- Strategi keamanan dan masyarakat

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 47 Tahun 2008 tentang penetapan sasaran untuk sub bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005-2008 dan sisa yang masih harus dilanjutkan pada tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 3. 34.

Tabel 3. 34
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Sub Bidang K3M

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
1	Menkopolhukam	Unit	1	1	-	1	-	
2	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1	1	-	1	-	
3	Stasiun RRI	Unit	2	2	-	2	-	
4	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	7	7	-	7	-	
5	Gedung PWI	Unit	2	2	-	2	-	
6	Rumah Dinas	Unit	5	5	-	5	-	
7	Kendaraan Roda-2 dan Roda 4	Unit	3	3	-	3	-	
8	Penampungan Sementara	Unit	1,416	1416	-	1,416	-	
9	Mapolda	Kompleks	2	2	-	2	-	
10	Brimobda	Kompleks	2	2	-	2	-	
11	Dit. Polair	Kompleks	2	2	-	2	-	
12	Rumah Dinas (Aspol)	Kompleks	57	57	-	57	-	
13	Polsek	Unit	20	20	-	20	-	
14	Pengadaan Material (Gedung)	Unit	193	193	-	193	-	
15	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit	439	439	-	439	-	
16	Kendaraan Roda - 4	Unit	71	71	-	71	-	
17	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket	5	5	-	5	-	
18	Bidang ALPAL: Kendaraan	Unit	8	8	-	8	-	
19	Bidang ALPAL: Alat Angkutan Air	Unit	2	2	-	2	-	
20	Bidang ALPAL: Alat Berat Zeni	Unit	27	27	-	27	-	
21	Bidang ALPAL: Alat Utama Militer (Senjata)	Unit	295	295	-	295	-	
22	Bidang ALPAL: Alpasus Zeni	Unit	39	39	-	39	-	
23	Bidang ALPAL: Alsatri dan Alsintor	Unit	4	4	-	4	-	
24	Bidang ALPAL: Peralatan Lainnya	Unit	7	7	-	7	-	
25	Bidang ALPAL: Kendaraan Roda - 2	Unit	217	217	-	217	-	
26	Bidang ALPAL: Kendaraan Roda - 4	Unit	28	28	-	28	-	
27	Bidang Faskon	Unit	461	461	-	461	-	
28	Bidang Alkon	Unit	0	0	-	0	-	
29	Korem/Kodim	Unit	2	2	-	2	-	
30	Rumah Dinas	Unit	1	1	-	1	-	
31	Kompi	Unit	2	2	-	2	-	
32	Biaya Perencanaan dan	Paket	1	1	-	1	-	

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
	Pengawasan							
33	Bidang Bekal Umum	Unit	1	1	-	1	-	
34	Bidang ALPAL	Unit	1	1	-	1	-	
35	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit	4	4	-	4	-	
36	- Peralatan Bengkel	Unit	4	4	-	4	-	
37	- Peralatan Laut Komar	Unit	1	1	-	1	-	
38	- Peralatan Khusus Komar	Unit	130	130	-	130	-	
39	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit	56	56	-	56	-	
40	- Amunisi	Butir	19.769	19.769	-	19.769	-	
41	- Peralatan Lainnya	Unit	76	76	-	76	-	
42	Bidang Faskon	Unit	40	40	-	40	-	
43	Rumah Dinas	Unit	2	2	-	2	-	
44	Posal Sitoli (Dermaga + Masjid)	Unit	2	2	-	2	-	
45	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit	3	3	-	3	-	
46	Lanud Maimun Saleh	Unit	1	1	-	1	-	
47	Lanud Iskandar Muda	Unit	1	1	-	1	-	
48	Paskhas AU	Unit	1	1	-	1	-	
49	Satrad	Unit	3	3	-	3	-	
50	Bidang Bekal Umum	Unit	3	3	-	3	-	
51	- Kendaraan Roda-2	Unit	40	40	-	40	-	
52	- Alat Utama Militer	Unit	958	958	-	958	-	
53	- Alat Angkutan Air	Unit	13	13	-	13	-	
54	- Jembatan Bailey	Unit	15	15	-	15	-	
55	- Alat Berat	Unit	483	483	-	483	-	
56	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit	2.299	2.299	-	2.299	-	
57	Bidang Faskon	Unit	3	3	-	3	-	
58	Bidang Kesehatan	Unit	4	4	-	4	-	
59	Bidang Alkon	Unit	1	1	-	1	-	

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Dari Tabel 3. 34 diatas dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan pada sub bidang K3M dapat terselesaikan pada tahun 2008, sehingga tidak diperlukan adanya kelanjutan pekerjaan yang harus dilanjutkan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kementerian/lembaga. Walaupun dilapangan saat Tim Sekretariat P3B Bappenas melakukan observasi, hingga akhir tahun 2008 masih terdapat beberapa kegiatan fisik yang masih berada dalam tahapan finishing terutama pada lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan. Dan semua kegiatan dibidang K3M pelaksanaannya didanai melalui APBN (*on budget*).

III.3.2 Pemerintah Daerah

APBD terdiri dari pendapatan daerah serta belanja dan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan daerah

1. pendapatan asli daerah, berupa hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK
3. lain-lain pendaparan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Belanja Daerah

- ☒ Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja tidak terduga
- ☒ Belanja Langsung, terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal

2. Pembiayaan Daerah

APBD Pemda yang dianalisis melibatkan 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagai sample yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan. Perbandingan APBD berdasarkan lokasi sampel dan bidang pemulihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 35

Rekapitulasi APBD Daerah Sampel Berdasarkan Bidang Pemulihan Tahun 2007 dan 2008

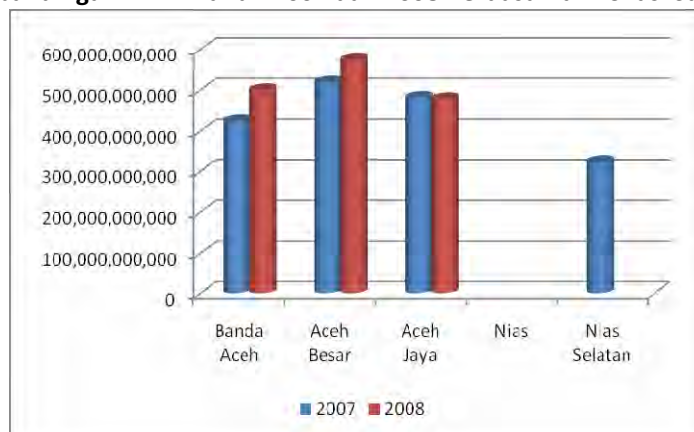
Lokasi Daerah Sampel	Infrastruktur dan Perumahan	Perekonomian	Sosial Kemasyarakatan	Kelembagaan dan Hukum	Umum	Total
APBD 2007						
Prov. NAD	670,069,511,718	332,542,591,775	790,667,226,000	12,556,327,798	2,251,521,364,472	4,057,357,021,763
Banda Aceh	78,421,809,688	22,378,864,403	201,739,941,850	6,546,655,044	115,769,636,967	424,856,907,952
Aceh Besar	62,093,064,397	51,591,686,337	261,900,131,389	3,130,226,401	140,280,291,477	518,995,400,000
Aceh Jaya	169,507,270,464	42,771,565,139	96,998,085,821	0	171,669,469,295	480,946,390,719
Nias	*	*	*	*	*	*
Nias Selatan	106,042,205,534	20,270,374,290	84,052,655,856	5,243,463,664	108,933,931,859	324,542,631,203
APBD 2008						
Prov. NAD	2,994,446,601,652	1,090,385,081,206	1,896,880,942,709	29,391,834,413	2,507,638,135,790	8,518,742,595,770
Banda Aceh	62,502,374,488	21,370,957,887	224,606,574,918	6,727,353,937	184,833,493,607	500,040,754,837
Aceh Besar	63,251,806,093	49,534,555,222	294,467,641,419	2,911,090,864	163,346,360,211	573,511,453,809
Aceh Jaya	132,607,100,657	53,253,796,059	126,449,898,293	0	165,409,404,704	477,720,199,713
Nias	*	*	*	*	*	*
Nias Selatan	*	*	*	*	*	*

Sumber : APBD Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, APBD Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 dan 2008, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2007.

Keterangan : *) Tidak diperoleh Dokumen APBD

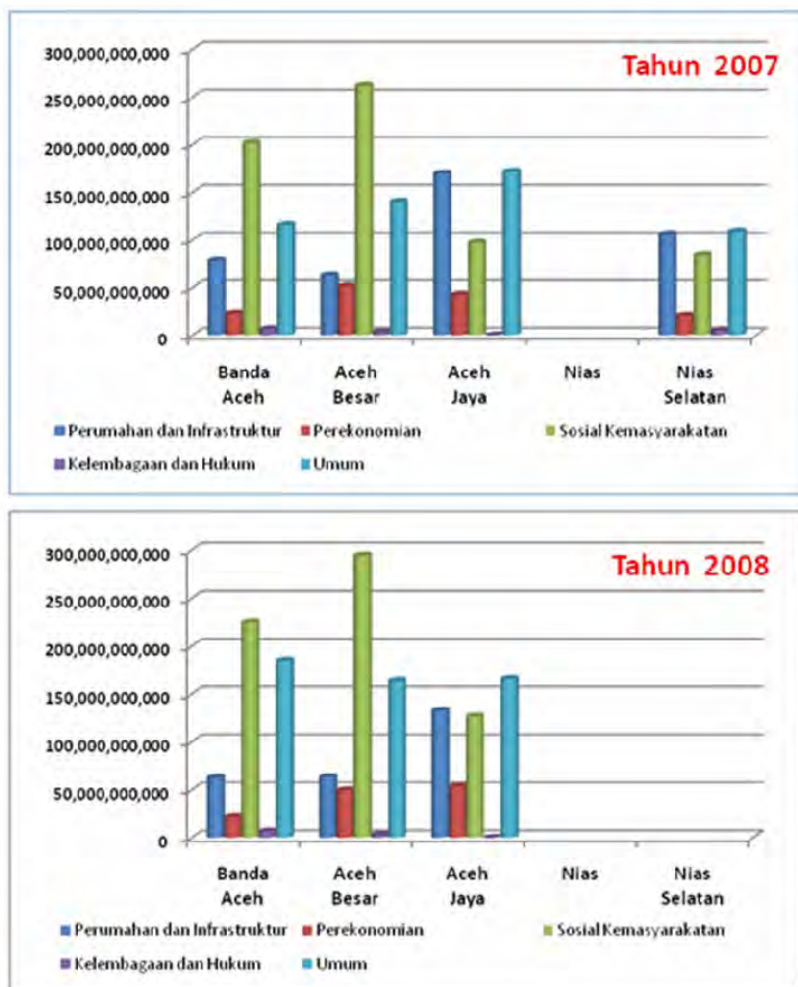
Diagram 3. 8

Perbandingan APBD Tahun 2007 dan 2008 Berdasarkan Lokasi Sampel



Sumber : Hasil Analisis Tim Sekretariat P3B, Bappenas, 2008

Diagram 3. 9
Perbandingan APBD Tahun 2007 dan 2008
Berdasarkan Lokasi Sampel dan Bidang Pemulihan



Sumber : Hasil Analisis Tim Sekretariat P3B, Bappenas, 2008

Rincian APBD akan dibahas berdasarkan 5 (lima) bidang pemulihan, yaitu perumahan dan infrastruktur, perekonomian, sosial kemasyarakatan, serta kelembagaan dan hukum. Bidang perumahan dan infrastruktur digabung dikarenakan ada salah satu dinas yang mencakup kedua bidang pemulihan tersebut, yaitu Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Selain pengelompokan ke dalam bidang pemulihan, juga terdapat pengelompokan ke dalam bidang umum, dimana SKPA/SKPD yang terlibat di dalamnya tergantung daerah masing-masing, misalnya terdiri dari kelompok pemerintahan umum dan SKPA/SKPD lainnya yang bersifat umum. Rincian pemerintahan umum, misalnya DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pendanaan, Badan Pengawasan, Bappeda, kantor-kantor kecamatan, dan lain sebagainya.

Penjelasan selanjutnya lebih menitikberatkan pada alokasi dana belanja langsung, karena diasumsikan kegiatan pembangunan daerah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan pada belanja langsung tersebut. Untuk daerah sampel Kabupaten Nias dan Nias Selatan tidak diperoleh rincian belanja langsung, oleh karena itu penjelasan selanjutnya hanya mencakup Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Jaya.

III.3.2.1 Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan juga melibatkan kontribusi Pemda melalui APBD maupun APBN, terutama yang mendukung kegiatan bidang infrastruktur dan perumahan. Dana APBD/APBN yang terkait dengan bidang infrastruktur dan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Pengelolaan Data Elektronik, serta Bapedalda.

Tabel 3. 36
Pengelompokan SKPA/SKPD
di Bidang Perumahan dan Infrastruktur

Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Nias Selatan
1. Dinas Bina Marga & Cipta Karya	1. Dinas Tata Kota dan Permukiman	1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	1. Dinas PU
2. Dinas Pengairan	2. Kantor Pemadam Kebakaran	2. Dinas Perhubungan	2. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Perhubungan, informasi & Telematika	3. DPJSDA	3. Dinas Pertambangan dan Energi		3. Kantor PLH
4. Dinas Pertambangan dan Energi	4. Dinas Perhubungan	4. Dinas Informasi dan Komunikasi		
5. Bapedalda	5. Badan Pengelolaan Perpajakan	5. Dinas Pengelolaan Data Elektronik		
	6. Dinas Informasi dan Komunikasi & PDE	6. Kanpedalda		
	7. Bapedalda			
	8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan			

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, 2008

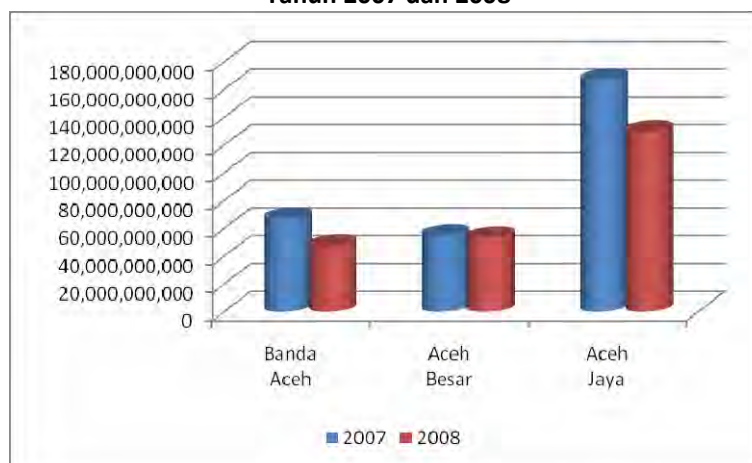
Dalam pemulihan bidang perumahan dan infrastruktur oleh Pemda melalui belanja langsung APBD, dan berdasarkan analisis dari hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas pada Oktober 2008 diketahui alokasi APBD belanja langsung pada daerah sampel dapat dilihat pada Tabel 3. 37.

Tabel 3. 37
Alokasi Belanja Langsung APBD
Bidang Perumahan dan Infrastruktur
Tahun 2007 dan 2008

Lokasi	Belanja Langsung APBD	
	2007	2008
Provinsi NAD	616,459,364,304	2,925,715,645,100
Banda Aceh	66,964,188,851	47,475,364,359
Aceh Besar	55,135,036,738	53,431,834,293
Aceh Jaya	166,939,159,829	129,757,214,348

Sumber : APBD Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, APBD Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 dan 2008

Diagram 3. 10
Grafik Alokasi Belanja Langsung
Bidang Perumahan dan Infrastruktur
Tahun 2007 dan 2008



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, 2008

Jika dilihat di tingkat provinsi, alokasi belanja langsung untuk bidang perumahan dan infrastruktur sebesar 30 % pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 45 % pada tahun 2008 dibandingkan dengan total biaya langsung APBD Provinsi. Pada tabel dan diagram di atas, terlihat bahwa alokasi belanja langsung untuk pemulihan bidang perumahan dan infrastruktur Aceh Jaya terbesar dibandingkan Banda Aceh dan Aceh Besar.

- Pemda Kota Banda Aceh mengalokasikan Rp. 66,9 miliar pada tahun 2007 (35,6 %) untuk anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan di bidang perumahan dan infrastruktur, namun pada tahun 2008 anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp. 47,4 miliar (21,5 %)
- Pemda Kabupaten Aceh Besar mengalokasikan Rp. 55,1 miliar pada tahun 2007 (21,9 %) untuk anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan di bidang perumahan dan infrastruktur, namun pada tahun 2008 anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp. 53,4 miliar (24,9 %)
- Pemda Kabupaten Aceh Jaya mengalokasikan Rp. 166,9 miliar pada tahun 2007 (42,7 %) untuk anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan di bidang perumahan dan infrastruktur, namun pada tahun 2008 anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp. 129,7 miliar (37,6%). Alokasi yang terbesar dibandingkan dengan daerah lain karena di Aceh Jaya merupakan daerah yang paling parah terkena bencana tsunami, sehingga diperlukan alokasi biaya yang besar untuk memulihkannya terutama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, permukiman, serta infrastruktur agar perekonomian di daerah Aceh Jaya berangsur-angsur pulih 100 %.

III.3.2.1.1 Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman yang bersumber dari pembiayaan daerah dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum, Kantor PLH, Bapedalda, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi NAD Tahun 2008, bidang perumahan dan permukiman termasuk ke dalam prioritas kedua yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi. Program-program prioritas yang

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

dilaksanakan untuk mendukung kegiatan perumahan adalah Pengembangan Perumahan, sedangkan pada sub bidang tata ruang dan pertanahan adalah 1) Perencanaan tata ruang, dan 2) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Sub bidang **perumahan dan permukiman**, pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana hunian. Kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, adalah dalam Pembangunan Rumah Dhuafa dengan Type 32. Tahun 2008 dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi telah dialokasikan dana untuk pembangunan/penggantian 4000 unit rumah bagi kaum dhuafa sebesar Rp. 60 juta/unit rumah, yang akan disebar ke semua kabupaten/kota. Untuk tahun 2007 lalu telah terbangun sebanyak 6000 unit rumah.

Pada sub bidang **tata ruang**, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Hal yang mendasarinya adalah bahwa perkembangan wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah-wilayah lainnya. Dalam pengertian tersebut, RTRWA memberikan arahan yang lebih berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota dan hal-hal lainnya yang bersifat lintas perbatasan daerah. Sedangkan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi diarahkan melalui RTRW Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 berjangka waktu perencanaan 15 tahun. Tujuan dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Aceh adalah mewujudkan ruang Wilayah Aceh yang mengakomodasikan keterkaitan antar kawasan kabupaten/kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan (*sustainable*). Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah:

- Terkendalinya pembangunan di Wilayah Aceh baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
- Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana Wilayah Aceh
- Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Sub bidang **pertanahan** diarahkan pada penyediaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin dan ekonomi lemah dalam bentuk Proda dan Prona, pensertifikatan tanah di daerah perbatasan, inventarisir tanah Pemda serta melakukan inventarisasi status penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), juga mempertegas batas-batas provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa-desa, serta menyelesaikan konflik-konflik perbatasan yang ada dan berlarut. Selain ini Pemda juga melakukan pembebasan lahan untuk beberapa kawasan perumahan, juga ada pembebasan lahan yang digunakan untuk beberapa fasilitas kepentingan umum seperti sekolah dan terminal.

III.3.2.1.2 Pemulihan Infrastruktur

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur yang bersumber dari pembiayaan daerah dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pengairan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Pengelolaan Data Elektronik.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi NAD Tahun 2008, bidang infrastruktur termasuk ke dalam prioritas kedua yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi. Adapun program-program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan infrastruktur dijelaskan sebagai berikut.

Pembangunan prasarana **jalan** raya diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi barang dan jasa melalui peningkatan jalan dan jembatan, pemulihan arus transportasi barang dan orang, pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan sehingga mempercepat pergerakan roda ekonomi masyarakat. Kegiatan prioritas sub bidang jalan dan jembatan diantaranya adalah :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan serta membuka isolasi kawasan
2. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Bidang **perhubungan** diarahkan pada pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sektor perhubungan darat, laut, dan udara secara efektif dan efisien untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. Kegiatan prioritas sub bidang perhubungan diantaranya adalah :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan
4. Program penyediaan peralatan bongkar muat pelabuhan
5. Program pelayanan administrasi (imigrasi dan bea cukai) pada pelabuhan udara
6. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pembangunan **sumber daya air** diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan partisipatif untuk mewujudkan system irigasi yang handal, pemanfaatan sumber daya air secara optimal, klestarian sumber sumber air, kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengamanan pantai dan pengendalian banjir pada DAS kritis. Kegiatan sub bidang sumber daya air diantaranya adalah :

1. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
2. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
4. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pembangunan di bidang **energi dan listrik** diarahkan pada peningkatan pemanfaatan terhadap potensi mineral tambang dan migas yang ada serta pemenuhan kebutuhan energi listrik. Pengembangan **energi** baru dan terbarukan diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat melalui kajian-kajian energi alternatif sebagai pengganti BBM, sedangkan di bidang **kelistrikan** diarahkan pada upaya memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan dan kawasan terisolir dalam bentuk PLTMH, PLTS, dan genset dalam ukuran kecil. Selain itu pemanfaatan air bawah tanah diarahkan pada penyediaan sumber-sumber air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat terutama pada daerah krisis air seperti daerah pantai dan rawan bencana. Kegiatan sub bidang energi dan listrik diantaranya adalah pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Kegiatan prioritas sub bidang kelistrikan adalah program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Bidang **komunikasi dan informasi** diarahkan pada peningkatan penyediaan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik yang tersedia. Kegiatan prioritas sub bidang komunikasi dan informasi diantaranya adalah program fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informasi.

Dari penjelasan di atas, peran Pemda juga sangat besar dalam pembebasan lahan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Kegiatan pembebasan lahan ini sering menghadapi kendala di lapangan, misalnya ada masyarakat yang tidak ingin tanahnya dibebaskan, harga yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut lebih dominan bersumber dari dana APBN. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagian besar digunakan untuk melanjutkan pembangunan BRR yang belum selesai dan kegiatan pemeliharaan.

III.3.2.2 Pemulihan Perekonomian

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan juga melibatkan kontribusi Pemda melalui APBD maupun APBN, terutama yang mendukung kegiatan bidang Perekonomian. Dana APBD/APBN yang terkait dengan bidang Perekonomian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Badan Investasi dan Promosi, Dinas Pertanian TPH, Dinas Peternakan (dan Kesehatan Hewan), Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan (dan Perkebunan).

Tabel 3. 38
Pengelompokan SKPA/SKPD
di Bidang Perekonomian

Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Nias Selatan
1. Dinas Tenaga Kerja	1. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja	1. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja	1. Kantor Kependudukan, Keluarga Sejahtera, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Dinas Kependudukan
2. Badan Investasi dan Promosi	2. Dinas Koperasi dan UKM	2. Dinas Koperasi dan UKM	2. Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi	2. Dinas Pertanian
3. Dinas Pertanian TPH	3. Dinas PPPK (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan)	3. Dinas Pertanian TPH	3. Dinas Pertanian dan Peternakan	3. Dinas Perikanan
4. Dinas Peternakan (dan Kesehatan Hewan)	4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4. Dinas Perkebunan	4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan	4. Dinas Perindagtamben
5. Badan Ketahanan Pangan	5. Dinas Pasar	5. Dinas Peternakan	5. Kantor Kelautan dan Perikanan	
6. Dinas Kehutanan (dan Perkebunan)		6. Dinas Kehutanan	6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7. Dinas Kelautan dan Perikanan		7. Dinas Kelautan dan Perikanan		
		8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, 2008

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Perekonomian yang bersumber dari pembiayaan daerah yang dilaksanakan untuk:

- Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PPPK (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pasar.
- Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Untuk Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Sejahtera, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian dan

Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- Kabupaten Nias Selatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindagtamben.

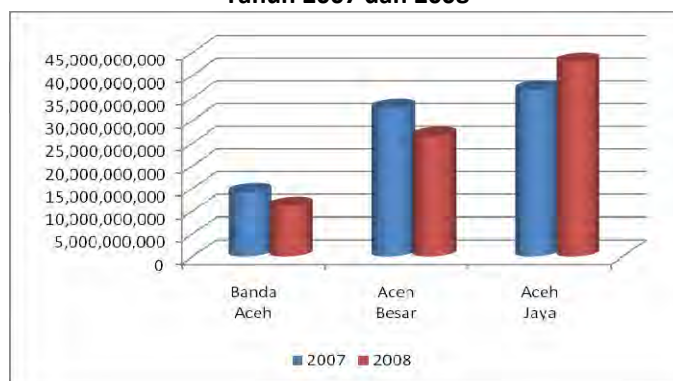
Bila ditelusuri dalam dokumen APBD/APBK, alokasi belanja langsung yang merupakan belanja untuk program pembangunan, maka khusus untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan untuk tahun 2007 yaitu Banda Aceh sebesar Rp 14,202,080,740, Aceh Besar sebesar Rp 32,781,274,148, dan Aceh Jaya sebesar Rp 36,818,493,122. Sedangkan untuk tahun 2008 yaitu Banda Aceh sebesar Rp 11,197,514,260, Aceh Besar sebesar Rp 26,578,147,799 dan Aceh Jaya sebesar Rp 42,946,776,758.

Tabel 3. 39
Alokasi Belanja Langsung APBD
Bidang Perekonomian
Tahun 2007 dan 2008

Lokasi	Belanja Langsung APBD	
	2007	2008
Provinsi NAD	244,870,156,867	985,430,106,823
Banda Aceh	14,202,080,740	11,197,514,260
Aceh Besar	32,781,274,148	26,578,147,799
Aceh Jaya	36,818,493,122	42,946,776,758

Sumber : APBD Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, APBD Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 dan 2008

Diagram 3. 11
Grafik Alokasi Belanja Langsung
Bidang Perekonomian
Tahun 2007 dan 2008



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, 2008

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi NAD Tahun 2008, terkait dengan pengelompokkan bidang pemulihan perekonomian Adapun program-program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan, yaitu :

1. Sub bidang Pertanian

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan
- Program Peningkatan produksi Teknologi pertanian/perkebunan

- Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Perkebunan Lapangan
2. Sub bidang Peternakan
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak.
 - Program Peningkatan produksi hasil peternakan
 - Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan
 - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
 3. Sub bidang Perikanan
 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
 - Program pengembangan budidaya perikanan
 - Program pengembangan perikanan tangkap.
 - Program pengembangan system penyuluhan perikanan.
 - Program optimilaisasi Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
 - Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
 4. Sub bidang Pengembangan Usaha
 - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - Program Pengembangan system Pendukung Usaha bagi UMKM
 - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - Program Pengembangan Usaha kecil menengah dan Koperasi
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 5. lainnya
 - Program Pengembangan data/informasi
 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan prasarana daerah
 - Program peningkatan kerjasama internasional
 - Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Program pengembangan industry kecil dan menengah
 - Program penataan struktur Industri
 - Program pengembangan sentra-sentra industry Potensi
 - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - Program penataan pengembangan kelembagaan dan perekonomian daerah
 - Program peningkatan kemampuan teknologi Industri
 - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - Program peningkatan kesempatan kerja
 - Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
 - Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan
 - Program Peningkatan Partisipasimasyarakat dalam membangun desa
 - Program pemberdayaan fakir miskin
 - Program penanggulangan kemiskinan
 - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya

Dari uraian daftar program prioritas di atas yang terdiri dari sub bidang Pertanian, sub bidang Peternakan, sub bidang Perikanan dan sub Pengembangan Usaha, menunjukkan adanya kesamaan dan ada pula perbedaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO. Hanya saja, perlu dilihat pula lokasi pelaksanaan program prioritas dimaksud apakah berada pada wilayah pascabencana atau di luar wilayah pascabencana. Keseluruhan program prioritas tersebut diimplementasikan melalui sumber dana APBA. Dengan demikian, sumber pembiayaan melalui APBA ini idealnya dapat menjadi bagian kontribusi dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi NAD untuk melengkapi sumber pendanaan APBN dan dana Donor/NGO.

III.3.2.3 Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sangat *urgent*. Hal ini bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh berbagai stakeholders terkait lainnya. Termasuk dalam hal ini keterlibatan Pemda dalam bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Untuk melihat sejauhmana kontribusi Pemda dalam konteks ini dapat dinilai dari porsi pada APBA Provinsi NAD, APBK/APBD kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Sedangkan unit-unit kerja Pemda yang termasuk dalam bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, antara lain; Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Syariat Islam, Dinas Kesejahteraan Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah dan berbagai instansi lainnya yang terkait. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3. 40 berikut ;

Tabel 3. 40
Pengelompokan SKPA/SKPD
di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Kota Banda Aceh	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Nias Selatan
1. Dinas Pendidikan	1. Dinas Pendidikan	1. Dinas Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan	2. Dinas Kesehatan	2. Dinas Kesehatan	2. Dinas Kesehatan
3. RSU	3. RSU Daerah	3. Dinas Syariat Islam	3. RSU Daerah
4. BPMKS	4. BKKS	4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5. Dinas Kesejahteraan Sosial		5. Kantor KB dan PP
6. Dinas Syariat Islam	6. Dinas Pemuda dan Olahraga		
	7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	9. Kantor Syariat Islam		

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, 2008

Bila ditelusuri dalam dokumen APBD/APBK, alokasi belanja langsung yang merupakan belanja untuk program pembangunan, maka khusus untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan untuk tahun 2007 yaitu Banda Aceh sebesar Rp 63,644,071,110, Aceh Besar sebesar Rp 79,056,639,666, dan Aceh Jaya sebesar Rp 68,317,503,575. Sedangkan untuk tahun 2008 yaitu Banda Aceh sebesar Rp 55,693,137,311, Aceh Besar sebesar Rp 74,624,149,363 dan Aceh Jaya sebesar Rp 65,865,603,616.

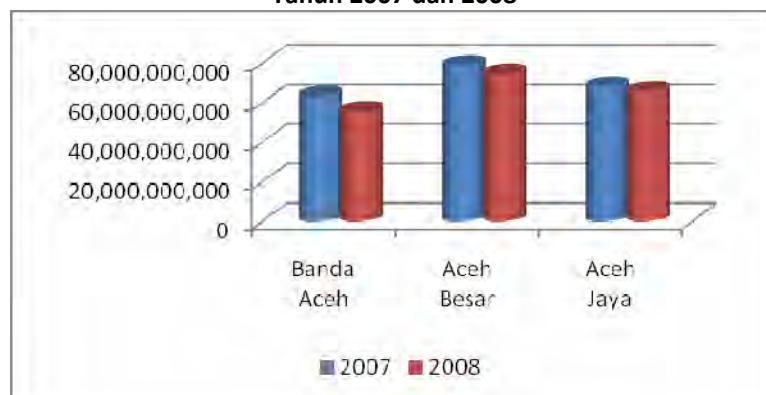
Tabel 3. 41
Alokasi Belanja Langsung APBD
Bidang Sosial Kemasyarakatan
Tahun 2007 dan 2008

Lokasi	Belanja Langsung APBD	
	2007	2008
Banda Aceh	63,644,071,110	55,693,137,311
Aceh Besar	79,056,639,666	74,624,149,363
Aceh Jaya	68,317,503,575	65,865,603,616

Sumber : APBD Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 dan 2008.

Terkait dengan bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemda dalam alokasi belanja langsung APBD, dapat dilakukan perbandingan sebagaimana tertera di bawah ini. Dari Diagram 3. 12, maka analisis perbandingan antar wilayah sampel menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terbesar alokasi belanja langsung. Dengan demikian, alokasi APBD Aceh Besar merupakan daerah yang paling esar untuk mendukung belanja program atau kegiatan pembanguana, baik untuk tahun 2007 maupun 2008.

Diagram 3. 12
Grafik Alokasi Belanja Langsung
Bidang Sosial Kemasyarakatan
Tahun 2007 dan 2008



Sumber : Hasil Analisi Tim P3B, Bappenas, 2008

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi NAD Tahun 2008, terkait dengan pengelompokkan bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan terdapat beberapa sektor yaitu pendidikan, kesehatan, syari'at Islam (agama), sosial, dan budaya. Adapun pogram-program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan, yaitu :

1. Sub bidang pendidikan

- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Dayah
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi

- Program Pembangunan Pendidikan Kabupaten/Kota

2. Sub bidang kesehatan

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Personel Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Hidup Sehat
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

3. Sub bidang agama, antara lain;

- Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam
- Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
- Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
- Program Peningkatan kualitas pendidikan agama
- Program pengembangan dayah dan balee seumeubeut

4. Sub bidang Sosial, antara lain;

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Anak Terlantar
- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Program Penanggulangan Kemiskinan

5. Sub bidang budaya

- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program pengelolaan kekayaan daerah
- Program Pagelaran Seni Budaya Daerah
- Program pengembangan keragaman budaya

Dari uraian daftar program prioritas di atas yang terdiri dari sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang sosial dan sub bidang budaya, menunjukkan adanya kesamaan dan ada pula perbedaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO. Hanya saja, perlu dilihat pula lokasi pelaksanaan program prioritas dimaksud apakah berada pada wilayah pasca bencana atau di luar wilayah pascabencana. Keseluruhan program prioritas tersebut diimplementasikan melalui sumber dana APBA. Dengan demikian, sumber pembiayaan melalui APBA ini idealnya dapat menjadi bagian kontribusi dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi NAD untuk melengkapi sumber pendanaan APBN dan dana Donor/NGO.

III.3.2.4 Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan juga melibatkan kontribusi Pemda melalui APBD. Dalam menjelaskan perkembangan di bidang Kelembagaan dan Hukum di tingkat pemerintah daerah, ini akan dianalisa berdasarkan badan/ dinas sampel yang terkait dengan bidang Kelembagaan dan Hukum yang berada pada level pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota yaitu yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang Linmas Satpol PP dan Paperda. Pada sampel kabupaten/kota yang dianalisis, hanya beberapa kab/kota yang memfungsikan lembaga tersebut sebagai satuan kerja. Fokus analisa terkait dengan Dana APBD yang dikelola oleh Badan Kesbang Linmas Satpol PP dan Paperda. Sumber pembiayaan Pemda berasal dari APBD dan APBN.

Tabel 3. 42
Pengelompokan SKPA/SKPD
di Bidang Kelembagaan dan Hukum

Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Nias Selatan
1. Badan Kesbang Linmas Satpol PP dan Peperda	2. Badan Linmas & Kesbang 3. Dinas Peperda Kota Banda Aceh	Badan Kesbang Linmas Satpol PP dan Peperda	Tidak ada badan khusus	1. Kantor Kesbang 2. Kantor Sat PP

Sumber : Hasil Analisa Tim P3B, Bappenas, 2008

Dalam penataan kelembagaan daerah sebagaimana yang disebut dalam PP No. 8 Tahun 2003 disebutkan bahwa rasio belanja aparatur (rutin) dalam APBD merupakan faktor umum yang harus diperhatikan, selain itu masih ada faktor lainnya yaitu: mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kabupaten/kota (untuk penataan propinsi) atau jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan (untuk penataan kabupaten/kota), serta aspek karakteristik daerah pengembangan / pertumbuhan. Maka berdasarkan analisis dari hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas pada akhir tahun 2008 yang lalu. Tahun 2008 perkembangan ditingkat provinsi sesuai dengan APBA terdapat beberapa program dalam rangka “penciptaan pemerintahan yang baik serta penyehatan birokrasi pemerintahan”. Melalui salah satu misi pembangunan daerah adalah mewujudkan “*good governance and clean government*” dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Dalam mencapai hal tersebut ada 3 klasifikasi program besar yang diharapkan terlaksana dengan baik, yaitu program pembangunan kelembagaan; program peningkatan kapasitas; dan program peningkatan tata pemerintahan. Berikut dapat dilihat rincian dari program-program tersebut:

- **Program Pembangunan Kelembagaan, melalui:**
 1. Kerjasama pembangunan;
 2. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan sekretariat DPRA;
 3. Penataan daerah otonomi baru;

4. Peningkatan kelembagaan dan aparatur pemerintah mukim dan gampong;
 5. Penataan batas daerah dan pengembangan wilayah perbatasan;
 6. Perencanaan pembangunan daerah;
 7. Penelitian dan pengembangan iptek.
- **Program Peningkatan Kapasitas, melalui:**
 1. Pengembangan wawasan kebangsaan;
 2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
 3. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah;
 4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 5. Pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan aparatur;
 6. Pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan non aparatur;
 7. Koordinasi peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil;
 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
 9. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 10. Pembinaan dan pengembangan aparatur;
 11. Peningkatan SDM kearsipan.
 - **Program Peningkatan Tata Pemerintahan, melalui:**
 1. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 3. Pemilihan kepala daerah dan pemilu;
 4. Pelayanan dan perlindungan bantuan hukum;
 5. Peningkatan koordinasi pimpinan pemerintahan;
 6. Koordinasi pengendalian pembangunan;
 7. Pendidikan kedinasan;
 8. Peningkatan kelembagaan dan aparatur;
 9. Peningkatan pelayanan publik;
 10. Perbaikan system administrasi kearsipan;
 11. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah;
 12. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan;
 13. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Berdasarkan rincian di atas, peran Pemda provinsi lebih dominan pada program peningkatan tata pemerintahan yang terdiri dari 13 program utama dan 11 program dalam peningkatan kapasitas , sedangkan untuk program pembangunan kelembagaan terdapat 7 program utama yang akan dilaksanakan termasuk dalam mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD. Sedangkan untuk alokasi di kabupaten/ kota pada daerah sampel sebagaimana tertera dalam APBD masing-masing kabupaten/kota seperti pada Tabel 3. 43 menunjukkan bahwa beberapa daerah menunjukkan keragaman dalam mendukung terselenggaranya tata pemerintahan dan penguatan di bidang kelembagaan, seperti:

- Banda Aceh mengalokasikan Rp. 3,9 miliar pada tahun 2007 untuk anggaran belanja langsung dalam mendukung penyelenggaraan dan kelancaran kinerja badan kesbang linmas dan dinas paperda untuk. Anggaran ini digunakan khusus untuk mendukung terselenggaranya program kerja untuk meningkatkan nilai kesatuan, kebangsaan, dan lingkungan masyarakat serta peningkatan tata peraturan daerah. Sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi Rp. 2,6

miliar, hal ini dikarenakan peralihan fokus pengarusutamaan program ke bidang-bidang yang lain di Kota Banda Aceh.

- Lain halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, karena menyesuaikan dengan PAD dan kebutuhan program di tingkat Kabupaten, maka nilai untuk pengembangan program dibidang kelembagaan lebih sedikit dibandingkan Kota Banda Aceh. Untuk Tahun 2007 melalui Badan Kesbang Linmas Satpol PP dan Peperda dialokasikan anggaran untuk implementasi program dan kegiatan sebesar Rp. 1,8 miliar, ini difokuskan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan di setiap instansi pemerintah di dalam kabupaten Aceh Besar. Sedangkan untuk tahun 2008 hanya dialokasikan Rp. 1,2 miliar. Hal ini disebabkan karena focus tahun 2008 dari Bupati Aceh Besar adalah salah satunya di bidang kesehatan yaitu untuk pemerataan Desa Sehat se-Aceh Besar, melalui pembangunan tempat pelayanan kesehatan diseluruh kecamatan di Kab.Aceh Besar. Yang ditargetkan pada awal 2009 program tersebut dapat berjalan.
- Namun berbeda dengan Aceh Jaya, dikarenakan merupakan wilayah yang terparah diterpa bencana, maka badan yang khusus menangani penyelenggaraan tata pemerintahan belum dibentuk dalam satu dinas/ badan khusus yang mengelolanya, namun masih berada pada unit di bawah secretariat kabupaten yaitu melalui Bagian Pemerintahan. Hingga akhir tahun 2008, masih belum dibentuk badan/ dinas tersebut, disamping karena minimnya personil di daerah yang dapat mengisi posisi yang ada nantinya.

Tabel 3. 43
Alokasi Belanja Langsung APBD
Bidang Kelembagaan dan Hukum
Tahun 2007 dan 2008

Lokasi	Belanja Langsung APBD	
	2007	2008
Provinsi NAD	8,699,622,815	21,126,088,619
Banda Aceh	3,962,761,650	2,653,976,146
Aceh Besar	1,835,302,716	1,194,731,500
Aceh Jaya	0	0

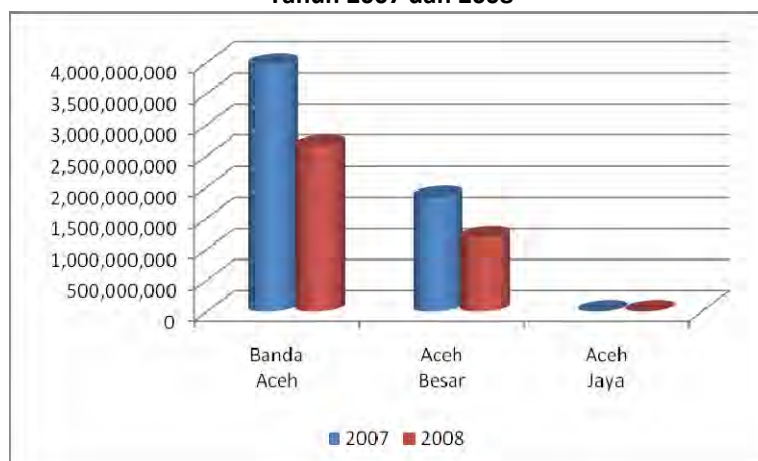
Sumber : APBD Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, APBD Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 dan 2008, APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 dan 2008

Berdasarkan Diagram 3. 13 sangat jelas terlihat bahwa di Kab.Aceh Jaya sama sekali belum ada alokasi yang khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan. Padahal adanya kelembagaan ini sangat penting untuk terciptanya aparatur pemerintah yang memiliki karakteristik penting, sehingga dapat menjadi pemimpin tranformasional yang diperlukan dalam dinamika perbaikan manajemen kualitas di tingkat kabupaten dan tidak tertinggal dengan kab/kota yang lain, seperti:

- Memiliki visi yang kuat
- Memiliki peta untuk tindakan
- Memiliki kerangka untuk visi
- Memiliki kepercayaan diri
- Berani mengambil risiko
- Memiliki gaya pribadi inspirasional
- Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual
- Memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang-peluang

Dengan demikian pemimpin di tingkat daerah: (kabupaten maupun kota) bertindak obyektif berdasarkan bukti-bukti atau data dan fakta yang otentik; melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab beserta hasil yang optimal secara profesional; menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan selalu menjaga nama baik dan wibawa sebagai penilai.

Diagram 3. 13
Grafik Alokasi Belanja Langsung
Bidang Kelembagaan dan Hukum
Tahun 2007 dan 2008



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, 2008

III.3.3 Donor/NGO

III.3.3.1 Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur

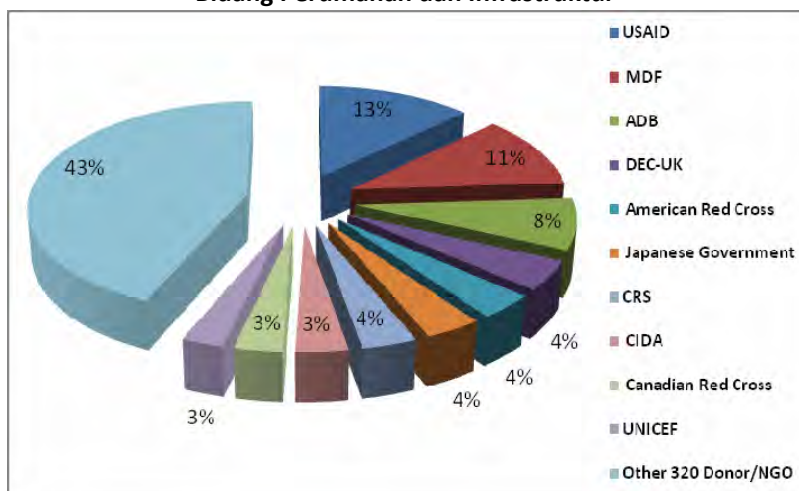
Peran Donor/NGO dalam rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada bidang infrastruktur dan perumahan sangat besar, diantaranya menangani sub bidang transportasi, perhubungan, sumber daya air, energi dan listrik, bangunan umum, perumahan, tata ruang, dan lain sebagainya. Berdasarkan RAN Database BRR, terdapat 325 Donor/NGO yang terlibat di dalam bidang infrastruktur dan perumahan, dan komitmen terbesar diantaranya adalah USAID, MDF, ADB, DEC-UK, *American Red Cross*, dan lain sebagainya. Komitmen rehabilitasi dan rekonstruksi Donor/NGO berdasarkan urutan 10 (sepuluh) terbesar pada bidang infrastruktur dan perumahan dapat dilihat pada Tabel 3. 44 dan Diagram 3. 14.

Tabel 3. 44
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Infrastruktur dan Permukiman

No	Funding Agency	Committed (USD)	Disbursed	
			(USD)	(%)
1	USAID (<i>United States Agency for International Development</i>)	277,282,091	111,859,854	40
2	MDF (<i>Multi Donor Fund</i>)	237,127,201	124,824,216	53
3	ADB (<i>Asian Development Bank</i>)	166,896,587	82,484,688	49
4	DEC-UK(<i>UK Disaster Emergency Committee</i>)	96,493,840	94,027,354	97
5	<i>American Red Cross</i>	79,581,802	73,783,548	93
6	<i>Japanese Government</i>	78,371,595	78,371,547	100
7	CRS (<i>Catholic Relief Service</i>)	76,936,343	55,574,257	72
8	CIDA (<i>Canadian International Development Agencies</i>)	72,710,153	71,497,493	98
9	<i>Canadian Red Cross</i>	66,241,724	31,846,128	48
10	UNICEF (<i>United Nations Children's Fund</i>)	58,378,010	45,227,876	77
11	Other 320 Donor/NGO	934,871,990	774,760,798	83
	Total	2,144,891,336	1,544,257,759	72

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008

Diagram 3. 14
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Perumahan dan Infrastruktur



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

III.3.3.1.1 Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh Donor/NGO terfokus pada sub bidang perumahan, prasarana dasar lingkungan, serta tata ruang dan pertanahan. Realisasi kegiatan tersebut secara lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 3. 45.

Tabel 3. 45
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Perumahan dan Permukiman oleh Donor/NGO

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	%
A	Perumahan				
1	Rumah rusak berat yang diperbaiki	Unit	3,425	1,952	57
2	Rumah yang dibangun	Unit	104,107	85,156	82
3	Rumah yang sudah ditempati	Unit	32,630	24,440	75
4	Rumah rusak ringan yang diperbaiki	Unit	7,234	3,997	55
5	Pembangunan rumah yang direlokasi	Unit	5,480	3,750	68
6	Pembangunan rumah sementara	Unit	102,829	102,790	100
7	Penyediaan bahan bangunan	USD	13,104,758	1,926,108	15
8	Rehabilitasi/rekonstruksi gedung pemerintahan	Unit	143	138	97
9	Jumlah Surat tanah yang diterbitkan	persil	12,305	11,019	90
10	Rehabilitasi/rekonstruksi gedung kantor	Unit	205	190	93
11	Penerangan jalan	Unit	609	559	92
12	Jumlah orang yang dilayani	Orang	791,128	219,869	28
13	Rehabilitasi/rekonstruksi bangunan publik	Unit	635	611	96
14	Restorasi taman publik	Unit	53	18	34
15	Study report		3,440	3,417	99
16	Rehabilitasi/rekonstruksi bangunan pendukung	Unit	324	324	100
B	Tata Ruang Dan Pertanahan				
1	Peta yang telah dihasilkan	%	20,363	5,161	25
2	Surat tanah yang diterbitkan	persil	146,565	8,103	6
3	Jumlah orang yang dilayani	orang	102,126	100,204	98
4	Study reports		158	35	22
5	Desa yang dilengkapi batas property	Gampong	414	414	100
6	Desa yang dilengkapi gambar tampilan	gampong	244	240	98

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008. Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Pada sub bidang **perumahan**, keterlibatan NGO dan donor pada bidang perumahan sejak masa tanggap darurat sangat dominan. Dari komitmen yang direncanakan sebanyak 104.107 unit terhadap rumah yang akan dibangun, pada bulan Desember 2008 tercatat telah diselesaikan 82% yaitu 85.156 unit. Komitmen pembangunan rumah yang direlokasi dan pembangunan rumah sementara masing-masing 5.480 unit dan 102.829 unit, sedangkan realisasinya 3.750 unit untuk rumah yang direlokasi dan 102.790 unit untuk rumah sementara. Untuk rehabilitasi rumah (rusak berat dan rusak ringan) direncanakan sebanyak masing-masing 3,425 dan 7,234 unit dan bisa diselesaikan sebanyak 1.952 unit untuk rumah rusak berat dan 3.997 unit untuk rumah rusak ringan.

Pada sub bidang **Tata Ruang dan Pertanahan**, kegiatan perencanaan untuk menunjang kualitas dan pelaksanaan sub bidang tata ruang khususnya untuk proyek perumahan dan permukiman sangatlah dibutuhkan. Diantaranya ada kegiatan pemetaan yang diperlukan untuk tata batas (desa/gampong). Dari 20,363% yang tercantum dalam komitmen, diselesaikan 5,161% dengan realisasi yang hanya sebesar 25%. Untuk sub bidang pertanahan, kegiatan penerbitan surat tanah dari komitmen sebanyak 146.565 persil, baru sedikit sekali terealisasi (6%) yaitu hanya sebanyak 8.103 persil.

Dari penjelasan secara umum di atas, berikut akan dibahas kontribusi beberapa Donor/NGO berdasarkan hasil kunjungan lapangan (Oktober 2008) terkait dengan bidang perumahan dan permukiman yaitu *Canadian International Development Agency, Turkish Red Crescent, China Charity Federation Dan Red Cross Society Of China, Qatar Charity, Bank Mandiri Dan Yayasan Nurani Dunia, dan Yayasan Bustanussalatin*.

A. Canadian International Development Agency (CIDA)

Salah satu donor yang tergabung dalam MDTF adalah Canadian International Development Agency (CIDA). Dengan adanya kontribusi (sebesar 18 juta dolar) dalam mekanisme pendanaan ini memungkinkan CIDA dalam koordinasi program-program antar donor di Aceh-Nias. Dari pihak pemerintah Kanada sendiri, mereka mempunyai komitmen untuk memberikan 425 juta dolar dalam mendukung upaya kemanusiaan secara komprehensif hingga 2009. CIDA menyediakan dana pendamping sebesar 72,5 juta dolar untuk proyek-proyek perumahan yang dilaksanakan oleh organisasi kemanusiaan Kanada, sehingga menambah jumlah dana bantuan yang diberikan oleh masyarakat Kanada. Perkembangan/kemajuan proyek dapat dilihat pada Tabel 3. 46.

Tabel 3. 46
Realisasi Bidang Perumahan dan Permukiman oleh CIDA

No	CIDA	Komitmen (unit)	Realisasi *)	
			Volume	%
1	Christian Reformed World Relief Committee (CRWCRC)/GenAssist	500	525	105%
2	Mennonite Central Committee of Canada (MCCC)/GenAssist	200	212	106%
3	Development and Peace / UpLink	550	550	100%
4	Canadian Red Cross	5.578	4.318	77%
	Total	6.828	5.605	82%

Sumber : *Canadian International Development Agency (CIDA), Desember 2008*

Dimulai dari kontribusi terbesar dari masyarakat Kanada, yaitu Canadian Red Cross sejumlah 66,1 juta dolar Kanada, direncanakan pembangunan 5.578 unit rumah dengan jumlah yang terbangun 4.318 unit (realisasi fisik sebesar 77%). Kemudian Development and Peace/UpLink dengan kontribusi USD 4,9 juta, mampu membangun seluruh rumah yang telah direncanakan, yaitu 550 unit. *Christian Reformed World Relief Committee (CRWCRC)/GenAssist* dengan kontribusi sebesar USD 1 juta dapat merealisasi 525 unit rumah, lebih dari target yang direncanakan, dengan capaian persentase 105%. Dan terakhir Mennonite Central Committee of Canada (MCCC)/GenAssist dari

kontribusi sebesar 0,5 juta rumah dapat membangun 212 unit dari rencana awal yang hanya 200 unit (teralisasi 106%).

Semua proyek perumahan yang didana CIDA, berpedoman pada pengelolaan lingkungan dan pengawasan dengan maksud mengatasi berbagai permasalahan seperti saluran air dan sanitasi. Untuk melengkapi hal ini, CIDA bekerjasama dengan *Emergency Response and Transitional Recovery* (ERTR) program dari UNDP yaitu memberikan pelatihan analisa dampak lingkungan dan monitoring kepatuhan; serta *Canada-Aceh Local Government Assistance Project* (CALGAP) dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah.

Hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas, **Canadian Red Cross** akan membangun sebanyak 2.500 rumah permanen bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Aceh Besar. Rencana ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Palang Merah Kanada dengan Bupati Aceh Besar. Pembangunan rumah tersebut akan dilakukan di Kecamatan Masjid Raya 1.632 unit dan Kecamatan Baitussalam 800 unit rumah. Canadian Red Cross juga ikut memfasilitasi pertemuan koordinasi di Kecamatan Baitussalam yang dihadiri oleh berbagai NGO/Lembaga yang bekerja di wilayah Baitussalam, perwalikan Pemerintah Daerah (Camat) dan perwakilan masyarakat desa. Tujuan koordinasi untuk mengevaluasi berbagai perkembangan program rekonstruksi dan rehabilitasi di Kecamatan Baitussalam.

Dari 800 rumah yang akan dibangun di Kecamatan Baitussalam, Canadian Red Cross akan membangun 160 rumah dan 38 akan direnovasi di Desa Miruk Lamreudeup yang luasnya 550 Ha. Berdasarkan gambar di atas, rumah-rumah tersebut mayoritas sudah dihuni oleh masyarakat. Rumah tersebut bertipe 36 yang dilengkapi dengan WC/kamar mandi. Kualitas konstruksi rumah sudah memadai, tidak terlihat kerusakan/retakan yang berarti di rumah-rumah tersebut. Rumah juga dilengkapi dengan kamar mandi dan septic tank. Untuk melengkapi kebutuhan air bersih di permukiman tersebut, *Canadian Red Cross* bekerja sama dengan *American Red Cross* pada pembangunan pipa distribusi air yang dimulai pada 10 April 2008 selama 3 bulan ke depan. Akses terhadap pusat kegiatan di permukiman ini diantaranya adanya sekolah (SD) dan tempat ibadah (mesjid dan mushalla). Kualitas konstruksi prasarana lingkungan antara lain jalan lingkungan belum diaspal, saluran drainase tidak ada, jaringan listrik dan tempat sampah sudah tersedia di masing-masing rumah.

C. Bank Mandiri dan Yayasan Nurani Dunia

Bank Mandiri melalui program Mandiri Peduli Aceh bekerja sama dengan Yayasan Nurani Dunia membangun perumahan (61 unit) di Desa Neuheun seluas 51.540 meter². Kawasan perumahan ini diresmikan pada 25 Agustus 2007. Pembangunan proyek ini mengikutsertakan masyarakat setempat dengan tujuan agar menimbulkan rasa memiliki yang tinggi terhadap bangunan tersebut. Bentuk rumah yang dibangun berarsitektur budaya Aceh yang terlihat dari bentuk atap rumah, rumah didesain berlantai dua dengan ukuran 2x (7x6) m², lantai dasar tidak menggunakan tembok untuk menghindari arus deras air yang mengalir dari bukit. Lantai bawah juga digunakan untuk kamar mandi/WC dan dapur/tempat makan, serta ruang pemberdayaan ekonomi keluarga sedangkan lantai atas khusus untuk kamar tidur dan keluarga. Komplek perumahan ini didesain dengan sistem *cluster*/kelompok, dimana setiap cluster terdiri dari lima atau enam rumah membentuk lingkaran dengan taman di tengahnya. Jadi setiap penghuni bisa memanfaatkan lantai pertama sebagai tempat usaha, sedangkan halaman mukanya untuk taman dan aktivitas sosial bersama.

Kualitas konstruksi berada dalam kondisi baik, retakan pada dinding ataupun kerusakan pada atap tidak ada. Rumah tersebut memanfaatkan kayu kelapa tua sebagai lantai rumah. Atap berbahan ringan serta fondasi cakar ayam sehingga akan tetap kuat bila terjadi gempa. Masyarakat dapat menambah atau memperluas bangunan lantai dasar. Bangunan rumah dilengkapi antara lain dengan adanya kamar mandi/jamban /kloset dan septic tank. Kebutuhan air bersih dipenuhi

dalam setiap kluster. Selain oleh Bank Mandiri dan Nurani Dunia, sebagian penyediaan air bersih juga bekerjasama dengan BRR dan Humanity First dalam “water and sanitary program” untuk 310 jiwa. Penyediaan air bersih ini dikoordinasikan oleh Humanity First International, didanai oleh Humanity First USA, dan diimplementasikan oleh Humanity First Indonesia. Bantuan tersebut berupa sumur air 3 unit, keran 19 titik, dan tempat mencuci 8 unit.

Kondisi prasarana lingkungan sudah cukup lengkap dan memadai, misalnya jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sudah di aspal, saluran drainase juga sudah tersedia di setiap pinggir jalan/di depan rumah, jaringan listrik juga sudah tersedia di setiap rumah dan di jalan juga tersedia lampu jalan. Nurani Dunia (dengan persetujuan Bank Mandiri) juga mengajak PT. Schneider Indonesia untuk membantu dalam penyediaan fasilitas listrik. Tempat sampah ada di setiap cluster/kelompok perumahan.

D. Turkish Red Crescent

Pembangunan 700 unit rumah dengan tipe 45 di Kecamatan Lampu'uk yang didanai oleh *Turkish Red Crescent Society* (TRCS) sebesar Rp 61 miliar, dimulai dari 20 Oktober 2005 - 8 Mei 2006. Kontraktor yang disewa oleh Turkish RC adalah Persero PT Waskita Karya – Almadali Konsorsium dengan PT. Meidiatama Indokonsult sebagai konsultan. Proses pembangunan perumahan ini sempat berjalan hampir setengahnya sampai akhirnya pihak TRCS mendapati bahwa pembangunan tersebut di sub-kontrakan oleh pihak Waskita. Keadaan ini menjadi lebih buruk, ketika ternyata kapasitas perusahaan-perusahaan sub kontrak tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang mereka buat dengan baik. Oleh karena itu, TRCS melakukan pengaduan langsung ke BRR yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya 'black list'. BRR melarang PT. Waskita Karya untuk melaksanakan proyek apapun yang berhubungan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh (program Tsunami) selama satu tahun. Pihak TRCS tidak mau menunda pekerjaan rekonstruksi mereka dan melanjutkan pembangunan dengan perusahaan lainnya dengan melakukan tender ulang. Setelah itu, pihak TRCS melakukan re-tender pembangunan perumahan tersebut kepada pihak lain dan pada akhirnya proyek tersebut berjalan dengan baik.

Rumah Turkish RC memiliki 2 kamar dengan WC dan ruang tamu, yang telah memenuhi standar warga. Sayangnya jalan lingkungan belum dibangun dengan baik, padahal BRR telah menjanjikan untuk memperbaiki jalan utama mulai dari pengaspalan sampai hotmix (perkerasan). Begitu juga pembuangan limbah rumah tangga (parit) yang agak bermasalah karena sudah tidak dapat digunakan, serta menyebabkan air tergenang dan ditumbuhi rumput liar. Masalah penyambungan aliran listrik masih belum jelas, beberapa rumah yang telah dipasang adalah sambungan dari rumah lama. Air setiap rumah dialirkan dari mata air yang berasal dari gunung melalui pipa-pipa yang dipasang sendiri oleh warga di setiap rumah. Tetapi saat kemarau, asupan air akan berkurang dan menguning.

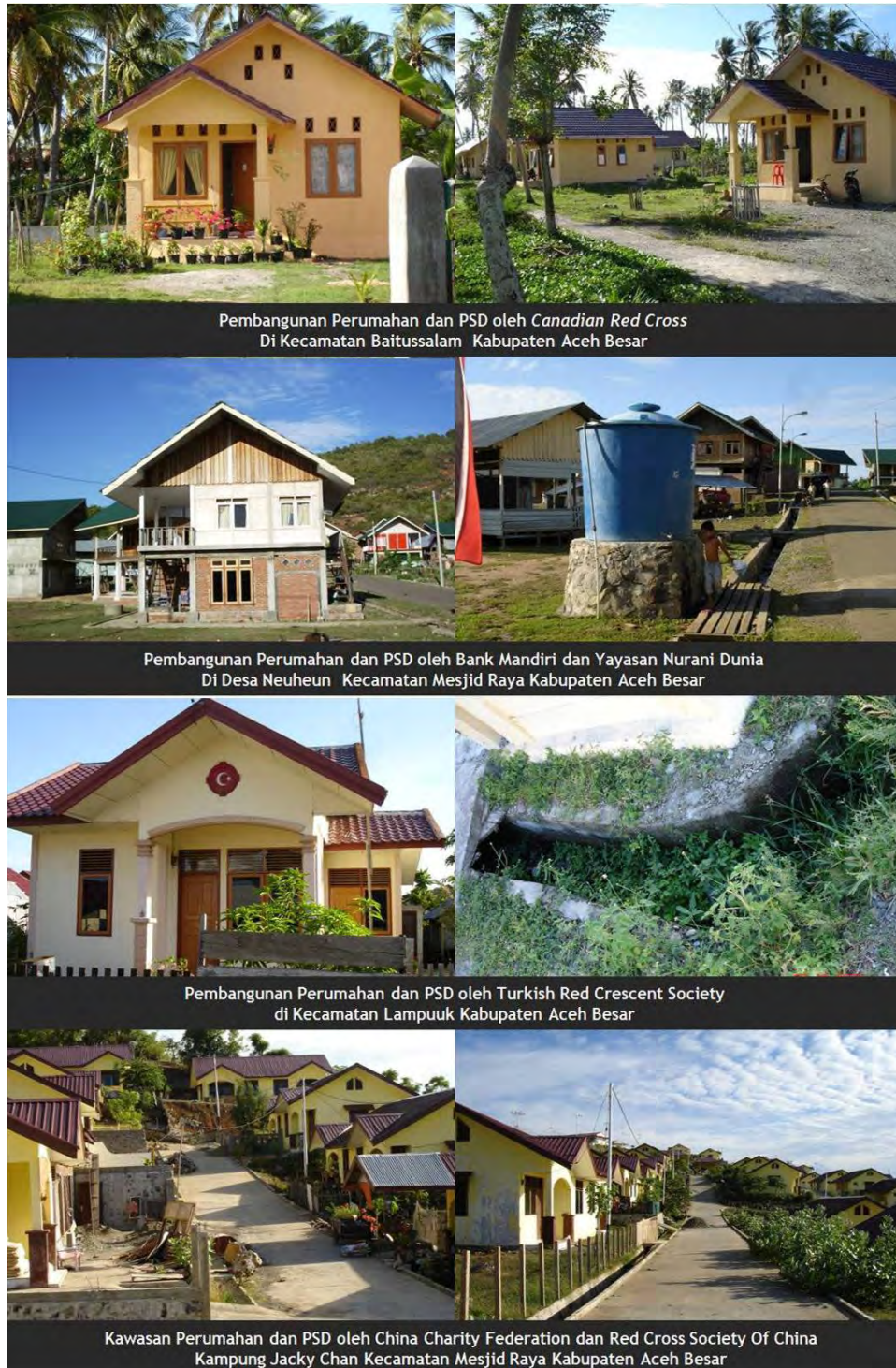
E. China Charity Federation dan Red Cross Society Of China

Pemerintah Tiongkok dengan dana USD 7 juta (sekitar Rp 65 miliar) membangun 606 unit rumah dengan tipe 42 di areal 22 Ha di perbukitan Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya (sekitar 17 km dari Banda Aceh) untuk korban tsunami 2004. Prasasti menyebutkan bahwa yang mendanai Kampung Jacky Chan atau Kampung Persahabatan Indonesia-Tiongkok adalah China Charity Federation dan Red Cross Society of China. Pekerjaan senilai USD 7 juta merupakan proyek hibah terbesar Tiongkok di antara daerah yang sama-sama dilanda tsunami. Pelaksanaan pembangunan dilakukan langsung oleh kontraktor dari Tiongkok, yakni Synohydro Corporation China. Peletakan batu pertama dilakukan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Lian Lik Juan. Acara penyerahan rumah bantuan juga ditandai dengan naskah serahterima rumah, serta penyerahan kunci oleh President China Charity Federation, Fan Baojun, yang diterima Bupati Aceh Besar, Dr Bukhari Daud. Dalam acara tersebut juga dihadiri Wagub Muhammad Nazar; Kedutaan RRC Charge d’Affaires Yang

Lingzhu; Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto; Secretary General Red Cross Society of China Wang Haijing; Koordinator Panitia Tionghoa Sumatera Utara Peduli Bencana Alam Ardjan Leo; dan Representation Sinohydro Corporation Ltd An Lanting.

Gambar 3. 18

Beberapa Hasil Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman oleh Donor/NGO



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

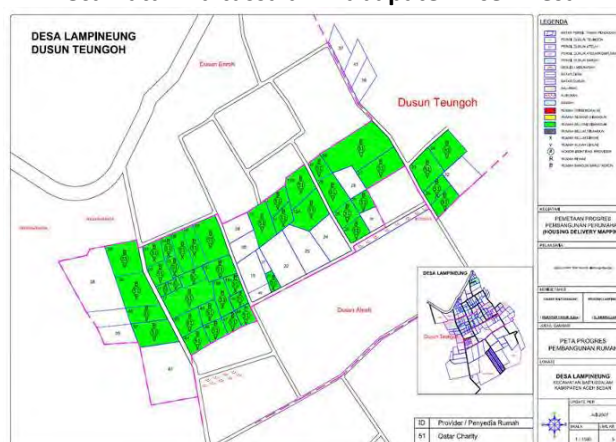
Kampung Jacky Chan atau Kampung Persahabatan Indonesia - Tiongkok dilengkapi dengan masjid sebagai sarana ibadah; sarana pendidikan (TK dan SD); Poliklinik; sarana bermain (lapangan basket, lapangan bola); gedung pertemuan; hingga pasar mini, yang terpampang tulisan "Bangunan ini sumbangan masyarakat Tiongkok" lengkap dengan huruf China. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air karena lokasinya yang berada di ketinggian, ditangani BRR NAD-Nias dengan membangun sumur bor di wilayah itu hingga bisa memenuhi kebutuhan penghuni. Listrik juga bisa dinyalakan selama 24 jam nonstop. Jalan di lingkungan Kampung Jacky Chan juga sudah dibuat dengan sangat baik.

F. Qatar Charity

Qatar Charity (sebuah lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga amal di Qatar yang didirikan tahun 1980 oleh sekelompok tokoh masyarakat Qatar untuk membantu masyarakat Qatar dan masyarakat lain) membangun Kompleks Perumahan "AR-Rayyan" dengan 170 rumah tipe 36 di Desa Lampineung, Aceh Besar. Perumahan ini dibangun dalam dua tahap yaitu 100 rumah selesai dibangun di tahun 2007 dan 70 rumah akan selesai di tahun 2008.

Kompleks perumahan Ar-Rayyan adalah sebuah kompleks perumahan integral dilengkapi dengan fasilitas penting seperti klinik kesehatan, masjid, arena bermain (termasuk lapangan basket dan lapangan sepak bola), serta toko. Setiap rumah di kompleks ini berlantai keramik memiliki 1 ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras serta dua kamar tidur, dan dilengkapi dengan septic tank di masing-masing rumah. Qatar Charity juga membuatkan menara-menara air agar masyarakat mendapat akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari.

Gambar 3. 19
Denah Kawasan Perumahan Ar Rayyan Lampineung di
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar



Sumber : http://www.logica.or.id/op/component/4/hdm/a_besar/
per Juli 2007

III.3.3.1.2 Pemulihan Infrastruktur

Kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Donor/NGO terfokus pada sub bidang jalan dan jembatan, perhubungan, sumberdaya air, serta energi dan listrik. Realisasi kegiatan tersebut secara lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 3. 47.

Tabel 3. 47
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Infrastruktur oleh Donor/NGO

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	%
A	Jalan dan Jembatan				
1	Pembangunan jembatan	m	2,633	2,623	100
2	Pembangunan jembatan	unit	417	279	67
3	Rehabilitasi/rekonstruksi jalan kabupaten	km	13	13	100
4	Rehabilitasi/rekonstruksi jalan provinsi/kota	km	150	130	87
5	Rehabilitasi/rekonstruksi jalan sekitar perumahan/desa	m	310,994	279,848	90
6	Rehabilitasi/rekonstruksi jalan untuk fasilitas umum	m	16,976	16,976	100

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	%
7	Rehabilitasi/rekonstruksi jalan	km	1,725	1,506	87
B	Perhubungan				
1	Rehabilitasi/rekonstruksi airstrip/landasan pacu	km	7	6	86
2	Pengembangan bandara/pelabuhan	unit	24	23	96
3	Rehabilitasi/rekonstruksi jalan sekitar pelabuhan/bandara	m	236	195	83
C	Sumber Daya Air				
1	Pembangunan pengaman pantai/tanggul/pengendali banjir	km2	182	142	78
2	Pembangunan sistem irigasi	Ha	4,935	2,345	48
3	Rehabilitasi waduk	m	1,280	1,280	100
4	Produksi kapasitas air bersih	Lt/sec	43,411	42,932	99
5	Penyediaan/rehabilitasi saluran pipa primer/sekunder	Km	14,008	11,394	81
6	Restorasi water system (skala besar)	Unit	4,507	2,821	63
7	Rehabilitasi/rekonstruksi water points (skala kecil)	Unit	21,563	14,058	65
8	Rehabilitasi booster pumps	Unit	800	423	53
9	Rehabilitasi/penggalian sumur dalam	Unit	1,457	1,439	99
10	Purifikasi air tanah	Unit	11,041	10,953	99
11	Perumahan yang disupply air	Unit	117,667	113,524	96
12	Penyediaan hydrant umum	Unit	35,055	35,055	100
13	Rehabilitasi/rekonstruksi keran umum	Unit	1,052	693	66
14	Rehabilitasi fasilitas pendistribusi air	unit	44,895	8,277	18
15	Pembangunan kamar mandi	Unit	134	134	100
16	Rumah yang disupply dengan sanitasi/pembuangan air kotor	Unit	18,471	15,848	86
17	Rehabilitasi/rekonstruksi toilet umum	Unit	1,715	1,326	77
18	Pemulihan rencana/pedoman sanitasi	Unit	53,928	49,026	91
19	<i>Sludge water treatment</i>	Unit	3	3	100
20	Rehabilitasi/rekonstruksi toilet	Unit	15,774	14,340	91
21	Penyediaan/rehabilitasi gerobak sampah	unit	4	0	0
22	Penyediaan/rehabilitasi container sampah	unit	134,147	127,909	95
23	Penyediaan/rehabilitasi truk sampah	unit	107	5	5
24	Penyediaan/rehabilitasi container plot	Unit	115,225	73,938	64
25	Penyediaan/rehabilitasi transfer station	unit	626,005	486,161	78
26	Penyediaan TPA sampah	M2	472,007	60,004	13
27	Rehabilitasi/rekonstruksi saluran drainase	m	529,616	487,539	92
28	Rehabilitasi/rekonstruksi struktur outlet drainase	m	32,492	32,492	100
D	Energi dan Listrik				
1	Pembangunan tenaga listrik/generator	kW	58,279	44,459	76
2	Penyediaan peralatan dan suku cadang	USD	15,680,634	15,294,726	98
3	Rehabilitasi fasilitas distribusi komunikasi	unit	7	3	43
4	Rehabilitasi fasilitas distribusi listrik	unit	343	337	98
5	Dukungan logistik	USD	5,074,615	5,074,615	100

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008. Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur yang dilaksanakan oleh Donor/NGO diantaranya adalah:

- Realisasi di sub bidang **jalan dan jembatan** sudah mencapai 80-100% dari target. Sebagai contoh, perbaikan jembatan telah mencapai realisasi 100% yaitu sepanjang 2.633 meter dan untuk jumlah jembatannya baru mencapai 67% atau 279 unit, sedangkan realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan mencapai 87-100%, dimana realisasi mencapai 100% khususnya pada rehabilitasi/rekonstruksi jalan kabupaten dan jalan untuk fasilitas umum.
- Pada sub bidang **perhubungan**, Donor/NGO hampir menyelesaikan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi landasan pacu (*airstrip*) yaitu telah mencapai 86% atau 6 km dari target 7 km, sedangkan rehabilitasi/rekonstruksi jalan sekitar pelabuhan/bandara sudah

direalisasikan 195 meter dari komitmen 236 meter. Untuk pengembangan bandara/pelabuhan hampir selesai yaitu 96 % dari 24 unit, telah selesai 23 unit.

- Kegiatan sub bidang **sumber daya air**, meliputi :
 - o Pembangunan sistem **irigasi** telah terealisasi seluas 2.345 Ha atau 48 % dari target 4.935 Ha dan rehabilitasi waduk terelisasi 100 % yaitu 1280 meter.
 - o pembangunan **pengaman pantai/tanggul/pengendali banjir** sudah dilaksanakan sepanjang 142 km² dari komitmen 182 km² (78 %).
 - o Untuk kegiatan **air bersih**, beberapa kegiatan telah mencapai realisasi di atas 80% seperti penyediaan hidran yang mencapai 35.051 unit (100 %), penyediaan saluran air perpipaan primer/sekunder sepanjang 11.394 km dari 14.008 km komitmen (81 %), restorasi *water system* mencapai realisasi sebesar 63 % dari rencana 4.507 unit. Kegiatan suply air ke perumahan telah merealisasikan kegiatannya pada 113.524 rumah dari target awal 117.667 rumah (96 %) dan purifikasi air tanah telah mencapai realisasi sebesar 99 % dari rencana 11.041 unit. Program lainnya seperti rehabilitasi keran umum mencapai 66 % dari komitmen 1.052 unit, rehabilitasi fasilitas distribusi air bersih baru mencapai realisasi sebesar 18 % dari komitmen 44.895 unit. Kapasitas air bersih yang diproduksi saat ini adalah 42.932 lt/det dari komitmen 43.411 lt/det (99 %).
 - o Kegiatan sanitasi lingkungan meliputi pengelolaan **air limbah dan persampahan**. Pada sub bidang pengelolaan air limbah yang telah selesai 100 % yaitu pembangunan 134 unit kamar mandi dan *sludge water treatment* sebanyak 3 unit. Realisasi kegiatan lainnya mencapai 77-91 % antara lain 15.848 unit perumahan yang disupply dengan sanitasi, 1.326 unit toilet umum, dan 49.026 pedoman sanitasi. Pada kegiatan pengelolaan persampahan, Donor/NGO turut membantu dalam penyediaan/rehabilitasi 127.909 unit container sampah (95 %), 486.161 unit *transfer station* (78 %), dan 73.938 unit *container* sampah, sedangkan TPA sampah telah terealisasi seluas 60.004 m² (13 %).
 - o Rehabilitasi saluran **drainase** telah direalisasikan 100 % dengan panjang struktur outlet 32.492 meter, selanjutnya konstruksi saluran drainase yang telah direhabilitasi adalah sepanjang 487.539 meter atau 92 % dari komitmen.
- Pada kegiatan **energi dan listrik**, pengadaan generator/tenaga listrik telah dilakukan dan kapasitas sampai saat ini adalah sebesar 44.459 Kw dari komitmen awal sebesar 58.273 Kw. Selanjutnya suply peralatan dan suku cadang telah direalisasikan sebesar 98% atau 15.294.726 USD, dan rehabilitasi fasilitas distribusi listrik terealisasi 337 unit (98 %).
- Donor/NGO yang terlibat dalam bidang **pos dan telematika** yaitu baru mencapai 43 % atau 3 unit dari komitmen 7 unit rehabilitasi fasilitas distribusi komunikasi.

Dari penjelasan secara umum di atas, berikut akan dibahas kontribusi beberapa Donor/NGO terkait dengan bidang infrastruktur yaitu USAID dan MDF.

A. USAID

Salah satu Donor yang memiliki komitmen terbesar di bidang infrastruktur adalah **USAID**. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID memberikan hibah untuk Aceh sebesar kurang lebih USD 460 juta dimana USD 245 juta tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan pesisir barat Aceh dari Banda Aceh-Calang. Jalan tersebut juga menghubungkan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Pembangunan jalan sepanjang 160 km juga termasuk dengan pembangunan saluran drainase dan jembatan. Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang akan terhubung dengan ruas jalan Calang-Meulaboh yang pembiayaannya didanai melalui bantuan JICS dari Jepang.

Kategori Jalan Banda Aceh-Calang adalah jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Proyek jalan ini didukung oleh perusahaan manajemen desain dan konstruksi Parsons Global Services Inc. (sebuah perusahaan yang berpusat di A.S) serta kontraktor

pembangunan P.T. Wijaya Karya (sepanjang 40 km). USAID juga memberikan kontrak pembangunan jalan ini kepada *Ssangyong Engineering and Construction Co. Ltd.* dari Korea Selatan dan P.T. Hutama Karya (sepanjang 115 km). Proyek jalan ini dijadwalkan selesai pada tahun 2010. Pembangunan jalan tersebut terbagi ke dalam 2 tahap/kontrak, yaitu *priority* dilaksanakan pada bulan Mei 2009 dan *prime* yang dilaksanakan pada Desember 2009.

Gambar 3. 20
Tahap Pembangunan Jalan dan Jembatan oleh USAID di
Kabupaten Aceh Besar



Sumber : <http://acehroad.org/>

Lambatnya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan antara lain pembebasan lahan dan pengiriman material jembatan yang terlambat. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, salah satu jembatan di sepanjang jalan Banda Aceh-Calang yang cukup lama pembangunannya yaitu jembatan Krueng Raba di Kecamatan Lhoknga, saat ini sudah selesai dibangun dan sudah dapat digunakan (Oktober 2008). Kategori jembatan Krueng Raba adalah jembatan nasional, dimana kondisi material jembatan terbuat dari baja, dan jembatan tersebut mampu menahan beban kendaraan berat (pengangkut alat dan bahan-bahan menuju Pabrik Semen La Farge di Lhonga). Kualitas jembatan dalam kondisi mulus dan disediakan juga jalur pejalan kaki disamping jembatan tersebut.

Gambar 3. 21
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Jalan dan Jembatan oleh USAID



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

B. MDF

Beberapa program MDF yang terkait dengan bidang infrastruktur diantaranya *Banda Aceh Flood Mitigation Project*, *Program Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)*, dan *Program Tsunami Recovery Waste Management Programme (TRWMP)*:

a) **Banda Aceh Flood Mitigation Project**

Sebelum tsunami terjadi, Kota Banda Aceh rentan terhadap bencana banjir. Rusaknya pintu air dan mesin pemompa air telah mengakibatkan banjir periodik di wilayah dataran rendah. Oleh karena itu **Muslim Aid dengan mitra Bank Dunia dengan sumber dana dari MDF** melaksanakan proyek pencegahan banjir untuk Banda Aceh (*Banda Aceh Flood Mitigation Project*), proyek ini juga secara erat melakukan koordinasi dengan rencana rekonstruksi pencegahan banjir dan drainase pemerintah kota. Rencananya meliputi pemasangan klep banjir dari karet dan memperbaiki sistem pemompaan dan drainase. Proyek ini dimulai pada bulan April 2006 hingga Juni 2009.

Realisasi pelaksanaan sejak tahun 2006 meliputi pemasangan di 11 lokasi dengan ukuran 600 mm (Zona 2 & 3) dan sampai dengan Maret 2009 yang akan datang akan dipasang 31 unit di 26 lokasi (zona 2 dan 3) dengan variasi ukuran 600, 750 dan 1050 mm. Bersebelahan dengan Zona 2 yaitu Zona 1 yang dikerjakan oleh JICA. Di dalam pelaksanaan pembangunan drainase ini dilakukan secara terkoneksi dengan zona-zona lainnya, sehingga dengan adanya interkoneksi tersebut diharapkan drainase tersebut dapat berfungsi secara baik.

Gambar 3. 22

Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Bidang Sumberdaya Air oleh Muslim Aid



Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Duck Bill di Kota Banda Aceh

Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Pengendali banjir tersebut menggunakan sistem *duck bill* (mulut bebek) yaitu pengendali banjir dengan sistem buka tutup otomatis berdasarkan dari debit air yang masuk pada saluran drainase. Keuntungan dari mulut bebek ini dibandingkan alat pengendali banjir konvensional adalah dari segi kepraktisan dan *maintenance*. Bila pengendali banjir konvensional harus dikendalikan secara manual dengan memutar tuas untuk membuka pintu air bila debit air sudah tinggi maka mulut bebek akan membuka secara otomatis sehingga meminimalkan resiko banjir karena terlambat membuka pintu air. Dari segi *maintenance*, mulut bebek tidak memerlukan perawatan dengan catatan DAS bersih dari sampah sehingga tidak mengakibatkan mulut bebek tersumbat. Pengelola bertugas untuk membersihkan DAS dengan memasang jaring-jaring pengaman disekitar mulut bebek untuk menghindari sampah masuk kedalamnya. Dengan bahan yang terbuat dari karet elastomer dan sangat kuat diperhitungkan usia pemakaian mulut bebek adalah 15-20 tahun.

Tantangan dalam pelaksanaan proyek ini adalah tersumbatnya drainase dengan limbah, oleh karena itu proyek ini harus memastikan koordinasi dan integrasi dari kegiatan pengelolaan limbah lainnya. Pihak Muslim Aid, dalam melakukan pembangunan ini juga melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga pasca

selesaiya pembangunan drainase maka pengelolaan dan perawatan tahap selanjutnya dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu pemahaman masyarakat tentang alat ini sangat minim karena kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana poyek sehingga di beberapa lokasi mulut bebek ini rusak karena dianggap tidak dapat berfungsi secara maksimal. Pada saat hujan dan debit air belum sampai ambang batas yang ditetapkan, mulut bebek tidak akan membuka otomatis sehingga di beberapa lokasi terjadi banjir. Dengan rusaknya mulut bebek tersebut, pada saat hujan mengakibatkan lokasi banjir semakin luas.

b) Program Infrastructure Reconstruction Financing Facility/IRFF

Program Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRRF) dilaksanakan oleh **BRR, dengan mitra Bank Dunia, dan sumber dana dari MDF**. IRRF meningkatkan fleksibilitas BRR untuk mendanai kegiatan infrastruktur yang memungkinkan proyek untuk langsung didanai begitu mereka siap. Proyek ini mendanai infrastruktur tingkat provinsi dan kabupaten yang teridentifikasi melalui kerangka Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP). IRRF menekankan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah daerah dan Provinsi. IREP dan IRRF berupaya memberikan kontribusi untuk strategi transisi BRR dengan melibatkan Pemda secara progresif dan pada akhirnya menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada mereka.

Proyek ini telah menggunakan rencana investasi daerah dan juga strategi IREP untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mungkin dilaksanakan. Memastikan kelestarian lingkungan dengan menyiapkan penilaian dampak lingkungan dan rencana manajemen yang berkaitan. Portfolio IRRF mencakup 57 sub proyek senilai (USD 227,4 juta), hingga saat ini 56 kontrak telah dibuat dengan jumlah total USD 218,2 juta, satu sub proyek (bernilai sekitar USD 9,2 juta) masih pada tahap tender.

c) Program Tsunami Recovery Waste Management Programme (TRWMP)

UNDP melalui pendanaan MDF melaksanakan program pengelolaan limbah tsunami (*Tsunami Recovery Waste Management Programme*). Proyek ini menyediakan respon yang terkoordinasi terhadap masalah kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan, dari limbah tsunami dan gempa bumi, serta limbah padat. Sebagian besar limbah bencana di daur ulang dengan potensi penggunaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Periode pelaksanaan dari September 2005-Desember 2010. Pada bulan September 2008, proyek ini telah berhasil mengangkut 20% limbah yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh, sehingga memungkinkan 1.400 keluarga dapat kembali bekerja di ladang dan tambak mereka serta mengurangi risiko lingkungan dan kesehatan. Dinas kebersihan di 8 (delapan) Kabupaten telah mendapatkan dukungan lebih lanjut melalui pembangunan/perbaikan TPA sementara. Dalam fase yang baru, Pemda akan mendukung untuk membangun TPA permanen.

Tantangan utama proyek ini adalah penyediaan lahan yang berkelanjutan dengan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengelolaan limbah, melalui dukungan yang kuat dari Pemda dan masyarakat. Diskusi-diskusi mengenai pembangunan lahan sedang dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

Tabel 3. 48

Beberapa realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur oleh MDF

Program MDF	Sub Bidang Infrastruktur	Kegiatan (per 30 September 2008)	Target	Pencapaian
Banda Aceh Flood Mitigation Project	Sumber daya air	Penurunan banjir langsung melalui klep banjir		11
		Sistem drainase yang dibangun kembali • Mesin pompa	3 rumah	Proses

Program MDF	Sub Bidang Infrastruktur	Kegiatan (per 30 September 2008)	Target	Pencapaian
		- Klep banjir - Drainase (pembangunan/perbaikan)	pompa Semua klep banjir pada zona 2 4.4 km/12.3 km	pengerjaan Selesai tender Proses pengerjaan
IRFF	Jalan dan jembatan Perhubungan Sumber daya air	Selesai :		8
		- Sistem Air - Jalan kabupaten		1 7/37 km
		Masih dalam pekerjaan :		48
		- Sistem air - Pelabuhan - Jalan - Jalan Provinsi - Jalan Kabupaten		11 5 8/266 km 9/317 km 15/153 km
TRWMP	Lingkungan hidup dan sumber daya alam	Masih dalam proses tender :		1
		Jalan kabupaten		1
		Sampah tsunami yang dibersihkan (m2)	1.000.000	1.132.863
		Sampah kota yang dikumpulkan (m2)	300.000	161.432
		Jumlah dan ukuran TPA sementara (Ha)	13 (24 Ha)	12 (25 Ha)
		Sawah/tambak yang direhabilitasi (Ha)	3000	891
		Gedung-gedung swasta dan pemerintah yang dihancurkan (unit)	500 10000	553 18.204/3.371
		Kayu limbah tsunami yang dikumpulkan dan diproses untuk daur ulang (,2)	5.000	235.000
		Kompos pertanian yang diproduksi (kg)	1.000.000	99
		Reruntuhan yang didaur ulang untuk pembangunan jalan (jarak km dari jalan)	50	400.000
		Total pekerjaan jangka pendek Rata-rata orang yang dipekerjakan per hari semenjak dimulainya proyek (jumlah hari kerja)/pekerja wanita/pengungsi internal (IDP) yang dipekerjakan (%)	1000 30%/25%	695 19%/14%
		Jumlah SME dengan daya tahan mata pencaharian yang dihasilkan dari sector pengelolaan limbah	200	120

Sumber : Laporan Kemajuan V MDF, Desember 2008.

III.3.3.2 Pemulihan Perekonomian

Peran Donor/NGO dalam rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada bidang perekonomian diantaranya, per Oktober 2008 tercatat sebesar total USD 452 juta, dengan alokasi komitmen terbesar pada pemulihan sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan sebesar USD 165 juta. Komitmen pada sektor pengembangan usaha sebesar USD 115 juta, sektor tenaga kerja USD 32 juta, sektor industri dan perdagangan USD 9 juta, sektor pariwisata dan budaya USD 1,9 juta (0,37 persen) dan sektor lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat sebesar USD 92 juta.

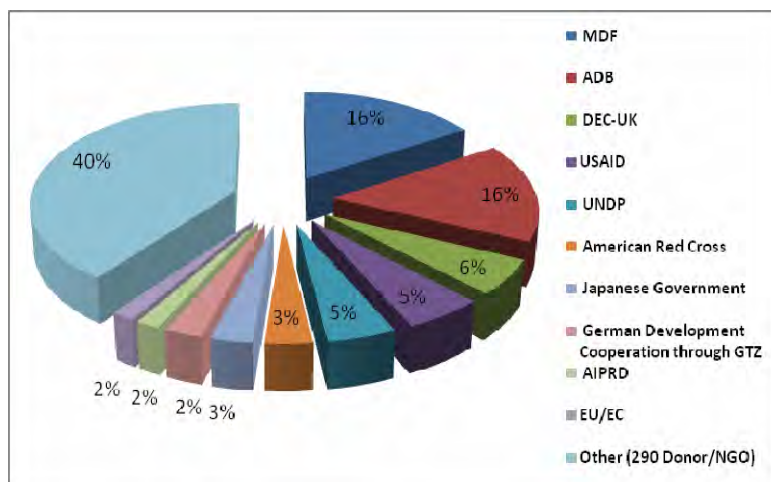
Berdasarkan RAN Database BRR, terdapat 325 Donor/NGO yang terlibat di dalam bidang perekonomian, dan komitmen terbesar diantaranya adalah MDF, ADB, DEC-UK, dan lain sebagainya. Komitmen rehabilitasi dan rekonstruksi Donor/NGO berdasarkan urutan 10 (sepuluh) terbesar pada bidang infrastruktur dan perumahan dapat dilihat pada tabel 3.49 dan diagram 3.15.

Tabel 3. 49
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Perekonomian

No	Funding Agency	Committed (USD)	Disbursed	
			(USD)	(%)
1	MDF (Multi Donor Fund)	91,445,771	19,353,345	21.16374
2	ADB (Asian Development Bank)	91,100,413	33,008,399	36.23299
3	DEC-UK(UK Disaster Emergency Committee)	32,602,819	31,793,078	97.51635
4	USAID (United States Agency for International Development)	32,007,070	27,293,405	85.27305
5	UNDP (United Nations Development Programme)	27,542,021	25,450,011	92.4043
6	American Red Cross	19,041,171	19,537,531	102.6068
7	Japanese Government	16,710,385	15,710,385	94.0157
8	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	15,067,247	13,650,132	90.59473
9	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	9,618,993	8,166,294	84.8976
10	EU/EC (European Union/European Commission)	9,496,710	7,696,710	81.04607
11	Other (290 Donor/NGO)	227,674,927	159,804,115	70.1896
	Total	572,307,527	361,463,405	63.15895

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008

Diagram 3. 15
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Perekonomian



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

Kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh Donor/NGO terfokus pada sub bidang perumahan, prasarana dasar lingkungan, serta tata ruang dan pertanahan. Realisasi kegiatan tersebut secara lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 3. 45.

Tabel 3. 50
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Perekonomian oleh Donor/NGO

No	Kegiatan	Komitmen	Realisasi *)	
			Volume	%
1	Jumlah Pupuk Tersedia (Kg)	10,111,102	8,763,111	87
2	Lahan Pertanian direhabilitasi (Hectares)	101,639	89,213	88
3	Area Kandang ternak direhabilitasi (Sq meters)	32,480	32,480	100
4	Area Pantai/coral direhabilitasi (Hectares)	2,797	2,404	86
5	Area tambak direhabilitasi (Hectares)	11,203	10,434	93

No	Kegiatan	Komitmen	Realisasi *)	
			Volume	%
6	Area hutan direhabilitasi (Hectares)	1,387,529	165,822	12
7	Area mangrove direhabilitasi (Hectares)	4,937	1,771	36
8	Area lahan perairan laut dilindungi dan didukung dengan peraturan (sq Km or region)	990	866	87
9	Perahu boat (unit)	1,274	1,274	100
10	Program Ketenagakerjaan (Jumlah penerima manfaat)	57,200	52,258	91
11	Peralatan disediakan (nilai USD)	21,084,007	16,196,542	77
12	Saluran irigasi diperbaiki (meter)	418,602	399,637	95
13	Tambak direhabilitasi (Km)	0	0	
14	Mikrofinance didirikan	340	228	67
15	Jumlah alat/mesin pertanian disediakan	11,704	11,683	100
16	Jumlah usaha didirikan	49,511	39,904	81
17	Jumlah organisasi pengembangan komunitas didirikan	3,540	3,030	86
18	Jumlah pengusaha menerima bantuan modal	47,826	16,027	34
19	Jumlah training dan pengembangan didirikan	36,070	7,447	21
20	Jumlah peralatan perikanan disediakan (Unit)	675	675	100
21	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) didirikan/direhabilitasi	18	13	72
22	Jumlah koperasi nelayan didirikan/dibantu	110	102	93
23	Jumlah jaring nelayan dibantu	3,862	3,534	92
24	Jumlah aparat pemerintah terlibat dalam pelatihan	1,525	546	36
25	Jumlah tambak/hatcheries direhabilitasi (Hectares)	727	727	100
26	Jumlah pabrik Es dibangun/direhabilitasi (unit)	11	11	100
27	Jumlah fasilitas industri disediakan (unit)	1,170	1,168	100
28	Jumlah hewan ternak disediakan	766,294	760,292	99
29	Jumlah pinjaman disediakan kepada pengusaha menengah (Pinjaman > IDR 50 Million)	1,300,131	1,300,125	100
30	Jumlah pinjaman diberikan kepada pengusaha kecil (Pinjaman < 5 million)	37,624	14,145	38
31	Jumlah pinjaman diberikan kepada pengusaha kecil (Pinjaman IDR 5-50 million)	1,015,571	1,014,690	100
32	Jumlah usaha kecil didirikan	89,211	66,080	74
33	Jumlah partisipan vocational training	97,975	74,312	76
34	Jumlah kemitraan didirikan	361	343	95
35	Jumlah orang dilayani	783,910	388,583	50
36	Jumlah pusat penelitian didirikan/dibantu	15	11	73
37	Jumlah peralatan pemrosesan ikan diberikan/dibantu	3,392	576	17
38	Jumlah laporan survey/penelitian	289	246	85
39	Jumlah pasar tradisional didirikan	91	73	80
40	Jumlah vocational training diberikan	10,697	3,778	35
41	Jumlah tenaga kerja untuk cash for work program	132,073	120,569	91
42	Jumlah bengkel didirikan	320	264	83
43	Kegiatan perikanan lainnya didirikan	1,592	1,568	98
44	Progress fisik (%)	10,009	7,275	73

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008. Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Aspek pemulihan (recovery) perekonomian masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias meliputi sektor primer (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan, koperasi dan UKM) serta aspek ketenagakerjaan. Program dan kegiatan yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari masyarakat dunia melalui sumbangan NGO dan Donor tercatat melalui RAN Database.

Adapun jika dilihat berdasarkan realisasi penyerapan anggaran, Hingga bulan Desember 2008, pada sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan telah terserap komitmen pendanaan sebesar USD 109 juta atau sebesar 66 persen dari keseluruhan total komitmen awal. Penyerapan komitmen pada sektor pengembangan usaha sebesar USD 79 juta (68,9 persen), sektor tenaga kerja USD 27 juta (86,9 persen), sektor industri dan perdagangan USD 7,2 juta (83

persen). Secara keseluruhan per Oktober 2008 penyerapan komitmen pendanaan untuk keseluruhan bidang pemulihan perekonomian adalah USD 279 juta dari komitmen awal keseluruhan sebesar 452 juta USD atau sebesar 61,6 persen.

Dari penjelasan secara umum di atas, berikut akan dibahas kontribusi beberapa Donor/NGO terkait dengan bidang Perekonomian yaitu oleh FAO dan JICS.

A. FAO

Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations melakukan rehabilitasi dan operasi tambak seluas 42 Ha yang berlokasi di Desa Lam Nga guna membantu masyarakat di wilayah pesisir sebagai mata pencaharian mereka serta memaksimalkan lapangan pekerjaan dan memberikan keuntungan sosial bagi guna menghindari konflik sosial serta keuntungan bagi Pemerintah Daerah.

Dengan dukungan teknis yang berasal dari BBAP Loka Ujung Batee, dan dukungan dana dari The Humanitarian Aid Department of The European Commission.

Oleh karena itu, rehabilitasi memerlukan anggaran yang sensitif untuk menanggapi berbagai masalah sosial.

B. JICS

Pembangunan tahap awal Pasar Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh dibantu oleh JICS dengan dana sebesar 31 miliar rupiah. Dan dari rencana pembangunan Pasar Aceh baru tercapai tercapai sepertiga sehingga untuk tahun 2009 Pemerintah Kota Banda Aceh masih membutuhkan dana sebesar 25 miliar rupiah

Gambar 3. 24
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Perdagangan oleh JICS



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Gambar 3. 23
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Perikanan oleh
FAO



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Untuk kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemko Banda Aceh pada tahun 2009 telah mengusulkan sebanyak 14 paket untuk pelaksanaan pada tahun 2009. Untuk pembangunan Pasar Aceh telah disetujui sebesar 15 Milyar rupiah namun masih belum mencukupi.

Diharapkan dari hasil pembangunan Pasar Aceh nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan bisnis dan perekonomian seperti eskalator, perparkiran dan prasarana lainnya.

III.3.3.3 Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan pihak Donor/NGO pada bidang pemulihan sosial kemasyarakatan ini sangat banyak. Beberapa sektor di dalam bidang pemulihan ini, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan agama menjadi perhatian dan bahkan prioritas kegiatan mereka dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana. Sebagai gambaran ringkas, Tabel 3. 51 di bawah ini dilakukan pemetaan berdasarkan empat sektor berikut;

Tabel 3. 51
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Sosial Kemasyarakatan oleh Donor/NGO

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	Persen
A	Pendidikan				
1	Block grant (Nilai dalam USD)	USD	453,528	329,496	73
2	Penerima manfaat/partisipasi pada pelatihan kejuruan	orang	50,654	29,381	58
3	Penyediaan buku-buku	eks	331,108	306,879	93
4	Penyediaan ruang kelas dengan furniture	kelas	782	697	89
5	Pembangunan pusat belajar komunitas	Unit	19	16	84
6	Sekolah dasar yang diperbaiki/dibangun	Unit	949	734	77
7	Sekolah menengah pertama yang diperbaiki/dibangun	Unit	168	92	55
8	Taman Kanak-kanak yang diperbaiki/dibangun	Unit	87	85	98
9	Jumlah orang yang dilayani	Orang	257,254	162,690	63
10	Beasiswa yang disediakan	Murid	21,975	18,823	86
11	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas sanitasi	Unit	3,356	1,324	39
12	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas air	Unit	253	51	20
13	Sekolah Menengah Umum yang diperbaiki/dibangun	Unit	136	74	54
14	Jumlah laporan survei/studi	Paket	1,114	944	85
15	Jumlah guru yang dilatih	Orang	36,257	29,394	81
16	Sekolah sementara yang dibangun	Unit	219	219	100
17	Transportasi yang disediakan	Unit	123	117	95
18	Universitas yang dibangun/diperbaiki	Unit	13	10	77
19	Kemajuan fisik (%)	-	8,301	7,497	90
20	Perlengkapan dan penyediaan sekolah (Nilai USD)	-	27,690,375	24,589,906	89
B	Kesehatan				
1	Aktifitas penilaian (angka)	kegiatan	70,246	62,661	89
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Lain-lain (Jumlah penerima manfaat)	orang	141,130	57,973	41
3	Perlengkapan dan peralatan-Non Kesehatan-Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai USD)	\$	2,641,787	2,640,737	100
4	Perlengkapan dan peralatan kesehatan-yang dapat dikonsumsi (Nilai USD)	\$	8,514,747	7,329,924	86
5	Perlengkapan dan peralatan kesehatan-yang tidak dapat dikonsumsi (Nilai USD)		10,860,101	9,104,025	84
6	Perlengkapan dan peralatan non kesehatan (Nilai USD)	unit	13,907,558	3,107,558	22
7	Perlengkapan dan peralatan lainnya (Nilai USD)	Unit	8,677,776	8,158,905	94
8	Jumlah peralatan kesehatan yang didistribusikan	Unit	450,084	420,084	93
9	Jumlah orang yang dilayani	Orang	9,645,370	6,212,159	64
10	Kemajuan fisik (%)		26,400	22,058	84
11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Klinik (Jumlah yang dibangun /diperbaiki))	Unit	16	14	88
12	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor Kesehatan Distrik (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	5	4	80
13	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Institusi Pendidikan (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	10	9	90

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	Persen
14	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat Pelatihan Kesehatan Distrik (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	3	3	100
15	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Laboratorium (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	2	2	100
16	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gudang Farmasi (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	3	3	100
17	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Posyandu (Jumlah yang dibangun/ diperbaiki)	Unit	281	157	56
18	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	31	24	77
19	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lainnya (Jumlah yang dibangun /diperbaiki)	Unit	442	387	88
20	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Polindes (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	393	321	82
21	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Puskesmas (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	139	104	75
22	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pustu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	217	175	81
23	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pos Kesehatan Satelit (Jumlah yang disediakan)	Unit	77	77	100
24	Program Diare (Jumlah penerima manfaat)	orang	240,541	130,541	54
25	Program Pengawasan Penyakit (Jumlah penerima manfaat)	Orang	37,677	37,667	100
26	Program EP (Jumlah penerima manfaat)	Orang	976,634	976,634	100
27	Program Malaria (Jumlah penerima manfaat)	Orang	3,491,315	1,365,207	39
28	Program Lainnya (Jumlah penerima manfaat)	Orang	10,484	10,469	100
29	Program TBC (Jumlah penerima manfaat)	Orang	4,673	4,673	100
30	Program Kesehatan Lingkungan Manajemen Pelayanan Kesehatan Limbah (Jumlah penerima manfaat)	Orang	273,876	90,985	33
31	Program Kesehatan Lingkungan Lainnya (Jumlah penerima manfaat)	Orang	178,413	176,102	99
32	Program Promosi Kesehatan (Jumlah penerima manfaat)	Orang	3,357,683	1,363,499	41
33	Program Anak dan Remaja (Jumlah penerima manfaat)	Orang	569,229	563,748	99
34	Program Kesehatan Reproduksi (Jumlah penerima manfaat)	Orang	43,770	40,849	93
35	Program Kesehatan Mental (Jumlah penerima manfaat)	Orang	261,738	62,441	24
36	Program Nutrisi (Jumlah penerima manfaat)	Orang	2,666,530	2,341,597	88
37	Program Kuratif Lainnya (Jumlah penerima manfaat)	Orang	202,968	163,500	81
38	Program Lainnya (Jumlah penerima manfaat)	Orang	322,154	321,243	100
39	Pelatihan Administrasi/Manajemen Pelayanan Kesehatan (Jumlah penerima manfaat)	Orang	394	346	88
40	Pelatihan Pelayanan CDC (Jumlah personel yang dilatih)	Orang	6,588	5,944	90
41	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Jumlah personel yang dilatih)	Orang	10,186	10,164	100
42	Pelatihan Promosi Kesehatan (Jumlah personel yang dilatih)	Orang	97,609	94,682	97
43	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Perawatan Ibu (Jumlah personel yang dilatih)	Orang	25,056	24,600	98
44	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Mental (Jumlah personel yang dilatih)	Orang	9,384	8,976	96
45	Pelatihan Pelayanan Nutrisi (Jumlah personel yang dilatih)	Orang	15,588	15,452	99

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	Persen
C	Agama				
1	Perlengkapan dan peralatan yang disediakan (Nilai USD)	unit	410,725	387,926	94
2	Jumlah gereja yang dibangun/diperbaiki	Unit	5	3	60
3	Pelajar dayah yang menerima pelatihan keterampilan hidup	Orang	750	750	100
4	Jumlah meunasah yang dibangun/diperbaiki	Unit	182	182	100
5	Jumlah mesjid yang dibangun/diperbaiki	Unit	95	94	99
6	Jumlah orang yang dilayani	Orang	15,652	15,652	100
7	Jumlah pesantren yang dibangun/diperbaiki	Unit	39	37	95
8	Jumlah laporan survey/kajian	Unit	300	300	100
9	Jumlah ustadz/pemimpin dayah yang dilatih	Orang	620	600	97
10	Jumlah kuil yang dibangun/diperbaiki	Unit	1	1	100
11	Kemajuan fisik (%)	persen	1,800	1,670	93
D	Sosial				
1	Perlengkapan dan peralatan yang disediakan (Nilai USD)	unit	13,722,089	13,586,800	99
2	Jumlah Pusat Sosial yang dibentuk/dibangun	Unit	452	450	100
3	Jumlah organisasi anak atau panti asuhan	Unit	3,571	2,902	81
4	Program Penerimaan Komunitas Psikososial Wanita Anak	Orang	278,001	237,034	85
5	Jumlah anak yang menerima bantuan penuh (makanan, pendidikan, dan program psikososial)	Anak	152,786	144,433	95
6	Jumlah anak yang kembali ke keluarganya	Keluarga	212	114	54
7	Pendirian grup diskusi komunitas awal	Unit	505,445	477,758	95
8	Balai desa yang dibangun kembali/ yang baru	Unit	452	369	82
9	Pertunjukan kebudayaan yang diadakan	Keg	4,222	4,200	99
10	Workshop/Pelatihan Kebudayaan	Keg	5,521	4,914	89
11	Asrama baru yang dibangun	Unit	97	90	93
12	Komunitas gabungan berdasarkan pusat pembangunan wanita	Kel	20	20	100
13	Jumlah museum, pustaka, dan fasilitas kebudayaan lainnya yang dibangun/diperbaiki	Unit	228	228	100
14	Jumlah orang yang dilayani	Orang	460,453	458,651	100
15	Jumlah orang yang dilatih (mis. Kepemimpinan komunitas, pendidikan perdamaian dan metodologi penelitian sosial)	Orang	45,057	20,042	44
16	Proposal yang diimplementasikan untuk memperingati tsunami	Paket	12	12	100
17	Taman bacaan umum yang dibangun	Unit	719	716	100
18	Fasilitas olahraga yang direhabilitasi	Unit	56	50	89
19	Pemberdayaan staf untuk proyek	Orang	548	548	100
20	Laporan untuk keperluan survey/kajian	Paket	2,625	2,547	97
21	Bantuan hukum untuk wanita	Orang	989	909	92
22	Pelatihan kapasitas bermata pencaharian untuk wanita	Orang	9,316	5,936	64
23	Pelatihan yang diterima oleh wanita	Orang	65,715	44,779	68
24	Kemajuan fisik (%)	Persen	2,100	1,791	85
25	Media cetak yang dipublikasi	Eks	969,107	714,106	74
26	Media cetak yang dipublikasi	Waktu	420	398	95

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008. Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Selain pemetaan berdasarkan empat sektor di atas, berikut ini ditampilkan komitmen beserta penyerapan pendanaan pada sepuluh donor/NGO terbesar yang terlibat dalam kegiatan di bidang pemulihan sosial kemasyarakatan.

Tabel 3. 52
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Sosial Kemasyarakatan

No	Funding Agency	Committed (USD)	Disbursed (USD)	
			USD	%
1	UNICEF (United Nations Children's Fund)	247,308,799	188,369,328	76
2	WFP (World Food Programme)	165,582,677	165,582,677	100
3	German Development Cooperation through KfW Development Bank (German Financial Cooperation)	87,485,517	59,338,952	68
4	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	64,593,240	59,171,882	92
5	CARE International	56,202,537	52,217,849	93
6	MDF (Multi Donor Fund)	53,390,064	22,886,627	43
7	USAID (United States Agency for International Development)	47,742,475	28,126,445	59
8	DEC-UK(UK Disaster Emergency Committee)	46,972,353	41,810,923	89
9	CRS (Catholic Relief Service)	38,714,678	22,318,269	58
10	ADB (Asian Development Bank)	34,599,033	4,496,344	13
11	Other (485 Donor/NGO)	697,131,103	575,279,250	83
	Total	1,539,722,476	1,219,598,546	79

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008

Untuk memudahkan dalam melihat gambaran konkret pemetaan komitmen 10 donor/NGO yang merupakan rangking teratas dapat dilihat pada diagram 3.16.

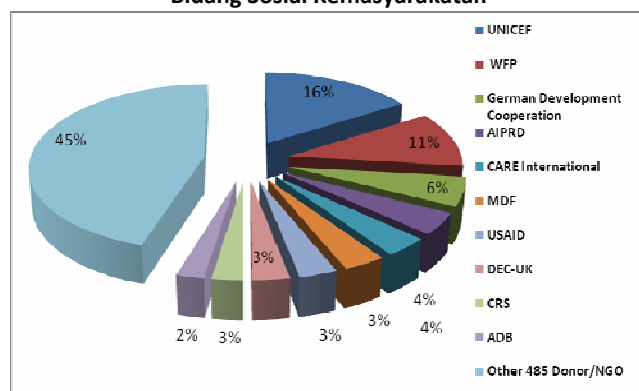
Berdasarkan hasil pemetaan diatas, berikut ini akan dijelaskan beberapa aktor dari Donor/NGO yang melakukan kegiatan pada bidang pemulihan sosial kemasyarakatan.

A. UNICEF

Salah satu badan dunia yang paling besar memberikan kontribusi untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan yaitu UNICEF. Badan dunia ini telah membulatkan tekadnya untuk membangun lebih dari 300 sekolah permanen baru yang anti-gempa dan bersifat ramah anak di tujuh daerah yang tertimpa bencana tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias, pulau di pinggir Sumatera Utara. Hingga saat ini sudah lebih dari 230 lokasi sekolah terseleksi atas kerjasama dengan masyarakat sekitar, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, dan pemerintah daerah tingkat provinsi. Ini merupakan bagian dari investasi senilai 90 juta dolar Amerika bagi sistem pendidikan di Aceh dan Sumatera Utara yang diharapkan dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam tiga tahun

Sebagai misal, UNICEF telah membangun SDN 075045 Somi Gido di Kecamatan Gido. Sekolah yang sudah diserahterimakan ini menambah capaian pembangunan sekolah UNICEF menjadi 14 dari 80 sekolah yang menjadi komitmen untuk dibangun oleh UNICEF di Kabupaten Nias. Sekolah-sekolah

Diagram 3. 16
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Sosial Kemasyarakatan



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

yang dibangun kembali oleh UNICEF merupakan sekolah ramah anak dengan tipe bangunan LGS (baja ringan). Bermanfaat kepada lebih kurang 500-an siswa, masing-masing sekolah dibangun dengan 6 ruang kelas, 1 ruang majelis guru, 1 ruang perpustakaan serta kamar kecil yang terpisah untuk murid laki-laki dan perempuan, yang masing-masing dilengkapi toilet dan wastafel. Guna meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar, sekolah ini juga dilengkapi dengan perangkat belajar mengajar seperti meja dan kursi murid serta meja guru sampai dengan perlengkapan olah raga seperti meja ping pong beserta peralatannya, bulu tangkis dan bola voli.

Gambar 3. 25
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Pendidikan oleh UNICEF



Rehabilitasi/Rekonstruksi Gedung Sekolah

Dok: www.unicef.org

Selain itu, UNICEF dan mitra kerjanya *International Development Law Organization* memulai suatu upaya perlindungan secara hukum bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya dalam tsunami. Mitra kerja UNICEF tersebut telah melatih para wali orang tua, pengasuh dan kepala desa untuk membantu melindungi anak-anak yang kehilangan orang tua dalam musibah tsunami di dalam wilayah tempat tinggal mereka.

Untuk mendukung ke arah itu, UNICEF bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, telah membuat draf qanun Perlindungan Anak. Dengan adanya qanun tersebut disahkan, maka anak-anak Aceh yang kehilangan orang tua yang dicintai mereka dalam tsunami dapat melanjutkan hidup mereka dengan penuh harapan, karena qanun tersebut menjamin hak-hak dasar mereka dilindungi oleh negara secara hukum.

C. Pemerintah Jerman

Pihak Pemerintah Jerman termasuk salah satu negara yang turun serta dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana di NAD dan Kepulauan Nias. Di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa instistusi yang tergabung dalam German Development Cooperation (GDC) yang berkolaborasi di dalam implementasi program rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias. Intitusi tersebut terdiri dari BGR, DED, CIM, GTZ, KfW dan InWEnt. Kontribusi Pemerintah Jerman terhadap bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan hanya difokuskan kepada dua sektor yaitu sektor pendidikan dan kesehatan.

Sebagai misal, pada sektor kesehatan tidak sebatas pada pembangunan fisik semata, namun juga dukungan dan bantuan pada aspek non fisik. Hal ini dapat dilihat pada bantuan KfW yang bekerja sama dengan Pemerintah Indoneisa melakukan pembangunan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin di Kota Banda Aceh. Nama proyek ini yaitu *Development Support to Dr. Zainoel Abidin Provincial Hospital*. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini yaitu selama 21 bulan. Di dalam pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin terbagi ke dalam lima paket yang dikerjakan oleh masing-masing kontraktor, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 3. 53
Paket Pembangunan RSUD Dr. Zaenol Abidin –Banda Aceh

Nama Paket	Kontraktor
Package 1: Site Preparation Works	PT Ayu Lestari Indah
Package 2: Substructure Works	PT Frankipile Indonesia
Package 3: Building Works	PT Pembangunan Perumahan (PP)
Package 4: Technical Services	PT Karya Intertek Kencana
Package 5: External Works	(Tidak Ada Data)

Sumber: Hasil kunjungan Lapangan Sekretariat P3B, Oktober 2008

Dari hasil kunjungan Tim Sekretariat P3B Bappenas diperoleh data dan informasi bahwa pembangunan RSUD Zaenol Abidin yang dibiayai oleh KfW Jerman ini mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya karena ada hambatan pembebasan lahan/tanah. Untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan ini berupa pembebasan lahan menelan waktu hingga 1,5 tahun. Di samping itu, terdapat pembagian peran dalam pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini yaitu pihak KFW Jerman yang membangun rumah sakit secara fisik dan instalasi. Sedangkan Pemda yang menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk mengelola rumah sakit tersebut.

Gambar 3. 26
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Kesehatan oleh KfW Jerman



Pembangunan Rumah Sakit Zainal Abidin oleh KFW Jerman
di Kota Banda Aceh

Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Sedangkan di sektor pendidikan, Pemerintah Jerman telah menyerahkan dan sekaligus meresmikan gedung SMA Negeri 1 Teluk Dalam dan SMA Negeri 1 Gomo kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Oktober 2008. Bantuan Pemerintah Federasi Jerman berupa bantuan fisik dan nonfisik. Bantuan fisik berupa bangunan gedung sekolah dan bantuan nonfisik berupa pelatihan kepada para guru, baik di dalam maupun di luar negeri.

Termasuk yang memperoleh dana bantuan yaitu SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, Kabupaten Nias dari KFW Jerman senilai 7 juta Euro. Peletakan batu pertama rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007. Bantuan pembangunan gedung dari pemerintah Jerman disambut gembira karena adanya pembangunan untuk mengganti bangunan yang telah hancur total. Gedung yang mewah ini dilengkapi dengan fasilitas seperti mesin genset, mobiler, laboratorium, komputer dan perpustakaan yang mendukung proses belajar mengajar.

Gambar 3. 27
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Pendidikan oleh KFW Jerman



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

D. AusAID

Pihak AusAID mengembangkan Program Rehabilitasi Aceh sejak Januari 2005 sebagai program rekonstruksi jangka menengah. AusAID mengembangkan berbagai program, antara lain di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dimana mereka memiliki kepercayaan diri.

Diperkirakan hingga saat ini lebih dari 80.000 anak telah memperoleh manfaat dari bantuan Australia bagi sektor pendidikan. Pada awalnya, perhatian difokuskan pada pembangunan kembali bangunan-bangunan sekolah, pusat pelatihan guru di universitas lokal dan dua dinas pendidikan. AusAID kemudian fokus pada penguatan administrasi dan penyediaan pelayanan pendidikan yang merevitalisasi program pengelolaan berbasis sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah terus menawarkan program pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah yang didasarkan pada manual-manual yang dibuat dengan bantuan AusAID. Perguruan tinggi daerah menerima bantuan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kurikulum pelatihan guru. Lebih dari 900 guru akan mendapatkan manfaat dari berbagai peningkatan ini setiap tahunnya. Di beberapa daerah dimana standar dan kualitas pendidikan telah terdampak oleh konflik separatisme selama beberapa dekade, AusAID menyatukan kembali masyarakat yang telah terpecah-pecah melalui isu tentang pendidikan. Pendekatan ini telah meningkatkan jumlah kehadiran siswa dan guru, serta ikatan desa yang lebih erat dan pembuatan keputusan yang lebih inklusif. Program ini telah menghasilkan lingkungan desa yang lebih stabil dan damai. Bantuan ini akan terus berlangsung selama 2009. Australia juga bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi-posisi pembuatan keputusan dalam komite sekolah. Hasilnya sangat mengagumkan, jumlah perwakilan perempuan di sebagian besar komite sekolah meningkat sebesar hampir 40 persen. Berbagai studi telah menunjukkan

Pencapaian pada sektor pendidikan

- peningkatan pengelolaan sekolah dan aset dengan merenovasi 84 sekolah melalui bantuan-bantuan kecil dan pelatihan untuk 101 sekolah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mengelola anggaran dan sumber daya
- menyelesaikan rekonstruksi 13 sekolah dan tiga fasilitas administrasi pendidikan
- menyerahkan 11.000 buku bagi perpustakaan-perpustakaan sekolah
- membantu pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi NAD
- meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran melalui pengembangan profesionalisme 1750 guru
- mengembangkan bahan-bahan pelatihan bagi tiga lembaga pelatihan pra jabatan guru sekolah dasar
- menyediakan pelatihan dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi 231 anggota staf perempuan di sekolah-sekolah Islam.

bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial berhasil mengurangi konflik dan meningkatkan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Australia merespon dengan cepat kebutuhan di sektor kesehatan dengan memperbaiki unit gawat darurat Rumah Sakit Zainoel Abidin—rumah sakit terbesar di Aceh. Fasilitas ini sekarang sudah sepenuhnya pulih dan merawat lebih dari 1.000 pasien setiap bulannya. Pelayanan kesehatan

Pencapaian pada sektor kesehatan

- memulihkan unit gawat darurat di Rumah Sakit Zainoel Abidin
- menata kembali sistem administrasi di Rumah Sakit Zainoel Abidin
- mendirikan laboratorium kesehatan di Universitas Syiah Kuala dan Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk melatih para profesional kesehatan di masa yang akan datang
- meningkatkan proses pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi
- meningkatkan kualitas empat klinik kesehatan dan merekonstruksi akademi kebidanan
- merekonstruksi dua gudang farmasi dan membangun kembali rantai pasokan obat-obatan
- Kemitraan Australia Indonesia Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan
- merenovasi bangunan dan laboratorium di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banda Aceh
 - memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi lebih dari 230 staf rumah sakit
 - menyerahkan lebih dari 3.700 beasiswa bagi siswa-siswi keperawatan, bidan dan kedokteran.

terus ditingkatkan melalui pelatihan bagi para pekerja kesehatan. Pengelolaan pelayanan kesehatan provinsi diperkuat melalui bantuan terarah dalam perencanaan dan anggaran departemen. Dengan bantuan Australia, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh diperbaharui dan rencana strategis pertama dan rencana aksi kesehatan Aceh sedang dijalankan. Salah satu sumbangan terpenting Australia selama 2007 adalah pembangunan fasilitas untuk melatih dan menciptakan para profesional di bidang kesehatan di masa yang akan datang di Aceh. Para mahasiswa diploma jurusan kesehatan sekarang dapat belajar

bagaimana menggunakan berbagai teknik dan peralatan yang paling modern di Indonesia di laboratorium yang dibangun di Universitas Syiah Kuala. Laboratorium itu akan melatih sekitar 1000 mahasiswa setiap tahunnya, dengan jumlah lulusan sekitar 200 setiap tahunnya. Mahasiswa pasca sarjana akan mempelajari kasus-kasus kehidupan nyata di Universitas Syiah Kuala. Selain itu, Australia juga mendukung renovasi laboratorium lingkungan dan mikrobiologi, laboratorium gizi, dan bangunan administrasi utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Banda Aceh.

E. CIDA

Pemerintah Kanda memiliki komitmen untuk memberikan 425 juta dollar Canada dalam mendukung upaya kemanusiaan secara komprehensif hingga 2009. Dari jumlah dana ini, lebih dari 200 juta dollar Canada telah dialokasikan untuk Indonesia sebagai negara yang paling parah yang mengalami kerusakan dibanding negara lainnya yang mengalami bencana tsunami. Dana ini untuk mendukung upaya program bantuan darurat yang disalurkan pasca bencana. Selain itu, dana tersebut untuk mendukung rekonstruksi selama lima tahun yang difokuskan pada sektor perumahan dan infrastruktur, mata pencaharian berkelanjutan dan tata pemerintahan.

Sebagai gambaran saja, beberapa capaian rekonstruksi yang terkait dengan bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, antara lain; proyek “Penguatan Hak-hak Perempuan” yang bertujuan untuk melakukan pengarusutamaan permasalahan jender dalam pembuatan regulasi pemerintah provinsi. Untuk melaksanakan proyek ini CIDA mengalokasikan dana sebesar 1,2 juta dollar Canada. Selain itu, dilakukan proyek “Pemerataan Sosial IAIN” oleh Universitas McGill yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Ar Raniry sebagai universitas Islam negeri di Aceh. Pada proyek ini, CIDA menyalurkan dana sebesar 2,9 juta dollar Canada.

F. Children On The Edge

Salah satu kontribusi kalangan NGO untuk sektor peran perempuan dan perlindungan anak yaitu Children On The Edge. Lembaga ini melakukan pembangunan Pusat Kegiatan Anak dan Masyarakat di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Gambar 3. 28 di bawah ini menunjukkan hasil dan kegiatan di lokasi tersebut.

Gambar 3. 28
Beberapa Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Bidang Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak oleh Children On The Edge



Pembangunan Pusat Kegiatan Anak dan Masyarakat
 di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Oktober 2008

Fasilitas *community center* tersebut merupakan kontribusi Children on the Edge (COTE), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan Anita Roddick, yang notabene adalah *pemilik The Body Shop Internasional*, pada 1990. Pusat kegiatan masyarakat ini terdiri dari *playgroup*, taman kanak-kanan (TK), pusat kegiatan remaja dan kaum ibu, serta balai pertemuan warga, yang dipakai untuk lokasi pemulihan bagi anak-anak dan masyarakat Aceh yang terkena bencana tsunami. Disini anak-anak dapat bermain sekaligus belajar agar kehidupan mereka kembali normal.

COTE mendedikasikan fasilitas tersebut kepada masyarakat Neuheun, termasuk di antaranya pengungsi dan anak yatim piatu. Tercatat sekitar 1.500 pengungsi berasal dari Alue Naga (411 jiwa), Neuheun (645 jiwa) dan Ulee Kareng/TVRI (615 jiwa) dan 100 anak yatim piatu. Untuk biaya operasionalnya didukung sepenuhnya oleh *The Body Shop Indonesia*. Di kompleks *Community Centre* itu, tidak hanya disediakan pendidikan pra sekolah, namun juga memberikan anak-anak tempat yang aman untuk bermain dan berinteraksi sekaligus membentuk dukungan dari para pengasuh dan anggota masyarakat lainnya.

III.3.3.4 Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Tahun 2008 yang merupakan tahun terakhir bagi BRR NAD-Nias dalam mewujudkan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias menjadi lebih baik. Hal ini terlepas dari peran berbagai Lembaga Donor/NGO dalam berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terutama di bidang kelembagaan. Walaupun BRR akan berakhir pada 16 April 2009, namun beberapa kegiatan yang didanai oleh donor dari berbagai negara masih terus melanjutkan implementasi komitmen dari programnya. Beberapa *funding agency* yang masih melaksanakan programnya hingga 2012 natinya. Pada Tabel 3. 54 ditampilkan 10 besar Donor/NGO yang aktif berkomitmen dalam bidang kelembagaan dan hukum.

Tabel 3. 54
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar
Bidang Kelembagaan dan Hukum

No	Funding Agency	Committed (USD)	Disbursed (USD)	
			USD	%
1	WB (World Bank)	50,882,521	50,783,206	100
2	MDF (Multi Donor Fund)	39,059,714	30,525,243	78
3	ADB (Asian Development Bank)	26,903,474	10,521,270	39
4	Japanese Government	26,119,091	25,519,091	98
5	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	25,964,323	18,887,315	73
6	UNICEF (United Nations Children's Fund)	23,168,837	18,308,666	79
7	USAID (United States Agency for International Development)	22,825,289	22,549,091	99
8	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	16,563,409	14,736,347	89
9	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	15,655,295	8,318,781	53
10	UNDP (United Nations Development Programme)	10,721,485	8,724,352	81
11	Other (142 Donor/NGO)	90,586,354	71,743,185	79
	Total	348,449,792	280,616,547	81

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008

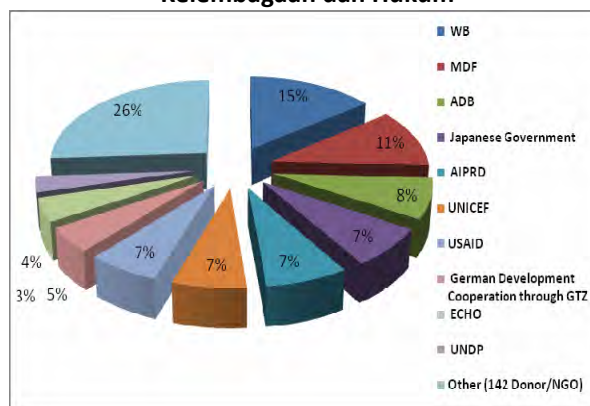
Dari tabel diatas tergambar dengan jelas jumlah total komitmen dari beberapa funding agency yang concern terhadap bidang pemulihan kelembagaan dan hukum yaitu sejumlah USD 348,4 juta dan hingga akhir tahun 2008 secara total telah ter disburse sebesar USD 280,6 juta dengan perkiraan 81% dari jumlah komitmen. Berikut akan dijelaskan beberapa funding agency, yang berperan besar dibidang ini, seperti:

- Lembaga World Bank (WB) yang telah berkomitmen sebesar USD 50,8 juta yang diperuntukkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum, komitmen ini diimplementasikan WB melalui lembaga/NGO lokal dan nasional diseluruh Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Hingga akhir Desember 2008 komitmen tersebut telah berhasil di *disburse* sebesar USD 50,7 juta. Angka ini hampir mencapai 100% dari keseluruhan program/kegiatan yang direncanakan.
- Multi Donor Fun (MDF) merupakan funding agency terbesar dalam mensupport kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. MDF merupakan kumpulan berbagai negara donor dari negara-negara di Uni Eropa yang berkomitmen terhadap pembangunan kembali bidang kelembagaan dan hukum di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Nilai komitmen MDF untuk bidang ini sebesar USD 39 juta, ini difokuskan pada peningkatan kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan dan penegakan hukum dalam berbagai bidang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari RAN Database BRR Aceh-Nias, bahwa komitmen tersebut hingga akhir Desember 2008 telah terdisburse sebanyak 78 dari nilai komitmen, yaitu sekitar USD 30,5 juta.
- Sedangkan di peringkat tiga besar funding agency yang fokus di bidang ini adalah ADB (Asian Development Bank) yang berkomitmen sebesar USD 26,9 juta, namun hingga akhir Desember 2008 baru ter serap sebesar 39% dari nilai komitmen yaitu USD 10,5 juta. Diantara program ADB yang di kenal lazim di masyarakat Aceh dan Nias yaitu program ETSP yang mensupport berbagai bidang pemulihan, diantaranya kelembagaan dan hukum. Mulai peringkat empat hingga 10 diisi oleh Pemerintah Jepang dengan komitmen sebesar USD 26,1 juta, AIPRD sejumlah USD 25,9 juta. Untuk peringkat 6 hingga sepuluh diisi oleh UNICEF, USAID, GTZ, ECHO dan UNDP. Dan masih terdapat sekitar 142 funding agency lainnya yang fokus dalam bidang ini

Adapun porsi yang digambarkan dalam persentasi dari masing-masing funding agency tersebut dapat dilihat pada Diagram 3.17 berikut, dimana berdasarkan hasil analisis Tim Sekretariat P3B Bappenas menunjukkan bahwa WB memiliki angka persentase yang tinggi yaitu sebesar 15% dari total keseluruhan, sedangkan untuk peringkat berikutnya diikuti oleh MDF 11%, dan ADB 8%. Pemerintah Jepang, AIPRD, UNICEF dan USAID masing-masing sebesar 7%. GTZ 5%, ECHO 4% dan UNDP 3%. Sedangkan sekitar 142 funding agency lainnya sebesar 26 %.

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai donor/NGO diatas termasuk jumlah komitmen untuk setiap program yang dilaksanakan serta jumlah realisasi hingga akhir tahun 2008 dapat dijelaskan oleh tabel berikut:

Diagram 3. 17
Komitmen 10 Donor/NGO Terbesar Bidang
Kelembagaan dan Hukum



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

Tabel 3. 55
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Kelembagaan dan Hukum oleh Donor/NGO

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	%
1	Penyediaan Perlengkapan dan Perbekalan untuk pemerintahan (dalam Dollar AS)	paket	1,870,109,497	1,865,861,185	100
2	Training terhadap peserta dari komunitas dan NGO	orang	870	792	91
3	Penilaian/ kajian/ penelitian terhadap lembaga institusional	paket	28,981	28,496	98
4	Peningkatan Kapasitasi dari berbagai perwakilan masyarakat melalui (seminar/workshop/training/mentoring/consulting/training dan pendidikan)	paket	6,972	5,916	85
5	Peningkatan kapasitas melalui (seminar/workshop/training/technical assistance/consulting/training/pendidikan) terhadap aturan pemerintah	paket	5,462	1,219	22
6	Pelatihan terhadap pegawai negeri sipil melalui kursus penilaian dan penguatan kapasitas	orang	8,365	5,970	71
7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti training	orang	20,683	19,355	94
8	Penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan	paket	473,288	472,572	100
9	Penyediaan tenaga ahli	orang	217	212	98
10	Perekrutan fasilitator untuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	orang	9,354	8,171	87
11	Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintahan	unit	252	52	21
12	Pembahasan tentang hukum dan reformasi terhadap tatanan hukum	Paket	17	15	88
13	Pemantauan terhadap pengembangan tatanan	paket	1,706	634	37

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	%
	untuk meyakinkan pelaksanaan yang telah sesuai dengan petunjuk dan standar				
14	Staff pemerintah yang menerima peningkatan kapasitas	orang	1,661	1,597	96
15	Jumlah organisasi (CSO/CBO/NGO) yang menerima penguatan kapasitas	orang	2,888	1,492	52
16	Penduduk yang telah terlayani dengan baik	orang	4,031,012	3,670,233	91
17	Mendirikan stasiun radio	unit	64	20	31
18	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ diseminasi/ publikaasi	paket	1,103	861	78

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, Desember 2008

Tabel 3. 55 diatas menunjukkan beragam program/kegiatan yang komit dilaksanakan oleh berbagai donor/NGO di bidang kelembagaan dan hukum. Termasuk dalam mendukung peningkatan pelayanan dari aparaturnya pemerintahan. Perkembangan komitmen dan realisasi dari program/kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas dari berbagai perwakilan masyarakat melalui (seminar/workshop/training/mentoring/consulting/training dan pendidikan), sebanyak 6,972 komitmen paket kegiatan yang akan dilaksanakan di Aceh dan Nias. Program ini bertujuan meningkatkan kembali kapasitas dari berbagai elemen masyarakat. Dan hingga akhir tahun 2008 sebanyak 85% yaitu 5,916 telah dilaksanakan dengan baik. Demikian juga dengan peningkatan kapasitas terhadap pemahaman berbagai aturan pemerintah, ini dirasakan penting oleh beberapa lembaga donor/NGO dengan melaksanakan sejumlah 5,462 paket kegiatan yang beraneka ragam tujuan dan manfaat. Ini terbukti minat masyarakat sangat tinggi, karena pada desember 2008 program ini telah berjalan hingga 1,219 paket, yaitu sekitar 22 %. Dan program ini akan terus berlanjut secara bertahap
- Disamping itu ada juga lembaga yang fokus dalam mendukung terhadap Penyediaan Perlengkapan dan Perbekalan untuk pemerintahan untuk berbagai kabupaten/kota di Aceh dan Nias. Kegiatan ini telah mencapai status 100% dalam realisasinya, yaitu dari USD 1,870,109,497 telah terealisasi hingga akhir tahun 2008 sebesar USD 1,865,861,185. Ini merupakan angka yang besar dalam sejarah provinsi Aceh maupun Sumut dalam perolehan dukungan untuk equipment pemerintahan. Disamping itu beberapa lembaga donor/NGO juga melaksanakan Training terhadap peserta dari komunitas dan NGO baik ditingkat local maupun nasional, pelatihan dan sharing informasi ini telah terlaksana dengan baik, dari 870 orang yang diberikan training selama tahun 2007-2008, hingga akhir desember 2008, sebanyak 792 orang atau sekitar 91% orang telah menerima training dengan baik dan siap mengimplementasikannya di lapangan. Kegiatan lain terhadap Penilaian/kajian/penelitian terhadap lembaga institusional juga telah terselenggara dengan baik ditingkat provinsi maupun kab/kota. Selama tahun 2007-2008 kegiatan ini telah terlaksana sebanyak 98% dari nilai komitmen 28,981 paket, telah terealisasi sebanyak 28,496 paket.
- Disamping kegiatan-kegiatan di atas, kegiatan seperti: Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintahan; Pembahasan tentang hukum dan reformasi terhadap tatanan hukum; Pemantauan terhadap pengembangan tatanan untuk meyakinkan pelaksanaan yang telah sesuai dengan petunjuk dan standar; Jumlah organisasi (CSO/CBO/NGO) yang menerima penguatan kapasitas; Mendirikan stasiun radio; dan Staff pemerintah yang menerima peningkatan kapasitas juga merupakan kegiatan-kegiatan penting di bidang kelembagaan dan hukum. Sehingga pada akhir tahun 2008 dari keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut, penduduk yang telah terlayani dengan baik oleh karena perubahan system pemerintah dan aparaturnya yang baik, menyebabkan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat, ini ditunjukkan bahwa dari 4 juta penduduk yang ditargetkan selama tahun 2007-2008 dapat menerima

pelayanan yang baik dari instansi pemerintah, maka hingga akhir desember 2008 telah mencapai 3,6 juta penduduk atau sekitar 91% penduduk telah terlayani dengan baik.

Berikut, sekilas beberapa profile dari Lembaga Donor/NGO dan kegiatan dilakukan di Aceh dan Nias di bidang kelembagaan, diantaranya:

A. WORLD BANK

Kelompok Bank Dunia bertujuan untuk membantu Indonesia menyelesaikan transisi kelembagaannya. Sampai saat ini, proses tersebut telah menghasilkan sejumlah prestasi besar. Desentralisasi telah membuat pemerintah daerah semakin berperan dalam penyampaian layanan. Pemerintah telah memperkuat sejumlah lembaga antikorupsi dan terus mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah juga mencari cara untuk menjadi pengelola keuangan publik yang lebih baik dan lebih bersih. Ada dorongan besar untuk menyelenggarakan negara dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Saat ini, Kelompok Bank Dunia berusaha menyamai dorongan ini dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan melakukan hal tersebut, Kelompok Bank Dunia akan terlibat dengan lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk berubah, mengidentifikasi pelaku reformasi yang berkomitmen, dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk mewujudkan visi perubahan mereka.

B. MULTI DONOR FUND (MDF)

Multi Donor Fund dibentuk sebagai tanggapan terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi setelah peristiwa bencana tsunami dan gempa bumi. BRR didirikan untuk mengkoordinasikan upaya rekonstruksi Pemerintah Indonesia senilai USD 7 milyar. Dengan telah selesainya mandat yang ditugaskan, BRR akan tutup pada bulan April 2009. Kemitraan yang erat telah terbina antara MDF dan BRR berdasarkan saling menghargai, tujuan bersama dan pemahaman tentang kompleksitas rekonstruksi dan wilayah kerjanya. Kemitraan ini merupakan aset strategis dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Dengan adanya BRR dalam pucuk pimpinan MDF, maka BRR dapat mengendalikan arah dalam memprioritaskan penggunaan dana MDF secara strategis dan efektif agar mengisi kebutuhan-kebutuhan dan kesenjangan penting.

MDF didukung oleh mitra pemerintah, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) dalam pelaksanaannya. Kebijakan Bantuan Pemulihan MDF berfungsi sebagai kerangka kerja untuk operasional MDF, di mana Sekretariat mengkoordinasikan dan melaporkan kinerja operasional dari portofolio. Proses persetujuan di MDF memastikan bahwa portofolio sejalan dengan prioritas pemerintah untuk rekonstruksi.

Untuk menjamin keberlanjutan program, di tahun 2008 MDF memprioritaskan upayanya pada dua bidang: (1) mendukung transisi dari BRR ke pemerintah daerah, dan (2) meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang di Aceh dan Nias.

Multi Donor Fund telah mengalokasikan USD 62 juta untuk mendukung penguatan tata kelola. Dukungan disediakan untuk memperkuat kelembagaan pemerintah lokal dalam berbagai sektor untuk menjamin transisi yang lancar untuk melaksanakan proyek-proyek rekonstruksi yang tengah berlangsung dan penyerahan aset-aset dari BRR ke badan pemerintah yang relevan. Proses partisipatif dan akuntabilitas dipromosikan dalam proyek-proyek MDF terutama dalam sektor Pemulihan Masyarakat. Proyek Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil mendorong keikutsertaan masyarakat sipil yang lebih luas, termasuk perempuan, dalam proses tata kelola.

Untuk memastikan keberlangsungan investasi rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias maka penting untuk adanya elemen administrasi umum yang kokoh. Multi Donor Fund telah mengalokasikan US\$75 juta untuk mendukung penguatan tata kelola.

Berdasarkan Laporan 4 Tahun MDF di Aceh-Nias, bahwa penguatan Lembaga-lembaga pemerintah daerah telah terjadi di berbagai sektor. Proyek-proyek Multi Donor Fund hingga kini

telah memberikan pelatihan formal, diikuti dengan pelatihan kerja kepada 2.000 staf lokal untuk meningkatkan kapasitas di bidang-bidang seperti perencanaan dan anggaran, kesehatan, pendidikan, konstruksi infrastruktur, pengelolaan limbah dan drainase, pengelolaan hutan, perencanaan tata kota dan administrasi pertanahan. Selanjutnya diadakan pelatihan informal di lokasi kerja melalui proyek Bantuan Teknis untuk BRR dengan menempatkan ahli teknis di kantor wilayah BRR dan di Proyek Pengelolaan Limbah atau konsultan wilayah BRR yang secara langsung mendukung satuan kerja dalam pekerjaannya. Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal telah berhasil mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kapasitasnya dengan metode berbasis sumber daya lokal. Kegiatan pelatihan dalam pengelolaan kontrak, konstruksi jalan dan teknis pengawasan konstruksi diberikan secara terus-menerus kepada insinyur dan pengawas dari pemerintah kabupaten yang berkaitan.

C. AIPRD

Di Aceh dan Nias, Pemerintah Australia menyumbangkan lebih USD 250 juta dalam bentuk bantuan tanggap darurat dan rekonstruksi, termasuk sumbangan yang signifikan dalam bentuk paket bantuan sebesar USD 1 miliar bagi Indonesia yang dikenal sebagai Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD). Bantuan ini telah mendukung pemulihan masyarakat dalam berbagai cara, termasuk rekonstruksi infrastruktur publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan pelabuhan di Banda Aceh. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia difokuskan pada konsolidasi investasi untuk rekonstruksi fisik dengan membantu masyarakat Aceh mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan agar berbagai perbaikan di sektor-sektor ini terus berkelanjutan.

Kemitraan Australia dengan Indonesia menjadi titik awal bagi pelaksanaan upaya-upaya AusAID di Aceh. AIPRD membuat sebuah perjanjian baru demi kemitraan pembangunan yang lebih erat antara Pemerintah Australia dan Indonesia. AIPRD memformalkan komitmen pemerintah-ke-pemerintah bagi kemitraan pada tingkat yang paling tinggi. AusAID mengambil pendekatan yang pragmatis untuk mengembangkan seperangkat program yang secara keseluruhan dipadukan menjadi Program Rehabilitasi Aceh. Agar efektif, program-program yang diperlukan untuk merespon lingkungan yang berubah tersebut mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat berfungsi dengan baik dan tetap fleksibel. Kemitraan resmi antara pemerintah Australia dan Indonesia memastikan bahwa AusAID meminta keterlibatan Indonesia sejak awal dan berkesinambungan dalam mengembangkan dan menyediakan program rekonstruksi. Program-program yang dijalankan melalui sistem-sistem yang ada, yang dalam prosesnya membangun kembali dan memperkuat program tersebut. Apabila memungkinkan, tim-tim AusAID ditempatkan di kantor-kantor pemerintahan daerah.

Tsunami dan konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun telah benar-benar mengurangi kemampuan Pemerintah NAD untuk merespon kebutuhan masyarakat dan menyediakan pelayanan. Tsunami dan konflik tersebut juga telah melemahkan hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Banyak pemimpin pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan dan lebih dari 5.000 pejabat publik tewas dalam bencana tsunami tersebut. Peralatan dan kertas kerja tersapu, bangunan kantor pemerintahan hancur dan penyedia layanan benar-benar lumpuh total. Akibatnya respon tersebut membutuhkan tidak hanya rekonstruksi bangunan tapi juga pelatihan bagi para pegawai yang baru diangkat. Adapun dukungan AIPRD untuk Tata Pemerintahan selama tahun 2005 hingga 2008 seperti pada Tabel 3. 56.

Ringkasan pencapaian dari kegiatan AIPRD dalam Tata Pemerintahan adalah:

- Menyediakan pelatihan khusus bagi lebih dari 700 petugas pemerintahan daerah mengenai kepemimpinan, perencanaan, pembuatan anggaran, penyelesaian konflik dan transparansi

- Menerapkan model penyediaan layanan 'layanan satu pintu untuk merampingkan penyediaan layanan publik di 51 pemerintahan kecamatan dan sekarang sedang dicoba diterapkan di seluruh NAD.
- Membangun tujuh kantor kecamatan.
- Memfasilitasi pemilihan kepala dan dewan desa secara demokratis di 270 desa (dua kepala desa perempuan terpilih untuk pertama kalinya di Aceh)
- Melatih 2300 orang sebagai pemimpin masyarakat (lebih dari setengahnya perempuan) di 204 desa.

Tabel 3. 56

Komimen Pemerintah Australia untuk Rekonstruksi Tata Pemerintahan

Tata Pemerintahan	
Komitmen 2005-2008	USD 47,9 Juta
Perkiraan Pengeluaran hingga Juni 2008	USD 42,7 juta

Sumber : Laporan Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan : Pemulihan Pasca Bencana di Aceh dan Nias (2005-2008)



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Okt 2008

Bab IV

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008

Bab IV

Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007-2008

Program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun dalam rangka upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi. Pelaku utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang, adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Sejalan dengan upaya pemulihan tersebut, diperlukan upaya koreksi secara menerus terhadap berbagai kebijakan, strategi dan sasaran program yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat darurat.

Maka dari itu, dengan memperhatikan kondisi wilayah, tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah bencana maupun wilayah sekitarnya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan beberapa terobosan (*breakthrough*) dalam hal pengaturan maupun pengelolaan. Penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi rencana induk dilakukan demi percepatan dan ketepatan dalam mengatasi berbagai hambatan administrasi dan birokrasi.

Bab IV merupakan bab yang sangat esensial dari laporan ini yang berupaya mengevaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias yaitu dengan mengukur dan menilai secara objektif terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan metode evaluasi yang lazim digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Sedangkan fokus evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi ini ditujukan pada lima (5)

PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA (LAMPIRAN I-A)

Penyesuaian kebijakan dan strategi dalam buku Lampiran baru ini, 3 (tiga) buku Lampiran Perpres Nomor 30 Tahun 2005 yaitu Lampiran I Buku Utama, Lampiran Buku II tentang Tata Ruang dan Pertanahan, serta Lampiran Buku III tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, disesuaikan dalam **Lampiran IA Kebijakan dan Strategi Utama**. Demi kemudahan pengelolaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, 7 (tujuh) bidang kerja yang diuraikan dalam Lampiran Rencana Induk kemudian disesuaikan menjadi 5 (lima) bidang dalam **Lampiran IB Kebijakan dan Strategi Bidang Pemulihan**, yaitu:

- Lampiran Buku IV Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perumahan dan Infrastruktur dipisahkan menjadi 2 (dua) bidang, maka kebijakan dan strategi bidang pertama dalam penyesuaian sebagian rencana induk ini adalah **bidang perumahan dan permukiman**;
- Sebagaimana disebutkan di atas, maka penyesuaian bidang kedua adalah **bidang infrastruktur**;
- Lampiran Buku V Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Ekonomi dan Tenaga Kerja kemudian disesuaikan dalam **bidang Perekonomian**;

Sumber: Perpres Nomor 47 Tahun 2008

aspek yang meliputi; konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Disamping lima aspek tersebut, juga mengkaji manfaat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama adanya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Kelima aspek ini akan dielaborasi satu per satu baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan di lapangan.

PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA (LAMPIRAN I-A)

Lanjutan...

- Lampiran Buku VII tentang Pendidikan dan Kesehatan, serta Lampiran Buku VIII Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Agama, Sosial dan Kependudukan, disesuaikan dalam **bidang Sosial Kemasyarakatan**; dan
- Lampiran Buku VI, Buku IX dan Buku X Perpres Nomor 30 Tahun 2005 disesuaikan dalam **bidang Kelembagaan dan Hukum**.

Kemudian 2 (dua) bidang lainnya dalam Lampiran Buku XI Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan, serta Lampiran Buku XII Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendanaan disesuaikan dalam **Lampiran IC Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung**.

Sasaran fisik program rencana induk dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah, sedangkan sasaran kegiatan non fisik yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat disesuaikan menurut kajian lapangan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sumber: Perpres Nomor 47 Tahun 2008

Evaluasi yang dilakukan tidak terlepas dari Perpres Nomor 47 Tahun 2008 yang merupakan revisi terhadap Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang rencana Induk. Dalam perpres tersebut disebutkan bahwa terdapat 4 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi Badan Pelaksana BRR, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO. Evaluasi lebih diprioritaskan pada 2 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Badan Pelaksana BRR dan Pemerintah Daerah. Disamping juga terdapat beberapa evaluasi terhadap kinerja lembaga Donor/NGO selama 4 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta mempersiapkan kerangka proses transisi pasca keberadaan BRR pada tahun 2009, serta melihat kontribusi dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca keberadaan BRR.

IV.1 Aspek Konsistensi

Perubahan Perpres 30 Tahun 2005 menjadi Perpres 47 Tahun 2008 yang merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dipandang perlu dilakukan perubahan. Dasar perubahan Rencana Induk adalah diawali dari hasil rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 yang meliputi meliputi dasar perubahan rencana induk dan substansi perubahannya. Ini adalah untuk penilaian kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; penyempurnaan/pemantapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap berikutnya; serta memberikan rekomendasi Untuk *Exit Strategy* BRR.

Demi pewujudan impian *Build Back Better*, maka jajaran petinggi BRR bersama stakeholders di Aceh memandang perlu untuk *mereview* Buku Rencana Induk agar segala yang dilakukan sesuai kebutuhan dan bermanfaat untuk jangka panjang. Review terhadap Buku Rencana Induk itu berujung pada kesepakatan Revisi Rencana Induk (RRI) dan pada tahun 2008 sudah disahkan oleh Presiden melalui Perpres No.47/2008. Melalui tahapan Revisi

BRR Belum Sepenuhnya Ikut Rencana Induk yang Baru

BRR dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR NAD-Nias telah menetapkan prioritas-prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi per tahunnya. Walaupun dalam beberapa program prioritas BRR tidak merujuk rencana induk. Seperti terkait pencapaian target untuk pembangunan perumahan terdapat kendala non teknis. Seharusnya untuk pembangunan perumahan sudah cukup. Karena bila merujuk kepada Rencana Induk, maka pencapaian saat ini sudah melampaui dari baseline perencanaan yang terdapat dalam Rencana Induk. Sehingga kami harus menyesuaikan kondisi dan prioritas. Sehingga masih perlu dikaji lagi terkait dengan isu Bantuan Sosial Biaya Rumah (BSBR) masih perlu dipertanyakan siapa saja penerima manfaatnya.

Sumber : Hasil wawancara dengan Deputi operasi BRR NAD-Nias, 2008

Rencana Induk itu, maka proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh BRR sudah legal dan diharapkan menjadi aset yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Perpres No 47 Tahun 2008 tersebut berisikan perubahan atas Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kabupaten Nias. Keberadaan Perpres tersebut berdasarkan pertimbangan masih terdapat kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir 2009. Perpres tersebut menerangkan rencana induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.

Setelah Perpres 47/ 2008 diterbitkan, sebagaimana tertera dalam Laporan Tahunan MDF Tahun 2008, hanya **Multi Donor Fund (MDF)** yang mewakili Lembaga Donor/ NGO yang menyatakan bahwa programnya **mendukung Rencana Induk Pemerintah Indonesia dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi**. MDF yang didukung oleh mitra pemerintah, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) dalam pelaksanaannya. Kebijakan Bantuan Pemulihan MDF berfungsi sebagai kerangka kerja untuk operasional MDF, di mana Sekretariat mengkoordinasikan dan melaporkan kinerja operasional dari portofolio. Proses persetujuan di MDF memastikan bahwa portofolio sejalan dengan prioritas pemerintah untuk rekonstruksi.

Aspek Konsistensi yang merupakan aspek evaluasi awal dari laporan ini yaitu memaparkan hasil analisa terhadap indikator-indikator, antara lain:

- Konsistensi **antar dokumen perencanaan**, yaitu antara Rencana Induk yang sudah direvisi dengan RKP, Renja BRR NAD-Nias, RPJMD dan RKPD Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, dan Komitmen Donor dan NGO;
- Konsistensi **antara perencanaan dengan pelaksanaan**, yaitu antara dokumen perencanaan yang dilakukan pada masing-masing bidang Rencana Induk oleh BRR, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO;
- Konsistensi **antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi**, yaitu hasil pelaksanaan antara BRR, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO; serta
- Konsistensi antara dampak/manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kehidupan masyarakat penerima manfaat di NAD-Nias.

Evaluasi terhadap indikator-indikator diatas akan dipaparkan berdasarkan pengkategorian di dalam setiap bidang pemulihan yang didukung hasil wawancara bersama *stakeholders* dan masyarakat pada lokasi sampel yang telah ditetapkan serta merujuk kepada Rencana Induk.

BRR NAD-Nias KONSISTEN DALAM MELAKSANAKAN RKP TAHUN 2008

BRR NAD-Nias menyatakan konsisten dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, ini diwujudkan dalam Renja KL Tahun 2008, melalui penetapan sasaran utama. Bahwa sasaran terkait Rehab/rekons NAD-Nias yang akan dicapai dalam salah satu program prioritas nasional untuk Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular pada tahun 2008 terbagi menjadi 2 sasaran utama, yaitu:

- Meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias.
- Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, di antaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antardaerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana;

Sumber: Renja KL BRR NAD-Nias, Tahun 2008

IV.1.1 Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan

IV.1.1.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Evaluasi konsistensi antar dokumen perencanaan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman dilakukan dengan mempersandingkan Perubahan Rencana

Induk sesuai Lampiran II pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008; Renstra BRR 2005 – 2009 (Lampiran I); Renja BRR 2008; RPJMD 2007 - 2012 untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan; serta Komitmen Donor/NGO yang dicuplik dari RAN Database BRR 2008, yang merupakan kebijakan dan acuan terhadap perencanaan. Persandingan dokumen-dokumen tersebut tersaji dalam beberapa tabel dibawah, sesuai dengan sub bidang pemulihan.

• Perumahan dan Permukiman

Fokus pemulihan untuk tahun 2007 - 2008 lebih ditujukan kepada pemulihan sektor perumahan dan prasarana dasar permukiman. Diharapkan untuk tahun 2009, pembangunan fisik, baik sektor perumahan maupun infrastruktur permukiman sudah dapat diatasi.

Perbedaan jumlah penerima manfaat antara Rencana Induk dengan Renstra BRR, kemungkinan terjadi karena adanya perubahan kondisi lapangan ataupun temuan baru. BRR bidang perumahan dalam strategi pelaksanaannya melaksanakan konsep *green belt* dan *escape hill* beserta aksesnya seperti yang tercantum dalam Rencana Induk, walaupun tidak dilakukan sesuai tahapan normal sehingga perencanaan di beberapa level dilakukan secara simultan. BRR juga mengakomodasi penataan lingkungan untuk permukiman, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rencana Induk.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatra Utara, kegiatannya adalah:

1. Pembangunan 8.000 rumah baru dan rumah bagi penyewa
2. Penyediaan 461 paket prasarana dan sarana dasar.

Sumber : Renja BRR NAD-Nias Tahun 2008

Tabel 4. 1

Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Rencana Induk sub bidang perumahan dan permukiman : 1. Rumah Baru (rekonstruksi) 2. Bantuan Perbaikan Rumah (BPR) dan Bantuan Sosial untuk Perbaikan Rumah (BSPR) 3. Prasarana dan Sarana Dasar.	Penggantian dan perbaikan rumah yang hancur dengan rumah yang memenuhi standar minimum : 1. Pembangunan rumah yang memenuhi standar 2. Rehabilitasi rumah rusak akibat tsunami 3. Pembuatan sertifikat rumah 4. Pengadaan tanah 5. Penyediaan prasarana dan sarana dasar (PSD) 6. Penyelenggaraan RT/RW.	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2. Pengembangan Perumahan RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan 4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 Tidak mencantumkan program perumahan	Komitmen Donor/NGO berdasarkan RAN Database BRR : 1. Rumah Baru (rekonstruksi) 2. Bantuan Perbaikan Rumah 3. Prasarana dan Sarana Dasar.

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

• Tata Ruang dan Pertanian

Kebijakan dan strategi Rencana Induk adalah membangun Aceh dan Nias yang baru dengan tata ruang untuk dapat mengantisipasi bencana, hal ini dapat juga terlihat dari pelaksanaan tata ruang makro BRR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih makro menjadi landasan setiap pembangunan fisik di wilayah NAD maupun Nias yang belum tersusun. Rencana Tata Ruang yang

menjadi tugas Pemda diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun karena dalam kondisi pasca bencana yang serba darurat, di mana semua bidang pemulihan harus segera dapat dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendasar, maka semua kegiatan termasuk perencanaan tata ruang di semua tingkatan dilakukan secara paralel dengan kegiatan fisik itu sendiri.

Sesuai rencana kerja BRR tahun 2008, dalam hubungan dengan pengurangan risiko bencana, akan difokuskan dan ditingkatkan pendayagunaan penataan ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama yang dapat mengurangi resiko bencana secara optimal. Kualitas rencana tata ruang yang berbasis pada pengurangan resiko bencana yang masih rendah, akan ditingkatkan dengan dukungan informasi, data maupun peta wilayah rawan bencana yang cukup memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang, serta sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah.

Tantangan utama di bidang penataan ruang pada tahun 2008 yaitu:

memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat pusat dan daerah;
memperkuat dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap bencana;
melengkapi NSPM penataan ruang yang tanggap terhadap bencana; dan
meningkatkan upaya penyediaan data dan informasi spasial.

Tabel 4. 2
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
TATA RUANG			
Rencana Induk sub bidang Tata Ruang : 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang 2. Rencana Pengembangan Desa (Village Planning) 3. Penyusunan Pedoman 4. Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada masyarakat 5. Koordinasi Pemerintahan Pusat dan Daerah (Integrasi Program Sektoral) 6. Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah 7. Studi Pengembangan Sistem Transportasi Intermoda dan Sistem Pedestarian dan DED Kota Banda Aceh; Studi Pengembangan Taman Lansekap di	Program sub bidang Tata Ruang tidak tercantum pada Renstra BRR.	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Perencanaan Tata Ruang RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 1. Program Penataan Ruang	Komitmen Donor/NGO berdasarkan RAN Database BRR: 1. Kerangka Tata Ruang Kecamatan dan Rencana Aksi 2. Rencana Desa (Village Planning) 3. Perencanaan Desa.

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Sepanjang Jalur Transportasi Regional Banda Aceh-Meulaboh dan DED; Studi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nias.			
PERTANAHAN			
Rencana Induk sub bidang Pertanahan : 1. Pemulihan Pelayanan Pertanahan 2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pemulihan Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 3. Pembangunan Fisik Kadastral 4. Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah 5. Pengadaan Peralatan Komputerisasi, Training serta Pembangunan Database Digital 6. Pembuatan Sertifikat Pengganti 7. Konsolidasi Tanah/Pemberian Hak atas Tanah (Relokasi Perumahan) 8. Penanganan Sengketa Pertanahan 2005-2008 9. Penyusunan Naskah Perundang-undangan dan Penyuluhan 8. Pengadaan Tanah.	Dokumentasi kepemilikan lahan, dengan kegiatan Penataan pertanahan.	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Penataan, Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah. RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 1. Program Pertanahan	Komitmen Donor/NGO berdasarkan RAN Database BRR adalah Penerbitan Surat Tanah.

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Perencanaan **sub bidang tata ruang** tidak tercantum baik dalam Renstra BRR 2005 - 2009 maupun Renja BRR 2008, walaupun dapat dilihat dari tabel RAN Database BRR (pada Bab III Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007/2008) bahwa telah dilakukan beberapa kegiatan untuk penyusunan tata ruang daerah, pengembangan desa dan lain-lain. Sedangkan untuk **pertanahan**, sub bidang ini telah memenuhi aspek untuk konsistensi antar dokumen perencanaan, hal ini dapat dilihat dari perencanaan yang dipenuhi oleh setiap dokumen, dimana pada seluruh dokumen telah terdapat program yang terkait dengan pertanahan, walaupun tidak seluruh program dimiliki oleh setiap dokumen.

IV.1.1.2 Bidang Infrastruktur

Konsistensi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur dapat dilihat dari kesinambungan antara perencanaan terhadap kebijakan dan acuan perencanaan. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diamanatkan dalam **Perpres 47/2008** merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga setiap dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, RPJM Daerah, RKPD harus sinkron serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sudah tercantum dalam **Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008**, yaitu pada prioritas 8 Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular dan pada fokus 1 a yaitu percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias.

Perencanaan bidang infrastruktur oleh BRR NAD Nias sudah mengacu dan konsisten dengan dokumen perencanaan yaitu RKP (tahun 2007 dan 2008) serta Perpres 47/2008 yang merupakan revisi rencana induk. Dari RKP, kemudian BRR menjabarkan lebih rinci ke dalam **Rencana Kerja BRR** yang mengacu pada Rencana Induk yang telah disempurnakan. Dokumen perencanaan di bidang infrastruktur disusun oleh Kedeputian Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan.

SASARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2008

1. Rehabilitasi/rekonstruksi jalan Nasional 232 km, jalan provinsi 243 km di Provinsi NAD, Jalan Provinsi di Nias 168 km, kabupaten NAD-Nias 864 km
2. Tersedianya *runway* bandara Sultan Iskandar Muda dengan kapasitas Airbus A340
3. Terbangunnya pelabuhan laut Lhoksemauwe (untuk industri); Meulaboh, Calang, dan Sabang (untuk logistic); dan Langsa (untuk CPO)

Sumber : Renja BRR NAD-Nias Tahun 2008

Peran antar BRR, Pemda dan Donor/NGO dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dilakukan dengan karakteristik dan proses yang berbeda di setiap daerah. Keterkaitan Rencana Induk dengan **RPJMD atau RKP Daerah** yaitu Dokumen RPJMD atau RKPD NAD-Nias secara umum telah terkait dimana rata-rata di setiap daerah menitikberatkan pada pembangunan dan pemulihan infrastruktur. Akibat keterbatasan anggaran Pemda maka sebagian besar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui anggaran/kegiatan BRR maupun Donor/NGO. Perencanaan Pemda pada RKPD mengacu kepada RPJMD telah mengarah ke dalam upaya pemulihan infrastruktur yang lebih baik pasca bencana, dimana dilengkapi dengan strategi yang jelas dan program-program yang berdasarkan target dan mencerminkan prioritas pembangunan. Perencanaan Pemda dilakukan oleh Dinas/Badan terkait bidang infrastruktur, misalnya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Perhubungan, Dinas Pengairan dan lain sebagainya.

Dasar perencanaan Donor/NGO di bidang infrastruktur belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan Rencana Induk maupun RKP, banyak Donor/NGO merencanakan berdasarkan rencana strategis maupun *assessment* masing-masing Donor/NGO. Sebelum pelaksanaan, perencanaan kegiatan Donor/NGO disinkronkan terlebih dahulu dengan RPJM daerah sasaran.

Dokumen perencanaan baik yang dimiliki oleh BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO secara garis besar telah mengacu kepada Rencana Induk, jadi dapat dikatakan sudah konsisten. Konsistensi antara dokumen perencanaan bidang infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3

Konsistensi Antar Perencanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Konsistensi antar Perencanaan

Provinsi NAD	Pembangunan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi tidak <i>sharing</i> dengan BRR karena BRR dan Pemda memiliki proyek/program sendiri sehingga tidak tumpang tindih. Donor yang juga menangani jalan Provinsi adalah USAID yang membangun jalan di sepanjang pantai barat Banda Aceh-Meulaboh. Ada juga Donor ADB yang memberikan dananya melalui BRR dalam pembangunan jalan, selain itu jalan lintas timur dibangun dengan dana APBN.
Aceh Besar	1. Sebagian besar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh Dinas Kimpraswil Aceh Besar sudah memperhatikan Rencana Induk namun terbentur oleh keterbatasan dana. Contoh kasus Pemda hanya bisa melakukan perkerasan jalan, sedangkan BRR mencapai tahap hotmix. 2. Kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Perhubungan Aceh Besar adalah kegiatan reguler dan tidak mengacu kepada Rencana Induk, hal ini dikarenakan anggaran sangat terbatas. Karena keterbatasan dana tersebut sebagai contoh untuk pembangunan terminal singgah (untuk makan dan minum) di Saree dengan total dana sebesar 12 M, Kantor Perhubungan hanya menerima Rp 1 M setiap tahunnya dan realisasi anggaran baru 30 persen. Oleh karena itu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan pendanaan besar dilaksanakan oleh BRR (pelabuhan dan terminal), selain itu Dinas Perhubungan Provinsi juga telah membangun gedung pengujian di Aceh Besar
Aceh Jaya	1. Rencana Induk menjadi rujukan BRR Aceh Jaya, bila ada masukan di luar Perpres akan didiskusikan internal BRR. BRR Aceh Jaya terlibat dalam Musrenbang Kabupaten, untuk proses klarifikasi pada beberapa program/kegiatan BRR dengan RKPD untuk menghindari tumpang tindih 2. Perencanaan di Dinas Kimpraswil Aceh Jaya mengacu pada Rencana Induk, RPJMD, serta menyesuaikan dengan prioritas usulan masyarakat (dari hasil Musrenbang). 3. Kegiatan bidang perhubungan yang anggarannya besar didukung oleh BRR, seperti pelabuhan dan terminal, sedangkan untuk kegiatan Dinas Perhubungan Aceh Jaya yang skalanya kecil dan reguler ditangani Dinas melalui APBK. RKPD dinas merujuk kepada RPJMD, dan selalu disinkronisasikan dengan perencanaan yang dibuat oleh BRR agar tidak terjadi tumpang tindih
Nias dan Nias Selatan	Menurut Dinas Kimpraswil Nias, Dinas Perhubungan Nias, Dinas Perhubungan Nisel , program yang disusun Pemda telah memperhatikan RKP pusat, RKPD daerah, namun perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemda belum sepenuhnya diakomodasi dalam Renja BRR 2008.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Konsistensi antara dokumen perencanaan berdasarkan sub bidang pemulihan infrastruktur dijelaskan sebagai berikut.

A. Jalan dan Jembatan

Tabel 4. 4
Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Jalan dan Jembatan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Rehabilitasi/rekonstruksi jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota	Perbaikan dan pembangunan jaringan jalan umum dan alan bebas hambatan di Aceh dan Nias • Pembangunan jalan dan jembatan	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan jembatan 2. Rehabilitasi/rekonstruksi jalan (Provinsi/kabupaten/kota) 3. Rehabilitasi/rekonstruksi jalan sekitar perumahan/desa Rehabilitasi/rekonstruksi jalan untuk fasilitas umum

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
		5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 1. Program pembinaan jalan dan jembatan 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)	

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsistensi perencanaan **sub bidang jalan dan jembatan** dengan Rencana Induk yaitu rehabilitasi/rekonstruksi jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Kegiatan ini diwujudkan melalui Renstra BRR, RPJMD NAD maupun Nias, dan perencanaan Donor/NGO berupa pembangunan jalan dan jembatan.

B. Perhubungan

Tabel 4. 5

Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Perhubungan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Transportasi Darat dan LLAJR 1. Pembangunan Terminal dan stasiun/Pool Damri 2. Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok, lampu) 3. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 4. Pengadaan bus bantuan	Perbaiki dan pembangunan jaringan jalan umum dan alan bebas hambatan di Aceh dan Nias • Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat • Penyediaan alat berat/alat bantu Pembangunan dermaga, bandara, fasilitas kereta api yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 4. Program Peningkatan & Pengamanan Lalu Lintas 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6. Program Peningkatan & Pembangunan Sarana Kereta Api RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1. Pengadaan bus bantuan 2. Pengembangan pelabuhan laut 3. Rehabilitasi/rekonstruksi pelabuhan ferry 4. Rehabilitasi/rekonstruksi airstrip/landasan pacu Pengembangan bandara
Transportasi laut dan ASDP 1. Rehabilitasi/rekonstruksi pelabuhan laut 2. Rehabilitasi/rekonstruksi pelabuhan ferry	• Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan/dermaga • Pembangunan/rehabilitasi terminal		
Transportasi Udara 1. Rehabilitasi/rekonstruksi bandara	• Penyediaan kapal		

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
2. Pembangunan airstrip 3. Pembangunan helipad	penyeberangan - Pembangunan/rehabilitasi landasan - Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan	6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 - Menyelenggarakan perawatan sistem transportasi seedisien mungkin - Mengusahakan harga suku cadang kendaraan bermotor semurah mungkin - Penyempurnaan izin-izin usaha transportasi - Peningkatan fungsi terminal dan keamanan transportasi - Pengembangan pembangunan pelabuhan di ibu kota kabupaten dan kecamatan yang memiliki potensi transportasi laut - Pengembangan sistem jaringan jalan - Pengembangan angkutan terpadu meliputi pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan, terminal bus, sub terminal bus dan pemeliharaan alat-alat angkut untuk menciptakan kemandirian, kelancaran transportasi yang terkendali - Pengembangan sarana komunikasi telepon, media massa cetak maupun elektronika yang mampu menjangkau seluruh perdesaan di wilayah Kabupaten Nias Selatan - Pengembangan pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan	

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsistensi perencanaan **sub bidang perhubungan** dengan Rencana Induk yaitu pada pembangunan terminal, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana keselamatan LLAJ, rehabilitasi/rekonstruksi pelabuhan laut dan ferry, rehabilitasi/rekonstruksi bandara, airstrip dan helipad. Kegiatan-kegiatan tersebut diwujudkan melalui Renstra BRR yaitu penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, pembangunan/rehabilitasi pelabuhan, terminal, dan landasan. Pada RPJMD kegiatan tersebut diwujudkan ke dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan fungsi terminal dan keamanan transportasi. Komitmen Donor/NGO pada sub bidang perhubungan berupa pengembangan pelabuhan, rehabilitasi/rekonstruksi pelabuhan laut dan pelabuhan ferry, pengembangan bandara, dan rehabilitasi/rekonstruksi airstrip.

C. Sumber Daya Air

Tabel 4. 6
Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Air

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Irigasi 1. Rehabilitasi irigasi Pantai 1. Pembangunan tanggul pengaman pantai Sungai 1. Pembangunan pengendali banjir Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan 1. Penyediaan air bersih (termasuk pembangunan jaringan air minum dan jaringan pipa air bersih) 2. Pembangunan IPLT 3. Pembangunan TPA 4. Pembangunan saluran drainase	Penyediaan akses air bersih dan sehat bagi seluruh warga - Pemasangan jaringan air minum - Penyediaan system pelayanan air limbah - Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan drainase - Penyediaan air bersih Pembangunan system drainase dan pengontrol banjir yang baru - Pembangunan/rehabilitasi bendungan - Pembangunan sarana pengendalian banjir dan pengaman pantai - Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 2. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 7. Program Pengendalian Banjir 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 1. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan	1. Pembangunan sistem irigasi 2. Rehabilitasi waduk 3. Rehabilitasi/rekonstruksi struktur outlet drainase 4. Pembangunan pengaman pantai 5. Pembangunan tanggul/ pengendali banjir 6. Penyediaan air bersih 7. Produksi kapasitas air bersih 8. Penyediaan/rehabilitasi saluran pipa primer/sekunder 9. Restorasi water system (skala besar) 10. Rehabilitasi/rekonstruksi water points (skala kecil) 11. Rehabilitasi booster pumps 12. Rehabilitasi/penggalian sumur dalam 13. Purifikasi air tanah 14. Perumahan yang disupply air 15. Penyediaan hydrant umum 16. Rehabilitasi/rekonstruksi keran umum 17. Rehabilitasi fasilitas pendistribusian air 18. Pembangunan IPLT 19. Pembangunan kamar mandi 20. Rumah yang disupply sanitasi/pembuangan air kotor 21. Rehabilitasi/rekonstruksi toilet umum 22. Pemulihan rencana/pedoman sanitasi 23. Sludge water treatment 24. Rehabilitasi/rekonstruksi toilet 25. Pembangunan TPA 26. Penyediaan/rehabilitasi gerobak sampah, container sampah, truk sampah,

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
		pengairan lainnya 3. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 4. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6. Program pengendalian daerah aliran sungai (DAS)	container plot, transfer station 27. Rehabilitasi/rekonstruksi saluran drainase

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsistensi perencanaan **sub bidang sumber daya air** dengan Rencana Induk yaitu pada rehabilitasi irigasi, pembangunan tanggul pengaman pantai, pembangunan pengendali banjir, penyediaan air bersih, pembangunan IPLT, pembangunan TPA dan pembangunan saluran drainase. Kegiatan tersebut direncanakan dalam Renstra BRR berupa pemasangan jaringan air minum, penyediaan sistem pelayanan air limbah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan drainase. Rehabilitasi bendungan, sarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta pembangunan. Rehabilitasi jaringan irigasi. Pada RPJMD NAD-Nias, kegiatan tersebut diwujudkan ke dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Komiten Donor/NGO dalam sub bidang sumber daya air pun cukup besar, misalnya dalam pembangunan sistem irigasi, rehabilitasi waduk, drainase, pengamanan pantai, tanggul pengendali banjir, produksi kapasitas air bersih, pembangunan IPLT, TPA, dan rehabilitasi/rekonstruksi saluran drainase.

D. Energi dan Listrik

Tabel 4. 7
Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Energi dan Listrik

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Energi 1. Pengadaan generator/pembangkit listrik (PLTD, PLTMH, PLTS) 2. Perbaikan kantor PLN 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi transmision lines dan gardu induk, distribusi lines, stasiun distribusi, sambungan pelanggan (kerjasama dengan PLN), gardu distribusi, gardu induk 4. System SCADA Listrik 1. Pembangunan Depo BBM	Penyediaan sumber energi yang terjangkau dan memadai • Pembangunan/rehabilitasi jaringan listrik • Penyediaan pembangkit/gardu	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1. Pembangunan tenaga listrik/generator (PLTD, PLTA, PLTMH, PLTS, PLTGU) 2. Penyediaan peralatan dan suku cadang 3. Rehabilitasi fasilitas distribusi komunikasi 4. Rehabilitasi fasilitas distribusi listrik 5. Dukungan logistik

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
2. Pembangunan gedung ESDM 3. Pemantau gunung api			

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsistensi perencanaan **sub bidang energi dan listrik** dengan Rencana Induk khususnya pada sub bidang kelistrikan yaitu pada pengadaan generator/pembangkit listrik dan jaringannya. Dalam dokumen Renstra BRR disebutkan adanya pembangunan/rehabilitasi jaringan listrik dan penyediaan pembangkit, sedangkan dalam RPJMD NAD-Nias diwujudkan dalam pembinaan dan pengembangan ketenagalistikan. Donor/NGO pun terlibat dalam pembangunan tenaga listrik/generator, dan rehabilitasi fasilitas distribusi listrik.

E. Pos dan Telematika

Tabel 4. 8
Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pos dan Telematika

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
1. Pembangunan kantor SAR, BMG, kantor pos, RRI-TVRI 2. Penyediaan fastel desa dan raadio 3. Penyediaan Radio Broadcast EWS 4. Fasilitasi telematika 5. Pembangunan Infrastruktur WIMAX	Berkembangnya jaringan komunikasi sehingga Aceh dan Nias menjadi bagian dan jaringan komunikasi nasional dan global - Pembangunan gedung dan rumah Negara - Penyediaan peralatan komunikasi - Pelaksanaan penanggulangan bencana alam dan kerusakan	RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 2. Program Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi. RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi. 4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.	1. Pembangunan kantor pos 2. Penyediaan fastel desa dan radio 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi BMF UPT Postel 4. Pengadaan radio broadcast EWS

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsistensi perencanaan **sub bidang pos dan telematika** dengan Rencana Induk yaitu pembangunan gedung kantor, penyediaan fasilitas telekomunikasi desa dan radio, radio EWS, pembangunan infrastruktur WIMAX. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam Renstra BRR berupa pembangunan gedung, penyediaan peralatan komunikasi, sedangkan dalam dokumen RPJMD NAD-Nias disebutkan adanya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Donor/NGO pun terlibat dalam sub bidang pos dan telematika, yaitu dalam pembangunan gedung, penyediaan fastel dan radio, pengadaan radio broadcast EWS.

F. Bangunan Fasilitas Umum

Tabel 4. 9
Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan Sub Bidang Bangunan Fasilitas Umum

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
1. Pembangunan pusat pelatihan mitigasi 2. Pembangunan escape building 3. Pembangunan museum tsunami 4. Pembangunan pusat kualitas struktur dan lab 5. Koordinasi dan konsultasi proyek infrastruktur			1. Pembangunan <i>escape building</i>

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsistensi perencanaan **sub bidang bangunan fasilitas umum** dengan Rencana Induk yaitu pembangunan escape building, dimana kegiatan tersebut dicantumkan dalam dokumen perencanaan Donor/NGO.

Untuk **sub bidang pemeliharaan, dan IREP** yang tercantum pada revisi Rencana Induk belum konsisten dengan dokumen perencanaan Renstra BRR, RPJMD NAD-Nias dna komitmen Donor/NGO. Sub bidang pemeliharaan dan RPJMD NAD-Nias tidak dipisahkan tersendiri melainkan terbagung dengan program lainnya, misalnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dan lain sebagainya.

IV.1.1.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Evaluasi konsistensi antar dokumen perencanaan untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan pada bagian ini akan difokuskan kepada lima sub bidang pemulihan yaitu pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan budaya. Basis perencanaan yang pertama dan utama dalam evaluasi ini mengacu kepada Perpres No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Beberapa dokumen perencanaan lainnya yang akan dipersandingkan dan dikomparasikan, antara lain, Rencana Strategis (Renstra) BRR NAD-Nias Tahun 2005-2009, RPJMD Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dan Komitmen Donor/NGO.

Konsistensi antar dokumen perencanaan didasarkan kepada beberapa sub bidang dalam bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Berikut ini gambaran persandingan perencanaan sub bidang pendidikan, sebagai berikut:

A. Pendidikan

Tabel 4. 10
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pendidikan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
1. Pendidikan anak usia dini 2. percepatan wajib belajar sembilan tahun 3. meningkatkan peran pendidikan menengah	1. Pendidikan dan pelatihan masyarakat 2. Penelitian pengkajian dan pelaksanaan terapan 3. Penyediaan buku-	Provinsi NAD 2007-2012 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Non Formal	1. Pendidikan Kejuruan 2. Penyediaan buku 3. Penyediaan ruang kelas 4. Pembangunan pusat belajar komunitas 5. Perbaikan/Pembangunan TK, SD, SMP, SMU,

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
4. peningkatan pendidikan tinggi 5. mengintensifkan pendidikan non-formal 6. meningkatkan mutu pendidikan tenaga kependidikan 7. meningkatkan pengelolaan dan pengaturan (governance) manajemen layanan pendidikan 8. mengefektifkan penelitian dan pengembangan pendidikan 9. mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 10. mengintensifkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) penekanan pada penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 dan 2007 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.	buku pendidikan 4. Penyakuran beasiswa 5. Penyediaan dan pelatihan teknis 6. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 7. Pembangunan gedung kantor 8. Pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor 9. Pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara 10. Pelaksanaan perawatan gedung khusus	5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Pendidikan Dayah 8. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 9. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 10. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 11. Pendidikan Kualitas Pendidikan Agama Kab. Nias 2006-2011 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	dan Univerditas 6. Perlengkapan sekolah 7. Pelatihan guru

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan yang disebutkan diatas, maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa program dalam dokumen perencanaan yang disebutkan dalam Perubahan Rencana Induk dengan dokumen perencanaan lainnya yang dinilai pada prinsipnya sama. Namun bila dilihat secara terpisah, dalam perencanaan dalam program-program Renstra BRR lebih banyak diarahkan dan ditekankan kepada aspek fisik seperti penyediaan buku-buku pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan gedung kantor, pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor, pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara dan pelaksanaan perawatan gedung khusus. Sedangkan program yang bersifat non fisik yaitu pendidikan dan pelatihan masyarakat, penelitian pengkajian dan pelaksanaan terapan dan Penyakuran beasiswa.

Namun bila diamati pada perencanaan untuk Donor/NGO nampak lebih fokus kepada beberapa hal saja dan tidak melebar kemana-mana. Hal ini nampaknya diarahkan dalam rangka memulihkan wilayah dan kehidupan pada sub bidang pendidikan yang lebih urgen dan berjangka pendek. Secara konkret dapat dilihat pada program-program yang difokuskan pada pembangunan pendidikan kejuruan, penyediaan buku dan ruang kelas, pembangunan pusat belajar komunitas,

perbaikan/pembangunan TK, SD, SMP, SMU, dan Universitas beserta perlengkapannya dan pelatihan bagi para guru.

Sedangkan bila dilihat pada program yang terdapat dalam RPJMD baik untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias menunjukkan sangat komprehensif karena terkait dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah secara reguler dalam jangka menengah. Secara umum meliputi aspek pembangunan fisik baik untuk sekolah dan perpustakaan, pengembangan pendidikan sekolah formal maupun non formal, pengembangan mutu dan kualitas sekolah dari aspek kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan ini.

A. Kesehatan

Tabel dibawah merupakan persandingan perencanaan sub bidang kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Kesehatan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan meningkatkan pelayanan kesehatan - Merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana serta memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan - Mengembangkan kesinambungan pelayanan kesehatan - Mengembangkan “best practice” yang disesuaikan dengan kearifan lokal - Memperkuat sumber daya kesehatan - Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	- Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan - Penyediaan asuransi kesejahteraan sosial (askesos) - Pembangunan gedung kantor - Pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor - Pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara - Pelaksanaan perawatan gedung khusus	Provinsi NAD - Obat dan Perbekalan Kesehatan - Upaya Kesehatan Masyarakat - Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat - Perbaikan Gizi Masyarakat - Pengembangan Lingkungan Sehat - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kab. Nias - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pengawasan Obat dan Makanan - Program Pengembangan Obat Asli Indonesia - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Pengembangan	- Peningkatan Kapasitas - Perlengkapan dan peralatan-Non Kesehatan - Perlengkapan dan peralatan Kesehatan - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbagai Sarana dan Prasarana Kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Klinik, kantor, dll) - Pengawasan Berbagai Penyakit - Pelatihan-pelatihan kesehatan - Program Anak dan Remaja - Promosi Kesehatan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
		Lingkungan Sehat 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Bila dianalisis dokumen perencanaan dalam Renstra BRR, nampak arah dan kebijakan program lebih banyak kepada pembangunan fisik sektor kesehatan. Dapat disebutkan antara lain pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan gedung kantor, pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor, pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara, dan pelaksanaan perawatan gedung khusus. Sedangkan pembangunan non fisik sektor kesehatan ini sangat sedikit dan tidak tampak pembangunan aspek sumber daya manusia dan program non fisik lainnya.

Sedangkan pada perencanaan Donor/NGO menunjukkan lebih luas cakupannya yaitu peningkatan kapasitas di sektor kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pengawasan berbagai penyakit, promosi kesehatan dan program bagi anak dan remaja serta program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga media dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bila dianalisis perbandingan antara perencanaan Renstra BRR dengan perencanaan Donor/NGO dapat melengkapi satu dengan lainnya.

Sedangkan pada perencanaan Pemda sangat variatif jenis programnya. Terdapat program yang bersifat fisik peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta program yang bersifat non fisik seperti peningkatan kualitas pelayanan, promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat,

standarisasi pelayanan dan berbagai program lainnya yang lebih banyak mendukung program dan kegiatan reguler dan dalam situasi normal.

B. Agama

Berikut gambaran persandingan perencanaan sub bidang agama:

Tabel 4. 12
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Agama

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
1. Meningkatkan pelayanan keagamaan 2. Pembangunan gedung pemerintah 3. pengembangan lembaga pendidikan keagamaan 4. pengembangan kapasitas aparaturnya dan petugas agama	1. Penciptaan transformasi nilai keagamaan dalam masyarakat 2. pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah. 3. pembangunan gedung kantor 4. pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor 5. pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara	1. penelitian dan pengembangan pelaksanaan Syariat Islam 2. Pemberdayaan dan peningkatan lembaga keagamaan 3. penyuluhan agama Islam dan sosialisasi Qanun Syariat Islam 4. Peningkatan sumber daya teknis pelaksana dan pengawas Syariat Islam 5. peningkatan kualitas kelembagaan 6. peningkatan pelayanan kehidupan beragama 7. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamatan agama dan pengamatan agama dan pembinaan kerukunan beragama 8. menyemarakkan Syiar Islam 9. sertifikasi penatausahaan, pengelolaan dan pembinaan kerukunan beragama 10. peningkatan pembinaan pelayanan kehidupan beragama 11. keserasian kebijakan pelaksanaan Syariat Islam 12. peningkatan sumber daya dan peran ulama	1. penyediaan perlengkapan dan peralatan 2. pembangunan/perbaikan masjid, meunasah, gereja, kuil dan dayah 3. pelatihan keagamaan

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Bila melihat kepada perencanaan Renstra BRR menunjukkan arah dan kebijakan program itu lebih banyak pada pembangunan fisik, yaitu pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah, pembangunan gedung kantor, pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor dan pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara. Untuk program yang bersifat non fisik yaitu penciptaan transformasi nilai keagamaan dalam masyarakat. Nampak disini penekanannya lebih banyak penekanan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang menunjang sub bidang pemulihan keagamaan. Namun, jika diperbandingkan dengan Perubahan Rencana Induk, secara kategori terdapat program peningkatan pelayanan keagamaan, pembangunan gedung, pembangunan lembaga pendidikan dan pengembangan kapasitas.

Sedangkan pada perencanaan Donor/NGO fokus program ditekankan pada aspek yaitu penyediaan perlengkapan dan peralatan, pembangunan/perbaikan mesjid, meunasah, gereja, kuil dan dayah serta pelatihan keagamaan. Bila dinilai ketiga program ini saling melengkapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil dan fokus saja. Ketiga program terbagi ke dalam dua jenis program yaitu bersifat fisik yang terdiri dari pembangunan sarana ibadah dan penyediaan peralatan/perlengkapan. Untuk yang bersifat non fisik yaitu program pelatihan keagamaan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi umat beragama dalam menjalankan ajarannya.

C. Sosial

Berikut gambaran persandingan perencanaan sub bidang sosial:

Tabel 4. 13
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Sosial

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
1. Pengembangan sistem penanganan kelompok rentan 2. pembangunan sosial masyarakat pedesaan berbasis kawasan 3. pengembangan kapasitas masyarakat Aceh untuk transformasi sosial 4. pembangunan sistem kesejahteraan sosial Aceh	1. bantuan untuk orsos/yayasan/LSM 2. pemberian subsidi 3. pemberian bantuan sosial 4. bantuan penanggulangan dan kerusakan sosial 5. pembangunan gedung kantor 6. pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor 7. pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara 8. pelaksanaan perawatan gedung khusus	Provinsi NAD 1. pelayanan fakir miskin, KAT, PMKS 2. pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. pembinaan anak terlantar 4. pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5. pembinaan panti asuhan/panti jompo 6. pembinaan eks-penyakit sosial 7. pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. penyediaan perlengkapan dan peralatan 2. pengembalian anak ke dalam keluarga 3. pembangunan pusat sosial 4. pembangunan balai desa 5. pembangunan asrama 6. pembangunan taman bacaan umum 7. bantuan hukum untuk wanita 8. pelatihan kapasitas

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Dari data perencanaan Renstra BRR, arah dan kebijakan program diarahkan kepada pembangunan fisik yaitu pembangunan gedung kantor, pelaksanaan prasarana lingkungan gedung kantor, pelaksanaan rehabilitasi bangunan negara dan pelaksanaan perawatan gedung khusus. Sedangkan arah program lainnya yaitu pada pemberian bantuan yaitu bantuan untuk orsos/yayasan/LSM, pemberian subsidi, pemberian bantuan sosial, bantuan penanggulangan dan kerusakan sosial. Sedangkan, bila diperbandingkan dengan Perubahan Rencana Induk, arah programnya yaitu pada pengembangan sistem kelompok rentan, pembangunan masyarakat pedesaan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembangunan sistem kesejahteraan sosial.

Namun bila dilihat dari perencanaan program Donor/NGO nampak lebih beragam arah dan kebijakan program tersebut. Arah dan kebijakan programnya bukan hanya pembangunan sarana fisik semata tapi terdapat program lainnya yang sangat strategis yaitu pengembalian anak ke dalam keluarga, bantuan hukum untuk wanita dan pelatihan kapasitas. Sedangkan program fisik yang direncanakan yaitu pembangunan pusat sosial, balai desa, asrama dan Taman Bacaan Umum.

D. Budaya

Tabel dibawah ini merupakan gambaran persandingan perencanaan sub bidang budaya:

Tabel 4. 14
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Budaya

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD –Nias	Komitmen Donor/NGO
Membangun kembali masyarakat Aceh melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	1. penyusunan buku tentang seni budaya Aceh dan buku lainnya 2. pelestarian artefak kebudayaan Aceh 3. pelaksanaan	Provinsi NAD 1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 3. pengembangan dan keserasian	1. Penyediaan perlengkapan dan peralatan 2. Pertunjukan kebudayaan 3. Workshop/Pelatihan Kebudayaan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD NAD –Nias	Komitmen Donor/NGO
	4. promosi pariwisata pembangunan gedung seni budaya	kebijakan pemuda 4. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 5. peningkatan peran serta kepemudaan 6. pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 7. peningkatan sarana dan prasarana olahraga 8. pengembangan nilai budaya 9. pengelolaan kekayaan budaya 10. pengelolaan keragaman budaya	4. Pembangunan fasilitas kebudayaan

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Pada program budaya yang terdapat dalam Renstra BRR terdapat tiga program yang merupakan non fisik seperti pembangunan gedung yaitu penyusunan buku tentang seni budaya Aceh dan buku lainnya, pelestarian artefak kebudayaan aceh, dan pelaksanaan promosi pariwisata. Sedangkan untuk program pembangunan fisik yaitu pembangunan gedung seni budaya.

Sedangkan pada perencanaan Donor/NGO terdapat berbagai program yang dapat melengkapi dengan program yang terdapat dalam Renstra BRR yaitu penyediaan perlengkapan dan peralatan, pertunjukan kebudayaan, workshop/Pelatihan Kebudayaan, dan pembangunan fasilitas kebudayaan. Hanya saja dalam perencanaan ini tidak terdapat pembangunan fisik gedung seperti dalam Renstra BRR yaitu pembangunan gedung seni budaya.

IV.1.1.4 Bidang Perekonomian

Evaluasi konsistensi antar dokumen perencanaan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perekonomian dilakukan dengan mempersandingkan Perubahan Rencana Induk (Lampiran II) pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008; Renstra BRR 2005 – 2009 (Lampiran I); Renja BRR 2008; RPJMD 2007 - 2012 untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan; serta Komitmen Donor/NGO yang dicuplik dari RAN Database BRR 2008, yang merupakan kebijakan dan acuan terhadap perencanaan. Persandingan dokumen-dokumen meliputi sub bidang pemulihan Kelautan dan Perikanan, Sub Bidang Pertanian, Sub Bidang Pariwisata, Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Sub Bidang Tenaga Kerja, dan Sub Bidang Koperasi & Usaha Kecil.

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelautan dan perikanan, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar telah mengacu kepada Rencana Induk.

Tabel 4. 15
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
Rencana Induk Sub Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) program, yaitu: 1. Rehabilitasi & rekonstruksi sarana dan bantuan	Renstra BRR terdiri dari 1 (satu) program yaitu pemulihan fasilitas pelayanan masyarakat. Penjabaran program tersebut dijabarkan dalam beberapa	Prov.NAD: 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui pembinaan kelompok ekonomi 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : 1. Area of fishponds/tambak restored (Hectares); 2. Boat building facilities completed (unit);

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
2. privat/modal dan Rehabilitasi & rekonstruksi sarana prasarana publik	kegiatan sebagai berikut: • Merehabilitasi tambak yang rusak, • Pengadaan Kapal motor kayu, • merehabilitasi kapal boat, • pengadaan alat tangkap, • Bantuan Agroinput, • Pengembangan BBIP Simeulue, • Pengadaan Hatchery skala rumah tangga, • Keramba Jaring Apung, • Sentra Pengolahan Ikan • Bagan Apung	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan melalui pemetaan dan rencana zonasi pengelolaan daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 3. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 4. Pengembangan budidaya perikanan dengan bibit ikan unggul 5. Pengembangan perikanan tangkap dengan memberikan alat bantu operasional 6. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 7. Pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar melalui identifikasi dan inventarisasi daya dukung lahan perikanan budidaya. Kab.Nias : NA Kab.Nias Selatan : 1. Pengadaan peralatan tangkap ikan 2. Pembentukan kelompok nelayan	3. Area of coastal (inshore, beach, corals) restored (Hectares); 4. Fish agregat device (FAD) provided (Unit); 5. Fish landing facilities (TPI) rebuilt/rehabilitated; 6. Fisheries cooperatives supported/created/operational; 7. Fishing vessels provided/replaced; 8. Sets of fish processing equipment provided;

Sumber : Analisa Tim P3B Bapenas

Amanat Perubahan Rencana Induk/Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 dijabarkan ke dalam dua program utama dengan menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan kelautan serta bantuan privat/permodalan guna pemberdayaan masyarakat korban bencana. Namun, Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan kelautan perikanan melalui Program Fasilitas Pelayanan Masyarakat, yang lebih berorientasi pada bantuan sarana prasarana dibandingkan dengan bantuan permodalan, dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembalikan aset dan peralatan penangkapan ikan, seperti kegiatan rehabilitasi tambak, bantuan perahu, jala, benih, hingga pembangunan/rehabilitasi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

Sementara, Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, tidak saja pada bantuan sarana prasarana namun juga pada pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat penting lainnya seperti aspek pemasaran, pemetaan dan zonasi. RPJMD Prov.NAD juga telah merencanakan program Peningkatan Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut.

Dilain pihak, Perencanaan oleh Lembaga Donor juga lebih berorientasi pada pemulihan sarana dan prasarana perikanan, seperti bantuan peralatan tangkap (perahu, jala, benih ikan, pembangunan PPI dan rehabilitasi tambak.

Dalam Rencana Induk dijabarkan dua program utama dengan tujuan utama pulihnya kembali fasilitas produksi pertanian, dan pengembangan serta peningkatan kualitas hasil pertanian.

Tabel 4. 16
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Pertanian

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005-2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
Di Rencana Induk, sub bidang pertanian terdapat 2 (dua) program yaitu : 1. Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum dan 2. Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi Swasta.	Renstra BRR menjabarkan melalui 4 (empat) program yaitu: 1. Pemulihan sarana irigasi, 2. Pemulihan pusat penjualan hasil produksi; 3. Pengembangan dan Peningkatan kualitas hasil produksi; 4. Pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan. Adapun Program tersebut dijabarkan melalui kegiatan: • Rehabilitasi lahan sawah, • Penghijauan pekarangan, • Lining jaringan irigasi, • Bantuan material jalan usaha tani, • Balai Benih (BBU dan BBI), • Alsintan dan Pengadaan Gudang Alsintan, • Gudang dan mesin RMU, • Balai Pertemuan Petani.	Prov.NAD : 1. Program peningkatan dan pemasaran hasil produksi pertanian melalui pembangunan terminal agribisnis dan pengembangan daerah agrowisata. 2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian Kab.Nias : NA Kab.Nias Selatan : 1. Penguatan struktur ekonomi berbasis pertanian 2. Pengembangan produk olahan (agro industri) 3. Pengembangan hasil pertanian berorientasi pasar 4. Pengembangan balai penyuluhan (BPP) untuk menjamin produk lokal regional 5. Meningkatkan pengawasan mutu pupuk pestisida 6. Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian 7. Publikasi metode maupun paket usaha pertanian 8. Pengadaan peternakan	Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : 1. Area of agricultural land rehabilitated (Hectares) 2. Length of irrigation canal new/rehabilitated (meter) 3. Amount of seeds and fertilizer provided (Kg) 4. Agricultural machines provided 5. Area of cages rebuilt/rehabilitated (Sq meters) 6. livestock provided Total komitmen awal keseluruhan adalah sebesar 209 juta USD. (termasuk komitmen awal pemulihan bidang perikanan dan kelutan)

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pertanian dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembalikan aset pertanian seperti Rehabilitasi lahan sawah, Penghijauan pekarangan, Lining jaringan irigasi, Bantuan material jalan usaha tani, Balai Benih (BBU dan BBI), Alsintan, Pengadaan Gudang Alsintan , Gudang dan mesin RMU, Balai Pertemuan Petani. Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk melalui Program dan Kegiatan dalam APBD tahun 2006 dan tahun 2007, termasuk melalui penggunaan teknologi pertanian yang tepat untuk peningkatan produksi pertanian.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, seperti penyediaan bantuan ternak, rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan irigasi, dan penyediaan bibit unggul, untuk peningkatan produksi. Lembaga donor/NGO sangat serius terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan

pertanian dan perikanan kelautan sebagai sub bidang yang paling parah akibat tsunami. Adapun Total komitmen awal keseluruhan pemulihan bidang pertanian, perikanan dan kelautan adalah sebesar 209 juta USD.

Secara keseluruhan, dengan mengacu kepada Rencana Induk yang mengamanatkan pemulihan bidang pertanian pada dua sisi pembangunan yaitu pembangunan prasarana ekonomi dan pemulihan usaha ekonomi masyarakat/swasta, maka baik perencanaan BRR, Pemerintah Daerah, maupun donor/NGO, nampak masih terfokus pada satu sisi pembangunan saja, yaitu pembangunan prasarana perekonomian, sementara pembangunan pada sisi pemulihan usaha belum mendapatkan perhatian memadai.

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Pariwisata, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, juga secara garis besar telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW).

Tabel 4. 17
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Pariwisata

Perubahan Rencana Induk	RENSTRA BRR 2005 – 2009	RPJMD 2007-2012	KOMITMEN DONOR/NGO
Rencana Induk sub-bidang pariwisata terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW), yang tidak ditemui pada Renstra BRR.	Sementara itu, pada Rencana Induk terdapat 2 (dua) Program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana; dan (2) Pengadaan sarana angkutan wisata darat, yang tidak terdapat pada Renstra BRR subbidang pariwisata. Adapun Program tersebut dijabarkan melalui kegiatan Pemugaran Kawasan Wisata di pulau Sabang, Pulau Banyak, Ujung Batee, Lampuuk, Kota Sabang, dan pengembangan sarana dan site plan wisata.	Prov.NAD : Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui: 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3. Pelatihan pemandu wisata terpadu Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui: 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2. Pembuatan Masterplan pengembangan kawasan wisata <u>Kab. Nias</u> : NA <u>Kab.Nias Selatan</u> : NA	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : Pemulihan sarana dan prasarana pariwisata di kab. Aceh besar; kota banda aceh; kab. Nias selatan, Kota sabang, Kab. Aceh singkil; kab. Aceh selatan; kab. Aceh barat daya; kab. Nagan raya Total komitmen awal keseluruhan sebesar 1,9 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pariwisata dengan 2 (dua) Program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana; dan (2) Pengadaan sarana angkutan wisata darat dengan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan utamanya untuk mengembalikan Daya tarik wisata. Kegiatan yang telah dan akan diprogramkan yaitu merealisasikan Pemugaran Kawasan Wisata di pulau Sabang, Pulau Banyak, Ujung Batee, Lampuuk, Kota Sabang, dan pengembangan sarana dan site plan wisata.

Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk melalui Program dan Kegiatan

dalam APBD tahun 2006 dan tahun 2007 terutama di Kab. Aceh Besar dan Kab. Aceh Singkil. Berbeda dengan rencana induk program dan kegiatan pada APBD telah merencanakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran dan promosi pariwisata. Terdapat pula kegiatan Pelatihan terpadu untuk meningkatkan kapasitas pemandu wisata. Adapun program dan kegiatan lainnya seperti, Pembangunan obyek wisata lampuuk dan Tahura Saree, Pembangunan sarana monumen penerbangan Kec. Sukamakmur, Pembinaan dan pergelaran kesenian tradisional, pemugaran cagar budaya Mesjid Bung Sidom dan Kuburan masal. Pemerintah Provinsi NAD juga telah merencanakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan dengan Rencana Induk, yang mencakup kegiatan pemulihan sarana dan prasarana pariwisata, yang dilaksanakan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNDP (United Nations Development Programme), FFI (Flora Fauna International), IFC (International Finance Corporation), LEAP (Local Empowerment Assistance Project Inc.), PanEco Foundation, AWSF (Aceh Water Sports Foundation) di berbagai Kab/Kota di Prov. NAD dan Kep. Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Perdagangan dan Perindustrian, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan untuk sub bidang perdagangan terdapat 5 (lima) program Sedangkan untuk sub bidang perindustrian terdapat 2 (dua) program. Program-program tersebut menekankan pada pemulihan sarana produksi dan sarana perdagangan guna peningkatan kapasitas/produktivitas produksi dan kelancaran aktivitas perdagangan.

Tabel 4. 18
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 - 2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
Di Perubahan Rencana Induk sub bidang perdagangan terdapat 5 (lima) program yaitu: (1) (Masa Tanggap Darurat: Tenda Pasar Darurat; (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi: (3) Pasar Tradisional Permanen; (4) Pasar Grosir/Induk; (5) Pergudangan; Kemetrolgian dan Koordinasi Posko Rencana Induk subbidang perindustrian terdapat 2 (dua) program yaitu (1) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristan; dan (2) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI.	Program pemulihan sub bidang perdagangan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti : Pembangunan /rehabilitasi pasar, dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving). Sedangkan program Bidang Perindustrian dilaksanakan melalui kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi pelabuhan Malahayati, BLM Masyarakat Industri, Penyediaan Fasilitas Industri, Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM	Prov. NAD : 1. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui perluasan pasar serta promosi 2. Peningkatan ekspor dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) 3. Pengembangan sentra industri potensial seperti makanan khas Aceh dan berbagai kerajinan <u>Kab. Nias</u> : NA <u>Kab. Nias Selatan</u> : Bantuan modal kerja industri rumah tangga	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : Penyediaan/pembangunan kembali pabrik, pemberian pinjaman lunak, pengembangan usaha skala kecil dan menengah, pengembangan kemitraan, lembaga keuangan mikro, penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional. Total komitmen awal keseluruhan sebesar 9,1 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang Perdagangan dan Perindustrian melalui beberapa kegiatan seperti: Pembangunan/rehabilitasi pasar, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving). Sedangkan pada Bidang Perindustrian melalui kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi pelabuhan malahayati, BLM Masyarakat Industri, Penyediaan Fasilitas Industri, Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM. Berbeda dengan rencana induk, program dan kegiatan pada Renstra BRR selain menekankan pada pembangunan fisik (Pasar) juga menekankan pada pemberian bantuan permodalan dan peralatan melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk, melalui kegiatan dan program dalam APBD tahun 2006 dan 2007 dengan menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan rencana induk, program dan kegiatan RPJMD Prov.NAD selain menekankan pada pembangunan fisik juga menekankan Peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui perluasan pasar serta promosi. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, seperti pemberian pinjaman lunak, dan penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional.

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Tenaga Kerja, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan untuk subbidang tenaga kerja terdapat 4 (empat) program dengan menekankan pada kegiatan pemulihan pendapatan masyarakat pasca bencana dan pelatihan tenaga kerja.

Tabel 4. 19
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Tenaga Kerja

Perubahan Rencana Induk	RENSTRA BRR 2005 – 2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
Rencana Induk subbidang tenaga kerja terdapat 5 (lima) program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik; (2) Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; dan (4) Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja.	Renstra BRR hanya terdapat 1 (satu) program yaitu Pemulihan Pendapatan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penyediaan lapangan kerja dan (2) Pelatihan	Prov. NAD: 1. Pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dengan membangun kemitraan dan program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja 2. Perluasan lapangan kerja Kab. Nias: Kab. Nias Selatan :	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : 1. Participants of vocational training 2. Extension, training, information and testing programmes established 3. Government officials participated in training 4. Vocational training organized (batch or time) 5. Worker for cash work programme 6. Workshops completed 7. Community development organization

Perubahan Rencana Induk	RENSTRA BRR 2005 – 2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
			established 8. Entrepreneur received grant 9. Employment programme implemented (Number of beneficiaries) 10. Equipment and supplies provided (Value USD) 11. People served 12. Research centers or laboratories supported/provided Total komitmen awal keseluruhan sebesar 32 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan Tenaga Kerja melalui 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penyediaan lapangan kerja dan (2) Pelatihan. Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk, melalui kegiatan dan program dalam APBD tahun 2006 dan 2007 dengan menekankan pada Memberikan bantuan/pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja (di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdy, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil), Pembuatan Kebun Cabe di Sabang, Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar; dan Perbaikan sarana publik, rehab jalan di Banda Aceh. Berbeda dengan rencana induk, program dan kegiatan pada baik pada Renstra BRR maupun RPJMD Prov.NAD belum mengakomodir Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, terutama pada program pelatihan tenaga kerja dan kegiatan "Cash for Work" dalam rangka pemulihan pendapatan. Adapun total komitmen awal lembaga donor/NGO dalam pemulihan ketenagakerjaan sebesar 32 juta USD.

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Koperasi & Usaha Kecil, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan untuk subbidang tenaga kerja terdapat terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik, dengan penekanan pada kegiatan bantuan kredit murah bergulir, pemberdayaan koperasi dan UKM, serta pembinaan kemitraan.

Tabel 4. 20
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Koperasi & Usaha Kecil

Perubahan Rencana Induk	RENSTRA BRR 2005 – 2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
Perubahan Rencana Induk Koperasi dan Usaha Kecil	Program dalam renstra BRR, yaitu :	Prov. NAD : Peningkatan	Program dan Kegiatan yang Direncanakan

Perubahan Rencana Induk	RENSTRA BRR 2005 – 2009	RPJMD 2007-2012	Komitmen Donor/NGO
terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik.	(1) Pemberian bantuan yg berkaitan dgn tanah yg tdk dpt digunakan sbg tempat permukiman & bantuan perumahan, sistem insentif kredit & bantuan teknis utk memperoleh akses kpd sumber daya produktif; (2) Pemberian bantuan Rp. 5 - 15 juta sbg pemulihan sarana atau utk melakukan kegiatan usaha dana pendamping (matching fund) dan (3) Pemberian hibah langsung, maksimal Rp. 2 juta. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan dilapangan, yaitu : Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat, Aceh Micro Finance, Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM, Kelembagaan koperasi terpadu, Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat, Melalui Koperasi Terpadu, dan Modal UKM Integrated Trading House.	kualitas kelembagaan koperasi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro dan Menengah. Kab. Nias : Kerjasama degan pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dari luar daerah. Kab. Nias Selatan : NA	oleh Lebag donor/NGO dalam pemulihan koperasi dan pengembangan UKM, yaitu: - Loans provided to medium business (loan > IDR 50 Million) - Loans provided to micro business (loan < 5 million) - Loans provided to small business (loan IDR 5-50 million) - Micro business developed - Partnership established - Business developed - Microfinance institutions supported/established. Total komitmen awal keseluruhan sebesar 173 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan koperasi dan UKM melalui berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat, Aceh Micro Finance, Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM, Kelembagaan koperasi terpadu, Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat, Melalui Koperasi Terpadu, dan Modal UKM Integrated Trading House. Namun berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas, kegiatan kemitraan (Partnership) antara UKM dengan Industri besar (bapak asuh) belum ada.

Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk, melalui kegiatan dan program dalam APBD tahun 2006 dan 2007 dengan berbagai kegiatan seperti penataan dan penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, monitoring dan evaluasi perkoperasian, pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan, penguatan modal usaha sarana bagi UKI, bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syari'ah, analisis diklat bagi Koperasi dan UKM, peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, terutama pada program kredit mikro. Adapun total komitmen awal lembaga donor/NGO dalam pemulihan ketenagakerjaan sebesar 32 juta USD.

IV.1.1.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Kelembagaan dan Hukum Menjadi Bagian Penting

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara, bidang kelembagaan dan hukum menjadi penting dalam Pemantapan Pengendalian dan Proses Peralihan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, dan Peningkatan Koordinasi antar Pelaku Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, melalui:

- Tersedianya sarana kerja pemerintah untuk 545 daerah dan 5 unit peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.
- Tersedianya sarana dan prasarana sistem kehumasan untuk 15 Kantor Pemda, dan 27 forum komunikasi.
- Terbangunnya 15 kantor/gedung pemerintah termasuk 68 gedung mukim, 13 rumah negara, dan kantor penyelenggaraan pemerintah lainnya
- Semakin baiknya kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat.

Sumber : Renja BRR NAD-Nias Tahun 2008

BRR NAD-Nias tetap konsisten dalam menggunakan dokumen perencanaan yang telah diatur oleh pemerintah, seperti RKP Tahun 2007 dan RKP 2008 di bidang kelembagaan dan hukum, disamping itu BRR juga mempunyai prioritas-prioritas tertentu dalam mengejar target penyelesaian sasaran yang telah di bagi kedalam beberapa tahapan dalam setiap tahunnya. Dokumen perencanaan di bidang kelembagaan, hukum dan ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (K3M) disusun melalui Kedeputan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dn UU NO. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja-KL. Selain merujuk kepada Rencana Kerja Pemerintah, BRR NAD-Nias juga mendapat amanat untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 47 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari Pepres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Sebagaimana tertera dalam lampiran Pepres Nomor 47 Tahun 2008, bahwa tahun 2008 merupakan tahun terakhir penyelesaian terhadap seluruh program/kegiatan di bidang kelembagaan dan hukum, sehingga tidak ada yang tersisa untuk tahun 2009. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sudah tercantum dalam **Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008**, yaitu pada prioritas 8 Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular dan pada fokus 1 a yaitu percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias.

Dokumen perencanaan baik yang dimiliki oleh BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO secara garis besar telah mengacu kepada Rencana Induk, jadi dapat dikatakan sudah konsisten. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR, Pemda dan Donor/NGO dalam penyusunan dokumen perencanaan di bidang Kelembagaan dan hukum dilakukan dengan karakteristik dan proses yang berbeda di setiap daerah. Keterkaitan Rencana Induk dengan **RPJMD atau RKP Daerah** yaitu Dokumen RPJMD atau RKP D NAD-Nias secara umum mayoritas kegiatan yang diprogramkan telah terkait. Walaupun akibat keterbatasan anggaran maka beberapa kegiatan dilaksanakan melalui anggaran/kegiatan BRR maupun lembaga donor/NGO.

Tabel 4. 21
Konsistensi Antar Perencanaan Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Konsistensi Antar Perencanaan
Kota Banda Aceh	Dari segi perencanaan pihak Pemko Banda Aceh yang memiliki jumlah APBD kecil masih mengalami kendala, dimana dana Otonomi Khusus yang diperoleh Pemko Banda Aceh masih dibatasi penggunaannya, contoh: tidak boleh dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah.

Lokasi Sampel	Konsistensi Antar Perencanaan
Aceh Besar	1. Bappeda turut terlibat pada penyusunan Rencana Induk, namun dalam pelaksanaannya banyak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, Rencana Induk tidak dapat dilihat secara utuh. 2. Penyusunan program kegiatan Dinas Kesbanglinmas mengacu pada perencanaan dari Provinsi dan Satlak. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, dinas tidak dilibatkan, padahal jelas ada 3 sub bidang yang jabatannya mengacu pada rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Perencanaan Pemda bersifat *bottom up*, perencanaan RKPD mengacu kepada RPJMD telah mengarah ke dalam tata pemerintahan dan sistem kelembagaan yang lebih baik pada pascabencana, dimana dilengkapi dengan strategi yang jelas dan program-program yang berdasarkan target dan mencerminkan prioritas pembangunan. Tabel berikut menunjukkan tingkat konsistensi pada sub bidang kelembagaan daerah:

Tabel 4. 22
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Kelembagaan Daerah

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-NIAS	Komitmen DONOR/NGO
Kelembagaan Daerah : 1. Perencanaan dan pembangunan Kantor KDH/ DPRD/Dinas/ Meuligo, 2. Pembangunan kantor & rumdin camat, desa/ kelurahan. 3. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat pemda 4. Penanganan masalah administrasi kepegawaian 5. Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda 6. Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai 7. Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda 8. Penyelamatan Administrasi Pemerintahan 9. Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda 10. Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda 11. Penataan SisKom Humas daerah (media centre) 12. BOP Kecamatan/ Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam) kab/ kec 13. Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong kab/ Kec 14. Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah 15. Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD 16. Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Pembangunan kantor desa dan kantor pemerintahan: 1. Pembangunan gedung khusus 2. Pembangunan/ rehabilitasi gedung kantor pemerintah 3. Penyediaan alat laboratorium Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan 2. Pelaksanaan kapasitas kelembagaan 3. Penyediaan sarana dan prasarana Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif di sektor pemerintahan 1. Penyediaan sarana dan prasarana 2. Pencapaian peningkatan SDM 3. Pelaksanaan kegiatan program kelembagaan dan SDM	Prov.NAD (2007-2012): Bidang Pemerintahan, melalui Program: 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 5. Penataan Otonomi Baru 6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan Kelurahan 7. Pengembangan Data/Informasi 8. Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH 10. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 11. Pendidikan Kedinasan 12. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 13. Pembinaan dan Pengembangan	Komitmen Donor/NGO berdasarkan RAN Database BRR: 1. Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk pemerintahan 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pemerintahan melalui training; kajian; penelitian; seminar; kursus; TA; pendidikan. 3. Penyediaan tenaga ahli; fasilitator dan pendamping dalam pemerintahan

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-NIAS	Komitmen DONOR/NGO
17. Optimalisasi Kerjasama antara Daerah 18. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah 19. Penataan Administrasi Kependudukan 20. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 21. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 22. Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy. 23. FKK Stakeholder RR 24. Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD 25. Harmonisasi Peraturan di Aceh		Aparatur 14. Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur dan Non Aparatur 15. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 16. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip 17. Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 18. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kab.Nias (2006-2011) : Pemerintahan Umum, melalui Program: 1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3. Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah 4. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten 5. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 6. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 10. Pengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat 11. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 12. Penataan peraturan perundang-undangan 13. Penataan daerah	

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-NIAS	Komitmen DONOR/NGO
		otonomi baru Kepegawaian, melalui Program: 1. Pendidikan kedinasan 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui Program: 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2. Pengembangan ekonomi pedesaan 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5. Peningkatan peran perempuan di perdesaan Statistik, melalui Program: 1. Pengembangan data/informasi/statistik daerah Kearsipan, melalui Program: 1. Perbaikan sistem administrasi kearsipan 2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi Kab. Nias Selatan (2006-2011): Pembangunan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, melalui Program: 1. Penerapan tata pemerintahan yang baik 2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah 3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 4. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Peningkatan sarana dan	

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-NIAS	Komitmen DONOR/NGO
		prasarana aparatur daerah	

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas, 2008

Ditingkat Pemerintah Daerah, program/kegiatan dibidang kelembagaan, hukum dan K3M di programkan melalui dinas/badan yang disebut kesbanglinmas untuk kelembagaan dan paperda untuk hukum. Namun pada beberapa daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya sejak mulai dibentuknya pada awal tahun 2000 hingga akhir tahun 2008 belum memiliki badan ini karena belum dinilai penting keberadaannya. Karena saat ini kabupaten Aceh Jaya masih fokus dalam pengembangan di bidang ekonomi dan infrastruktur. Namun untuk dinas/badan lain yang ada di Aceh Jaya dalam menyusun perencanaan merujuk RPJM Kabupaten/ RKPD. Dari tabel diatas secara umum terlihat konsistensi dengan Rencana Induk seperti pada beberapa program di sub bidang kelembagaan daerah yang dilaksanakan oleh BRR, Pemda dan Donor/NGO, yaitu dalam rencana induk menyebutkan tentang *Pemberdayaan dan fasilitasi aparat pemda, Penanganan masalah administrasi kepegawaian, Penataan dan Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai*, tugas ini diwujudkan melalui Renstra BRR yaitu pembangunan kelembagaan pemerintah seperti *kantor desa dan kantor pemerintahan, penguatan terhadap kapasitas aparatur pemerintahan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif di sektor pemerintahan*. Hal ini sejalan dengan yang dilaksanakan Pemda NAD-Nias dengan merencanakan *Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, termasuk penerapan sistem dan tata pemerintahan yang baik*. Lembaga Donor/NGO juga berkomitmen dalam mendukung program tersebut, melalui *Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk pemerintahan; Peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pemerintahan melalui training; kajian; penelitian; seminar; kursus; TA; pendidikan; serta Penyediaan tenaga ahli; fasilitator dan pendamping dalam pemerintahan*. Lain halnya dengan tingkat konsistensi dalam sub bidang hukum:

Tabel 4. 23
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Hukum

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
Hukum 1. Kejati, Kejari di Provinsi NAD 2. Pembangunan Rumah Dinas, peralatan dan kendaraan Jaksa 3. Pembangunan Rumah dinas, lapas/ rutan 4. Rehabilitasi kanwil depkumham dan kantor imigrasi 5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pengadilan negeri, mahkamah syariah, pengadilan militer dan termasuk kendaraan dan peralatan kantor.	Peningkatan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat 1. Pelaksanaan operasi kepolisian 2. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga 3. Pelaksanaan pembinaan hukum Aceh.	Prov.NAD (2007-2012): Bidang Hukum, melalui Program: 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Penyiapan Rancangan Qanun dan Peraturan Pelaksanaan Syariat Islam Kab. Nias (2006-2011): Tidak mencantumkan secara khusus prioritas program di bidang hukum. Kab. Nias Selatan (2006-2011): Hukum, melalui Program: 1. Perencanaan hukum 2. Pembinaan peraturan daerah 3. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM 4. Pelayanan dan bantuan hukum	Komitmen Donor/NGO berdasarkan RAN Database BRR: Rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan hukum dan Pembahasan tentang hukum serta reformasi terhadap tatanan hukum.

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-Nias	Komitmen Donor/NGO
		5. Penegakan hukum dan HAM 6. Peningkatan kualitas profesi hukum 7. Pembinaan sarana dan prasarana hukum	

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Berdasarkan tabel diatas secara umum terlihat tingkat konsistensi program/kegiatan dengan yang tercantum dalam Rencana Induk seperti pada beberapa program di sub bidang hukum yang dilaksanakan oleh BRR, Pemda dan Donor/NGO, yaitu dalam rencana induk menyebutkan tentang *Rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap beberapa lembaga penanganan hukum di Aceh dan Nias seperti Pembangunan Rumah dinas, lapas/rutan; Rehabilitasi kanwil depkumham dan kantor imigrasi; serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi pengadilan negeri, mahkamah syariah, pengadilan militer dan termasuk kendaraan dan peralatan kantor.* Penyusunan program ini diwujudkan dalam Renstra BRR melalui *terlaksananya pemberdayaan lembaga penegak hukum dan terlaksananya pembinaan hukum Aceh.* Dalam rencana jangka menengah Pemda NAD-Nias memprogramkan tentang *pentingnya penataan peraturan perundang-undangan; Penyiapan Rancangan Qanun dan Peraturan Pelaksanaan Syariat Islam; Peningkatan kesadaran hukum dan HAM; Pelayanan dan bantuan hukum; Penegakan hukum dan HAM; Peningkatan kualitas profesi hukum; dan Pembinaan sarana dan prasarana hukum.* Lembaga Donor/NGO juga berkomitmen dalam mendukung program tersebut, melalui *rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan hukum dan Pembahasan tentang hukum serta reformasi terhadap tatanan hukum.* Sedangkan dalam sub bidang K3M:

Tabel 4. 24
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang K3M

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-NIAS	Komitmen DONOR/NGO
K3M 1. Rehabilitasi Kantor Menkopolhukam, dinas infokom, Stasiun RRI, Transmisi TVRI, PWI, Mapolda, Brimobda 2. Rekonstruksi Rumdin, pengadaan material Alpal, kendaraan roda 2 dan roda 4 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengadaan perlengkapan Kodim, kompi dan Lanud. 4. Pengadaan bidang bekal umum, faskon, kesehatan, dan alkon.	Pemulihan dan Pembangunan infrastruktur gedung pemerintahan dan prasarana 1. Pembangunan/ rehab bangunan negara. 2. Pelaksanaan pembangunan gedung kantor 3. Penyediaan rumah negara 4. Penyediaan prasarana Membangun kepercayaan masyarakat 1. Pelaksanaan kegiatan seminar/ diskusi/ konferensi 2. Penyediaan sarana dan prasarana hankam 3. Pelaksanaan penyebaran informasi 4. Pelaksanaan penelitian dan	Prov.NAD (2007-2012): Bidang Politik, melalui Program: 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 6. Pendidikan Politik Masyarakat Kab.Nias (2006-2011): Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, melalui Program: 1. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Komitmen Donor/NGO berdasarkan RAN Database BRR: 1. Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk pemerintahan 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pemerintahan melalui training; kajian; penelitian; seminar; kursus; TA; pendidikan.

Perubahan Rencana Induk	Renstra BRR 2005 – 2009	RPJMD NAD-NIAS	Komitmen DONOR/NGO
	pengembangan hukum.	2. Pemeliharaan kantribnas dan pencegahan tindak kriminal 3. Pengembangan wawasan kebangsaan 4. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 7. Pendidikan politik masyarakat 8. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Komunikasi dan Informatika, melalui Program: 1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 4. Kerjasama informasi dengan mass media. Kab. Nias Selatan (2006-2011): Politik, melalui Program: 1. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik 2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 3. Pembinaan otonomi daerah 4. Penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi dan hubungan antar lembaga 5. Pembinaan peraturan daerah	

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Tabel diatas menggambarkan perencanaan pada sub bidang K3M diatas secara umum menunjukkan beberapa sinkrosisasi program yang direncanakan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Induk seperti pada beberapa program di sub bidang K3M yang dilaksanakan oleh BRR, Pemda dan Donor/NGO, yaitu kegiatan dalam *program Rehabilitasi Kantor Menkopolhukam, Dinas Infokom, Stasiun RRI, Transmisi TVRI, PWI, Mapolda, Brimobda; Rekonstruksi Rumdin, pengadaan material Alpal, kendaraan roda 2 dan roda 4; dan Rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengadaan perlengkapan Kodim, Kompi dan Lanud*. Penyusunan program ini diwujudkan dalam Renstra BRR melalui *pulihnya dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintahan dan*

prasarana; serta terbangunnya kembali kepercayaan masyarakat. Pemda NAD dan Pemda Kab. Nias dan Nias Selatan memprogramkan tentang *Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; dan Pendidikan Politik Masyarakat.* Sedangkan Lembaga Donor/NGO juga berkomitmen dalam *Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk pemerintahan; serta peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pemerintahan melalui training; kajian; penelitian; seminar; kursus; Technical Asisstant; pendidikan.*

Gambaran lain tentang proses perencanaan yang dilaksanakan di Aceh Besar, walaupun RPJM/RKPD dirasakan tidak saling berkaitan dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Keberadaan Badan Kesbanglinmas di Aceh Besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh Besar, selain karena badan tersebut menjadi satlak dalam penanggulangan bencana, badan tersebut juga bertanggung jawab dalam memantau kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan bencana melalui Bidang Penanggulangan Bencana yang berada dalam struktur badan tersebut. Dalam penyusunan perencanaan Badan ini juga mengacu pada perencanaan dari Provinsi dan Satlak. Namun untuk perencanaan dalam program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertera secara khusus dalam dokumen perencanaan dari badan ini.

Mayoritas dari Lembaga Donor/NGO yang *concern* di bidang K3M hingga akhir tahun 2008 belum secara khusus menggunakan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah, mereka menggunakan perencanaan berdasarkan *assessment* terhadap masyarakat, dan donor/NGO berkomitmen dengan tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari lembaga pemerintah dalam rangka penyamaan visi dalam pembangunan kembali Aceh-Nias. Kegiatan menyerap masukan-masukan dari pemerintah, dilakukan oleh lembaga donor/NGO secara rutin melalui berkonsultasi dengan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Setelah mendapat hasil dari *assessment* tersebut kemudian ditetapkan prioritas, sasaran, dan target penyelesaian program/ kegiatan.

IV.1.2 Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan

IV.1.2.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan bidang perumahan dan permukiman merupakan analisa kesesuaian yang dilihat dari program/kegiatan yang ada pada Perubahan Rencana Induk yang disusun oleh Pemerintah (Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008) dengan pelaksanaan perumahan dan permukiman, tata ruang, dan pertanahan yang dilakukan oleh BRR dan Donor/NGO di tahun 2007 - 2008.

Dari hasil analisa, diketahui bahwa konsistensi atau kesesuaian antar perencanaan dan pelaksanaan hampir dapat terlaksana dengan baik. Dikatakan hampir karena dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahun 2008 tidak dapat seluruh kegiatannya terealisasi, tetapi masih terdapat sisa untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2009.

Tabel
Evaluasi Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan
Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			

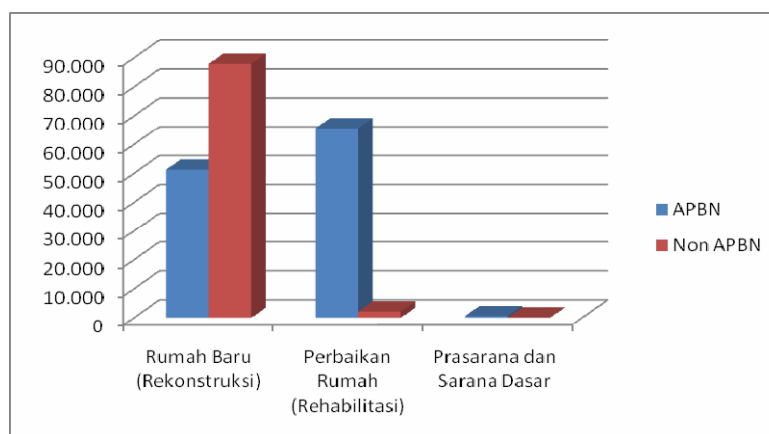
Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007-2008

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Realisasi 2005-2008		Total Realisasi 2005-2008	Sisa RR 2009	Instansi Pelaksana
				APBN	Non APBN			
Perumahan dan Permukiman								
1	Rumah Baru (Rekonstruksi)	Unit	139,195	51,253	87,942	139,195	-	
2	Perbaikan Rumah (Rehabilitasi)	Unit	67,850	65,674	2,176	67,850	3792*)	*) Tambahan Dana Rp,7,5jt /unit NAD/ Nias
3	Prasarana dan Sarana Dasar	desa	647	560	87	647	2*)	NAD/ Nias
Tata Ruang								
1	Rencana Pengembangan Desa (Village Planning) : - Rencana Desa (<i>Village Planing</i>)	Desa	647	158	489	647	-	
2	Penyusunan Pedoman : - Perencanaan Desa	Paket	2	1	1	2	-	
Pertanahan								
1	Pembangunan fisik kadastral: - Ajudikasi	bidang	330,000	220,662	0	220,662	109,338	BPN Kab/ Kota *) RKP 2009, program RALAS
2	Pembuatan sertifikat pengganti	Kab/Kota	13	1		1	12	BPN Kab/ Kota *) RKP 2009, program RALAS
	- Sertifikat Pengganti	Sertifikat	10,000	178		178	9.822	BPN Kab/ Kota. *) RKP 2009, program RALAS

Sumber : Pusdatin BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sub bidang Perumahan dan Permukiman telah menyelesaikan seluruh rekonstruksi rumah baru sesuai dengan sasaran dari revisi Rencana Induk, yaitu sebanyak 139.195 unit. Rekonstruksi ini dilakukan oleh BRR (pembiayaan dari APBN) dan Donor/NGO (pembiayaan non-APBN). Hasil need assessment bidang perumahan dan permukiman untuk tahun 2005 - 2008 berdasarkan pembiayaan APBN dan Non-APBN ditunjukkan pada gambar dibawah. Untuk rehabilitasi rumah terjadi perbedaan pada tambahan dana untuk Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) di NAD - Nias. Menurut data dari Pusdatin BRR NAD - Nias status Agustus 2008 sebanyak 3.792 unit rumah akan dikerjakan pembangunannya pada tahun 2009 dengan mendapat tambahan dana sebesar Rp. 7,5 juta per unit rumah. Sedangkan berdasarkan Laporan Semesteran BRR 2008, untuk peluncuran BSPR disalurkan dana sebesar Rp. 2,5 juta untuk 48.579 Kepala Keluarga dengan penerima manfaat 37.264 KK di NAD dan 11.315 KK di Nias. Dan untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar, ada penambahan 2 desa di NAD dan Nias.

Gambar 4. 1
Perbandingan Realisasi Bidang Perumahan 2005 – 2008 berdasarkan
Pembiayaan APBN dan Non APBN



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

Sub bidang Tata Ruang telah dengan baik mencapai 100 % realisasi pada seluruh kegiatannya.

Kekurangan dapat dilihat pada sub bidang Pertanahan, dimana kegiatan masih harus dilanjutkan di tahun 2009, penjelasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan fisik kadastral (ajudikasi) dari 330.000 bidang yang akan dilakukan baru sebanyak 220.662 bidang yang terealisasi untuk tahun 2005 - 2008. Sisa sebanyak 109.338 bidang tanah harus dilanjutkan pada tahun 2009.
2. Pembuatan sertifikat pengganti yang direncanakan untuk 13 kabupaten/kota terlaksana hanya untuk 1 lokasi, dengan sisa 12 kabupaten/kota yang harus diselesaikan tahun 2009.
3. Sertifikat pengganti direncanakan 10.000 sertifikat, tetapi hanya dapat didistribusikan sebanyak 178 sertifikat dengan menyisakan 9.822 sertifikat.

Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut di tahun 2009 akan dilakukan oleh BPN Kabupaten/Kota dengan program RALAS.

IV.1.2.2 Bidang Infrastruktur

Pemulihan bidang infrastruktur terdiri dari jalan dan jembatan, perhubungan, sumber daya air, energi dan listrik, pos dan telematika, bangunan fasilitas umum, pemeliharaan, dan IREP. Penelusuran konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan yaitu melalui identifikasi sisi perencanaan yang tercantum di dalam Rencana Induk dengan pelaksanaan oleh BRR, Pemda, dan Donor/NGO hingga Agustus 2008. Dari hasil analisis, terdapat beberapa poin mengenai konsistensi antar perencanaan dan pelaksanaan bidang infrastruktur oleh BRR, walaupun dalam pelaksanaannya belum selesai 100 % namun sudah mengacu kepada perencanaan dalam revisi rencana induk.

Tabel 4. 25
Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan
Bidang Infrastruktur yang Belum Selesai

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Sasaran RR 2005-2008	SISA RR 2009	Instansi Pelaksana
Jalan dan Jembatan						
1	Lintas Barat NAD (Jalan Nasional)	km	702	702	-	Dinas PU
2	Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional)	km	191	88	103	65 Km RKP 2009 Dinas PU NAD/NIAS
3	Jalan Propinsi P. Nias	km	469	359	110	47 Km RKP 2009 Dinas PU NAD/NIAS
4	Jalan Kabupaten NAD dan	km	3,511	2,047	1,464	339 Km RKP 2009 Dinas PU

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Sasaran RR 2005-2008	SISA RR 2009	Instansi Pelaksana
	Nias					NAD/NIAS
Perhubungan						
1	Pembangunan Terminal dan stasiun/Pool Damri	unit	16	16	3	RKP 2009 Dept. Hub
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	unit	2	2	1	RKP 2009 Dept. Hub
3	Pelabuhan Laut	unit	16	16	4	RKP 2009 Dept. Hub
4	Rehabilitasi-rekonstruksi Bandara	unit	9	9	1	RKP 2009 Dept. Hub
Sumber daya air						
1	Irigasi	ha	121,884	121,884	1695	Pemprov NAD
2	Pengamanan Pantai	m	72,454	72,454	5000	Pemprov NAD
3	Pengendalian Banjir	m	98,765	98,765	4120	Pemprov NAD
4	Tempat Pembuangan Akhir Sampah	unit	7	7	1	Pemprov NAD
5	Drainase	m'	200,000	200,000	3000	Pemprov NAD
Pos dan Telematika						
1	Fasilitas Telematika	paket	12	12	1	Dept. Kom Info
IREP						
1	Program Manajemen Infrastruktur	Paket	1	1	1	Dept. Pekerjaan Umum
2	Perencanaan Infrastruktur dan Fasilitas, Desain, Konstruksi dan Pengawasan Infrastruktur Pantai Barat	Paket	1	1	1	Dept. Pekerjaan Umum
3	Perencanaan, Desain dan Pengawasan Konstruksi Infrastruktur Nias	Paket	1	1	1	Dept. Pekerjaan Umum
4	Perencanaan, Desain, Pelelangan, dan Pengawasan Konstruksi serta Peningkatan kapasitas bagi infrastruktur strategis di tingkat provinsi	Paket	1	1	1	Dept. Pekerjaan Umum
5	Manajemen Keuangan untuk Proyek Keuangan BRR	Paket	1	1	1	Dept. Pekerjaan Umum

Sumber: BRR NAD Nias, Agustus 2008

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan bidang infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 26
Konsistensi Antar Perencanaan dan Pelaksana Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi dalam Perencanaan
Provinsi NAD	Berdasarkan informasi dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi NAD pelaksanaan di lapangan yang belum terealisasi 100 persen dikarenakan adanya kendala oleh beberapa hal: 1. Pembangunan jalan terhambat/dibatalkan karena berlokasi di daerah hutan lindung (misalnya cagar alam pinus dan ekosistem leuser), padahal masyarakat membutuhkan jalan yang membutuhkan antar wilayah tersebut (Jantho-Keumala) 2. Masalah pembebasan tanah untuk infrastruktur adalah kendala yang sering terjadi di lapangan. Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan dana untuk pembebasan tanah tersebut, namun mayoritas harga tanah sudah naik terutama di sepanjang Banda Aceh-Meulaboh yang dibangun oleh USAID. Selain itu juga banyak juga kasus sengketa tanah dan Pemda menindaklanjutinya dengan pendekatan/negosiasi dengan masyarakat, apabila tidak berhasil maka ditempuh melalui pengadilan atau jalur hukum 3. Salah satu dampak rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kabupaten Aceh Besar yaitu ada jalan

Lokasi Sampel	Koordinasi dalam Perencanaan
	(yang tidak terkena tsunami) yang rusak berat yaitu jalan yang menuju Jantho karena mengangkut bahan galian C untuk Kota Banda Aceh. Perbaikan jalan akan menggunakan dana APBN (tahun 2008-2009) karena merupakan jalan provinsi. 4. Kendala pada anggaran terbatas, sehingga perencanaan dan pelaksanaan dilakukan pada tahun yang sama, namun tahun ini mekanisme perencanaan sudah berjalan normal karena anggaran sudah tersedia. Mulai tahun 2008 Aceh sudah kembali ke keadaan normal/reguler, dimana Dinas sudah bisa merencanakan kegiatan untuk 5 tahun ke depan. Permasalahan yang muncul di lapangan yang dihadapi USAID antara lain pembebasan lahan serta keamanan lingkungan sekitar yang menyebabkan pembangunan terhambat. Penyediaan tanah merupakan tugas Pemda dan biasanya Pemda yang bernegosiasi dengan masyarakat. Saat ini kurang lebih ada 20 kasus sengketa tanah sepanjang Banda Aceh-Lhoong, di daerah kasusnya Calang lebih banyak lagi Hal ini kemudian diselesaikan di tingkat kecamatan atau melalui jalur hukum/pengadilan. Kasus tersebut menyebabkan pemerintah membayar tanah 2 kali lipat dari biasanya, dan USAID pun sudah membantu memberikan dana sebesar 60 juta USD untuk pembebasan lahan.
Aceh Besar	Berdasarkan informasi dari Dinas Kimpraswil Aceh Besar : 1. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan terjal dengan baik, dan harus didukung dengan pengawasan. BRR memiliki tim teknis pengawasan sendiri untuk jalan provinsi namun untuk jalan kabupaten/kota, Dinas turut terlibat dalam pengawasannya. 2. Permasalahan di lapangan yang dihadapi BRR misalnya Satker BRR-perumahan dan permukiman sudah membangun jalan lingkungan perumahan namun jalan kabupaten yang menghubungkan ke kompleks perumahan tersebut belum dibangun oleh Satker BRR-jalan kabupaten
Aceh Jaya	1. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BRR Aceh Jaya mayoritas berlangsung dengan baik di lapangan 2. Pelaksanaan kegiatan Dinas Kimpraswil Aceh Jaya tidak terealisasi 100 persen yang dikarenakan permasalahan administrasi misalnya ada beberapa paket kegiatan yang masih dalam tahap tender 3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Aceh Jaya masih terkendala, karena keterbatasan SDM

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

A. Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan dan jembatan sudah selesai untuk jalan lintas timur dan lintas lainnya di NAD (jalan provinsi) sudah selesai, sedangkan yang belum selesai 100 % terutama pada jalan lintas barat NAD, Lintas tengah NAD (88 km dari 191 km yang direncanakan), jalan provinsi di Kepulauan Nias (359 km dari 469 km yang direncanakan), dan jalan kabupaten NAD-Nias (2.047 km dari 3.511 km yang direncanakan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Kedeputian Operasi BRR, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan nasional (lintas barat) yang dibangun USAID dalam awal perencanaan sudah diperkirakan membutuhkan waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) tahun, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi untuk ruas jalan ini tidak akan selesai hingga tahun 2008 ini dan masih akan berlanjut hingga tahun 2009. Selain itu pelaksanaan ini terhambat pada pembebasan tanah yaitu banyaknya spekulasi-spekulasi tanah yang menyebabkan harga tanah sangat tinggi/tidak wajar. Penerapan harga ganti rugi terhadap pembebasan tanah ini menggunakan standar di atas harga NGOP. Oleh karena itu, pembebasan tanah ini selain ditanggung Pemda, juga ditanggung oleh BRR dan USAID.

Sisa pekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan pada tahun 2009 oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangan, misalnya jalan lintas barat akan dilanjutkan oleh Departemen PU hingga 2010, jalan lainnya oleh Pemda (Dinas PU NAD-Nias), antara lain untuk tahun 2009 sepanjang 65 km lintas tengah, 47 km jalan provinsi di Kepulauan Nias, dan 339 km untuk jalan kabupaten NAD-

Nias, hal ini sudah tercantum dalam RKP 2009. Jalan lainnya tentunya akan diselesaikan pada tahun 2010.

B. Perhubungan

Pada sub bidang **transportasi darat dan LLAJR**, 100 % kegiatan telah selesai misalnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana keselamatan LLAJ (rambu, *traffic light*, pagar, patok, lampu), pengadaan bus bantuan, dan pembangunan halte bus. Untuk pembangunan terminal dan stasiun/pool damri dan gedung pengujian kendaraan bermotor belum selesai 100 % hingga akhir Desember 2008 dan akan dilanjutkan oleh Departemen Perhubungan pada tahun 2009. Untuk sub bidang **transportasi laut dan ASDP**, 8 pelabuhan fery telah selesai dibangun, namun dari 16 pembangunan pelabuhan laut di NAD dan Nias, ada 4 pelabuhan besar yang pembangunan fisiknya blm selesai, dan akan dilanjutkan oleh Departemen PU, yaitu Pelabuhan Malahayati, Lhokseumawe, Kuala Langsa, dan Calang. Pada sub bidang **transportasi udara**, pembangunan 3 airstrip dan 1 helipad, dan 8 bandara sudah selesai, sedangkan 1 bandara yaitu bandara SIM akan dilanjutkan pembangunannya oleh Departemen Perhubungan pada tahun 2009 karena bandara tersebut belum selesai 100 % yaitu dalam tahap pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya.

C. Sumber daya air

Kegiatan di sub bidang sumber daya air banyak mendapatkan perhatian dari BRR, karena peningkatan dan perbaikan irigasi membantu masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan perekonomian daerah. Sistem pengendalian banjir di beberapa daerah sudah selesai diperbaiki, meskipun di beberapa kawasan masih mengalami banjir. Program pengendalian banjir dimaksudkan untuk melindungi komunitas masyarakat yang paling rentan terhadap banjir melalui pembangunan tanggul, pemasangan katup pengendali banjir dan perbaikan stasiun pompa di berbagai area yang rawan banjir karena hujan dan banjir karena luapan air sungai dan gelombang pasang. Kemajuan pelaksanaan sebagian besar telah selesai, namun hingga Desember 2008 ada beberapa kegiatan yang harus dilanjutkan oleh Pemda, diantaranya **irigasi** seluas 1695 Ha, pengaman **pantai** sepanjang 5000 m, **pengendali banjir** 4120 m.

Pada sub bidang **air bersih** telah selesai penyediaan air bersih 1.30 lt/detik, dan IPLT sebanyak 6 unit, sedangkan yang akan dilanjutkan oleh Pemda dikarenakan belum selesai yaitu 1 unit TPA (dari 7 unit) dan 3000 m saluran **drainase** (dari 200.000 unit). Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

D. Energi dan Listrik

Pemulihan di bidang energy dan listrik dilaksanakan secara terpadu walaupun kapasitas dan kuantitasnya belum mencakup seluruh daerah. Pembangunan pembangkit tenaga listrik seperti PLTD, PLTA, PLTMH, PLTS, PLTGU juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pembangunan ini telah selesai 100 % hingga desember 2008. Dalam pelaksanaannya BRR juga bekerjasama dengan PT PLN, terutama dalam percepatan distribusi jaringan listrik ke daerah-daerah pedalaman. Di bidang energi, BRR juga bekerja sama dengan Pertamina dalam menyupply BBM melalui depo bangunan, gedung ESDM dan pemantau gunung api. Secara umum, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonsrtruksi konsisten dengan target yang tercantum di dalam Rencana Induk

E. Pos dan telematika

Kemajuan telekomunikasi sudah membaik pasca tsunami, terutama di daerah sekitarp usat-pusat kota, namun di daerah luar pusat kota jaringan telekomunikasi belum terjangkau. Peran industry telekomunikasi paling dominan tanpa begantung secara langsung kepada pemerintah. Peran pemerintah melalui BRR yaitu megembangkan jaringan melalui pembangunan pusat-pusat telekomunikasi di daerah, dan juga pembangunan kantor SAR, meterorologi dan geofisika, fastel desa PFS-PASTi dan radio, PS RRI-TVRI, radio broadcast system peringatan diri (EWS),

pembangunan infrastruktur WIMAX NAD-Nias, serta fasilitas telematika. Untuk fasilitas telematika ini dari 12 paket yang direncanakan, ada 1 paket yang akan dilanjutkan oleh depkominfo.

F. Bangunan Fasilitas Umum

Dalam rencana induk disebutkan bahwa akan dibangun escape building dan prasarana penunjangnya (rambu, *escape road*, dll), dan hingga Desember 2008 pembangunan bangunan fasilitas publik tersebut sudah selesai diantaranya pembangunan pusat pelatihan mitigasi bencana, *escape building*, museum tsunami, dan pusat kualitas struktur dan laboratorium.

G. Pemeliharaan

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan untuk menunjang rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai dilaksanakan pada Desember 2008. BRR telah memberikan dukungan program melalui pembentukan unit swakelola dan dukungan melalui pedoman dan peraturan bagi penguatan tim swakelola, studi pemeliharaan infrastruktur, perlengkapan laboratorium, perlengkapan komponen jembatan, pelatihan teknis laboratorium di kabupaten dan staf komponen jembatan, pembelian suku cadang untuk komponen jembatan pemeliharaan aset infrastruktur kabupaten/kota, dan perlengkapan berat untuk pemeliharaan rutin kabupaten/kota. Dengan dukungan pemeliharaan ini kepada Pemda, diharapkan pasca BRR, Pemda dapat melaksanakan pemeliharaan terhadap hasil rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada pemeliharaan infrastruktur.

H. IREP

Kegiatan IREP dilaksanakan oleh 5 konsultan yang merupakan hasil kerjasama BRR dengan Bank Dunia. Pelaksanaan IREP hingga bulan Desember 2009 belum selesai, karena kegiatan infrastruktur untuk NAD-Nias akan terus berlanjut. Pelaksanaan IREP direncanakan hingga Juni 2010 untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur oleh Departemen PU sebagai *executing agency*.

IV.1.2.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Pada bagian konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan dapat diukur seberapa kesenjangan dari kondisi awal. Dari hasil hasil perbandingan ini dapat diketahui kemungkinannya terjadi sisa kegiatan yang masih perlu diselesaikan lagi. Secara detail dapat dicermati pada tabel berikut ini;

Tabel 4. 27
Konsistensi Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Sasaran Revisi RI	PENETAPAN SASARAN RR (2005-2008)	SISA RR 2009	INSTANSI PELAKSANA
Pendidikan						
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	orang /bulan	900	750	150	Dikti
Peran Perempuan dan Anak						
1.	Reunifikasi keluarga	Anak	6.800	353	6.447	Badan/ Dinas. Kab/ Kota
2.	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak	73.223	63000	10.223	Badan/ Dinas. Kab/ Kota
Agama						
1.	Bantuan pemb. Masjid	Unit	1.533	1236	297	Dinas syariah Kab/ Kota
2.	Bantuan Pemb. Meunasah	Unit	1.062	919	143	Dinas syariah Kab/ Kota
3.	Terbangunnya kembali KUA	Unit	143	99	44	Dinas syariah Kab/ Kota
4.	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000	0	30.000	KUA

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Sasaran Revisi RI	PENETAPAN SASARAN RR (2005-2008)	SISA RR 2009	INSTANSI PELAKSANA
5.	Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org	6.000	4802	1.198	Dinas syariah Kab/ Kota
6.	Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1	0	1	Depag/ Dis. Syariah Prov.
7.	Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	13	6	7	Dis. syariah Prov dan Kab/ Kota
8.	Gedung Baitul Mal	Unit	24	5	19	Dinas syariah Kab/ Kota
9.	Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	15	13	2	Depag/ Dis. Syariah Prov.
SOSIAL						
1.	Bantuan Lauk Pauk	Jiwa	2.209	2209		*) Dilaksanakan pada masa darurat
2.	Rehabilitasi MPN	MPN	2	0	2	Dis. Sosial/ Depsos
3.	Perbaikan Rumah Perintis Kemerdekaan	RPK	9	0	9	Dis. Sosial Nad/ Nias
4.	Bantuan beasiswa untuk anak, biaya kesehatan untuk janda dan lansia	Paket	1.300	1200	100	Dis. Sosial Nad/ Nias
5.	Peningkatan Kesra Anak (Org)	Org	139.382	35000	104.382	Dis. Sosial Nad/ Nias
BUDAYA						
1.	Penyusunan peta budaya	Paket	5	3	2	DinasHubpar ProvNad/ Nias
PEMUDA						
1.	Penumbuhan KUPP	kelompok	145	140	5	Badan PORA.
2.	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota	orang	300	120	180	Badan PORA Nad/Nias
3.	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	300	244	56	Badan PORA Nad/ Nias
PEMBINAAN OLAH RAGA						
1.	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	440	420	20	Badan PORA Nad/ Nias
2.	Menyusun model increament dan strategi perlakuan	kegiatan	5	4	1	Badan PORA.
3.	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	200	145	55	Badan PORA NAD/ Nias

Sumber: BRR NAD Nias, Agustus 2008.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Namun terjadi pula kesenjangan antara perencanaan yang telah disusun dengan realisasi kegiatan di lapangan. Dengan demikian terjadi selisih kegiatan-kegiatan yang masuk dalam perencanaan tersebut. Berdasarkan data-data itu ada beberapa sub bidang pemulihan yang terjadi kesenjangan yaitu pendidikan, peran perempuan dan anak, budaya, sosial, agama, pemuda dan pembinaan pemuda. Terkait sisa kegiatan tersebut, maka penanggung jawab penyelesaiannya sudah ada instansi pelaksana sesuai dengan sektor masing-masing.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsistensi antara perencanaan dengan realisasi kegiatan, terdapat sub bidang pemulihan yang akan dipilih yang akan dipersandingkan. Untuk sub bidang pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut;

Tabel 4. 28
Perbandingan Antara Rencana Induk dengan Realisasi Sub Bidang Pendidikan
Tahun 2005-2008

Perubahan Rencana Induk		Realisasi RR 2005-2008	
Kegiatan	Target	Kegiatan	Target
TK/RA	91	TK/RA	97
SD/MI	664	SD/MI	1101
SMP/MTS	530	SMP/MTS	536
SMA/SMK/MA	148	SMA/SMK/MA	152
PT/PTA	23	PT/PTA	48
SLB	6	SLB	-
PKB/TBM	-	PKB/TBM	-
Madrasah Diniyah	32	Madrasah Diniyah	38
TPA	1	TPA	1
BKG Madrasah	31	BKG Madrasah	37

Sumber: Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, Desember 2008

Data diatas menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang melebihi dari target dalam Perubahan Rencana Induk seperti pada pelaksanaan kegiatan TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA, PT/PTA, Madrasah Diniyah dan BMG Madrasah. Namun demikian terdapat pula kegiatan yang masih di bawah target Perubahan Rencana Induk yaitu SLB. Terdapat satu kegiatan yang sesuai antara perencanaan dalam Perubahan Rencana Induk dengan pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan pembangunan TPA.

Sedangkan perbandingan antara Perubahan Rencana dengan realisasi kegiatan untuk sub bidang kesehatan dapat dilihat di bawah ini;

Tabel 4. 29
Perbandingan Antara Rencana Induk dengan Realisasi Sub Bidang Kesehatan
Tahun 2005-2008

Perubahan Rencana Induk		Realisasi RR 2005-2008	
Kegiatan	Target	Kegiatan	Target
Kantor Dinas Kesehatan	19	Kantor Dinas Kesehatan	21
Rumah Sakit	25	Revitalisasi Rumah Sakit	29
Puskesmas	102	Revitalisasi dan Relokasi Puskesmas	212
Pustu	117	Revitalisasi Pustu	190
Polindes	246	Revitalisasi Polindes	252
Gudang Farmasi	14	Revitalisasi Gudang Farmasi	17
Kantor Kesehatan Pelabuhan	3	Revitalisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan	3
Laboratorium Kesehatan	1	Revitalisasi Laboratorium Kesehatan	1
Institusi Pendidikan Kesehatan	14	Revitalisasi Institusi Pendidikan Kesehatan	15
BBPOM	1	BBPOM	1
Ambulance rusak	69	Pengadaan Ambulance (BRR)	124
Tenaga Kesehatan	156	Beasiswa Tenaga Kesehatan	258

Sumber: Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, Desember 2008

Dari tabel diatas menunjukkan terdapat banyak realisasi kegiatan yang melebihi target dalam Perubahan Rencana Induk yaitu kantor dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pustu, polindes, gudang farmasi, institusi pendidikan kesehatan, ambulance rusak dan tenaga kesehatan. Terdapat kegiatan-kegiatan yang sama antara Perubahan Rencana Induk dengan realisasi yaitu kantor kesehatan pelabuhan, BBPOM dan laboratorium kesehatan.

Berikut ini persandingan antara Perubahan Rencana Induk dengan realisasi kegiatan untuk sub bidang pemulihan peran perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut;

Tabel 4. 30
Perbandingan Antara Rencana Induk dengan Realisasi
Sub Bidang Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2008

Perubahan Rencana Induk		Realisasi RR 2005-2008	
Kegiatan	Target	Kegiatan	Target
Woman Crisis Center	10	Woman Crisis Center	10
P2TP2	23	P2TP2	23
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	5300	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	13906
Reunifikasi Keluarga	6800	Reunifikasi Keluarga	353
Qanun Perlindungan	1	Qanun Perlindungan	1
Balee Ureung Inong	-	Balee Ureung Inong	-
Fasilitasi Children Center dan Kid Line Counseling	34	Fasilitasi Children Center dan Kid Line Counseling	36
Beasiswa Bagi Ulama Perempuan	1	Beasiswa Bagi Ulama Perempuan	1
Dukungan Hukum untuk Perempuan	218	Dukungan Hukum untuk Perempuan	636

Sumber: Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, Desember 2008

Berdasarkan data-data itu memberikan gambaran target dalam Perubahan Rencana Induk dengan realisasi kegiatan yang melebihi dari target yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan, Fasilitasi Children Center dan Kid Line Counseling dan Dukungan Hukum untuk Perempuan. Namun terdapat beberapa kegiatan yang berada di bawah target dalam Perubahan Rencana Induk yaitu reunifikasi keluarga dan balee ureung inong. Tapi ada pula beberapa kegiatan yang realisasinya sesuai dengan target dalam Perubahan Rencana Induk yaitu beasiswa bagi ulama perempuan, P2TP2 dan Woman Crisis Center.

IV.1.2.4 Bidang Perekonomian

Pemulihan bidang perekonomian meliputi sub bidang pemulihan Kelautan dan Perikanan, Sub Bidang Pertanian, Sub Bidang Pariwisata, Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Sub Bidang Tenaga Kerja, dan Sub Bidang Koperasi & Usaha Kecil. Setelah adanya revisi Rencana Induk khususnya dalam penyesuaian sasaran program menyebabkan perlunya dianalisis apakah pelaksanaan pemulihan di bidang perekonomian sudah mendekati target revisi rencana induk Perpres 47 tahun 2008.

Penelusuran konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan adalah melalui identifikasi sisi perencanaan yang tercantum didalam Revisi Rencana Induk dengan pelaksanaan oleh BRR, Pemda, dan Donor/NGO hingga Agustus 2008. Dari hasil analisis, Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang perikanan kelautan, pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, tenaga kerja, sampai bidang pariwisata secara garis besar telah mengacu kepada rencana induk, walaupun dengan beberapa catatan.

Tabel 4. 31
Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2008
Bidang Perekonomian

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Sasaran Revisi RI	RR (2005-2008)	SISA RR 2009	INSTANSI PELAKSANA
Kelautan dan Perikanan						
1	Pangkalan Pendaratan Ikan	Unit	31	30	1	Dis. Perik & kelautan prov. NAD **) 2 unit, RKP 2009
2	Galangan Kapal	Paket	67	67	-	*) 1 pkt, RKP 2009
3	Bagan Apung	Unit	59	46	13	Dis. Perik & Laut Kab/Kota
4	Rehabilitasi Tambak	Ha	18,631	15,777	2,854	Dis. Perik & Laut Kab/Kota. **) 775

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Sasaran Revisi RI	RR (2005-2008)	SISA RR 2009	INSTANSI PELAKSANA
						ha, RKP 2009
5	Agroinput Tambak	Ha	10,532	7,814	2,718	Dis. Perik & Laut Kab/Kota
6	Pembangunan Keramba Jaring Apung	Unit	485	252	233	Dis. Perik & Laut Kab/Kota
7	Pabrik Es	Paket	64	35	29	Dis. Kan Kab/Kota NAD/ Nias
8	Pengadaan Cold Storage	Paket	7	1	6	Dis. Perik & Kelautan Prov. NAD **) 1 unit RKP 2009
9	Pengembangan Kelembagaan/ Koperasi Nelayan	Paket	94	27	67	Dis. Kan Kab/Kota NAD/ Nias
Pertanian						
1	Rehabilitasi Lahan Sawah	Ha	16,356	16,356	-	*) 1000 ha, RKP 2009
2	Percetakan sawah baru	Ha	2,921	907	2,014	Dinas Tan. Pangan Kab/kota.NAD/ Nias **) 1500 ha - RKP 2009),
3	Pembangunan Gudang dan Mesin RMU	Unit	92	75	17	Dinas Tan. Pangan Kab/kota
4	Pengembangan Terminal Agribisnis	Unit	3	1	2	Dinas Prov. NAD
5	Pengembangan Kawasan Tan. Pangan dan Hortikultura	Kwsn	5	4	1	Dinas Tan. Pangan Kab/kota. *) 1 kws - RKP 2009),
6	Bantuan Riset Pengembangan Kebun Organik dan Nursery Hortikultura	Paket	1	1	-	*) 1 Unit, RKP 2009.
Perkebunan						
1	Rehabilitasi Kantor	Unit	10	10	-	*) 1 Unit, RKP 2009.
2	Rehab, Intensifikasi, Penanaman, Perawatan, Tan. Perkebunan (kelapa sawit, kakao, kelapa, karet)	Ha	32,011	32,011	-	*) 900 ha, RKP 2009
3	Pendidikan, Pelatihan fasilitator dan Penyuluh Pendamping	Orang	535	85	450	Dis. Perkebunan Kab/Kota
4	Pembangunan Gd. Lab. Analisa Kualitas Hasil Produksi	Paket	2	-	2	Disbun. Prov. NAD
5	Rumah Dinas Kepala Laboratorium dan Staff	Unit	2	-	2	Disbun. Prov. Aceh
Perternakan						
1	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	53,270	48,900	4,370	Disnak. Prov. NAD/ Nias
2	Pembangunan Poskeswan dan Gudang Fasilitas IB	Unit	30	21	9	Disnak Prov. NAD
3	Pembangunan Pasar Hewan	Unit	7	2	5	Disnak. Kab/Kota
4	Tempat Penjualan Daging	Unit	7	7	-	
5	Pembangunan tempat/ Rumah Pemotongan	Unit	15	7	8	Disnak. Kab/Kota

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Sasaran Revisi RI	RR (2005-2008)	SISA RR 2009	INSTANSI PELAKSANA
	Ternak					
6	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	6	6	-	*) 1 kawasan, RKP 2009
Kehutanan dan Lingkungan						
1	Penguatan kawasan hutan (tata batas, rekonstruksi, orientasi dan pemeliharaan batas)	Km	134	70	64	DisHut. Prov. NAD
2	Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Klp	76	18	58	DisHut. Kab/Kota
3	Rehabilitasi Hutan Pantai	Ha	16,775	1,964	14,811	DepHut.
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lokal	Paket	23	8	15	DisHut. Kab/Kota
Industri						
1	Peningkatan Kualitas Produk Pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar	Paket	1	1	-	*) 1 pkt, RKP 2009
2	BLM Penguatan Perajin Sentra dan Non Sentra Industri	Paket	29	27	2	Dis. Indag. Prov. NAD
Perdagangan						
1	Pengembangan AMF Center dan Perwakilannya di Kab/ Kota	Unit	43	22	21	Dis. Indag. Prov. NAD
Pariwisata						
1	Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Paket	4	1	3	Dis. Budpar kab/ kota
2	Pengembangan dan studi pengembangan wisata	Paket	57	7	50	Dis. Budpar NAD/ Nias
3	Pengembangan Paket Wisata Terpadu (Termasuk Bus Wisata)	Paket	1	1	-	*) 1 pkt, RKP 2009
Ketenagakerjaan						
1	Pembangunan/ Rehab. BLK dan Peralatan BLK	Unit	10	5	5	Disnakertrans. Prov. NAD

Sumber : BRR NAD-Nias, Agustus 2008

Bidang Kelautan dan Perikanan secara garis besar sudah mengacu pada revisi rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta bantuan privat/permodalan guna pemberdayaan masyarakat korban bencana. Adapun kegiatan yang perlu dituntaskan pada sub bidang kelautan dan perikanan diringkaskan dalam table berikut.

Potensi perikanan dan Kelautan NAD dan Nias sesungguhnya sangat besar, namun belum dikelola dengan baik dan komprehensif. Perencanaan yang telah dilakukan oleh para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Donor/NGO) dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perikanan sudah cukup komprehensif, mulai dari penanganan kegiatan produksi (tangkap dan budi daya) beserta prasarana dan sarana pendukungnya, pengolahan paska panen

beserta prasarana dan sarana pendukung dan pemasaran beserta sebagian prasarana dan sarana pendukungnya.

Yang masih perlu ditingkatkan adalah upaya yang berorientasi pada pasar antar daerah dan ekspor. Hal ini akan terkait ke belakang (backward sector), dalam kaitan dengan pengolahan paska produksi yang sesuai hingga pada mutu dan kontinuitas produksi yang mendukung. Untuk itu kerjasama dengan swasta dan pengembangan koperasi menjadi sangat penting. Dalam jangka dekat, pembangunan hatchery, pabrik es dan cold storage, kalau tidak dikelola dengan baik akan mati, karena itu perlu dikerjasamakan dengan swasta yang telah berpengalaman dan menguasai dibidangnya. Sementara itu dipersiapkan koperasi dengan berbagai jenis kegiatan, mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.

Mengingat banyak bantuan lembaga Donor dan NGO membantu dalam bidang perikanan, maka koordinasi dan integrasi program serta upaya berbagi pengalaman perlu dilakukan, agar semua kegiatan rehab/rekon di bidang perikanan akan semakin baik dan bermanfaat.

Bidang Pertanian secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu pulihnya kembali fasilitas produksi pertanian, dan pengembangan serta peningkatan kualitas hasil pertanian.

Walaupun demikian ada juga kegiatan yang tidak disebutkan di dalam rencana induk tetapi dilaksanakan oleh BRR seperti pencetakan sawah. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sawah tergolong rusak berat dan cukup luas, sehingga untuk mengganti sawah yang telah rusak tersebut dalam waktu yang cepat dilakukan dengan pencetakan sawah. Kemudian kegiatan yang sesuai dengan rencana induk tetapi belum dilakukan adalah penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan pada sub bidang pemulihan pertanian masih bersifat meluas dan ditujukan kepada penerima manfaat (Beneficiaries) secara menyeluruh. Maka dari itu upaya yang masih perlu dilakukan adalah peningkatan manfaat dan dampak dari kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan. Yaitu seperti peningkatan produksi padi, palawija dsb, peningkatan produksi populasi ternak (besar, sedang dan unggas), serta peningkatan produksi kebun, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.

Perindustrian dan Perdagangan secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu menekankan pada pemulihan sarana produksi dan sarana perdagangan guna peningkatan kapasitas/produktivitas produksi dan kelancaran aktivitas perdagangan.

Berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas, masalah perdagangan yang utama adalah masalah pemasaran dengan segala aspek terkait, baik prasarana fisik maupun kelembagaan dan system serta kebijakan (tata niaga) yang mendukungnya. Ditinjau dari kegiatan rehab dan rekon, maka aspek perdagangan yang masih memerlukan perhatian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang jasa dan perdagangan. Karena nilai tambah di kegiatan ini sangat tinggi, maka di butuhkan kemampuan kewirausahaan yang lebih dari kegiatan ekonomi lainnya.

Sedangkan permasalahan utama dalam rangka rehab dan rekon di bidang perindustrian, adalah masalah industri menengah dan kecil. Dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus untuk mengembangkan kemampuan usaha di bidang industri. Potensi yang masih belum dikembangkan adalah industri kerajinan rakyat. Selama ini kerajinan rakyat, baik skala produksi dan pemasarannya masih sangat terbatas dengan pemasaran yang juga terbatas. Industri kerajinan

rakyat, bila dikembangkan secara lebih tersitem akan memberikan kesempatan kerja yang luas dan mempunyai nilai tambah yang tinggi dan harus mengarah kepada ekspor dan menunjang kegiatan pariwisata NAD dan Nasional.

Pada bidang *Koperasi dan Usaha Kecil Menengah* secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu menekankan pada kegiatan bantuan kredit murah bergulir, pemberdayaan koperasi dan UKM, serta pembinaan kemitraan.

Setelah disandingkan dengan revisi Rencana Induk Perpres 47 tahun 2008 pelaksanaan pemulihan di sub bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah mencapai target revisi rencana induk, sehingga tidak ada program yang perlu dituntaskan pada tahun 2009.

Namun ada beberapa catatan yaitu dalam pelaksanaan program pengembangan koperasi masih terbatas pada pemberian subsidi dan pelatihan namun belum pada upaya pemantapan dan pengembangan usaha koperasi yang sistematis. Berdasarkan rencana induk, seharusnya Koperasi di kembangkan dengan kemampuan kewirausahaan yang menghimpun usaha individu yang kecil, agar mampu bersaing dengan usaha menengah dan besar. Koperasi adalah bukan lembaga sosial, karena itu kewirausahaan dan kebersamaan merupakan satu kesatuan sikap di dalamnya. Koperasi harus mampu mengembangkan kegiatan usahanya dari hulu hingga hilir, dari menghimpun kegiatan produksi, pengolahan hingga pemasaran. Sebaiknya agar dapat dikembangkan lebih fokus, diarahkan pada komoditi tertentu.

Dalam kaitan dengan pengembangan UKM, hal ini terkait dengan usaha produksi/komoditi lainnya, sehingga harus dikembangkan secara terintegrasi. Kegiatan ini mencakup pemberian dana bergulir hingga pemberian pinjaman/kredit, serta kegiatan pembinaan usaha lainnya. Peran pemerintah harus sebatas menjadi penggerak dan stimulator, dari upaya yang harus dikembangkan oleh lembaga keuangan dan perbankan serta investasi. Dan pemerintah, melalui BRR dan Pemda, perlu melakukan regulasi dan kemudahan serta dorongan agar kelembagaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Untuk mengatasi kekurangan penyaluran kredit mikro, diusulkan belajar dari pengalaman penyaluran dana bergulir dan kredit mikro di daerah lain di Indonesia yang telah berhasil.

Pariwisata secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu menekankan pada rehabilitasi rekonstruksi sarana prasarana obyek wisata dan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan daya tarik obyek wisata.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang di masa depan sangat penting, apalagi paska tsunami. Dengan potensi berbagai alam yang indah, kalau di dukung oleh pengembangan kesenian yang unik dan spesifik dan dapat dikembangkan industri kerajinan rakyat yang baik dan tepat. Pariwisata akan menjadi kegiatan ekonomi di Aceh yang penting. Karena itu sasaran dan program, harus di mulai dengan meletakkan dasar-dasar pengembangan ke arah itu.

Bidang Tenaga Kerja secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu pada kegiatan pemulihan pendapatan masyarakat pasca bencana dan pelatihan tenaga kerja.

IV.1.2.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan dibidang kelembagaan, hukum dan K3M, yaitu antara dokumen perencanaan yang dilakukan pada bidang kelembagaan, hukum dan K3M dari Rencana Induk oleh BRR, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO.

Berdasarkan hasil analisis, dari perkembangan program/kegiatan BRR, maka konsistensi antar perencanaan dan pelaksanaan bidang kelembagaan dan hukum mayoritas telah terlaksana dengan baik hingga tahun 2008, walaupun dalam pelaksanaannya belum selesai 100 % namun mengacu kepada perencanaan sehingga program tersebut harus dilanjutkan pada tahun 2009, diantaranya dapat terlihat dalam tabel berikut adalah:

Tabel 4. 32
Perencanaan dengan Pelaksanaan
Bidang Kelembagaan, Hukum dan K3M

No	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Revisi RI	Sasaran RR 2005-2008	SISA RR 2009	Instansi Pelaksana
	Kelembagaan Daerah					
1	Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo	Unit/Paket	11	11	16 Unit *)	*) RKP 2009/ Pemda Kab/Kota
	Hukum					
1	Kendaraan R2	Unit	38	33	5	Dep. Hukum dan Ham
2	Lapas/Rutan	Unit	4	4	1 *)	*) RKP 2009/ Dep. Hukum dan Ham
3	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	15	18	Mahkamah Syariah
4	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	17	1	Mahkamah Syariah
	K3M					
1						Telah selesai

Sumber: BRR NAD Nias, Agustus 2008.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya tentang perkembangan program/kegiatan di bidang kelembagaan, hukum dan K3M mayoritas telah terselesaikan. Pada **sub bidang kelembagaan daerah** telah 95 % telah dapat terselesaikan dari beragam program/ kegiatan yang direncanakan. Namun masih terdapat 1 program/ kegiatan yang masih harus dilanjutkan pada tahun 2009 yaitu program/ kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kantor KDH/ DPRD/ Dinas/ Meuligo. Dari 11 unit paket yang direncanakan dan menjadi sasaran dalam revisi Rencana Induk emenurut Perpres 47 Tahun 2008. Namun sesuai dengan RKP tahun 2009 masih terdapat sisa 16 unit/paket yang masih harus diselesaikan pada tahun 2009. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemda Kab/Kota di NAD dan Nias untuk melaksanakannya.

Pada **sub bidang hukum** telah 90 % terlaksana hingga akhir tahun 2008. Namun masih terdapat 4 program/ kegiatan yang masih harus dilanjutkan pada tahun 2009 yaitu program/ kegiatan pengadaan peralatan pendukung operasional kegiatan dibidang hukum. Yaitu:

Pengadaan 38 unit kendaraan roda dua, telah terlaksana hingga akhir tahun 2008 sebanyak 33 unit, dan 5 unit masih harus dilanjutkan pada tahun 2009. Pelaksana kegiatan tersebut nantinya akan dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM.

Pembangunan lapas/ rutan sejumlah 4 unit, telah diselesaikan hingga akhir tahun 2008. Tahun 2009 masih dibutuhkan penyelesaian sebanyak 1 unit lagi, hal ini sebagaimana yang tertera dalam RKP tahun 2009. Dan ini berada dibawah tanggung jawab Departemen Hukum dan HAM.

Lainnya yaitu pengadaan kendaraan di Mahkamah Syari'ah yang terdiri dari 33 unit kendaraan roda dua dan 18 unit kendaraan roda empat. Berdasarkan pelaksanaan hingga akhir tahun 2008. Dari 33 unit kendaraan roda dua, telah terlaksana sebanyak 15 unit, sedangkan sisanya 18 unit

akan dilaksanakan pada tahun 2009. Sedangkan untuuk kendaraan roda 4, dari 18 unit kendaraan, 17 unit telah terlaksana pada akhir 2008 dan 1 unit di tahun 2009. Pengadaan ini dilaksanakan oleh mahkamah syari'ah.

Sedangkan program/kegiatan pada **sub bidang ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (K3M)** sesuai dengan yang tercantum dalam revisi Rencana Induk menurut Perpres 47 Tahun 2008, menyebutkan tidak terdapat program/ kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2009. Karena di rencanakan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2008.

IV.1.3 Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

IV.1.3.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Konsistensi antar para pelaksana (stakeholder) dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada Bidang Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut, dimana pelaksanaan BRR diperoleh dari Laporan Kinerja BRR dan pelaksanaan Pemerintah Daerah dari Program Pembangunan Daerah dan hasil wawancara Tim P3B Bappenas.

LAKIP BRR disusun dengan cara mengukur capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan komitmen dari manajemen puncak dan seluruh anggota organisasi.

Program pembangunan daerah merupakan instrument kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.

Tabel 4. 33
Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Perumahan dan Permukiman

BRR	Pemerintah Daerah	Donor/NGO
Perumahan dan Permukiman		
1. Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. I 2. Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. IA 3. Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. II 4. Pengembangan perumahan dan permukiman NAD-ADB 5. Bantuan perumahan dan permukiman kembali Provinsi NAD 6. Bantuan perumahan dan permukiman kembali / BPPK Simeulue 7. Pengembangan perumahan dan pemukiman Kota Calang 8. Bantuan sosial bertempat tinggal dan perbaikan rumah NAD 9. Prakarsa pembangunan partisipatif 10. Pengembangan perumahan dan permukiman (MDTF) 11. Penanggulangan kemiskinan di perkotaan 12. Penataan ruang dan lingkungan permukiman 13. Pengelolaan Pertanahan NAD - Nias 14. Bantuan perumahan dan permukiman NAD wilayah II	1. Pengembangan perumahan 2. Penyediaan sarana dan prasarana hunian 3. Pembangunan rumah dhuafa	1. Rumah rusak yang diperbaiki 2. Rumah yang dibangun dan yang sudah ditempati 3. Rumah rusak ringan yang diperbaiki 4. Pembangunan rumah yang direlokasi dan rumah sementara 5. Penyediaan bahan bangunan 6. Rehabilitasi/rekonstruksi gedung pemerintahan, gedung kantor, bangunan publik dan bangunan pendukung 7. Penerangan jalan 8. Restorasi taman publik.

BRR	Pemerintah Daerah	Donor/NGO
15. Bantuan perumahan dan permukiman NAD wilayah III 16. Bantuan perumahan dan permukiman NAD wilayah IV 17. Bantuan perumahan dan permukiman NAD wilayah V 18. Pengembangan perumahan dan permukiman Kab.Nias 19. Pengembangan perumahan dan permukiman NAD wilayah I 20. Pengembangan perumahan dan permukiman NAD wilayah III 21. Pengembangan perumahan dan permukiman NAD wilayah IV 22. Infrastruktur kawasan siap huni 23. Pengembangan perumahan dan permukiman kabupaten Nias 24. Pengelolaan pertanahan Nias 25. Pengembangan perumahan dan permukiman Nias Selatan 26. Pengelolaan pertanahan Nias Selatan 27. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II		
Tata Ruang dan Pertanahan		
1. Pembinaan keuangan dan perencanaan.	1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Perencanaan tata ruang 3. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4. Penyediaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin dan ekonomi lemah 5. Pensertifikatan tanah di daerah perbatasan 6. Inventarisir tanah Pemda 7. Pembebasan lahan untuk perumahan dan fasilitas umum.	1. Peta yang telah dihasilkan 2. Surat tanah yang diterbitkan 3. Desa yang dilengkapi batas property dan gambar tampilan.

Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

Sasaran untuk **sub bidang perumahan dan permukiman** adalah tergantinya dan terperbaikinya seluruh rumah yang hancur akibat tsunami dengan rumah pengganti yang memenuhi standar minimal. BRR telah dengan rinci menjabarkan kegiatan yang dilakukannya di tahun 2008, dengan berbagai macam kegiatan pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman. Sejalan dengan hal tersebut, donor/NGO juga melakukan hal yang sama di lokasi berbeda. Menurut hasil tinjauan lapangan, pelaksanaan kegiatan dilokasi yang sama antara BRR dan donor/NGO merupakan kegiatan yang saling mengisi/melengkapi, seperti misalnya donor melakukan kegiatan pembangunan perumahan dan BRR melengkapinya dengan prasarana jalan lingkungannya, begitu juga sebaliknya.

Sasaran **sub bidang tata ruang** yang tercantum dalam Laporan Kinerja BRR adalah tersedianya kajian perencanaan detil tata ruang dan laporan evaluasi manfaat. Sayangnya pada Lakip ini hanya tercantum kegiatan pembinaan keuangan dan perencanaan. Sebetulnya jika melihat data yang diperoleh dari Pusdatin BRR ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan BRR di tahun 2008, antara lain Rencana Pengembangan Desa (Village Planning) dan Penyusunan Pedoman Pengembangan Desa.

Program-program yang dilakukan oleh Pemda merupakan program/kegiatan reguler dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang infrastruktur, yang biasa dilaksanakan setiap tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan berasal dari sumber pembiayaan daerah.

IV.1.3.2 Bidang Infrastruktur

Terdapat 3 (tiga) *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur yaitu BRR, Pemda dan Donor/NGO. Dalam pelaksanaannya telah tercipta mekanisme kerjasama/pembagian tugas dan saling melengkapi diantara para *stakeholders* tersebut. Berdasarkan penjelasan di bab 3, sampel Donor yang akan dibahas adalah USAID dan MDF, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan BRR adalah hasil dari LAKIP BRR Tahun 2008. Konsistensi antar pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 34
Pembagian Peran dan Tanggungjawab Antar Pelaksana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

BRR	Pemerintah Daerah	Donor/NGO
Jalan dan jembatan		
Terbaiknya dan terbangunnya jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan untuk wilayah NAD-Nias • Pembangunan jalan dan jembatan wilayah IA • Pengembangan kawasan percontohan NAD • Jalan nasional NAD • Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi NAD • Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IV, V, I, II, III, II • Pemeliharaan, rehab, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Nias • Perencanaan, rehab dan rekon provinsi dan ketenagalistrikan Kabupaten Nias • Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di Provinsi NAD, kabupaten Nias dan Nias Selatan • Pembinaan perencanaan jalan NAD	• Pembangunan Jalan dan Jembatan serta membuka isolasi kawasan • Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan • Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	USAID-Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Pesisir Barat NAD • Pembangunan jalan dan jembatan nasional • Pembangunan saluran drainase
Perhubungan		
Terbangunnya dermaga, terminal, dan bandara yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi • Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil IA • Rehab, peningkatan, pembangunan fasilitas pos, telekomunikasi dan transportasi udara NAD • Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut	• Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Peningkatan Pelayanan Angkutan • Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan • Penyediaan peralatan bongkar muat pelabuhan • Pelayanan administrasi (imigrasi dan bea cukai) pada pelabuhan udara • Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas • Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan	MDF-Infrastructure Reconstruction Financing Facility/IRFF • Rehabilitasi/rekonstruksi sistem air • Rehabilitasi/rekonstruksi pelabuhan • Rehabilitasi/rekonstruksi jalan provinsi dan jalan kabupaten

BRR	Pemerintah Daerah	Donor/NGO
	Bermotor	
Sumber daya air		
Tersedianya akses air bersih dan sehat bagi seluruh warga • Lingkungan, drainase dan pengendalian banjir NAD • Pengembangan kawasan percontohan NAD • Infrastruktur, lingkungan, dan pemeliharaan wilayah I, V, III, II • Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP dan air minum NAD, Kab Nias dan Nias Selatan • Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan NAD • Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi Nias • Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wilayah I Terbangunnya system drainase dan pengontrol banjir • Pembangunan prasarana pengendalian air NAD • Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil IA, I, II, III, IV, V • Irigasi NAD • Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP dan air minum Kab Nias dan Nias Selatan • Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil I	• Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya • Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya • Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah • Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong • Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	MDF-Banda Aceh Flood Mitigation Project • Pembangunan sistem drainase (mesin pompa, klep banjir, dan saluran drainase) MDF-Tsunami Recovery Waste Management Programme • Sampah tsunami yang dibersihkan (m2) • Sampah kota yang dikumpulkan (m2) • Jumlah dan ukuran TPA sementara (Ha) • Kayu limbah tsunami yang dikumpulkan dan diproses untuk daur ulang (m2) • Kompos pertanian yang diproduksi (kg) • Reruntuhan yang didaur ulang untuk pembangunan jalan (jarak km dari jalan)
Energi dan Listrik		
	• Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.	
Pos dan Telematika		
	Fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informasi.	
Bangunan fasilitas umum		
Pemeliharaan		
IREP		

Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

Kontribusi Pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur berupa pendukung atau komplemen dari kegiatan yang dilaksanakan BRR maupun Donor/NGO, dan apabila terkait dengan pembangunan fisik pun dalam skala kecil (kabupaten/kota/kecamatan) karena adanya keterbatasan anggaran pada APBD. Pada umumnya Pemda terlibat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan/perluasan pelabuhan, bandara,

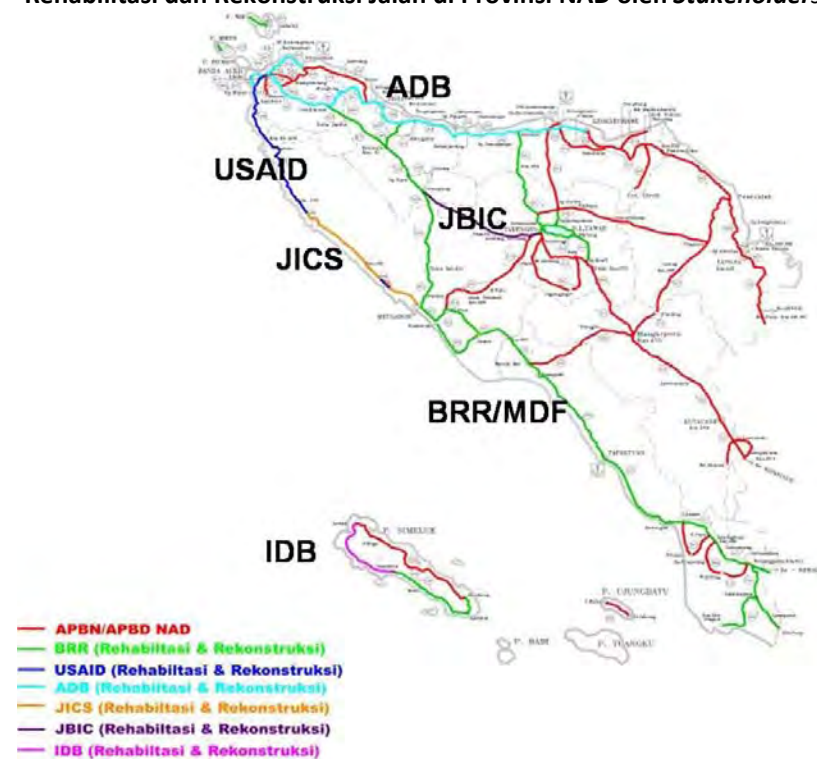
terminal, jalan, dan lain sebagainya. Kontribusi lainnya yaitu Pemda juga terlibat dalam aspek perencanaan maupun pengawasan walaupun kewenangannya masih terbatas.

Peran BRR dalam pelaksanaan yaitu rehabilitasi/rekonstruksi bangunan fisik yang rusak akibat bencana tsunami dan gempa, dan biasanya berskala besar. BRR juga bekerja sama dengan Donor/NGO yaitu dalam penyediaan pendanaan, misalnya dalam pembangunan pelabuhan, jalan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan diantara Donor/NGO juga seringkali terbentur pada tumpang tindih kegiatan di lokasi yang sama, karena kurangnya koordinasi diantara Donor/NGO.

Peran Donor/NGO di bidang infrastruktur banyak terfokus pada sub bidang jalan dan jembatan, perhubungan, sumberdaya air, serta energy dan listrik. Berdasarkan tabel di atas, konsistensi antar pelaksana terjadi pada beberapa sub bidang, misalnya :

- **sub bidang jalan dan jembatan.** Di Provinsi NAD, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan ditangani oleh beberapa *stakeholders* antara lain BRR (melalui proyek IRFF-MDF), JICS, JBIC, ADB, USAID, IDB dan melalui dana APBN/APBD NAD dengan pembagian ruas jalan yang berbeda-beda. Salah satu Donor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan jalan yaitu USAID yang terlibat dalam pembangunan jalan lintas barat Banda Aceh-Calang. BRR bersama Donor/NGO (ADB, JBIC, JICS, IDB) menangani sebagian pembangunan jalan dan jembatan pada lintas barat provinsi NAD, karena lintas timur kondisi lebih baik dan telah ditangani melalui kerjasama dengan Dep. PU, jalan lintas tengah, dan jalan kabupaten/kota pun dibangun untuk mendukung akses kepada perumahan dan permukiman. Pemda pun terlibat dalam pembangunan jalan dan jembatan tingkat kabupaten/kota serta jalan lingkungan, namun dalam skala yang lebih kecil karena keterbatasan anggaran Pemda. Jadi di antara pelaksana untuk sub bidang jalan dan jembatan tidak terjadi tumpang tindih

Gambar 4. 2
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan di Provinsi NAD oleh *Stakeholders*



- **Sub bidang perhubungan.** BRR dan Donor/NGO bekerjasama dalam pembangunan terminal, dermaga/pelabuhan dan bandara. MDF melalui proyek IRFF mendanai infrastruktur tingkat provinsi dan kabupaten yang teridentifikasi melalui kerangka Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP). Peran Pemda yaitu mendukung prasarana dan fasilitas perhubungan. Sehingga dalam pelaksana, ketiga *stakeholders* ini saling melengkapi satu sama lain.
- **Sub bidang sumber daya air.** Mekanisme saling melengkapi di antara para pelaksana pun terjadi pada pemulihan bidang persampahan. BRR membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sebanyak 5 unit dan Donor/NGO membangun 2 unit. Selain itu Donor juga menyediakan gerobak sampah, container, truk sampah untuk mendukung lingkungan yang bersih. Peran Pemda yaitu pengembangan kinerja pengelolaan persampahan agar mekanisme pengelolaan sampah menjadi lebih efisien.

IV.1.3.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Di dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias diperlukan kerja sama yang sinergis dan saling komplementer antar berbagai stakeholders. Terdapat 3 (tiga) *stakeholders* yang terlibat dalam proses pelaksanaan tersebut, khususnya untuk bidang sosial dan kemasyarakatan yaitu BRR, Pemda dan Donor/NGO. Dengan adanya 3 pelaku utama yang terlibat maka diharapkan adanya pembagian peran, tugas dan tanggung jawab yang saling mendukung satu dengan lainnya. Sumber data yang dipergunakan untuk melihat peran BRR bersumber dari LAKIP BRR Tahun 2008, untuk Pemda bersumber dari RPJMD secara jeneral dan Donor/NGO dari laporan pelaksanaan kegiatan. Secara lebih konkret, dapat dilihat konsistensi antar pelaksana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 35
Pembagian Peran dan Tanggungjawab Antar Pelaksana
Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan

BRR	Pemerintah Daerah	Donor/NGO
Pendidikan		
Tercapainya rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan yang terdiri dari; • Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah • Pendidikan Reg. IA, I, II, III, IV dan V • Pendidikan tinggi NAD • Rehab-rekons IAIN Ar Raniry Banda Aceh (IDB) • Pendidikan di Depag NAD • Pendidikan menengah lanjutan • Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	• Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Pendidikan Menengah • Program Pendidikan Non Formal • Program Pendidikan Dayah • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan • Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	AusAID • peningkatan pengelolaan sekolah dan aset • menyelesaikan rekonstruksi sekolah dan fasilitas administrasi pendidikan • menyerahkan buku bagi perpustakaan- sekolah • membantu pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi NAD • meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran • mengembangkan bahan-bahan pelatihan • menyediakan pelatihan dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan
Kesehatan		
Tercapainya rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan yang terdiri dari;	• Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	AusAID • meningkatkan proses

BRR	Pemerintah Daerah	Donor/NGO
• Kesehatan Reg. IA, I, II, III, IV dan V • Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD • Pelayanan Kesehatan NAD-ADB • Pelayanan kesehatan NAD • Pelayanan kesehatan NAD lanjutan • Kesehatan Kab. Nias Selatan • Pelayanan kesehatan Nias (ADB)	• Program Personel Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Hidup Sehat • Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular • Program Perbaikan Gizi Masyarakat • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata • Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata • Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat propinsi • meningkatkan kualitas klinik kesehatan dan merekonstruksi akademi kebidanan • merekonstruksi farmasi dan membangun kembali rantai pasokan obat-obatan • merenovasi bangunan dan laboratorium di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banda Aceh
Pemberdayaan perempuan dan anak		
Terlaksananya kesejahteraan pemberdayaan perempuan dan anak • Gender Reg. IA, I, II, III, IV dan V • Gender Prov. NAD	• Program Pembinaan Anak Terlantar • Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Children On The Edge Memberikan pelayanan untuk kegiatan-kegiatan berikut; <i>playgroup</i>, taman kanak-kanan (TK), pusat kegiatan remaja dan kaum ibu, serta balai pertemuan warga, yang dipakai untuk lokasi pemulihan bagi anak-anak dan masyarakat Aceh yang terkena bencana tsunami.

Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2008

Peran dan tanggung jawab Pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih banyak komplementer terhadap kegiatan bidang pemulihan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan BRR maupun Donor/NGO. Posisi Pemda lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan reguler pembangunan di daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran melalui aktifitas di lapangan tidak sedikit kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didukung melalui APBA/APBK seperti kegiatan pendamping di bidang pemulihan sosial kemasyarakatan.

Untuk peran BRR dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan yang utama karena sebagai penanggung jawab. Fokus utama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR merupakan kawasan pascabencana. Beberapa kegiatan fisik dalam bidang sosial kemasyarakatan lebih banyak melakukan pembangunan gedung sarana dan prasarana

bidang pemulihan sosial kemasyarakatan termasuk penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk menunjang fasilitas sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, terdapat pula peran BRR dalam mendukung pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yang diperlukan, khususnya dalam sub bidang pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan peran Donor/NGO dalam bidang sosial kemasyarakatan lebih banyak terfokus pada sub bidang pendidikan dan kesehatan, seperti yang banyak dilakukan oleh pihak AusAID. Peran lembaga ini cukup signifikan dalam memulihkan berbagai sarana dan prasarana fisik, perlengkapan dan peralatan, pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sub bidang pendidikan dan kesehatan. Berbagai Donor/NGO yang melaksanakan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan bisa saling mengisi walaupun tidak menutup kemungkinan adanya tumpang tindih karena bisa terjadi perebutan lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

IV.1.3.4 Bidang Perekonomian

Konsistensi Antar pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian terhadap rencana induk masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan kerap terjadi masalah, misalnya secara kontraktual bantuan sudah diberikan tetapi tidak ada kecocokan dalam jenis dan tipe barang bantuan yang diberikan. Hal ini dikarenakan stakeholders (terutama lembaga donor/NGO) hanya melihat keinginan masyarakat penerima bantuan tetapi bukan kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagai contoh adalah pemberian kapal bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan di Lampulo. Hal ini juga tentu sebagai bahan masukan bagi pihak perencanaan, apakah hal-hal yang direncanakan tersebut sudah tepat. Contoh lainnya adalah bantuan perahu/kapal yang tidak dapat diterima pemerintah daerah karena kondisi kapal yang tidak memenuhi syarat, dimana tentu hal ini perlu diperhatikan pihak pemberi bantuan.

IV.1.3.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu antara BRR, Pemda, dan Donor/NGO berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim P3B Bappenas memperlihatkan bahwa adanya mekanisme yang bersifat saling mendukung dan melengkapi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dikarenakan berbedanya fokus prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari masing-masing pelaksana.

Sampai dengan akhir tahun 2008 pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah yang merupakan kegiatan fisik masih menjadi fokus dan prioritas di bidang kelembagaan, hukum, dan K3M. BRR NAD-Nias melaksanakan pembangunan terhadap infrastruktur pemerintah NAD dan Nias; pembangunan infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan di wilayah I, II, III dan IV; pengembangan fasilitas polri; pemeliharaan, rehab, peningkatan sarana dan sarana transportasi; serta pembangunan pusat pembelajaran dan pengembangan SDM. Program ini merupakan bagian dari tujuan BRR agar pulih dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintah dan prasarana sebagaimana tertera dalam LAKIP BRR NAD-Nias Tahun 2008. Pemerintah Daerah pada beberapa wilayah sampel yang menjadi analisis juga ikut melaksanakan kegiatan fisik di bidang ini yaitu adanya kegiatan: rehabilitasi dan rekonstruksi kantor kecamatan dan rumah dinas termasuk kegiatan lanjutan pembangunan kantor bupati di Kab.Nias. sedangkan Donor/NGO, seperti MDF ikut mendukung pembangunan infrastruktur pemerintahan melalui program dukungan terhadap penguatan tata kelola dan sistem pemerintahan, disamping itu juga MDF juga ikut melakukan penguatan lembaga-lembaga pemerintahan daerah di berbagai sector. Ausaid melalui program AIPRD mendukung pemulihan melalui rekonstruksi infrastruktur public; termasuk dalam membangun beberapa kantor kecamatan.

Selain kegiatan-kegiatan fisik diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan non fisik yang dilakukan oleh pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. BRR dalam mendukung program utama terhadap pulihnya

dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintah dan prasarana, melalui pelaksanaan kegiatan: peningkatan dan penataan kapasitas kelembagaan di NAD dan Nias. Sedangkan dalam mendukung semakin kuatnya kapasitas aparat pemerintah, maka dilaksanakan kegiatan seperti dukungan bantuan pemerintah daerah; penataan dan pengelolaan SDM aparat NAD dan Nias; pengembangan sarana dan prasarana hukum NAD; dukungan terhadap kegiatan TNI angkatan udara; serta penguatan komunikasi dan informasi di NAD dan Nias. Pemda NAD-Nias dalam tahun 2008 ikut mendukung kegiatan penguatan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dan system pelaporan; peningkatan kapasitas aparat; pembinaan kesatuan bangsa; pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; serta pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat.

Lembaga donor/NGO, seperti World Bank mendukung kegiatan pengelolaan keuangan public serta memperkuat lembaga anti korupsi. MDF melaksanakan kegiatan penguatan organisasi masyarakat sipil; penguatan system administrasi serta mengikut sertakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kapasitasnya dengan metoda yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat local. Sedangkan Ausaid melalui program AIPRD menerapkan model penyediaan layanan satu pintu untuk merampingkan penyediaan layanan public di pemerintahan kecamatan; menyediakan pelatihan khusus bagi petugas pemerintahan daerah mengenai kepemimpinan, perencanaan, pembuatan anggaran, penyelesaian konflik dan transparansi. Untuk lebih lengkapnya pembagian peran antar pelaksana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang kelembagaan dan hukum dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 36
Peran BRR, Pemda dan Donor/NGO dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Kelembagaan dan Hukum

BRR	Pemda NAD-Nias	Donor/NGO
Pulihnya dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintah dan prasarana 1. Pembangunan infrastruktur pemerintah NAD 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan Pulau Simeulue 3. Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IA 4. Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I 5. Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II 6. Pemeliharaan, rehab, peningkatan sarana dan prasarana transportasi 7. Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I, II, III dan IV 8. Peningkatan kapasitas rekonstruksi infrastruktur NAD 9. Perencanaan, rehab dan rekon jalan provinsi dan kenagalistrikan Kab.Nias 10. Rehab dan Rekon jalan Kab.Nias Selatan 11. Penyelenggaraan dan pendaftaran bangunan gedung negara dan rumah negara NAD 12. Pengembangan fasilitas polri 13. Kelembagaan dan pengembangan	Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Nias dan Nias Selatan 1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi kantor kecamatan dan rumah dinas 3. Pemberdayaan Pemerintahan Gampong/Lurah dan Mukim 4. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda 5. Penyebaran dan Pembangunan Informasi dan komunikasi 6. Pembinaan kesatuan bangsa 7. Pemberdayaan Masyarakat desa 8. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	World Bank (WB) 1. Pengelelolaan keuangan publik yang lebih baik dan lebih bersih 2. Memperkuat lembaga antikorupsi dan penyelesaian transisi kelembagaan Multi Donor Fund (MDF) 1. Mendukung Penguatan Tata Kelola sistem pemerintahan. 2. Penguatan organisasi masyarakat sipil 3. Penguatan sistem administrasi. 4. Penguatan lembaga-lembaga pemerintah daerah di berbagai sektor. 5. Memberikan pelatihan formal dan pelatihan kerja kepada staf lokal untuk meningkatkan kapasitas di bidang-bidang seperti perencanaan dan anggaran, kesehatan, pendidikan, konstruksi infrastruktur, pengelolaan limbah dan drainase, pengelolaan hutan, perencanaan tata kota dan administrasi pertanahan. 6. mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kapasitasnya dengan metode berbasis sumber daya lokal. AusAid, melalui Program AIPRD: 1. Mendukung pemulihan masyarakat

BRR	Pemda NAD-Nias	Donor/NGO
SDM Wilayah I dan IV 14. Peningkatan dan penataan kapasitas kelembagaan NAD-Nias 15. Pusat Pembelajaran dan pengembangan SDM Semakin kuatnya kapasitas aparatur pemerintahan 1. Dukungan bantuan pemerintah daerah SPADA L 2. Peningkatan sarana dan prasarana gedung keuangan negara 3. Kelembagaan dan pengembangan SDM Wilayah V 4. Penataan dan pengelolaan SDM aparatur NAD-Nias 5. TNI angkatan udara L 6. Pengembangan sarpras hukum NAD 7. Penguatan komunikasi dan informasi NAD-Nias	9. Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur Satpol PP	dalam berbagai cara, termasuk rekonstruksi infrastruktur public 2. Menyediakan pelatihan khusus bagi petugas pemerintahan daerah mengenai kepemimpinan, perencanaan, pembuatan anggaran, penyelesaian konflik dan transparansi 3. Menerapkan model penyediaan layanan satu pintu untuk merampingkan penyediaan layanan publik di pemerintahan kecamatan. 4. Membangun kantor kecamatan. 5. Memfasilitasi pemilihan kepala dan dewan desa secara demokratis di NAD 6. Melatih pemimpin masyarakat (lebih dari setengahnya perempuan) di desa.

Sumber: Analisis Tim P3B Bappenas, 2008.

Program-program diatas yang dilaksanakan melalui pelatihan lebih menekankan pada partisipasi dalam kelas yang tidak terlalu besar, penerapannya dilakukan dalam bentuk pelatihan, dengan fasilitator/instruktur yang dapat memotivasi peserta, dengan menggunakan pendekatan yang paling efektif. Terlebih jika dalam implementasinya kemudian disediakan seorang konsultan/pendamping yang dapat membantu jika ternyata di lapangan ditemui banyak masalah yang tidak sesuai dengan konsep. Seperti dalam melatih pemimpin masyarakat yang berasal dari generasi perempuan.

IV.1.4 Masyarakat Penerima Manfaat

Tinjauan terhadap masyarakat penerima manfaat dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat pada beberapa wilayah sample Kab/Kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Nias dan Nias Selatan. Pertanyaan dalam wawancara dengan masyarakat diarahkan pada perkembangan dan manfaat yang diperoleh masyarakat selama adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan hasil wawancara ini disajikan dalam bentuk deskripsi historis yang diarahkan kepada masing-masing bidang pemulihan.

IV.1.4.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Komentar masyarakat penerima manfaat tentang bagaimana jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh para stakeholders (BRR, Donor/NGO, Pemda, dan lain-lain) serta kepuasan/ketidakpuasan ataupun keluhan mereka terhadap bidang perumahan dan permukiman, untuk lengkapnya dapat dilihat pada box dibawah yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara Tim P3B Bappenas pada tahun 2008. Box pertama adalah tentang contoh kegagalan pembangunan rumah yang dirasakan masyarakat dan box kedua adalah keberhasilan pembangunan yang perencanaannya dilakukan bersama masyarakat.

RUMAH DIBANGUN DENGAN PRASARANA DASAR BURUK

Pembangunan perumahan yang baik adalah sesuai dengan tataruang yang baik, adanya penerangan (listrik), air dan sanitasi yang baik serta terbangunnya prasarana dasar lainnya seperti saluran pembuangan, jalanan, septic tank yang tertata rapi, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Aceh Jaya, masih banyaknya prasarana yang dibangun namun tidak bisa dimanfaatkan, seperti yang terjadi di desa Lueng Tata Luah Kab.Aceh Jaya, dalam pembuatan saluran pembuangan yang tidak dapat mengalirkan air dan gorong-gorong, ini dinilai sangat mubazir. Hal ini dapat menyebabkan banjir disekitar, sehingga menyebabkan gagal tanam (pepaya, jagung, cabe, sayuran dan lain-lain) bagi masyarakat sekitar, ujar bapak Gunawan kepada Tim P3RIRRWANS Bappenas usai shalat ashar disebuah masjid di daerah Krueng Sabee, Aceh Jaya.



Demikian juga dengan kegiatan bantuan pembangunan WC tanpa ada septic tank kepada masyarakat yang didanai oleh Oxfam, karena tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terbengkalai begitu saja dan tidak terpakai. Lain halnya dengan bantuan dari BRR untuk peningkatan ekonomi masyarakat tani, dengan kegiatan pemberian pupuk. Namun masyarakat malah menjualnya untuk biaya hidup sehari-hari.

Gunawan yang berprofesi sebagai pedagang eceran di sebuah ruko (rumah toko) di daerah Krueng Sabee menyampaikan hendaknya ada verifikasi terlebih dahulu terhadap bantuan apa saja yang diberikan, sehingga tidak dinilai sia-sia.

Masih banyak pembangunan lain yang dinilai sia-sia, seperti pembangunan pusat air di Pucok Pante Kleun oleh NGO Merlin. Padahal masyarakat di desa tersebut kelebihan dengan sumber air yang telah ada, karena terletak di dataran tinggi.

Harapan dari beliau, hendaknya ada percepatan pelaksanaan pembangunan menjelang berakhirnya BRR di Aceh Jaya, terutama dalam penyelesaian perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dasar yang baik, infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana fasilitas masyarakat umum lainnya.



Desa Lueng Tata Luah yang menjadi salah satu sampel untuk Kabupaten Aceh Jaya merupakan desa dengan perencanaan dan koordinasi yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kunjungan lapangan oleh Tim P3B Bappenas, dimana banyak prasarana yang dibangun tidak bisa dimanfaatkan. Pembuatan saluran pembuangan dan gorong-gorong juga tidak dapat berfungsi dengan baik dan air tidak dapat mengalir. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan fatalnya dapat menyebabkan gagal tanam bagi masyarakat sekitar. Bantuan pembangunan WC kepada masyarakat yang didanai oleh Oxfam juga dilakukan tanpa ada septic tank.

Merduati, Keberhasilan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Ditinggalkan

Desa Merduati, daerah permukiman elit di Banda Aceh dengan rumah-rumah besar dan penduduk yang hidup berkecukupan. Namun saat tsunami datang menjadi salah satu daerah yang paling parah terkena dampak dimana hampir 75% penduduknya hilang. Sehingga pada awal pelaksanaan rehabilitasi dibutuhkan waktu hampir 9 bulan untuk mengumpulkan lagi warga yang selamat karena pada umumnya mereka tersebar pada tempat-tempat pengungsian ataupun menumpang dirumah sanak famili yang jauh dan aman.

Evi Juwita adalah salah seorang warga Merduati yang menjadi korban, suami dan anaknya hilang akibat tsunami juga kehilangan rumah dan usahanya hancur. Namun hal tersebut tidak membuat Evi putus asa, dengan keberanian dan pengetahuannya dibidang akutansi, Evi menjadi koordinator kelompok. Selain membangun kembali rumahnya, Evi mengatur kerjasama dengan kelompok-kelompok warga yang selamat dan tinggal kembali di tenda. Bersamaan mereka membersihkan lahan, memancang tanah dan mengadakan pertemuan-pertemuan.



Dalam proses masyarakat, dibutuhkan keahlian. Evi menjadi penggerak kelompok dan sebagai koordinator kelompok Evi membuat anggaran kelompok, menyusun daftar harga barang dan pemasok, merekrut tukang dan bekerjasama dengan fasilitator UN - Habitat. Evi juga membuka warung kecil dan memasak bagi para tukang untuk menambah pendapatan. Ketika rumahnya hampir selesai, Evi kemudian menjadi kontraktor kecil yang menangani disain bangunan, persiapan proyek, koordinasi pembangunan dan lain-lain bagi kelompok-kelompok lain dilingkungannya. Dengan kegigihan dan semangat untuk terus belajar, dari kakaknya yang arsitek, Evi belajar cara menangani masalah konstruksi dan mencatat rincian kebutuhan bahan bangunan.



Saat ini desa Merduati telah kembali hidup, Evi telah membantu meletakkan fondasi bagi keluarga dan usaha baru. Namun sayangnya setelah proses pembangunan selesai, banyak warga enggan untuk menempati rumah yang sudah mereka bangun sendiri, dikarenakan trauma yang masih belum hilang, sehingga banyak dari warga yang memilih untuk pindah ke daerah lain yang lebih aman dibandingkan tetap tinggal di sana. Rumah-rumah yang sudah dibangun oleh pemiliknya lebih banyak dikontrakkan kepada pendatang yang bekerja

disekitar desa Merduati ataupun ditempati oleh sanak keluarga mereka yang datang ke Banda Aceh. (sumber: Buku *Anchoring Homes –UN-Habitat*, hasil wawancara tim P3RIRRWANS Bappenas)

∞∞∞∞

Pembangunan perumahan di Desa Merduati, Banda Aceh merupakan pembangunan yang dianggap cukup berhasil, walaupun tidak banyak warga yang mau kembali menempati rumahnya karena trauma yg belum juga hilang. Pembangunan dilakukan melalui pendekatan community based dengan filosofi dasar *people process*, dimana masyarakat harus berada di bangku kemudi atau yang memegang kendali. Pembangunan perumahan ini difasilitasi oleh UN - Habitat sebagai *implemementing partner* UNDP Banda Aceh dalam program shelter. Warga ikut terlibat dalam pembangunan kembali perumahan, dibantu fasilitator dari UN - Habitat dengan membentuk kelompok pembangunan rumah (KPR) yang tiap kelompoknya dipimpin oleh seorang Koordinator.

Ada juga komentar yang dikutip dari www.serambinews.com tanggal 3 April 2009, yang isinya adalah sebagai berikut : “Menurut Sayed Fuad Zakaria, Ketua DPR Aceh “Untuk Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) tahap I, sudah disalurkan pada pengujung tahun 2008 kepada 41.938 penerima, sebesar Rp 2,5 juta per kepala keluarga (KK). Dijanjikan saat itu, sisanya sebesar Rp 7,5 juta lagi akan dibayarkan pada Maret 2009. Untuk tahap II senilai Rp 7,5 juta lagi per KK, dulunya dijanjikan akan dibayar paling lambat awal Maret 2009. Tapi sampai minggu pertama April 2009, belum juga ada tanda-tanda dana BSPR tahap II itu dibayar. Saat bertemu dengan Kepala BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto minggu lalu, ia sempat menanyakan ikhwal BSPR tahap II tersebut. Kuntoro menjawab bahwa dana BSPR tahap II Rp 314,5 miliar telah dialokasikan dan dimasukkan ke dalam sisa anggaran BRR yang akan dikelola BKRA dengan total nilai Rp 1,6 triliun.”

IV.1.4.2 Bidang Infrastruktur

Berdasarkan LAKIP BRR Tahun 2008, dikehui bahwa Kinerja hasil (outcome) rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur

1. Sub bidang telekomunikasi, akses telepon selular merata di setiap kabupaten di Aceh mencakup ± 35 % rumah tangga
2. Sub bidang listrik, 97 % rumah tangga mendapat aliran energy listrik
3. Sub bidang pengelolaan sampah/limbah, lebih dari 36 km pengaman pantai, 21 km tanggul air asin telah dibangun, 17.672 m3 limbah kayu ditampung untuk dimanfaatkan lagi, 2,5 juta m3 kayu telah di daur ulang sehingga dapat dimanfaatkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat NAD-Nias, diketahui dampak/manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kehidupan masyarakat penerima mafaat untuk bidang infrastruktur yaitu sumber daya air terutama pada kebutuhan air bersih dan manfaat pengelolaan persampahan.

AIR BERSIH, KEBUTUHAN YANG TERABAIKAN

Air bersih yang lazim digunakan dan dibutuhkan oleh seluruh manusia di bumi ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Patek merupakan desa yang menjadi salah satu bagian terkecil dari wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang masih kekurangan terhadap air bersih. Padahal air bersih di desa Patek sangat dibutuhkan, selain sebagai kebutuhan sehari-hari, namun dibutuhkan sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan interaksi sosial bermasyarakat.

Hal ini diutarakan oleh Jalaluddin yang merupakan warga asli Desa Patek yang merupakan salah seorang saksi hidup pada peristiwa gempa dan tsunami pada 24 Desember 2005 yang lalu. Berprofesi sebagai nelayan merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh Jalaluddin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ia termasuk salah satu penerima rumah batuan korban tsunami dari lembaga Palang Merah Indonesia (PMI). Namun dari rumah bantuan yang diperoleh oleh Jalaluddin, paket rumah tersebut belum termasuk adanya air bersih yang langsung dapat digunakan. Walaupun telah dibangun jaringan untuk aliran air, namun belum berfungsi dengan baik. Sehingga permasalahan tentang kebutuhan air bersih di Desa Patek belum tertanggulangi hingga Oktober 2008. Ujar Jalaluddin kepada Syathiri salah seorang tim P3RIRRWANS Bappenas saat bertugas.



Selain lembaga PMI, sebuah badan yang merupakan bagian dari PBB yaitu UN Habitat juga berperan dalam pembangunan perumahan di Desa Patek. Disamping itu ada juga Yayasan OBOR Indonesia. Bapak Jalaluddin menyampaikan, "masyarakat sekarang sangat membutuhkan sebuah Mushalla yang sebelum telah hancur oleh Tsunami". Padahal masyarakat telah menunggu lama untuk terbangunnya sarana ibadah tersebut, saat ini akhirnya masyarakat secara swadaya melaksanakan pembangunan tersebut. Disamping pembangunan rumah juga yang masih terus berjalan. PMI di Desa Patek juga merencanakan akan melaksanakan kegiatan "pugar gampong" untuk melengkapi prasarana dasar (jalan dalam desa) yang masih dibutuhkan di desa tersebut.

Pada desa tempat Jalaluddin melaksanakan usaha barunya yaitu "warung nasi" telah terbangun beberapa bangunan yang merupakan dampak positif dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti adanya kantor lurah, sekolah dasar yang dibangun oleh UNICEF, termasuk puskesmas yang sebelumnya belum pernah ada di Desa Blang Dalam. Namun pembangunan tersebut tidak didukung dengan terlaksananya jalan pendukung yang layak. UN Habitat dan Yayasan OBOR juga pernah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Harapan Jalaluddin terhadap pembangunan yang telah dibangun, hendaknya NGO yang melaksanakan pembangunan tersebut atau BRR melengkapi dengan prasarana dasar seperti air bersih, jalan dalam desa, dan lain-lain. Termasuk memohon agar diperbaiki bangunan yang belum ditempati, yang kenyataannya telah rusak, seperti retak-retak pada dinding dan lantai sebelum serah terima kepada masyarakat Blang Dalam. Seperti halnya perumahan yang dibangun oleh ACT di Desa Kampong Baro dan juga Blang Dalam telah diserahkan lengkap dengan sertifikat kepada masyarakat.

Keinginan lain dari Jalaluddin agar segera terselesaikannya proses sertifikasi pemilik rumah baik di Desa Patek maupun di Blang Dalam. Kerena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BRR yang belum tercapai.



MENGAIS REJEKI KE GAMPONG JAWA



Pagi-pagi sekali 4 orang Ibu Asni, Farida, Ainal Mardiah dan Eli Riani berangkat dari rumah mereka di perumahan Budha Suci, desa Neheun menuju Gampong Jawa yang jaraknya cukup jauh, memakan waktu sekitar 2 jam dan berganti kendaraan sebanyak 3 kali untuk mensortir plastik-plastik bekas yang akan diolah kembali pada Program Pengumpulan Sampah dan Daur Ulang Plastik yang dikelola oleh LSM lokal Palapa Plastic Recycle (PPR) dibawah program Waste Management UNDP Banda Aceh.

Setiap harinya selama 3 tahun setelah tsunami, ke-empat Ibu tersebut melakukan pekerjaannya mulai dari jam 09.00-17.00

WIB dengan target perharinya, yang mereka tentukan sendiri, minimal 35 kilogram sampah plastik

yang harus mereka sortir. Alasan mereka sangat sederhana, bila kurang dari berat minimal yang mereka tetapkan, hasil yang mereka dapat tidak menutup biaya operasional sehari-hari untuk ongkos dan makan dan tidak ada uang lebih yang bisa mereka bawa pulang untuk keluarga. Begitu sederhana, tetapi membuat miris hati yang mendengarnya.

Rata-rata harian yang mereka peroleh bila mencapai berat minimal adalah Rp. 30.000,-, setelah dipotong ongkos dan makan hanya tersisa Rp. 10.000,-. Namun penghasilan mereka perharipun tidaklah stabil, selain hitungan per-kilo yang selalu naik turun, juga tergantung dari kecepatan mereka dalam melakukan penyortiran maupun jumlah sampah plastik yang masuk per harinya yang sangat fluktuatif. Sehingga tidak jarang sudah jauh-jauh datang dari Neheun, ternyata tidak ada sampah yang bisa disortir sehingga akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa dan harus "nombok" ongkos perjalanan pulang pergi.

Pihak pengelola memberikan alternatif pengerjaan penyortiran dilakukan di rumah sehingga penyortir tidak perlu datang ke lokasi penampungan sampah. Pengelola mengirimkan sampah-sampah plastik tersebut dan dijemput kembali setelah selesai disortir. Tetapi menurut Ibu Eli hal tersebut tidaklah efektif karena pendapatan yang mereka peroleh dengan mengerjakan di rumah jauh lebih kecil, selain harus menyortir sampah plastik mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Belum lagi mereka harus mengeluarkan uang tambahan untuk kendaraan pengantar, minimal Rp. 10.000,- per orang untuk sekali pengiriman.

Bagi mereka tidak ada pilihan selain bekerja di Plastic Recycle dikarenakan mereka tidak memiliki keahlian dibidang lain. Rata-rata mereka adalah ibu rumah tangga yang berusaha membantu meringankan beban keluarga. Harapan mereka adalah pihak pengelola lebih memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan tunjangan kesehatan, meralisasikan program beasiswa yang pernah dijanjikan serta menstabilkan harga sampah plastik hasil sortir. (*sumber: hasil wawancara tim P3RIRRWANS Bappenas*)

IV.1.4.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Setelah gelombang tsunami menggulung Kota Banda Aceh sekitar empat tahun lalu, saat ini menunjukkan sudah adanya geliat kehidupan masyarakat yang mulai marak. Lihat saja di wilayah tersebut yang sudah maraknya kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan masyarakat korban bencana sudah mulai merasakan dampak yang positif dari hasil proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa kegiatan masyarakat antara lain dapat dilihat pada kegiatan rutin pengajian anak-anak, Musabaqah Tolawatil Qur'an (MTQ) dan festival budaya daerah. Sebagai gambaran maraknya aktifitas tersebut dapat diamati pada beberapa foto kegiatan yang berhasil diobservasi oleh Tim P3B Bappenas di lapangan.



Sore hari selepas Ashar anak-anak usia sekolah dasar dengan diantar oleh orang tua mereka, mengikuti pelajaran mengaji di Masjid Polri Banda Aceh. Dengan suara lantang khas anak-anak, bersama-sama mengulang bacaan shalat sambil mengikuti gerakan Ibu guru yang menirukan gerakan orang shalat. Pembekalan sejak usia dini diberikan sebagai pondasi masyarakat yang akhlakul karimah.

Festival Budaya Daerah yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh di Taman Sari merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam melestarikan seni budaya daerah dan menjadikan kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia





MTQ ke 30 se Kota Banda Aceh yang dilaksanakan di Masjid TGK Dikandang, Desa Merduati Banda Aceh sebagai salah satu perwujudan menjadikan kota Banda Aceh Bandar Wisata Islami yang berwawasan Kalam Ilahi.

sumber: hasil observasi lapangan tim P3RIRRWANS

IV.1.4.4 Bidang Perekonomian

Tsunami Membawa Berkah



Bapak Rusli telah berjualan mie kepiting sejak tahun 1992. Awalnya beliau berjualan di Pasar Lhok Nga, kemudian di tahun 1996 beliau membangun toko yang tersambung dengan rumahnya. Pada saat Tsunami beliau selamat karena sedang berbelanja di pasar tetapi saying istrinya hilang. Setelah Tsunami, bulan Agustus 2005, beliau berjualan kembali di tanahnya sendiri dengan menggunakan tenda, disaat masih sangat sedikit orang yang berani datang ke daerah Lampu'uk. Beliau baru membangun rumah dan tokonya yang

setengah permanen (setengah keatas ditembok dan setengah kebawah hanya dari kayu) dengan bantuan dana donor dari Jengala pada Oktober 2007.

Dilihat dari omzet penjualan sebelum dan sesudah Tsunami, ternyata beliau mendapat lebih besar pendapatan setelah Tsunami. Lebih banyak orang yang mengetahui tempat usaha beliau pada tahun pertama dan kedua setelah Tsunami, khususnya para donor, NGO, maupun visitor dari luar kota dan luar negeri. Sayangnya tahun ini karena sudah banyak donor dan NGO kembali ke negaranya, pelanggan beliau menjadi sedikit berkurang.

IV.1.4.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Dalam bidang kelembagaan di tingkat desa, berikut terdapat petikan ungkapan suara warga desa Srak Mo dalam pengalamannya hidup bersama masyarakat setelah 3 tahun pasca tsunami. Ilustrasi cerita berikut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah ditingkat daerah maupun pusat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

IV.2 Aspek Koordinasi

Aspek koordinasi merupakan interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD-Nias. Evaluasi yang dilakukan pada aspek koordinasi ini adalah melalui: Mekanisme *koordinasi dalam penyusunan perencanaan* pada BRR, Donor/ NGO, Pemda Provinsi NAD dan Pemda Kepulauan Nias Provinsi Sumut; dan mekanisme *koordinasi dalam pelaksanaan* pada BRR, Satuan Kerja (Satker), Pemda Provinsi NAD dan Pemda Kepulauan Nias Provinsi Sumut, dan Donor/NGO.

BERMASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEMBAGA DESA

Keaktifan seorang pemimpin desa di dalam suatu permukiman akan sangat menentukan berkembang atau majunya sebuah desa dengan desa lain dalam suatu kecamatan. Keaktifan tersebut dapat diwujudkan dalam : aktif dalam menyuarakan aspirasi warganya; rajin hadir dalam forum-forum ditingkat desa maupun kecamatan; termasuk keaktifan bermasyarakat dan berinteraksi dengan warganya dalam musyawarah dan mufakat (bagi pemimpin desa).

Geuchik Gampong Srak Mo atau kepala Desa Srak Mo yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Jaya, dinilai sangat kurang aktif (lamban) dalam menyuarakan aspirasi warganya, sehingga beberapa pulang bantuan yang akan diberikan oleh NGO maupun lembaga asing lainnya akhirnya singgah kedesa sebelah. Kekecewaan ini diungkapkan oleh Rasyidah, salah seorang warga telah lama tinggal di Desa Srak Mo yang sebelumnya berasal dari Desa Lamno, Kecamatan Jaya.

Sebagai salah satu korban yang selamat pada peristiwa Tsunami yang lalu, disamping kekecewaan tersebut beliau juga mengungkap kegembiraan atas dibangunnya tempat tinggalnya oleh PMI dan rumah penduduk sekitar oleh BRR diwilayah sekitarnya. Sambil berdagang bahan-bahan kebutuhan rumah tangga pada kios yang bersebelahan dengan tempat tinggal, beliau menyampaikan sedikit cerita selama berlangsungnya rehabilitasi dan rekonstruksi di desanya.



Rasyidah bersama suaminya yang merupakan warga asli Desa Srak Mo mengungkapkan kegembiraannya dengan ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, misalnya, dia dapat menempati rumah barunya, dapat berdagang dan mempunyai usaha sendiri, desanya telah memiliki Puskesmas yang bagus, serta meningkatnya alternatif untuk mata pencaharian masyarakat Srak Mo seperti adanya PT.Totalindo, PT.Sawit dan perusahaan-perusahaan lain yang merekrut tenaga lokal. Padahal sebelumnya masyarakat hanya berkebun karet, rambutan dan mangga sebagai mata pencaharian pokok. Bahkan sekarang ini suami Rasyidah telah bekerja di Totalindo, yang merupakan salah satu konsultan yang ikut membangun perumahan di Desa Srak Mo.

Namun demikian, Rasyidah tidak dapat menyimpan kekecewaannya terhadap pembangunan perumahan didesa ini yang belum dilengkapi adanya sarana air bersih, termasuk air sumur yang tidak layak dipergunakan. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat harus membeli air ke Desa Lhok Kruet yang berjarak kurang lebih 3 kilometer untuk kebutuhan minum dan konsumsi sehari-hari.

Selain prasarana dasar tersebut, ibu rumah tangga ini menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakaktifan kepala desa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sehingga bila ada bantuan untuk penguatan ibu-ibu PKK di desa, seperti bantuan piring atau peralatan PKK, maka untuk Desa Srak Mo tidak mendapat bagian karena tidak ada kegiatan-kegiatan rutin desa yang dilaksanakan. Demikian juga hal dengan perabot untuk penghuni rumah baru, hal ini telah dijanjikan oleh pihak PMI namun belum kunjung tiba hingga saat ini, ujar beliau kepada Syathiri Tim P3RIRRWANS Bappenas saat diwawancara.

IV.2.1 Mekanisme Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan

Terdapat beberapa forum koordinasi dalam penyusunan perencanaan dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda pada setiap forumnya. Koordinasi yang dimaksud adalah, dari yang sekadar berbagi informasi, menjadi menyusun langkah-langkah strategis bersama yang serealistik mungkin. Selain Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias (Coordination Forum for Aceh and Nias, CFAN), Pertemuan Pemangku-kepentingan Kepulauan Nias (Nias Islands Stakeholder Meeting, NISM), atau Tim Terpadu, diciptakan pula kepemimpinan di tingkat daerah/regional, antara lain melalui pengimplementasian sekretariat bersama (Sekber) dan regionalisasi.

A. Musrenbang

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) merupakan wadah untuk menyatukan berbagai perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat, desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Perencanaan ini dimulai dari bawah (bottom up) yang melibatkan seluruh unsur dan kelompok masyarakat penerima manfaat dari pembangunan yang akan dilakukan. Seperti Musrenbang Tahun 2008 di Aceh yang bertema mewujudkan Perencanaan yang Partisipatif, Fokus, Sinergis, Berkelanjutan, Merata, dan Berwawasan Lingkungan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada 4 (empat) proses perencanaan, yaitu: **Proses Politik**, Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*publik choice theory of planning*) Khususnya dalam penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM; **Proses Teknokratik**, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan terutama dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana; **Proses Partisipatif**, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (*stake holders*) sebagaimana halnya pelaksanaan Musrenbang; dan **Proses Bottom-Up dan Top-Down**, Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN	
NASIONAL	DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL)	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Sumber: Paparan Direktur KKDT, Bappenas, 2008	

B. CFAN

CFAN (Coordination Forum for Aceh Nias) adalah forum tingkat tinggi tahunan yang mengajak seluruh mitra pemulihan, donor, LSM lokal dan internasional, pemerintah daerah dan pusat serta pemangku kepentingan lainnya- yang bekerja untuk pemulihan, untuk membahas bersama tentang kemajuan pemulihan dan berbagai tantangan yang menghambat pemulihan. Sejak awal, setiap tema yang diusung CFAN terfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan para mitra pemulihan di masa itu. Forum kolaborasi ini menyediakan wadah yang pening untuk menciptakan kebijakan-kebijakandan strategi kreatif guna memastikan percepatan kemajuan pemulihan.

- CFAN 1 - Diadakan pada bulan Oktober 2005, CFAN pertama yang mengajak seluruh komunitas rekonstruksi untuk sama-sama mengidentifikasi isu apa yang paling bermasalah dan tantangan apa yang paling menghambat pelaksanaan rekonstruksi. Melalui dialog, beberapa solusi segera diwujudkan seperti Tim Terpadu, atau "Tim Satu Atap", untuk mempercepat proses imigrasi dan pabean yang diperlukan untuk menjamin jasa pengiriman barang lebih cepat bagi organisasi internasional yang mengirimkan bantuan.
- CFAN 2 – Berlangsung pada bulan Mei 2006. Melalui Rapat-rapat Teknis dan Forum Tingkat tinggi, inti masalah adalah perlunya desentralisasi operasional dan pengambilan keputusan bersama untuk menangani isu-isu lintas sektoral seperti gender dan lingkungan yang diangkat ke permukaan. Kemudian membentuk kelompok tematik untuk fokus pada isu-isu lintas sektor sebagai basis serta mendirikan kantor-kantor regional BRR.

- CFAN 3 - Berlangsung pada paruh waktu dari mandat BRRdi bulan April 2007. Terfokus pada tiga sektor utama yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi dan pembangunan-bersamaan dengan isu-isu lintas sektoral yang teridentifikasi pada CFAN terdahulu. CFAN 3 bertujuan untuk mengumpulkan keseluruhan laporan rekonstruksi dengan Tim BRR Mid Term Review, mengidentifikasi isu-isu yang beredar dan cara memecahkannya.

C. NISM

Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) merupakan pertemuan tahunan yang diprakarsai oleh BRR Perwakilan Nias. Pertemuan ini adalah pertemuan tahunan antar lembaga lembaga Nasional dan Internasional untuk merumuskan rencana aksi pengurangan resiko bencana menuju masyarakat Nias yang siaga bencana serta untuk merumuskan rencana kerja bagi pengembangan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak empat kali berturut-turut sejak tahun 2005.

- NISM 1 dilaksanakan pada 6 Desember 2006 di Jakarta. Keberhasilan melaksanakan pertemuan stakeholder khusus mengenai Nias ini merupakan awal yang baik untuk meningkatkan perhatian donor dan masyarakat internasional terhadap dampak bencana dan masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah kepulauan Nias.

Melalui NISM 1, untuk pertama kali dalam forum yang dihadiri oleh hampir seluruh negara dan lembaga donor, BRR Perwakilan Nias menyampaikan tantangan dan peluang untuk dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias. Pelaksanaan NISM 1 itu sendiri telah membawa Nias ke suatu tahap yang lebih tinggi. Dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi, Nias telah memiliki forum stakeholder tersendiri dan sekaligus menjadikan Nias, suatu daerah yang kurang dikenal menjadi suatu wilayah yang berada dalam sorotan mata dan hati pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional.

- NISM 2 dilaksanakan pada 16-17 Januari 2006 di Gunungsitoli Nias. Akomodasi yang terbatas di Nias menyebabkan banyak tamu kesulitan mendapatkan tempat menginap. Ruang pertemuan yang tidak memadai memaksa pertemuan kelompok diadakan secara darurat di beberapa lokasi terbuka. Kesulitan para peserta bahkan telah dimulai dari Medan, ketika hendak ke Nias. Tidak mudah mendapatkan penerbangan ke Nias, karena pesawat reguler terbatas, dan walaupun dapat perbangan terpaksa dibatalkan karena cuaca yang buruk di Nias. Keterbatasan ini memberikan kesan nyata kepada seluruh peserta mengenai tantangan-tantangan yang telah disampaikan pada NISM 1. Tujuan yang hendak dicapai yaitu agar komitmen yang telah disampaikan dapat direalisasikan dan bahwa seluruh stakeholder perlu segera menetapkan action plan untuk secara bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang riil dihadapi dalam proses pemulihan Nias.

NISM 2 menghasilkan Action Plan 2006 yang antara lain menetapkan perlunya pemberian otonomi yang lebih luas kepada kantor BRR di Nias karena akan memberikan keuntungan: 1) memperpendek jalur dan proses pengambilan keputusan, 2) BRR akan semakin dekat kepada masyarakat, 3) menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal dan dapat dengan segera mengadakan sumber daya untuk memenuhinya, 4) membawa lingkup koordinasi ke tataran kabupaten sebagai unit administrasi yang otonom, yang pada hakekatnya membawa koordinasi pelaksanaan konstruksi semakin dekat pada desa dan kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan rekonstruksi, dan 5) meminta kepada semua mitra rekonstruksi BRR di Nias agar juga melakukan desentralisasi sehingga keputusan-keputusan dapat diambil segera bersama dengan BRR di Nias.

- NISM 3 dilaksanakan pada 8 Maret 2007 di Jakarta. Pertemuan yang dilaksanakan pada paruh waktu rehabilitasi dan rekonstruksi Nias ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan rekonstruksi yang telah berjalan selama 2 tahun serta menetapkan target-target dan rencana

kerja baru sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan skenario pembangunan pasca rekonstruksi di masa depan. Pada NISM 3 ini ditegaskan arah rekonstruksi Nias yang menggunakan 4 pilar dan 10 program utama rekonstruksi sebagai platform rekonstruksi.

- NISM 4 dilaksanakan di Medan Sumatera Utara pada 15 Mei 2008 dan merupakan NISM terakhir.

Pertemuan ini menekankan pentingnya persiapan pengakhiran masa tugas BRR dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta peran pemerintah daerah dalam proses pemulihan selanjutnya.

Dalam rangka mengembangkan proses transisi yang baik untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan, maka dikembangkan 3 aspek perhatian: Pertama, perlunya kesepakatan mengenai lembaga selama masa transisi. Kedua, bagaimana menerapkan strategy pengurangan resiko bencana (DRR) ke dalam kebijakan dan program Pemda. Ketiga, dukungan pengembangan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan.

Forum NISM 4 juga membicarakan perlunya institusi pengganti BRR untuk penanganan koordinasi selama masa transisi. Terkait hal ini, atas usulan Pemkab Nias, forum NISM 4 menyimpulkan, perlunya kejelasan mengenai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat pada tahun 2009.

Sedangkan mengenai pengakhiran masa tugas rehabilitasi dan rekonstruksi dibicarakan perlunya pengembangan mekanisme yang lebih jelas dalam kerangka penyerahan asset dari BRR/Donor kepada penerima manfaat, dan tentang bagaimana tanggungjawab berkelanjutan dari BRR/Donor. Dalam hal ini dipandang penting dipertimbangkan mengenai ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan asset.

Berkaitan dengan penerapan DRR ke dalam platform pembangunan daerah, forum menyepakati untuk menyiapkan Nias DRR Action Plan untuk mengkoordinasikan program ke dalam 4 hal, yang perlu segera dikeluarkan sebelum berakhirnya mandat BRR. Pertama, peningkatan kapasitas terkait pengurangan resiko bencana bekerjasama dengan organisasi-organisasi komunitas lokal. Kedua, peningkatan kesadaran dari penduduk lokal terkait ancaman bencana dan pengurangan resiko. Ketiga, membangun budaya selamat melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Keempat, pengembangan aktivitas lokal community-based dalam pengurangan resiko bencana, persiapan menghadapi bencana serta up to date warning systems.

Sedangkan mengenai pengembangan ekonomi dan sumberdaya manusia, forum menyepakati perlunya memasukan dalam action plan suara dari stakeholder lain yang selama ini tidak dilibatkan. Pertama, peran dari industri perbankan dan sector swasta lainnya. Selain itu, pimpinan adat dan komunitas/agama. Faktor eksternal lainnya perlu juga mendapat perhatian, seperti isu lingkungan dan kebudayaan, yang mana persepsi komunitas lokal dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

D. General Coordination Meeting

General Coordination Meeting merupakan forum dimana BRR dan para mitra rekonstruksi duduk bersama untuk membicarakan isu dan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan rekonstruksi di Kepulauan Nias. Forum ini dipimpin secara bersama oleh BRR dan UNORC dan hanya membicarakan agenda-agenda umum dan lintas sektor.

Dua topik yang sering dibahas di dalam forum General Coordination Meeting adalah masalah keamanan dan kerjasama dengan aparat pemerintah mulai dari tingkatan desa hingga kabupaten. Kedua isu tersebut sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan rekonstruksi terutama yang dilakukan oleh badan atau organisasi non-BRR.

Pada periode awal pelaksanaan rekonstruksi, keluhan berupa sulitnya bekerjasama dengan aparat pemerintah sering menjadi agenda utama General Coordination Meeting. Sejalan dengan pelibatan pemda dalam berbagai rapat sektoral, maka keluhan-keluhan tersebut semakin jarang terdengar.

E. Sekretariat Bersama (Sekber) BRR

Sekretariat Bersama (Sekber) yang merupakan bentukan dari BRR NAD-Nias yang fungsinya untuk koordinasi dan sinkronisasi program dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekber ini berada mulai pada tingkat distrik hingga regional di Aceh dan di Nias. Adapun tugas Sekretariat Bersama adalah:

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan rekonstruksi.
- Menyediakan dan menyebarkan informasi tentang kemajuan rekonstruksi.
- Melibatkan Pemerintah Kabupaten secara luas dalam proses rekonstruksi.
- Menyiapkan dan melengkapi Pemerintah Kabupaten dengan kapasitas manajemen untuk menjadi lembaga profesional dalam pembangunan wilayah di masa depan.

Koordinasi perencanaan dimulai sejak 2006 ketika indikasi program rekonstruksi BRR dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diketahui dan diselaraskan. Koordinasi perencanaan secara lebih intensif dilakukan menjelang Tahun Anggaran 2007 ketika BRR mulai mengikuti mekanisme Musrenbang. Forum konsultasi secara luas dengan pemerintah, dinas teknis dan perwakilan masyarakat dilakukan sekitar Oktober 2006 untuk memantapkan program rekonstruksi 2007 yang kompatibel dengan RAPBD 2007.

Mekanisme ini kemudian difasilitasi secara lebih baik oleh Sekretariat Bersama pada periode pemrograman 2007 menuju 2008 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2009 pada semester kedua 2008.

IV.2.1.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang melibatkan BRR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Donor/NGO ataupun stakeholder terkait lain, diantaranya Musrenbang, Sekber, NISM, dan lain-lain. Koordinasi para stakeholder juga dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas terkait dengan bidang perumahan dan permukiman :

Tabel 4. 37
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
Provinsi NAD	• IFRC NAD : Seiring dengan pembangunan rumah, PNS's juga melakukan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait dalam menangani masalah faktor lingkungan seperti listrik, air, drainase dan lain-lain. • PMI NAD : PMI dan PNS's melakukan koordinasi dengan Asisten II Aceh Besar dalam merencanakan suatu kegiatan, mialnya dalam pembangunan Water and Sanatation termasuk pembuatan septictank, drainase, sumur bor yang dibiayai oleh AmCross, Germany RC dan Norwegian RC. • UN-Habitat : Sejak awal UN-Habitat sudah banyak bekerjasama dengan BRR, membantu di housing policy advisor, membantu membuat draf kebijakan untuk masalah permukiman. UN Habitat menggunakan sistem community base, dalam menangani masalah perumahan dan permukiman, banyak organisasi yang meragukan sistem ini, karena filosofi dasarnya adalah people processed (masyarakat harus di bangun kemudi, yang pegang kendali) sedangkan issue yang paling logis pada saat itu adalah membangun rumah sebanyak-banyaknya dan mendatangkan kontraktor sebanyak-banyaknya. UN Habitat juga melakukan kerjasama dengan BPN pada saat partisipatif plan mapping dengan masyarakat yang selamat dan masih

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
	ingat batas-batas tanah. • Deputi Bidang Operasi BRR : Peran lembaga donor sangat berarti dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, namun ada juga yang kurang konsisten dalam programnya seperti : World Bank dengan program RALASnya. • Dinas Bina Marga dan Cipta Kaya Provinsi NAD : Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan antara Dinas dengan BRR maupun Donor/NGO kurang intensif. Dasar perencanaan BRR yaitu mereka memegang master plan Dinas, dan Dinas menanggapi rehabilitasi dan rekonstruksi di luar perencanaan BRR.
Aceh Jaya	• BRR Aceh Jaya : Selain koordinasi dengan Sekber, terdapat Tim Vertib (verifikasi dan penertiban), yang dipimpin oleh wakil bupati. Tim ini bertugas untuk koordinasi dan validasi terhadap beneficiary bantuan perumahan, termasuk terhadap verifikasi sisa bantuan rumah yang masih dibutuhkan pada tahun 2009 oleh korban tsunami.
Aceh Besar	• Dinas Kimpraswil Aceh Besar : Untuk kegiatan infrastruktur jalan dan perumahan koordinasi perencanaan terjalin dengan baik, karena anggota Satker untuk kegiatan tersebut adalah pegawai Dinas Kimpraswil, sehingga ada laporan terhadap perkembangan yang terjadi. • Kepala Desa Meunasah Cut, Lampuuk, Kecamatan Lhoknga : Beberapa warga ikut terlibat dalam proses pembangunan rumah dengan donor, mulai dari perencanaan (seperti ukur - mengukur tanah) sampai kepada pengawasan. • Warga Desa Blang Krueng, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar : Dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah ini, warga kurang dilibatkan.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

IV.2.1.2 Bidang Infrastruktur

Koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur melibatkan Kementerian/Lembaga (terutama Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan), Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga Donor/NGO, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya (PT PLN, Pertamina, Telkom, dan lain sebagainya). Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2008 misalnya melalui Musrenbang, Sekretariat Bersama, CFAN, NISM, *Steering Committee* MDF, forum dengar pendapat SKPA, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait koordinasi dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 38

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
Provinsi NAD	• Koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Pemda (khususnya Dinas Bina Marga dan Cipta Karya) dengan BRR maupun Donor/NGO kurang intensif. BRR maupun Donor/NGO tidak memberikan pelaporan secara rutin. • Donor IFRC melakukan koordinasi dengan PMI NAD dalam perencanaan, kemudian PMI berkoordinasi dengan Keuchik di masing-masing daerah yang akan dijadikan target rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun kadang2 anggota IFRC/national societies/PNS's ada yang tidak berkoordinasi dengan IFRC maupun PMI. Koordinasi IFRC dengan BRR dalam perencanaan dilakukan melalui meng-input perencanaan ke dalam RAN database • Dalam perencanaan, USAID berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi NAD serta BRR bidang infrastruktur untuk membahas mengenai <i>alignment</i> jalan, namun yang menentukan spesifikasi jalan adalah Parson-USAID. Selain itu terdapat <i>outreach team</i> serta <i>environmental team</i> yang saling berkoordinasi dengan konsultan jalan untuk desain. Tim tersebut juga berkoordinasi dengan masyarakat dan membahas permasalahan dengan masyarakat setempat.
Banda Aceh	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda) berkoordinasi dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Sekretariat Bersama.
Aceh Jaya	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda, Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan) berkoordinasi melalui Sekretariat Bersama. Tidak ada program/kegiatan yang tumpang tindih antara BRR, Pemda, dan Donor/NGO, karena bila sudah direncanakan oleh BRR/Donor/NGO maka Pemda tidak akan merencanakan lagi, melainkan fokus pada kegiatan lain. Permasalahan yang dihadapi adalah perwakilan dari BRR maupun lembaga Donor/NGO kurang aktif/rutin mengikuti pertemuan di Sekber

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
	Kadang-kadang terjadi tumpang tindih dalam pembangunan jalan, yang disebabkan oleh permasalahan administrasi, misalnya BRR sudah merencanakan, namun karena permasalahan administrasi kemudian menghambat pembangunan jalan, sehingga Bappeda menganggarkan melalui APBD, lalu BRR harus merevisi rencananya. Selain itu ada perencanaan Donor/NGO ada yang tidak diketahui oleh Pemda/BRR
Aceh Besar	- BRR dan Pemda (khususnya Bappeda, Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan) berkoordinasi melalui Sekretariat Bersama. Sinkronisasi antara program dan kegiatan Dinas dan BRR tidak akan tumpang tindih, karena Pemda sudah mengajukan kepada Sekber mengenai jalan dan jembatan yang harus ditangani oleh BRR dan Pemda. Sekber mengumpulkan usulan-usulan tersebut (<i>long list</i>) kemudian dipilih yang prioritas (<i>short list</i>.) - Donor/NGO berkoordinasi dalam perencanaan dengan Bappeda, bukan dengan Dinas terkait - Koordinasi ini pun didukung oleh sebagian staff Dinas bekerja di BRR Distrik Aceh Jaya maupun di Satker Jalan BRR - Koordinasi Dinas dengan Pemda Provinsi melalui Rakornis (setahun sekali) - Untuk sub bidang irigasi, koordinasi dinilai kurang sedangkan untuk sub bidang sanitasi dan pembuangan limbah tidak ada pembicaraan dalam perencanaan
Nias	BRR dan Pemda (khususnya Bappeda, Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan) berkoordinasi melalui Sekretariat Bersama
Nias Selatan	BRR dan Pemda (khususnya Bappeda dan Dinas Perhubungan) berkoordinasi melalui Sekretariat Bersama yang terjalin dengan baik walaupun belum optimal. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak semua SKPD diikutsetakan dalam tim Sekber, pada awal rehabilitasi dan rekonstruksi memang Dinas dilibatkan namun sekarang sudah jarang

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koordinasi untuk sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur antara **BRR, Pemda, dan Donor/NGO** mayoritas cukup efektif melalui Sekretariat Bersama (Sekber). Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih kegiatan di lapangan karena adanya pembagian tugas di antara para stakeholders tersebut. Mekanisme koordinasi perencanaan dalam Sekber diawali dengan *sharing* informasi dan *screening* proposal dari berbagai *stakeholders*, hal ini memudahkan dalam identifikasi prioritas bidang infrastruktur di masing-masing daerah. Selanjutnya berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih' (*short list/prioritas*). Dalam koordinasi perencanaan juga didukung oleh staf Pemda yang diperbantukan di BRR Distrik sehingga koordinasi semakin lancar. Dengan adanya koordinasi perencanaan terjalin sinergitas perencanaan program, peluang kerjasama antar *stakeholders*, serta pertukaran data/informasi terkait dengan usulan kegiatan.

Fungsi koordinasi Sekber saat ini sudah berjalan baik hanya saja belum optimal, misalnya adanya tumpang tindih pembangunan jalan di Kabupaten Nias Selatan, Aceh Jaya. Hal ini pun disebabkan karena tidak semua SKPD dilibatkan dalam Sekber, dan tidak rutinnya perwakilan dari BRR maupun Donor/NGO untuk menghadiri forum Sekber. Selain itu koordinasi dalam perencanaan belum memperhatikan kondisi daerah. Hal ini dapat dilihat pada terkonsentrasinya pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota besar atau daerah yang memiliki aksesibilitas jaringan jalan atau transportasi yang sudah baik.

Koordinasi perencanaan antara **Donor/NGO dengan Pemda** jarang terjadi, karena biasanya Donor/NGO langsung melakukan identifikasi dan pelaksanaan kegiatan langsung berdasarkan aspirasi masyarakat. Lain halnya koordinasi perencanaan antara **BRR dengan Donor/NGO** dilaksanakan melalui RAN *database*, yaitu Donor/NGO menyampaikan rencana kegiatannya melalui proposal proyek untuk selanjutnya disetujui BRR. Persetujuan ini melibatkan stakeholders terkait yang meliputi Pemda, tenaga ahli, dan sektor terkait.

Evaluasi koordinasi dalam penyusunan perencanaan berdasarkan sub bidang infrastruktur sebagai berikut.

- Jalan dan Jembatan.** Koordinasi penyusunan perencanaan jalan dan jembatan antara BRR, Donor/NGO dan Pemda terjalin dengan relatif baik. Pemda terlibat dalam pengajuan lokasi

ruas jalan dan jembatan yang perlu direhabilitasi/rekonstruksi terutama yang membutuhkan alokasi dana yang besar kepada BRR dan Donor/NGO, sedangkan Pemda membangun jalan dan jembatan dalam skala yang lebih kecil.

- **Perhubungan.** Dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang perhubungan ketersediaan alokasi dana Pemda sangat terbatas, oleh karena itu Pemda berkoordinasi dengan BRR dan Donor/NGO dalam pengajuan usulan rehabilitasi/rekonstruksi terminal, pelabuhan, bandara, airstrip, bandara kepada BRR dan NGO/Donor. Pemda turut mendukung dalam penyediaan sarana pendukung sub bidang perhubungan.
- **Sumber daya air.** BRR dan Donor/NGO melakukan koordinasi dengan PDAM daerah untuk pembangunan sumber air minum di berbagai kabupaten/kota. Untuk perencanaan pembangunan saluran irigasi dan pengendalian air, BRR dan Donor/NGO menyusun dokumen perencanaan dengan lokasi yang telah dikoordinasikan dengan Pemda serta melibatkan masyarakat. Pemda menjadi fasilitator untuk memberikan informasi teknis yang berguna bagi kepentingan perencanaan BRR.
- **Energi dan Listrik.** Perencanaan sub bidang listrik sebagian besar melibatkan PLN terutama dalam penyediaan jaringan transmisi-distribusi di wilayah pasca tsunami serta peningkatan kapasitas. Namun seringkali terjadi kendala, yaitu mendesaknya pemulihan energi listrik namun terbatasnya sumber daya listrik yang dipasok PLN sehingga dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan dan pengadaan pembangkit sumber daya listrik BRR belum dapat digunakan secara maksimal.
- **Pos dan telematika.** Koordinasi dalam perencanaan sub bidang pos dan telematika melibatkan BRR dengan PT.Telkom dan PT. Pos Indonesia yang sudah terjalin dengan baik.
- **Bangunan Fasilitas Umum.** Koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan publik (khususnya bangunan penyelamat/*escape buildings*) dilakukan secara terorganisir oleh BRR, Donor/NGO dan Pemda Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat. Pemda mengajukan usulan lokasi-lokasi jalur evakuasi yang kemudian diserahkan ke BRR maupun Donor/NGO. Koordinasi dengan pusat juga dilakukan yaitu dengan DESDM dan Pemda dalam menyiapkan isi dan kelengkapan bangunan penyelamat tersebut.
- **Pemeliharaan.** Koordinasi dalam perencanaan pemeliharaan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi terjalin antara BRR dan Pemda, yaitu BRR memberikan dukungan program pemeliharaan prasarna kepada Pemda melalui pembentukan unit swakelola.
- **IREP.** IREP merupakan salah satu program rehabilitasi dan rekonstruksi MDF. Koordinasi perencanaan program pemberdayaan rekonstruksi infrastruktur/IREP terjalin dengan baik antara BRR dan Bank Dunia melalui pendanaan MDF.

IV.2.1.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Pada saat sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu diawali dengan perencanaan. Di dalam proses penyusunan perencanaan itu, tentu diperlukan koordinasi antar berbagai pihak sehingga terjalin sinergis dan informasi yang diperoleh dapat menjadi valid. Pola koordinasi dalam bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pemulihan social dan kemasyarakatan diperoleh beberapa data dan informasi mengenai dinamika. Secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 39
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan di Beberapa Lokasi

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
Aceh Besar	Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi penyusunan perencanaan dengan BRR secara baik dengan cara mengajukan program/kegiatan fisik kepada BRR . Bila disetujui maka akan dibangun seperti pembangunan pustu dan puskesmas. Sedangkan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan yang bersifat non fisik seperti kegiatan capacity building dan pelatihan di bidang kesehatan.
Aceh Jaya	Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan melalui: ▪ Penyediaan TA untuk BRR dari Dinas Pendidikan, ▪ Antar dinas terkait juga berkoordinasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar SKPD , juga melibatkan BRR. Namun hal ini jarang dilakukan. ▪ Termasuk kegiatan rutin melalui musrenbang ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Nias	Pada awal rehabilitasi dan rekonstruksi Dinas Kesehatan dilibatkan dalam Sekretariat Bersama (Sekber) terutama untuk memberikan data dan informasi kebutuhan sarana prasarana dan SDM bidang kesehatan, selanjutnya sudah tidak dilibatkan lagi. Namun setelah itu, fungsi Sekber sudah bukan koordinasi dalam perencanaan lagi, namun lebih kepada forum penyelesaian masalah bersama. Dalam forum ini ditentukan pembagian tugas antara Pemda dan BRR .

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, menunjukkan adanya berbagai pendekatan dalam melakukan proses koordinasi perencanaan. Di wilayah Aceh Besar, pendekatan koordinasi perencanaan melalui usulan program/kepada dari dinas terkait kepada BRR. Ada pula koordinasi perencanaan melalui pengiriman personel dari dinas terkait kepada BRR untuk bisa membantu penyusunan perencanaan. Selain itu, ada pula pendekatan koordinasi perencanaan melalui Sekretariat Bersama (Sekber). Harapannya, dengan terjalin koordinasi perencanaan supaya tidak terjadi tumpang tindih satu dengan lainnya.

Dinamika dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang dan pemulihan sosial dan kemasyarakatan dapat diamati pada dua kasus berikut ini;

- Menurut hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya mengenai program BRR untuk sektor pendidikan berasal dari dinas. Dinas Pendidikan di kabupaten ini selalu melakukan sinkronisasi perencanaan dengan BRR. Di dalam proses penyusunan perencanaan, BRR selalu meminta masukan kepada dinas tersebut supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Namun demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh mempunyai kebijakan pada tahun 2008 yaitu penguatan kapasitas (peningkatan kualitas) sekitar 70% dan kegiatan fisik untuk daerah terpencil yang sulit di jangkau sekitar 30% yang sumber pendanaannya berasal dari APBK. Karena anggaran dinas sangat terbatas, maka sebahagian besar kegiatan fisik telah dibangun oleh BRR dan Lembaga Donor/NGO. Untuk melakukan koordinasi perencanaan dilakukan penempatan salah seorang staff dari dinas pendidikan untuk menjadi Technical Assistance yang ditempatkan di BRR Distrik Aceh Jaya. Dengan demikian masukan untuk penyusunan rencana kegiatan di bidang pendidikan lebih terarah dan terjadi korelasi yang baik
- Pada pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Gunungsitoli Kabupaten Nias menunjukkan adanya koordinasi perencanaan untuk memulihkan kembali rumah sakit. Koordinasi perencanaan dilakukan melalui *Hospital Working Group Workshop* yang dilakukan dan didukung oleh BRR, WHO Dan Mercy Malaysia. Dari hasil kegiatan workshop itu disusunlah *master plan* revitalisasi RSU Gunungsitoli. Pendekatan menyeluruh tergambar pada skema revitalisasi dalam *Comprehensive Approach of Gunungsitoli Hospital Partnership Project*. Di dalam skema tersebut terdapat beberapa tahapan pembangunan yang dilakukana untuk memulihkan rumah sakit itu yang gancur dan rusak akibat dampak bencana. Pada proses perencanaan ini dapat dinilai bukan hanya melakukan koordinasi perencanaan tapi juga melakukan perencanaan bersama.

IV.2.1.4 Bidang Perekonomian

Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, khususnya bidang pemulihan perekonomian, yang dilakukan BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah, dan lembaga donor/NGO di tahun 2008 sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun mekanisme koordinasi penyusunan perencanaan yang selama ini terutama melalui 3 forum (Sekretariat Bersama, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Coordination Forum for Aceh and Nias) sudah berjalan baik, walaupun dengan beberapa catatan.

Tabel 4. 40
Evaluasi Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan
Bidang Pemulihan Perekonomian

Forum	Evaluasi Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pemulihan Perekonomian
Sekretariat Bersama	Berfungsinya forum Sekretariat bersama (sekber) pada tahun 2007 telah menjembatani koordinasi dan komunikasi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perikanan dan kelautan, pertanian, tenaga kerja, koperasi UKM, dan Perdagangan dan perindustrian di tingkat Kabupaten/kota yang selama ini terputus. Koordinasi dan komunikasi sudah berjalan baik khususnya antara BRR dengan pemerintah daerah dengan dilibatkannya beberapa orang SKPD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi BRR. Aparat Pemda yang dilibatkan tersebut telah memberi kontribusi besar terhadap informasi kebutuhan (masyarakat) di lapangan, yang seringkali pihak BRR kurang mengetahui secara detail. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah juga diinformasikan kepada BRR sehingga tumpang tindih kegiatan dan anggaran (overlapping) antara BRR dan Pemerintah daerah dapat dihindari. Walaupun demikian, Lembaga donor/NGO kurang terlibat dalam forum sekretariat bersama. Contoh koordinasi antara BRR dan Pemda adalah perumusan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kab. Aceh Besar. Pada forum tersebut ditetapkan pembagian peran antara dinas dengan BRR dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pertanian, dalam hal penyuluhan pertanian. Dinas pertanian menyediakan tenaga penyuluh dan kelompok tani sedangkan BRR menyediakan biaya operasional penyuluhan dan bibit untuk petani. Peran Sekber dalam menyuarkan Aspirasi Pemerintah Daerah dirasakan masih kurang. Wakil pemerintah daerah hanya dapat memberikan masukan untuk perencanaan program/kegiatan BRR, namun keputusan dan kewenangan ada pada pihak Bapel BRR. Diharapkan pada perencanaan di tahun selanjutnya aspirasi Pemerintah daerah dapat lebih ditampung.
CFAN	Dalam bidang pemulihan perekonomian, Forum CFAN sangat efektif dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan baik oleh BRR, Pemerintah Daerah dan terutama dengan lembaga Donor/NGO. Pada CFAN ke-4 khususnya bidang pemulihan perekonomian telah disepakati berbagai kegiatan yang mencakup : 1. Pemulihan aktivitas ekonomi pasca bencana gempa dan tsunami (tahun pertama dan kedua pasca bencana) 2. Pemberian kredit lunak terhambat masalah tingginya kredit bermasalah (NPL) dan seringkali tidak terdistribusikan merata untuk daerah terpencil. 3. Dampak terhadap pekerja ketika pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir. 4. Hal yang perlu dilakukan di tahun III dan IV rehabilitasi rekonstruksi (tahun 2007 dan 2008) guna memantapkan fondasi perekonomian jangka panjang 5. Kebijakan yang perlu didukung seluruh pelaksana rehabilitasi rekonstruksi guna percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh-Nias.
Musrenbang	Forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional efektif dalam mensinkronkan usulan dari Pemerintah Daerah dan pihak BRR sebagai institusi pusat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Prov.NAD dan Kep.Nias. Dalam forum tersebut dipilah-pilah tanggungjawab masing-masing sehingga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih (overlapping) dan/atau kegiatan yang belum tercover. Semua usulan rehabilitasi rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian yang berasal dari daerah ditampung ke forum yang lebih tinggi, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi. Namun yang menjadi permasalahan adalah semua kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi lebih

Forum	Evaluasi Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pemulihan Perekonomian
	diserahkan kepada BRR. Seharusnya ada pembagian peran dan saling mengisi dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi.

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas

IV.2.1.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Selama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat koordinasi telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun pada beberapa sub bidang masih dinilai belum optimal. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan antara Pemda, BRR dan Donor/NGO melalui sekretariat bersama secara umum telah berjalan dengan baik namun belum merata di semua distrik di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait koordinasi dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelembagaan dan hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 41
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
Provinsi NAD	• PMI NAD, pada beberapa pertemuan yang dihadiri, Pemda jarang terlihat dalam berkoordinasi, salah satu contoh keabsenan Pemda adalah CFAN pertemuan tingkat tinggi dari donor-donor yang membantu Aceh yang diselenggarakan oleh BRR. • IFRC NAD, dalam melakukan kegiatan, PNS bekerjasama dengan PMI NAD akan berkoordinasi dengan Keuchik di tiap daerah yang akan dijadikan target dalam penyusunan program/perencanaan. Ada beberapa national societies yang tidak berkoordinasi lebih dahulu dengan IFRC maupun dengan PMI NAD, hal seperti itu tidak bisa dikontrol oleh IFRC. • MDF, MDF akan selalu membangun koordinasi dengan lembaga donor lainnya dan juga dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini dilakukan dengan BRR agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak terjadi overlap program. • BRR NAD-Nias, Dalam hal pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum tentang pertanahan terdapat hambatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena terlalu lambat dalam menerbitkan regulasi yang terkait dengan masalah tersebut.
Banda Aceh	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda) berkoordinasi dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Sekretariat Bersama.
Aceh Besar	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda, Badan Kesbanglinmas) Koordinasi dalam tahap perencanaan dan pengawasan, hanya Kepala Dinas saja yang ikut dilibatkan, tanpa ada staf lain. Tetapi dalam pelaksanaan, tidak dilibatkan.
Nias	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda, Badan Kesbang Linmas) berkoordinasi melalui Sekretariat Bersama • BRR Regional VI, Fungsi Sekber saat ini bukan sebagai koordinasi perencanaan program, namun lebih dalam fungsi forum penyelesaian masalah bersama. Sebagai contoh penyelesaian masalah infrastruktur air minum dibicarakan dalam forum sekber untuk menentukan porsi tanggung jawab antara Pemda dan BRR.
Nias Selatan	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda dan Badan Kesbanglinmas) berkoordinasi melalui Sekretariat Bersama yang terjalin dengan baik walaupun belum optimal. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak semua SKPD diikutsetakan dalam tim Sekber, pada awal rehabilitasi dan rekonstruksi memang Dinas dilibatkan namun sekarang sudah jarang

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Pada penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum di antara Bapel BRR dan Pemda:

Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007-2008

Koordinasi penyusunan perencanaan antara Bapel BRR dan Pemda dalam perencanaan bangunan kantor telah berjalan relatif baik. Pemda lebih banyak memberikan dukungan dalam penunjukkan bangunan-bangunan kantor yang mengalami kerusakan dan kebutuhan pembangunan kantor yang baru kepada BRR. Namun koordinasi Bapel BRR lebih terfokus kepada Dinas dibandingkan dengan Badan yang ada di NAD-Nias.

Koordinasi perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum di antara **Donor/NGO dengan Pemda** terjalin dengan baik. Pemda memberikan usulan dalam penunjukkan sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan dan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang baru kepada Donor/NGO. Kemudian **Donor/NGO berkoordinasi dengan Bapel BRR** melalui penyampaian proposal proyek (RAN Database) untuk disetujui BRR dan menjabarkan rincian proyek di bidang kelembagaan, hukum maupun K3M yang ingin dilaksanakan.

IV.2.2 Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan

IV.2.2.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas dapat diketahui mekanisme koordinasi dalam hal pelaksanaan diantara para stakeholder yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perumahan dan permukiman.

Tabel 4. 42
Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur dan Permukiman
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan
Provinsi NAD	• Dinas Bina Marga dan Cipta Kaya Provinsi NAD : BRR maupun Donor/NGO tidak memberikan pelaporan pelaksanaan secara rutin. • IFRC NAD : Koordinasi dengan BRR tetap dilakukan, juga dalam memberikan laporan perkembangan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, yaitu melalui movement coordinator dalam penginputan data ke RAN DataBase BRR. • UN-Habitat : Dalam hal pelaksanaan serah terima rumah, dilakukan secara simbolis sehingga masyarakat dapat langsung menempati rumahnya. Proses berikutnya adalah verifikasi dari rumah kerumah oleh konsultan yang didatangkan ADB. • Deputi Bidang Operasi BRR : Dalam hal pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum tentang pertanahan terdapat hambatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena terlalu lambat dalam menerbitkan regulasi yang terkait dengan masalah tersebut.
Aceh Jaya	• BRR Aceh Jaya : Koordinasi dalam pelaksanaan dilapangan antara BRR Pemda dan NGO, terutama dalam : pembebasan lahan (<i>land clearing</i>) dari segi teknis, namun dalam pelaksanaan pembangunan itu merupakan internal masing-masing pelaksana.
Aceh Besar	• Dinas Kimpraswil Aceh Besar : Mayoritas Donor/NGO fokus kepada pelaksanaan pembangunan jalan-jalan di lingkungan perumahan dan jalan untuk membuka akses perekonomian (pertanian/perkebunan). • Kepala Desa Meunasah Cut, Lampuuk, Kecamatan Lhoknga : Tidak semua perencanaan pembangunan perumahan permukiman sesuai dengan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya fasilitas umum seperti yang dijanjikan sejak awal; dan pembangunan jalan permukiman yang kurang baik, padahal bisa dilihat bahwa daerah Lampuuk ini adalah daerah yang paling parah terkena tsunami. • Warga Desa Blang Krueng, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar : Pada pelaksanaan dan pengawasan, warga juga kurang terlibat. Hingga saat ini kemajuan pelaksanaan BRR dan Donor/NGO dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sudah 75-80 persen dibandingkan sebelum terjadi tsunami. Hal ini terlihat dari banyaknya perumahan yang sudah dibangun BRR ataupun Donor/NGO,

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

IV.2.2.2 Bidang Infrastruktur

Setelah 3 (tiga) tahun berjalan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan mengalami kemajuan, walaupun memang belum optimal. Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas terkait koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 43
Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemulihan Infrastruktur
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Provinsi NAD	- Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan terjalin melalui Sekber yaitu pada penyelesaian permasalahan jalan - Salah satu Donor/NGO yaitu Parsons USAID tidak berkoordinasi dengan Pemda dalam pengawasan karena Parsons-USAID memiliki konsultan pengawas tersendiri
Banda Aceh	BRR dan Pemda (khususnya Bappeda) berkoordinasi dalam penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Sekretariat Bersama.
Aceh Jaya	- Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan terjalin dengan baik antara BRR Aceh Jaya dan Pemda (Bappeda, Dinas Perhubungan), serta Donor/NGO terutama MDF, misalnya : - o pembebasan lahan (<i>land clearing</i>), - o pembangunan dermaga penyeberangan antara Pulo Raya dan Sampoeniet, - o penyelesaian masalah misalnya 1) transportasi yang kurang lancar yang menyebabkan mobilisasi pengangkutan alat material pembangunan menjadi terlambat dan mahal, atau jembatan yang menggunakan rangka bailey tidak dapat menanggung beban berat, sehingga truk yang bisa membawa muatan 10 ton harus dikurangi menjadi 6 ton; 2) pengawasan pembangunan oleh Pemda
Nias	Pemda (khususnya Bappeda dan Dinas Kimpraswil, Dinas Perhubungan) dan BRR (BRR Regional 6) berkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan terutama dalam penyelesaian masalah infrastruktur (jalan, jembatan dan air minum) melalui Sekber
Nias Selatan	Pemda (khususnya Bappeda, Dinas Perhubungan) dan BRR (BRR Nisel, BRR Regional 6) berkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan terutama dalam penyelesaian masalah infrastruktur (jalan, jembatan dan air minum) melalui Sekber

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas koordinasi antara perencanaan dengan pelaksanaan yang terjalin antara BRR, Pemda dan Donor/NGO melalui forum Sekber terutama penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis dan non teknis bidang infrastruktur. Seringkali muncul permasalahan pada tahap pelaporan yaitu Pemda kurang mendapatkan informasi kemajuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR dan Donor/NGO terutama dalam sub bidang jalan dan jembatan, perhubungan, sumber daya air, energi dan listrik, pos dan telematika.

Salah satu contoh hasil evaluasi koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pada sub bidang **jalan dan jembatan**, yaitu :

- koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan **jalan nasional lintas barat** antara USAID, BRR dan Pemda terjalin dengan baik dimana sudah sering dilaksanakan *sharing* kegiatan namun masih kurang intensif, sehingga penyelesaian terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di wilayah tersebut masih tersendat. Selain itu sengketa tanah juga masih menjadi kendala dalam kegiatan ini.
- Kegiatan IRFF yang dilaksanakan oleh BRR dengan pendanaan MDF juga belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2008. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kurang intensif antara BRR dengan Bank Dunia (*partner agency*), hal ini dikarenakan rumitnya sistem dan mekanisme yang terdapat di Bank Dunia dalam pengelolaan hibah.

IV.2.2.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Pada tahap implementasi program dan kegiatan pun sangat diperlukan koordinasi. Dengan adanya koordinasi dalam proses pelaksanaan supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan pelaksanaan bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber diperoleh gambaran koordinasi pelaksanaan antar berbagai stakeholders yang terkait.

Dari hasil kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 44
Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan di Beberapa Lokasi

Lokasi Sampel	Koordinasi Pelaksanaan
Provinsi NAD	Terjalin hubungan koordinasi yang baik antara Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD . Dalam pelaksanaan tersebut pihak FK Unsyiah memberikan bantuan SDM. Selain itu FK Unsyiah mempunyai staf pengajar spesialis (staf luar biasa) yang notabene adalah pegawai Dinas Kesehatan.
Aceh Besar	Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi pelaksanaan secara baik dengan BRR dan Donor/NGO . Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi berikut ini; ▪ BRR melakukan penyempurnaan perencanaan program tambahan yang mendukung telaksananya kegiatan di bidang kesehatan. ▪ Mengikutsertakan dalam proses pemantauan pelaksanaan yang dilaksanakan BRR. ▪ Donor/NGO hanya mengikutsertakan Dinas Kesehatan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah bangunan fisik selesai dibangun.
Aceh Jaya	• Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan yang berlangsung secara baik dengan pihak BRR
Nias Selatan	Koordinasi pelaksanaan dengan pihak BRR belum cukup baik karena Dinas Pendidikan tidak dilibatkan secara langsung dalam tim Sekretariat Bersama (Sekber) sehingga pihak Dinas Pendidikan kurang mengetahui informasi terkait progres pekerjaan

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di beberapa lokasi sampel, pada umumnya menunjukkan adanya koordinasi pelaksanaan antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan FK Unsyiah dengan pihak BRR dan Donor/NGO di Provinsi NAD, Aceh Besar dan Aceh Jaya. Ada beberapa pola koordinasi pelaksanaan dari berbagai stakeholders terkait yaitu melalui pola kerja sama personel, keikutsertaan dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan mengikutsertakan Namun, terdapat satu lokasi yaitu di Nias Selatan yang menunjukkan tidak adanya koordinasi pelaksanaan. Dinas Pendidikan di Nias Selatan menilai belum terjadinya koordinasi yang cukup baik antara dinas tersebut dengan BRR. Faktornya karena ketidakterlibatan mereka dalam struktur Sekretariat Bersama yang padahal di dalamnya terdiri dari unsur BRR, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah. Melalui Sekber ini kiranya bisa dijadikan pusat informasi dan komunikasi mengenai hasil-hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada berbagai kasus pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat memberikan kondisi mengenai dinamika koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu;

- Untuk memulihkan pembangunan kampus Fakultas Kedokteran Unsyiah telah dilakukan beberapa upaya kerja sama. Hal merupakan bentuk koordinasi pelaksanaan yang bersifat sinergis dan komplementer dengan beberapa Donor/NGO; antara lain; Petronas Malaysia membantu pembangunan fisik gedung, Australia membantu pembangunan gedung, WHO memberikan bantuan identifikasi DNS (alat tropical medical center) tapi hanya memberikan peralatan tanpa perangkat sehingga alat tersebut dapat berfungsi. dan ADB memberikan bantuan gedung dengan bekerjasama dengan UGM yang bertujuan untuk membuat pusat manajemen kesehatan untuk pelatihan. Untuk melakukan pelatihan manajemen kesehatan

yang berasal dari kabupaten/kota cukup di FK Unsyiah sedangkan modul akan disupport dari UGM.

- Selain itu,, FK Unsyiah juga melakukan koordinasi pelaksanaan dengan pihak BRR. Dari pihak FK Unsyiah sebenarnya mengharapkan kepada BRR untuk melakukan fungsionalisasi bantuan gedung yang diberikan oleh BRR. Tapi institusi ini tidak memberikan perangkat pendukung supaya bantuan lebih komprehensif. Bantuan yang telah diberikan oleh BRR yaitu 2 gedung dan 1 mushalla dan renovasi gedung.
- Untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dilaksanakan secara bersama-sama yaitu antara KfW Jerman, BRR dan Pemerintah Daerah. Di dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin yang dibiayai oleh KfW Jerman ini mengalami permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi karena adanya hambatan pembebasan lahan/tanah. Untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan ini berupa pembebasan lahan menelan waktu hingga 1,5 tahun. Pihak KfW Jerman yang membangun rumah sakit secara fisik beserta instalasinya. Sedangkan Pemda untuk mendukung pembangunan rumah sakit umum ini menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk mengelola rumah sakit tersebut
- Begitu pula dengan pembangunan RSUD Gunungsitoli yang dilakukan secara bersama antar berbagai stakeholders. Pihak-pihak yang memberikan bantuan untuk pembangunan fisik RSUD Gunungsitoli yaitu Mercy Malaysia yang memberikan bantuan sebesar USD 1 juta, RRC memberikan bantuan sebesar USD 1,5 juta, Pemerintah Jepang memberikan bantuan sebesar USD 5 juta, Singapore Red Cross memberikan bantuan sebesar USD 4 juta dan BRR mengalokasikan dana sebesar USD 2 juta untuk institutional capacity building dan training SDM. Sehingga total dana yang digunakan untuk membangun RSU ini adalah sebesar USD 13,5 juta atau setara dengan Rp 120 Milyar
- Sedangkan untuk pemulihan sektor pendidikan di Kepulauan Nias, pelaku utama yang sangat berperan besar dalam pelaksanaan pembangunan sekolah-sekolah yaitu oleh BRR dan UNICEF. Selain kedua lembaga ini, masih terdapat NGOs baik internasional maupun lokal yang membangun sekolah-sekolah di Kepulauan Nias, antara lain; World Vision International, French Red Cross, LPAM-Nias, Spanish Red Cross, ACTED, dan Johannifer-International Assiatnce. Dari pihak BRR telah membangun sekolah sebanyak 412 unit sekolah atau mencakup total 62% target yang ditetapkan. Sedangkan UNICEF telah mengalokasikan pembangunan sekolah sebanyak 120 unit. Dan masih banyak dana off budget lainnya yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan di Kepulauan Nias. Dari gambaran tadi menunjukkan adanya saling proses koordinasi di dalam melaksanakan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak dan hancur akibat bencana di Kepulauan Nias.
- Di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan adanya koordinasi dalam pelaksanaan. Hal ini telah berlangsung dengan baik karena pihak BRR, Donor/NGO selalu melakukan koordinasi. Contoh koordinasi pelaksanaan yang telah dilakukan yaitu pada pelaksanaan bangunan SD oleh BRR dan pengadaan meubelair oleh UNICEF.

Bila memperhatikan pada beragam kasus pelaksanaan pemulihan di bidang sosial dan kemasyarakatan menunjukkan adanya saling koordinasi dalam pelaksanaan. Kasus-kasus kegiatan di bidang sosial dan kemasyarakatan ini yaitu pada sub bidang pendidikan dan kesehatan. Memang kalau dilihat dua sektor ini merupakan sektor yang paling banyak dan dominan dibandingkan sektor lainnya pada bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Dari kasus-kasus tersebut terdapat berbagai pendekatan dan metode dalam koordinasi pelaksanaan. Ada kasus yang melakukan pemulihan rumah sakit umpamanya, itu dilakukan secara bersama-sama baik dari sisi dukungan pendanaan maupun dukungan lainnya. Namun ada juga yang melakukan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kegiatan pembangunan sekolah. Aspek

koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sangat penting, tapi lebih penting lagi yaitu bagaimana memadukan dan melakukan sinkronisasi kegiatan dan lokasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

IV.2.2.4 Bidang Perekonomian

Koordinasi pelaksanaan antara BRR, Pemerintah Daerah, dan lembaga Donor/NGO dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian secara umum sudah terkoordinasi dengan baik, walaupun dengan beberapa catatan.

Koordinasi pelaksanaan dapat berjalan dengan baik terutama dengan berfungsinya sekretariat bersama. Disini selain koordinasi perencanaan, pihak BRR dan pemerintah daerah dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga dalam pelaksanaan pun dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat kecemburuan dari beberapa SKPD yang walaupun terlibat dalam forum Sekretariat bersama tetapi tidak diikutsertakan dalam satker BRR. Walaupun koordinasi pelaksanaan antara BRR dengan Pemerintah daerah berjalan baik, koordinasi pelaksanaan dengan lembaga donor/NGO ditingkat bawah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan lembaga donor/NGO sudah punya program/kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tidak perlu terlibat dalam forum sekretariat bersama. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita bersama agar pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya bidang pemulihan perekonomian dapat berjalan sinergis.

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait Koordinasi antar pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemulihan perekonomian ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam penyusunan perencanaan yaitu Satker ADB, ETSP hanya melaksanakan kegiatan fisik, seperti penyediaan kendaraan operasional, namun tidak mempertimbangkan untuk penyediaan insentif atas pengelolaan fasilitas yang diberikan. Tindak lanjut terhadap permasalahan ini agar satker ADB-ETSP berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk membuat SK terlebih dahulu terhadap penunjukan petugas yang akan bekerja dilapangan. (Kabupaten Aceh Jaya)
2. Dalam penyusunan perencanaan, permasalahan yang dihadapi adalah ada beberapa masukan kegiatan dan harapan pemda setelah di koordinasikan banyak yang berubah dan menyimpang. Kegiatan yang telah dikoordinasikan dan menyimpang pada pelaksanaannya, jika itu urgent akan segera diatasi dengan perencanaan reguler Dinas Kelautan Perikanan dan untuk pelaksanaannya akan menggunakan dana APBD. (Kabupaten Aceh Besar)
3. Koordinasi dengan BRR selama ini melalui satker pertanian, tapi tidak diketahui sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh BRR karena tidak pernah ada laporan resmi. Ada alokasi dana dari BRR tapi tidak pernah ada koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi. Untuk pengadaan untuk dinas pertanian provinsi dari BRR, hanya 1 unit kendaraan operasional dari 2 unit yang dijanjikan. Kerjasama dengan Donor/NGO hanya sebatas pencarian data pada tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dari FAO, mereka meminta data setelah itu tidak pernah ada laporan/progress. (Dinas Pertanian Provinsi NAD)
4. Pertemuan rutin sekber distrik Nias Selatan saat ini bukanlah dalam fungsi koordinasi perencanaan program, namun lebih dalam fungsi forum penyelesaian masalah bersama. Sebagai contoh penyelesaian masalah infrastruktur jalan, jembatan dan air minum perlu dibicarakan dalam forum sekber guna menentukan porsi pembagian kerjasama antara Pemda dan BRR. (kab. Nias Selatan)

5. Laporan dari satker ada yang dilaporkan, ada juga yang tidak dilaporkan ke dinas. Kegiatan riil yang dilakukan tidak diketahui oleh dinas, revisi dan yang disahkan selengkapnyanya ada di satker.
6. Koordinasi dengan Pemda dengan Donor/NGO masih sangat kurang. Yang terjadi, kebanyakan dari Donor/NGO langsung memberikan bantuan modal ke masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih antar program dan kegiatan.
7. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam koordinasi Pelaksanaan program dan kegiatan antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu informasi/laporan yang tidak cukup serta kurangnya komunikasi dalam pelaksanaannya. Forum sekretariat bersama dirasakan masih belum cukup.
8. Koordinasi dengan NGO/Donor diwujudkan dalam bentuk koordinasi laporan satu pintu melalui RANDatabase BRR. Melalui RANDatabase ini Donor/NGO melaporkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mereka dan Bapel BRR yang mempublikasikan ke masyarakat karena ini bisa diakses oleh umum. Disamping itu koordinasi tetap berkembang dengan dibentuknya CFAN I – IV secara bersama dalam koordinasi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

IV.2.2.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Hasil evaluasi setelah 3 (tiga) tahun berjalan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan mengalami kemajuan, walaupun memang belum optimal. Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas terkait koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelembagaan dan hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 45
Koordinasi dalam Pelaksanaan Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Provinsi NAD	• BRR NAD-Nias, BRR sangat memahami segala kendala yang dialami pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena BRR sendiri juga mengalami kendala diantaranya : • Non teknis : gangguan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab, gangguan ini sangat menghambat pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. • Pembebasan lahan untuk pembangunan proyek bangunan perkantoran yang begitu rumit. • SDM yang lemah, kita harus mengakui bahwa kontraktor lokal lemah dibandingkan kontraktor luar, kesempatan selalu diberikan kepada kontraktor lokal tetapi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. • IFRC NAD, Koordinasi dengan BRR tetap dilakukan, juga dalam memberikan laporan perkembangan pembangunan yang dilakukan, yaitu melalui movement coordinator dalam penginputan data ke RAN DataBase BRR.
Banda Aceh	• BRR dan Pemda (khususnya Bappeda) Secara rutin, Sekber melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholders terkait untuk membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Banda Aceh.
Aceh Besar	• Badan Kesbang Linmas, mempunyai keterlibatan koordinasi dengan para donor untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (antara lain yaitu : UNDP, MPBI dan Yakunt Unit). • Sekretariat Bersama berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dengan semua sektor SKPD selanjutnya Sekber berkoordinasi dengan BRR pusat untuk menyaring program-program prioritas di Kabupaten Aceh Besar. Misalnya usulan kegiatan dari Pemda sebanyak 100 namun yang diterima hanya 3 untuk tahun ini karena pembangunan proyek-proyek besar (pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya)
Nias	• Pemda, Fungsi sekber sangat kami rasakan manfaatnya dalam mengkoordinasikan perencanaan dan sebagai sarana bermusyawarah dengan BRR Nias. Saat ini fungsi sekretariat bersama sudah bukan koordinasi dalam perencanaan lagi, namun lebih kepada forum penyelesaian masalah bersama. Dalam forum ini akan ditentukan pembagian tugas antara

Lokasi Sampel	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
	Pemda dan BRR.
Nias Selatan	Pemda, Pertemuan rutin sekber distrik Nias Selatan saat ini bukanlah dalam fungsi koordinasi perencanaan program, namun lebih dalam fungsi forum penyelesaian masalah bersama.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas koordinasi antara perencanaan dengan pelaksanaan yang terjalin antara BRR, Pemda dan Donor/NGO melalui forum Sekber terutama penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis dan non teknis bidang kelembagaan dan hukum. Walaupun kadang-kadang muncul permasalahan pada tahap pelaporan yaitu Pemda kurang mendapatkan informasi kemajuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR dan Donor/NGO terutama dalam sub bidang hukum dan K3M.

Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan kantor/rumah dinas terjalin dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat pembagian peran di antara para stakeholder tersebut. Pemda menyediakan lahan, Donor/NGO membangun sarana dan prasarana kantor (kantor kecamatan/kelurahan/desa) sedangkan BRR membangun kantor lainnya yang belum terbangun (kantor kecamatan/kelurahan/desa, kantor KDH/DPRD/Dinas/Badan/Meuligo, rumah dinas camat, dan kantor mukim/balee musyawarah). Untuk pembangunan kantor sub bidang hukum dan K3M, koordinasi pelaksanaannya sama dengan pembangunan kantor pemerintah, namun Donor/NGO hanya terlibat dalam pembangunan rumah dinas.

IV.3 Aspek Konsultasi

Aspek evaluasi berikutnya yaitu konsultasi pelibatan, keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa indikator yang dilihat pada aspek konsultasi ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat, media partisipasi masyarakat dan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik.

Terkait informasi, kebutuhan yang semakin mendesak saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sistem data untuk menyediakan tinjauan umum mengenai Pemulihan secara konsisten, baik yang *on-* maupun *off-budget*, di samping untuk mengidentifikasi berbagai kesenjangan yang masih laten. Mekanisme pelaporan internal dan Pangkalanda Pemulihan Aceh-Nias (Recovery Aceh-Nias Database, RANdatabase) yang telah dilakukan hingga kini, dengan demikian, telah melengkapi upaya-upaya BRR untuk mengatasi hal tersebut. Tonggak penting juga terlihat dari dukungan Pusat Informasi Geospasial dan Pemetaan (Spatial Information and Mapping Centre, SIM-C) BRR bagi pengembangan kapasitas SDM Pemda. Olehnya, telah berdiri Pusat Data Geospasial Aceh (Aceh Geospatial Data Center, AGDC) yang kini telah melekat di Bappeda Aceh. Banyaknya aset rekonstruksi, perlu dikumpulkan dan dicatat agar diketahui persis letak dan wujudnya. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi pangkalan-data Sistem Informasi Geospasial (Geospatial Information System, GIS). Pusat Data dan Informasi BRR tengah melakukannya untuk mencatat seluruh rumah hasil Pemulihan se-Aceh-Nias. Dari 112.000 rumah, sudah 100.000-an yang tercatat dalam GIS.

A. RAN Database

RAN (Recovery Aceh-Nias) Database merupakan solusi dari BRR NAD-Nias dalam menyampaikan informasi akuntansi perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. RAN Database terbuka untuk seluruh pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menyampaikan laporan kegiatannya di Aceh dan Nias.

Pada akhir oktober 2008, Sistem informasi RAN Database yang dikembangkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias telah memenangkan Government Technology Award (Penghargaan bagi Teknologi Pemerintahan) dalam acara FutureGov Summit 2008 ke-4. RAN`Database BRR menyisihkan 450 nominasi diwakili 15 negara Asia Pasifik pada acara 15-17 Oktober 2008 di Hotel

Grand Hyatt, Bali, yang dilaksanakan Alfabeta Media, penerbit materi pelayanan publik di kawasan Asia Pasifik. RAN Database atau Recovery Aceh-Nias Database menjadi pemegang penghargaan tertinggi dalam kategori manajemen informasi dan diakui sebagai model pengelolaan informasi secara inovatif di kawasan Asia, yang berhasil mendorong perbaikan layanan publik, modernisasi tata kelola pemerintah dan efisiensi pengelolaan sektor publik. Government Technology Award merupakan penghargaan internasional pertama yang diraih pemerintah Indonesia dalam FutureGov Summit. Melihat kebanyakan peserta berasal dari negara-negara yang lebih maju dalam teknologi informasi, seperti Singapura, Hongkong dan India, sehingga penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Indonesia.

Lebih dari 1.600 proyek rekonstruksi senilai 3.8 miliar dolar AS telah diimplementasikan di wilayah Aceh dan Nias. RAN Database memantau seluruh proyek ini secara real time dan memungkinkan perbaikan koordinasi yang dapat dijadikan contoh bagi upaya manajemen pasca bencana lainnya. RAN Database dikembangkan selanjutnya untuk mendukung pemerintah daerah dalam proses koordinasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh- Nias yang sedang berlangsung.

Pemerintah daerah yang akan meneruskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh setelah berakhirnya mandat BRR pada 16 April 2009, memandang RAN Database sebagai alat bantu penting dalam meneruskan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Lebih dari 2.600 desa di 23 kecamatan Provinsi NAD dan Nias telah menikmati implementasi proyek yang lebih cepat dan efisien, berkat koordinasi yang dilakukan melalui database ini.

B. AGDC

Aceh Geospatial Data Center (AGDC) merupakan pusat penyedia data dan pelayanan informasi geospasial / kebumihangka / keruangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di portal internet ini kita dapat mencari data geospasial, citra satelit, peta interaktif, video, dokumen, dan data terkait lainnya. dioperasikan di Bappeda Provinsi NAD, yang dapat mempermudah seluruh SKPD di tingkat kab/kota hingga provinsi dalam menyampaikan data awal spasial untuk selanjutnya diolah dan kemudian disampaikan kepada publik. GDC mendukung pemanfaatan dan sharing data/informasi spasial antar berbagai institusi baik pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dari dalam maupun luar negeri yang turut serta dalam proses pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. AGDC Bertujuan:

1. Menyediakan akses terhadap data dan informasi spasial secara mudah dan cepat;
2. Mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan pemahaman akan kegunaan data informasi geospasial

Disini juga dapat dilakukan penyusunan personal geodatabase dimaksudkan untuk dapat menyimpan semua informasi data yang diperlukan dalam mendukung perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penyusunan personal geodatabase ini, prinsip yang dipakai dalam penyusunan adalah:

- Data tersimpan secara konsisten, sehingga data dapat diakses melalui intranet
- Memudahkan pencarian data
- Memudahkan penyimpanan data
- Memperkecil atau menghilangkan redundansi
- Mendukung penyimpanan metadata

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan Geodatabase ini terdiri dari 10 langkah :

1. Identifikasi produk informasi yang akan dihasilkan menggunakan sistem GIS. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi produk peta, model analisis, pelaporan database, pengaksesan menggunakan web, aliran data, dan kebutuhan pengguna

2. Indentifikasi tema kunci dari setiap layer yang diperlukan untuk memunculkan informasi, menentukan spesifikasi penggunaan peta, sumber data, spasial representasi, skala dan akurasi peta, simbol dan anotasi
3. Menentukan spesifikasi batasan skala dan spasial representastion untuk tiap tema layer, Data GIS dikumpulkan menurut skala yang ada, representasi dari feature terkadang berubah diantara titik, garis, atau polygon pada perbedaan skala. Data raster dikumpulkan menggunakan piramida berbagai resolusi (*multi-resolusi*).
4. Pengelompokan kedalam dataset; *discrete dataset* dimodelkan dengan *feature dataset*, *feature class*, *relation class*, *rule* dan *domain*. Sedangkan dataset kontinyu dimodelkan menggunakan dataset raster. Data pengukuran dimodelkan dengan dataset hasil survey. Data permukaan dimodelkan dengan dataset *raster* dan *feature*.
5. Mendefinisikan struktur database tabular dan sifat-sifatnya untuk mendeskripsikan atribut, mengidentifikasi field atribut, spesifikasi range dan nilai dari nilai atribut, mengapikasikan subtype untuk mengontrol sifat-sifat atribut dan memodelkan relationship.
6. Mendefinisikan spasial property dari dataset, menggunakan jaringan untuk menghubungkan feature dan topologi untuk memunculkan integrasi spasial. Menentukan referensi spasial dari dataset.
7. Mengetahui keperluan dalam mendesain geodatabase, menginventarisasi struktur desain dari geodatabase dan menyiapkan desain. Melakukan studi terhadap desain yang ada.
8. Melakukan implementasi, prototype, review, dan memperbaiki desain geodatabase, mengimplementasikan desain, memasukkan data, untuk dapat dilakukan test dan perbaikan desain.
9. Mendesain alur kerja dalam menyusun dan memelihara setiap layer data. Setiap layer mempunyai sumber data, akurasi, metadata dan system akses uang unik.
10. Mendokumentasikan desain dari geodatabase menggunakan metoda yang sesuai. Menggunakan gambar, diagram dan skema untuk menggambarkan desain geodatabase yang dilakukan.

C. Rumoh PMI

Sebagai media partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD. Rumoh PMI dengan motto “tempat berbagi (a place to share)” merupakan media untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat kepada lembaga PMI yang kemudian akan diteruskan kepada pihak terkait untuk dicarikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut.

Sebagai salah satu lembaga impelementasi dari lembaga donor IFRC, PMI NAD juga turut berkontribusi besar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam tiga tahun terakhir.

PDAM Masuk Desa

Contoh Kasus dari Peran Rumoh PMI:

Pengaduan Maimun mengenai air yang belum masuk ke daerah Lingke, padahal meteran sudah dipasang oleh pihak PDAM, setelah tsunami air PDAM putus total, untuk pengerjaan awal setelah tsunami PDAM hanya memasang pipa induk di jalan raya belum masuk kedalam Desa Lingke. Setelah sekian lama warga Lingke menunggu untuk pemasangan pipa ke lorong Lingke, akhirnya warga memotong jalan pintas. Mereka memotong/ mencuri air yang dari pipa induk dengan cara mereka sendiri, tentu saja hal ini merugikan pihak PDAM. Tetapi kenikmatan akan air bersih sudah dapat mereka rasakan tanpa harus membeli air. Beberapa bulan warga Lingke menikmati segarnya air PDAM tiba-tiba air putus kembali. Warga pun harus kembali membeli air seperti bulan-bulan sebelumnya. Hingga akhirnya klien membuat pengaduan ke Rumoh PMI (tim advokasi Palang Merah Irlandia) dalam memediasi permasalahan Maimnu Tim advokasi mencoba bernegosiasi dengan pihak PDAM dan hasil yang diperoleh dari pihak PDAM untuk saat ini memang masih ada pengecekan pipa yang sudah dipasang oleh NGO asing bahwa masih ada yang pipa bocor. tunggu dan harap bersabar katanya. Seminggu kemudian tim Advokasi palang merah irlandia kembali menelusuri permasalahan tersebut hasilnya alhamdulillah air PDAM sudah mulai masuk pak Maimun dan warga lainnya sangat senang sekali karena tidak perlu lagi membeli air.

Sumber : <http://rumohpmi.blogspot.com/2009/01/pdam-masuk-desa.html>

IV.3.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat

IV.3.1.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Konsultasi tingkat partisipasi masyarakat untuk bidang perumahan permukiman dapat terlihat dari program RE-KOMPAK. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) merupakan kegiatan yang didanai melalui Bank Dunia dan Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga pelaksananya. RE-KOMPAK melalui kegiatannya, melakukan pembangunan kembali dan perbaikan rumah di 188 desa dan kelurahan, serta penyediaan hibah bagi 125 komunitas untuk prasarana lokal. Semua kegiatan tersebut terlaksana melalui pendekatan berbasis komunitas, dimana masyarakat terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tercermin dalam pembinaan untuk melaksanakan pemetaan serta pengkajian kerusakan, untuk menetapkan kebutuhan konstruksi dan mengidentifikasi penerima manfaat.

Konsultasi juga tergambar dalam sub bidang pertanahan dengan konsep RALASnya. Adanya partisipasi masyarakat dan NGO membantu memfasilitasi penggunaan media. Walaupun terdapat beberapa hambatan namun lapangan sudah terlaksana *community mapping*. Kegiatan penunjukkan batas bidang tanah kembali banyak mengandalkan kesepakatan masyarakat karena BPN tidak mempunyai data yang lengkap mengenai kepemilikan tanah, buku tanah yang ada dan data PBB digunakan sebagai *cross reference*. RALAS melalui *Community Driven Adjudication* melakukan kegiatan penelitian riwayat tanah secara simultan seluruh warga desa dalam rangka pendaftaran tanah (*pensertifikatan tanah*) diharapkan membantu penyelesaian pertanahan.

Prakarsa pembangunan partisipatif, terkait bidang perumahan dan permukiman, merupakan hal yang prioritas. Tugas pihak fasilitator, mediator dan pelaksana, menjadi jauh lebih terbantu. "Harga" keterlibatan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian, walaupun memakan waktu dan tenaga, menjadi terbayar cukup setimpal. Rasa memiliki masyarakat terhadap hasil capaian akan muncul. Berkat keterlibatan mereka, kendala sesulit apapun yang berkenaan dengan pendataan dan pemantauan pekerjaan, termasuk terhadap konsultan yang kurang bertanggung jawab, misalnya, sudah pasti akan lebih mudah diatasi. Kuatnya partisipasi masyarakat, secara tak langsung menjadi jaminan kuat bagi kesinambungan aspek pemeliharaan, pengelolaan, serta pengembangan perumahan dan permukiman pada masa-masa mendatang.

Jika dilihat dari hasil wawancara Tim P3B Bappenas tahun 2008, dapat diketahui keterlibatan masyarakat dengan para stakeholder (konsultasi masyarakat), antara lain :

Tabel 4. 46
Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
Provinsi NAD	• IFRC NAD : Umumnya dalam pelaksanaan kegiatan IFRC dan PNS's dilakukan dengan berbasiskan masyarakat, apa atau seperti apa yang diinginkan masyarakat, contoh kecilnya adalah dalam pemilihan cat rumah. • PMI NAD : Para donor setiap akan melakukan suatu kegiatan, akan membuat MoU yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat jika diperlukan. • UNDP Aceh - Nias : UNDP melalui ETRT (Emergency Respones and Transisional Recovery) terlibat dalam program shelter dengan implementing partnernya yaitu UN-Habitat dan saat ini UNDP juga melakukan kerjasama dengan RALAS untuk masalah pertanahan. • UN - Habitat : Pembangunan rumah memakai pendekatan masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat pada saat pembangunan rumah, dalam 2 tahun terakhir 2006-2008 dapat dibangun sebanyak 4500 rumah pada 26 desa di NAD dan Nias, 500 rumah sedang dibangun di Simeuleue diperkirakan selesai akhir tahun 2008. • Pusdatin BRR : Salah satu kendala yang dihadapi dalam masalah perumahan adalah isu rumah ganda, hal tersebut masih sulit tercover dikarenakan dasar pemberian rumah adalah dengan menggunakan kartu identitas (KTP) dan ada kemungkinan 1 orang memiliki beberapa KTP. Hal

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
	tersebut dapat terjadi karena secara nasional belum ada identitas nasional yang unik. Solusi dari masalah rumah ganda ini adalah berdasarkan pengaduan masyarakat, dikirim tim yang kemudian melakukan identifikasi dan penyegelan terhadap rumah yang bersangkutan. Sejauh ini data rumah ganda hanya berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat.
Aceh Besar	• Kepala Bappeda Aceh Besar : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sudah maksimal, terutama yang difasilitasi oleh Donor/NGO, misalnya dalam penyusunan tata ruang (<i>village planning</i>). Mekanisme Donor/NGO dalam berkoordinasi diawali dengan Pemda, kemudian dengan masyarakat. Masyarakat yang kurang puas dengan kinerja BRR langsung menyampaikan aspirasinya ke kantor BRR atau melalui media massa.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

IV.3.1.2 Bidang Infrastruktur

Rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh BRR maupun Donor/NGO masih belum optimal. Partisipasi masyarakat pada bidang infrastruktur masih terbatas dan mayoritas diterapkan pada program perumahan dan permukiman serta perekonomian. Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas terkait tingkat partisipasi masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 47
Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Infrastruktur di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
Provinsi NAD	• Peran serta masyarakat dalam perencanaan biasanya masyarakat menyusun usulan/proposal kepada kepala desa kemudian diserahkan ke Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (tingkat provinsi), namun permasalahannya adalah biasanya yang tercantum di dalam proposal adalah pembangunan/rehabilitasi Jalan Kabupaten/Kota bukan Jalan Provinsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui Rakorbang Kabupaten/Kota (Musrenbang) • Masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan lintas barat-USAID, masyarakat biasanya menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Di samping itu, pihak kontraktor USAID juga turut meningkatkan kapasitas lokal melalui pelatihan konstruksi, dan manajemen proyek. • Dalam pelaksanaan pembangunan jalan, menurut Dinas Bina Marga dan Cipta Karya banyak melibatkan orang lokal sebagai tenaga kerja pembangunan jalan dan jembatan ini. • Menurut Dinas Bina Marga dan Cipta Karya pengawasan sangat dipantau oleh masyarakat terutama di Banda Aceh, biasanya melalui media massa (Serambi) biasanya ada laporan setiap hari di Koran oleh masyarakat (komentar/kritik), Talkshow di TV lokal, radio, TV, sms, dll. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan misalnya melalui kunjungan ke daerah melalui Rakorbang Kabupaten/Kota (Musrenbang)
Aceh Jaya	• Bappeda menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Lamno terhambat karena usulan masyarakat (perencanaan) melalui musrenbang daerah tidak dijadikan prioritas oleh DPRK • Menurut BRR dan Dinas Kimpraswil, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurang banyak terlibat, biasanya masyarakat hanya sebagai tenaga kerja lokal (buruh, security, dll) pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh kontraktor. • Dalam pengawasan, ada konsultan pengawas tersendiri (baik dari BRR maupun dari proyek). Menurut Bappeda dan Dinas Kimpraswil, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat tinggi terutama dalam pengaduan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang hasilnya kurang memuaskan dan kinerja kontraktor yang tidak maksimal, terutama pada sub bidang infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum. Pengaduan ini menjadi masukan awal turunnya tim pengawas BRR ke lapangan.
Aceh Besar	• Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk minim, menurut Kantor Perhubungan • Dinas Kimpraswil, bersama dengan Donor/NGO (contohnya ILO) melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan yaitu sebagai tenaga kerja dalam kegiatan peningkatan prasarana jalan di Baitussalam. • Pengawasan oleh masyarakat biasanya berupa keluhan yang disampaikan kepada Dinas Kimpraswil, misalnya dalam perbaikan pengairan di Leupung, irigasi di Lam Teba, dll
Nias	• Bappeda, Dinas Kimpraswil, dan BRR regional 6 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan berupa pengajuan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
	dengan kebutuhan masyarakat
Nias Selatan	Menurut Bappeda, Dinas Perhubungan, dan BRR, partisipasi masyarakat dalam perencanaan berupa pengajuan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama jalan dan jembatan

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui tingkat partisipasi masyarakat di bidang infrastruktur sebagai berikut :

- Tingkat partisipasi masyarakat di bidang infrastruktur pada tahap perencanaan pada umumnya berupa pengajuan usulan/proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Dinas (Pemerintah Daerah). Usulan tersebut biasanya berupa pembangunan jalan pedesaan, drainase, dan proyek-proyek tingkat desa. Salah satu Donor terbesar yaitu MDF melibatkan masyarakat (CSO) dalam forum *Steering Committee* MDF.
- Keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan di bidang infrastruktur masih terbatas karena pengetahuan masyarakat terhadap detail teknis pembangunan sangat minim. Oleh karena itu masyarakat biasanya hanya sebagai tenaga kerja local di bawah koordinasi kontraktor, terutama pada sub bidang **jalan dan jembatan, perhubungan, sumber daya air, dan bangunan publik**. Masyarakat pun biasanya diberikan pelatihan konstruksi dan manajemen proyek oleh BRR ataupun Donor/NGO. Lain halnya pada sub bidang **pos dan telematika serta energi dan listrik**, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sangat minim, karena sebagian besar tenaga kerja di bidang ini adalah tenaga kerja di bawah PLN dan Telkom.
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO terdapat tim pengawas tersendiri, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kualitas bangunan atau konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor juga terbatas karena banyak masyarakat yang kurang mengetahui detail teknis dan kualitas bangunan. Biasanya yang terjadi adalah banyak masyarakat yang mengadukan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang buruk (kinerja kontraktor yang buruk/tidak maksimal khususnya pada sub bidang **jalan dan jembatan, dan fasilitas/bangunan public, misalnya** jalanan berlubang, pembangunan gedung publik yang tidak selesai, dan lain sebagainya. Dampak keluhan dan pengaduan masyarakat tersebut menjadi masukan awal turunnya tim pengawas BRR/konsultan pengawas proyek ke lapangan.

IV.3.1.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Hal terpenting lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu partisipasi masyarakat. Hal ini sebagai upaya maksimalisasi pelaksanaan kegiatan bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Dari hasil perbincangan dengan berbagai nara sumber di lapangan diperoleh tergambar mengenai tingkat partisipasi masyarakat sebagai berikut ;

Tabel 4. 48
Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
Aceh Jaya	Dari hasil pembicaraan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dan terbuka. Mereka mendukung program-program yang sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan tersebut. Demikian juga dalam pelaksanaan, masyarakat sangat mendukung sehingga dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan-hambatan yang khusus. Sedangkan dalam hal pengawasan, bila lokasi tersebut tidak dapat dijangkau atau jauh maka peran serta masyarakat diikutsertakan melalui peran kepala sekolah setempat, termasuk staff pendidikan.
Aceh Besar	Tingkat partisipasi masyarakat pada Dinas Kesehatan Aceh Besar dalam aspek perencanaan terlihat aktif. Forum yang dilakukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
	Pembangunan yang dimulai dari desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Hanya saja masyarakat sepertinya lebih menyukai dalam perencanaan di bidang pertanian dan jalan dibandingkan bidang kesehatan yang dirasakan masih kurang diminati. Namun demikian, berbeda pada aspek pelaksanaan, masyarakat di wilayah Aceh Besar sangat antusias dalam berperan untuk melaksanakan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan di tingkat pedesaan, terutama pembangunan puskesmas pembantu di wilayah-wilayah terpencil. Sedangkan dalam aspek pengawasan, masyarakat bersama BRR dan NGO ikut memantau pada wilayah-wilayah yang terkena tsunami. Sedangkan untuk wilayah terpencil, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan bersama Dinas Kesehatan. Sama halnya yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2008 yang ikut membantu pada wilayah terpencil.
Nias Selatan	Lain halnya dengan kondisi di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang menyebutkan bahwa konsultasi dengan masyarakat hingga saat ini belum dilakukan. Hal ini mengingat pelaksanaan pembangunan gedung sekolah hampir seluruhnya dilaksanakan oleh BRR dan donor/NGO. Sedangkan alokasi APBD sebagian besar adalah untuk belanja rutin yaitu gaji guru.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Secara umum, tingkat partisipasi pada pelaksanaan kegiatan di bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, menunjukkan tingkat yang tinggi. Hanya saja dari data-data tersebut belum diperoleh seberapa besar dan tinggi tingkat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti pada wilayah Aceh Besar dan Aceh Jaya. Sebaliknya yang terjadi di wilayah Nias Selatan yang menyebutkan bahwa konsultasi belum dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, dapat dikatakan tingkat partisipasi di wilayah ini masih rendah. Hal ini nampak terkait dengan permasalahan dukungan anggaran untuk melakukan konsultasi publik.

IV.3.1.4 Bidang Perekonomian

Dalam bidang pemulihan perekonomian, pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi masih belum optimal. Kurangnya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan beberapa hal seperti: 1) Beberapa masyarakat penerima manfaat tidak mengembalikan pinjaman kredit yang dilakukan karena menganggap pinjaman sebagai hibah; 2) Ada image dari masyarakat bahwa dana pinjaman adalah sebagai hibah (ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengembalikan). Padahal dana tersebut seharusnya dikembalikan agar terus bergulir ke penerima manfaat lainnya; 3) Sulit memonitor masyarakat yang mendapat dana pinjaman karena kondisi masyarakat yang masih belum menetap.

Aspirasi yang berasal dari masyarakat kepada pemerintah daerah mekanismenya yaitu melalui Musrenbang Daerah, yang diharapkan telah menyerap partisipasi masyarakat dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa. Dalam musrenbang daerah tidak ada utusan khusus, tapi diwakili oleh mukim/ camat melalui pengiriman delegasi. Sebagai contoh keterlibatan masyarakat dalam membangun jaringan irigasi pertanian yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia) yaitu dimulai dari pemilihan lokasi sampai dengan pembangunan. World Bank melibatkan masyarakat di setiap prosesnya. Begitu juga halnya dengan pengawasan, masyarakat ikut mengawasi berlangsungnya penyelesaian pembangunan tersebut. Jika terdapat penyelewengan masyarakat dapat melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait aspek konsultasi pada bidang pemulihan perekonomian ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dinas, yang diawali dengan penyerahan proposal kebutuhan masyarakat kepada dinas. Dan masyarakat harus menerima keputusan yang dilaksanakan oleh dinas dalam pemilihan program/kegiatan tersebut. Sehingga alur sistem mekanisme partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: Masyarakat mengajukan usulan lahan yang akan didayagunakan → geuchik, mengecek kelapangan dan menyetujui → camat melakukan survei bersama pihak dinas →

pihak dinas menetapkan prioritas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan → dinas menetapkan alokasi apakah berdasarkan (APBK, APBA, BRR maupun donor/NGO). (Kabupaten Aceh Jaya)

2. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan khususnya yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan partisipasi masyarakat sangat dominan dengan dipimpin oleh panglima laot yang mewakili tokoh dari masyarakat. Panglima laot atau masyarakat selalu dilibatkan dari awal pelaksanaan kegiatan sampai akhir kegiatan tersebut berlangsung sehingga dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan akan menghasilkan pekerjaan yang sempurna. (Kabupaten Aceh Besar)

IV.3.1.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Tahun ketiga pelaksanaan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias masih sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi ini diharapkan dapat memberikan arah dan ketepatan sasaran program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selain itu, langkah ini dapat mendorong proses percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dapat diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, dan juga pada tahap pengawasan dan evaluasi.

BRR dan Donor/NGO sangat minim dalam melibatkan masyarakat dalam identifikasi penilaian kebutuhan karena BRR maupun Donor/NGO lebih banyak melibatkan aparat Pemda, hukum dan Polri dibandingkan masyarakat. Partisipasi masyarakat biasanya terlibat dalam merencanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor kecamatan/desa/kelurahan dan balee musyawarah bersama kepala desa atau ketua kampung dalam musyawarah tingkat desa, sedangkan bangunan lainnya secara langsung melibatkan aparat Pemda, hukum maupun Polri

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas terkait tingkat partisipasi masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelembagaan dan hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 49
Tingkat Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
Provinsi NAD	• PMI NAD, Irish RC dengan PMI membuat suatu wadah yang dinamakan a place to share yang digunakan sebagai balai pertemuan masyarakat untuk tempat berbagi dan menjangkau aspirasi. Para donor setiap akan melakukan suatu kegiatan akan membuat MoU, yang melibatkan semua stakeholder. • IFRC, Program dari British RC turut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari program livelihood, dimana BRC menyediakan program bantuan dana bagi masyarakat (Tunggal : 10 juta/KK yang diberikan dalam 4 tahap; Berkelompok : 10 juta/kelompok petani untuk membeli bibit dan pengolahan lahan; dan Manula yang masih produktif). Pemberian modal telah selesai, tapi programnya di masyarakat masih tetap dilakukan.
Banda Aceh	• Bappeda, Masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan dan saran-saran yang disalurkan melalui Sekretariat Bersama yang bertempat di kantor Bappeda Kota Banda Aceh.
Aceh Besar	• Badan Kesbanglinmas, Partisipasi dari masyarakat dilakukan melalui beberapa pelatihan, pertemuan masyarakat/pemuda dengan Satpol PP, serta dalam suatu forum untuk melakukan konsultasi. • Salah satu contoh pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah mengawasi keperluan di barak. • Bappeda, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sudah maksimal, terutama yang difasilitasi oleh Donor/NGO, misalnya dalam penyusunan tata ruang (<i>village planning</i>). Mekanisme Donor/nNGO dalam berkoordinasi diawali dengan Pemda, kemudian dengan masyarakat. Masyarakat yang kurang puas dengan kinerja BRR langsung

Lokasi Sampel	Tingkat Partisipasi Masyarakat
	menyampaikan aspirasinya ke kantor BRR atau melalui media massa.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Partisipasi masyarakat bidang kelembagaan dan hukum juga melalui peran lembaga agama, adat, dan sosial. Dengan adanya program pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang dikembangkan oleh BRR serta kegiatan pengembangan masyarakat dan penyediaan fasilitator untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat oleh Donor/NGO, diharapkan partisipasi lembaga agama, adat, dan sosial, serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dapat terlaksana dengan lebih optimal.

IV.3.2 Media Partisipasi Masyarakat dan Akses Informasi

IV.3.2.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

Ada beberapa media partisipasi masyarakat yang dibuat oleh para stakeholders, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara Tim P3B Bappenas, antara lain :

Tabel 4. 50
Media Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Media Partisipasi Masyarakat
Provinsi NAD	• IFRC NAD : Ada beberapa media yang dilakukan IFRC untuk melakukan advokasi atau konsultasi dengan masyarakat, yaitu radio dengan talk shownya; news letter; bulletin; dan lain-lain. • PMI NAD : Irish RC dengan PMI membuat suatu wadah yang dinamakan “a place to share” yang digunakan sebagai balai pertemuan masyarakat untuk tempat berbagi dan menjangar aspirasi. PMI juga mempunyai media (semacam tabloid) yaitu “Rumoh PMI” untuk menjangar aspirasi dan keluhan dari masyarakat. • UN Habitat : UN Habitat melakukan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu dengan membentuk “Kelompok Pembangun Rumah (KPR)”, didalamnya ada fasilitator-fasilitator yang akan in charge dengan para pemilik rumah (kelompok keluarga).
Aceh Jaya	• BRR Aceh Jaya : Secara khusus tidak ada konsultasi, namun secara parsial ada, seperti dalam pembangunan perumahan, BRR Aceh Jaya mempunyai “Tim Penerima Keluhan”, dan keluhan tersebut akan langsung ditindak lanjuti.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

IV.3.2.2 Bidang Infrastruktur

Sistem dan mekanisme partisipasi masyarakat pada sub bidang infastruktur belum diatur secara khusus, biasanya menggunakan pendekatan pasrtisipatif untuk mengakomodasi permasalahan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan. Penerapannya selama ini sudah berjalan semakin bak dari tahun ke tahun di seluruh wilayah bencana.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, diketahui bahwa media pastisipasi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya di bidang infrastruktur di beberapa lokasi sampel adalah:

- Di Provinsi NAD, IFRC dan PMI menyediakan balai pertemuan masyarakat untuk tempat berbagi dan menjangar informasi masyarakat, radio, newsletter, bulletin, dll
- Di Banda Aceh, masyarakat menyampaikan keluhan dan saran kepada **Sekretariat Bersama**
- Di Aceh Jaya, masyarakat melakukan pengaduan secara rutin melalui balai masyarakat, media BRR, media LSM, termasuk radio. **Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan Aceh Jaya** pun melaksanakan pertemuan dengan masyarakat untuk klarifikasi kesalahan persepsi masyarakat terhadap kegiatan Dinas, BRR, dan Donor/NGO. Pertemuan yang dilaksanakan Dinas ini walaupun tidak rutin namun cukup bermanfaat untuk semua pihak.

- Di Aceh Besar, masyarakat yang melakukan pengaduan kegiatan infrastruktur biasanya menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BRR, melalui media massa, atau langsung kepada **Dinas Kimpraswil**
- Di Nias dan Nias Selatan, media partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui Musrenbang.

IV.3.2.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Faktor media dalam partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan sarana yang dipakai untuk terlibat dalam kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung. Berikut ini beberapa gambaran yang diperoleh dari beberapa narasumber dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas ,yaitu;

Tabel 4. 51
Media Partisipasi Masyarakat Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Media Partisipasi Masyarakat
Aceh Besar	• Dinas Kesehatan, Akses informasi mengenai informasi terbaru bidang kesehatan di wilayah Aceh Besar disampaikan melalui program radio yang ada di Banda Aceh, yang jaringannya dapat didengar oleh masyarakat di Aceh Besar. Media pertemuan yang berbentuk penyuluhan terpadu masih secara rutin dilaksanakan oleh dinas di tingkat desa dan kecamatan. Adapun keluhan yang sering dilontarkan masyarakat adalah kekurangan dana dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Diharapkan ke depan kemampuan dana yang ada di dinas mampu melaksanakan program-program yang ada di tingkat desa. Untuk itu, diharapkan adanya ketersediaan anggaran desa untuk bidang kesehatan.
Aceh Jaya	• Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya memberikan gambaran bahwa ketersediaan akses dan informasi untuk masyarakat diperoleh dari kegiatan musyawarah mukim. Sesuai arahan Bupati Kabupaten Aceh Jaya supaya diadakan posko di kantor camat dengan pengawas masing-masing berasal dari SD, SMP dan SMA yang merupakan perpanjangan tangan guru. Pertemuan yang dilakukan dinas dengan masyarakat diantaranya kegiatan musyarah mukim dan pertemuan bersama pengawas dikantor camat.
Nias Selatan	• Sedangkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menyebutkan bahwa aspirasi yang berasal dari masyarakat ditampung melalui forum musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Beberapa bentuk media partisipasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain, melalui radio yang menyiarkan program-program kesehatan, pertemuan untuk penyuluhan, musyawarah mukim, posko dan forum musrenbang. Beragam media yang dipergunakan dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, melalui media yang dipergunakan itu semua dapat diperoleh umpan balik atau *feedback* terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tahap selanjutnya tentu saja dapat akan dipergunakan untuk perbaikan kualitas kegiatan sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi kegiatan.

IV.3.2.4 Bidang Perekonomian

Di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Ada banyak bentuk media yang dapat dipergunakan dalam media partisipasi masyarakat, antara lain, forum pertemuan, pengaduan masyarakat, musyawarah, forum curah pendapat, dan bentuk media lainnya.

Hasil temuan lapangan Tim P3B Bappenas terkait dengan Media Partisipasi Masyarakat Secara Langsung pada bidang pemulihan perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Sekretariat Bersama antara Bapel BRR dengan pemda provinsi dan Kab/kota sebagai wadah penyatuan visi dan misi secara bersama termasuk penyelesaian masalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan secara bersama dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Akses informasi dan komunikasi untuk masyarakat tentang proses pembangunan, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilakukan melalui papan pengumuman, melalui media "Serambi Indonesia" dan disiarkan juga melalui media center pemda.
3. Penyerapan aspirasi masyarakat (di Kab.Aceh Jaya) dilakukan melalui Proposal masyarakat yang diserahkan kepada BRR distrik. Selanjutnya Proposal usulan masyarakat tersebut dirapatkan pada forum Sekber bersama-sama antara BRR, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO. Jika diputuskan usulan masyarakat tersebut layak maka akan diteruskan usulannya kepada BRR pusat di Banda Aceh untuk dimasukkan dalam RKA-KL BRR pada tahun selanjutnya.

IV.3.2.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Media partisipasi masyarakat pada bidang kelembagaan dan hukum tersebut diantaranya :

- Musrenbang di tingkat kecamatan, namun daerah belum memiliki utusan khusus, tetapi hanya diwakili oleh mukim/ camat melalui pengiriman delegasi yang mewakili setiap desa/kecamatan
- Forum koordinasi kecamatan yang terdiri dari kumpulan masyarakat , aparat desa, Donor/NGO, BRR dan pemerintah level kecamatan maupun kabupaten/kota. Forum tersebut merupakan tempat berinteraksi, bertukar informasi dan mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada bidang kelembagaan dan hukum, isu yang dibahas yaitu masalah pembangunan kantor
- Konsultasi dengan masyarakat dilakukan melalui proposal masyarakat yang diserahkan kepada BRR regional/distrik, kemudian proposal tersebut dibahas ketika rapat Sekretariat Bersama apakah usulan masyarakat tersebut layak untuk diteruskan usulannya kepada BRR pusat di Banda Aceh.
- Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BRR dengan tembusan kepada Pemda terkait, namun keputusan tidak selalu ada di Pemda.

Media partisipasi dalam proses pengawasan masih terbatas yaitu melalui media massa, media elektronik dan website.

IV.4 Aspek Kapasitas

Aspek kapasitas yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara garis besar pada aspek kapasitas disajikan dua indikator yaitu kapasitas kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia.

IV.4.1 Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Kelembagaan BRR NAD-Nias

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2006, organ kelembagaan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

A. Dewan Pengarah

Susunan Dewan Pengarah terdiri dari:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Sekretaris: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan (Kepala Bappenas)
Anggota:

1. Menko Kesra
2. Menko Perekonomian
3. Menkeu
4. Menteri Pekerjaan Umum
5. Ketua DPRD Aceh
6. Gubernur Sumut
7. Kapolda NAD
8. Rektor Universitas Syah Kuala
9. Rektor IAIN Arraniry
10. Muslimin Ibrahim
11. Surya Paloh
12. Badruzzaman
13. Arkian Zabua
14. Humam Hamid

B. Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :

Ketua Plt.: Naimah Hasan
Sekretaris: Djunaidi Hadisumarto
Anggota:

1. Emil Salim
2. Mari'e Muhammad
3. TB. Silalahi
4. Kanaka Puradireja
5. Djali Yusuf
6. Naimah Hasan
7. Kemal Stamboel

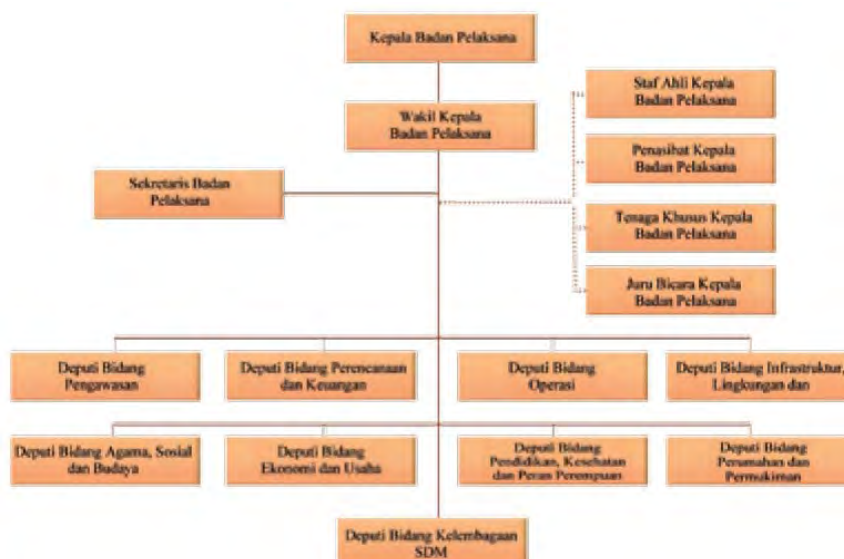
C. Badan Pelaksana

Susunan Badan Pelaksana terdiri dari :

Kepala:	Kuntoro Mangkusubroto
Wakil Kepala:	Gubernur NAD
Sekretaris:	Faisal Putra
Deputi Bidang Pengawasan:	Ramli Ibrahim
Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan:	Amin Subekti
Deputi Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan:	T. Safir Iskandar Wijaya
Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha:	Said Faisal Baa'bud
Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman:	Bambang Sudiatmo
Deputi/Kepala Operasi:	Eddy Purwanto
Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan:	Cut Cayarani Bitai
Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan:	Bastian Sihombing
Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM:	Iqbal Farabi

Selanjutnya Struktur Badan Pelaksana dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Bagan 4. 1
Struktur Organisasi Badan Pelaksana
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias



Sumber: LAKIP BRR NAD-Nias, 2008

Pada tahun 2008, BRR semakin mengintensifkan pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM), antara lain dengan reorganisasi tanggungjawab yang memungkinkan stafnya memfokuskan diri pada kebutuhan utama Pemulihan 2008. Dalam rangka menyediakan dukungan bagi penyelesaian program dan implementasi peralihan, diintensifkan penggeseran fokus sektoral ke wilayah. Sebagai akibatnya, terdapat penambahan kapasitas dan aktivitas di kantor perwakilan BRR untuk meningkatkan peran dan partisipasi Pemda setempat.

Untuk SDM Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR NAD - Nias) didukung oleh sumber dayamanusia yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan juga telah ditunjang dengan remunerasi yang memadai. Jumlah personil BRR NAD- Nias seluruhnya (per 31 Desember 2008) sebanyak 811 orang, yang terdiri dari Kepala Badan, Wakil Kepala, Sekretaris, Deputy 10 orang, Direktur 54 orang, Manajer 154 orang, Asisten Manajer 193 orang, dan Senior Staf 393 orang. Sedangkan dari latar belakang pendidikan, SDM BRR NAD - Nias didominasi lulusan S-1/DIV yaitu sebanyak 423 orang, selanjutnya SMU sebanyak 167 orang, S-2 sebanyak 102 orang, D-III sebanyak 65 orang, D-I sebanyak 22 orang, S3 sebanyak 17 orang dan SLTP sebanyak 15 orang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

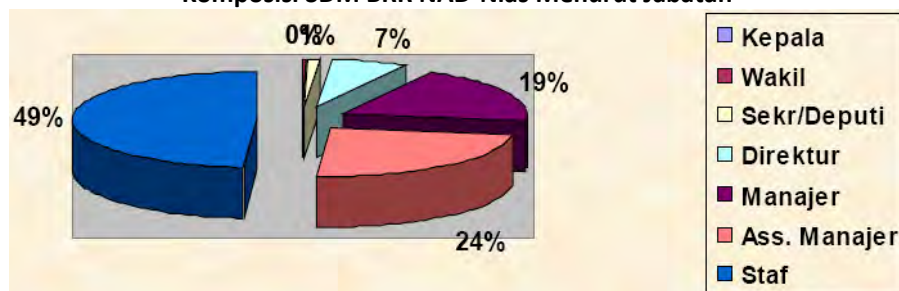
Tabel 4. 52
Sumber Daya Manusia (SDM) Bapel BRR NAD -Nias

MENURUT JABATAN	JUMLAH	MENURUT PENDIDIKAN	JUMLAH
Kepala Badan	1	Strata 3 (S-3)	17
Wakil Kepala Badan	1	Strata 2 (S-2)	102
Sekretaris Badan	1	Strata 1 (S1) dan Diploma IV	423
Deputi/Kepala	10	Diploma III (DIII)	65
Direktur	54	Diploma I (DI)	22
Manajer	154	SLTA	167
Asisten Manajer	193	SLTP	15
Senior Staf	397		
JUMLAH	811	JUMLAH	811

Sumber: LAKIP BRR NAD-Nias, 2008

Sedangkan untuk komposisi SDM menurut jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut:

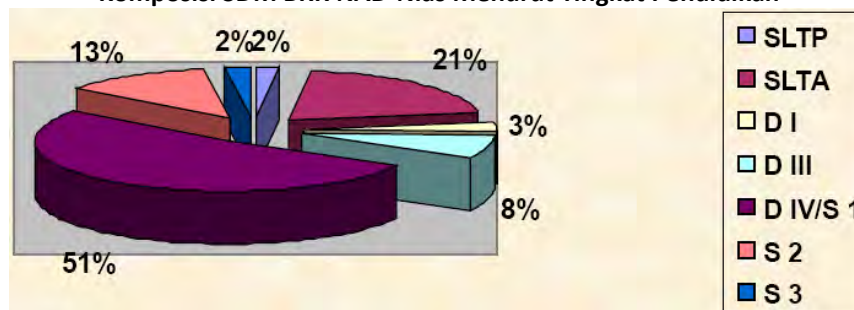
Diagram 4. 1
Komposisi SDM BRR NAD-Nias Menurut Jabatan



Sumber: LAKIP BRR NAD-Nias, 2008

Diagram 4. 2

Komposisi SDM BRR NAD-Nias Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: LAKIP BRR NAD-Nias, 2008

Berikut ini beberapa gambaran yang diperoleh dari beberapa narasumber dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas pada beberapa bidang pemulihan, yaitu;

Tabel 4. 53
Kelembagaan dan SDM dalam Aspek Kapasitas
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Kelembagaan dan SDM
Bidang Perumahan dan Permukiman	
Provinsi NAD	• IFRC NAD, Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk keadaan biasa/normal, kapasitas kelembagaan dan SDM yang sekarang ini dirasakan cukup memadai. Yang menjadi tantangan adalah terkadang pada keadaan/waktu-waktu tertentu (khususnya saat terjadi bencana) terasa perlunya penambahan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan kualitas SDM, staf diikutsertakan pada pelatihan yang dilaksanakan oleh KPDE agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan. Sedangkan untuk pelatihan penanggulangan bencana, SAR bekerjasama dengan Satpol PP yang melaksanakannya. • SDM dari PNS's bisa dikatakan <i>capable</i>, PNS's banyak menurunkan orang yang memang mengerti bidang yang dikerjakan. Contohnya bisa dilihat pada Germany RC membuat septic tank ber-trap yang pembuangan terakhirnya adalah air yang baik untuk tanaman sebagai unsur hara; dan Norwegian RC mempunyai <i>drilling equipment</i> terbaik untuk dapat mencapai air bersih. PMI sendiri memiliki keterbatasan dalam kapasitas SDM. Sewajarnya volunteer/relawan PMI harus mampu memberikan dedikasinya dan berjiwa kemanusiaan, hal ini yang membuat kuantitas SDM PMI sedikit. Keterbatasan lain adalah dalam mempersiapkan workplan dan pelaporan. Ada pembelajaran mengenai workplan yang didapat dari PNS's, juga ada pelatihan tentang workplan tersebut tentang bagaimana memetakan apa yang harus

Lokasi Sampel	Kelembagaan dan SDM
	dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Ada workshop pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat yang dilakukan Belgium RC di Aceh Selatan dan Aceh Tengah, yang melibatkan PMI cabang, wakil dari pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan serta PMI NAD dan PNS's (donor) tersebut. AmCross, Belgium RC dan Danish RC fokus terhadap pelatihan IC-BRR (Integrated Community - Basis Risk Reduction), tergetnya menyiapkan masyarakat agar siaga terhadap kejadian bencana. • UN - Habitat : SDM yang ada sudah memadai, terutama untuk lapangan dimana dilakukan perekrutan dan pelatihan fasilitator yang akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pembangunan kembali rumah. • Deputi Multi Donor Fund (MDF) Aceh - Nias : Tantangan ke depan yaitu bagaimana peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap Pemerintah Daerah pasca berakhirnya BRR. Termasuk dalam hal melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memelihara aset-aset yang sudah dibangun. • Deputi Bidang Operasi BRR : Perlu ditingkatkan kapasitas (capacity building) terhadap Pemerintah Daerah seperti dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset yang sudah dibangun, bagaimana pula dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. BRR dalam proses penyusunan penganggaran di parlemen bisa cepat karena sudah didukung oleh dokumen pendukung. Kapasitas SDM pada Pusat Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (P4W) komposisinya terdiri dari 70% dari Pemerintah Daerah, 10% dari Perguruan Tinggi dan 5% dari NGO. Pemerintah Daerah bisa menggunakan SDM eks BRR yang sudah melatih tenaga-tenaga yang handal seperti untuk penyusunan pelaporan dan penganggaran pembangunan. Mereka dapat menyelesaikan penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam waktu cepat. • Dinas Bina Marga dan Cipta Kaya NAD : SDM di Dinas sudah mencukupi dan memadai, karena sudah banyak SDM lulusan S2. Dalam proses penyusunan RTRW, sebagai SDM diperbantukan ke dalam Satker BRR. Ada lulusan dari Surabaya, Bandung, Semarang. SDM yang kurang khususnya di bidang quality control, terutama pada SDM tenaga teknis lab/orang lapangan yang perlu diperbanyak. Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Dinas melaksanakan pelatihan di bidang perencanaan dan pengawasan menggunakan dana APBA/APBN.
Banda Aceh	• Bappeda Banda Aceh : Peningkatan SDM terus dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan pelatihan yang juga disupport oleh NGO, hal ini sangat mendukung untuk peningkatan Capacity Building. Untuk peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia dan pengembangan Informatika Technology (IT) kiranya dapat didukung melalui dana APBK dan Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Kota Banda Aceh.
Aceh Besar	• Bappeda Aceh Besar : SDM di Bappeda sudah memadai untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi ketika BRR berakhir karena sistem penyelenggaraan pemerintahan berjalan seperti biasa, yang bertambah hanyalah asset nya. • Dinas Kimpraswil Aceh Besar : Kapasitas SDM yang dimiliki dinas sangat terbatas. Hal ini masih terus ditingkatkan dengan mengikuti beberapa pelatihan.
Aceh Jaya	• Bappeda Aceh Jaya : Kelembagaan Bappeda sebagaimana aturan yang tertera dalam PP 41 telah memenuhi syarat, namun penempatan personil didalamnya yang belum tepat, begitu juga terjadi kekurangan Kabid dan Kasubid. Lemahnya personil yang ada, padahal seharusnya ada evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan (cross check di lapangan). Peningkatan SDM sangat rendah, karena kebijakan pimpinan (bupati) : "pegawai yang ada di Aceh Jaya tidak boleh sekolah, walaupun atas biaya sendiri". Sehingga kita kekurangan tenaga ahli. Harus ada lembaga donor yang menilai, agar membuat perjanjian untuk SDM yang dikirim ke luar negeri. • BRR Distrik Aceh Jaya : Kapasitas SDM semakin kita kurangi, karena menyesuaikan dengan kapasitas pekerjaan yang dilaksanakan, bahkan pada beberapa sektor telah ditutup karena pekerjaannya untuk wilayah Aceh Jaya telah selesai. Walaupun progress pada Oktober ini berkisar pada 75% hingga 80%, kami harapkan pada awal Desember dapat mencapai 100%. Sehingga Januari sampai April hanya penyusunan laporan. Kapasitas SDM untuk pengawas, untuk distrik Aceh Jaya sangat aktif, karena beliau juga telah berpengalaman bersama saya (kepala distrik) ketika di regional III (Aceh Tengah). Dan BRR juga mempunyai standar tersendiri dalam perekrutan tenaga pengawas. • Dinas Kimpraswil Aceh Jaya : Kapasitas kelembagaan di dinas masih serba kekurangan. Kapasitas SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping personil yang terbatas, kemampuan kita juga lemah disemua bidang. Sehingga ada beberapa personil yang berkualitas, sehingga ia harus bekerja hingga malam. Personil, disini ada 3 bidang, minimal 1 bidang harus memiliki 20 personil. Namun kami mengharapkan personil tersebut benar-benar berkualitas dan sesuai dengan bidangnya.

Lokasi Sampel	Kelembagaan dan SDM
Bidang Sosial Kemasyarakatan	
Aceh Jaya	• Dinas Pendidikan harus dilakukan dinas dalam peningkatan kapasitas yaitu penambahan formasi dan quota untuk guru tingkat SD, SMP dan SMA serta guru bidang studi. Selain itu, diperlukan peningkatan peralatan kelembagaan untuk setiap sekolah baik yang berada di pedalaman maupun pesisir.
Aceh Besar	• Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar masih memerlukan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program/kegiatan di dinas tersebut. Beberapa kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan yaitu peningkatan tingkat pendidikan dari aparatur dinkes seperti peningkatan jenjang dari S1 ke tingkat S2 khususnya bidang kesehatan masyarakat. Selain itu, diperlukan pula peningkatan jumlah dokter spesialis yang hingga kini masih dirasakan sangat minim. Hal ini dilakukan melalui pengalokasian anggaran beasiswa melalui pemda kabupaten.
Bidang Kelembagaan dan Hukum	
Aceh Besar	• Badan Kesbanglinmas, Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk keadaan biasa/normal, kapasitas SDM dan kelembagaan yang sekarang ini dirasakan cukup memadai. Yang menjadi tantangan adalah terkadang pada keadaan/waktu-waktu tertentu (khususnya saat terjadi bencana) terasa perlunya penambahan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan kualitas SDM, pegawai diikutsertakan pada pelatihan yang dilaksanakan oleh KPDE agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan. Sedangkan untuk pelatihan penanggulangan bencana, SAR bekerjasama dengan Satpol PP yang melaksanakannya. • Bappeda, SDM di Bappeda sudah memadai untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi ketika BRR berakhir karena sistem penyelenggaraan pemerintahan berjalan seperti biasa, yang bertambah hanyalah asset nya.
Banda Aceh	• Bappeda, Peningkatan SDM terus dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan pelatihan yang juga disupport oleh NGO, hal ini sangat mendukung untuk peningkatan Capacity Building. Untuk peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia dan pengembangan Informatika Technology (IT) kiranya dapat didukung melalui dana APBK dan Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Kota Banda Aceh.
Nias dan Nias Selatan	• Bappeda, Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Kapasitas SDM dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dirasakan sudah cukup baik. Kapasitas Pemda tidak kalah dengan orang pusat. Selama ini program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD dapat direalisasikan dengan baik. Namun, Kami harapkan tambahan anggaran terutama dari pusat untuk pelatihan Sumber Daya Manusia. Hal ini mengingat bukan hanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi saja, tetapi kegiatan pembangunan reguler membutuhkan tenaga kerja yang handal.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Pada tahun 2008 ini terjadi peningkatan kapasitas **kelembagaan BRR** di bidang infrastruktur, hal ini terlihat dari meningkatnya efektifitas kinerja dengan adanya regionalisasi BRR di beberapa wilayah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Ditinjau dari jumlah satker di bidang infrastruktur pada tahun 2008 terjadi penambahan jumlah satker dibandingkan tahun 2007 yaitu awalnya berjumlah 25 satker kemudian menjadi 28 satker untuk bidang infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan, antara lain:

1. Penanganan Kegiatan Strategis
2. Lingkungan, Drainase dan Pengendalian Banjir NAD
3. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IA
4. Pembangunan infrastruktur Pemerintah NAD
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Simeulue (IDB)

6. Rehabilitasi, peningkatan, Pembangunan Fasilitas Pos, Telekomunikasi dan Transportasi Udara NAD
7. Pengembangan Kawasan percontohan NAD
8. Pembinaan Perencanaan Jalan NAD
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD
10. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Provinsi NAD
11. Irigasi NAD
12. Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut NAD
13. Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat NAD
14. Peningkatan Kualitas Jasa Energi dan Ketenagalistrikan NAD
15. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah I
16. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II
17. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah III
18. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV
19. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah V
20. Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias
21. Perencanaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Provinsi dan Ketenagalistrikan Kabupaten Nias
22. Irigasi, Pengendali Banjir, Pengaman Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias
23. Irigasi, Pengendali Banjir, Pengaman Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias Selatan
24. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias
25. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias Selatan
26. Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD
27. Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan NAD
28. Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Infrastruktur NAD

Terkait dengan kelembagaan SKPD Pemerintah Daerah, pihak yang terlibat dalam penanganan bidang infrastruktur adalah Bappeda sebagai koordinator perencanaan, sedangkan yang menangani infrastruktur secara sektoral adalah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (tingkat provinsi) atau Dinas Kimpraswil (Kabupaten/Kota) dan Dinas Perhubungan.

Pada kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang terkait dengan bidang infrastruktur, berdasarkan hasil kunjungan lapangan diketahui kondisi kelembagaan dan SDM khususnya untuk Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan di Provinsi NAD, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Nias dan Nias Selatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 54
Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah Bidang Pemulihan Infrastruktur
di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemda
Provinsi NAD	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi NAD - Menurut Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, mekanisme laporan biasanya 2 mingguan dari lapangan/PPK/PPTK ke Satker Pemda kepada Dinas Provinsi, pelaporan dari BRR kepada Dinas tidak ada, kecuali apabila Dinas yang meminta kepada BRR. - SDM di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sudah mencukupi dan memadai, karena sudah banyak SDM lulusan S2 bidang perkotaan, jalan raya, dan lain sebagainya. Dalam proses penyusunan RTRW, sebagian SDM diperbantukan ke dalam Satker BRR. SDM yang kurang khususnya di bidang <i>quality control</i> terutama pada SDM tenaga teknis lab/orang lapangan ang perlu diperbanyak. Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melaksanakan pelatihan di bidang perencanaan dan pengawasan menggunakan dana APBA, APBN/P2JJ, bahkan ada kerjasama dengan Litbang tentang jalan (pelatihan jalan) di Bandung

Lokasi Sampel	Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemda
Aceh Jaya	Dinas Kimpraswil Aceh Jaya - Mekanisme dan tata kerja Dinas Kimpraswil merujuk pola yang ada di tingkat provinsi dan peraturan lain yang terkait. Kapasitas kelembagaan di Dinas masih terbatas/kurang. Mekanisme pelaporan rutin setiap bulannya, dengan alur penyampaian kepada Setda dan ditembuskan kepada Bawasda. Selain itu setiap triwulan, Setda yang akan melaporkan kepada tingkat provinsi Mekanisme pengawasan mencakup pada pelaksanaan program dan kegiatan - Kapasitas SDM Dinas Kimpraswil baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat terbatas, hal ini menyebabkan beberapa personil yang berkualitas harus bekerja hingga malam. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur Pemda, terutama pelatihan sertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi peran kerja pengadaan barang dan jasa yang berada dalam satu atap. Dinas Perhubungan Aceh Jaya - Mekanisme dan tata kerja Dinas Perhubungan masih merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku - Kuantitas SDM di Dinas Perhubungan belum memenuhi standar, karena ada beberapa posisi yang masih kosong, hal ini menyebabkan tidak sinkron sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan aturan yang ada. Misalnya: - Kurangnya Tenaga KIR untuk angkutan umum di Calang. Hal ini ditindaklanjuti Dinas dengan mendatangkan 2 orang tenaga KIR dari Tegal. - Pasca tsunami banyak staff Dinas yang hilang, dan sekarang staff-staf yang ada di Dinas diisi oleh guru karena tenaga yang kepengkatannya sesuai dan cepat berasal dari guru. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga yang memiliki keilmuan sesuai dengan bidang infrastruktur. - Minimnya tenaga ahli keudaraan, hal ini ditindaklanjuti dengan mengirimkan staff ke tingkat provinsi untuk mengikuti training keudaraan di Medan selama 1 bulan.
Aceh Besar	Dinas Kimpraswil Aceh Besar - Permasalahan kelembagaan Dinas Kimpraswil adalah keterbatasan atau kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas, terutama pada transportasi (kendaraan dinas). Selain itu pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak ditembuskan kepada Dinas terkait - Jumlah SDM di Dinas Kimpraswil cukup memadai, namun tetap diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatigab, terutama untuk tenaga pengukuran, perencanaan, desain, dan tenaga surveyor. BRR telah membantu memberikan pelatihan peralatan laboratorium jalan dan pelatihan teknis lab di tingkat kabupaten dan provinsi, selain itu Donor/NGO ILO pun memberikan pelatihan laboratorium jalan Kantor Perhubungan Aceh Besar - Dulu status Kantor Perhubungan adalah Dinas, namun pada tahun 2008 ini mengalami penurunan menjadi Kantor. Rencananya pada tahun 2009, kapasitas kelembagaan Kantor Perhubungan akan menjadi Dinas dan bergabungnya dengan 2 Dinas yaitu Dinas Infokom dan KPDE, dan jumlah SDM menjadi 75 orang. - SDM di Kantor Perhubungan sangat terbatas, dimana saat ini hanya berjumlah 25 orang, pejabat kantor tertinggi adalah eselon 3, sedangkan untuk Dinas adalah eselon2.
Nias	Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan Nias - Kapasitas kelembagaan dan SDM Dinas dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dirasakan sudah cukup baik. Kapasitas Pemda tidak kalah dengan orang pusat. Selama ini program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPd dapat direalisasikan dengan baik. - Dinas mengharapkan adanya tambahan anggaran untuk pelatihan SDM yang handal dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi saja dan kegiatan reguler
Nias Selatan	Dinas Perhubungan Nias Selatan Kapasitas kelembagaan dan SDM Dinas dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dirasakan sudah cukup baik. Kapasitas Pemda tidak kalah dengan orang pusat. Selama ini program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPd dapat direalisasikan dengan baik.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

Dari tabel di atas, secara umum diketahui bahwa rata-rata keterbatasan kelembagaan di SKPD (Pemda) yaitu pada sarana dan prasarana pendukung, terutama di Dinas Kimpraswil Aceh Besar. Mekanisme dan tata kerja Dinas di Kabupaten/Kota mengacu pada pola yang ada di tingkat Provinsi serta peraturan terkait lainnya. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas terkait yaitu ada staff yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing dinas.

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk pemulihan infrastruktur dalam jajaran Pemda masih terbatas, hal ini menyebabkan Pemda harus mendatangkan SDM dari luar Dinas. Oleh karena itu kapasitas SDM Pemda ini perlu ditingkatkan dalam melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur pasca berakhirnya BRR pada 16 April 2009. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan upaya meningkatkan kapasitas SDM aparatur Pemda tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Untuk mendukung Pemda dalam mengatasi permasalahan di atas, BRR dan Donor/NGO melakukan peningkatan capacity building melalui pelatihan/training, seminar, pendampingan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, peningkatan alokasi APBD dapat didukung proses peningkatan kapasitas SDM, sehingga Pemda dapat memiliki kemampuan finansial dan kelembagaan yang membaik untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR terutama dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan terhadap asset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, serta bagaimana penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Pemda dapat menggunakan SDM eks BRR yang sudah terlatih dalam penyusunan pelaporan dan penganggaran pembangunan.

Salah satu Donor/NGO yang memiliki kontribusi cukup besar di bidang infrastruktur yaitu USAID dalam pembangunan jalan lintas barat dari Banda Aceh-Calang. Kapasitas SDM USAID Untuk melaksanakan pembangunan jalan sangat memadai, yang melibatkan 1) konsultan asing/perusahaan yang berpusat di AS yaitu Parsons Global Services Inc, yang bertanggung jawab pada manajemen desain dan konstruksi jalan; 2) Ssangyong Engineering and Construction Co. Ltd. dari Korea Selatan, dan 3) P.T. Hutama Karya. Kontraktor-kontraktor tersebut banyak mempekerjakan masyarakat lokal sebagai buruh, security, dan lain sebagainya dalam pembangunan jalan dan drainase. Parsons pun turut terlibat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan konstruksi dan manajemen proyek.

IV.4.2 Pendanaan

Pendanaan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias diperoleh dari APBN dan Non-APBN (dana dari *Non Government Organization* dan Negara Donor). Sejumlah Rp. 67 triliun (USD 7,4 milyar) sudah dikomitmenkan untuk proses Pemulihan Aceh-Nias. Pendanaan *off-budget* telah mencapai komitmen sekitar Rp. 35 triliun;

Keuangan BRR NAD-Nias

Berdasarkan Laporan BPK-RI tahun 2008 atas pemeriksaan keuangan BRR NAD-Nias Tahun 2007, bahwa Anggaran Belanja Tahun Anggaran (TA) 2007 BRR NAD-Nias adalah sebesar Rp. 10.421.421.421.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.532.842.711.896,00 atau 62,69 % dari anggaran. Dari sisi Pendapatan terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 304.512.342.812,00. Pendapatan selama TA 2007 mencapai Rp. 304.512.342.842,00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 299.870.749.551,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2006 yang mencapai Rp. 4.641.593.291,00. Realisasi Belanja tahun anggaran 2007 mencapai Rp. 6.532.842.711.896,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 3.443.835.214.888,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2006 yang sebesar Rp. 9.976.677.926.784,00. Realisasi Belanja tahun anggaran 2007 mengalami penurunan disebabkan oleh:

- a) TA 2006 BRR NAD-Nias mengelola sisa DIPA 2005 (DIPA Luncuran 2006) sebesar Rp. 3.552.289.724.000,00 dan DIPA Murni 2006 sebesar Rp. 10.522.978.230.000,00
- b) Realisasi TA 2006 sebesar Rp. 9.976.677.926.784,00 termasuk realisasi Trust Fund sebesar Rp. 2.213.702.756.920,00 sementara pelaksanaan kegiatannya di TA 2007.

Sumber: Laporan BPK-RI atas pemeriksaan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun 2007, Agustus 2008

realisasinya sudah sekitar Rp. 22,85 trilyun. Adapun melalui saluran *on-budget*, baik yang *on-* maupun *off-treasury*, telah tercatat komitmen sekitar Rp. 32 trilyun; realisasinya sekitar Rp. 23 trilyun.

Alokasi anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp10,8 trilyun ($\pm$ USD 1,2 milyar) yang merupakan kombinasi dari dua skema Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA Murni Rp7 trilyun ($\pm$ USD 778 juta) serta DIPA Luncuran Rp3,8 trilyun. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (Rp. 6,57 trilyun), Pinjaman Luar Negeri (Rp. 482,16 milyar), Hibah (Rp. 3,2 trilyun), serta Rupiah Murni Pendamping (Rp. 633,77 milyar). Bertambahnya aktivitas regional tercermin dari alokasi anggaran TA 2008. Kantor perwakilan BRR menerima alokasi sebesar 43 persen dari keseluruhan anggaran dibandingkan dengan 2007 yang hanya 31 persen.

Dana APBN untuk tahun anggaran 2008 tersedia sebesar **Rp. 10.888.322.764.000,-** yang terdiri dari DIPA Murni 2008 **Rp. 7.000.401.140.000,-** dan DIPA Luncuran sebesar **Rp. 3.887.921.624.000,-**.

LAKIP BRR NAD-Nias Tahun 2008

Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada gabungan dari hasil kegiatan seluruh satuan kerja BRR, sehingga dalam perspektif keseimbangan, kinerja sasaran yang dihasilkan merupakan hasil capaian dari beberapa satuan kerja. Berdasarkan indikator kinerja keluaran (*outputs*), rata-rata capaian kinerja BRR untuk tahun 2008 adalah sebesar **80,98%**. Sedangkan dari perspektif keuangan, realisasi penggunaan dana mencapai Rp. 7.625.820.619.607 atau **70,04%** dari total anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 10.888.322.764.000,-.

Sumber : LAKIP BRR NAD-Nias, 200

Adapun rincian alokasi dan realisasi per bidang pemulihan pada 31 oktober 2009 adalah:

Tabel 4. 55
Rincian Alokasi dan Realisasi per-Bidang Pemulihan
Status 31 Oktober 2009

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	ANGGARAN		REALISASI				PERSENTASE REALISASI			Total Realisasi
			DIPA-L 2008	DIPA 2008	DIPA-L 2008		DIPA 2008		DIPA-L 2008	DIPA 2008	DIPA 2008&L	
					RM	PHLN	RM	PHLN				
1	01	BIDANG PENGAWASAN	6.526.862.000	29.528.750.000	5.155.456.583	0	11.646.160.453	0	78,99%	39,44%	46,60%	16.801.617.036
2	02	BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	66.590.095.000	535.762.013.000	17.062.787.171	549.304.921	4.730.843.492	0	26,45%	0,88%	3,71%	22.342.935.584
3	03	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA	47.317.023.000	208.519.232.000	38.365.137.984	0	178.494.309.316	0	81,08%	85,60%	84,76%	216.859.447.300
4	04	BIDANG EKONOMI DAN USAHA	335.758.459.000	295.248.411.000	152.519.057.993	58.206.432.320	138.056.722.715	40.440.802.991	62,76%	60,46%	61,68%	389.223.016.019
5	05	BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN	432.270.858.000	515.907.086.000	154.036.766.791	20.984.467.515	137.050.976.926	90.341.206.311	40,49%	44,08%	42,44%	402.413.417.543
6	06	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.430.894.354.000	1.357.564.899.000	800.455.948.004	48.290.062.289	388.393.663.301	162.589.445.305	59,32%	40,59%	50,20%	1.399.729.118.899
7	07	BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN	1.235.558.982.000	3.030.502.049.000	617.669.404.979	192.225.392.965	949.633.307.647	201.688.814.211	65,55%	37,99%	45,97%	1.961.216.919.802
8	08	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	241.746.747.000	212.962.194.000	133.096.292.322	27.661.422.346	68.083.995.002	3.141.593.439	66,50%	33,45%	51,02%	231.983.303.109
9	09	SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	46.526.530.000	377.477.299.000	20.328.660.761	0	263.703.083.429	0	43,69%	69,86%	66,99%	284.031.744.190
10	10	BIDANG OPERASI	44.731.714.000	436.929.207.000	30.718.323.187	10.956.500	158.903.901.615	3.355.217.060	68,70%	37,14%	40,07%	192.988.398.362
Jumlah Keseluruhan			3.887.921.624.000	7.000.401.140.000	1.969.407.835.775	347.928.038.856	2.298.696.963.896	501.557.079.317	59,60%	40,00%	47,00%	5.117.589.917.844

Sumber : BRR NAD-Nias, Oktober 2008.

Namun berdasarkan LAKIP BRR NAD-Nias Tahun 2008, menyebutkan bahwa total realisasi belanja per 31 Desember 2008 adalah sebesar **Rp. 7.625.820.619.607,-** atau dan telah mencapai **70,04%**.

Berikut ini beberapa gambaran yang diperoleh dari beberapa narasumber terkait kapasitas pendanaan dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas pada beberapa bidang pemulihan, yaitu;

Tabel 4. 56
Kapasitas Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Kapasitas Pendanaan
Bidang Perumahan dan Permukiman	
Provinsi NAD	• Deputi Bidang Operasi BRR: Untuk pendanaan bagi Provinsi NAD, sebenarnya tidak ada permasalahan karena jumlah alokasi anggaran yang besar karena adanya dana otonomi khusus dan migas. Permasalahannya adalah bagaimana pemanfaatan dana tersebut. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Pemerintah Daerah seperti perencanaan, penganggaran dan pemantauan. Hal ini disebabkan karena kapasitas Pemda NAD dalam hal penyerapan dana pembangunan masih sangat rendah, dimana saat ini penyerapannya masih sekitar 18%. • Deputi Multi Donor Fund (MDF) Aceh - Nias : Keberadaan MDF ini perlu juga dilihat efektifitas dan efisiensi terhadap keberadaan trust fund melalui wadah ini. • UN - Habitat: UN - Habitat adalah NGO dengan funding off budget dari ADB & UNDP. Mekanisme penyaluran dana adalah dengan pengiriman melalui joint account yang dibuka setelah terbentuk kelompok kerjasama dengan Bank pemerintah (BRI) dikarenakan desa-desa yang dibangun jauh dipelosok. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap, dimana kelompok-kelompok tersebut mengajukan proposal dan secara berkala membuat laporan kemajuan pembangunan rumah mereka. Besaran jumlah dana dikirim berdasarkan prosentase pencapaian yang dihasilkan.
Banda Aceh	• Bappeda Banda Aceh : Terkait dengan kapasitas pendanaan yang bersumber dari Otonomi Khusus untuk Kota Banda Aceh yaitu sebesar 63 miliar rupiah. Alokasi sebesar itu dengan mempertimbangkan dengan indikator-indikator yang dipergunakan dalam rangka penerimaan dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/Kota.
Aceh Besar	• Bappeda Aceh Besar : Permasalahan yang mungkin dihadapi pada aspek kapasitas ini adalah masalah pendanaan untuk memelihara asset-asset yang telah dibangun oleh BRR dan donor/NGO tersebut. Untuk biaya operasionalnya apabila menggunakan dana APBA tidak akan mencukupi, oleh karena itu diharapkan ada bantuan dari APBN melalui DAU atau DAK.
Aceh Jaya	• Bappeda Aceh Jaya : Masih sesuai dengan aturan yang berlaku bagi lembaga perencanaan. Namun yang diperlukan adalah sinkron dan sinergisnya. Seperti Bappeda yang bergerak cepat dalam penyusunan KUA dan PPAS, namun SKPD lain masih terlambat. • BRR Distrik Aceh Jaya : Kapasitas pendanaan di distrik tetap harus mengikuti pusat walaupun usulan lebih besar. Sehingga distrik harus lebih pintar dalam memilih prioritas pekerjaan yang akan dilaksanakan serta koordinasi dengan pemda dan NGO agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.
Bidang Infrastruktur	
Aceh Jaya	Dinas Perhubungan Aceh Jaya sampai Oktober 2008 ini masih 37 % dan Dinas merencanakan membangun 2 sisi pelabuhan di Pulo Raya, namun karena keterbatasan dana maka hanya dapat membangun di 1 sisi pelabuhan. Selain itu Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan di Kepulauan Nias mengharapkan ada tambahan dana APBD untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur Pemda agar Pemda memiliki staff yang handal dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan anggaran APBD. Peningkatan kapasitas Pemda merupakan salah satu tantangan pasca berakhirnya BRR, karena Pemda yang akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemeliharaan asset-aset berdasarkan kewenangan daerah, terutama di bidang infrastruktur.
Bidang Sosial Kemasyarakatan	
	Gambaran dan kondisi bidang pemulihan ini dapat dilihat pada tiga sub bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan peran perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pelaksana BRR NAD-Nias menunjukkan pencapaian pada tiga sub bidang tersebut mulai tahun 2005-2008 mencapai 71,66 persen. Konkretnya, alokasi yang disediakan sebesar 3,812 T rupiah, sedangkan penyerapannya mencapai 2,732 T rupiah.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

IV.5 Aspek Keberlanjutan

Aspek keberlanjutan merupakan aspek terakhir dari 5-K sebagai analisis dari laporan ini. Pada aspek keberlanjutan diantaranya menjelaskan tentang regulasi PMT BRR dan kesinambungan

rehabilitasi dan rekonstruksi; manajemen aset P3D dan kesiapan peralihan; pengaturan kelembagaan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta integrasi PRB dan kebijakan pembangunan.

Berikut ini beberapa gambaran yang diperoleh dari beberapa narasumber terkait isu keberlanjutan dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim P3B Bappenas pada beberapa bidang pemulihan, yaitu;

Tabel 4. 57
Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Beberapa Kabupaten/Kota

Lokasi Sampel	Keberlanjutan
Bidang Perumahan dan Permukiman	
Provinsi NAD	PMI NAD : End of mission dari PNS's bagi PMI merupakan titik awal pasca donor berakhir, bahwa PMI harus kembali mandiri. PMI sudah menyiapkan strategi menjelang berakhirnya tugas para donor, yaitu dengan Fund Rising and Income Generating Program, dimana PMI mencoba untuk dapat mengumpulkan dana. Fund Rising and Income Generating Program ini dilaksanakan dengan menggunakan aset yang di-hand-over oleh donor. Sebagai contoh biaya pengadaan peralatan kantor untuk tahun depan bisa ditiadakan, karena sudah ada peralatan kantor yang dihibahkan donor, dan lain sebagainya.
Aceh Besar	• Bappeda, mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut : "Donor/NGO sangat percaya kepada BRR yang memiliki kapasitas yang baik dimana profesionalisme mereka diakui dunia internasional, tetapi apabila BRR berakhir bagaimana dengan keberlanjutannya. Sebaiknya BRR diperpanjang sampai 2 tahun lagi. Apabila dibentuk badan baru, Pemda kurang setuju karena : tentunya memerlukan peningkatan kapasitas untuk SDM baru (terutama untuk mengelola aset); manajemen badan tersebut harus ada batasan-batasan jangan sampai aset tidak dikelola dan anggaran tidak terserap; mekanismenya seperti pembahasan dana otsus; dan list kegiatan dan pendanaannya (APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) dipilih bersama;; serta kegiatan keberlanjutannya diprioritaskan pada daerah tsunami mengingat dananya sudah terbatas. Tetapi apabila Badan tersebut harus dibentuk dan atas Keputusan SK Gubernur maka dianggap kurang kuat." • Dinas Kimpraswil Aceh Besar : Dalam menghadapi keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR, dinas optimis untuk melakukan kegiatan lanjutannya. Walaupun tetap harus selalu dilakukan pelatihan dan transfer knowledge.
Bidang Infrastruktur	
Aceh Jaya	Dinas Kimpraswil Aceh Jaya • Tidak ada persiapan khusus dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR, Dinas pun tetap melaksanakan peningkatan kapasitas SDM secara rutin dengan dana APBK maupun pelatihan dari BRR atau Donor/NGO berupa: - o pendidikan pelatihan untuk personil Dinas, - o mengikuti diklat dan short course mengenai standarisasi dalam pembangunan infrastruktur - o pelatihan software, dll • Aset-aset yang diterima Dinas baik dari BRR maupun Donor/NGO biasanya berupa rumah, jalan, dan jembatan, serta sarana kantor. Dinas siap untuk pemeliharaan aset melalui anggaran APBK. Dinas pun belum membentuk sistem atau mekanisme peralihan yang dibentuk secara khusus. Dinas Perhubungan Aceh Jaya • Belum ada persiapan khusus dalam rangka peningkatan kapasitas, karena Dinas Perhubungan memang rutin meningkatkan kapasitas tenaga ahli dalam bidang perhubungan. Rencana peningkatan kapasitas dinas yaitu membuka peluang untuk peningkatan SDM dalam arti pengadaan tenaga yang sesuai dengan bidangnya seperti bidang kelautan, bidang darat, dll yang direncanakan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan (short course). • Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan BRR mengenai mekanisme pengalihan aset terminal dan pelabuhan. Untuk pemeliharannya, dinas telah mengalokasikan uang operasional melalui APBK

Lokasi Sampel	Keberlanjutan
Aceh Besar	Dinas Kimpraswil Aceh Besar • Dalam menghadapi keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR, Dinas optimis untuk melakukan kegiatan lanjutannya, karena memiliki staff yang cukup memadai dan berpengalaman, walaupun tetap harus selalu dilakukan pelatihan dan transfer <i>knowledge</i>. • Saat ini Dinas belum banyak menerima peralihan aset, kecuali untuk jalan dan jembatan. Dinas terkendala dalam biaya untuk pemeliharaan karena kemampuan APBA sangat terbatas/kurang memadai. Misalnya jalan yang dibangun pada tahun 2005 dan kemudian diserahkan pada tahun 2009, setelah 4 tahun tentunya jalan tersebut membutuhkan pemeliharaan dan perawatan. Selain itu serah terima jalan ada kewenangannya masing-masing, yaitu jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyerahan aset dilakukan ke Bupati/Pemda, ada berita acara serah terima aset khusus untuk jalan kabupaten dan drainase/saluran, dan sebelum serah terima aset ada tim tersendiri yang akan melihat kondisi aset. Dinas Perhubungan Aceh Besar • Setelah BRR berakhir, Pemda siap untuk kegiatan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahun 2009 Kantor perhubungan menjadi Dinas dan jumlah SDM menjadi 75 orang, jumlah tersebut dirasakan cukup untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. • Nantinya akan ada tim penuntasan yang akan melanjutkan kegiatan BRR, sebaiknya Pemda juga turut terlibat di dalamnya • Mekanisme serah terima aset harus ditinjau kembali, harus ada pertanggung jawabannya. Aset yang akan diserahkan ke Pemda diantaranya adalah Pelabuhan Lamting, Pelabuhan di Pulo Aceh, namun Pemda menemukan adanya kendala dalam manajemen dan biaya operasional pemeliharaan pelabuhan tersebut, karena dana APBA sangat terbatas.
Nias dan Nias Selatan	Dinas Kimpraswil Nias • Infrastruktur jalan dan jembatan di kab.Nias sudah terlaksana dengan baik, dan sejauh ini tinggal menuntaskan paket-paket pekerjaan yang belum terselesaikan yang akan dilanjutkan oleh Dinas Kimpraswil (Pemda). Kualitas pekerjaan sejauh ini tidak ada komplain dari masyarakat. Yang menjadi persoalan yaitu anggaran APBD yang terbatas untuk biaya operation dan maintenance. • Dinas Kimpraswil mengharapkan alat-alat berat pasca berakhirnya BRR dapat ditinggalkan menjadi aset Pemerintah daerah, dengan sebelumnya diperbaiki terlebih dahulu. Dinas Perhubungan Nias dan Nias Selatan • Infrastruktur pelabuhan laut dan pelabuhan udara di kab.Nias sudah sudah diserahkan dan dimanfaatkan. Kualitas pekerjaan sejauh ini tidak ada komplain dari masyarakat. Yang menjadi persoalan yaitu anggaran APBD yang terbatas untuk biaya operation dan maintenance
Bidang Sosial Kemasyarakatan	
	• Dalam rangka keberlanjutan pengembangan FK Unsyiah untuk peningkatan pelayanan, saat ini FK Unsyiah sudah membuat perencanaan untuk membuat pusat tropical medicine. Pusat ini dapat melakukan diagnostik secara biologi monokuler dan lebih cepat dikarenakan selama ini metode diagnostik masih konvensional. Rencananya didalam tropical medicine center (Pusat Penyakit Tropis) ada laboratorium biologi monokuler yang diagnosanya dilakukan dengan indikasi DNA lebih cepat dan akurat. Diharapkan percontohannya dibuat di Aceh. Tapi sampai saat ini belum ada dukungan pendanaan dan FK Unsyiah sebenarnya mengharapkan kepada BRR untuk dapat merealisasikannya. • Harapan dengan adanya center tersebut di FK Unsyiah dapat melatih tenaga laboratorium (S1) dan dokter (S2) bidang kesehatan yang dapat melakukan diagnosa dengan metode biologi monokuler keseluruh kabupaten/kota. Pembuatan pusat tersebut tidak dimulai dari awal karena sudah ada bantuan dari Dikti Departemen Pendidikan Nasional tapi ada beberapa alat yang belum tersedia. Ke depan, dengan dibukanya pusat penyakit tropis, maka FK Unsyiah dapat membuka S2 kedokteran tropis (DBD, malaria, TBC, hepatitis, diare) dan kesempatan bagi dokter-dokter umum yang tidak dapat mengambil S2 keluar untuk peningkatan SDM supaya rumah sakit yang sudah dibangun bisa fungsional semua.

Lokasi Sampel	Keberlanjutan
	Beberapa proyeksi pengembangan pendidikan kesehatan setelah bubarnya BRR yaitu pengembangan kurikulum, menghasilkan dokter umum (S1) dan peningkatan fasilitas pembelajaran, seperti teknologi informasi (lab komputer), labskim (untuk pelatihan peningkatan mutu dokter dan dokter spesialis) membantu Depkes melakukan training-training tersebut.
	Gambaran tentang manajemen AP3D dan kesiapan peralihannya di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut; - Beberapa permasalahan pasca berakhirnya BRR pada April 2009 yaitu biaya Operating and Maintanance untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)1, SMK 2 dan SMK 3 yang dibangun oleh pihak GTZ. Pembangunan gedung tersebut megah sekali dan lengkap dengan fasilitas ruang belajar yang ber-AC. Untuk biaya listrik saja sangat besar kebutuhannya. Selain itu, masalah dana Operating and Maintanance untuk Gedung Museum Tsunami. Pemerintah Kota Banda Aceh siap menerima aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dibangun oleh berbagai pihak. Untuk mendukung biaya pengelolaan dan perawatan aset tersebut dapat bersumber dari pendanaan APBD. - Investasi untuk membangun RSU Gunungsitoli sangat besar yaitu Rp 120 Milyar. Jumlah kapasitas kamar sebanyak 160 unit. Rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit rujukan dan satu-satunya pusat layanan kesehatan yang terkesan mewah di Kepulauan Nias. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki yang cukup mewah diperkirakan dibutuhkan biaya operating and maintainance (OM). Bila dibebankan kepada APBD kabupaten sejauhmana kemampuan untuk mengalokasikan anggaran pengelolaan dan pemeliharaan. Dengan keterbatasan APBD maka diperlukan langkah dan upaya strategis untuk mendukung pengelolaan RSU tersebut. Berdasarkan perkiraan kebutuhan pendanaan OM sekitar 10 milyar sampai 20 milyar pertahun. Namun, kemampuan Pemda hanya mampu sekitar seperempat dari biaya yang diperkirakan. - Menjelang berakhirnya BRR, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah mempersiapkan berbagai langkah kebijakan dengan membentuk personel-personel untuk mengelola aset-aset yang akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Di dalam tim ini terdapat bagian pengadaan dan pemeliharaan. Adapun tugas bagian pengadaan dan pemeliharaan ini diberikan wewenang untuk mengecek kesempurnaan fisik aset yang diserahkan termasuk standar kelayakan yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Di kabupaten ini sudah sekitar 50% aset yang dialihkan terkecuali bangunan fisik yang belum selesai. Namun bila ada masalah dalam proses serah terima aset maka tim ini yang dibentuk melalui SK Kepala Dinas Pendidikan yang akan bertindak. Atas dasar itu maka akan dijadikan langkah selanjutnya yaitu apakah akan diserahkan kepada penerima manfaat atau diperbaiki terlebih dahulu. Terkait gambaran kondisi aset pada pembangunan sekolah yang dibangun oleh NGO Jerman dinilai sangat bagus. Demikian juga dengan American Red Cross. - Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menghadapi berakhirnya BRR, melakukan beberapa langkah pada tahun 2008 yaitu melaksanakan kegiatan capacity building, terutama terhadap aparatur yang nantinya akan memanfaatkan aset dari rehabilitasi dan rekonstruksi, melakukan peningkatan standar terhadap sebagian besar aparatur pelayan kesehatan, hingga memenuhi standar dalam melayani masyarakat dan memperjuangkan adanya dana operasional untuk setiap puskesmas. Seperti yang digunakan untuk petugas jaga.
Bidang Perekonomian	
Aceh Besar	- Pasca berakhirnya BRR, Dinas Kelautan dan Perikanan telah merencanakan dan siap memanfaatkan segala aset yang akan diserahkan oleh BRR sekaligus dengan perawatannya, jika tidak ada dana khusus maka Pemda akan menganggarkannya dari APBD. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus terus berlanjut walaupun BRR berakhir dan adanya badan baru, karena masih banyak bidang kelautan dan perikanan yang belum tersentuh. (Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Besar). - Dinas akan menerima aset yang akan diserahkan dari BRR maupun Donor/NGO, namun aset tersebut juga harus dioperasikan oleh SDM yang handal. Pemda Aceh Besar sangat mengharapkan dalam penyerahan aset juga sekaligus dengan penyerahan SDM yang terlibat pada BRR selama ini. Pemeliharaan aset tersebut akan didukung dana dari APBD. (Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Besar)

Lokasi Sampel	Keberlanjutan
Aceh Jaya	- Untuk tahun 2009 : Telah mengalokasikan dana untuk pembangunan kebun enteres untuk tanaman karet. Sehingga mata dari tanaman tersebut nantinya dapat menjadi stumm bagi pengembangan tanaman karet. Harapannya ini nantinya dapat diperjual belikan oleh kelompok tani tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih mandiri dan tidak perlu mendatangkan dari daerah lain. Untuk pengembangan baru, dinas akan tetap berkoordinasi dengan lembaga baru pengganti BRR. Harapannya bisa merealisasikan potensi-potensi yang mungkin dikembangkan. Dinas juga telah mengajukan kepada Pemda Kabupaten untuk menambah personil petugas lapangan, karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (Kabupaten Aceh Jaya) - Dinas akan tetap melakukan koordinasi dengan apapun lembaga baru nantinya, karena bidang perkebunan dan kehutanan merupakan bagian signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Jaya. (Kabupaten Aceh Jaya)
Provinsi NAD	Realisasi pelaksanaan yang merupakan kebutuhan utama pertanian; irigasi (lining), penguatan institusi benih, sarana dan prasarana tersedia. Pogram bantuan dari IDB yang akan mulai berjalan Januari 2009 hingga tahun 2011. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2008 proses administrasi sudah selesai. Untuk tahap pertama (2009) pembangunan infrastuktur pertanian. (Dinas Pertanian Provinsi NAD)
Nias Selatan	- Potensi perikanan di Kab.Nias Selatan sangat besar terutama di Pulau-pulau Batu. Hal ini perlu diperhatikan karena selama ini banyak pencurian ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yang merusak. Potensi pariwisata juga perlu dikembangkan. (Kab.Nias Selatan). - Perlunya dikembangkan potensi produk lokal khususnya karet, kelapa dan kokoa. Seharusnya pengembangan ekonomi juga perlu diperhatikan misalnya dengan pembukaan lahan karet baru yang sangat luas. Ini sebagai proyek percontohan. Dalam 5 tahun sudah akan memberikan hasil yang pasti kepada masyarakat. Pembukaan lahan karet disertai pelibatan partisipasi masyarakat. Ini sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar dapat dihasilkan karet kualitas terbaik. (Kab.Nias Selatan)
Bidang Kelembagaan dan Hukum	
Aceh Besar	Badan Kesbanglinmas Dalam menghadapi peralihan, dinas merasa siap karena objek dari program dan kegiatan tetap berasal dari kabupaten sendiri. Dinas sendiri belum menerima asset yang akan dialihkan, dan dinas tetap berharap akan dialihkan ke dinas sesuai dengan hak dan kewajiban dinas. Dinas memerlukan adanya Reviter (transmisi) yang dapat digunakan sebagai penyebar informasi ke masyarakat. Reviter sangat berguna untuk menyebarkan apa yang terjadi pada saat Tsunami yang terjadi 3 tahun lalu, karena reviter hanya menggunakan batere dan tidak mengandalkan satelit. Sayangnya reviter yang ada saat ini sudah tidak layak lagi kondisinya.
Nias Selatan	BRR, Konsekuensi dari serah terima aset yaitu ada hak dan kewajiban. Dengan infrastruktur jalan yang semakin bagus maka transportasi menjadi semakin lancar, perekonomian dapat meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan potensi penerimaan daerah. Jadi tidak benar kalau sama sekali BRR tidak mempedulikan penegembangan ekonomi. - PAD yang semakin besar dapat digunakan sebagai biaya operation dan maintenance (O&M) dari aset yang sudah diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-Bappenas, 2008.

IV.5.1 Regulasi PMT BRR dan kesinambungan RR

Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka tugas selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2007, BRR telah melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun yang ketiga. Sedangkan pada tahun 2008 merupakan proses persiapan menjelang pengakhiran masa tugas BRR yang akan berakhir pada 2009. Untuk pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009 akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU No.

10 Tahun 2005 tentang pembentukan BRR NAD-Nias. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saatnya seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR untuk keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain; aspek perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) dan aspek penganggaran pembangunan (APBD). Untuk Provinsi NAD merupakan daerah yang memperoleh porsi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang paling besar. Hal ini sesuai dengan skala kerusakan dan kerugian yang dialami wilayah NAD. Bila dilihat dari ketersediaan APBD, Provinsi NAD sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional selama dua puluh tahun. Alokasi pendanaan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, social dan kesehatan. Jadi, selain dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan, Provinsi NAD memperoleh dana otonomi khusus yang secara riil diperkirakan mencapai 4 triliun rupiah.

Sedangkan pengakhiran masa tugas BRR di Kepulauan Nias memiliki format yang berbeda dengan apa yang sedang dipersiapkan di NAD. Beberapa hal mendasar yang membuat dibutuhkannya pendekatan khusus ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Nias tidak memiliki anggaran pembangunan yang cukup untuk meniadakan proses pembangunan pasca rekonstruksi.
- b. Kegiatan rekonstruksi selama periode 2005-2009 diperkirakan telah menambah asset Kepulauan Nias sebesar Rp 6 triliun. Isu kritis yang dihadapi adalah keberlanjutan dari operasi dan pemeliharaan dari berbagai asset yang telah dibangun.
- c. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sangat rendah.
- d. Sejak awal Kepulauan Nias dianggap sebagai daerah belakang dari daratan Sumatera Utara.
- e. Persoalan keterbelakangan menjadi isu yang dikaitkan dalam proses pelaksanaan rekonstruksi di Kepulauan Nias sejak awal, dan ini akan terus berlanjut hingga pengakhiran masa tugas.

Oleh karenanya, diperlukan persiapan dan upaya strategis yang optimal dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR. Adapun upaya strategis tersebut dapat dibagi kepada tiga yaitu:

- **Penyerahan Mandat**

1. Menyerahkan Proyek. Kegiatan ini meliputi pengakhiran proyek terakhir tertanggal 1 November 2008, hal ini sejalan dengan asumsi bahwa per tanggal 1 November 2008, tidak akan ada lagi kegiatan tender maupun penunjukan langsung untuk proyek pembangunan.
2. Peralihan Aset. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) menjadi ketentuan utama yang juga didukung oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun PP No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Pembangunan Kapasitas secara Terbatas. Pembangunan kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan melalui AGTP (Aceh Governace Transition Program) yaitu sebuah program yang didanai oleh Multi Donor Fund (MDF) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam kegiatan transisi maupun kegiatan lanjutan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

- **Memperkuat Dampak Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

1. Koordinasi dengan LSM maupun Donor . Koordinasi dengan LSM maupun Donor dilakukan dengan berkala melalui beberapa metode diantaranya CFAN (*Coordination Forum for Aceh and Nias*) dan NISM (*Nias Island Meeting Stakeholders*) dalam kaitannya

membangun hubungan koordinasi yang baik dengan para LSM maupun Donor pada masa transisi maupun pada masa pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias.

2. Mengisi Celah yang Masih Tersisa. Melakukan monitoring terhadap semua aktifitas. Celah yang masih tersisa diupayakan sedemikian mungkin untuk terisi dengan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh maupun dengan menyarankan qanun-qanun terkait sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias Tahun 2007-2009.

- **Mempersiapkan Pembangunan NAD dan Kepulauan Nias Jangka Panjang.**

1. Membantu Pemda dalam melakukan perencanaan untuk 5 tahun kedepan.
2. Dalam melakukan kegiatan perencanaan, Pemda dibantu secara kontinu melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sesuai dengan RPJM.
3. Melakukan transfer kapasitas dari BRR.

Sebelum melaksanakan upaya-upaya strategis diatas, BRR dan pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa landasan regulasi terkait pengakhiran masa tugas BRR, diantaranya adalah:

1. Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Terutama pada pasal 16 dan 26.
2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terutama pada pasal 4, 42, 51 dan 55.
3. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama pada pasal 10.
4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Terutama pada pasal 1 dan 6.
5. PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terutama pada pasal 2.

Adapun kegiatan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih terus dilanjutkan pada tahun 2009 di NAD dan Nias antara lain, tergambar sebagai berikut:

Bagan 4. 2

Program/ kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilanjutkan pada Tahun 2009

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	L O K A S I		
		NAD	NIAS	NISEL
1	Perumahan Pemukiman	●	●	●
2	Jalan Provinsi/ Kabupaten	●	●	●
3	Infrastruktur dan Lainnya	●	●	●
	Terminal	●	●	
	Irigasi	●	●	●
	Tanggul Pengendali Banjir	●	●	
	Pengaman Pantai	●	●	
	Air Minum	●		
	Sanitasi	●		
	Air Limbah	●		
	Drainase	●		
	Persampahan	●		
4	Ekonomi	●	●	
5	Sosial Kemasyarakatan	●	●	●
6	Kelembagaan	●	●	●

Sumber: Paparan Meneg PPN pada Rapat Tripartite Terbatas BRR NAD-Nias, Oktober 2008

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Pada Tahun 2009 adalah:

Tabel 4. 58
Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2009
oleh Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pagu Indikatif 2009

No	Pelaksana	Program/Kegiatan dan Keluaran	Lokasi
1	Departemen Pekerjaan Umum	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		ADB - Roads Project (ETSP)	NAD
		MDF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP)	NAD
		MDF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) Non Pelabuhan	NAD
		JBIC - Prasarana Jalan dan Drainase	NAD
		AFD - Drainase Kota	NAD
2	Departemen Perhubungan	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		Infrastructure Reconstruction Financing Facility - Seaport 1 Pelabuhan Laut (Singkil), 2 Bandara (SIM dan Cut Nyak Dhien)	NAD
3	Departemen Dalam Negeri	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		MDF - Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRRP)	Nias
		IDB - Semeulue Reconstruction Project	NAD
4	Departemen Agama	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		IDB - Reconstruction of IAIN Ar-Raniry	NAD
5	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		MDF-Bank Dunia - Support for Poor and Disadvantage Area (SPADA)	NAD-Nias
		MDF - Bank Dunia- Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD
		Livelihood and Economic Development Program (Nias-LEDP)	Nias
6	Badan Pertanahan Nasional	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		RALAS (MDF - Bank Dunia)	NAD
7	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		Koordinasi dengan stakeholder terkait	NAD-Nias

Sumber : Kegiatan keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009.

Sedangkan lembaga Donor/NGO yang masih mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009:

Tabel 4. 59
Donor Yang Mendukung Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009

No	Donor	Kegiatan	Lokasi
1	MDF - World Bank	Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS)	NAD
		Livelihood and Economic Development Programme (LEDP)	Nias
		Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD

No	Donor	Kegiatan	Lokasi
		Support for Poor and Disadvantage Area (SPADA)	NAD-Nias
		Infrastructure Reconstruction Enabling Programme (IREP)	NAD-Nias
		Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)	NAD-Nias
		Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) - Ports	NAD
		Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRRP)	Nias
2	ADB	Road Project (ETSP)	NAD
3	JBIC	Prasarana Jalan dan Drainase	NAD
4	AFD	Drainase Kota	NAD
5	IDB	Simeulue Reconstruction Project	NAD
6	IDB	Reconstruction of IAIN Ar-Raniry	NAD

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008.

Kegiatan kesinambungan di Kepulauan Nias, BRR telah dan akan meninggalkan beberapa kegiatan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat membantu peningkatan kapasitas Pemkab. Dalam hal ini, sikap Pemkab yang proaktif akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari program-program tersebut. Setidaknya ada lima kegiatan yang termaksud, yaitu:

1. SPADA (Support for Poor and Disadvantage Area), telah berjalan di Nias selama kurang lebih 2 tahun dan berada di bawah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Ini bertujuan untuk mengembangkan daerah tertinggal dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum hingga ekonomi;
2. SPEM (Spatial Planning and Environmental Management) yang merupakan proyek penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang dibiayai dengan hibah ADB ETESP dimana salah satu fitur dari proyek yang telah berjalan selama 3 tahun ini adalah peningkatan kapasitas perencanaan Pemkab melalui *on the job training* terhadap staf perencanaan Bappeda;
3. NITP (Nias Islands Transition Program) akan dimulai pada awal 2009 berada di bawah pembinaan Departemen Dalam Negeri dimana salah satu komponen kegiatannya betul-betul dirancang untuk meningkatkan kapasitas Pemkab melalui proses pendampingan oleh Penasehat Teknis pada bidang pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, dsb;
4. NRP (Nias Reconstruction Program) yang telah berjalan 2 tahun dan akan berakhir pada pertengahan 2009 merupakan proyek rekonstruksi Nias Selatan yang didanai oleh AusAID, dimana salah satu komponen kegiatannya adalah perkuatan kapasitas Pemkab pada level kecamatan;
5. AMAP (Asset Mapping Assistance Project for Aceh-Nias) yang didanai oleh AusAID dan dilaksanakan oleh GTZ dengan program penginventarisasian aset program rekonstruksi serta peningkatan kapasitas Pemkab dalam pengelolaan aset daerah baik yang merupakan hasil rekonstruksi maupun pembangunan reguler pra dan pasca bencana.

IV.5.2 Manajemen Aset P3D dan Kesiapan Peralihan

Pada tahap persiapan penyelesaian tugas BRR pada April 2009, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses transisi dan transfer dari BRR kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yakni Aset P3D (Pendanaan, Peralatan, Personil (SDM) dan Dokumen.

Mengenai aset atau barang milik negara diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Kedua landasan

regulasi merupakan bagian dari payung hukum dalam proses serah terima aset dari hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Seluruh Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada BRR NAD-Nias merupakan Barang Milik Negara dan dicatat serta dikelola oleh BRR NAD-Nias, baik yang berasal dari dana APBN maupun non APBN (Hibah). Pada saat BRR NAD-Nias berakhir pada tahun 2009 seluruh aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada Pemda atau pihak lain melalui mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melakukan proses penyerahan urusan atau aset, baik yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah maka disesuaikan dengan dengan tingkat kewenangannya masing-masing. Hal ini merujuk kepada PP No. 38 Tahun 2007 maka telah ditentukan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara khusus untuk Provinsi NAD juga mengacu dan memperimbangkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aset Pendanaan, Peralatan, Personil dan Dokumen (P3D) hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias –Provinsi Sumatera Utara perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD -Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

Dalam proses pemindahan aset BRR ini ada beberapa hal penting yaitu :

Manajemen Serah Terima Aset

Hasil wawancara Tim P3B Bappenas mengenai aspek keberlanjutan khususnya yang terkait dengan serah terima aset. Berikut ungkapan narasumber :

- **Direktur Manajemen Aset BRR:** DPKKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) dengan dukungan dana dari UNDP akan membentuk tim yang akan berkoordinasi dengan BRR untuk melakukan verifikasi dan produce data-data dan persiapan serah terima. Kasus distribusi perumahan dari dana funding (non BRR) yang off budget ditangani khusus oleh Kedeputian Perumahan karena dalam parameter aset rumah bukan aset tetap tetapi persediaan. Rumah adalah aset individu bukan aset publik.
- **Pusdatin BRR:** Telah dibangun *sistem Housing Geospatial* yang sudah online dalam jaringan intranet bapel BRR, dimana data yang terdapat didalamnya 110 ribu titik rumah hasil survey yang dilakukan dari bulan Desember 2007, lengkap dengan gambar dan data pemilik. Selain itu sistem tersebut dapat dilihat by provider (yang dibedakan dengan warna), by wilayah based on legend dan per-rumah. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai data dalam serah terima di bidang perumahan. Untuk saat ini system housing geospatial belum di publikasikan karena menyangkut *privacy*. Sistem tersebut dibangun bukan untuk aplikasi buku telepon, tetapi merupakan aplikasi akuntabilitas dan untuk pertanggungjawaban. Kemungkinan akan dipublikasikan sekalian dengan *asset mapping*, tetapi dengan sedikit perubahan. Dimana nantinya yang akan ditampilkan tidak hanya rumah tapi juga jalan, jembatan dan lain-lain. Saat ini diutamakan rumah dikarenakan menyangkut kepada pertanggungjawaban.
- **Dinas Bina Marga dan Cipta Karya NAD:** Aset jalan belum ada yang dialihkan ke Pemda, mungkin baru mulai dilakukan serah terima aset pada akhir tahun 2008. Sebaiknya mekanisme serah terima rumah penduduk diserahkan terlebih dahulu kepada Pemda kemudian Pemda menghibahkan kepada masyarakat, Karen amenggunakan uang Negara dalam pembangunan rumah tersebut. Rumah yang tidak dilengkapi dengan prasarana dasar lingkungan akan dibebankan kepada Pemda, dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Contohnya di Aceh Jaya membutuhkan Rp. 60 M untuk pembangunan sanitasi dan jalan masuk dimana nantinya akan ditanggung oleh Pemda Setempat.
- **Bappeda Aceh Besar:** Pengalihan aset harus disosialisasikan sejak awal dan diperlukannya mekanisme pengelolaan aset. Aset terbagi ke dalam aset tetap dan aset tidak tetap. Aset rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus jelas menjadi tanggung jawab siapa. Apabila diserahkan kepada Pemda, harus dilihat statusnya apakah masuk ke dalam kewenangan Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

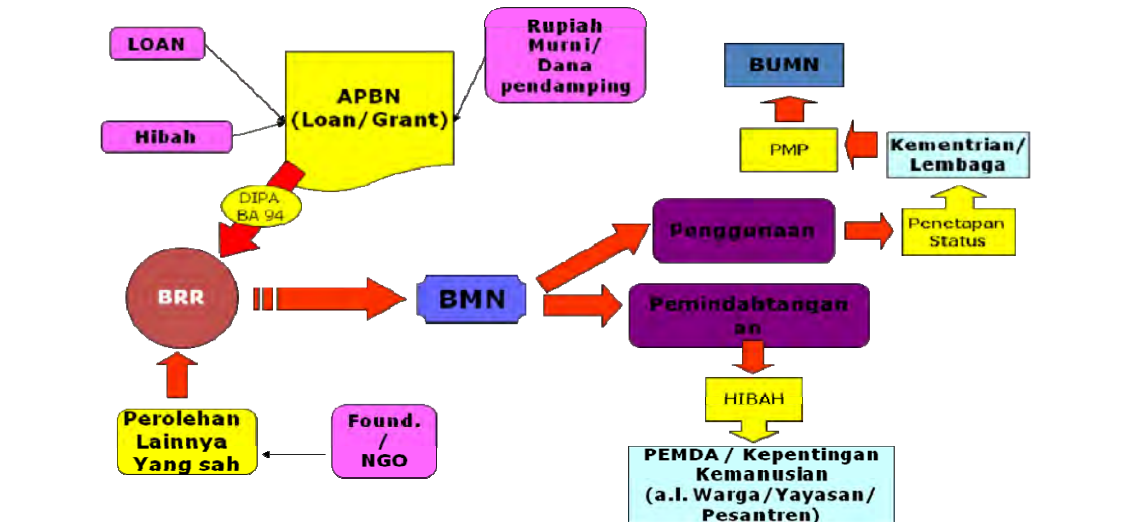
Sumber : Hasil wawancara Tim P3B dari berbagai sumber, 2008

A. Kerangka Manajemen Aset BRR

Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang reliable dan mudah di update

- Penyediaan aplikasi manajemen aset
- Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
- Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah dikeluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset

Bagan 4. 3
Alur Aset BRR NAD-Nias



Sumber: Direktorat Manajemen Aset BRR NAD-Nias

Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya.

- Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang dihibahkan atau dialihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat
- Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan.
- Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggungjawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

B. Prosedur Pengelolaan Aset di BRR

- Penyerahan Aset dari Satker ke BRR

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputi sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh:

- Satker yang bersangkutan,
- Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
- Direktorat Manajemen Aset,
- Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

- Penyerahan aset dari NGO/ Negara Donor ke BRR

Tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

- Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir.

Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (end user) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun pengelolaan.

Terkait dengan peralihan Aset Personil (SDM), bagi personil PNS secara bertahap, menjelang akhir tahun 2008 hingga April 2009, sesuai dengan tingkat kebutuhannya dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sedangkan personil non PNS juga akan dilepas dan mengakhiri kontraknya sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan terhadap peralihan dokumen, BRR NAD-Nias sampai dengan paruh waktu masa tugasnya telah menerapkan Sistem Manajemen Dokumen (selanjutnya disingkat SMD) sebagai sistem pengelolaan dokumen melalui teknologi informasi, termasuk pengaturan proses pergerakan dan isinya. Beberapa fungsi SMD yang telah dijalankan oleh BRR NAD-Nias adalah sebagai berikut:

Saran BPK-RI terhadap Aset BRR NAD-Nias

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar melakukan penertiban atas penguasaan, pencatatan dan pelaporan aset (termasuk aset eks hibah), dengan cara melakukan inventarisasi ulang seluruh asset untuk memastikan keberadaan, penguasaan, dokumentasi dan penilaian aset.

Sumber : Laporan BPK-RI atas pemeriksaan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun 2007, Agustus 2008

- Fungsi Perpustakaan;
- Fungsi pengelompokkan (Indeks) dokumen sesuai dengan klasifikasinya;
- Fungsi pencarian dan pengambilan dokumen yang mudah dan cepat, sesuai teks aslinya, kata petunjuk, judul dan profilnya;
- Fungsi keamanan terhadap dokumen;
- Kontrol terhadap versi dokumen, dan perubahan isi dokumen;
- Fungsi administrasi surat masuk dan keluar
- Fungsi menjalankan secara otomatis aplikasi yang sesuai dengan dokumennya dan kemampuan melihat isi dokumen tanpa membuka aplikasinya.

Dokumen BRR NAD-Nias yang masuk dalam dokumen peralihan setelah masa tugasnya adalah sebagai berikut :

C. Dokumen Administrasi

Secara umum terdapat beberapa administrasi yang menjadi perhatian khusus adalah:

Pengalihan Administrasi Proyek

Merupakan dokumen proyek/paket kegiatan, mulai dari proses pelelangan/penunjukan langsung (terdiri dari dokumen lelang/penunjukan langsung dan proses lelang hingga penetapan pemenang lelang/penunjukkan langsung), hingga pada seluruh proses kegiatan pelaksanaan dan supervisi, beserta inventarisasi barang dan jasa yang tidak habis pakai. Penyerahan pengelolaan proyek ke pengguna akhir (*end user*) yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP).

Pengalihan Regulasi/Peraturan

Hal ini terkait dengan semua penetapan/ keputusan yang berkaitan dan membawa akibat pada pembiayaan. Peraturan-peraturan yang telah dihasilkan antara lain, mencakup Surat keputusan dan pengaturan; kepegawaian, kebijakan operasional, penetapan standar dan prosedur dan lain sebagainya.

a) Hasil Studi

Hasil studi adalah segala bentuk penelitian, survey, studi kelayakan, studi banding yang dilaksanakan untuk keperluan perencanaan, penyelesaian masalah atau pengambilan kebijakan. Tujuan pengalihan hasil studi dapat diserahkan ke Departemen atau Instansi terkait di Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang yang diteliti. Disamping itu hasil studi tersebut dapat ditempatkan di tempat khusus seperti di Perpustakaan Nasional, Wilayah, Daerah, Kantor Pemerintah Daerah, Universitas, Sekolah, LSM, dan lain sebagainya.

b) Sistem

Sistem adalah bentuk perangkat lunak yang dilengkapi dengan perangkat keras serta dukungan keahlian tertentu untuk mengoperasionalkannya. Karena itu proses pengalihan di lakukan secara utuh dan lengkap, dalam arti meliputi perangkat keras dan perangkat lunak serta pengalihan keahlian (kalau perlu dengan personil) atau pelatihan serta bila dimungkinkan juga dialihkan pembiayaannya. Beberapa hal yang termasuk dalam sistem antara lain database, data spatial/sistem pemetaan, sistem kependudukan (SISDUK), pelayanan satu atap (keimigrasian), dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal pendataan, pemantauan, dan pengelolaan aset, BRR melakukan sejumlah langkah, diantaranya adalah :

1. Pemutakhiran data agar lebih akurat dan final untuk mendukung sistem informasi kepada publik dan seluruh pihak terkait, serta keperluan sistem pemantauan dan pengelolaan aset. Untuk rumah baru, secara khusus telah didata dengan sistem yang terstruktur dan mengakomodasi seluruh pihak pembangun, mencakup data lokasi (kota/kabupaten, kecamatan, desa), tahun pelaksanaan (2005, 2006, 2007), nama pembangun/pendonor (NGO/LI, BRR, Dinas), nama pelaksana (kontraktor, khususnya BRR), jumlah rumah (yang terkontrak/komitmen, yang sedang dibangun, yang telah selesai); terdata rumah baru per Desember 2007 sebanyak 104.287 unit;
2. Meningkatkan pemantauan secara berkala. Semula pemantauan dilakukan setiap bulan sampai Mei 2007. Mulai Juli - September 2007 menjadi dwimingguan, dan mulai Nopember 2007 menjadi mingguan. Hal itu dilakukan untuk pengendalian pencapaian mutu, waktu, dan dana. Per Desember 2007, target fisik yang sudah tercapai sebesar 75 persen, dan rata-rata keuangan yang terserap sebesar 60 persen (on-budget 54 persen dan off-budget 65 persen);

3. Pengelolaan aset, dengan mempersiapkan daftar inventarisasi atas seluruh aset yang kelak diserahkan, seperti hasil jasa konsultasi, jasa barang, jasa kontraktor, dan jasa lainnya. Hingga saat ini aset yang telah didaftar yaitu rumah 104.287 unit, tersebar di seluruh kota/kabupaten yang terkena tsunami. Data lainnya masih dalam proses pendataan;
4. Penyiapan dan penyerahan aset yang telah usai diserahkan dari pihak pelaku pembangunan sehubungan pertanggungjawaban PMT.

Dengan penuntasan dan pertanggungjawaban data, pemantauan, dan pengelolaan aset, data diharapkan dapat tersaji secara akurat, resmi, dan terakses oleh pihak yang membutuhkan, baik untuk keperluan pertanggungjawaban maupun dukungan pengelolaan dan pelaporan aset.

IV.5.3 Pengaturan Kelembagaan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi target utama yang harus dicapai adalah semua program dan proyek yang telah terselesaikan harus dengan mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tahun 2008 yang juga merupakan tahun transisi pelaksanaan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan BRR ditahun 2008 menjamin terjadinya transisi yang mulus secara administrasi dan fisik dari BRR kepada Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga. Kerangka kebijakan dalam rangka kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2009 akan difokuskan kepada 4 aspek:

1. Program Penyelesaian/Fungsionalisasi

Proyek yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pekerjaan tahun 2008 yang masih belum tuntas dilaksanakan dan/atau belum fungsional pada TA 2008, serta proyek yang dilaksanakan untuk menuntaskan program yang belum dapat dicapai penuntasannya pada TA 2008

2. Program/kegiatan yang berbasis PHLN

Proyek yang mengandung *co-financing* melalui PHLN berskala besar (misal MDF) yang diperkirakan tidak akan selesai pada TA 2008. Prioritas pengalokasian pada proyek ini adalah penyediaan dana pendamping.

3. Program Strategis

Proyek yang perlu dilaksanakan dalam rangka menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Program Dukungan Transisi dan Keberlanjutan

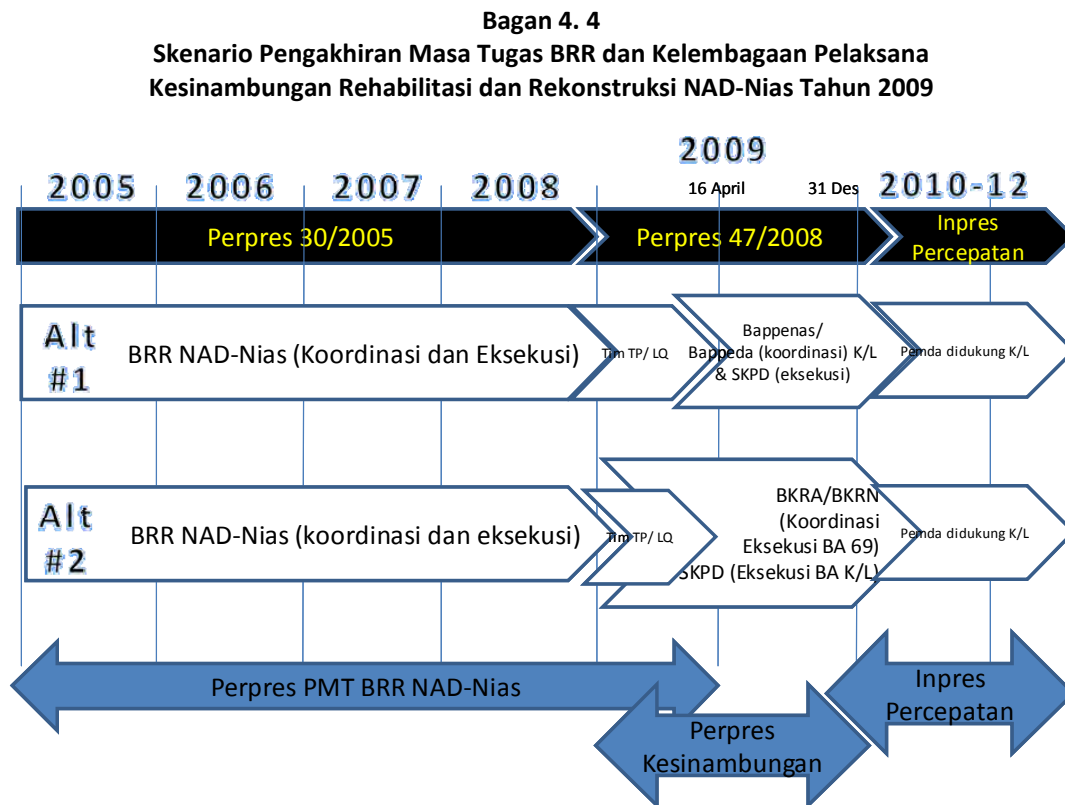
Proyek yang dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diserahkan.

Berdasarkan kerangka kebijakan diatas maka skema kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias ada 3 (tiga) yaitu :

1. *Skema pertama*, program yang sedang berjalan dan diperhitungkan tidak akan selesai dan/atau program yang terhenti/bermasalah/terbengkalai dan/atau program yang belum dapat difungsionalkan.
2. *Skema kedua*, program yang tertera dalam Renaksi NAD-Nias 2007-2009 yang belum dimulai dan/atau program yang sudah diserahkan ke masyarakat dan akan terus berlanjut (seperti program *microfinance*, beasiswa dll) dan/atau program *capacity building*.
3. *Skema ketiga*, program yang tertera dalam Renaksi NAD-Nias 2007-2009 yang akan dianggarkan melalui APBD.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dengan adanya penyesuaian rencana induk baik dari segi kebijakan, strategi dan sasaran tentunya akan membuat kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi NAD-Nias akan terus berlanjut agar upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian dapat segera tercapai. Adapun skenario untuk pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dan kelembagaan untuk kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pada tahun 2009 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Paparan Meneg PPN pada UN Retreat, Oktober 2008

Dikepulauan Nias, pada dasarnya keberlanjutan rekonstruksi sektor kelembagaan terutama pemerintahan perlu lebih dikonsentrasikan pada peningkatan kapasitas Pemkab dibandingkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas fisik. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan produk hukum dan pengelolaan proyek adalah hal-hal yang perlu diperkuat agar investasi besar yang telah ditanamkan pada periode rekonstruksi oleh BRR dan mitra kerja rekonstruksinya dapat dimanfaatkan secara efektif dan dipelihara sehingga tetap memberikan manfaat untuk jangka waktu yang panjang.

IV.5.4 Integrasi PRB dan Kebijakan Pembangunan

Bencana hampir terjadi di mana-mana baik konteks internasional, nasional maupun regional dan lokal. Korban berjatuh dan kerusakan fisik pun terbilang sangat luar biasa. Itu berarti aset penghidupan masyarakat dan daerah semakin terganggu. Salah satu faktor pemicunya adalah perencanaan pembangunan yang kurang mempertimbangkan perspektif bencana. Karena itu, dalam perencanaan pembangunan termasuk kebijakan anggaran daerah harus mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) atau *Disaster Risk Reduction*. Oleh karenanya, PRB harus menjadi prioritas daerah.

Bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Kepulauan Nias serta beberapa daerah lain di Indonesia juga produk dari perencanaan pembangunan yang tidak mempertimbangkan perspektif bencana.

Untuk perencanaan pembangunan dalam kaitan dengan penganggaran, rujukan hukumnya berada pada beberapa aturan yang telah ada seperti UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, PP 40 tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan SE bersama Mendagri dan Meneg Bappenas No 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264/SJ. Sementara untuk mengintegrasikan *dissasster risk reduction*, dasar pijak sebagai sebuah kewenangan dapat merujuk pada: Rosolusi PBB 1999, Strategi Yokohama, Kegiatan Aksi Hyogo, Kegiatan Aksi Beijing, Rencana Aksi Nasional (RAN) PRB, UU PB (PP) dan Kegiatan Aksi Daerah.

Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui lima hal yaitu:

1. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana. Dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah bencana sesuai wilayah administrasi masing-masing daerah, secara tidak langsung menjajaki potensi wilayah daerah bersangkutan. Hasil identifikasi wilayah-wilayah rentan bencana ditindaklanjuti dengan mengkaji risikonya termasuk gambaran siklus bencana serta membuat petah wilayah bencana. Peta wilayah-wilayah rentan bencana sebagai media informasi yang bakal menjadi acuan dalam perencanaan di masing-masing sektor pembangunan.
2. Meletakkan PRB sebagai prioritas daerah. Artinya, meletakkan PRB sebagai sebuah perspektif yang harus diintegrasikan ke dalam semua sektor perencanaan pembangunan. Bukan menempatkan PRB sebagai sebuah atau salah satu program yang sama dengan program yang lainnya. Jika PRB dipandang sebagai salah satu program, maka PRB ditempatkan sebagai program yang berdiri sendiri. Dengan demikian akan berpengaruh pada penganggaran yang lebih difokuskan pada program-program kegiatan

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dan Kebijakan Pembangunan

Hasil wawancara Tim P3B Bappenas mengenai isu Pengurangan Risiko Bencana dan Kebijakannya dalam pembangunan, yaitu :

- **Dinas Bina Marga dan Cipta Karya NAD** : Isu pengurangan risiko bencana sudah masuk ke dalam kebijakan Dinas. Dinas juga berkonsultasi dengan Unsyah, diskusi mengenai desain untuk pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana juga sudah diterapkan ke dalam rumah dhuafa yang dibangun oleh Dinas.
- **Bappeda Aceh Besar** : Isu pengurangan risiko bencana akan dimasukkan ke dalam RPJMD (revisi). Di Bappeda Aceh Besar terdapat tim Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) yang bekerja sama dengan MPBI mulai tahun 2007 hingga sekarang. Proyek LGSP juga turut terlibat.
- **Dinas Kimpraswil Aceh Besar** : Dinas sudah mengakomodasi isu pengurangan resiko bencana dalam kebijakan dinas. Sebagai contoh adalah adanya jalan putus akibat banjir, akan siap pos tanggap darurat yang akan membantu para pengungsi. Akan lebih baik bila dibentuk satu instansi teknis yang khusus menangani bencana, agar ada pos khusus yang dapat meng-cover dana untuk bencana.
- **PMI NAD** : AmCross, Belgium RC dan Danish RC sudah mempersiapkan PMI NAD untuk fokus terhadap pelatihan IC-BRR (Integrated Community - Basis Risk Reduction), dimana targetnya adalah menyiapkan masyarakat agar siaga terhadap kejadian bencana.
- **Bappeda Aceh Jaya** mengakomodasi PRB, seperti dalam RTRW dilakukan oleh konsultan terkait (oleh BRR dan FSI), walaupun masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan, karena dibuat berdasarkan narasumber mukim dan wilayah perlindungan hutan (lebih kepada daya fungsi hutan).
- **Bappeda Nias** Program peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat juga telah dilakukan melalui community based disaster risk reduction (CBDRM). Program ini melibatkan masyarakat dan palang merah dari berbagai negara melalui proyek percontohan sampai tingkat kecamatan, dimana telah dihasilkan peta rawan bencana. Tujuan utama program yaitu peningkatan kesadaran masyarakat atas mitigasi bencana.

Sumber : Hasil wawancara Tim P3B dari berbagai sumber, 2008

emergency respond. Tetapi kalau PRB sebagai sebuah perspektif maka anggarannya pun terintegrasi ke dalam semua sektor perencanaan pembangunan. Dengan demikian hasilnya pun sudah meminimalisir resiko bencana.

3. Pengetahuan, inovasi dan pendidikan. Setidaknya di semua tingkat masyarakat sekalipun walau sedikit tapi pasti ada pemahaman, pengetahuan dan inovasi. Ini mesti dilihat sebagai sebuah potensi yang mesti digali dan ditumbuh-kembangkan dengan berbagai perspektif untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkat masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Jika PRB diletakkan sebagai prioritas dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah, maka segala bentuk perencanaan pasti sudah meminimalisir risikonya. Katakanlah dalam sebuah perencanaan pembangunan selalu didahului dengan analisis dampak lingkungan (Amdal). Kenyataan selama ini, banyak Amdal yang dihasilkan tetapi tetap saja menuai risiko bencana. Itu berarti Amdal belum menempatkan PRB sebagai prioritas. Cukup banyak regulasi yang tertuang dalam UU maupun PP dan kini diperkuat lagi dengan UU PB No 24/2007 sebagai rujukan hukum dalam perencanaan pembangunan yang mengurangi faktor-faktor penyebab resiko.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkat masyarakat, agar respon yang dilakukan lebih efektif. Dalam perencanaan-perencanaan pembangunan yang bersifat fisik atau infrastruktur, perlu juga diperkuat dengan perencanaan pembangunan yang bersifat non fisik seperti program-program peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun kesiapan menghadapi bencana. Program-program jenis ini, kebanyakan dilakukan oleh NGO atau LSM sedangkan Pemerintah lebih cenderung menyiapkan dana untuk *emergency respond* dan rehabilitasi.

Karena itu, semua pihak baik level pemerintahan masyarakat terkecil di desa sampai pada level pemerintahan di tingkat daerah maupun kalangan LSM dan swasta lainnya harus menempatkan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam semua aspek perencanaan program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, upaya-upaya preventif atau pencegahan lebih penting daripada upaya rehabilitasi.

Kerangka manajemen pengurangan resiko bencana dalam konteks ekonomi dan perencanaan wilayah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias juga diharapkan dapat mengurangi kerentanan bencana dari proyek-proyek investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia kepada para investor. Langkah-langkah utama yang segera dipersiapkan adalah:

1. Perencanaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar memasukkan perencanaan pengurangan resiko bencana dalam program dan anggaran. Konsep PRB ini selaras dengan Program Pengembangan Kecamatan (*Kecamatan Development Program*) dan program berbasis komunitas lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Membangun mekanisme koordinasi, dengan membentuk Badan Koordinasi Gabungan, khususnya di antara Pemerintah di wilayah Samudera Hindia, untuk mengurangi resiko terjadinya bencana besar selanjutnya seperti gempa bumi dan tsunami. Badan Koordinasi Gabungan yang dimaksud untuk mengantisipasi bencana alam di masa depan yakni, suatu badan koordinasi yang melingkupi seluruh kabupaten sepanjang pantai barat Sumatera mulai dari Pulau Weh di Provinsi NAD hingga Pulau Panaitan di Provinsi Banten. Sehingga pembelajaran dari Kepulauan Nias maupun Simeulue dapat dipelajari oleh yang lain juga. Kawasan tersebut juga perlu dikembangkan potensi perekonomiannya, dengan demikian kawasan tersebut tidak tergantung lagi dengan daratan Sumatera.
3. Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur unit penanganan darurat dan pelaksanaannya, termasuk proses evakuasi dan penanganan terhadap korban secara darurat.
4. Menjelang Keberlanjutan Program Pembangunan pasca Tahun 2009, perlu dimantapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah [RAD] tentang Pengurangan Resiko Bencana [PRB] untuk

Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Karena hal ini akan sejalan dengan semangat pengarusutamaan manajemen mitigasi bencana yang telah dimulai dengan pembuatan Rencana Aksi Nasional [RAN] – PRB oleh Bappenas dan Bakornas PB pada tahun 2006 lalu yang telah menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2006.

Berdasarkan prioritas Penanganan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana, sebagaimana telah diatur kebijakan dan strategi nasional yang menjadi sasaran pembangunan Tahun 2008 untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, kiranya penting untuk menjadi pengarusutamaan pada Tahun 2009, kebijakan dan strategi tersebut diarahkan kepada dua sasaran utama :

1. Meningkatnya kinerja pemerintah dan lembaga pendukung dalam penanganan pascabencana, baik pada tahap tanggap darurat bencana maupun pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, diantaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar daerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan resiko bencana.

Meski tindakan lanjut dengan peraturan pemerintah terkesan lamban bagi daerah untuk menerapkannya sesuai konteks daerah masing-masing, lahirnya UU No. 24/2007 adalah hal positif. Dengan adanya UU No. 24/2007 telah membawa perubahan paradigma dalam kaitan dengan penanggulangan bencana. Setidaknya ada tiga hal yang merujuk pada perubahan paradigma tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan dalam Pengurangan Risiko Bencana, yaitu:

1. Penanggulangan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko dan dipadukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan dan program pembangunan. Aspek tanggap darurat hanyalah sebuah program penanggulangan pasca bencana. Lebih baik mencegah atau mengurangi daripada merehabilitir yang telah rusak.
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan wujud dari perlindungan hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban Pemerintah.
3. Penanggulangan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Kepada Pemerintah Daerah baik di Aceh maupun di Kepulauan Nias, semestinya serius menindaklanjutinya dengan membuat sejenis rencana aksi daerah dan yang paling penting mengintegrasikan perspektif bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. Artinya, pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas daerah.



Dok: Sekretariat P3B Bappenas, Okt 2008

Bab V

Penutup

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bagian terakhir dari laporan ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias untuk tahun 2008. Untuk sub bagian kesimpulan laporan ini akan diklasifikasikan ke dalam lima bidang pemulihan yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial dan kemasyarakatan serta kelembagaan dan hukum. Namun, sebelum dielaborasi pada masing-masing bidang pemulihan tersebut, terlebih dahulu akan disajikan kesimpulan yang bersifat umum dari hasil pemantauan dan evaluasi ini. Selanjutnya, dari hasil proses pemantauan dan evaluasi akan disampaikan beberapa rekomendasi yang dikelompokkan ke dalam beberapa isu strategis. Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi ini maka kiranya dapat menjadi masukan kebijakan dan langkah strategis lainnya untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias selanjutnya.

V.1 Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias untuk periode tahun 2008, terdapat beberapa kesimpulan umum yang meliputi semua aspek evaluasi. Berikut ini disajikan beberapa kesimpulan umum, sebagai berikut;

1. Rencana Induk merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, namun dalam proses pelaksanaan terjadi berbagai dinamika di lapangan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan Rencana Induk.
2. Dasar perubahan Rencana Induk ini dilandasi pada beberapa pertimbangan, yaitu; 1) hasil rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 yang disusun pada bulan Juni-Juli 2007, 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009 yang disusun pada bulan Juli-Oktober 2007; 3) Review BPKP terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009 yang dilaksanakan pada bulan November-Desember 2007. Atas dasar beberapa aspek itu Bappenas menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut dengan melakukan proses konsultasi di pusat dan daerah untuk menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk
3. Perpres Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah NAD dan Kepulauan Nias diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2008. Perpres tersebut dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan dan proses pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias di tahun 2008 dan perencanaan untuk tahun 2009 dalam penuntasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias.
4. Penerbitan Perpres 47/2008 bertujuan untuk memantapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan landasan hukum bagi para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu BRR untuk masa 2005-2008 serta untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tahun 2009. Substansi perubahan Rencana Induk yang didasarkan kepada Perpres 47 Tahun 2008 meliputi batang tubuh yang terdiri dari lampiran I tentang

kebijakan dan strategi serta lampiran II tentang sasaran program/kegiatan untuk 5 bidang pemulihan yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial kemasyarakatan, kelembagaan dan hukum).

5. Selain perubahan kebijakan dan strategi akibat Perubahan Rencana Induk tersebut, terjadi pula perubahan pada aspek kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bila merujuk kepada Rencana Induk dalam Perpres No. 30 Tahun 2005 maka kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp. 48,7 triliun. namun setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres No. 47 Tahun 2008 maka kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meningkat menjadi Rp. 64 triliun.
6. Terdapat beberapa faktor meningkatnya kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu terjadinya peningkatan investasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti di sektor perumahan, sektor perekonomian dan sektor lainnya. Faktor lainnya yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan pendanaan yaitu faktor inflasi yang mengakibatkan *unit cost* menjadi membengkak.
7. Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, telah dialokasikan anggaran dari APBN pada tahun 2008 dengan total sebesar Rp. 10,8 trilyun yang merupakan kombinasi dari dua skema Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni DIPA Murni Rp. 7 trilyun dan DIPA Luncuran Rp3,8 trilyun. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 6,57 trilyun, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 482,16 milyar, Hibah sebesar Rp. 3,2 trilyun, dan Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp. 633,77 milyar. DIPA Luncuran itu merupakan sisa anggaran sebelumnya yang tidak terserap yang dimanfaatkan untuk tahun selanjutnya. Alokasi anggaran untuk BRR NAD-Nias ini dimasukkan ke dalam Bagian Anggaran (BA) 094.
8. Di dalam koordinasi penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias terdapat beberapa forum koordinasi dengan menggunakan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda, antara lain; Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias (Coordination Forum for Aceh and Nias/CFAN), Pertemuan Pemangku-kepentingan Kepulauan Nias (Nias Islands Stakeholder Meeting, NISM), Tim Terpadu, Sekretariat Bersama (Sekber) dan regionalisasi.
9. Dana APBN untuk tahun anggaran 2008 untuk BRR tersedia sebesar Rp10.888.322.764.000,- yang terdiri dari DIPAMurni 2008 Rp7.000.401.140.000,- dan DIPA Luncuran sebesar Rp3.887.921.624.000,-. Total realisasi belanja per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp7.625.820.619.607,- atau mencapai 70,04%, sedangkan total realisasi pada 31 Oktober 2008 hanya mencapai 47%. Ini berarti terjadi peningkatan kapasitas penyerapan pendanaan yang sangat tinggi hingga mencapai sekitar 30%.
10. Untuk pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009 maka dipersiapkan kerangka regulasi yang mengatur tahapan-tahapan dalam penyelesaian mandat institusi tersebut. Setelah BRR berakhir, maka tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
11. Pada tahun 2009, kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi selain diteruskan oleh Pemerintah Daerah, juga dilanjutkan oleh 6 Kementerian/Lembaga terkait yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Agama, dan Badan Pertanahan Nasional.
12. Hal yang terpenting dan strategis menjelang BRR berakhir yaitu permasalahan serah terima aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelum BRR NAD-Nias berakhir pada tahun 2009 seluruh aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi diserahterimakan kepada Kementerian/Lembaga, Pemda, masyarakat penerima manfaat atau pihak lain melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Peristiwa bencana gempa dan tsunami yang sangat dahsyat di wilayah NAD dan Kepulauan Nias telah memberikan inspirasi bagi Pemerintah terkait penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk penanganan pasca bencana di NAD dan Kepulauan Nias maka telah disusun kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias yang selanjutnya diubah menjadi Perpres No. 47 Tahun 2008. Sedangkan secara nasional, sudah diterbitkan beberapa kebijakan yang penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia.

V.1.1 Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Pembangunan perumahan yang dilakukan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tugas dari beberapa stakeholders sebagai pelaku proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu BRR NAD - Nias, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah sendiri. Peran para stakeholders cukup baik dalam rangka pemulihan kembali perumahan dan permukiman pasca gempa dan tsunami. Pembagian peran antar pelaksana pada beberapa wilayah/lokasi juga berjalan dengan cukup baik serta dapat menciptakan mekanisme yang bersifat saling melengkapi.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NAD, untuk bidang perumahan dan permukiman yang mempunyai fokus pada penataan lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana dasar, melengkapi perencanaan yang disusun oleh BRR NAD - Nias.
3. Aspek konsistensi antar dokumen perencanaan (target dalam Peraturan Presiden no. 47 tahun 2008) dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh BRR NAD-Nias di bidang perumahan bisa dikatakan dapat terlaksana dengan baik, sebagian besar pelaksanaan program/kegiatannya mengacu dan sesuai dengan Revisi Rencana Induk. Walau demikian tidak dapat disangkal ada sedikit sisa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai dikerjakan dan menjadi pekerjaan lanjutan di tahun 2009.
4. Bila dilihat pada sub bidang perumahan dan permukiman, seluruh sasaran dapat terealisasi dengan maksimal. Terdapat sebanyak 3792 unit rumah pada pekerjaan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2009, yang merupakan penambahan karena adanya program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) yang dicanangkan oleh BRR ditahun 2008; serta penambahan 2 unit untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan di NAD dan Nias.
5. Program/kegiatan pada sub bidang tata ruang telah dapat terealisasi 100%, baik untuk Rencana Pengembangan Desa (Village Planning) maupun Penyusunan Pedoman Perencanaan Desa. Dalam hal pengaturan tentang penataan ruang yang menjadi bagian penting untuk membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami, juga telah selesai dilakukan penyusunan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk Provinsi NAD dan untuk 15 kab/kota.
6. Kurang baiknya konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh BRR, terjadi pada sub bidang pertanahan. Sub bidang ini masih mempunyai sisa pengerjaan di tahun 2009 pada kegiatan adjudikasi pembangunan fisik kadastral dan pembuatan sertifikat pengganti untuk 12 kabupaten/kota sebanyak 9.822 sertifikat. Seluruh kegiatan yang bersisa akan dikerjakan melalui Pelaksanaan Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS), yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan BRR serta didanai oleh Multi Donor Trust Fund (MDTF).
7. Permasalahan yang masih timbul khusus dalam bidang perumahan, mengindikasikan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan antar *stakeholders* terkait belum berjalan dengan baik. Koordinasi perencanaan di beberapa wilayah kabupaten/kota menunjukkan gambaran koordinasi dan keterlibatan Pemda yang sangat terbatas.

8. Pada beberapa kasus dan hasil wawancara didapat informasi bahwa BRR dan Donor/NGO tidak semua dan tidak selalu menginformasikan kegiatan apa yang akan dikerjakan, dan juga laporan hasil kegiatannya kepada Pemda setempat, sehingga tidak dapat diketahui secara detail proses pelaksanaan terhadap program yang berlangsung.
9. Untuk pembangunan prasarana dasar perumahan dan permukiman, walaupun seluruh pelaksanaannya dapat direalisasikan dengan baik, tetapi ada beberapa fasilitas yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan. Dari hasil kunjungan lapangan dapat diketahui bahwa masalah kurangnya koordinasi sering terjadi pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BRR dan Donor/NGO.
10. Tahun 2008 BRR merencanakan Aceh tanpa barak dan huntara, ternyata sayangnya masih ada juga masyarakat yang menempati barak maupun huntara. Kasus barak dan huntara ini bisa ditemui di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Keterangan dari Kepala Bappeda Kota Banda Aceh sampai Oktober 2008 masih terdapat warga Kota/pengungsi yang tinggal di barak-barak di Kota Banda Aceh. Posisi barak tersebut berada di 4 lokasi termasuk di Kecamatan Meuraxa. Letak barak pengungsi ini tidak jauh dari pelabuhan feri Ulee Lheue dan Fasilitas Wisata Kuliner yang hampir selesai pembangunannya.
11. Penerapan pemberdayaan masyarakat (*community based*) dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang berkaitan erat dengan aspek konsultasi (partisipasi masyarakat), belum cukup memadai, pelaksanaannya pun masih sangat terbatas. Tidak banyak pembangunan perumahan yang dikerjakan dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat. Beberapa yang efektif misalnya, hanya terealisasi pada program REKOMPAK (kerjasama Departemen PU dengan BRR yang dibiayai oleh Multi Donor Fund); dan program shelter dengan filosofi dasar *people process*, yang difasilitasi oleh UN – Habitat sebagai *implementing partner* UNDP Banda Aceh.

V.1.2 Bidang Infrastruktur

1. Dokumen perencanaan bidang infrastruktur, baik yang dimiliki oleh BRR NAD-Nias (Renstra), Pemda (RPJMD), dan Donor/NGO secara garis besar telah mengacu pada Revisi Rencana Induk yang tercantum dalam Perpre 47/2008.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur mengacu kepada perencanaan dalam revisi rencana induk. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang energi dan listrik, pos dan telematika, dan bangunan fasilitas umum sudah selesai, sedangkan pada sub bidang jalan dan jembatan, perhubungan, sumber daya air rata-rata belum terealisasi 100 persen. Berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan diantaranya adalah lambatnya pembebasan tanah/lahan, lokasi pembangunan berada di area hutan lindung, kontraktor yang kurang kompeten, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai, dan lain sebagainya
3. Peran BRR dan Donor/NGO dalam rehabilitasi/rekonstruksi bangunan fisik yang rusak akibat bencana tsunami dan gempa, dan biasanya berskala besar, sedangkan Pemda berkontribusi melalui APBD berupa dukungan pembebasan lahan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi skala kecil, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
4. Terdapat pembagian tugas dan peran diantara *stakeholders* dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang jalan dan jembatan, perhubungan, dan sumber daya air. Terdapat instansi lain yang turut mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang energi dan kelistrikan, pos dan telematika, serta bangunan fasilitas umum yaitu PLN, Telkom, Pertamina, Dep. Kominform, dan Dep. ESDM. Hal yang tidak dapat dihindari yaitu adanya tumpang tindih dalam pemilihan lokasi, namun hal ini dapat diatasi dengan salah satu pihak segera mengganti lokasi pembangunan.

5. Salah satu contoh pembagian tugas yang terjalin dengan sangat baik, yaitu pada rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di Provinsi NAD ditangani oleh beberapa *stakeholders* antara lain BRR (melalui proyek IRFF-MDF), bantuan dari ADB, USAID, IDB, JICS, JBIC dan melalui dana APBN/APBD NAD dengan pembagian ruas jalan yang berbeda-beda
6. Berdasarkan LAKIP BRR tahun 2008, diketahui bahwa kinerja (*outcome*) hasil rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur diantaranya adalah aksestelepon selular sudah merata di setiap kabupaten/kota di Provinsi NAD mencakup ± 35 % rumah tangga, 97 % rumah tangga telah mendapat listrik, dan pengaman pantai telah direhabilitasi sepanjang 36 km, 21 tanggul air telah dibangun. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (sampel) diketahui bahwa kebutuhan air bersih sangat diperlukan masyarakat namun saat ini justru terabaikan dan pengelolaan sampah daur ulang dapat menjadi mata pencaharian warga di Aceh Besar
7. Koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur melibatkan Kementerian/Lembaga (terutama BRR, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan), Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga Donor/NGO, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya (PT PLN, Pertamina, Telkom, dan lain sebagainya).
8. Setelah 3 (tiga) tahun berjalan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang infrastruktur mengalami kemajuan, walaupun memang belum optimal. Forum Sekber adalah salah satu forum penyelesaian permasalahan teknis dan non teknis bidang infrastruktur yang cukup efektif. Kendala dalam koordinasi yaitu kurang intensifnya dalam sharing progress kegiatan baik yang dilakukan BRR maupun Donor/NGO, serta mekanisme koordinasi antara BRR dengan *partner agency* (Bank Dunia).
9. Partisipasi masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur masih terbatas, yaitu:
 - Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat berupa pengajuan usulan/proposal kebutuhan masyarakat (biasanya berupa pembangunan jalan perdesaa, drainase, dan proyek-proyek tingkat desa) kepada Kepala Desa atau melalui Musrenbang
 - Pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat masih terbatas karena pengetahuan masyarakat terhadap detail teknis pembangunan sangat minim, oleh karena itu masyarakat biasanya terlibat sebagai tenaga kerja lokal (buruh, satpam, dan lain sebagainya) untuk konstruksi dibawah koordinasi kontraktor, misalnya pada pembangunan jalan dan jembatan, perhubungan, sumber daya air, dan bangunan publik.
 - Dalam pengawasan, masyarakat pun kurang mengetahui detail teknis dan kualitas hasil rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga tidak dilibatkan dalam tim pengawas. Oleh karena itu biasanya masyarakat hanya menyampaikan keluhan-keluhan mengenai hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang dianggap buruk/kurang berkualitas (misalnya jalanan yang berkubang, bangunan yang tidak selesai, dan lain sebagainya)
10. Media partisipasi masyarakat untuk bidang infrastruktur belum diatur secara khusus, masyarakat menyampaikan keluhan terhadap hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Sekretariat Bersama, Dinas Kimpraswil, dan Dinas Perhubungan.
11. Pada tahun 2008, terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan BRR di bidang infrastruktur, yang terlihat dari meningkatnya efektifitas kinerja dengan adanya regionalisasi BRR dan adanya peningkatan jumlah satker dalam kelompok bidang infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan dimana awalnya sebanyak 25 satker kemudian meningkat menjadi 28 satker.
12. Pihak yang terlibat dalam penanganan bidang infrastruktur pada tingkat Pemerintah Daerah adalah Bappeda sebagai koordinator perencanaan, sedangkan yang menangani infrastruktur secara sektoral adalah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (tingkat provinsi) atau Dinas Kimpraswil (Kabupaten/Kota) dan Dinas Perhubungan. Kendala yang ada yaitu kualitas dan kuantitas SDM Dinas kurang memadai, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM agar

dapat melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR terutama dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan terhadap asset-aset dan pennggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

13. Salah satu contoh Donor/NGO yang memiliki komitmen dalam pembangunan jalan lintas barat NAD, yaitu USAID memiliki kapasitas kelembagaan dan SDM yang memadai. USAID melibatkan 1) konsultan asing/perusahaan yang berpusat di AS yaitu Parsons Global Services Inc, yang bertanggung jawab pada menajamen desain dan konstruksi jalan; 2) *Ssangyong Engineering and Construction Co. Ltd.* dari Korea Selatan, dan 3) P.T. Utama Karya. Kontraktor-kontraktor tersebut banyak memperkerjakan masyarakat lokal sebagai buruh, security, dan lain sebagainya dalam pembangunan jalan dan drainase. Parsons pun turut terlibat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan konstruksi dan manajemen proyek.
14. Dinas Kimpraswil dan Dinas Perhubungan siap melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekostruksi yang menjadi kewenangan daerah pasca berakhirnya BRR, namun mereka belum menyiapkan sistem dan mekanisme khusus, karena belum ada kepastian pembentukan badan koordinasi/kesinambungan baru setelah BRR berakhir. Secara bertahap transfer asset dan *knowledge* telah dilakukan oleh Pemda melalui kegiatan reguler dan peningkatan kapasitas Pemda oleh BRR/Donor/NGO kepada Pemda setempat
15. Kesiapan Dinas dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi terkendala pada manajemen dan biaya *operations and maintenance* aset-aset rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur yang membutuhkan biaya yang cukup besar, karena anggaran APBD sangat terbatas. Pemda mengharapkan adanya bantuan dari APBN maupun Donor/NGO (MDF, ADB, USAID, JICS, IDB, dan lain sebagainya), terutama pada sub bidang jalan dan jembatan, perhubungan (pelabuhan laut, pelabuhan ferry, bandara dan airstrip, terminal, kapal dan fasilitas LLAJ), pos dan telematika, sumberdaya air (jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai), dan bangunan fasilitas umum.

V.1.3 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

1. Pada aspek konsistensi perencanaan sub bidang pemulihan pendidikan di institusi BRR menunjukkan lebih banyak fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana fisik di hampir keseluruhan sektor ini. Agak berbeda pada perencanaan Donor/NGO yang lebih fokus sarana dan prasarana pembangunan sektor pendidikan yang mendesak saja.
2. Pada aspek konsistensi sub bidang pemulihan kesehatan pada dokumen perencanaan BRR lebih kepada fokus pembangunan fisik. Sedangkan pada perencanaan Donor/NGO menunjukkan bahwa fokusnya tidak hanya pembangunan fisik tapi juga non fisik.
3. Secara umum, pada beberapa sub bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan terdapat pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan ada juga yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan. Pada kegiatan yang tidak sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan maka akan memunculkan kegiatan-kegiatan lanjutan yang dilaksanakan untuk tahap selanjutnya.
4. Berdasarkan pembagian peran dan tugas dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan di NAD dan Kepulauan Nias yang paling dominan peranannya adalah BRR dan kalangan Donor/NGO. Sedangkan peranan Pemda lebih banyak pendukung pada kegiatan yang dilakukan oleh stakeholders lainnya.
5. Bila dilihat dari hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, peranan Donor/NGO dalam bidang sosial dan kemasyarakatan lebih banyak terfokus pada sub bidang pendidikan dan kesehatan, seperti yang banyak dilakukan oleh pihak KfW dan GTZ Jerman serta AusAID. Peran lembaga ini cukup signifikan dalam memulihkan berbagai sarana dan prasarana fisik,

perlengkapan dan peralatan, pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sub bidang pendidikan dan kesehatan.

6. Terdapat beragam pendekatan dalam melakukan proses koordinasi perencanaan untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Ada pendekatan koordinasi perencanaan yang dilakukan melalui usulan program/kegiatan dari dinas terkait kepada BRR. Ada pula koordinasi perencanaan melalui pengiriman personel dari dinas terkait kepada BRR untuk bisa membantu penyusunan perencanaan. Dan ada pula pendekatan koordinasi perencanaan melalui Sekretariat Bersama (Sekber). Dengan berbagai pola pendekatan dalam pelaksanaan koordinasi, maka ini dapat terwujud kondisi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. Selain itu, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara satu program/kegiatan dengan lainnya.
7. Untuk koordinasi pelaksanaan pada bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan pada umumnya menunjukkan adanya koordinasi pelaksanaan antar berbagai stakeholders terkait di wilayah sampel. Terdapat beberapa pola koordinasi pelaksanaan yaitu melalui pola kerja sama personel, keikutsertaan dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan mengikutsertakan. Walaupun demikian, masih terdapat tidak adanya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan karena tidak dilibatkan dalam Sekretariat Bersama.
8. Pada bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, sub bidang pemulihan yang paling banyak terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yaitu pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Terdapat berbagai pola pendekatan dalam pelaksanaan di lapangan seperti adanya pembagian peran dan tanggung jawab pada pelaksanaan program/kegiatan, dan sinkronisasi lokasi dan jenis kegiatan sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan di lapangan.
9. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan, secara umum menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang tinggi. Hanya saja secara kuantitatif belum dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret seberapa besar tingkat partisipasi tersebut. Namun demikian, masih juga terdapat tingkat partisipasi yang rendah di wilayah tertentu untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan karena berbagai situasi yang terjadi di wilayah tersebut.
10. Media partisipasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, hanya terdiri dari beberapa media saja. Penggunaan media dan akses informasi untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat sangatlah penting untuk memperoleh umpan balik sehingga dapat meningkatkan kualitas program/kegiatan.
11. Gambaran kapasitas dari aspek pendanaan untuk bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada tiga sub bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan peran perempuan menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup dari alokasi pendanaan yang disediakan untuk tiga sektor ini. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan pencapaian pada tiga sub bidang tersebut mulai tahun 2005-2008 mencapai 71,66 persen. Konkretnya, alokasi yang disediakan sebesar 3,812 T rupiah, sedangkan penyerapannya mencapai 2,732 T rupiah.
12. Dari hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemulihan sosial dan kemasyarakatan, khususnya pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sudah banyak yang dibangun seperti Rumah Sakit dan sekolah dengan fasilitas yang sangat lengkap dan mewah. Untuk keberlanjutan aset-aset tersebut maka diperlukan dukungan dari aspek pendanaan maupun Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan dan pemeliharaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, aset-aset yang sudah dibangun agar dapat dipergunakan dan difungsionalisasikan secara maksimal.

V.1.4 Bidang Perekonomian

1. Dokumen perencanaan bidang pemulihan pertanian, perdagangan dan perindustrian, perikanan, serta ketenaga kerjaan, baik yang disusun BRR, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO, pada dasarnya tetap konsisten pada Perpres 47 tahun 2008 tentang Revisi Rencana Induk.
2. Pada umumnya, perencanaan strategis BRR lebih terfokus pada bantuan sarana prasarana, dan belum membangun dalam artian pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Demikian pula dengan perencanaan lembaga donor/NGO yang lebih memperhatikan bantuan sarana prasarana, walaupun ada sedikit perhatian pada bantuan modal. Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pemasaran diisikan melalui perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah (RPJMD).
3. Perkoperasian, dalam Rencana Induk dikembangkan dengan kemampuan kewirausahaan yang menghimpun usaha individu yang kecil, agar mampu bersaing dengan usaha menengah dan besar, namun dalam pelaksanaannya, program pengembangan koperasi masih terbatas pada pemberian subsidi dan pelatihan dan belum ada upaya pemantapan dan pengembangan usaha koperasi yang sistematis.
4. Salah satu forum yang dipergunakan untuk melakukan koordinasi perencanaan untuk bidang pemulihan perekonomian dengan lembaga donor yaitu Community Forum for Aceh Nias (CFAN). Di dalam forum tersebut isu perekonomian merupakan salah satu agenda utama. Hasilnya antara lain yang penting adalah rekomendasi tentang perlunya pemantapan fondasi perekonomian jangka panjang yaitu mengimplementasikan project prioritas utama guna membangun fondasi perekonomian dalam rangka *better future economy*; serta mendesain dan mengimplementasikan *exit strategy* untuk *handover* program-program kepada pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kapasitasnya. Strategy dalam *better future economy* yaitu: menghilangkan hambatan seperti pungutan liar, gangguan keamanan, birokrasi dan aturan yang kurang mendukung; percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara; pelatihan sumber daya manusia; serta peningkatan dan mempermudah akses terhadap permodalan.
5. Di lain pihak, koordinasi antara Bapel BRR dengan Pemda NAD dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah lebih baik daripada tahun 2007, meskipun laporan reguler dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi antara Bapel BRR, Dinas maupun Bappeda masih terbatas. Hal yang mencolok adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapel dengan Pemda Kabupaten Nias Selatan, yang mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan daerah dalam pemulihan pasca bencana. Koordinasi dalam pelaksanaan ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam kegiatan atau pendanaan.
6. Konsultasi di bidang pemulihan perekonomian sangat kurang antara stakeholders yang terkait. Sebagai akibatnya muncul beberapa masalah yaitu masyarakat tidak mengembalikan pinjaman kredit, ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengembalikan dana pinjaman, dan sulit memonitor masyarakat yang mendapat dana pinjaman.
7. Pada tahun 2007, beberapa kabupaten/kota, BRR dan Donor/NGO lebih banyak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan 50 % lebih banyak dari keterlibatan ditahun lalu. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat dalam membangun jaringan irigasi pertanian yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia), mulai dari pemilihan lokasi sampai dengan pembangunan, serta pengawasan. Jika terdapat penyelewengan masyarakat dapat melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
8. Media yang dimanfaatkan dalam pelibatan masyarakat antara lain, Sekretariat Bersama antara Bapel BRR dengan pemda provinsi dan Kab/kota sebagai wadah penyatuan visi dan misi secara bersama termasuk penyelesaian masalah pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi di lapangan, pengumuman dan media "Serambi Indonesia" serta media center Pemda untuk memberikan akses informasi dan komunikasi tentang proses pembangunan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan proposal pembangunan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum diserahkan kepada BRR distrik, dan dirapatkan dalam forum Sekber bersama-sama antara BRR, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO.

9. Satker BRR secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas isu dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh, BRR (Singkil) melibatkan beberapa orang Pemda sebagai tim teknis dalam sekretariat bersama. Dengan adanya keterlibatan beberapa aparat SKPD terkait bermanfaat untuk menghindari adanya overlapping atau tumpang tindih terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penerima manfaat (Beneficiaries).
10. Kapasitas SDM Pemerintah daerah terutama di tingkat Kabupaten menjadi tidak memadai, akibat diperbantukan ke Satker BRR. Hal ini dikarenakan SDM diperbantukan tersebut adalah SDM yang berpengalaman dengan jumlah yang terbatas. Diperlukan pelatihan Sumber Daya Manusia guna menggantikan/ regenerasi pegawai Pemda. Secara khusus, pemda memiliki mekanisme dan tata kerja sendiri dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila permasalahan muncul, pemda dapat berkoordinasi dengan dinas terkait yang dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan dan dicari solusi bersama.
11. Perlunya perhatian dan tindakan nyata atas Potensi perikanan di Kab.Nias Selatan yg sangat besar terutama di Pulau-pulau Batu. Hal ini perlu diperhatikan karena selama ini banyak pencurian ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yang merusak. Potensi pariwisata juga perlu dikembangkan.
12. Perlunya dikembangkan potensi produk lokal khususnya karet, kelapa dan kakao di Kab.Nias Selatan. Seharusnya pengembangan ekonomi juga perlu diperhatikan misalnya dengan pembukaan lahan karet baru yang sangat luas. Ini sebagai proyek percontohan. Dalam 5 tahun sudah akan memberikan hasil yang pasti kepada masyarakat. Pembukaan lahan karet disertai pelibatan partisipasi masyarakat. Ini sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar dapat dihasilkan karet kualitas terbaik.

V.1.5 Bidang Kelembagaan dan Hukum

1. Dokumen perencanaan bidang kelembagaan dan hukum, baik yang dimiliki oleh BRR NAD-Nias (Renstra), Pemda (RPJMD), dan Donor/NGO di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias secara garis besar telah mengacu pada Revisi Rencana Induk yang tercantum dalam Perpres 47/2008.
2. Dalam penyusunan perencanaan dan penataan kelembagaan dibidang kelembagaan dan hukum belum berjalan dengan baik di seluruh kab/kota di Provinsi NAD, seperti halnya di kab.Aceh Jaya, kab.Aceh Jaya sejak mulai dibentuknya pada awal tahun 2000 hingga akhir tahun 2008 belum memiliki badan ini karena belum dinilai penting keberadaannya. Karena saat ini kabupaten Aceh Jaya masih fokus dalam pengembangan di bidang ekonomi dan infrastruktur. Hal ini berbeda dengan Kepulauan Nias yang telah membentuk badan/ dinas untuk menata masalah kelembagaan dan hukum di daerah.
3. Konsistensi antar pelaksana berjalan dengan baik, seperti antar lembaga donor, World Bank mendukung kegiatan pengelolaan keuangan public serta memperkuat lembaga anti korupsi. MDF melaksanakan kegiatan penguatan organisasi masyarakat sipil; penguatan system administrasi serta mengikut sertakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kapasitasnya dengan metoda yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat local. Sedangkan Ausaid melalui program AIPRD menerapkan model penyediaan layanan satu pintu untuk merampingkan penyediaan layanan public di pemerintahan kecamatan; menyediakan pelatihan khusus bagi petugas pemerintahan daerah mengenai kepemimpinan, perencanaan, pembuatan anggaran, penyelesaian konflik dan transparansi.

4. Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tahun 2008 yang belum berjalan dengan baik terutama dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam hal pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum tentang pertanahan terdapat hambatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena terlalu lambat dalam menerbitkan regulasi yang terkait dengan masalah tersebut. Sehingga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah mengalami keterlambatan dalam penyelesaian masalah ini.
5. Belum maksimalnya peran sekber ditingkat kab/kota, seperti di Aceh Besar, Sekretariat Bersama berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dengan semua sektor SKPD selanjutnya Sekber berkoordinasi dengan BRR pusat untuk menyaring program-program prioritas di Kabupaten Aceh Besar. Misalnya usulan kegiatan dari Pemda sebanyak 100 namun yang diterima hanya 3 untuk tahun ini karena pembangunan proyek-proyek besar (pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya). Sehingga kegiatan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang kelembagaan daerah harus di support oleh lembaga donor/NGO.
6. Masyarakat sangat menyambut positif dengan adanya pelatihan bersama lembaga pemerintahan, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh warga, seperti partisipasi dari masyarakat dilakukan melalui beberapa pelatihan, pertemuan masyarakat/pemuda dengan Satpol PP, serta dalam suatu forum untuk melakukan konsultasi dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat serta siaga terhadap bencana. Demikian juga kerjasama dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah mengawasi keperluan di barak.
7. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan, adalah melalui: (1) pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan, (2) kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan dan peralatan lainnya.
8. Sedangkan untuk melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah, yaitu melalui: (a) penataan, penyediaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, (b) menata sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan), (3) menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.

V.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD Dan Kepulauan Nias untuk tahun 2008, maka dirumuskan beberapa point rekomendasi yang dijadikan sebagai masukan dan arahan kebijakan bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya. Secara umum, rekomendasi-rekomendasi tersebut dijelaskan sebagai berikut;

V.2.1 Penyusunan Kebijakan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahun 2009

1. Dalam rangka pelaksanaan keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias untuk tahun 2009, hendaknya perlu dilakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan kesinambungan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR yang dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.
2. Proses perencanaan program/kegiatan dan penganggaran untuk kesinambungan rekonstruksi hendaknya dapat dimasukkan ke dalam dan dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 sehingga mempunyai kekuatan kebijakan program/kegiatan yang lebih kuat dan formal. Disamping itu, dengan memasukkan ke dalam perencanaan tahunan pemerintah

akan lebih mudah untuk dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.

3. Selain itu, diharapkan pula kepada Donor/NGO untuk tetap melanjutkan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Keterlibatan kalangan Donor/NGO dalam kontels ini disesuaikan dengan visi dan misi pada masing-masing institusi tersebut. Dengan demikian, peran dari berbagai institusi Donor/NGO ini dapat menjadi komplementer dan pendukung terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui pengalokasian pendanaan APBN.
4. Di dalam pelaksanaan keberlanjutan dan kesinambungan pada tahun 2009 supaya tetap mengacu kepada kerangka kebijakan dan basis perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dengan mengacu kepada Rencana Induk yang sudah mengalami penyesuaian pasca kegiatan Evaluasi Paruh Waktu rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2005-2007 yang merupakan dasar untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Induk.
5. Pelaksanaan kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 yang akan dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut merupakan bagian dari kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BRR sebelumnya. Untuk itu, supaya bisa dirumuskan dan disusun perencanaan program dan kegiatan yang masih belum tuntas dan selesai hingga akhir tahun 2008 untuk dapat dilanjutkan untuk tahun 2009.
6. Untuk menyusun kebijakan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi hendaknya Badan Pelaksana BRR dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi secara lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah yang akan melanjutkan program dan kegiatan. Hal ini terkait proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR dalam kurun waktu tahun 2005-2008.

V.2.2 Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Pengakhiran Masa Tugas BRR

7. Untuk menghadapi pengakhiran masa tugas dan mandat BRR NAD-Nias pada tahun 2009 supaya dapat disusun dan dirancang kerangka kebijakan secara khusus. Kerangka kebijakan yang disusun ini dapat memberikan pedoman yang jelas untuk menghantarkan pembubaran BRR yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang ada.
8. Dalam penyusunan kerangka kebijakan pengakhiran masa tugas BRR hendaknya dapat disusun berbagai langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang lebih konkret sehingga dapat dijadikan landasan dalam exit strategy bagi BRR dalam melakukan pembubaran kelembagaan tersebut. Langkah dan tahapan pembubaran BRR ini menjadi pedoman bagi penyelesaian dan menuju kepada proses peralihan kepada stakeholders terkait lainnya.
9. Di dalam penyusunan kebijakan pengakhiran masa tugas BRR hendaknya dapat dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak baik di pusat maupun daerah sehingga dapat diperoleh masukan dan saran yang lebih komprehensif sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. Untuk itu, sangat diharapkan berbagai komunikasi dan dialog dengan kalangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias serta Donor/NGO yang akan masih melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahap selanjutnya.
10. Hal terpenting dalam penyusunan kerangka kebijakan pengakhiran masa tugas BRR yaitu proses transisi dan peralihan Aset, Program, Pendanaan, Personel dan Dokumen (AP3D) dari institusi BRR kepada berbagai stakeholders terkait yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota serta masyarakat penerima manfaat. Untuk mendukung proses transisi dan peralihan AP3D ini mengacu kepada beberapa regulasi

yang sudah ada dan yang masih perlu disusun untuk memberikan landasan sistem dan mekanisme tersebut.

11. Terkait aset-aset yang sudah dibangun pada rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR perlu kiranya melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi sebelum dilakukan proses serah terima kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kerangka regulai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sangat terkait dengan penganggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut
12. Pasca BRR NAD-Nias selesai masa baktinya, maka perlunya koordinasi antara Pemda (Dinas) dengan apapun lembaga baru nantinya sehingga rekonstruksi NAD-Nias dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat

V.2.3 Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga menghadapi Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BRR

13. Pasca berakhirnya BRR pada April 2009, perlu kiranya dipersiapkan kapasitas Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga untuk dapat mempunyai kapasitas yang memadai dan baik untuk melanjutkan kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dikerjakan oleh BRR sebelumnya. Kesiapan kapasitas tersebut sangat diperlukan untuk dapat meneruskan berbagai program/kegiatan bidang pemulihan yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial dan kemasyarakatan serta kelembagaan dan hukum.
14. Pemerintah Daerah sudah harus mempersiapkan diri secara lebih matang dari berbagai aspek baik dari aspek Sumber Daya Manusia, aspek kelembagaan maupun aspek pendanaan. Hal ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak dini sebelum jauh-jauh hari BRR akan bubar nanti. Karena bagaimana pun dan apa pun kondisinya, maka Pemerintah Daerah yang akan melanjutkan proses pembangunan secara reguler nantinya. Selain itu, Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dan pelaksana utama pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu kapasitas yang penting dipersiapkan yaitu dari aspek pendanaan melalui APBD masing-masing Pemerintah Daerah sehingga dapat menjalankan program/kegiatan lanjutan serta pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Pihak Kementerian/Lembaga terkait yang akan melanjutkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahap selanjutnya pada tahun 2009 perlu juga mempersiapkan kapasitas yang memadai untuk dapat melanjutkan program dan kegiatan yang merupakan limpahan dari BRR sebelumnya karena diperkirakan hingga BRR berakhir masih banyak program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai dan masih perlu dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
16. Terkait serah terima aset hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dibangun pada masa BRR, maka bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi NAD, Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di NAD dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias sangat diperlukan penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia, kelembagaan dan pendanaan untuk dapat mendukung pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut sehingga dapat difungsionalisasikan secara maksimal. Diharapkan sekali berbagai aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dibangun selama masa BRR dapat dioptimalisasi dan dimaksimalisasi pemanfaatannya. Karena sebagaimana diketahui bahwa investasi yang dipergunkana untuk program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat besar.

V.2.4 Implementasi Rencana Induk yang Sudah Mengalami Perubahan

1. Setelah dilakukan Perubahan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut dengan kerangka regulasi Perpres No. 47 Tahun 2008 yang didasarkan kepada hasil Evaluasi Paruh Waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005-2007, maka Perubahan Rencana Induk itu dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi pelaksanaan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh berbagai stakeholders terkait yaitu Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO.
2. Masa berlakunya Rencana Induk yang sudah mengalami perubahan ini berlangsung hingga akhir tahun 2009, namun demikian bila terjadi penyesuaian terhadap sasaran dan target dalam pelaksanaan maka Bappenas supaya dapat melakukan proses penyesuaian dan perubahan sasaran dan target dalam perencanaan tersebut. Kemungkinan ini bisa saja terjadi tergantung kepada situasi dan kondisi pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan konsolidasi secara terus menerus dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO.
3. Untuk melihat implementasi Rencana Induk yang sudah diperbaharui, maka perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini untuk dapat melihat sejauhmana akseptabilitas terhadap kebijakan Perubahan Rencana Induk berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2008. Sama halnya pemantauan dan pengendalian yang dilakukan terhadap Perpres No. 30 Tahun 2005 yang merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias.

V.2.5 Pembelajaran dari Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias

1. Untuk mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut sangat diperlukan koordinasi melalui Sekretariat Bersama yang mempertemukan berbagai stakeholders terkait. Keberadaan sekretariat semacam ini sangat membantu dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi mengenai berbagai perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
2. Keberadaan trust fund yang diorganisasikan melalui wadah tertentu seperti Multi Donor Fund (MDF) for Aceh and Nias yang menghimpun 15 donor baik yang bersifat bilateral maupun multilateral sangat membantu dalam melakukan koordinasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hanya saja masih perlu diupayakan peningkatan koordinasi dan konsolidasi untuk mencapai visi dan misi MDF dalam mengemban pemulihan wilayah pascabencana di NAD dan Kepulauan Nias melalui program rekonstruksi.
3. Pembagian peran dan tugas dari masing-masing stakeholders terkait baik dari BRR, Donor/NGO maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pemulihan pascabencana yang difokuskan pada sektor-sektor tertentu seperti sektor perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perikanan dan kelautan serta sektor-sektor lainnya akan mempercepat dan memperlancar proses rekonstruksi. Namun yang sangat penting untuk diperhatikan mengenai konsolidasi dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih program dan kegiatan baik pada lokasi yang sama atau objek kegiatan yang sama pula.
4. Pelibatan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam proses pemulihan pascabencana di NAD dan Kepulauan Nias sangat diperlukan dan dibutuhkan sejak dini dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pengalaman penanganan pemulihan wilayah dan masyarakat pada masa BRR menunjukkan minimnya keterlibatan stakeholders

tersebut. Seharusnya peranan Pemda dalam proses ini sangat strategis dalam rangka menghadapi berakhirnya masa tugas BRR. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kerangka regulasi pembentukan BRR bahwa pasca berakhirnya institusi tersebut maka tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya dilimpahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Pemerintah Daerah Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

5. Peristiwa bencana gempa dan tsunami di NAD dan Kepulauan Nias telah memberikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk dapat menyusun kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana secara lebih sistematis dan terencana. Untuk itu, diperlukan berbagai kerangka kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung ke arah tersebut.

V.2.6 Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Donor/NGO dan Masyarakat dalam Rangka Penuntasan dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

A. Peran Pemerintah Pusat

1. Bappenas perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BRR dalam rangka menghadapi transisi dan persiapan pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009.
2. Bappenas perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias untuk melaksanakan kegiatan kesinambungan rekonstruksi sesuai dengan program dan kegiatan yang masih dilanjutkan.
3. Bagi Kementerian/Lembaga terkait yang akan melanjutkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 yang merupakan kelanjutan dari BRR sebelumnya untuk dapat memasukkan ke dalam perencanaan masing-masing institusi tersebut. Selain itu, perlu pula dipersiapkan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan kelanjutan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
4. Bagi BRR untuk dapat mempersiapkan langkah-langkah peralihan aset, program, pendanaan, personel dan dokumen sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan, Kementerian/Lembaga terkait lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Donor/NGO dan masyarakat penerima manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Pada level nasional Pemerintah Pusat perlu merumsukan dan menyusun berbagai kerangka kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana yang diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan. Hal ini belajar dari pengalaman peristiwa bencana gempa dan tsunami yang sangat dahsyat di wilayah Samudra Hindia. Peristiwa bencana ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak untuk melakukan berbagai kebijakan untuk penanganan dan penanggulangan bencana.

B. Peran Pemerintah Daerah

1. Pada tahun 2009 merupakan masa transisi menjelang berakhirnya masa tugas dan mandat BRR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pemulihan pascabencana di NAD dan Kepulauan Nias. Untuk itu, Pemerintah Daerah sudah selayaknya mempersiapkan diri secara lebih matang lagi dari berbagai aspek baik dari sisi pendanaan, Sumber Daya Manusia, maupun kelembagaan di level provinsi dan kabupaten/kota.
2. Dengan berakhirnya BRR pada tahun 2009, Pemerintah Daerah sudah harus pula mempersiapkan alokasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat mendukung

kelanjutan proses pemulihan di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias melalui berbagai program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sudah banyak dihasilkan aset-aset yang harus tetap difungsionalisasikan dan dioptimalisasi. Untuk mendukung ke arah tersebut, maka sangat dibutuhkan dukungan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan berbagai aset itu.
4. Keberlanjutan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada bidang kelembagaan dan hukum terutama pemerintahan hendaknya lebih dikonsentrasikan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah provinsi, kab/kota dibandingkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas fisik. Seperti peningkatan kapasitas kemampuan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan produk hukum dan pengelolaan proyek adalah hal-hal yang perlu diperkuat agar investasi besar yang telah ditanamkan selama tiga tahun oleh BRR dan mitra kerja rekonstruksinya dapat dimanfaatkan secara efektif dan dipelihara sehingga tetap memberikan manfaat untuk jangka waktu yang panjang.
5. Untuk penanganan, pengurangan dan penanggulangan bencana di daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan hal-hal tersebut ke dalam kebijakan pembangunan daerah melalui rencana pembangunan jangka menengah serta rencana tata ruang dan wilayah.

C. Peran Donor/NGO

1. Bagi Donor/NGO yang masih melanjutkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 hendaknya dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terkait lanjutan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kalangan Donor/NGO, hendaknya dapat mengisi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tertangani dan terlaksananya program dan kegiatan pada masa tugas BRR melaksanakan mandatnya di NAD dan Kepulauan Nias. Beberapa kesenjangan program dan kegiatan yang terjadi pada berbagai sektor pemulihan, antara lain, sektor infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perekonomian, dan sektor kelembagaan pemerintahan daerah.
3. Pada masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah banyak dihasilkan berbagai aset-aset rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan Donor/NGO. Untuk itu, supaya dapat difungsionalisasikan dan dioptimalisasikan secara maksimal aset-aset tersebut maka perlu dilakukan serah terima berbagai aset dimaksud kepada BRR untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, Pemerintah Daerah kabupaten/kota di NAD dan Kepulauan Nias.
4. Dengan berakhirnya BRR, pihak Donor/NGO hendaknya tetap melakukan koordinasi pelaksanaan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pihak Bappeda dan Bappenas yang merupakan penanggung jawab pembangunan di tingkat daerah dan pusat. Selain itu, kedua institusi tersebut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

D. Peran Masyarakat

1. Peranan masyarakat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat urgen untuk melakukan pengawalan di lapangan sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang sudah ditentukan. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias supaya dapat terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholders terkait.

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka sangat diperlukan aspirasi dan gagasan yang disampaikan kepada masing-masing pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Berbagai media dan akses informasi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat sehingga dapat mempermudah penyampaian informasi tersebut.
3. Masyarakat penerima manfaat hendaknya juga dapat memaksimalkan hasil-hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dibangun sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak yang besar pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana di NAD dan Kepulauan Nias.

Daftar Pustaka

A. Pemerintah Pusat

1. Salinan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada BRR NAD-Nias
2. Paparan Konsepsi Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara (PP Nomor: 6 Tahun 2008)
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
4. Perkim Katalog Book –BRR NAD-Nias
5. Paparan Asst Management, Serah Terima Aset –Pemda Pidie (21 Oktober 2008)
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/326/M.PAN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)
7. Surat Departemen Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Banda Aceh Nomor S-01/MK.06/WKN.1/2008 tanggal 25 Agustus 2008 perihal penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN) pada BRR NAD-Nias kepada Departemen Keuangan RI
8. Surat Departemen Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Kantor Wilayah I Banda Aceh Nomor S-03/MK.06/WKN.1/2008 tanggal 24 September 2008 perihal persetujuan hibah BMN pada BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Kabupaten Nias -Provinsi Sumatera Utara
9. Surat Departemen Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Kantor Wilayah I Banda Aceh Nomor S-04/MK.06/WKN.1/2008 tanggal 24 September 2008 perihal persetujuan hibah BMN pada BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Bahan paparan Information Management BRR 2008
11. Buku Panduan konstruksi
12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2006, Bappeda Kabupaten Aceh Besar
13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007, Bappeda Kabupaten Aceh Besar
14. Berita Acara Serah terima Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah I PPK Jalan Kabupaten Aceh Besar dan Satker BRR-Pengembangan Kawasan Percontohan NAD PPK Jalan Aceh Besar (Hard Copy)
15. Tsunami Indonesia, It Takes Time to Recover, December 2006 – After 2 Years, BRR
16. APBK Perubahan Tahun 2007 (Qanun No.9 Tahun 2007 Kab.Aceh Jaya).
17. Tiga Tahun Pasca Tsunami, Memberikan Manfaat, Mempersiapkan Transisi : Laporan Perkembangan IV – BRR, Desember 2007

B. Pemerintah Daerah

18. Laporan Konsolidasi Kegiatan Per Satuan Kerja, Dana APBN Dekonsentrasi dan Pembantuan Provinsi, Program Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis –Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura –Tahun Anggaran 2007
19. Rekap Laporan Per Unit Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NAD Triwulan II –Keadaan Bulan September Tahun 2008
20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007, Bappeda Kabupaten Aceh Besar
21. APBD Kabupaten Aceh Besar tahun 2007, Bappeda Kabupaten Aceh Besar
22. APBD Kabupaten Aceh Besar tahun 2008, Bappeda Kabupaten Aceh Besar
23. RPJMD Kabupaten Aceh Besar Buku I, Bappeda Kabupaten Aceh Besar
24. RPJMD Kabupaten Aceh Besar Buku II Bappeda Kabupaten Aceh Besar
25. RTRW Kabupaten Aceh Besar Bappeda Kabupaten Aceh Besar
26. Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Aceh Besar Tahun 2007 Bappeda Kabupaten Aceh Besar
27. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Penanganan Bencana Tahun 2007 , Dinas Kesbanglinmas Kabupaten Aceh Besar
28. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Per Kegiatan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2008 Status September 2008 (Hard Copy)
29. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Per Kegiatan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007 (Hard Copy)
30. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kantor Perhubungan Tahun Anggaran 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Perhubungan Tahun Anggaran 2008 , Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar
32. Daftar Perkembangan Madrasah Tingkat MI, MTs, dan MA Negeri/Swasta di Lingkungan Kantor departemen Agama Kabupaten Aceh Besar tahun 2005-2007, Kantor Departemen Agama Aceh Besar
33. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II, II Tahun Anggaran 2008, Kantor Departemen Agama Aceh Besar
34. Rincian Perhitungan Biaya per kegiatan tahun Anggaran 2008/RKAKL Kantor Departemen Agama Aceh Besar
35. Rincian Perhitungan Biaya per kegiatan tahun Anggaran 2007/RKAKL, Kantor Departemen Agama Aceh Besar
36. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBN Dinas Bina MArga dan Cipta Karya Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 Status September 2008 (Hard Copy)
37. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Bina MArga dan Cipta Karya Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 Status September 2008

38. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Bina MArga dan Cipta Karya Provinsi NAD Tahun Anggaran 2007
39. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBN Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsi NAD Tahun Anggaran 2007
40. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA APBN Tahun Anggaran 2008 Status September 2008 , Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NAD
41. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DIPA APBA Tahun Anggaran 2008 Status September 2008
42. Daftar Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desember 2007, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NAD
43. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari Dana APBA Triwulan III Tahun Anggaran 2008 untuk KABUPATEN Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NAD
44. Realisasi APBD dan APBN Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi NAD Tahun 2006, 2007, dan 2008
45. Laporan Kemajuan Pembangunan Rumah oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Aceh Pasca Tsunami per Juli 2008, , PMI Prov. NAD
46. Dokumen Rekapitulasi terhadap seluruh program/ kegiatan serta realisasi fisik dan keuangan di bidang kesehatan, yang dilaksanakan oleh BRR, Donor/NGO mulai tahun 2005-2008 yang terdaftar di dinas kesehatan Kab.Aceh Besar.
47. APBK Perubahan Tahun 2007 (Qanun No.9 Tahun 2007 Kab.Aceh Jaya).
48. APBK Tahun 2008 (Qanun No.4 Tahun 2008 Kab.Aceh Jaya).
49. RPJMD Tahun 2007-2012 (Buku I) Kab.Aceh Jaya (Peraturan Bupati No.57.a Tahun 2007)
50. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kab.Aceh Jaya (Buku II, laporan Rencana)
51. Laporan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kab.Aceh Jaya tahun 2007. (Bappeda Aceh Jaya).
52. Realisasi Anggaran APBK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007.
53. Realisasi Anggaran APBK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 .
54. Realisasi Anggaran DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 .
55. Realisasi Anggaran OTSUS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 .
56. Realisasi Anggaran APBK Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008.
57. Realisasi Fisik APBK Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008
58. Usulan Anggaran APBK Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009
59. Realisasi Fisik dan Keuangan dari APBK Dinas Kimpraswil Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008
60. Realisasi APBK Dinas Perhubungan Tahun 2008 (30 Okt 2008)

61. Usulan Dinas Perhubungan Tahun 2009 (1 dan 2)
62. Laporan Penyerapan Anggaran dari APBK Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007.
63. Laporan Penyerapan Anggaran dari APBK Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008.
64. Usulan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 (PPAS).
65. Kumpulan Laporan Dinas Perkebunan dan Kehutana Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari: Pedahuluan (gambaran geografis Perkebunan dan kehutanan Aceh Jaya), Rencana Strategis, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2007, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2008
66. Usulan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 (Rekapitulasi Permohonan Kelompok Tani)
67. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh
68. APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007
69. APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008
70. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2007
71. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2008
72. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Banda Aceh

C. DONOR/NGO

73. Building Blocks for Sustainable Recovery –Second Annual Report of the Aceh/Nias Emergency Response and Transitional Recovery (ERTR) Programme 2005-2006
74. United Nations Development Programme in Indonesia Partner in Human Development
75. The Third Annual Report of the UNDP Aceh/Nias Emergency Response and Transitional Recovery (ERTR) Programme 2007-2008
76. CD ANSSP Guidelines
77. Buku Panduan konstruksi
78. Buku Anchoring Homes feat film “playing between elephants
79. Laporan : The Tsunami Operation of IFRC in NAD Province and Nias Island
80. Livelihood Programme Report 2007, Rebuilding Lives and Livelihoods of Tsunami Affected Communities by British Red Cross
81. Tsunami Three years Progress Report, IFRC
82. Kenali ICRC
83. Tabloid Rumoh PMI Tempat Untuk Berbagi, edisi September 2008
84. Paparan Indonesian Red Cross NAD, Who We Are & What We Do, PMI Prov. NAD

85. Laporan Kemajuan Pembangunan Rumah oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Aceh Pasca Tsunami per Juli 2008, , PMI Prov. NAD
86. Indonesia : Satu Tahun Tsunami, Harapan dan Kenyataan, , PMI Prov. NAD
87. Program dan kegiatan Project ADB Loan 1770-IND (SF) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya
88. Profile Lembaga Multi Donor Fund : Bersama Membangun
89. Tiga Tahun Pasca Tsunami, Memberikan Manfaat, Mempersiapkan Transisi : Laporan Perkembangan IV - Desember 2007
90. In-Depth Progress Report (as of March 31, 2008) Multi Donor Fund for Aceh and Nias
91. Three Years After the Tsunami, Delivering Results, Supporting Transition : Progress Report IV Desember 2007, MDF



Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian
Penangan Bencana (P3B)

Bappenas

2008